



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029**





BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi tahapan, tata cara, sistematika, substansi dan sebagai upaya menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional; dan
- b. tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan Daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan Daerah.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 5

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Daerah
 - c. Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
 - d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - e. Bab V : Penutup
- (2) Isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau sampai dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 AGUSTUS 2025

BUPATI MOJOKERTO,



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 179-6/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Sebagai salah satu instrumen manajemen pembangunan daerah, keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arahan umum pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih baik.

Kabupaten Mojokerto mempunyai nilai sejarah yang tinggi karena merupakan pusat ibukota Kerajaan Majapahit. Atas dasar hal tersebut, diharapkan Kabupaten Mojokerto mengulang kembali kejayaan seperti Kerajaan Majapahit untuk menjadi Kabupaten yang tumbuh menjadi tulang punggung pronominal daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, Pasal 263 mengatur bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Adapun RPJMD disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. Selain sebagai pedoman sebagaimana yang dimaksud, RPJMD sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dalam upaya menjadikan dokumen perencanaan yang berkualitas, materi muatan dalam bagian batang tubuh Peraturan Daerah ini beserta penjelasan dan lampirannya yang memuat materi RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 3

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan 1

1.2. Dasar Hukum 5

1.3. Hubungan Antar Dokumen 9

1.4. Maksud Dan Tujuan..... 20

1.5. Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 20

BAB II 22

GAMBARAN UMUM DAERAH 22

2.1 GAMBARAN KONDISI DAERAH 22

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi..... 22

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 75

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah 120

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum 151

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 359

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 397

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah..... 397

2.3.2 Isu Strategis..... 405

BAB III 440

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... 440

3.1.1 Visi dan Misi 440

3.1.2 Tujuan dan Sasaran 452

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 455

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan..... 456

3.2.2 Program Prioritas Daerah 492

BAB IV..... 516

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 516

4.1 Program perangkat Daerah..... 516

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... 617

BAB V..... 643

PENUTUP..... 643

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto.....	- 23 -
Tabel 2. 2	Cakupan Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Mojokerto	- 24 -
Tabel 2. 3	Luas Lahan Berdasarkan Letak Ketinggian	- 25 -
Tabel 2. 4	Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto.....	- 26 -
Tabel 2. 5	Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto	- 27 -
Tabel 2.6	Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto	- 27 -
Tabel 2. 7	Persentase dan Nilai PDRB Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto	- 30 -
Tabel 2. 8	Penggunaan Lahan	- 32 -
Tabel 2. 9	Status D3TLH Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	- 44 -
Tabel 2. 10	Proyeksi Status D3TLH Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2029.....	- 46 -
Tabel 2. 11	Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Kabupaten Mojokerto	- 48 -
Tabel 2. 12	Proyeksi Status D3TLH Air Kabupaten Mojokerto Tahun 2029	- 49 -
Tabel 2. 13	Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Kabupaten Mojokerto	- 51 -
Tabel 2. 14	Proyeksi Status D3TLH Lahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2029.....	- 52 -
Tabel 2. 15	Banyaknya Tenaga Listrik yang Disalurkan, Jumlah Pelanggan dan Nilai Produksi Per Bulan di Kabupaten Mojokerto, 2024.....	- 54 -
Tabel 2. 16	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 54 -
Tabel 2. 17	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 55 -
Tabel 2. 18	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten Mojokerto (Persen), 2020-2024	- 55 -
Tabel 2. 19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024	- 55 -
Tabel 2. 20	Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024.....	- 58 -
Tabel 2. 21	Presentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Tahun 2020-2024.....	- 58 -
Tabel 2. 22	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman.....	- 59 -
Tabel 2. 23	Proporsi Rumah Tangga yang melakukan Pengelolaan Sampah.....	- 60 -
Tabel 2. 24	Tingkat Bahaya pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten	- 64 -
Tabel 2. 25	Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto	- 66 -
Tabel 2. 26	Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mojokerto.....	- 66 -
Tabel 2. 27	Penurunan emisi GRK Kumulatif.....	- 68 -
Tabel 2. 28	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.....	- 68 -
Tabel 2. 29	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin.....	- 69 -
Tabel 2. 30	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024-2028.-	70 -
Tabel 2. 31	Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2024 ...-	70 -
Tabel 2. 32	Penduduk Menurut Agama yang dianut Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	- 71 -
Tabel 2. 33	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, 2024.....	- 74 -
Tabel 2. 34	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2020-2024	- 76 -
Tabel 2. 35	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024	- 77 -
Tabel 2. 36	Distribusi Persentase Produk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 78 -
Tabel 2. 37	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024	- 81 -
Tabel 2. 38	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah).....	- 84 -
Tabel 2. 39	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto, Tahun 2020-2024.....	- 86 -
Tabel 2. 40	Realisasi Indeks Gini Kabupaten Mojokerto	- 87 -
Tabel 2. 41	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia Tahun 2020-2024 (000 Jiwa)	- 90 -
Tabel 2. 42	Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 91 -
Tabel 2. 43	Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024	- 92 -
Tabel 2. 44	Nilai Tukar Petani Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	- 98 -

Tabel 2. 45	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Jawa Timur	- 99 -
Tabel 2. 46	Angka Literasi/Numerasi Tahun 2024.....	- 106 -
Tabel 2. 47	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024	- 108 -
Tabel 2. 48	Tingkat Kegemaran Membaca	- 109 -
Tabel 2. 49	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	- 111 -
Tabel 2. 50	Cakupan Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024	- 112 -
Tabel 2. 51	Indeks Kesalehan Sosial kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 113 -
Tabel 2. 52	Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	- 114 -
Tabel 2. 53	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023	- 115 -
Tabel 2. 54	Indeks Pembangunan Gender	- 117 -
Tabel 2. 55	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mojokerto	- 118 -
Tabel 2. 56	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mojokerto.....	- 119 -
Tabel 2. 57	Komposisi Penduduk (Jiwa) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	- 121 -
Tabel 2. 58	Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	- 122 -
Tabel 2. 59	Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2019-2023	- 123 -
Tabel 2. 60	Status Pekerjaan Utama 2021-2023	- 124 -
Tabel 2. 61	Jumlah Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Mojokerto, 2021-2024.....	- 125 -
Tabel 2. 62	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2021-2024	- 126 -
Tabel 2. 63	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mojokerto	- 127 -
Tabel 2. 64	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	- 129 -
Tabel 2. 65	Proporsi PDRB Akomodasi makan dan minum	- 129 -
Tabel 2. 66	Indeks Inovasi Daerah.....	- 134 -
Tabel 2. 67	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Mojokerto, 2020–2024	- 135 -
Tabel 2. 68	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 136 -
Tabel 2. 69	Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 137 -
Tabel 2. 70	Jumlah Investasi PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024	- 138 -
Tabel 2. 71	Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 139 -
Tabel 2. 72	Indeks Masyarakat Digital.....	- 141 -
Tabel 2. 73	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	- 142 -
Tabel 2. 74	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 143 -
Tabel 2. 75	Indeks Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024	- 144 -
Tabel 2. 76	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Mojokerto	- 145 -
Tabel 2. 77	Indeks Desa Membangun Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 146 -
Tabel 2. 78	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	- 147 -
Tabel 2. 79	Indeks Akses Keuangan Daerah	- 151 -
Tabel 2. 80	IRB dan IPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 152 -
Tabel 2. 81	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- 152 -
Tabel 2. 82	Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Mojokerto	- 153 -
Tabel 2. 83	Capaian IPKD Kabupaten Mojokerto	- 154 -
Tabel 2. 84	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	- 155 -
Tabel 2. 85	Capaian Rencana Aksi HAM di Kabupaten Mojokerto	- 155 -
Tabel 2. 86	Indikator Kinerja IDSD Tahun 2022-2024.....	- 156 -
Tabel 2. 87	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 158 -
Tabel 2. 88	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 159 -
Tabel 2. 89	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024.....	- 160 -
Tabel 2. 90	Literasi dan Numerasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 162 -
Tabel 2. 91	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto	- 162 -
Tabel 2. 92	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2024	- 164 -
Tabel 2. 93	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024.....	- 165 -
Tabel 2. 94	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.....	- 166 -
Tabel 2. 95	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024	- 168 -
Tabel 2. 96	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 178 -
Tabel 2. 97	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.....	- 183 -
Tabel 2. 98	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024	- 185 -
Tabel 2. 99	Capaian Indikator Angka Morbiditas RSUD Basoeni	- 187 -

Tabel 2. 100	Capaian Angka Morbiditas RSUD Prof DR Soekandar	188 -
Tabel 2. 101	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	190 -
Tabel 2. 102	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum.....	193 -
Tabel 2. 103	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	194 -
Tabel 2. 104	Status dan Panjang Jalan	195 -
Tabel 2. 105	Jenis, Jumlah dan Panjang Jembatan.....	195 -
Tabel 2. 106	Jumlah Daerah Irigasi Teknis, Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi	196 -
Tabel 2. 107	Kondisi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik, Sedang, Rusak	197 -
Tabel 2. 108	- 198 -	
Tabel 2. 109	Persentase Kemantapan Jalan Kondisi Baik Tahun 2023-2024.....	198 -
Tabel 2. 110	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.....	199 -
Tabel 2. 111	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	199 -
Tabel 2. 112	Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat	200 -
Tabel 2. 113	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Tahun 2020-2024.....	202 -
Tabel 2. 114	Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	203 -
Tabel 2. 115	Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban	206 -
Tabel 2. 116	Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	207 -
Tabel 2. 117	- 207 -	
Tabel 2. 118	Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	209 -
Tabel 2. 119	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2020-2024.....	211 -
Tabel 2. 120	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	212 -
Tabel 2. 121	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	213 -
Tabel 2. 122	Jumlah Kepemilikan Akte Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	214 -
Tabel 2. 123	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024	217 -
Tabel 2. 124	Indikator Kincera Kunci Urusan Tenaga Kerja	220 -
Tabel 2. 125	Penanganan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Mojokerto	221 -
Tabel 2. 126	Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A Tahun 2019-2024.....	221 -
Tabel 2. 127	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	224 -
Tabel 2. 128	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak ...	225 -
Tabel 2. 129	Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024....	227 -
Tabel 2. 130	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan	228 -
Tabel 2. 131	Proporsi Ketersediaan Kalori Per Kapita berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024 (%)	228 -
Tabel 2. 132	Proporsi ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan	229 -
Tabel 2. 133	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.....	230 -
Tabel 2. 134	Angka Kecukupan Energi Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024	232 -
Tabel 2. 135	Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2024.....	233 -
Tabel 2. 136	Volume Sampah TPA Karang Diyeng.....	238 -
Tabel 2. 137	Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2022-2024.....	240 -
Tabel 2. 138	Inventarisasi Sungai Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	240 -
Tabel 2. 139	Inventarisasi Danau/Embung/Situ/Waduk Kabupaten Mojokerto	243 -
Tabel 2. 140	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto ..	243 -
Tabel 2. 141	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Kabupaten Mojokerto	244 -
Tabel 2. 142	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Mojokerto	245 -
Tabel 2. 143	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto	245 -
Tabel 2. 144	Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mojokerto	246 -
Tabel 2. 145	Kualitas Udara Ambien Di Kabupaten Mojokerto 2024	247 -
Tabel 2. 146	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 -	247 -
Tabel 2. 147	Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup.....	249 -
Tabel 2. 148	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut Kecamatan.....	250 -

Tabel 2. 149	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto	252 -
Tabel 2. 150	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	253 -
Tabel 2. 151	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk	254 -
Tabel 2. 152	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ...	256 -
Tabel 2. 153	Laju Pertumbuhan Penduduk	256 -
Tabel 2. 154	Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto	257 -
Tabel 2. 155	Keaktifan anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	258 -
Tabel 2. 156	Cakupan Perkawinan pertama penduduk Wanita Usia di bawah 20 Tahun	259 -
Tabel 2. 157	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	261 -
Tabel 2. 158	PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	262 -
Tabel 2. 159	Pencapaian Peserta KB Aktif Menggunakan MKEJ.....	263 -
Tabel 2. 160	Kecamatan Peserta KB Aktif Menggunakan Non MKEJ.....	264 -
Tabel 2. 161	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Mojokerto	265 -
Tabel 2. 162	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan	267 -
Tabel 2. 163	Jumlah Arus Penumpang Per Moda Transportasi Tahun 2024	268 -
Tabel 2. 164	Pendapatan Bidang Perhubungan	268 -
Tabel 2. 165	Jumlah Arus Penumpang Terangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	270 -
Tabel 2. 166	Jumlah Terminal Bis Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	270 -
Tabel 2. 167	Data Perlintasan Sebidang.....	270 -
Tabel 2. 168	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024	271 -
Tabel 2. 169	Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika	273 -
Tabel 2. 170	Jumlah Modal dan Volume Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Mojokerto 2020-2024.....	276 -
Tabel 2. 171	Jumlah Usaha Mikro Kluster Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	277 -
Tabel 2. 172	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro.....	278 -
Tabel 2. 173	Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	279 -
Tabel 2. 174	Data Koperasi Berdasarkan Jumlah Anggotanya	280 -
Tabel 2. 175	Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto	281 -
Tabel 2. 176	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	283 -
Tabel 2. 177	Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal	284 -
Tabel 2. 178	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemuda dan Olahraga	285 -
Tabel 2. 179	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2022-2024.....	286 -
Tabel 2. 180	Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	288 -
Tabel 2. 181	Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024	289 -
Tabel 2. 182	Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik	294 -
Tabel 2. 183	Tingkat Keamanan Informasi	296 -
Tabel 2. 184	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	297 -
Tabel 2. 185	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan.....	298 -
Tabel 2. 186	Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	299 -
Tabel 2. 187	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023.....	300 -
Tabel 2. 188	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Mojokerto	301 -
Tabel 2. 189	Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023	302 -
Tabel 2. 190	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan	302 -
Tabel 2. 191	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024-303 -	
Tabel 2. 192	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.....	303 -
Tabel 2. 193	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	306 -
Tabel 2. 194	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan.....	307 -
Tabel 2. 195	Capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Mojokerto	308 -
Tabel 2. 196	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan	309 -
Tabel 2. 197	Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024.....	310 -
Tabel 2. 198	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	311 -
Tabel 2. 199	Perkembangan Kenaikan Kelas Kelompok Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-	

	2024.....	- 311 -
Tabel 2. 200	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	- 313 -
Tabel 2. 201	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata	- 314 -
Tabel 2. 202	Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam.....	- 315 -
Tabel 2. 203	Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi	- 316 -
Tabel 2. 204	Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Edukasi dan Minat Khusus.....	- 317 -
Tabel 2. 205	Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Sejarah dan Religi	- 317 -
Tabel 2. 206	Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner.....	- 319 -
Tabel 2. 207	Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 - 2024	- 320 -
Tabel 2. 208	Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Palawija	- 321 -
Tabel 2. 209	Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2022–2024	- 322 -
Tabel 2. 210	Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias Tahun 2022 - 2024	- 322 -
Tabel 2. 211	Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah Tahun 2022 - 2024	- 322 -
Tabel 2. 212	Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka	- 323 -
Tabel 2. 213	Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2023 - 2024	- 323 -
Tabel 2. 214	Perkembangan Pelayanan Kesehatan Hewan.....	- 324 -
Tabel 2. 215	Capaian Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024	- 324 -
Tabel 2. 216	Capaian Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024	- 326 -
Tabel 2. 217	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 326 -
Tabel 2. 218	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian	- 327 -
Tabel 2. 219	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	- 328 -
Tabel 2. 220	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan	- 329 -
Tabel 2. 221	Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Komoditi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2024.....	- 329 -
Tabel 2. 222	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024	- 331 -
Tabel 2. 223	Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Bulan	- 332 -
Tabel 2. 224	Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024	- 333 -
Tabel 2. 225	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024.....	- 334 -
Tabel 2. 226	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	- 335 -
Tabel 2. 227	Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian.....	- 336 -
Tabel 2. 228	Capaian Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 202 – 2024	- 337 -
Tabel 2. 229	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020- 2024.....	- 337 -
Tabel 2. 230	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 338 -
Tabel 2. 231	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024.....	- 339 -
Tabel 2. 232	Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2024	- 340 -
Tabel 2. 233	Capaian MCSP KPK Kab. Mojokerto Tahun 2020-2024	- 343 -
Tabel 2. 234	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024.....	- 343 -
Tabel 2. 235	Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2024.....	- 343 -
Tabel 2. 236	Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.....	- 344 -
Tabel 2. 237	Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Tahun 2023	- 345 -
Tabel 2. 238	Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Mojokerto	- 347 -
Tabel 2. 239		- 348 -
Tabel 2. 240	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024.....	- 349 -
Tabel 2. 241	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan	- 349 -
Tabel 2. 242	Realisasi Pemberian Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024	- 350 -
Tabel 2. 243	Realisasi Eselon PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024.....	- 350 -
Tabel 2. 244	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mojokerto	- 351 -
Tabel 2. 245	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto	- 352 -
Tabel 2. 246	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 357 -
Tabel 2. 247	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 -	- 359 -

Tabel 2. 248	Realisasi APBD Tahun 2020-2024	- 364 -
Tabel 2. 249	Realisasi APBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Periode 2020–2024	- 365 -
Tabel 2. 250	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2024	- 371 -
Tabel 2. 251	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020- 2024.....	- 375 -
Tabel 2. 252	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto	- 377 -
Tabel 2. 253	Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Mojokerto	- 377 -
Tabel 2. 254	Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2024	- 379 -
Tabel 2. 255	Realisasi Neraca Daerah Tahun 2020-2024	- 382 -
Tabel 2. 256	Perkembangan Neraca Daerah Tahun 2020-2024	- 383 -
Tabel 2. 257	Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto	- 388 -
Tabel 2. 258	Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	- 388 -
Tabel 2. 259	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030.....	- 390 -
Tabel 2. 260	Proyeksi APBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Periode 2026–2030	- 391 -
Tabel 2. 261	Perkembangan Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto.....	- 396 -
Tabel 2. 262	Identifikasi Permasalahan Pembangunan.....	- 397 -
Tabel 3. 1	Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029	- 446 -
Tabel 3. 2	Keselarasan Catur Abhipraya Mubarak dengan ASTA CITA - PHTC dan NAWA BHAKTI SATYA	- 449 -
Tabel 3. 3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto	- 453 -
Tabel 3. 4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Mojokerto 2025-2029	- 457 -
Tabel 3. 5	Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2026.....	- 473 -
Tabel 3. 6	Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2027.....	- 476 -
Tabel 3. 7	Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2028.....	- 480 -
Tabel 3. 8	Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2029.....	- 482 -
Tabel 3. 9	Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2030.....	- 483 -
Tabel 3. 10	Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Gerbangkertosusila.....	- 485 -
Tabel 3. 11	Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD .	- 496 -
Tabel 4. 1	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	- 517 -
Tabel 4. 2	Proporsi Anggaran Program Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas Alokasi Belanja Daerah	- 517 -
Tabel 4. 3	Kerangka Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Mojokerto (dalam Rupiah)	- 518 -
Tabel 4. 4	Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025- 2029.....	- 522 -
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah	- 618 -
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Daerah.....	- 619 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Hubungan Antar Dokumen	- 10 -
Gambar 2. 1	Perkembangan Jumlah Curah Hujan (mm) per Bulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 - 29 -	
Gambar 2. 2	Proyeksi timbulan sampah terolah di fasilitas	- 57 -
Gambar 2. 3	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur	- 72 -
Gambar 2. 4	Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan 2024	- 73 -
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Mulai 2020- 2024.....	- 80 -
Gambar 2. 6	PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2022-2024	- 85 -
Gambar 2. 7	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024.....	- 85 -
Gambar 2. 8	Angka Kemiskinan Ekstrem 2021-2024.....	- 93 -
Gambar 2. 9	Perkembangan IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 95 -
Gambar 2. 10	Perkembangan IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024.....	- 96 -
Gambar 2. 11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 97 -
Gambar 2. 12	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 100 -
Gambar 2. 13	Angka Kematian Bayi	- 101 -
Gambar 2. 14	Angka Kematian Ibu.....	- 102 -
Gambar 2. 15	Prevalensi Stunting	- 103 -
Gambar 2. 16	Rata-rata Lama Sekolah	- 104 -
Gambar 2. 17	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 105 -
Gambar 2. 18	iBangga dan Indikator Pembentuk, 2022-2024	- 116 -
Gambar 2. 19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mojokerto	- 130 -
Gambar 2. 20	Net Ekspor Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 143 -
Gambar 2. 21	Laju Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 148 -
Gambar 2. 22	Inflasi Kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	- 149 -
Gambar 2. 23	Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 169 -
Gambar 2. 24	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024	- 170 -
Gambar 2. 25	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 171 -
Gambar 2. 26	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 172 -
Gambar 2. 27	Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 174 -
Gambar 2. 28	Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024	- 175 -
Gambar 2. 29	Prevalensi Stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024	- 176 -
Gambar 2. 30	Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Medis, Paramedis dan lainnya Kabupaten Mojokerto	- 177 -
Gambar 2. 31	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	- 178 -
Gambar 2. 32	Realisasi Kondisi Jalan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024.....	- 190 -
Gambar 2. 33	Angka Kriminalitas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024.....	- 203 -
Gambar 2. 34	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024.....	- 215 -
Gambar 2. 35	Jenis Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	- 216 -
Gambar 2. 36	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	- 223 -
Gambar 2. 37	Proporsi Ketersediaan Kalori Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (%).....	- 228 -
Gambar 2. 38	Proporsi Ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (%).....	- 230 -
Gambar 2. 39	Perbandingan Skor PPH dengan Skor Riil dan Skor Maksimal Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.....	- 231 -
Gambar 2. 40	Angka Kecukupan Energi (AKE) Berdasarkan Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2024 (%).....	- 232 -
Gambar 2. 41	Peta Pelayanan Sampah Kabupaten Mojokerto	- 238 -
Gambar 2. 42	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Tahun 2024.....	- 251 -
Gambar 2. 43	Jumlah Kantor Pos di Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2023.....	- 274 -
Gambar 2. 44	Jumlah Koperasi Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	- 274 -
Gambar 2. 45	Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan.....	- 282 -

Gambar 2. 46	Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024	285 -
Gambar 2. 47	Kegiatan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024	301 -
Gambar 2. 48	Pertumbuhan Pendapatan 2020-2024	372 -
Gambar 2. 49	Pertumbuhan Belanja 2020-2024	376 -
Gambar 2. 50	Pertumbuhan Pembiayaan 2020-2024	380 -
Gambar 2. 51	Pertumbuhan Neraca Tahun 2020-2024	387 -

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan

Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sedang dalam pasal 150 ayat 3 huruf e berbunyi bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 70, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Dilantiknya Muhammad Albarraa dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025, maka Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama DPRD. Penyusunan RPJMD ini juga harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bahwa pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta jangka pendek berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD).

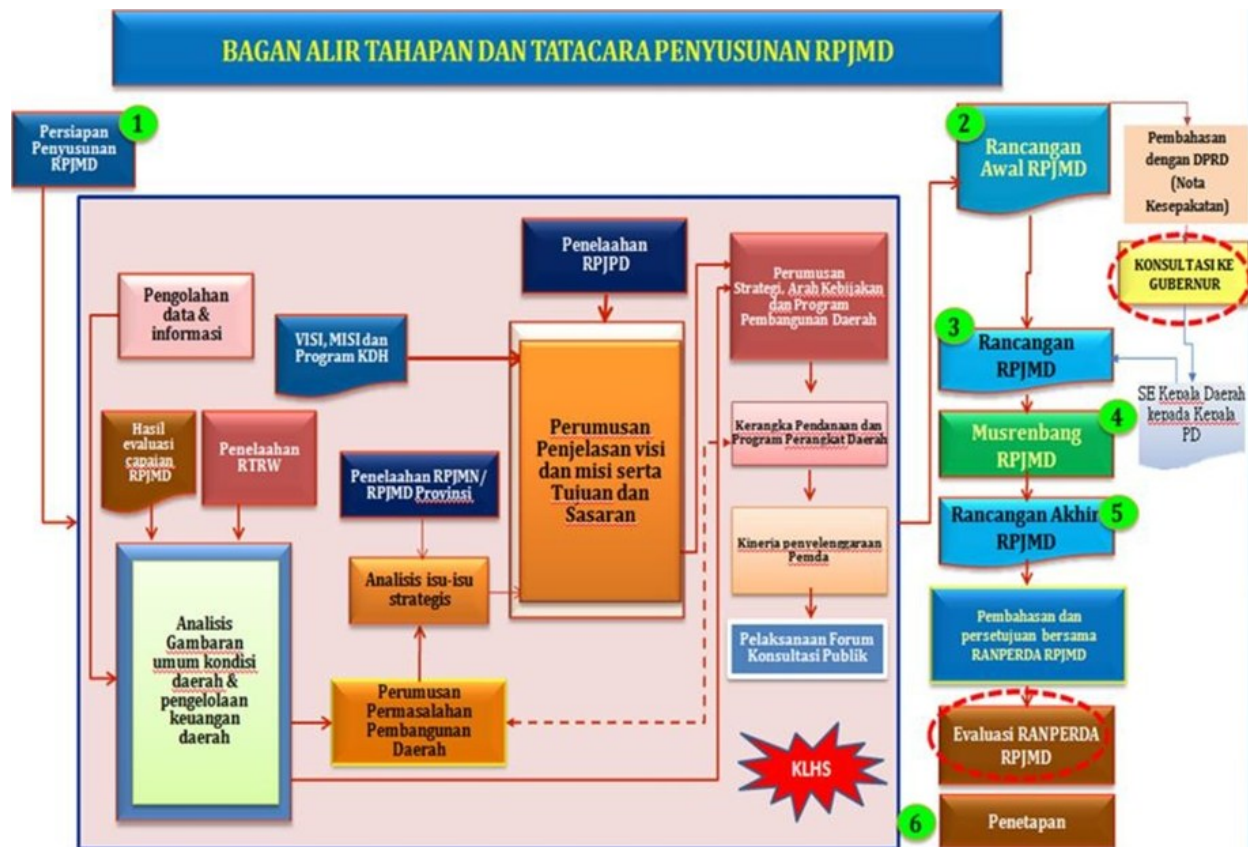
Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berpedoman pada Pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan, meliputi: (i) pendekatan teknokratis, (ii) pendekatan partisipatif, (iii) pendekatan politis, dan (iv) pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top-down planning*.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Adapun RPJMD diterjemahkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk

jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan RKPD diterjemahkan ke dalam Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

Selanjutnya tahapan penyusunan sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut, digambarkan lebih detail dalam gambar berikut :



Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD

Proses penyusunan RPJMD sebagai tahapan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah ini mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD dengan tahapan sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan;
- Penyusunan rancangan awal;
- Penyusunan rancangan;
- Pelaksanaan musrenbang;
- Perumusan rancangan akhir; dan
- Penetapan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah

kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran lima tahun pertama dari Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra dijelaskan sebagai berikut. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Sedangkan RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Renja PD dan KUA-PPAS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 mengamanatkan penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Rancangan Awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyadari pentingnya memastikan bahwa setiap arah kebijakan dan program pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan utama dalam perencanaan ini. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai proses pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*),

serta arahan dalam dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dalam konteks lokal, pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui upaya untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat, menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inklusif. RPJMD ini disusun tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menimbulkan kesenjangan, tidak merusak lingkungan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan iklim, kerentanan sosial, serta dinamika global menjadi bagian integral dari proses perumusan kebijakan dalam dokumen ini.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung agenda pembangunan global sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah agar tetap relevan, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
15. 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

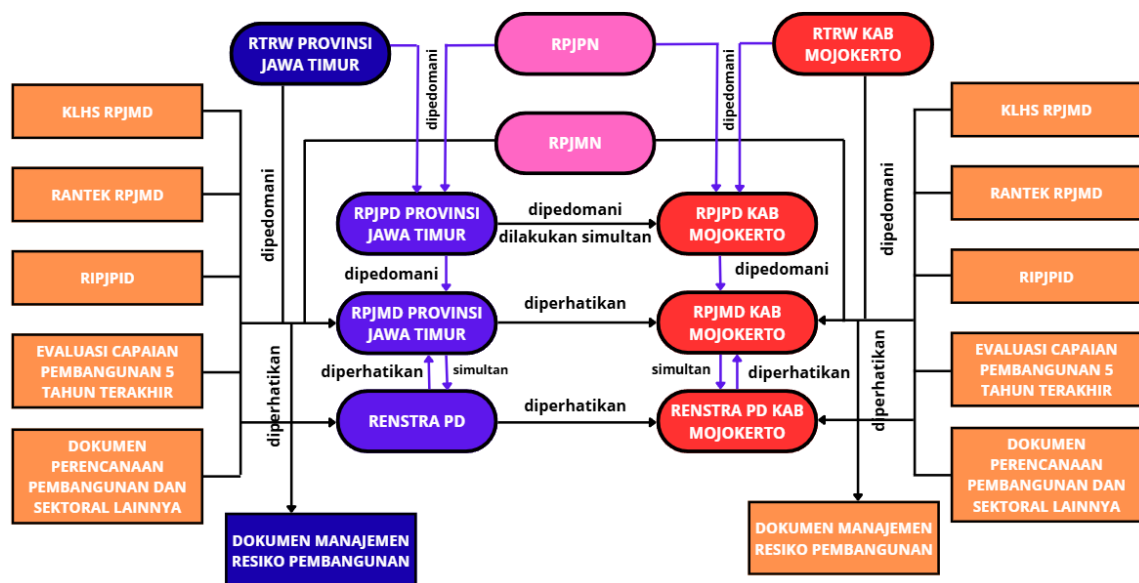
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor...tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJPD, RPJMD, RTRW, RKPD, dan Renstra, Renja perangkat daerah saling terhubung dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang menetapkan visi dan sasaran pembangunan daerah untuk 20 tahun ke depan, memberikan arah umum yang menjadi pedoman dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. RPJMD, yang mengacu pada RPJPD, menjabarkan program-program prioritas yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun, 2025-2029, dengan tujuan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. RTRW mengatur tata ruang wilayah sebagai panduan pengembangan fisik yang selaras dengan kebijakan pembangunan, memastikan penggunaan ruang yang efisien dan berkelanjutan. RKPD, sebagai dokumen tahunan, menyusun rencana kerja yang berfokus pada pencapaian program yang telah digariskan dalam RPJMD, sementara Renstra perangkat daerah merinci langkah-langkah operasional yang lebih teknis dan spesifik dalam setiap organisasi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Sinergi antara kelima dokumen perencanaan ini sangat penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang terkoordinasi dan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen



Sumber Data : Inmendagri 2 Tahun 2025 (diolah)

1) Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029

Rancangan RPJMN menjadi acuan utama yang harus diikuti oleh Rancangan RPJMD dalam merumuskan rencana pembangunan daerahnya. Implementasi kebijakan nasional yang tercantum dalam RPJMN dalam konteks lokal daerahnya serta penyesuaian prioritas pembangunan dan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Selain itu dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa target-target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah dapat tercapai dengan efektif. Memastikan bahwa pembangunan di Indonesia berjalan terarah dan terkoordinasi antara level nasional dan daerah. Oleh karena itu perlu mengetahui arah kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Adapun Tema RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Penguatan Fondasi Transformasi. Arah Kebijakan meliputi:

- 1. Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan Sosial.
- 2. Transformasi Ekonomi
Hilirisasi Sumber daya alam serta penguatan riset dan inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
- 3. Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil.
- 4. Supremasi Hukum Stabilitas dan Kepimimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketahanan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 mengacu pada visi Indonesia Emas 2025-2045 yaitu: “Negara Nusantara, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dengan sasaran utama visi RPJPN 2025–2045:

1. Pendapatan Per kapita Setara Negara Maju
2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang
3. Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas Emisi GRK menurun menuju *Net Zero Emission*

Gambar 1. 2 Visi Misi RPJPD 2025-2045



2) **Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045.**

Untuk mencapai sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mojokerto secara bertahap, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam RPJMD. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan serta sebagai wujud keberlanjutan RPJPD, maka pada RPJMD lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh dan terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto yang semakin maju dan kompetitif yang ditandai dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian yang handal akan

mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berkembang lebih cepat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap yang diwujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijak. Pelestarian lingkungan hidup terus dilakukan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik ditandai etos dan produktivitas kerja yang semakin baik.

Selanjutnya pembangunan hukum dan politik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, asri-berkelanjutan, ber-dedikasi dan adil terus membaik ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berperannya hukum yang mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto.

3) Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur.

Arah kebijakan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah:

1. Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif.
2. Transformasi Ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Jawa Timur serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan.
3. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, pembentukan dan penguatan lembaga peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan Pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen Risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.
4. Stabilitas, Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah, difokuskan pada upaya memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai landasan transformasi dan Pembangunan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrument kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Visi RPJPD 2025-2045 Provinsi Jawa Timur yaitu **“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan”**. Adapun realisasi dari visi ini diturunkan ke dalam 8 Misi RPJPD 2025-2045 Jawa Timur, meliputi:

Gambar 1. 3 Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045



4) **Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Salah satu aspek penting dalam RTRW adalah penetapan kawasan strategis, baik nasional (KSN) maupun provinsi (KSP), yang menjadi dasar penataan ruang, pembangunan wilayah, dan prioritas pengembangan. RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025–2029 disusun selaras dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang mempengaruhi arah pembangunan daerah.

- **KSN Gerbangkertosusila** – Penguatan konektivitas, industri, perdagangan, dan permukiman.
- **KSN Trowulan** – Revitalisasi situs Majapahit, pengembangan pariwisata sejarah dan budaya.
- **KSP Ekonomi Super Koridor Mojokerto–Sidoarjo–Pasuruan** – Pengembangan kawasan industri Ngoro, UMKM, dan infrastruktur penghubung.
- **KSP Sosial Budaya Gunung Penanggungan** – Pelestarian cagar budaya, pengembangan

wisata sejarah dan ekonomi kreatif.

- **KSP Lingkungan DAS Brantas** – Konservasi sumber daya air, rehabilitasi hutan, penataan bantaran sungai, dan ruang terbuka hijau.

Sinergi ini memastikan pembangunan Mojokerto sejalan dengan kebijakan tata ruang provinsi, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa kawasan strategis yang secara langsung mempengaruhi arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur.

5) Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan RTRW Kabupaten Mojokerto.

Dalam mewujudkan rencana tata ruang diperlukan program yang bersumber dari pemerintah (*public investment*) dan program yang bersumber dari masyarakat dan swasta (*private investment*). Program yang bersumber dari pemerintah umumnya melalui mekanisme perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan tahap akhir dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Program yang bersumber dari masyarakat dan swasta umumnya sulit diprogramkan tetapi harus selalu dibina dan diarahkan sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Perumusan strategi pengembangan di Kabupaten Mojokerto sekarang - kurangnya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan dan arahan pemanfaatan ruang.
- b. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan kawasan agropolitan

Strategi pengembangan kawasan agropolitan tersebut dilakukan melalui mengembangkan pusat agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan, mengoptimalkan fungsi kawasan pertanian, menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis, mempertahankan luasan kawasan pertanian secara ketat serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan reklamasi bekas tambang batuan.

2. Strategi pengembangan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor PKSP pertanian

Strategi yang ditempuh adalah mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan,

mengendalikan perkembangan industri besar dan menengah hanya pada lokasi zona industri dan atau peruntukan industri serta kawasan industri, memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional dengan membatasi pertumbuhan pasar modern hanya di pusat ibu kota kecamatan, menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modern, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan perdagangan dan jasa.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- 1) Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- 2) Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.
- 3) Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- 4) Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- 5) Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

6) Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan KLHS Kabupaten Mojokerto

Guna menyinergikan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam Penyusunan dan penetapan Rancangan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 juga memperhatikan keberadaan dokumen-dokumen lain di luar komponen perencanaan seperti halnya KLHS RPJMD. Sehingga perlu adanya dokumen KLHS RPJMD yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses penyusunannya. Adapun fungsi dari KLHS RPJMD ini adalah untuk memastikan bahwa isu-isu permasalahan strategis, dan sasaran strategis tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Mojokerto masuk dalam RPJMD. Selain itu penyusunan KLHS menjadi amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal inilah maka perlu adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD.

7) Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan RIPJPD

RPJMD Tahun 2025–2029 selain mengacu pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, salah satunya adalah Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). RIPJPID disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK), yang mengatur perlunya arah kebijakan dan strategi pembangunan iptek di daerah.

Keterkaitan RPJMD dengan RIPJPID bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah memperkuat ekosistem inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendukung peningkatan daya saing daerah. Program dan kegiatan dalam RPJMD diarahkan untuk selaras dengan strategi dan sasaran yang ditetapkan dalam RIPJPID, sehingga pembangunan daerah berbasis iptek dapat terwujud secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Aspek	RPJMD 2025–2029	RIPJPID	Keterkaitan
Dasar Hukum	UU No. 25/2004 tentang SPPN, Permendagri No. 86/2017	UU No. 11/2019 tentang Sisnas iptek	Kedua dokumen disusun berdasarkan ketentuan perundangan yang saling mendukung.
Ruang Lingkup	Pembangunan seluruh sektor daerah selama 5 tahun	Pemajuan iptek daerah dalam jangka panjang	RIPJPID memperkuat aspek iptek dalam pelaksanaan program-program RPJMD.

Aspek	RPJMD 2025–2029	RIPJPID	Keterkaitan
Fungsi Utama	Menjadi pedoman penyusunan RKPD tahunan, arah kebijakan pembangunan	Menjadi acuan pengembangan iptek berbasis potensi daerah	RIPJPID menjadi landasan untuk program/kegiatan iptek di RPJMD.
Visi dan Misi	Berasal dari visi-misi Kepala Daerah	Mendukung terwujudnya ekosistem riset dan inovasi daerah	Visi-misi RPJMD harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan iptek daerah dari RIPJPID.
Tujuan Pembangunan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah	Peningkatan kapasitas iptek dan inovasi daerah untuk kesejahteraan	Program inovasi dan riset daerah dalam RPJMD merujuk pada strategi RIPJPID.
Strategi dan Program	Menyusun strategi sektor-sektor pembangunan daerah	Menyusun strategi pengembangan iptek daerah	Strategi RPJMD di sektor pendidikan, industri, kesehatan, dll., disinergikan dengan RIPJPID.
Kinerja	Indikator pembangunan	Indikator kinerja iptek daerah	Indikator bidang iptek dalam RPJMD harus konsisten dengan target RIPJPID.

8) Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Dokumen Sektoral Lain

Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyusun dan memutakhirkan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2024. Dokumen ini menjadi acuan penting dalam integrasi kebijakan kebudayaan ke dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto. Dengan latar belakang sejarah yang panjang dan sebagai bekas pusat Kerajaan Majapahit, Kabupaten Mojokerto memiliki potensi budaya yang sangat besar, baik berupa warisan budaya benda maupun tak benda yang tersebar di berbagai wilayah. Pemutakhiran PPKD 2024 mencatat sebanyak 256 obyek pemajuan kebudayaan dan 365 data lembaga, seniman, serta tenaga budaya, yang merefleksikan keragaman dan kekayaan budaya daerah.

Dalam rangka mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal, integrasi PPKD ke dalam RPJMD diarahkan pada penguatan kebijakan lintas sektor. Langkah-langkah strategis meliputi sinkronisasi program Perangkat Daerah (PD) yang relevan, peningkatan kapasitas SDM kebudayaan, serta pembangunan sarana dan prasarana kebudayaan yang memadai. Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis budaya juga diaktualisasikan melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya, seperti kerajinan, kuliner tradisional, hingga penguatan destinasi wisata sejarah yang ikonik seperti Candi Brahu, Candi Bajang Ratu, dan Petirtaan Jolotundo. Upaya ini diperkuat dengan dukungan regulasi melalui peraturan daerah

dan keputusan kepala daerah guna menjamin kesinambungan program perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah.

Dengan menjadikan budaya sebagai pilar utama pembangunan, integrasi PPKD ke dalam RPJMD diharapkan mampu memperkuat identitas daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal, serta menjadikan Mojokerto sebagai wilayah yang unggul dan berkarakter dalam lanskap pembangunan Jawa Timur dan nasional. Narasi ini mempertegas komitmen Kabupaten Mojokerto dalam menjaga dan menghidupkan warisan budaya sebagai sumber inspirasi dan kekuatan transformasi pembangunan daerah di masa mendatang.

1.4 Maksud Dan Tujuan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara berkesinambungan.

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan pedoman pada Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pembangunan jangka waktu 2025-2029;
2. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah berdasarkan urusan dan kewenangan sesuai tugas dan fungsi;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.5 Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Adapun sistematika penulisan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan

lainnya;

4. Maksud dan tujuan ; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
2. Gambaran Keuangan Daerah;
3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah
2. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

a. Geografi

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah mencapai 98.438,09 ha. Secara astronomis, Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" bujur timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'30" lintang selatan. Secara geografis Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya:

Sebelah Utara	: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
Sebelah Timur	: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
Sebelah Selatan	: Kabupaten Malang dan Kota Batu
Sebelah Barat	: Kabupaten Jombang

Di samping itu, wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

a) Letak dan Kondisi Geografis

Secara administratif Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Sebagaimana diketahui wilayah Gerbang Kertosusila merupakan kawasan andalan di Propinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan menjadi kawasan strategis nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sejalan dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Timur, bahkan pengaruhnya hingga wilayah Indonesia Timur.

Tujuan dengan dibentuknya kawasan Gerbang Kertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota. Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. Peran wilayah Gerbang kertosusila yang semakin meningkat sebagai penggerak dan sekaligus kontributor pembangunan ekonomi di Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan dengan rincian berikut ini:

Tabel 2. 1
Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa
1	Jatirejo	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
2	Gondang	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
3	Pacet	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20
4	Trawas	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13
5	Ngoro	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
6	Pungging	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
7	Kutorejo	-	17	-	17	-	17	-	17	-	17
8	Mojosari	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14
9	Bangsalsari	-	17	-	17	-	17	-	17	-	17
10	Mojoanyar	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12
11	Dlanggu	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
12	Puri	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
13	Trowulan	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
14	Sooko	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15
15	Gedeg	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14
16	Kemlagi	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20
17	Jetis	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
18	Dawarblandong	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
Jumlah		5	299	5	299	5	299	5	299	5	299

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

b) Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.

Tabel 2. 2
Cakupan Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)	Tinggi Rata- Rata dari Permukaan Laut (m)	Luas Daerah) (Km ²)
		2020		2021		2022		2023		2024	
1	Jatirejo	140	107,62	140	107,62	140	107,62	140	107,62	140	107,62
2	Gondang	240	98,62	240	98,62	240	98,62	240	98,62	240	98,62
3	Pacet	470	107,98	470	107,98	470	107,98	470	107,98	470	107,98
4	Trawas	600	58,00	600	58,00	600	58,00	600	58,00	600	58,00
5	Ngoro	120	70,50	120	70,50	120	70,50	120	70,50	120	70,50
6	Pungging	100	45,00	100	45,00	100	45,00	100	45,00	100	45,00
7	Kutorejo	170	43,50	170	43,50	170	43,50	170	43,50	170	43,50
8	Mojosari	100	28,85	100	28,85	100	28,85	100	28,85	100	28,85
9	Bangsals	60	25,84	60	25,84	60	25,84	60	25,84	60	25,84
10	Mojoanyar	54	23,37	54	23,37	54	23,37	54	23,37	54	23,37
11	Dlanggu	120	35,82	120	35,82	120	35,82	120	35,82	120	35,82
12	Puri	70	34,65	70	34,65	70	34,65	70	34,65	70	34,65
13	Trowulan	60	45,93	60	45,93	60	45,93	60	45,93	60	45,93
14	Sooko	64	19,30	64	19,30	64	19,30	64	19,30	64	19,30
15	Gedeg	36	26,18	36	26,18	36	26,18	36	26,18	36	26,18
16	Kemlagi	52	42,35	52	42,35	52	42,35	52	42,35	52	42,35
17	Jetis	60	53,05	60	53,05	60	53,05	60	53,05	60	53,05
18	Dawarblandong	75	102,80	75	102,80	75	102,80	75	102,80	75	102,80
Kabupaten Mojokerto		64	969,36	64	969,36	64	969,36	64	969,36	64	969,36

Sumber:BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15°, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15°. Pada umumnya ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto rata-rata 64 m (<500 m) di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang berbeda dari kecamatan lain yaitu Kecamatan Pacet 470 m dan Kecamatan Trawas 600 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 15 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya, oleh karena itu ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam memetakan dan kemudian menetapkan wilayah tanah usaha. Adapun luas daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Luas Lahan Berdasarkan Letak Ketinggian

No.	Ketinggian Tempat (meter)	Luas *)	
		Ha	%
1.	0 – 500	84.998	87,69
2.	500 – 1.000	8.272	8,53
3.	1.000 – 4.000	3.666	3,78
	Total	96.936	100,00

*Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024 *)*

- Ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut, merupakan daerah datar dan sedikit sekali daerah yang bergelombang dengan penggunaan lahan usaha pertanian/persawahan, meliputi hampir seluruh kecamatan;
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut, merupakan daerah yang relatif bergelombang dan berbukit. Daerah ini juga merupakan daerah persawahan dan tegal, dan yang termasuk dalam ketinggian ini hanya Kecamatan Trawas.

Kabupaten Mojokerto mempunyai bentang kemiringan lahan yang bervariasi, yang terdiri dari:

- Daerah landai dan bergelombang meliputi 48,78 % dari luas wilayah;
- Daerah berbukit dengan kemiringan sampai 15° meliputi 22,63% dari luas wilayah;
- Daerah pegunungan dengan kemiringan antara 15° – 40° meliputi 8,69% dari luas wilayah;
- Daerah pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40° meliputi 19,90% dari luas wilayah.

Berdasarkan kemiringan tanah, luas tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 4 (empat) kelompok kemiringan, yaitu:

Tabel 2. 4
Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto

No	Kemiringan	Luas							
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
		2020		2021		2022		2023	
1	0° - 2°	45.886	47,34	45.886	47,34	45.886	47,34	45.886	47,34
2	2° – 15°	22.072	22,77	22.072	22,77	22.072	22,77	22.072	22,77
3	15° - 40°	8.474	8,74	8.474	8,74	8.474	8,74	8.474	8,74
4	Di atas 40°	20.504	21,15	20.504	21,15	20.504	21,15	20.504	21,15
Total		96.936	100,00	96.936	100,00	96.936	100,00	96.936	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

c) Geologi

Tekstur tanah di Wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- Tekstur Halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas 26.405,4 Ha atau 27,24% dari luas wilayah keseluruhan yang tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari dan Trawas;
- Tekstur Sedang, seluas 70.530,6 Ha atau 72,76% dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto, yang tersebar merata kecuali Kecamatan Gedeg dan Kemlagi.

d) Hidrologi

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air dan pola aliran sungai serta keberadaan bendungan. Jumlah mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto mencapai 161 buah, dari jumlah tersebut yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air tersebut rata-rata maksimum 19,42 liter/detik dan debit rata-rata minimum 7,60 liter/detik. Adapun keberadaan mata air tersebut sebagian besar sebarannya terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto bagian selatan.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi logis pada jenis jaringan irigasi panjang saluran serta pemanfaatannya untuk areal persawahan. Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 39 buah yang sudah mempunyai nama, di samping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto di antaranya adalah Sungai Brantas dengan debit

air ±10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik.

Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, di samping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto di antaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit 262 liter/detik. Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sungai	Hulu	Muara
1.	Sungai Brantas	Kabupaten Jombang	Kecamatan Sooko, Jetis, Ngoro
2.	Kali Sadar	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, Ngoro
3.	Kali Surabaya	Kabupaten Mojokerto	Kecamatan Jetis

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2.6
Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Sungai Sadar	22,998
2.	Sungai Cemporat	5,500
3.	Sungai Kintelan	13,182
4.	Sungai Gayaman	3,622
5.	Sungai Bangsal	13,125
6.	Sungai Judeg	12,500
7.	Sungai Bangsal II	5,555
8.	Sungai Tekuk	14,433
9.	Sungai Sumber Ngrayung	6,056
10.	Sungai Sumber Glogok	8,906
11.	Sungai Sumber Wonosari	2,506
12.	Sungai Sumber Kembar	6,345
13.	Sungai Sumber Wonodadi	7,445
14.	Sungai Gembolo	31,631
15.	Sungai Cumpleng	14,982
16.	Sungai Made	12,414
17.	Sungai Bulu Kidul	3,480
18.	Sungai Jubel	12,595
19.	Sungai Sumber Pasinan	9,666
20.	Sungai Sumber Kali Urip	3,708
21.	Sungai Kanigoro	4,000
22.	Sungai Sumber Pandokan	2,500

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
23.	Sungai Janjing	14,378
24.	Sungai Jurang Jero	3,258
25.	Sungai Sumber Towo	7,775
26.	Sungai Kukupan	4,025
27.	Sungai Porong	28,290
28.	Sungai Curah Klengkeng	10,120
29.	Sungai Curah Panggul	4,350
30.	Sungai Kletak	1,744
31.	Sungai Dlundung	4,985
32.	Sungai Brantas	19,550
33.	Sungai Brangkal	14,890
34.	Sungai Jurang Cetot	33,625
35.	Sungai Coban	11,400
36.	Sungai Butek	2,900
37.	Sungai Manting	13,050
38.	Sungai Sumber Winong	15,000
39.	Sungai Landean	13,700
40.	Sungai Klorak	6,250
41.	Sungai Galuh	13,117
42.	Sungai Klopo	6,074
43.	Sungai Pikatan	22,319
44.	Sungai Kromong	14,240
45.	Sungai Surabaya/Mas	7,500
46.	Sungai Marmoyo	20,450
47.	Sungai Asin	5,100
48.	Sungai Kwangen	7,200
49.	Sungai Kedung Saro	13,350
50.	Sungai Sidoringin	4,900
51.	Sungai Gedeg	4,000
52.	Sungai Wonoayu	10,350
53.	Sungai Kedung Sumur	6,650
54.	Sungai Sumber Waru	5,700
55.	Sungai Polaman	2,300
56.	Sungai Curah Ngoro	2,500
57.	Sungai Curah Jedong	2,225
58.	Sungai Curah Lapangan	2,950
59.	Sungai Landak	5,250
60.	Sungai Landak II	2,450
61.	Sungai Curah Wates	3,225

Sumber: DPUPR Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

e) Klimatologi

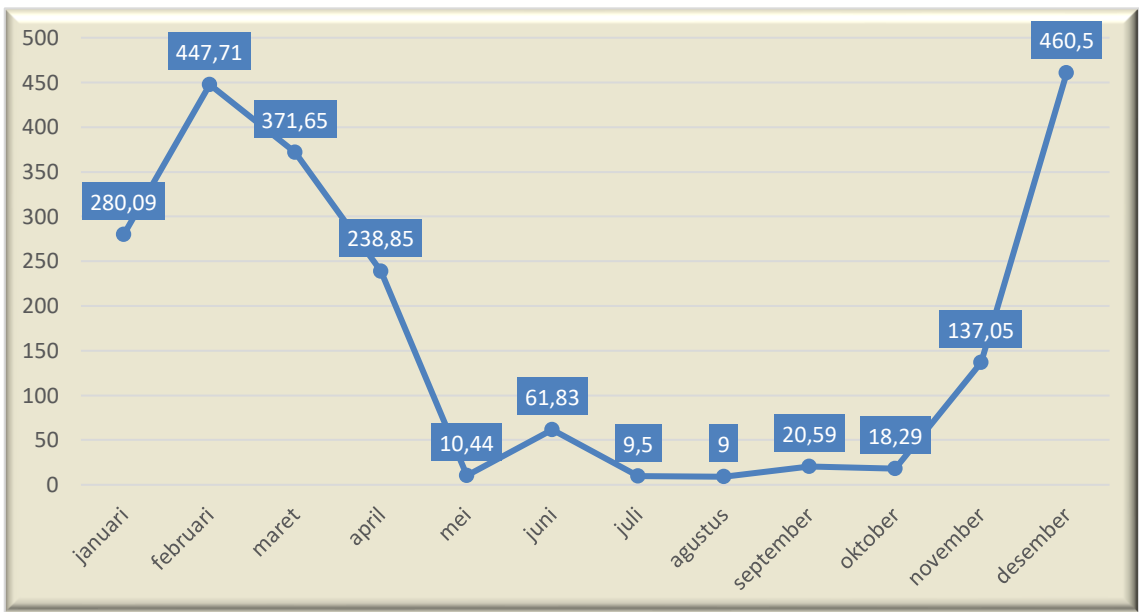
Pada awal tahun 2024, curah hujan berada pada angka cukup tinggi dengan Januari mencatat 280,09 mm, diikuti oleh peningkatan tajam di Februari hingga mencapai puncak

tertinggi kedua sebesar 447,71 mm. Curah hujan mulai menurun pada Maret (371,65 mm) dan terus turun hingga April (238,85 mm). Memasuki Mei, terjadi penurunan drastis hingga hanya 10,44 mm, menjadikan bulan ini sebagai periode dengan curah hujan terendah. Kondisi ini berlanjut di bulan Juni (61,83 mm), Juli (9,5 mm), dan Agustus (9 mm), yang mencerminkan periode musim kemarau dengan curah hujan sangat rendah.

Namun, sejak September (20,59 mm) curah hujan mulai meningkat perlahan, meskipun Oktober kembali turun sedikit (18,29 mm). Kenaikan lebih signifikan terjadi pada November (137,05 mm), diikuti lonjakan drastis pada Desember yang mencatat curah hujan tertinggi dalam tahun ini sebesar 460,5 mm. Perkembangan curah hujan tahun 2024 bisa dilihat di gambar di bawah ini:

Gambar 2. 1

Perkembangan Jumlah Curah Hujan (mm) per Bulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari pola ini, terlihat bahwa Kabupaten Mojokerto mengalami musim hujan dengan intensitas tinggi pada awal dan akhir tahun, sementara musim kemarau terjadi dari Mei hingga Agustus, dengan curah hujan yang sangat rendah. Pola ini sesuai dengan karakteristik iklim monsun yang memengaruhi wilayah Indonesia.

f) Kontribusi Ekonomi

Untuk memperkuat posisi dan peran strategis daerah, analisis terhadap struktur perekonomian menjadi hal yang fundamental. Pemahaman mendalam tentang sektor-sektor penyusun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sangat krusial dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terfokus dan berkelanjutan. Analisis ini tidak hanya menunjukkan besaran total PDRB, tetapi juga mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang menjadi tulang punggung

perekonomian daerah, serta sektor-sektor yang berpotensi untuk dikembangkan di masa mendatang. Berikut adalah tabel yang menyajikan data PDRB Kabupaten Mojokerto atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut sektor lapangan usaha pada tahun 2024:

Tabel 2. 7
Persentase dan Nilai PDRB Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto
Tahun 2024

Sektor Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)	Persentase Kontribusi
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.160,98	7,21%
Pertambangan dan Penggalian	922,38	0,81%
Industri Pengolahan	65.534,97	57,93%
Pengadaan Listrik dan Gas	65,57	0,06%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	65,53	0,06%
Konstruksi	8.317,45	7,35%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.707,26	10,35%
Transportasi dan Pergudangan	1.809,18	1,60%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.293,97	2,03%
Informasi dan Komunikasi	5.984,66	5,29%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.581,22	1,40%
Real Estate	1.477,76	1,31%
Jasa Perusahaan	181,44	0,16%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.301,47	2,03%
Jasa Pendidikan	1.289,83	1,14%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	467,34	0,41%
Jasa lainnya	968,71	0,86%
PDRB Total	113.129,71	100,00%
PDRB Tanpa Migas	113.127,88	

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Mojokerto tahun 2024, struktur perekonomian daerah sangat didominasi oleh sektor Industri Pengolahan, yang memberikan kontribusi signifikan sebesar 57,93% atau senilai Rp65.534,97 miliar. Dominasi ini menunjukkan peran sentral sektor industri sebagai motor penggerak utama ekonomi lokal. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi 10,35% dan Konstruksi sebesar 7,35%, yang menunjukkan tingginya aktivitas komersial dan investasi di bidang infrastruktur.

2) **Potensi Sumber Daya Alam**

a) **Penggunaan Lahan**

Penggunaan Lahan di Kabupaten Mojokerto meliputi:

- 1. Kabupaten Mojokerto memiliki hutan lindung seluas 8.391,5 ha yang tersebar di kawasan

Pegunungan Welirang dan Penanggungan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Mojokerto ini memiliki fungsi utama sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan untuk menyimpan cadangan air di dalam tanah, mengendalikan erosi pada tanah, mencegah terjadinya banjir, mencegah intrusi air laut, menjaga kesuburan pada tanah, sebagai tempat penyimpanan sumber daya genetica (plasma nutfah), habitat flora dan fauna, destinasi wisata alam dan sebagai sarana belajar ilmu pengetahuan alam.

2. Hutan produksi di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2015 adalah seluas 3.924,20 ha. Dari luas total hutan produksi tersebut yang merupakan area Tanaman Bukan Pohon (TBP/LDTI) adalah seluas 17,9 ha. Produksi hutan kayu pada tahun 2015 meliputi kayu jati sebanyak 100,75 m³ dan kayu rimba sebanyak 38,07 m³. Sedangkan produksi TBP berupa daun kayu putih sebanyak 3.312,35 ton yang kemudian diolah menjadi minyak kayu putih oleh Perum Perhutani KBM Industri Non Kayu Surabaya.
3. Kawasan pertanian lahan sawah di Kabupaten Mojokerto meliputi sawah irigasi dan sawah tadah hujan, tersebar di seluruh kecamatan. Frekuensi penanaman adalah satu hingga tiga kali dalam setahun. Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Mojokerto adalah 27.535 Ha.
4. Kawasan pertambangan yang memiliki kegiatan dan dukungan spesifik di Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis bahan tambang adalah :
 - a. Pertambangan batuan terdapat di Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jetis, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Kutorejo, dan Kecamatan Dlanggu
 - b. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan termasuk pasir dan tanah urug serta batu gunung.
 - c. Pertambangan mineral bukan logam terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Sooko, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong.
 - d. Pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.
 - e. Pertambangan panas bumi terdapat di Gunung Arjuno Welirang.
5. Kawasan peruntukkan industri di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan andalan Gerbangkertosusila, ditetapkan sebagai pengembangan tahap I dengan kegiatan rehabilitasi kawasan andalan untuk industri pengolahan:
 - a. Kawasan industri di Kecamatan Ngoro seluas kurang lebih 500 ha;
 - b. Kawasan industri di Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong seluas kurang lebih 10.000 ha; dan
 - c. Kawasan industri di Kecamatan Mojoanyar seluas kurang lebih 500 ha.
6. Berdasarkan potensi wilayahnya, maka kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto akan dikembangkan sebagai berikut ini.

- a. Wisata alam, kawasan ini berada di Kecamatan Trawas, Pacet, Jetis, Kemlagi, Gondang dan Dawarblandong.
- b. Wisata budaya dan peninggalan sejarah, terdapat situs bersejarah yang memiliki nilai kultural yang tinggi yang lokasinya terdapat di Kecamatan Trowulan, yaitu situs bekas kerajaan Majapahit (cagar budaya) yang dikembangkan menjadi Mojopahit Park. Selain itu terdapat pula di Kecamatan Bangsal, Sooko, Ngoro, Jetis, Jatirejo, Puri, Gedeg, Trawas, dan Pacet.
- c. Wisata buatan, terletak di Kecamatan Trowulan, Sooko, Bangsal, Ngoro, Jetis, Mojoanyar, Puri, Mojosari, Dlanggu dan Pacet.

Tabel 2. 8
Penggunaan Lahan

No.	Kategori Penggunaan Lahan	Lokasi / Catatan
1	Hutan Lindung	Pegunungan Welirang & Penanggungan; fungsi ekologis & wisata alam Luas 8.391,5 ha
2	Hutan Produksi	Produksi: Kayu jati (100,75 m³), Kayu rimba (38,07 m³), Daun kayu putih (3.312,35 ton) Luas 3.924,2 ha (termasuk TBP: 17,9 ha)
3	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Tersebar di seluruh kecamatan; irigasi dan tadah hujan Luas 27.535 ha
4	Kawasan Pertambangan	Batuan: Ngoro, Jetis, Dawarblandong, Kutorejo, Dlanggu Mineral Bukan Logam: Mojoanyar, Sooko, Bangsal, Gedeg, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong Migas: Seluruh wilayah Panas Bumi: Gunung Arjuno-Welirang
5	Kawasan Industri	Ngoro: ±500 ha, Jetis, Kemlagi, Dawarblandong: ±10.000 ha, Mojoanyar: ±500 ha
6	Kawasan Wisata	Alam: Trawas, Pacet, Jetis, Kemlagi, Gondang, Dawarblandong Budaya: Trowulan (Mojopahit Park), Jetis, Jatirejo, Puri, Gedeg, Trawas, dan Pacet. Buatan: Trowulan, Sooko, Bangsal, Ngoro, Jetis, Mojoanyar, Puri, Mojosari, Dlanggu dan Pacet.

Sumber:Bappeda Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

b) Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Mojokerto terletak di wilayah tengah Provinsi Jawa Timur dan memiliki posisi geografis yang sangat strategis sebagai bagian dari kawasan metropolitan Gerbangkertasusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan). Lokasinya

yang berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gresik menjadikan Mojokerto sebagai simpul penghubung utama antara wilayah barat dan timur Jawa Timur, serta sebagai wilayah penting dalam mendorong keterpaduan pembangunan antarwilayah. Secara geospasial, Kabupaten Mojokerto berada pada jalur transportasi nasional dan regional yang sangat vital. Keberadaan Jalan Nasional Surabaya–Madiun, Jalan Tol Trans Jawa (Surabaya–Mojokerto–Kertosono), dan jalur kereta api lintas selatan Jawa menempatkan Mojokerto sebagai pusat logistik, distribusi, dan mobilitas regional yang berpengaruh langsung terhadap konektivitas Provinsi Jawa Timur. Berbagai peran strategis yang diemban Kabupaten Mojokerto dalam konteks pembangunan wilayah yang lebih luas adalah sebagai berikut:

➤ **Simpul Konektivitas Regional dan Aksesibilitas Multimoda**

Kabupaten Mojokerto menjadi penghubung efektif antarwilayah industri, perdagangan, dan permukiman, baik melalui akses jalan tol, jalur arteri nasional, maupun jaringan kereta api. Hal ini menguatkan peran Kabupaten Mojokerto sebagai koridor logistik antara kawasan industri di Sidoarjo–Pasuruan dan kawasan *hinterland* di Jombang–Madiun.

➤ **Pusat Pertumbuhan dan Penyangga Surabaya Raya**

Sebagai bagian dari metropolitan Gerbangkertasusila, Kabupaten Mojokerto berperan menyediakan ruang untuk ekspansi wilayah perkotaan, pengembangan kawasan industri baru (misalnya di Ngoro dan Jetis), penyediaan kawasan hunian dan ruang terbuka hijau, serta ketahanan pangan dan suplai air untuk wilayah hilir.

➤ **Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi dan Agroindustri**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045, Kabupaten Kabupaten Mojokerto telah menetapkan beberapa Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), di antaranya:

Kawasan Agropolitan di Pacet dan Gondang, yang dikembangkan sebagai pusat produksi hortikultura, peternakan, dan pengolahan komoditas unggulan (alpukat, durian, jeruk, rambutan, salak).

Kawasan Perkotaan Baru seperti Milirip/Kota Mandiri Canggü, Pagerluyung, Dawarblandong, dan Airlangga City yang diproyeksikan menjadi simpul pertumbuhan urban baru yang terintegrasi dengan infrastruktur regional.

➤ **Destinasi Sejarah dan Wisata Budaya Nasional**

Mojokerto merupakan lokasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Majapahit Park di Trowulan dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam jaringan DPN Bromo–Malang. Potensi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai titik gravitasi sejarah dan budaya yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelestarian budaya lokal.

➤ **Wilayah Strategis dalam Keberlanjutan Lingkungan dan Ketahanan Alam**

Kawasan Cagar Budaya Gunung Penanggungan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas

menjadi bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) untuk fungsi konservasi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan ini memainkan peran penting dalam penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan mitigasi bencana ekologis lintas kabupaten/kota.

➤ **Pusat Kolaborasi dan Kemitraan Antarwilayah**

Dengan posisinya yang berada di tengah-tengah lintasan perdagangan, permukiman, dan pertanian, Kabupaten Mojokerto menjadi mitra strategis dalam berbagai bentuk kerja sama antar daerah. Ini mencakup kerja sama dalam pengelolaan infrastruktur, pengembangan ekonomi kawasan, serta penguatan sistem transportasi dan logistik regional. Melalui integrasi kawasan strategis dalam RTRW dan penguatan peran fungsionalnya secara regional, Kabupaten Mojokerto memiliki peluang besar untuk tidak hanya berperan sebagai penyangga metropolitan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang unggul dalam sektor agroindustri, pariwisata budaya, dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengembangan kawasan strategis harus dijadikan landasan kebijakan spasial dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur menetapkan sejumlah kawasan strategis yang menjadi fokus pengembangan wilayah, baik pada tingkat nasional (KSN) maupun provinsi (KSP). Kabupaten Mojokerto memiliki posisi penting dalam kerangka tersebut karena masuk dalam beberapa kawasan strategis yang memiliki nilai ekonomi, sosial-budaya, sejarah, dan lingkungan yang signifikan. Penetapan ini tidak hanya menjadi landasan penataan ruang, tetapi juga menjadi peluang strategis bagi daerah untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan yang berdaya saing tinggi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur, terdapat lima kawasan strategis yang menjadi potensi utama pengembangan Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Gerbangkertosusila

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) yang ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Dalam kerangka RPJMD, keberadaan Kabupaten Mojokerto dalam struktur Gerbangkertosusila mendorong pengembangan wilayah yang terintegrasi dalam aspek konektivitas, industri, perdagangan, dan permukiman. Arah pembangunan diarahkan pada penguatan peran Kabupaten Mojokerto sebagai simpul penghubung antara kawasan metropolitan Surabaya dan wilayah *hinterland* melalui pengembangan infrastruktur serta sektor-sektor unggulan.

2. Kawasan Strategis Sejarah Nasional – Trowulan

Kawasan Kerajaan Majapahit di Trowulan juga dikategorikan sebagai Kawasan

Strategis Nasional dalam RTRW. RPJMD Kabupaten Mojokerto menempatkan kawasan ini sebagai ikon kebudayaan dan pariwisata unggulan, dengan rencana revitalisasi situs sejarah, pembangunan fasilitas pendukung wisata, serta promosi budaya secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelestarian warisan sejarah nasional.

3. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Ekonomi – Super Koridor Mojokerto–Sidoarjo–Pasuruan

Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Koridor Ekonomi Mojokerto–Sidoarjo–Pasuruan (Ngoro–Jabon–Gempol–Rembang) yang merupakan bagian dari Super Koridor Ekonomi Jawa Timur. Arah pengembangan koridor ini mencakup integrasi kawasan industri, agropolitan, dan minapolitan secara berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Mojokerto mengakomodasi arah tersebut melalui prioritas pembangunan kawasan industri di Ngoro, penguatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya lokal.

4. Kawasan Strategis Provinsi Sosial Budaya – Cagar Budaya Gunung Penanggungan

Kabupaten Mojokerto bersama Kabupaten Pasuruan juga ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Cagar Budaya Gunung Penanggungan. Penetapan ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya, khususnya kejayaan Kerajaan Majapahit yang berpusat di wilayah Trowulan. RPJMD menetapkan pengembangan kawasan wisata sejarah dan budaya sebagai salah satu prioritas pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal. Sinergi dengan kebijakan RTRW ditunjukkan melalui rencana pelibatan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya serta pengembangan potensi edukatif dan ekonomi kreatif di kawasan tersebut.

5. Kawasan Strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan– DAS Brantas

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang ditetapkan sebagai KSP untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. Dalam RTRW, DAS Brantas diarahkan untuk konservasi sumber daya air, pengendalian bencana, dan pelestarian lingkungan. Hal ini diterjemahkan dalam RPJMD melalui program-program rehabilitasi hutan dan sempadan sungai, pengendalian permukiman di bantaran sungai, serta penataan ruang hijau kawasan. Tujuannya adalah

untuk menjaga keseimbangan ekologis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah sungai.

Potensi Kawasan Strategis Kabupaten Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1. Pemantapan dan pengembangan kawasan Agropolitan
 - a. Agropolitan alpukat berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pungging, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojoanyar.
 - b. Agropolitan durian berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Pungging, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko.
 - c. Agropolitan jeruk keprok siam berada di Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Kutorejo, Kecamatan Dlanggu, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Mojoanyar.
 - d. Agropolitan rambutan Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Puri, Kecamatan Trowulan, Kecamatan Sooko, Kecamatan Gedeg, Kecamatan Jetis, Kecamatan Mojoanyar.
 - e. Agropolitan salak berada di Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Sooko.
2. Pemantapan dan pengembangan perkotaan baru, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Interchange Mlirip/ Kota Mandiri Cangu di Kecamatan Jetis
 - b. Kawasan Perkotaan Interchange Pagerluyung di Kecamatan Gedeg
 - c. Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai pendukung kawasan industri
 - d. Kawasan Perkotaan Airlangga *City* di Kecamatan Ngoro

Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto

Pada dokumen Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto, dijelaskan bahwa Potensi Wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat pada beberapa Aspek, antara lain:

1. Sistem Perkotaan: Sistem perkotaan yang berkembang saat ini telah memiliki pola yang relatif terbentuk dengan jelas. Hal ini dapat dilihat dari mulai berkembangnya kota-kota baik kota kecamatan maupun kota yang dulunya dikondisikan menjadi kota SSWP. Dengan demikian akan relatif lebih mudah dalam mengondisikan sistem perkotaan di mana prasarana pendukungnya sudah ada di tiap kawasan perkotaan. Mengacu pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada sistem perkotaan, telah

mengalami beberapa penyesuaian baik istilah maupun definisi yang menjadi terjemahannya. Untuk itu dengan adanya potensi berupa terbentuknya sistem perkotaan di Kabupaten Mojokerto, maka dalam perwujudan rencana struktur ruang sampai akhir tahun rencana 2029 diharapkan dapat terintegrasi lebih baik.

2. Sistem Perdesaan: Kawasan perdesaan di Kabupaten Mojokerto telah berkembang sedemikian rupa, dan memiliki tingkat perkembangan yang beragam. Dari tingkat perkembangan yang beragam tersebut, secara umum tiap kawasan perdesaan telah memiliki potensi sarana, prasarana, lahan kegiatan ekonomi produktif, dan sentra pengolah ekonomi produktif yang dapat menjadi generator pertumbuhan kawasan perdesaan. Dengan adanya potensi tersebut di atas maka kawasan perdesaan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan diharapkan dapat berkembang secara dinamis dengan memanfaatkan potensi yang telah dikelola oleh SDM yang mumpuni.
3. Kependudukan: Distribusi penduduk di Kabupaten Mojokerto bervariasi sesuai dengan tingkat perkembangan wilayahnya. Tercatat yang memiliki distribusi penduduk tinggi adalah Kecamatan Mojosari, Sooko dan Gedeg. Distribusi penduduk sedang meliputi Kecamatan Trowulan, Puri, Dlanggu, Bangsal, dan Pungging, serta kecamatan lainnya memiliki distribusi yang rendah. Jumlah penduduk yang secara alami akan terus bertambah jika dikelola dengan baik dari segi kualitasnya maka akan menjadi salah satu potensi yang sangat baik. Jumlah penduduk yang memadai dengan tingkat kualitas yang terus ditingkatkan akan sangat menunjang bagi pembangunan di wilayah yang bersangkutan.
4. Jaringan Transportasi: Secara umum Kabupaten Mojokerto telah terhubung dengan sistem jaringan jalan yang telah dapat menghubungkan simpul bangkitan dan tarikan yang ada. Panjang ruas jalan yang pada tahun 2008 adalah 41,12 km jalan negara, 119,17 km jalan Provinsi dan 748,69 km jalan kabupaten. Dari ruas jalan yang ada khusus untuk jalan kabupaten terdapat 418,12 km dalam kondisi baik dan 118,09 km dalam kondisi sedang. Sistem jaringan jalan yang telah terbentuk ini merupakan potensi yang sangat besar, karena dengan jaringan jalan yang ada pergerakan barang dan penumpang dapat berlangsung sehingga roda pembangunan dapat terus berjalan. Jaringan jalan ini pada tahun 2008 terintegrasi pula dengan 203 unit jembatan dengan kondisi baik dan 28 unit jembatan dalam kondisi sedang. Potensi lainnya adalah pengembangan akses jalan bebas hambatan antara ruas Surabaya-Mojokerto dan ruas Mojokerto-Kertosono di mana salah satu *interchangenya* ada di wilayah Kecamatan Gedeg dan Jetis. Dengan adanya jalan bebas hambatan ini maka interaksi dan aksesibilitas Kabupaten Mojokerto akan semakin meningkat. Diharapkan investasi dan pembangunan juga akan semakin meningkat dengan semakin mudahnya akses ke Kabupaten Mojokerto. Keberadaan terminal di Mojosari dan

sub-sub terminal lainnya yang ikut mendukung pola sirkulasi kendaraan umum, yang menjadi moda angkutan barang dan penumpang bagi sebagian masyarakat. Keberadaan jaringan rel kereta api yang terhubung dengan Kota Surabaya menjadi potensi bagi pengembangan sistem transportasi massal yang dapat dijadikan alternatif moda angkutan yang murah, aman, dan cepat.

5. Jaringan Energi: Adanya jumlah pemakai tenaga listrik yang terus bertambah seiring dengan penambahan penduduk dan kegiatan usaha, merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
6. Jaringan Telekomunikasi: Kebutuhan telekomunikasi yang terus meningkat seiring perkembangan jumlah penduduk dan dunia usaha. Trend ataupun kecenderungan perkembangan selama 5 tahun terakhir yaitu semakin maraknya penggunaan telepon selular yang memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi. Untuk itu selama 20 tahun ke depan sistem jaringan telepon selular akan semakin penting dan mendominasi.
7. Jaringan Sumber Daya Air: Potensi sumber daya air permukaan berupa sungai yang berjumlah 26 sungai melintasi wilayah Kabupaten Mojokerto. Sungai terpanjang adalah Sungai Pikatan, yakni 26 km, dan sungai terpenting peran dan fungsinya adalah Sungai Brantas yang melintas sepanjang 9 km.
8. Prasarana Pengelolaan Lingkungan: Prasarana pengelolaan lingkungan akan terkait dengan pengelolaan sanitasi dan persampahan. Jika dilihat secara umum dengan semakin meningkatnya pola hidup dan kemampuan masyarakat dari sisi finansial dan pola pikir baik di perkotaan maupun di pedesaan maka, kebutuhan akan sanitasi dan persampahan yang baik juga sangat diperlukan. Di kawasan perdesaan pun telah relatif banyak prasarana sanitasi baik individu maupun komunal, dan kondisi akan terus meningkat karena warga semakin peduli akan kesehatan lingkungan. Potensi pengelolaan persampahan yang ada adalah, adanya upaya-upaya secara mandiri dari warga masyarakat untuk mengolah sampah yang dapat didaur ulang dan pembuatan kompos dari sampah organik. Kedua kegiatan di atas telah dilaksanakan walaupun masih perlu ditingkatkan lagi kualitas dan kuantitasnya. Untuk itu selama 20 tahun ke depan pengolahan sampah model ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam upaya untuk dapat mereduksi sampah, dan melestarikan lingkungan.
9. Kawasan Hutan Lindung: Di bagian Selatan dari Kabupaten Mojokerto terdapat kawasan pegunungan yang memiliki kelerengan lebih dari 40%. Pada kawasan ini telah berkembang kawasan hutan lindung yang memang selama ini telah dipertahankan dan ditingkatkan terus keberadaannya. Kawasan di bagian selatan ini meliputi Kecamatan Ngoro, Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan. Di bagian utara juga terdapat kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Kemlagi dan Dawarblandong. Adapun luasan potensi dari

kawasan ini 17.007,87 Ha.

10. Kawasan Lindung Bawahannya (Resapan Air): Kawasan resapan air selain hutan lindung juga akan meliputi hutan produksi, perkebunan tanam keras. Kawasan resapan air ini dapat berupa perkebunan tanaman tahunan ataupun hutan. Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai areal perkebunan tanaman keras yang dimanfaatkan adalah hasil buah bukan kayunya, sehingga masih tetap memiliki fungsi lindung. Kawasan ini berpotensi di Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang, Jatirejo, dan Trowulan, serta Kemlagi dan Dawarblandong yang memiliki kawasan hutan produksi.
11. Kawasan Perlindungan Setempat: Potensi kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Mojokerto yang dapat dikembangkan adalah sempadan sungai, mata air, rel kereta api, SUTT dan danau/waduk. Untuk kawasan tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan potensi pengembangan terbesar berupa sempadan sungai.
12. Kawasan Pelestarian Alam: Potensi pengembangan ruang untuk kawasan ini di Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo dan Trowulan. Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Mojokerto berupa Taman Hutan Raya R.Soeryo (Kecamatan Trawas, dan Pacet), Taman Wisata Alam berpotensi dikembangkan di Kecamatan Trawas, Pacet dan Gondang, dan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kecamatan Trowulan.
13. Kawasan Rawan Bencana: Kawasan rawan bencana yang ada adalah kawasan rawan banjir dan longsor. Untuk kawasan rawan banjir berada di sekitar sungai-sungai dan rawan longsor berada di Kemlagi, Dawarblondong, Pacet, Trawas, Gondang, Jatirejo, dan Ngoro.
14. Kawasan Hutan Produksi: Potensi pengembangan hutan produksi berada di sekitar kecamatan Dawarblandong dan Kemlagi. Hutan produksi dapat juga difungsikan sebagai kawasan yang mampu menjadi resapan air dan menjaga kualitas udara karena keberadaan vegetasi pohon yang mampu mereduksi karbon dioksida.
15. Kawasan Pertanian: Potensi pertanian yang dapat dikembangkan berupa pertanian lahan basah dan lahan kering. Walaupun secara geografis Kabupaten Mojokerto berdekatan dengan kawasan yang identik dengan perkembangan industri yang pesat (Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik), Kabupaten Mojokerto masih memiliki potensi pertanian dengan luas keseluruhan 39.871 Ha. Potensi ini selama 20 tahun ke depan dapat dikembangkan lebih lanjut.
16. Kawasan Perkebunan: Potensi kawasan perkebunan yang ada di Kabupaten Mojokerto berada di Kecamatan Jatirejo, Pacet, Gondang, Pungging dan Dlanggu, serta kawasan di bagian utara Sungai Brantas.
17. Kawasan Peternakan: Potensi peternakan walaupun bukan merupakan suatu kawasan yang berkumpul menjadi satu dalam lingkup *spatial* yang luas, dapat menjadi salah satu komoditi yang berpotensi dikembangkan. Potensi peternakan ada di Kecamatan Jatirejo,

Ngoro, Sooko, Kemlagi, Pungging, Trawas, Kutorejo, Dawarblandong, Sooko Gedeg, dan Kutorejo. Ternak yang potensial dikembangkan mulai dari ternak besar, kecil dan unggas.

18. Kawasan Perikanan: Potensi perikanan yang ada berupa perikanan darat yang bertumpu pada kolam ikan dan waduk yang ada. Kawasan yang potensial berada di Kecamatan Mojosari, Mojoanyar, Kemlagi, Jetis, Puri, Gondang dan Trowulan.
19. Kawasan Pertambangan: Adanya potensi galian C di sekitar kecamatan Ngoro dan sepanjang aliran sungai Brantas dan potensi gas di Desa Sawo, Kecamatan Jetis.
20. Kawasan Industri: Kawasan di sekitar Kabupaten Mojokerto seperti yang telah diuraikan di atas telah mengembangkan kawasan-kawasan industri secara intensif. Demikian pula Kabupaten Mojokerto yang ditunjang dengan aksesibilitas yang baik memiliki potensi kawasan industri yang berada di Kecamatan Ngoro, Mojoanyar dan Jetis.
21. Kawasan Pariwisata: Potensi wisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam dan budaya, religius. Untuk wisata alam berpotensi di Kecamatan Trawas, Pacet, Gondang dan Jetis sedangkan wisata budaya religi dikembangkan di Kecamatan Trowulan.
22. Kawasan Permukiman: Permukiman merupakan salah satu kawasan yang akan memiliki pertambahan luasan *spatial* yang signifikan. Pertambahan jumlah penduduk juga selayaknya akan diiringi dengan pertambahan permukiman, yang tentunya mengikuti aturan dan arahan penataan yang telah disusun.
23. Kawasan Strategis Ketahanan Ekonomi: Sebagai kabupaten yang termasuk dalam Gerbangkertosusila *Plus*, maka kabupaten Mojokerto memiliki potensi kawasan yang mengarah pada pengembangan sektor industri dan pertanian secara terintegrasi dan juga wisata. Potensi dasar ini dapat menghasilkan efek berganda yang juga dapat menjadi generator makro perekonomian Kabupaten, misalnya perkembangan kawasan permukiman besar. Selain itu di beberapa kawasan potensi sektor pertanian juga masih menjadi unggulan dengan ditunjang oleh adanya sistem irigasi teknis dan pola tanam yang mendukung.

Kabupaten Mojokerto memiliki karakteristik bentang alam yang beragam, mulai dari wilayah pegunungan di selatan hingga dataran rendah di utara, yang berkontribusi terhadap kekayaan sumber daya alamnya. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan pembangunan, perubahan penggunaan lahan, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran air dan tanah, serta pertumbuhan jumlah penduduk, terjadi penurunan kualitas dan kapasitas lingkungan hidup yang melebihi daya dukung dan daya tampung yang tersedia. Daya dukung lingkungan di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan, terutama pada kawasan resapan air, daerah aliran sungai, serta kawasan hutan lindung. Penurunan ini menyebabkan berkurangnya kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya alam dan jasa ekosistem, seperti air

bersih dan kualitas udara. Sementara itu, daya tampung lingkungan, yang mencerminkan kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah dan polutan tanpa menimbulkan kerusakan, ditandai dengan meningkatnya volume limbah domestik, pencemaran badan air, dan Risiko bencana ekologis seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan.

Dalam konteks perubahan iklim, tantangan terhadap daya dukung dan daya tampung menjadi semakin kompleks. Perubahan pola curah hujan, suhu ekstrem, serta pergeseran musim menambah beban terhadap sistem lingkungan yang sudah rentan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui langkah-langkah seperti: penguatan kebijakan perlindungan dan pemulihan lingkungan, optimalisasi perencanaan tata ruang berbasis mitigasi bencana, konservasi dan rehabilitasi kawasan kritis, pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu, serta peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas lokal, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto, sehingga lingkungan hidup dapat terus mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di masa depan.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan pengembangan tata ruang merupakan kerangka umum pengaturan elemen-elemen dasar spasial dan keterkaitan antar elemen tersebut, yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih konkret. Penyusunan tata ruang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional (RTRWN), provinsi, hingga kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten. Dengan mempertimbangkan tujuan pengembangan wilayah, tujuan penataan ruang, serta hasil analisis terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Mojokerto, maka dirumuskan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang mencakup:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten

1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan:

- Pengembangan sistem pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan untuk mendorong pemerataan wilayah.
- Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang terkoneksi dengan jaringan nasional dan regional guna mendukung potensi wilayah.
- Pelaksanaan mitigasi dan manajemen Risiko pada kawasan rawan bencana.

Strategi:

1.1. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan:

- Mengembangkan Perkotaan Kemlagi dan Dawarblandong, termasuk kawasan peruntukan industri.
- Meningkatkan aksesibilitas kawasan perkotaan di ruas Lamongan–Gedeg.
- Mengembangkan kawasan wisata buatan di wilayah utara.
- Mengembangkan kawasan agropolitan dan agrowisata.
- Meningkatkan aksesibilitas kawasan sentra pertanian.

1.2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah:

- Mengembangkan interkoneksi antar moda transportasi.
- Menyusun jaringan jalan berhierarki.
- Meningkatkan konektivitas jalan ke pusat kegiatan ekonomi (pariwisata dan industri).
- Menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pusat pemasaran.
- Mengaktifkan kembali jalur kereta api yang tidak terpakai dan membangun jalur ganda.
- Mengembangkan jaringan energi, air, dan prasarana lainnya.

1.3. Mitigasi dan Manajemen Risiko Bencana:

- Mengelola peruntukan lahan pada kawasan rawan bencana.
- Mengembangkan informasi pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat.
- Menyediakan jalur evakuasi dan tempat penampungan sementara.
- Meningkatkan sistem peringatan dini bencana.

2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan:

- Pengembangan fungsi kawasan lindung.
- Pengembangan fungsi kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan.
- Pengembangan kawasan industri dan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.

Strategi:

2.1. Kawasan Lindung:

- Mempertahankan kawasan hutan lindung dan konservasi (Tahura).
- Menjaga situs geologi–arkeologi dan kawasan cagar budaya.
- Mengembangkan wisata ramah lingkungan yang tetap menjaga fungsi kawasan lindung.

2.2. Kawasan Budidaya:

- Mengendalikan perubahan fungsi hutan produksi dan pertanian.
- Mengembangkan KP2B, hortikultura, perkebunan, perikanan, serta industri pengolahannya.
- Mewujudkan kawasan industri ramah lingkungan.
- Mengembangkan permukiman berbasis kearifan lokal dan lingkungan.
- Memenuhi kebutuhan RTH kawasan perkotaan (min. 30% dari luas kota).
- Mengamankan wilayah pertahanan.

2.3. Kawasan Industri dan Pariwisata:

- Menyediakan lahan kawasan industri.
- Mengembangkan akses jalan industri (arteri dan kolektor primer).
- Mengendalikan industri besar/menengah hanya di lokasi peruntukan industri.
- Menyediakan instalasi pengolahan limbah.
- Mengembangkan pariwisata alam, desa wisata, serta pariwisata budaya.
- Meningkatkan jaringan telekomunikasi kawasan pariwisata.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Kebijakan:

- Pengembangan pusat agropolitan dan pendukungnya.
- Pengembangan kawasan perkotaan baru.

Strategi:

3.1. Pusat Agropolitan:

- Mempertahankan lahan sawah beririgasi.
- Meningkatkan produktivitas komoditas unggulan dan sarana produksi pertanian.
- Menyediakan pasar dan pusat pengolahan produk unggulan.
- Memperluas jaringan pemasaran dan menjalin linkage system dengan pusat agropolitan provinsi.
- Meningkatkan kemampuan pengelolaan pasca panen.

3.2. Kawasan Perkotaan Baru:

- Mengembangkan infrastruktur penunjang kawasan.
- Menjadikan kawasan perkotaan baru sebagai pusat pertumbuhan.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a) Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) sektor pangan merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan kebutuhan dasar pangan bagi masyarakatnya secara berkelanjutan. Di Kabupaten Mojokerto, isu ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian, dan dinamika pembangunan wilayah.

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi agraris yang cukup besar dengan topografi dan iklim yang mendukung aktivitas pertanian. Namun, sebagaimana wilayah-wilayah lain di Jawa

Timur, kawasan ini juga menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara produksi pangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Faktor-faktor seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau industri, penurunan kesuburan tanah, serta dampak perubahan iklim menjadi ancaman nyata terhadap daya dukung lingkungan.

Daya tampung lingkungan hidup dalam konteks pangan juga sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi, distribusi pangan, dan efisiensi sistem pertanian. Ketimpangan dalam distribusi sumber daya atau ketergantungan pada komoditas tertentu dapat menyebabkan kerentanan di tingkat lokal, meskipun secara regional atau kabupaten terlihat cukup.

Untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang, pendekatan pembangunan yang memperhatikan prinsip keberlanjutan mutlak diperlukan. Ini mencakup upaya konservasi lahan produktif, penerapan pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur tata ruang, memberikan insentif bagi petani, dan melakukan edukasi publik tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologi demi keberlanjutan pangan.

Secara umum, tantangan D3TLH pangan di Kabupaten Mojokerto tidak hanya berkaitan dengan kemampuan alam dalam menyediakan pangan, tetapi juga mencerminkan bagaimana manusia mengelola ruang, sumber daya, dan pola hidupnya. Oleh karena itu, sinergi antar sektor lingkungan, pertanian, perencanaan wilayah, dan sosial menjadi kunci dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Tabel 2. 9
Status D3TLH Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kecamatan/Status	Ketersediaan Pangan (kg/ha)	Kebutuhan Pangan (kg/ha)	Selisih (kg/ha)
Kec. Bangsal	4,079,094.77	4,564,425.60	-485,330.83
Belum Terlampaui	2,389,898.16	763,904.15	1,625,994.01
Terlampaui	1,689,196.61	3,800,521.45	-2,111,324.84
Kec. Dawarblandong	8,034,128.79	4,516,041.60	3,518,087.19
Belum Terlampaui	6,853,537.12	1,028,377.59	5,825,159.53
Terlampaui	1,180,591.67	3,487,664.02	-2,307,072.34
Kec. Dlanggu	12,351,041.69	5,007,571.19	7,343,470.50
Belum Terlampaui	11,217,429.80	3,021,457.94	8,195,971.85
Terlampaui	1,133,611.89	1,986,113.25	-852,501.36
Kec. Gedeg	8,605,218.03	5,043,340.80	3,561,877.23
Belum Terlampaui	7,313,720.51	2,809,557.64	4,504,162.87
Terlampaui	1,291,497.53	2,233,783.16	-942,285.64
Kec. Gondang	18,438,097.32	3,835,814.40	14,602,282.92
Belum Terlampaui	17,258,026.61	1,533,801.35	15,724,225.26
Terlampaui	1,180,070.71	2,302,013.05	-1,121,942.35
Kec. Jatirejo	17,239,248.53	3,907,785.59	13,331,462.94
Belum Terlampaui	16,069,165.07	1,358,539.43	14,710,625.64
Terlampaui	1,170,083.47	2,549,246.16	-1,379,162.70

Kecamatan/Status	Ketersediaan Pangan (kg/ha)	Kebutuhan Pangan (kg/ha)	Selisih (kg/ha)
Kec. Jetis	14,119,369.07	7,601,644.79	6,517,724.28
Belum Terlampaui	12,497,644.65	2,769,225.62	9,728,419.04
Terlampaui	1,621,724.42	4,832,419.17	-3,210,694.75
Kec. Kemlagi	14,122,918.23	5,195,491.21	8,927,427.02
Belum Terlampaui	12,872,338.05	2,797,266.09	10,075,071.96
Terlampaui	1,250,580.18	2,398,225.12	-1,546,645.93
Kec. Kutorejo	10,969,038.70	5,877,100.79	5,091,937.91
Belum Terlampaui	9,235,788.24	1,800,945.14	7,434,843.10
Terlampaui	1,733,248.25	4,076,155.65	-2,266,093.40
Kec. Mojonyar	6,517,219.65	4,328,208.00	2,189,011.65
Belum Terlampaui	5,355,430.14	2,133,790.91	3,221,639.22
Terlampaui	1,161,789.52	2,194,417.09	-1,032,627.57
Kec. Mojosari	4,616,204.43	6,957,273.61	-2,341,069.18
Belum Terlampaui	2,054,524.55	239,992.03	1,814,532.51
Terlampaui	2,561,679.89	6,717,281.58	-4,155,601.69
Kec. Ngoro	3,552,560.96	7,399,900.81	-3,847,339.85
Belum Terlampaui	1,920,691.44	3,040,016.41	-1,119,325.00
Terlampaui	1,631,868.82	4,359,884.40	-2,727,015.58
Kec. Pacet	12,195,724.40	5,238,259.20	6,957,465.20
Belum Terlampaui	10,583,513.36	1,507,362.44	9,076,150.92
Terlampaui	1,612,211.04	3,730,896.76	-2,118,685.72
Kec. Pungging	7,297,087.29	6,983,798.40	313,288.89
Belum Terlampaui	5,051,008.79	1,350,163.73	3,700,845.06
Terlampaui	2,245,476.00	5,633,634.27	-3,388,158.27
Kec. Puri	13,085,221.29	6,904,310.41	6,180,910.88
Belum Terlampaui	10,636,559.15	4,666,815.13	5,969,744.02
Terlampaui	2,448,093.00	2,237,495.28	210,597.72
Kec. Sooko	5,218,141.13	6,441,033.61	-1,222,892.48
Belum Terlampaui	1,974,723.91	5,009,548.60	-3,034,824.69
Terlampaui	3,243,417.22	1,431,485.01	1,811,932.21
Kec. Trawas	4,232,771.50	2,738,880.00	1,493,891.50
Belum Terlampaui	2,266,570.44	410,294.44	1,855,954.91
Terlampaui	966,201.06	2,328,255.06	-1,362,054.00
Kec. Trowulan	10,221,915.53	6,673,276.79	3,548,638.74
Belum Terlampaui	8,091,107.03	1,616,262.80	6,474,844.23
Terlampaui	2,130,808.50	5,057,013.99	-2,926,205.49
Kab. Mojokerto	174,895,000.00	99,214,156.84	75,680,843.16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto Tahun 2024

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui status daya dukung dan daya tampung pangan Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto, dengan populasi sebanyak 1.148.312 jiwa pada tahun 2024, menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Berdasarkan data yang ada, total ketersediaan pangan di wilayah ini mencapai 174.895.000,00 kg/ha, sementara total kebutuhan pangan hanya sebesar 99.214.156,84 kg/ha. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki surplus pangan yang signifikan, yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, tetapi juga menyisakan

kelebihan yang dapat digunakan sebagai cadangan pangan atau dialokasikan ke wilayah lain yang membutuhkan.

Tabel 2. 10
Proyeksi Status D3TLH Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2029

Kecamatan/Status	Ketersediaan Pangan (kg/ha)	Kebutuhan Pangan (kg/ha)	Selisih (kg/ha)
Kec. Bangsal	4.079.094,77	4.587.235,20	-508.140,43
Belum Terlampaui	2.369.578,17	747.355,73	1.622.222,44
Terlampaui	1.709.516,60	3.839.879,47	-2.130.362,87
Kec. Dawarblandong	8.034.128,79	4.538.592,00	3.495.536,79
Belum Terlampaui	6.845.927,03	1.025.877,93	5.820.049,10
Terlampaui	1.188.201,76	3.512.714,08	-2.324.512,31
Kec. Dlanggu	12.351.041,69	5.032.540,79	7.318.500,90
Belum Terlampaui	11.206.565,73	3.025.626,74	8.180.938,99
Terlampaui	1.144.475,96	2.006.914,05	-862.438,10
Kec. Gedeg	8.065.218,03	5.068.690,46	2.996.527,57
Belum Terlampaui	7.300.412,55	1.763.973,86	5.536.438,43
Terlampaui	1.304.805,46	3.258.297,17	-1.953.512,71
Kec. Gondang	18.848.397,93	4.051.246,78	14.797.151,15
Belum Terlampaui	17.242.032,08	1.525.246,26	15.716.605,82
Terlampaui	1.606.365,85	2.525.970,52	-919.604,67
Kec. Jatirejo	17.239.248,53	3.927.311,99	13.311.936,54
Belum Terlampaui	16.060.899,80	1.357.037,45	14.703.862,35
Terlampaui	1.178.348,73	2.570.274,11	-1.391.925,38
Kec. Jetis	14.119.369,07	7.639.537,29	6.479.831,78
Belum Terlampaui	12.489.540,87	3.874.283,81	8.615.257,06
Terlampaui	1.629.828,20	3.765.253,48	-2.135.425,28
Kec. Kemlagi	14.122.928,09	5.221.411,21	8.901.516,88
Belum Terlampaui	12.861.569,79	3.259.392,93	9.602.176,86
Terlampaui	1.261.358,44	1.962.018,28	-700.659,84
Kec. Kutorejo	10.969.038,00	5.906.476,79	5.062.561,21
Belum Terlampaui	9.730.159,30	2.380.880,50	7.349.278,80
Terlampaui	1.238.878,70	3.525.596,29	-2.286.717,59
Kec. Mojoanyar	6.517.219,65	4.439.808,02	2.077.411,63
Belum Terlampaui	5.347.247,99	2.213.562,48	3.133.685,51
Terlampaui	1.169.971,66	2.226.245,54	-1.056.273,88
Kec. Mojosari	4.616.204,43	6.992.902,81	-2.375.698,38
Belum Terlampaui	2.054.652,45	2.083.248,13	-28.595,68
Terlampaui	2.561.551,98	4.909.654,68	-2.348.053,70
Kec. Ngoro	2.392.669,14	4.277.453,63	-1.884.784,49
Belum Terlampaui	1.552.660,14	4.015.291,15	-2.462.631,01
Terlampaui	840.009,00	262.162,48	577.846,52
Kec. Pacet	12.239.174,28	5.264.352,50	6.974.821,78
Belum Terlampaui	10.580.528,23	3.468.769,26	7.111.758,97
Terlampaui	1.658.646,05	1.795.583,24	-136.937,19
Kec. Pungging	7.297.087,29	7.018.704,00	278.383,29
Belum Terlampaui	5.040.915,64	1.416.528,63	3.624.387,02
Terlampaui	2.256.171,65	5.602.175,37	-3.346.003,72
Kec. Puri	13.085.221,29	6.938.784,01	6.146.437,28
Belum Terlampaui	10.624.987,46	2.217.211,03	8.407.776,43
Terlampaui	2.460.233,82	4.721.572,99	-2.261.339,17
Kec. Sooko	5.218.141,22	6.474.263,81	-1.256.122,59
Belum Terlampaui	3.797.013,29	1.438.611,07	2.358.402,22

Kecamatan/Status	Ketersediaan Pangan (kg/ha)	Kebutuhan Pangan (kg/ha)	Selisih (kg/ha)
Terlampau	1.421.127,92	5.035.652,74	-3.614.524,82
Kec. Trawas	4.232.771,50	2.752.530,10	1.480.240,30
Belum Terlampau	3.263.219,21	409.311,95	2.853.907,26
Terlampau	969.552,29	2.343.218,15	-1.373.665,86
Kec. Trowulan	10.221.915,53	6.706.627,19	3.515.288,34
Belum Terlampau	8.062.832,44	2.596.170,53	5.466.661,91
Terlampau	2.158.083,09	4.110.456,66	-1.952.373,57
Kab. Mojokerto	174.895.000,00	99.709.660,64	75.185.339,16

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan proyeksi Status D3TLH Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2029, secara total ketersediaan pangan diperkirakan mencapai 174,89 juta kg/ha, sementara kebutuhan pangan sebesar 99,71 juta kg/ha, sehingga terdapat surplus sekitar 75,19 juta kg/ha. Hampir semua kecamatan menunjukkan surplus pangan, terutama wilayah agraris seperti Gondang (14,80 juta kg/ha), Jatirejo (13,31 juta kg/ha), dan Dlanggu (7,32 juta kg/ha). Namun, beberapa kecamatan diproyeksikan mengalami defisit, di antaranya Mojosari (-2,38 juta kg/ha), Ngoro (-1,88 juta kg/ha), dan Sooko (-1,26 juta kg/ha).

b) Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Kabupaten Mojokerto

Daya dukung air merupakan kemampuan sumberdaya air untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan meninjau besarnya ketersediaan air. Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, air berpengaruh terhadap daya tahan, daya pikir, mental serta aktivitas sehari-hari. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar produktivitas pertanian. Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui.

Tingkat produktivitas air yang rendah karena lemahnya pengelolaan sumber daya air, ketidakmerataan distribusi serta akses terhadap air pada akhirnya akan berkontribusi kepada pemenuhan pangan serta tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan. Berikut merupakan status daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 11
Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Kabupaten Mojokerto

Kecamatan/ Status	Ketersedian Air	Kebutuhan Air	Selisih
	(M ³ /Tahun)	(M ³ /Tahun)	
Kec. Bangsal	3,424,422.57	4,564,425.61	-1,140,003.04
Belum	2,041,496.	728,863.24	1,312,633.
Terlampau	1,382,925.	3,835,562.36	-2,452,636.73
Kec Dawarblandong	6,984,871.05	4,516,041.59	2,468,829.46
Belum	5,590,089.	314,197.52	5,275,891.
Terlampau	1,394,781.	4,201,844.07	-2,807,062.36
Kec. Dlanggu	12,072,156.73	5,007,571.19	7,064,585.54
Belum	10,909,730.2	3,138,625.12	7,771,105.
Terlampau	1,162,426.	1,868,946.08	-
Kec. Gedeg	6,662,413.69	5,043,340.80	1,619,072.89
Belum	5,288,990.	2,343,772.80	2,945,217.
Terlampau	1,373,423.	2,699,568.01	-1,326,144.31
Kec. Gondang	21,457,889.53	3,835,814.40	17,622,075.13
Belum	20,302,058.3	1,666,518.57	18,635,539.7
Terlampau	1,155,831.	2,169,295.83	-1,013,464.61
Kec. Jatirejo	18,950,279.55	3,907,785.60	15,042,493.95
Belum	17,626,228.3	1,250,351.24	16,375,877.1
Terlampau	1,324,051.	2,657,434.36	-1,333,383.20
Kec. Jetis	10,159,624.99	7,601,644.79	2,557,980.20
Belum	7,993,918.	2,482,384.53	5,511,533.
Terlampau	2,165,706.	5,119,260.26	-2,953,553.32
Kec. Kemlagi	12,197,926.02	5,195,491.19	7,002,434.82
Belum	10,225,772.8	1,141,208.53	9,084,564.
Terlampau	1,972,153.	4,054,282.66	-2,082,129.53
Kec. Kutorejo	9,947,947.79	5,877,100.79	4,070,847.00
Belum	8,044,070.	1,613,860.52	6,430,210.
Terlampau	1,903,877.	4,263,240.28	-2,359,363.12
Kec. Mojoanyar	6,428,053.49	4,328,208.01	2,099,845.48
Belum	5,245,691.	1,973,238.00	3,272,453.
Terlampau	1,182,362.	2,354,970.01	-1,172,607.55
Kec. Mojosari	4,138,083.89	6,957,273.60	-2,819,189.71
Belum	2,030,940.	390,459.91	1,640,480.
Terlampau	2,107,143.	6,566,813.69	-4,459,669.93
Kec. Ngoro	4,201,250.88	7,399,900.80	-3,198,649.91
Belum	2,583,544.	94,942.59	2,488,602.
Terlampau	1,617,706.	7,304,958.21	-5,687,251.92
Kec. Pacet	12,332,163.42	5,238,259.20	7,093,904.23
Belum	10,434,534.4	1,016,010.20	9,418,524.
Terlampau	1,897,628.	4,222,249.00	-2,324,620.01
Kec. Pungging	7,426,814.25	6,983,798.40	443,015.84
Belum	5,338,689.	1,448,395.07	3,890,294.
Terlampau	2,088,124.	5,535,403.34	-3,447,278.86
Kec. Puri	9,120,211.42	6,904,310.40	2,215,901.03
Belum	6,982,293.	1,725,728.78	5,256,564.
Terlampau	2,137,917.	5,178,581.62	-3,040,663.80
Kec. Sooko	3,574,633.36	6,441,033.61	-2,866,400.25
Belum	1,873,792.	360,720.04	1,513,072.
Terlampau	1,700,840.	6,080,313.58	-4,379,472.75

Kecamatan/ Status	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air	Selisih
	(M ³ /Tahun)	(M ³ /Tahun)	
Kec. Trawas	4,331,007.69	2,738,880.00	1,592,127.69
Belum	3,178,808.	217,634.60	2,961,173.
Terlampau	1,152,199.	2,521,245.40	-1,369,045.96
Kec. Trowulan	8,140,260.48	6,673,276.80	1,466,983.68
Belum	5,961,312.	500,252.50	5,461,060.
Terlampau	2,178,947.	6,173,024.30	-3,994,076.65
Kab. Mojokerto	161,550,010.81	99,214,156.79	62,335,854.02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

dapat disimpulkan status daya dukung dan daya tampung air di Kabupaten Mojokerto. Dengan populasi sebesar 1.148.312 jiwa pada tahun 2024, Kabupaten Mojokerto menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi kebutuhan air masyarakatnya. Data menunjukkan bahwa total ketersediaan air di wilayah ini mencapai 161,550,010.81 m³, sementara total kebutuhan air hanya sebesar 99,214,156.79 m³. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Mojokerto memiliki surplus air yang signifikan, yang tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Tabel 2. 12

Proyeksi Status D3TLH Air Kabupaten Mojokerto Tahun 2029

Kecamatan/Status	Jumlah Populasi Grid	Ketersediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Selisih
Kec. Bangsal	53.093	3.424.422,57	4.587.235,21	-1.162.812,64
Belum Terlampaui	8.324	2.028.191,72	719.175,27	1.309.016,45
Terlampau	44.769	1.396.230,85	3.868.059,94	-2.471.829,09
Kec. Dawarblandong	52.530	6.984.871,05	4.538.591,99	2.446.279,06
Belum Terlampaui	3.655	5.590.089,33	315.766,44	5.274.322,90
Terlampau	48.875	1.394.781,72	4.222.825,56	-2.828.043,84
Kec. Dlanggu	58.247	12.072.156,73	5.032.540,79	7.039.615,94
Belum Terlampaui	36.345	10.895.724,76	3.140.229,73	7.755.495,03
Terlampau	21.902	1.176.431,98	1.892.311,07	-715.879,09
Kec. Gedeg	58.664	6.662.413,69	5.068.569,60	1.593.844,09
Belum Terlampaui	26.785	5.247.867,73	2.314.243,47	2.933.624,27
Terlampau	31.879	1.414.545,96	2.754.326,14	-1.339.780,18
Kec. Gondang	44.618	21.457.889,53	3.854.995,12	17.602.894,41
Belum Terlampaui	19.372	20.300.919,15	1.673.709,40	18.627.209,75
Terlampau	25.246	1.156.970,38	2.181.285,80	-1.024.315,42
Kec. Jatirejo	45.455	18.960.279,55	3.927.312,00	15.032.967,55
Belum Terlampaui	14.544	17.628.238,38	1.256.598,08	16.371.640,30
Terlampau	30.911	1.324.051,17	2.670.713,91	-1.346.661,26
Kec. Jetis	88.421	10.159.624,99	7.639.574,39	2.520.050,60
Belum Terlampaui	28.875	7.993.918,05	2.155.782,06	5.838.135,99

Kecamatan/Status	Jumlah Populasi Grid	Ketersediaan Air (M3/Tahun)	Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Selisih
Terlampau	59.546	2.165.706,94	5.144.803,31	-2.979.096,37
Kec. Kemlagi	60.433	12.197.926,02	5.221.411,19	6.976.514,83
Belum Terlampau	13.114	10.833.103,88	1.138.008,52	9.695.095,36
Terlampau	47.319	1.364.822,14	4.083.402,67	-2.718.580,53
Kec. Kutorejo	68.362	9.947.947,79	5.906.476,09	4.041.471,70
Belum Terlampau	18.593	8.028.645,14	1.606.469,67	6.422.175,47
Terlampau	49.769	1.919.302,65	4.300.007,12	-2.380.704,47
Kec. Mojoanyar	50.345	6.428.053,49	4.349.808,01	2.078.245,48
Belum Terlampau	22.751	5.228.372,28	1.965.725,70	3.262.646,58
Terlampau	27.594	1.199.681,21	2.384.082,31	-1.184.401,10
Kec. Mojosari	80.927	4.138.083,69	6.992.902,81	-2.854.008,91
Belum Terlampau	4.372	2.016.329,66	377.768,51	1.638.561,15
Terlampau	76.555	2.121.754,03	6.614.324,29	-4.492.570,26
Kec. Ngoro	86.074	4.201.250,88	7.736.595,93	-3.535.342,71
Belum Terlampau	1.104	2.583.544,59	95.415,93	2.488.128,66
Terlampau	84.970	1.617.706,29	7.341.377,66	-5.723.671,37
Kec. Pacet	60.930	12.332.163,42	5.264.352,00	7.067.811,43
Belum Terlampau	11.778	10.431.080,97	1.017.610,42	9.413.470,55
Terlampau	49.152	1.901.082,45	4.246.741,58	-2.345.659,14
Kec. Pungging	81.235	7.426.814,25	7.018.704,00	408.110,25
Belum Terlampau	16.785	5.333.309,45	1.450.253,00	3.883.056,45
Terlampau	64.450	2.093.504,80	5.568.451,00	-3.474.946,20
Kec. Puri	80.310	9.120.211,42	6.938.784,00	2.181.427,43
Belum Terlampau	19.872	6.964.934,08	1.716.933,85	5.248.000,23
Terlampau	60.438	2.155.277,33	5.221.850,15	-3.066.572,82
Kec. Sooko	74.922	3.573.636,36	6.472.355,21	-2.898.632,85
Belum Terlampau	4.196	1.873.792,54	362.524,87	1.511.267,67
Terlampau	70.726	1.700.840,82	6.110.795,34	-4.409.955,08
Kec. Trawas	31.858	3.178.808,25	2.752.518,63	426.289,62
Belum Terlampau	2.531	3.178.808,25	218.719,34	2.960.088,91
Terlampau	29.327	1.152.199,44	2.533.811,86	-1.381.612,42
Kec. Trowulan	77.628	8.140.260,48	6.706.627,20	1.433.633,28
Belum Terlampau	5.819	5.961.312,91	1.453.256,15	4.508.056,76
Terlampau	71.804	2.178.947,65	6.203.874,62	-4.024.926,97
Kab. Mojokerto	1.154.047	161.550.010,81	99.709.660,79	61.840.350,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Meskipun mengalami sedikit penurunan surplus dibandingkan tahun 2024, tetapi ketersediaan air ini tetap mampu memenuhi kebutuhan air di wilayah. Dengan adanya surplus ini, kita bisa memastikan bahwa kebutuhan air di wilayah yang mengalami defisit dapat terpenuhi. Surplus air yang ada di kecamatan-kecamatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjaga stabilitas air di seluruh Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2029, proyeksi menunjukkan sedikit kenaikan defisit air yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkatkan sesuai dengan kebutuhan air. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengelola kebutuhan air agar tercapai keseimbangan yang lebih baik antara ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Mojokerto

c) Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Kabupaten Mojokerto

Sebelum menentukan daya dukung dan daya tampung lahan permukiman di Kabupaten Mojokerto, terlebih dahulu ditentukan kawasan yang dapat dibangun maupun kawasan yang tidak dapat dibangun yang diberi nama *Negative List*. Kawasan- kawasan ini dikecualikan dari pembangunan karena memiliki nilai ekologis, budaya, atau Risiko bencana yang tinggi. Penentuan Negative List dilakukan melalui analisis berbagai kriteria, seperti:

- Kawasan Lindung: Hutan lindung, taman nasional, dan area konservasi lainnya yang berfungsi melindungi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem.
- Kawasan Resapan Air: Daerah yang berperan penting dalam siklus hidrologi, seperti lahan basah dan cekungan air tanah.
- Kawasan Rawan Bencana: Wilayah dengan Risiko tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan gempa bumi.
- Kawasan Budaya dan Sejarah: Situs arkeologi, bangunan bersejarah, dan area yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Jumlah dan jenis kawasan yang termasuk dalam negatif list bersifat opsional dan disesuaikan berdasarkan ketersediaan data serta kesepakatan dengan Dinas terkait.

Penyesuaian ini penting agar perhitungan daya dukung lahan tetap sesuai dan dapat diterapkan dengan kondisi lokal. Proses ini melibatkan dialog dan koordinasi antara perencana, ahli lingkungan, dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa semua aspek penting terakomodasi

Tabel 2. 13
Status Daya Dukung Dan Daya Tampung Lahan Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Jumlah Penduduk (2029)	Ketersediaan Lahan (Ha)	Kebutuhan Lahan Rumah Layak (Ha)	Selisih (Ha)	Status
Bangsals	53,093	3,767.25	47.78	3,719.47	Belum Terlampaui
Dawarblandong	52,53	10,363.85	47.28.00	10,316.58	Belum Terlampaui
Dlanggu	58,247	7,079.41	52.42.00	7,026.98	Belum

Kecamatan	Jumlah Penduduk (2029)	Ketersediaan Lahan (Ha)	Kebutuhan Lahan Rumah Layak (Ha)	Selisih (Ha)	Status
					Terlampai
Gedeg	58,664	2,467.22	52.80	2,414.43	Belum Terlampai
Gondang	44,618	24,717.91	40.16.00	24,677.75	Belum Terlampai
Jatirejo	45,455	23,426.38	40.91	23,385.47	Belum Terlampai
Jetis	88,421	9,555.39	79.58.00	9,475.81	Belum Terlampai
Kemlagi	60,433	8,700.10	54.39.00	8,645.71	Belum Terlampai
Kutorejo	68,362	5,009.67	61.53.00	4,948.15	Belum Terlampai
Mojoanyar	50,345	3,730.85	45.31.00	3,685.54	Belum Terlampai
Mojosari	80,927	3,197.08	72.83	3,124.25	Belum Terlampai
Ngoro	86,074	7,906.71	77.47.00	7,829.24	Belum Terlampai
Pacet	60,93	20,844.71	54.84	20,789.87	Belum Terlampai
Pungging	81,235	5,418.45	73.11.00	5,345.34	Belum Terlampai
Puri	80,31	6,401.12	72.28.00	6,328.84	Belum Terlampai
Sooko	74,922	2,470.44	67.43.00	2,403.01	Belum Terlampai
Trawas	31,858	20,663.37	28.67	20,634.70	Belum Terlampai
Trowulan	77,623	6,717.85	69.86	6,647.99	Belum Terlampai

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kebutuhan lahan untuk permukiman menurut standar lahan yang layak masih belum terlampai di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto saat ini masih mampu menampung jumlah penduduk yang ada. Selanjutnya, dilakukan proyeksi terhadap jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto hingga tahun 2029, yang diperkirakan mencapai 1.262.302 jiwa.

Tabel 2. 14

Proyeksi Status D3TLH Lahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2029	Ketersediaan Lahan	Kebutuhan Rumah Layak (Ha)	Selisih	Status
Bangsals	53,093	3,767.25	47.78	3,719.47	Belum Terlampai
Dawarblando	52,53	10,363.85	47.28.00	10,316.58	Belum Terlampai
Dlanggu	58,247	7,079.41	52.42.00	7,026.98	Belum Terlampai
Gedeg	58,664	2,467.22	52.80	2,414.43	Belum Terlampai
Gondang	44,618	24,717.91	40.16.00	24,677.75	Belum Terlampai

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2029	Ketersediaan Lahan	Kebutuhan Rumah Layak (Ha)	Selisih	Status
Jatirejo	45,455	23,426.38	40.91	23,385.47	Belum Terlampaui
Jetis	88,421	9,555.39	79.58.00	9,475.81	Belum Terlampaui
Kemlagi	60,433	8,700.10	54.39.00	8,645.71	Belum Terlampaui
Kutorejo	68,362	5,009.67	61.53.00	4,948.15	Belum Terlampaui
Mojonanyar	50,345	3,730.85	45.31.00	3,685.54	Belum Terlampaui
Mojosari	80,927	3,197.08	72.83	3,124.25	Belum Terlampaui
Ngoro	86,074	7,906.71	77.47.00	7,829.24	Belum Terlampaui
Pacet	60,93	20,884.71	54.84	20,829.87	Belum Terlampaui
Pungging	81,235	5,418.45	73.11.00	5,345.34	Belum Terlampaui
Puri	80,31	6,401.12	72.28.00	6,328.84	Belum Terlampaui
Sooko	74,922	2,470.44	67.43.00	2,403.01	Belum Terlampaui
Trawas	31,858	20,663.37	28.67	20,634.70	Belum Terlampaui
Trowulan	77,623	6,717.85	69.86	6,647.99	Belum Terlampaui
Jumlah	1,154,048	73,679.04	1,038.64	72,640.40	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kebutuhan lahan untuk rumah layak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kecamatan Jetis dan Kecamatan Ngoro mengalami peningkatan luas lahan terbesar, yang sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tertinggi di kedua kecamatan tersebut. Secara keseluruhan, peningkatan kebutuhan lahan di tingkat kabupaten pada tahun 2029 tidak signifikan dibandingkan tahun eksisting, karena proyeksi penduduk tidak menunjukkan peningkatan yang besar pada tahun 2029.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, Kabupaten Mojokerto menetapkan arah strategis untuk memperkuat ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan sebagai bagian dari upaya meningkatkan resiliensi daerah terhadap perubahan iklim, tekanan lingkungan, serta dinamika sosial ekonomi.

Di bidang energi, Kabupaten Mojokerto mendorong pemanfaatan energi terbarukan secara progresif, seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biogas, guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta memperluas akses energi bersih di pedesaan. Pemanfaatan energi alternatif berbasis potensi lokal ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi daerah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2. 15
Banyaknya Tenaga Listrik yang Disalurkan, Jumlah Pelanggan dan Nilai Produksi Per Bulan di
Kabupaten Mojokerto, 2024

Bulan	Listrik Disalurkan (KWh)	Jumlah Pelanggan	Nilai Produksi (Rp)
Januari	216,052,589	361,187	235,471,835,822
Februari	194,042,714	361,897	211,241,011,493
Maret	217,902,836	362,6	237,331,769,070
April	179,648,394	363,324	195,188,460,708
Mei	214,023,007	364,187	233,217,273,942
Juni	214,040,769	365,05	232,588,424,983
Juli	219,942,389	365,998	238,979,493,992
Agustus	211,621,889	366,957	230,014,129,382
September	207,176,198	367,811	225,018,007,192
Oktober	228,127,011	368,746	248,039,024,617
November	208,428,014	369,514	226,069,806,585
Desember	215,061,998	370,428	233,572,153,469
Jumlah	2.526.067.808	4.387.699	2.746.731.391.255

Sumber:BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data di atas penggunaan listrik yang tersalurkan fluktuatif pada setiap bulan serta keterjangkauan terhadap listrik sudah merata di wilayah Kabupaten Mojokerto. Peningkatan jumlah listrik yang disalurkan ke rumah tangga juga mencerminkan peningkatan akses terhadap energi, yang merupakan indikator pembangunan dan kesejahteraan. Namun, konsumsi listrik yang tinggi juga perlu disertai dengan kesadaran penggunaan energi secara bijak dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya fosil.

Dalam pengelolaan sumber daya air, Kabupaten Mojokerto menempatkan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), peningkatan infrastruktur irigasi, dan optimalisasi sumber air baku sebagai prioritas. Upaya pengelolaan air secara terpadu dari hulu ke hilir bertujuan untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi pertanian, rumah tangga, industri, serta menjaga ekosistem alami. Strategi adaptasi terhadap Risiko kekeringan dan banjir juga dikembangkan melalui sistem peringatan dini, pembangunan embung, revitalisasi rawa, dan perlindungan kawasan resapan air.

Tabel 2. 16
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten
Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	99,2	98,37	97,05	98,9	97,46

Sumber : BPS Jawa Timur, Tahun 2024

Di sektor pangan, Kabupaten Mojokerto berkomitmen memperkuat kemandirian pangan melalui diversifikasi produksi pertanian, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan dan teknologi tepat guna. Pemanfaatan lahan-lahan potensial, dukungan terhadap pertanian organik, serta pengembangan cadangan pangan daerah menjadi langkah nyata untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang, sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.

Tabel 2. 17

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	85,92	84,46	84,06	86,7	87,32

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 18

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten Mojokerto (Persen), 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan	5,93	6,6	7,65	6,61	6,94

Sumber: Badan Pangan Nasional Tahun 2024

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian serius untuk mendukung peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2022–2023, timbulan sampah tahunan mengalami peningkatan dari 168.322,61 ton menjadi 172.984 ton. Namun, persentase sampah terkelola justru menurun dari 55,82% menjadi 43,53%, mengindikasikan perlunya perbaikan sistem pengelolaan sampah. *Recycling rate* yang stagnan di kisaran 25% juga menunjukkan potensi penguatan ekonomi sirkular yang belum termanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. 19

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,19	69,75	62,92	60,2	64,43
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	60,00	60,00	61,33	54,71	58
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,26	90,18	89,37	71,27	70,86
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	49,20	48,71	n.a	49,31	49,31

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto

Pencemaran air di Kabupaten Mojokerto masih terjadi akibat pengelolaan limbah rumah tangga, terutama lumpur tinja, yang belum optimal. Sebesar 2% penduduk masih melakukan buang air besar sembarangan (BABS), sementara akses sanitasi layak baru mencapai 87,3% dan akses aman air limbah domestik masih 0%. Pencemaran juga bersumber dari pembuangan isi tangki septik yang tidak layak (0,5%) serta saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang tidak aman (99,97%). Dari sisi industri, hasil pengawasan terhadap 200 perusahaan pada 2023 menunjukkan banyak pelaku usaha belum memenuhi persyaratan teknis dan perizinan pengelolaan air limbah, IPAL tidak sesuai ketentuan, serta pembuangan langsung ke drainase tanpa pengolahan. Hal ini berkontribusi pada tingginya kadar BOD di perairan (6–9 ppm, kategori tercemar) dan menurunnya kualitas lingkungan.

Selain itu, pencemaran udara dan penurunan indeks kualitas udara (IKU) dipengaruhi oleh emisi sektor transportasi dan industri yang belum tertangani optimal, serta rendahnya capaian pengurangan (19,20%) dan penanganan (26,90%) timbunan sampah. Penurunan indeks kualitas lahan (IKL) disebabkan oleh kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau dan laju alih fungsi lahan yang tinggi, serta penanaman vegetasi yang belum mampu menggantikan vegetasi yang hilang. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya upaya terintegrasi dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri, pengendalian emisi, peningkatan pengelolaan sampah, serta perlindungan lahan dan vegetasi.

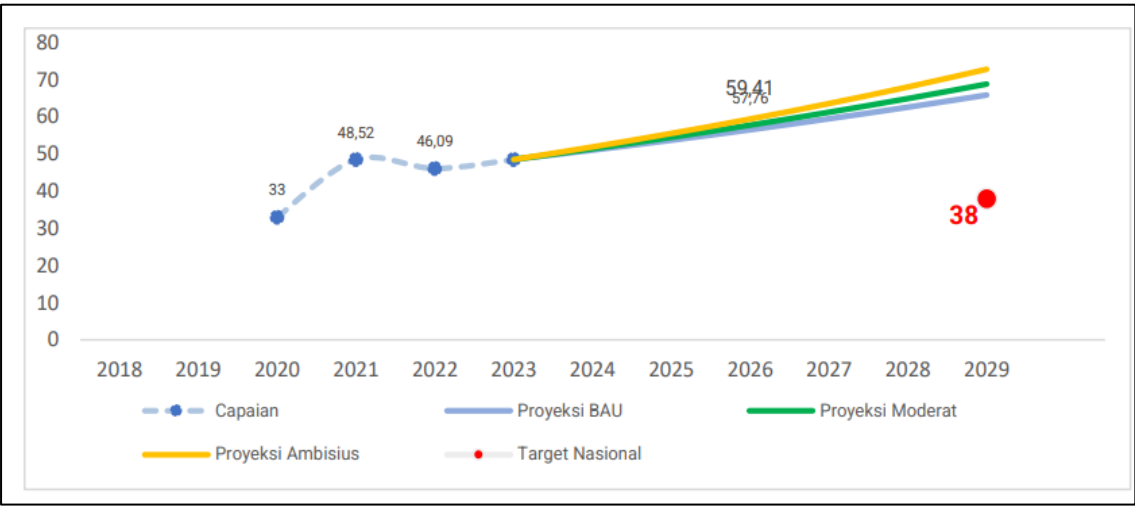
Upaya pengendalian pencemaran perlu didukung oleh peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah dan partisipasi aktif masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mojokerto yang berada pada kategori sedang (64,43 pada 2024) menegaskan bahwa sektor udara dan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama. Di sisi lain, meskipun akses sanitasi aman secara nasional telah mencapai 80%, implementasinya di tingkat kabupaten perlu diperkuat untuk memastikan pengolahan limbah domestik yang berkelanjutan. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah juga perlu ditingkatkan guna mengurangi sampah yang tidak terangkut dan berpotensi mencemari lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kebijakan berbasis indikator lingkungan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Program edukasi lingkungan, seperti pemilahan sampah dan pengembangan bank sampah, dapat meningkatkan persentase pengurangan sampah di sumber. Selain itu, pemanfaatan bahan baku daur ulang, seperti plastik dan kertas berpotensi mendorong pertumbuhan industri hijau dan menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan memperkuat fondasi ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan pendekatan terpadu yang mencakup peningkatan infrastruktur, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Mojokerto dapat mengoptimalkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Integrasi data lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil berbasis bukti dan mampu menjawab tantangan lingkungan secara komprehensif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

b) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Fasilitas pengolahan sampah dibangun untuk mewadahi proses pengolahan sampah. Aktivitas pengolahan sampah sendiri pada umumnya dapat mencakup pemilahan, pencacahan sampah organik, pengomposan, penyaringan kompos, pengepakan kompos, dan pencacahan sampah anorganik sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Faktor pendorongnya meliputi kesesuaian arah kebijakan dengan target nasional, intervensi pemerintah yang mendukung peningkatan pengolahan dan daur ulang sampah, penerapan konsep ekonomi sirkular melalui pengelolaan terintegrasi hulu–hilir, keterlibatan multi pihak, serta kemajuan teknologi pengelolaan sampah. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain keterbatasan infrastruktur pengolahan yang belum merata di seluruh wilayah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah, minimnya pendanaan dan investasi swasta, koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Capaian Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2020-2023 mengalami fluktuatif akan tetapi pada tahun 2023 terjadi kenaikan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 2 Proyeksi timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)

Tabel 2. 20

Capaian Pengelolaan Sampah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024

Tahun	Provinsi	Kabupaten /Kota	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) (A)	Pengurang an Sampah Tahunan (ton/tahun) (B)	% Pengur angan Sampa h (B/A)	Penangan an Sampah Tahunan (ton/tahun) (C)	% Penangan an Sampah (C/A)	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun) (B+C)	% Sampah Terkelola (B+C)/A	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun) (D)	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun) (E)	Recycl ing Rate(D+E)/ A
2024	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	164.117,17	48.454,40	29,52	38.622,80	23,53	87.077,20	53,06	38.662,50	306,19	23,74
2023	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	172.984,00	35.088,29	20,28	39.704,20	22,95	74.792,49	43,24	34.431,60	7.141,92	24,03
2022	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	168.322,61	44.680,60	26,54	49.268,72	29,27	93.949,32	55,82	43.598,50		25,90

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

c) Presentase Rumah tangga dengan sanitasi layak

Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak adalah indikator yang mengukur sejauh mana rumah tangga di suatu wilayah memiliki dan menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, lingkungan, dan teknis sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan nasional dan komitmen global.

Tabel 2. 21

Presentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	%	91,02	87,34	89,87	89,38	91,14

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data di atas capaian akses sanitasi layak di Kabupaten Mojokerto masih berada pada kisaran yang relatif tinggi, untuk menjaga konsistensi tersebut, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan intervensi sanitasi sangat diperlukan agar target nasional menuju sanitasi layak dan aman dapat tercapai secara berkelanjutan.

d) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga disebut mengakses sanitasi yang aman (*safely managed*) apabila fasilitas sanitasi digunakan hanya ART sendiri dengan jenis kloset berupa leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 22
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0,02 %	0,02%	0,02%	0,02%	0,08%

Sumber: DPUPR Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2024 menunjukkan upaya dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan rumah tangga dengan sanitasi aman. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keluarga dan mencegah penyebaran penyakit serta melindungi sumber daya air dan tanah.

e) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: - Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan - Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Tahun 2023. Dengan data capaian tahun 2024 akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 17,11%.

f) Proporsi Rumah Tangga yang melakukan Pengelolaan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari - hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selanjutnya yang dimaksud dengan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 (dua) kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam 3 (tiga) atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam 3 (tiga) fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Proporsi rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 23

Proporsi Rumah Tangga yang melakukan Pengelolaan Sampah

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Proporsi Rumah Tangga yang melakukan Pengelolaan Sampah	55,51%	51,44%	57,38%	44,75%	51,10%

Sumber: DLH Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data capaian di atas proporsi rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah terjadi kenaikan namun juga terjadi penurunan. Selain itu Proporsi rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pendorongnya antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, adanya dukungan program pemerintah dan komunitas seperti bank sampah, serta ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat desa atau kelurahan. Namun, capaian indikator ini juga masih terkendala oleh rendahnya kebiasaan memilah sampah di masyarakat, keterbatasan fasilitas pengelolaan, lemahnya pengawasan, serta kebutuhan biaya operasional yang belum sepenuhnya tertutupi.

6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi fondasi utama dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto. Resiliensi ini menuntut kemampuan adaptasi, respons cepat, dan pemulihan efektif di tengah perubahan iklim yang tidak menentu. Dengan integrasi antara mitigasi bencana, konservasi lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan serta partisipatif, seluruh elemen masyarakat dapat terlibat aktif memperkuat ketahanan daerah. Peningkatan ketangguhan ini akan menurunkan tingkat kerentanan, mempercepat pemulihan pasca-bencana, dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dalam menghadapi tantangan masa depan.

Dalam upaya mengurangi Risiko bencana dan memperkuat ketangguhan daerah, Kabupaten Mojokerto memerlukan penanganan yang terstruktur dan sistematis. Kabupaten ini memiliki tingkat Risiko tinggi terhadap tanah longsor, puting beliung, serta kebakaran hutan dan lahan, sementara banjir dan kekeringan berada pada kategori Risiko sedang. Untuk itu, penguatan regulasi menjadi hal krusial, termasuk penyusunan aturan tegas terkait aktivitas pertambangan di daerah rawan seperti Gondang, Pacet, Dawar, dan Ngoro, guna mencegah kerusakan lingkungan yang berujung pada peningkatan Risiko bencana. Selain itu, perlu ada mekanisme pembagian peran antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pengurangan Risiko, serta evaluasi prosedur penanganan darurat untuk meningkatkan

efektivitas tanggap bencana.

Perencanaan penanggulangan bencana perlu disusun secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor dan pemangku kepentingan. Ini mencakup pengembangan sistem pemantauan potensi bencana, penguatan dokumen kajian Risiko lintas batas, penyusunan rencana aksi berbasis data Risiko, serta integrasi pengelolaan Risiko bencana dalam perencanaan pembangunan seperti dalam penyusunan RDTR. Upaya ini juga diperkuat melalui kebijakan konservasi lingkungan hidup, misalnya pemulihan daerah aliran sungai untuk mitigasi banjir dan kekeringan.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas komunitas lokal sangat diperlukan. Pembentukan dan penguatan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat desa hingga kabupaten menjadi prioritas, untuk mempercepat desentralisasi kegiatan pengurangan Risiko dan menjembatani kendala birokrasi. Pemberdayaan ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah, memperkuat kapasitas adaptif, dan melibatkan dunia usaha dalam perlindungan sektor ekonomi pascabencana.

Rekomendasi berbasis jenis ancaman juga menjadi bagian integral strategi ini. Untuk banjir, langkah-langkah yang disarankan meliputi pemulihan ekosistem sungai secara partisipatif, normalisasi sungai, pembangunan pintu air, kampanye menanam air, pembentukan kelompok PRB di kawasan hulu, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Untuk cuaca ekstrem, dilakukan sosialisasi mitigasi dan advokasi aktif di tingkat desa. Dalam menghadapi kekeringan, perlu pembentukan kelompok konservasi hulu serta peningkatan sistem ramalan iklim melalui kolaborasi dengan BMKG. Sedangkan untuk kebakaran hutan dan lahan, dibutuhkan penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan mitigasi kebakaran, pemberian sanksi tegas kepada pelanggar, serta sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar

a) Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Mojokerto meliputi kawasan yang rawan terhadap bencana tanah longsor (rawan gerakan tanah), banjir dan kekeringan.

Bencana Longsor

Longsor tanah dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai

tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relatif tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah.

Sebaran kawasan rawan tanah longsor meliputi 31 desa di 4 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Jaterejo : Desa Lebak Jabung, Jembul, Rejosari, Tawangrejo Mojogeneng, Sumberjati, Manting.
- b. Kecamatan Gondang : Desa Gumeng, Begaganlimo, Kalikatur dan Ngembat.
- c. Kecamatan Pacet : Desa Pacet, Padusan, Claket, Cembor, Mojokembang, Pandanarum, Kemiri, Nogosari, Kesimantengah, Kembangbelor dan Sajen.
- d. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame, Belik, Duyung, Kesiman, Selotapak, Tamiajeng, Penanggungan, Kedungudi dan Seloliman.

Bencana Banjir

Bencana banjir yang pernah terjadi di Kabupaten Mojokerto terdapat 72 desa di 15 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Dawarblandong : Desa Banyulegi, Pulorejo, Pucuk dan Talunblandong
2. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojojajar, Mojowiryo, Mojowatesrejo dan Mojogebang.
3. Kecamatan Jetis : Desa Bandung, Kupang, Mojolebak dan Perning.
4. Kecamatan Gedeg : Desa Pagerluyung, Kemantren dan Baratwetan.
5. Kecamatan Mojoanyar : Desa Sadartengah, Gebangmalang, Jabon, Gayaman, Suberjati, Wunut, Kwatu, Lengkong, Jumeneng dan Ngarjo.
6. Kecamatan Trowulan : Desa Tawang Sari, Watesumpak, Bicak, Balongwono dan Pakis.
7. Kecamatan Sooko : Desa Ngingasrembyong, Sooko, Brangkal, Karangkedawang, Modongan, Kedungmaling dan Wringinrejo.
8. Kecamatan Puri : Desa Kintelan, Banjaragung, Kenanten, Kebonagung dan Sumbergirang.
9. Kecamatan Bangsal : Desa Pekuwon dan Salen
10. Kecamatan Mojosari : Desa Modopuro, Randubango, Jotangan, Kedunggempol, Mojosulur, Leminggir dan Ngimbangan.
11. Kecamatan Pungging ; Desa Watukenongo, Taunggalpager, Balongmasin, Ngrame, Banjartanggul dan Kembangringgit.
12. Kecamatan Ngoro : Desa Tambakrejo, Sedati, Jasem, Wonosari dan Bandarsari.
13. Kecamatan Jatirejo : Desa Dinoyo
14. Kecamatan Gondang : Desa Kalikatur, Bakalan, Karangkuten, Padi, Kemasantani dan Dilem.
15. Kecamatan Pacet : Desa Sajen, Pacet dan Wiyu.

Kekeringan

Kawasan rawan kekeringan meliputi 18 desa di 6 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Dawarblandong: Desa Banyulegi, Pulorejo, Pucuk, Temuiren, Madureso, Gunungan dan Cinandang.
- b. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojopilang, Mojowono dan Mojokusumo.
- c. Kecamatan Jetis : Desa Lakardowo, Kupang dan Sidorejo.
- d. Kecamatan Mojoanyar : Desa Kepuhanyar.
- e. Kecamatan Kutorejo : Desa Jiyu.
- f. Kecamatan Ngoro : Desa Kutogirang, Kunjorowesi dan Mandu Manggung Gajah.

Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung meliputi 49 desa di 18 kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Dawarblandong: Desa Sumberwuluh dan Jatiworo.
- b. Kecamatan Kemlagi : Desa Tanjungan.
- c. Kecamatan Jetis : Desa Sidorejo, Parengan, Kupang dan Ngabar.
- d. Kecamatan Gedeg : Desa Beratwetan, Pagerejo, Balongsari dan Batankrajan.
- e. Kecamatan Mojoanyar : Desa Jabon, Lengkong, Sumberjati, Gayaman, Gebangmalang, Kwatu dan Sadartengah.
- f. Kecamatan Trowulan : Desa Jatipasar, Panggih, Beloh, Bicak, Temon, Jambuwok, Beijjong, Domas dan Balongwono.
- g. Kecamatan Sooko : Desa Tempuran, Klintorejo, Sooko, Brangkal dan Gemekan.
- h. Kecamatan Puri : Desa Ketemasdungus, Puri, Tangunan, Mlaten, Medali dan Balongmojo.
- i. Kecamatan Bangsal : Desa Gayam, Pacing, Sumberwono dan Bangsal.
- j. Kecamatan Mojosari : Desa Pekukuhan, Randubango, Jotangan, Modopuro, Awang-awang, Belahantengah dan Sumbertanggul.
- k. Kecamatan Pungging : Desa Tanggulpager, Tempuran, Jabontegal dan Watukenongo.
- l. Kecamatan Ngoro : Desa Sedati, Jasem, Manduro Manggung Gajah, Kutogirang, Kunjorowesi dan Watonmasjedong.
- m. Kecamatan Dlanggu : Desa Kalen, Kedunggede, Segunung, Talok, Sambilawang, Tumapel dan Sumberkarang.
- n. Kecamatan Kutorejo : Desa Jiyu, Simbarringin, Singowangi, Wonodadi dan Kaligoro.
- o. Kecamatan Jatirejo : Desa Sumberjati, Bleberan dan Kumintir.
- p. Kecamatan Gondang : Desa Bening, Padi dan Kebontunggul.
- q. Kecamatan Pacet : Desa Pacet, Kembangbelor, Petak dan Sajen.

- r. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame dan Kedungudi.

Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi :

- a. Kecamatan Dawarblandong: Desa Suru, Cendoro dan Jatirowo.
- b. Kecamatan Kemlagi : Desa Mojorejo.
- c. Kecamatan Jetis : Desa Lakardowo.
- d. Kecamatan Jatirejo : Desa Jembul dan Tawangrejo.
- e. Kecamatan Gondang : Desa Gumeng, Ngembat, Begaganlimo dan Dilem.
- f. Kecamatan Ngoro : Desa Kunjorowesi.
- g. Kecamatan Trawas : Desa Ketapanrame, Kedungudi dan Seloliman.

Tabel berikut menyajikan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang disusun berdasarkan analisis potensi ancaman, tingkat kerentanan, kapasitas penanggulangan, dan perhitungan tingkat Risiko pada masing-masing jenis bencana.

Tabel 2. 24
Tingkat Bahaya pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten

Kecamatan	Cuaca Ekstrem	Banjir	Tanah Longsor	Kekeringan	Karhutla	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Multihazard
Dawarblandong	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	-	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, TANAH LONGSOR, GEMPA BUMI
Gondang	TINGGI	SEDANG	TINGGI	SEDANG	TINGGI	TINGGI	RENDAH	CUACA EKSTREM, TANAH LONGSOR, KARHUTLA, BANJIR BANDANG
Kemlangi	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	-	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, TANAH LONGSOR, GEMPA BUMI
Jatirejo	TINGGI	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI	TINGGI	RENDAH	CUACA EKSTREM, TANAH LONGSOR, KARHUTLA, BANJIR BANDANG
Ngoro	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI	RENDAH	CUACA EKSTREM, BANJIR, TANAH LONGSOR, BANJIR BANDANG
Pacet	RENDAH	SEDANG	TINGGI	RENDAH	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TANAH LONGSOR, KARHUTLA, BANJIR BANDANG
Pungging	TINGGI	SEDANG	-	RENDAH	SEDANG	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM,

Kecamatan	Cuaca Ekstrem	Banjir	Tanah Longsor	Kekeringan	Karhutla	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Multihazard
								BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Bangsals	TINGGI	TINGGI	-	RENDAH	-	-	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, GEMPA BUMI
Mojoanyar	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	-	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Puri	TINGGI	SEDANG	-	SEDANG	-	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Trowulan	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Sooko	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	-	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Gedeg	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	-	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Jetis	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Mojosari	TINGGI	TINGGI	-	RENDAH	-	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Kutorejo	TINGGI	SEDANG	-	RENDAH	-	-	TINGGI	CUACA EKSTREM, GEMPA BUMI
Dlanggu	TINGGI	SEDANG	-	SEDANG	-	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI
Trawas	RENDAH	-	-	SEDANG	RENDAH	TINGGI	RENDAH	BANJIR BANDANG
Kab. Mojokerto	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	TINGGI	TINGGI	CUACA EKSTREM, BANJIR, TANAH LONGSOR, BANJIR BANDANG, GEMPA BUMI

Sumber: BPBD Kabupaten Mojokerto 2024

b) Indeks Risiko Bencana

Kerawanan, dampak bencana, potensi kehilangan atau kerugian Risiko bencana dapat diukur dengan menggunakan Indeks Risiko Bencana. Indeks Risiko bencana dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks Risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan

bencana pada periode tertentu. Interval/skala penilaian Indeks Risiko Bencana 13 Rendah, 13 – 144 Sedang dan 144 Tinggi. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 25
Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Capain IRB
1	2020	125,4
2	2021	110,73
3	2022	119,86
4	2023	106,7
5	2024	115,53

Sumber: BNPB Tahun 2024

Pada tahun 2020, IRB berada pada angka tertinggi yaitu 125,4, namun mengalami penurunan tajam di tahun 2021 menjadi 110,73. Setelah sempat meningkat kembali pada 2022 menjadi 119,86, tren penurunan berlanjut di tahun 2023 dengan capaian terendah 106,7. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali menjadi 115,53. upaya pengurangan Risiko bencana telah menunjukkan hasil positif di beberapa tahun, namun belum konsisten dan masih perlu diperkuat karena peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi bencana, dan pengelolaan Risiko yang lebih baik. IRB Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan, dari posisi Risiko tinggi ke Risiko sedang. Artinya peran Pemerintah Daerah dalam program dan kegiatan mampu menurunkan kerentanan dan Risiko yang dihadapi masyarakatnya jika terjadi bencana. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana juga diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Yaitu mengukur kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah Semakin tinggi nilai IKD, makin tinggi pula kapasitas yang dimiliki sebuah daerah dan otomatis menekan skor IRB. Berikut data IKD Kabupaten Mojokerto tahun 2020 – 2024 yang mengalami kenaikan setiap tahunnya yang menunjukkan makin meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2. 26
Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Capain IKD
1	2019	0.57
2	2020	0.61
3	2021	0.69
4	2022	0.70
5	2023	0.76

No	Tahun	Capain IKD
6	2024	0.79

Sumber Data: BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data mengenai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Mojokerto, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, nilai IKD tercatat sebesar 0,57, dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, mencapai 0,61 pada tahun 2020, 0,69 pada tahun 2021, dan 0,70 pada tahun 2022. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai IKD mencapai 0,76, dan terus meningkat menjadi 0,79 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan daerah Kabupaten Mojokerto semakin baik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IKD ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek, seperti infrastruktur, ekonomi, sistem sosial, dan kebijakan mitigasi yang lebih efektif. Tren positif ini menandakan bahwa Kabupaten Mojokerto sedang bergerak menuju peningkatan ketahanan yang lebih baik.

c) Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Melalui implementasi Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut kesepakatan internasional yang dicapai dalam pertemuan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) pada *Conference of the Parties* (COP) ke-21 di Paris, yang berlangsung dari 30 November hingga 11 Desember 2015. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri (*unconditional*) pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 29% pada tahun 2030. Seiring perkembangan global dan nasional, Indonesia memperkuat komitmennya melalui dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC), yang menaikkan target penurunan emisi GRK menjadi 31,89% secara *unconditional* dan 43,20% dengan dukungan internasional (*conditional*) pada tahun 2030.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pencapaian target nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur aktif melaksanakan aksi pembangunan rendah karbon di wilayahnya. Aksi ini tidak hanya ditujukan untuk menurunkan emisi, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Pemerintah provinsi secara rutin melakukan pemantauan dan pelaporan atas seluruh aksi yang dilakukan melalui Aplikasi Perencanaan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Indonesia (AKSARA) yang dikelola oleh Bappenas, dan dapat diakses melalui tautan <https://pprk.bappenas.go.id/aksara/>. Melalui pendekatan yang berbasis data dan kolaboratif ini, diharapkan kontribusi daerah dapat semakin memperkuat pencapaian

target penurunan emisi GRK secara nasional dan mendorong Indonesia menuju pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 27
Penurunan emisi GRK Kumulatif

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	-	119.588,76	119.624,02	210.150,20	211.662,80

Sumber Data: <https://pprk.bappenas.go.id/>

Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren positif dan progresif dalam pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sejak 2021. Terjadinya lonjakan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 menjadi indikasi bahwa inisiatif pembangunan rendah karbon mulai berjalan secara optimal. Hal ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Mojokerto sebagai daerah yang berkontribusi aktif dalam mendukung pencapaian target nasional penurunan emisi sesuai dengan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC). Keberlanjutan tren ini akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, dukungan lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

7) Demografi

Demografi dapat meliputi deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Adapun sumber data yang digunakan pada aspek demografi yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir. Data yang digunakan sebagai gambaran demografi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 28
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

NO	Kecamatan	L	P	JML
1	Jatirejo	23.121	22.259	45.380
2	Gondang	22.450	22.326	44.776
3	Pacet	30.569	30.375	60.944
4	Trawas	16.052	15.911	31.963
5	Ngoro	43.235	43.207	86.442
6	Pungging	40.968	40.606	81.574
7	Kutorejo	34.876	33.935	68.811
8	Mojosari	40.813	40.428	81.241
9	Mojoanyar	25.382	25.046	50.428
10	Dlanggu	29.374	28.884	58.258
11	Bangsals	26.689	26.458	53.147
12	Puri	40.444	39.905	80.349

NO	Kecamatan	L	P	JML
13	Trowulan	39.407	38.174	77.581
14	Sooko	37.901	37.453	75.354
15	Gedeg	29.354	29.055	58.409
16	Kemlagi	30.261	30.146	60.407
17	Jetis	45.035	43.706	88.741
18	Dawarblandong	26.036	26.303	52.339
JUMLAH		581.967	574.177	1.156.144

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Mojokerto, dapat dilihat distribusi jumlah penduduk antara laki-laki (L), perempuan (P), dan total jumlah penduduk (JML). Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Ngoro dengan total 86.442 jiwa, diikuti oleh Pungging yang memiliki 81.574 jiwa, dan Mojosari dengan 81.241 jiwa. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Trawas dengan total 31.963 jiwa. Jumlah total penduduk di Kabupaten Mojokerto mencapai 1.156.144 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 581.967 jiwa dan jumlah perempuan 574.177 jiwa, yang menunjukkan komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Beberapa kecamatan seperti Jetis dan Kutorejo memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, masing-masing 88.741 jiwa dan 68.811 jiwa, yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi di daerah. Perkembangan penduduk Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2. 29
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

No	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laki- laki	561.810	566.690	571.390	577.672	581.967
2	Perempuan	555.170	560.090	564.910	569.763	574.177
	Jumlah	1.116.980	1.126.780	1.136.300	1.147.435	1.156.144
	Rasio Laki-laki	50,29%	50,23%	50,28%	50,35%	50,34%
	Rasio Perempuan	49,70%	49,71%	49,72%	49,66%	49,66%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut jenis kelamin dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi kenaikan yang stabil setiap tahunnya. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2020 tercatat sebanyak 561.810 jiwa, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 581.967 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk laki-laki selama periode tersebut adalah sekitar 3,58%. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan pada tahun 2020 sebanyak 555.170 jiwa, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 574.177 jiwa, dengan kenaikan sekitar 3,42%. Adapun jumlah

total penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebesar 1.116.980 jiwa, yang meningkat menjadi 1.156.144 jiwa pada tahun 2024, mencatatkan kenaikan total sekitar 3,52%. Sedangkan penduduk Kabupaten Mojokerto untuk proyeksi lima tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 2. 30
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024-2028

No	Jenis Kelamin	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laki- laki	581.967	584.230	588.080	591.720	595.130	598.370	602.105
2	Perempuan	574.177	578.470	582.680	586.730	590.620	597.964	597.125
	Jumlah	1.156.144	1.162.700	1.170.760	1.178.450	1.185.750	1.196.334	1.199.230

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024

Tahun 2045 sebagai tahun bonus demografi Indonesia. Oleh karena itu, pemisahan penduduk berdasarkan kelompok umur perlu untuk dianalisis untuk melihat angka ketergantungan, penduduk usia produktif, penduduk usia lanjut, dan angka ketergantungan.

Tabel 2. 31
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Kelompok Umur
Tahun 2020-2024

No	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
1	0 – 4	87.450	87.140	86.910	75.014	72.495
2	5 – 9	84.510	84.260	83.640	82.028	82.194
3	10 – 14	83.180	83.440	83.830	89.246	88.576
4	15 – 19	82.490	82.460	82.530	83.176	83.974
5	20 – 24	83710	82.860	82.320	88.165	88.360
6	25 – 29	89.330	88.540	87.270	84.503	84.649
7	30 – 34	87.120	87.540	88.140	82.378	83.386
8	35 – 39	86.000	86.290	86.380	83.182	81.153
9	40 – 44	82.600	82.920	83.520	89.507	90.495
10	45 – 49	82.940	82.800	82.460	80.292	81.274
11	50 – 54	77.940	79.240	80.210	85.121	83.018
12	55 - 59	64.700	67.160	69.550	71.958	76.471
13	60 – 64	49.160	51.620	54.060	58.039	58.707
14	65 – 69	33.980	36.120	38.270	39.769	42.491
15	70 – 74	21.370	22.660	24.120	24.349	26.894
16	75+	20.500	21.740	23.090	30.708	32.007
	Jumlah	1.116.980	1.126.780	1.136.300	1.147.435	1.156.144

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut kelompok umur dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi beberapa perubahan signifikan yang mencerminkan dinamika penduduk di wilayah tersebut. Kelompok umur 0-4 tahun mengalami penurunan yang cukup besar, dari 87.450 jiwa pada tahun 2020 menjadi 72.495 jiwa pada tahun 2024, yang mencatatkan penurunan sekitar 17,1%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka kelahiran atau faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah anak-anak di kelompok usia dini. Kelompok umur 5-9 tahun juga mengalami penurunan, meskipun lebih kecil, dari 84.510 jiwa pada tahun 2020 menjadi 82.194 jiwa pada tahun 2024, dengan penurunan sekitar 2,6%. Sementara itu, kelompok umur 10-14 tahun menunjukkan sedikit fluktuasi, dengan angka yang sempat meningkat pada 2023 (89.246 jiwa) tetapi sedikit turun menjadi 88.576 jiwa pada 2024, meskipun masih mencatatkan kenaikan sekitar 6,5% dibandingkan 2020. Pada kelompok umur yang lebih dewasa, seperti 20-24 tahun, terdapat peningkatan dari 83.710 jiwa pada tahun 2020 menjadi 88.360 jiwa pada 2024, dengan kenaikan sekitar 5,5%, yang mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar. Kelompok 40-44 tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 82.600 jiwa pada 2020 menjadi 90.495 jiwa pada 2024, mencatatkan kenaikan sekitar 9,5%. Sementara itu, kelompok umur yang lebih tua, seperti 55-59 tahun dan 60-64 tahun, menunjukkan tren peningkatan yang cukup besar, masing-masing naik sekitar 18% dan 19%, yang mencerminkan peningkatan jumlah penduduk usia lanjut di Kabupaten Mojokerto. Khususnya, kelompok umur 75 tahun ke atas mengalami lonjakan signifikan, dengan jumlahnya meningkat dari 20.500 jiwa pada 2020 menjadi 32.007 jiwa pada 2024, yang mencatatkan kenaikan sekitar 56%. Kenaikan signifikan ini menandakan adanya penuaan populasi di Kabupaten Mojokerto yang perlu diantisipasi dalam perencanaan kebijakan sosial, kesehatan, dan infrastruktur. Dari data diatas dapat disimpulkan, meskipun ada penurunan pada kelompok umur anak-anak dan usia dini, kelompok usia produktif dan lanjut usia mengalami peningkatan, mencerminkan dinamika penduduk yang semakin menua, namun tetap menunjukkan pertumbuhan stabil pada penduduk usia produktif. Tren ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok umur yang terus berkembang.

Tabel 2. 32

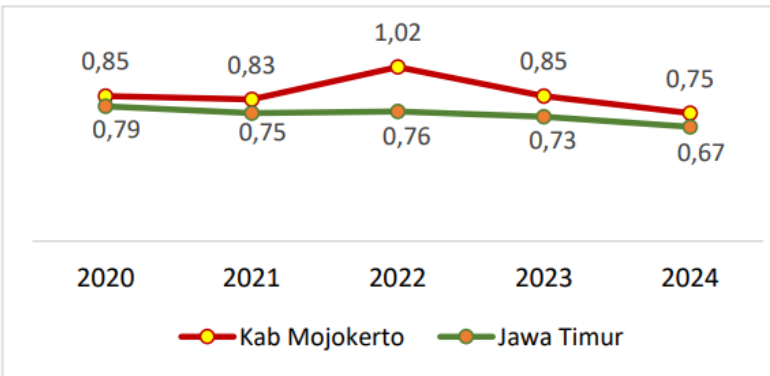
Penduduk Menurut Agama yang dianut Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghucu	Kepercayaan Lain
Jatirejo	45.221	152	6	1	-	-	-
Gondang	44.088	445	23	204	16	-	-
Pacet	60.269	452	195	7	14	5	2
Trawas	31.814	101	42	6	-	-	-
Ngoro	86.092	283	39	16	8	-	4
Pungging	80.950	389	81	86	68	-	-

Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghucu	Kepercayaan Lain
Kutorejo	68.376	317	88	15	14	-	1
Mojosari	79.543	1.073	265	131	225	2	2
Mojoanyar	49.889	411	95	12	21	-	-
Dlanggu	57.425	757	46	7	23	-	-
Bangsalsari	52.998	104	16	22	6	1	-
Puri	79.289	833	169	10	43	-	5
Trowulan	77.308	224	21	14	7	-	7
Soko	74.268	861	157	23	43	-	2
Gedeg	57.438	872	77	2	18	1	1
Kemlagi	59.915	455	26	3	8	-	-
Jetis	87.363	1.207	152	1	17	-	1
Dawarblandong	51.321	839	163	-	-	-	16
Jumlah Total	1.143.567	9.775	1.661	560	531	9	41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto Tahun 2024

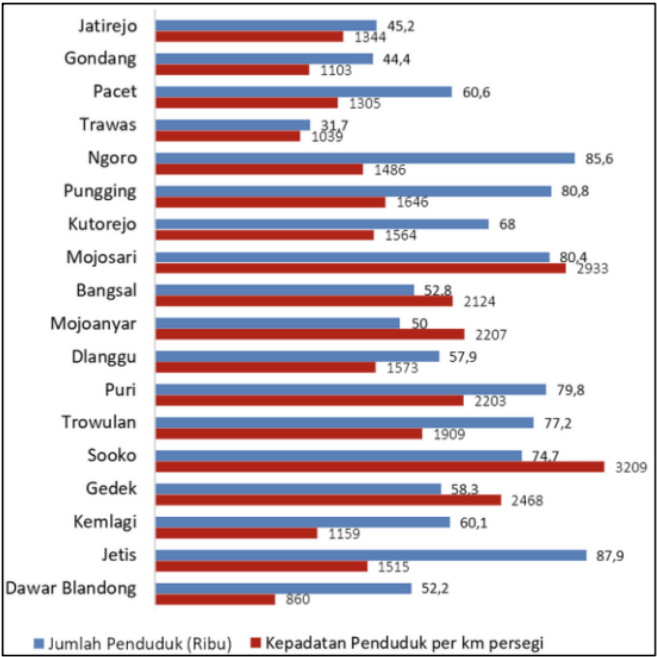
Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto menurut agama yang dianut pada 2024, mayoritas penduduk di wilayah ini memeluk agama Islam, dengan total 1.143.567 jiwa atau 98,5% dari total penduduk yang tercatat. Agama Kristen menjadi agama kedua yang paling banyak dianut dengan 9.775 jiwa atau sekitar 0,85% dari jumlah penduduk. Sementara itu, pemeluk agama Katholik tercatat sebanyak 1.661 jiwa atau sekitar 0,14% dari total penduduk. Sedangkan untuk agama Hindu, jumlah pemeluknya mencapai 560 jiwa atau sekitar 0,05% dari populasi. Agama Budha tercatat memiliki 531 jiwa atau sekitar 0,05%, sedangkan Khonghucu hanya ada pada beberapa kecamatan dengan total 9 jiwa, atau sekitar 0,0008% dari populasi Kabupaten Mojokerto. Terakhir, terdapat beberapa orang yang menganut kepercayaan lain, dengan jumlah total 41 jiwa atau sekitar 0,003%. Kabupaten Mojokerto memiliki komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam, sementara agama-agama lain, seperti Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan kepercayaan lain, memiliki porsi yang sangat kecil dalam jumlah total penduduk.



Gambar 2. 3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur
Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto (diolah)

Data kependudukan Kabupaten Mojokerto diperoleh dari dua instrumen utama, yaitu Sensus Penduduk (SP) dan Registrasi Penduduk. SP terakhir dilaksanakan pada 2020 dengan cakupan universal (de jure dan de facto) mencakup WNA nondiplomatik, sedangkan Registrasi

Penduduk bersifat kontinu dan mencatat dinamika kelahiran, kematian, serta migrasi. Berdasarkan SP 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto tercatat sebanyak 1.119.209 jiwa, menunjukkan tren peningkatan sejak periode sensus sebelumnya, meskipun laju pertumbuhannya mengalami perlambatan signifikan dari 20,56 persen pada 1971 menjadi 9,15 persen pada 2020. Kondisi ini mencerminkan terjadinya transisi demografi yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan meningkatnya akses keluarga berencana. Data tahun 2024 mencatat jumlah penduduk sebesar 1.156.414 jiwa atau meningkat 3,3 persen dibandingkan 2020, yang relatif lebih tinggi dibandingkan tren sensus sebelumnya dan diduga dipengaruhi oleh migrasi pekerja menuju kawasan industri di Mojokerto. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mojokerto pada 2024 sebesar 0,75%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang sebesar 0,6%. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, tren historis sejak SP 1961 hingga SP 2020 konsisten menunjukkan penurunan laju pertumbuhan penduduk, dengan faktor pendorong utama berupa migrasi netto positif dan perubahan dinamika demografi.



Gambar 2. 4 Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan 2024
Sumber data: BPS Kabupaten Mojokerto (diolah)

Kabupaten Mojokerto memiliki konsentrasi penduduk tertinggi di wilayah yang berdekatan dengan pusat industri dan perkotaan, khususnya kecamatan Puri, Sooko, Jetis, dan Gedeg yang berbatasan langsung dengan Kota Mojokerto, serta Mojosari, Ngoro, dan Pungging yang berdekatan dengan Ngoro Industrial Park. Faktor geografis dan ekonomi menjadi penentu utama distribusi penduduk, dengan kepadatan tertinggi tercatat di Sooko (3.209 jiwa/km²), Mojosari (2.933 jiwa/km²), Gedeg (2.468 jiwa/km²), dan Puri (2.203 jiwa/km²), yang dipengaruhi oleh efek spillover perkembangan Kota Mojokerto sebagai pusat administrasi dan jasa serta aksesibilitas tinggi ke fasilitas perkotaan. Keberadaan kawasan industri seperti Ngoro

Industrial *Park* mendorong migrasi tenaga kerja dan pengembangan permukiman di koridor Mojosari–Pungging. Sebaliknya, kecamatan perifer seperti Dawar Blandong (860 jiwa/km²) dan Trawas (1.037 jiwa/km²) memiliki kepadatan rendah karena dominasi lahan pertanian atau hutan serta keterbatasan infrastruktur dan lapangan kerja nonpertanian. Kondisi ini mengimplikasikan perlunya kebijakan penataan ruang untuk mengendalikan urban sprawl di wilayah penyangga, pemerataan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri sekunder di wilayah timur seperti Kemlagi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah guna mengurangi tekanan di daerah padat. Secara teoretis, pola ini sejalan dengan teori *Central Place* dan *Push-Pull Migration*, di mana penduduk cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan akses ekonomi dan fasilitas terbaik.

Tabel 2. 33 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mojokerto, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Jatirejo	45,2	1,07	394	41.985	103,8
Gondang	44,4	2,03	387	44.973	101,1
Pacet	60,6	1,97	528	56.091	101,1
Trawas	31,7	1,41	276	54.600	101
Ngoro	85,6	-0,37	746	121.363	100,1
Pungging	80,8	1,13	704	179.444	101
Kutorejo	68	0,22	592	156.216	102,7
Mojosari	80,4	2,51	701	278.835	101
Bangsals	52,8	2,55	460	204.241	101,8
Mojoanyar	50	-2,17	436	214.142	101,1
Dlanggu	57,9	3,02	505	161.642	101,1
Puri	79,8	0,8	696	230.392	101,5
Trowulan	77,2	2,38	672	167.995	103
Sooko	74,7	-1,39	651	387.280	101,1
Gedek	58,3	2,28	508	222.743	100,9
Kemlagi	60,1	2,63	524	141.849	100,4
Jetis	87,9	0,87	766	165.681	103,2
Dawar Blandong	52,2	2,59	455	50.795	98,8
Mojokerto	1.147,40	1,22	10.000,00	118.370	101,4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mojokerto Tahun 2024

Kecamatan dengan akses langsung ke pusat kota atau kawasan industri, seperti Jetis (87,9 ribu jiwa), Ngoro (85,6 ribu jiwa), dan Mojosari (80,4 ribu jiwa), mencatat jumlah penduduk besar serta kepadatan tinggi—bahkan Sooko mencapai 387.280 jiwa/km² dan Mojosari 278.835 jiwa/km². Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Dlanggu (3,02%), Kemlagi (2,63%), dan Dawar Blandong (2,59%), sedangkan pertumbuhan negatif tercatat di Mojoanyar (-2,17%), Sooko (-1,39%), dan Ngoro (-0,37%), yang mengindikasikan adanya pergeseran penduduk. Sebaliknya, wilayah agraris dan perifer seperti Jatirejo (41.985 jiwa/km²) dan Gondang (44.973 jiwa/km²) memiliki kepadatan rendah

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Sering kali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Sehingga angka pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (*output*) dari seluruh sektor ekonomi. Berikut merupakan tabel Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2020–2024:

Tabel 2. 34
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

No	Sektor Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.522,87	6.687,59	7.219,80	7.905,49	8.160,98
2	Pertambangan dan Penggalian	761,27	813,57	875,17	929,08	922,38
3	Industri Pengolahan	44.708,44	48.549,56	54.143,77	59.668,59	65.534,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	52,54	55,18	58,44	62,86	65,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	50,73	54,43	58,45	61,72	65,53
6	Konstruksi	7.366,41	7.270,48	7.702,25	7.919,04	8.317,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.254,29	8.972,12	9.894,80	10.867,64	11.707,26
8	Transportasi dan Pergudangan	1.062,60	1.134,75	1.348,38	1.597,17	1.809,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.589,34	1.693,35	1.924,09	2.125,94	2.293,97
10	Informasi dan Komunikasi	4.759,40	4.989,62	5.271,38	5.551,57	5.984,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.285,55	1.331,08	1.410,06	1.501,85	1.581,22
12	Real Estate	1.282,36	1.298,16	1.371,19	1.396,59	1.477,76
13	Jasa Perusahaan	131,23	137,40	147,24	164,74	181,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.033,36	2.028,53	2.060,97	2.090,15	2.301,47
15	Jasa Pendidikan	1.105,88	1.098,45	1.119,88	1.205,11	1.289,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	359,15	372,14	401,21	441,90	467,34
17	Jasa lainnya	615,43	658,62	791,03	874,79	968,71
	PDRB	81.940,86	87.145,02	95.798,11	104.364,24	113.129,71
	PDRB Tanpa Migas	81.938,98	87.143,18	95.796,31	104.362,35	113.127,88

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024

Tabel 2. 35
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020 (Rp. Miliar)	2021 (Rp. Miliar)	2022 (Rp. Miliar)	2023 (Rp. Miliar)	2024 (Rp. Miliar)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.884,60	3.924,57	3.978,81	4.152,33	4.157,61
2.	Pertambangan dan Penggalian	479,35	498,04	527,89	543,01	544,77
3.	Industri Pengolahan	32.153,80	33.875,26	36.102,77	38.190,85	40.441,64
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	40,20	41,45	43,46	46,42	48,66
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40,62	43,21	44,89	46,43	48,56
6.	Konstruksi	4.897,72	4.795,85	5.084,02	5.190,94	5.356,67
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.806,83	6.212,46	6.535,69	6.916,35	7.257,60
8.	Transportasi dan Pergudangan	699,11	743,83	841,78	929,44	1.042,57
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.011,49	1.045,24	1.155,07	1.225,94	1.282,50
10.	Informasi dan Komunikasi	4.230,20	4.419,20	4.629,18	4.821,64	5.135,71
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	839,77	844,33	856,14	898,06	939,72
12.	Real Estate	914,54	916,86	958,38	965,02	995,67
13.	Jasa Perusahaan	85,26	86,91	90,96	99,42	107,29
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.238,87	1.240,75	1.246,02	1.245,15	1.341,28
15.	Jasa Pendidikan	771,94	770,10	775,42	824,28	873,20
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	257,17	259,41	272,02	292,09	305,66
17.	Jasa Lainnya	466,95	481,24	557,34	595,30	648,52
Total PDRB		55.256,61	58.467,15	57.818,42	60.198,70	60.198,70

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto atas dasar harga konstan menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2024, dengan lima sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, serta Informasi dan Komunikasi. Sektor Industri Pengolahan tetap menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi, mencapai Rp 38.190,85 miliar pada 2023 dan terus meningkat hingga Rp 40.441,64 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini mengindikasikan peran penting industri dalam perekonomian daerah. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga berkontribusi besar, dengan angka yang meningkat dari Rp 3.884,60 miliar pada 2020 menjadi Rp 4.157,61 miliar pada 2024. Perdagangan Besar dan Eceran terus menunjukkan pertumbuhan stabil, mencapai Rp 7.257,60 miliar pada 2024, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan yang mengalami pertumbuhan signifikan hingga Rp 1.042,57 miliar. Sektor Informasi dan Komunikasi juga menunjukkan peningkatan positif, mencapai Rp 5.135,71 miliar pada 2024.

Di sisi lain, tiga sektor dengan kontribusi terendah terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto adalah Jasa Perusahaan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Jasa Perusahaan, meskipun mengalami pertumbuhan sebesar 21,5% dari 2019 hingga 2023, tetap memiliki kontribusi yang kecil dengan Rp 107,29 miliar pada 2024. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar Rp 1.282,50 miliar pada 2024, sementara Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mencapai Rp 305,66 miliar, meskipun mengalami peningkatan sepanjang periode analisis. Total PDRB Kabupaten Mojokerto meningkat dari Rp 55.256,61 miliar pada 2020 menjadi Rp 60.198,70 miliar pada 2024, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan di tengah dinamika berbagai sektor.

Tabel 2. 36
Distribusi Persentase Produk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.96	7.67	7.54	7.57	7.21
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.93	0.93	0.91	0.89	0.82
3.	Industri Pengolahan	54.56	55.71	56.52	57.17	57.93
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

No	Lapangan Usaha	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
6.	Konstruksi	8.99	8.34	08.04	7.59	7.35
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.07	10.3	10.33	10.41	10.35
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.3	1.3	1.41	1.53	1.6
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.94	1.94	2.01	2.04	2.03
10.	Informasi dan Komunikasi	5.81	5.73	5.5	5.32	5.29
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.57	1.53	1.47	1.44	1.4
12.	<i>Real Estate</i>	1.56	1.49	1.43	1.34	1.31
13.	Jasa Perusahaan	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.48	2.33	2.15	2	2.03
15.	Jasa Pendidikan	1.35	1.26	1.17	1.15	1.14
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.44	0.43	0.42	0.42	0.41
17.	Jasa lainnya	0.75	0.76	0.83	0.84	0.86
Total PDRB		100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto selama periode 2020-2024 didominasi oleh lima sektor utama, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Informasi dan Komunikasi. Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor terbesar dengan kontribusi yang terus meningkat dari 54,56% pada 2020 menjadi 57,93% pada 2024, mencerminkan peran dominannya dalam perekonomian daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan, stabil di kisaran 10,07% hingga 10,41% selama lima tahun terakhir. Sementara itu, sektor Konstruksi mengalami penurunan kontribusi dari 8,99% pada 2020 menjadi 7,35% pada 2024, menunjukkan perlambatan di sektor ini. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, meskipun tetap menjadi sektor penting, mengalami penurunan kontribusi dari 7,96% pada 2020 menjadi 7,21% pada 2024. Sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami sedikit penurunan kontribusi dari 5,81% pada 2020 menjadi 5,29% pada 2024.

Di sisi lain, beberapa sektor dengan kontribusi terkecil terhadap PDRB adalah Pengadaan Listrik

dan Gas, serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, yang keduanya tetap stabil di angka 0,06% sepanjang periode 2020-2024. Sektor Jasa Perusahaan juga memiliki kontribusi yang sangat kecil, yaitu hanya 0,16% pada 2024. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami peningkatan kecil dari 1,3% pada 2020 menjadi 1,6% pada 2024. Meskipun pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator keberhasilan pembangunan, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi juga berkualitas dan merata di berbagai sektor, bukan hanya terfokus pada industri utama saja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto.

Sering kali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas.



Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Mulai 2020- 2024
Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi mencapai 1,11 persen. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai pembatasan aktivitas ekonomi, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penutupan usaha. Pembatasan aktivitas ekonomi ini menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa, yang berakibat pada penurunan produksi dan pendapatan. Penurunan pendapatan ini juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat,

yang semakin memperparah dampak pandemi terhadap ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Hal ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Hal ini termasuk memberikan bantuan sosial kepada IKM dan pelaku usaha dagang yang terdampak COVID-19, memberikan bantuan hibah Dana Intensif Daerah (DID) kepada kelompok tani/ternak, dan melakukan agenda Majafest 2021. Sehingga kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto kembali pulih mencapai 5,82% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto sebesar 5,15%, tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,82%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi di Kabupaten Mojokerto yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang sedikit lebih stabil, dengan Jawa Timur tumbuh 4,93% dan Kabupaten Mojokerto 5,29%, yang menandakan optimisme berlanjut di Kabupaten Mojokerto dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Sehingga angka pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi.

Tabel 2. 37

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,59	1,03	1,38	4,36	0,13
2.	Pertambangan dan penggalian	-3,33	3,9	5,99	2,86	0,32
3.	Industri pengolahan	0,16	5,35	6,58	5,78	5,89
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,84	3,1	4,85	6,82	4,81
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,47	6,38	3,89	3,43	4,58
6.	Konstruksi	-6,19	-2,08	06,01	2,1	3,19
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,96	6,99	5,2	5,82	4,93
8.	Transportasi dan Pergudangan	-4,92	-6,4	13,17	10,41	12,17
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-13,02	3,34	10,51	6,14	4,61
10.	Informasi dan Komunikasi	7,53	4,47	4,75	4,16	6,51

No.	Lapangan Usaha	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,27	0,54	1,4	4,9	4,64
12.	<i>Real Estate</i>	2,47	0,25	4,53	0,69	3,18
13.	Jasa Perusahaan	-6,48	1,94	4,66	9,3	7,91
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,7	0,15	0,42	-0,07	7,72
15.	Jasa Pendidikan	1,47	-0,24	0,69	6,3	5,94
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,16	0,87	4,86	7,38	4,65
17.	Jasa lainnya	-13,82	3,06	15,81	6,81	8,94
PDRB		-1,11	4,12	5,82	5,15	5,29

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2020 - 2024

Tabel di atas menampilkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari berbagai lapangan usaha selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, terlihat bahwa tahun 2020 merupakan periode kontraksi ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan negatif pada banyak sektor. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, mayoritas sektor mengalami pemulihan dengan laju pertumbuhan yang variatif.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun relatif rendah, dengan lonjakan signifikan di tahun 2023 (4,36%), lalu menurun drastis di tahun 2024 (0,13%). Sektor pertambangan dan penggalan sempat mengalami kontraksi pada 2020 (-3,33%), kemudian pulih dengan pertumbuhan positif, meskipun menurun signifikan pada 2024 (0,32%). Industri pengolahan tumbuh sangat positif sejak 2021 hingga 2024, mencerminkan peran pentingnya dalam pemulihan ekonomi. Demikian pula, pengadaan listrik dan gas menunjukkan tren pemulihan setelah kontraksi awal, dengan puncaknya di tahun 2023 (6,82%).

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencatat pertumbuhan cukup stabil dengan rata-rata di atas 3%, menunjukkan konsistensi pertumbuhan di sektor utilitas dasar. Sektor konstruksi mengalami kontraksi pada dua tahun pertama, lalu pulih secara perlahan. Sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum sangat terdampak pandemi di 2020, namun menunjukkan *rebound* kuat di tahun-tahun berikutnya, terutama transportasi yang mencapai 13,17% pada 2022 dan tetap tinggi di tahun 2024 (12,17%).

Sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan yang stabil dan positif sepanjang periode, dengan peningkatan signifikan di 2024 (6,51%). Jasa keuangan dan asuransi, serta *real estate* menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat namun cenderung

meningkat. Jasa perusahaan sempat berkontraksi di 2020 (-6,48%) namun bangkit kuat hingga mencapai 9,3% pada 2023 dan tetap tinggi di 2024 (7,91%).

Administrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan yang sangat rendah bahkan negatif di beberapa tahun, namun mengalami lonjakan signifikan pada 2024 (7,72%). Sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan pemulihan setelah tertekan selama pandemi, dengan pertumbuhan kuat di 2023 dan 2024. Terakhir, jasa lainnya, salah satu sektor paling terdampak pada 2020 (-13,82%), menunjukkan pemulihan impresif dengan pertumbuhan tertinggi pada 2022 (15,81%) dan tetap tinggi di tahun-tahun selanjutnya.

Tiga Sektor Paling Berkembang Transportasi dan Pergudangan Sektor ini menunjukkan pemulihan yang sangat kuat pasca pandemi. Setelah mengalami kontraksi signifikan pada 2020 dan 2021 (-4,92% dan -6,4%), sektor ini melonjak tajam dengan pertumbuhan dua digit selama tiga tahun berturut-turut: 13,17% (2022), 10,41% (2023), dan 12,17% (2024). Ini menunjukkan peningkatan aktivitas mobilitas dan logistik secara nasional.

Sektor Jasa Lainnya mengalami penurunan tajam pada 2020 (-13,82%), namun mampu bangkit secara luar biasa, terutama pada 2022 dengan pertumbuhan tertinggi selama lima tahun yaitu 15,81%. Pertumbuhan ini terus berlanjut dengan angka tinggi pada 2023 (6,81%) dan 2024 (8,94%), menandakan meningkatnya kembali berbagai layanan berbasis masyarakat dan hiburan.

Jasa Perusahaan Dari -6,48% pada 2020, sektor ini menunjukkan pemulihan yang solid dan konsisten. Pertumbuhannya meningkat menjadi 1,94% (2021), 4,66% (2022), 9,3% (2023), dan 7,91% (2024), mencerminkan peran penting jasa profesional dan *outsourcing* dalam pemulihan ekonomi dan ekspansi bisnis.

Tiga Sektor Paling Kurang Berkembang antara lain Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat rendah dan tidak stabil, bahkan negatif pada 2020 (-2,7%) dan 2023 (-0,07%). Baru pada 2024 sektor ini melonjak ke 7,72%, yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor musiman seperti tahun politik. Namun secara rata-rata, sektor ini tergolong kurang berkembang secara konsisten.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Meskipun merupakan sektor strategis, pertumbuhannya cenderung datar dan fluktuatif. Dari angka rendah 0,59% (2020), sektor ini hanya mengalami peningkatan moderat dan sempat melonjak pada 2023 (4,36%), namun kembali turun drastis ke 0,13% di 2024, menandakan kurangnya dorongan pertumbuhan berkelanjutan. *Real Estate* Sektor ini mencatat pertumbuhan yang sangat fluktuatif dan cenderung rendah, yakni 2,47% (2020), turun ke 0,25% (2021), naik ke 4,53% (2022), lalu kembali lesu di 2023 (0,69%), dan sedikit membaik di 2024 (3,18%). Ketidakstabilan ini menunjukkan belum pulihnya secara penuh sektor properti dan perumahan.

Tabel 2. 38

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per kapita	73,34	77,34	84,31	91,11	98,01

Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Mojokerto mengalami tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020–2024, yakni dari Rp73,34 juta pada tahun 2020 menjadi Rp98,01 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi nominal per individu yang stabil. Kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 9,01% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi COVID-19.

Peningkatan PDRB per kapita ADHB sejalan dengan pertumbuhan nilai total PDRB ADHB, yang meningkat dari Rp81,94 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp113,13 triliun pada tahun 2024. Hal ini juga tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang relatif kecil, berkisar antara 0,77%–0,84% per tahun, yang berarti pertumbuhan PDRB total tidak “tergerus” secara signifikan oleh peningkatan jumlah penduduk.

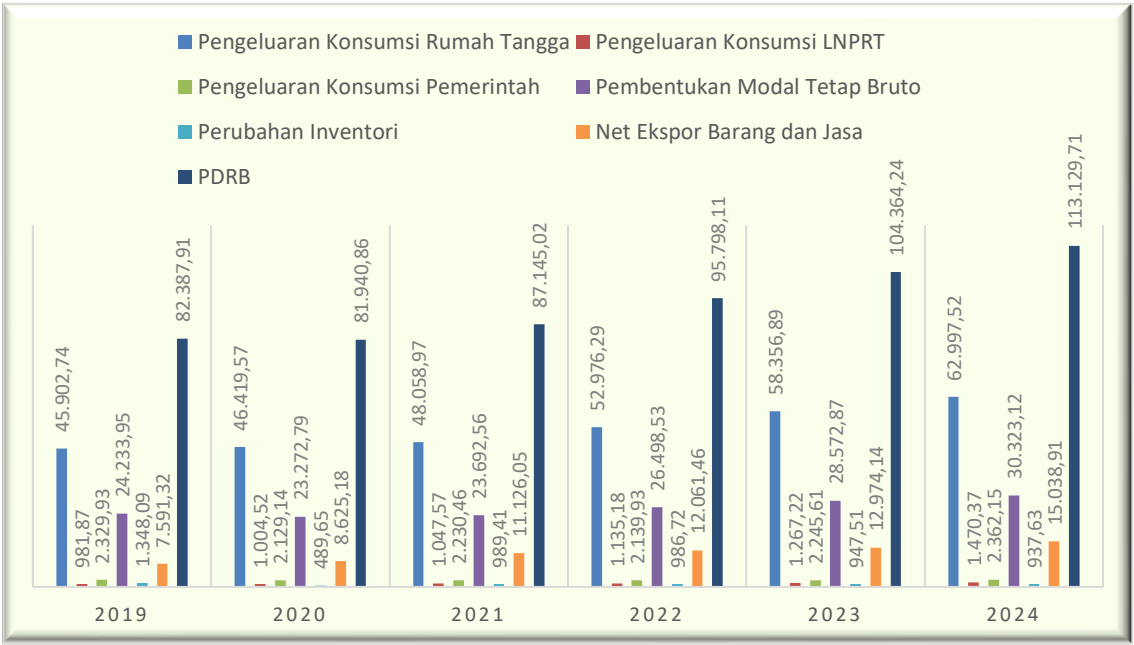
Sementara itu, PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK 2010) juga meningkat dari Rp51,75 juta (2020) menjadi Rp61,10 juta (2024), dengan pertumbuhan tahunan yang positif sejak 2021. Ini menandakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita bukan hanya karena inflasi, tetapi juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi riil.

Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita ADHB Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir mencerminkan kombinasi dari kenaikan ekonomi (PDRB total), pertumbuhan jumlah penduduk yang terkendali, serta adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan riil yang turut tercermin dari kenaikan PDRB per kapita ADHK. Dapat disimpulkan Kabupaten Mojokerto berada pada jalur pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

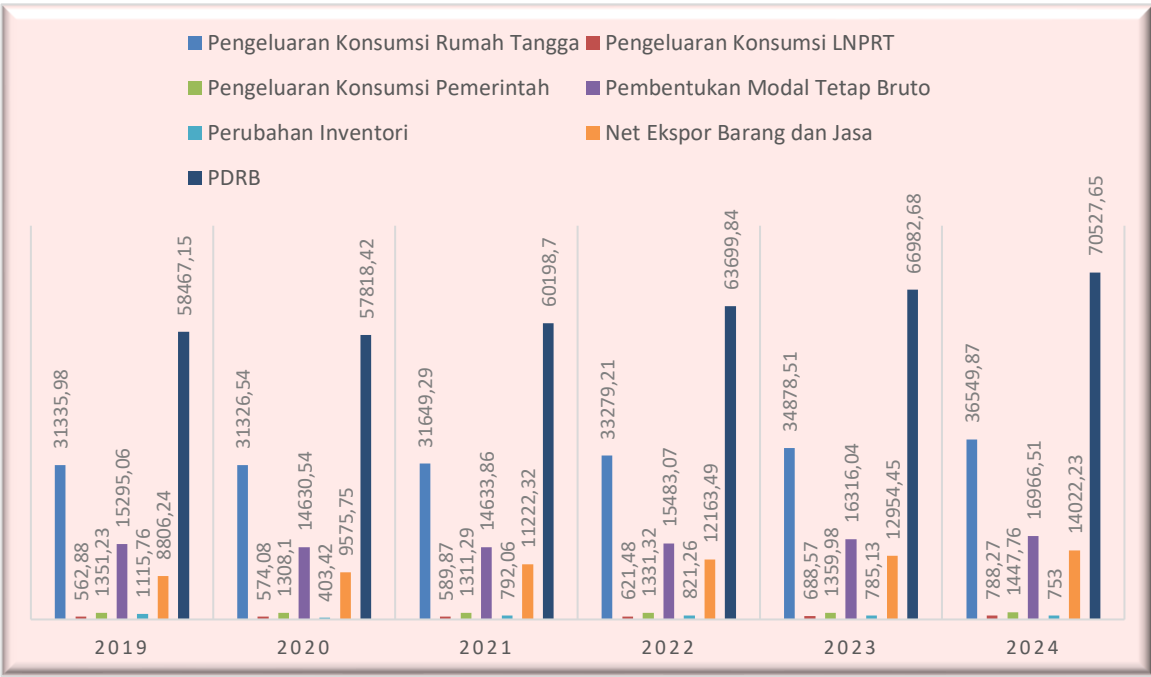
Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan

demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Gambar 2. 6
PDRB Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Gambar 2. 7 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 39
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Mojokerto, Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	46.419,57	48.058,97	52.976,29	58.356,89	62.997,52
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	31.326,54	31.649,29	33.279,21	34.878,51	36.549,87
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	56,65	55,15	55,3	55,92	55,69
Rata-rata Konsumsi Perkapita/Tahun					
a. ADHB (Ribu Rp)	41.544,61	42.651,48	46.621,91	50.946,70	54.578,42
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	28.036,63	28.088,19	29.287,45	30.449,61	31.665,28
Pertumbuhan (Persen)					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	-0,03	1,03	5,15	4,81	4,79
b. Konsumsi Perkapita	0,08	0,18	4,27	3,97	3,99
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1.117,34	1.126,78	1.136,30	1.145,45	1.154,26

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Mojokerto 2024

Konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen dengan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Mojokerto menurut pengeluaran. Data menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik maupun impor digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Selama periode 2020–2024, konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan baik secara nominal (ADHB) maupun secara riil (ADHK), seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor pendorong naiknya nilai konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Porsi konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB ADHB menunjukkan pola yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 2020 sebesar 56,65%, sedangkan titik terendah terjadi pada tahun 2021 yakni 55,15%. Setelah sempat meningkat kembali pada 2023 (55,92%), porsinya menurun sedikit pada 2024 menjadi 55,69%.

Secara pertumbuhan, konsumsi rumah tangga ADHK sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar -0,03 persen akibat pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan masyarakat menahan konsumsi dan hanya memenuhi kebutuhan dasar, ditambah tekanan ekonomi yang mengurangi pendapatan. Namun, sejak 2021 konsumsi rumah tangga kembali tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 5,15%.

Rata-rata konsumsi per kapita juga mengalami tren peningkatan dari Rp41,5 juta pada 2020 menjadi Rp54,6 juta pada 2024. Pertumbuhan konsumsi per kapita riil selama periode tersebut berkisar antara 0,08% hingga 4,27%. Hal ini menunjukkan bahwa pascapandemi,

konsumsi penduduk tidak hanya pulih tetapi juga tumbuh secara stabil, mencerminkan perbaikan daya beli, volume, dan kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

b. Indeks Gini

Indeks Gini/*Gini Ratio* adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengetahui derajat ketimpangan pendapatan secara umum. Dalam lima tahun terakhir, tren indeks gini/*gini ratio* Kabupaten Mojokerto cenderung menurun. Nilai dari indeks ini berkisar antara 0 dan 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0, maka pendapatan masyarakat merata (tidak timpang). Sementara, Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan pendapatan timpang sempurna. Indeks Gini semakin mendekati 0 berarti tingkat ketimpangan/kesenjangan antar kelompok pengeluaran semakin rendah. Demikian juga sebaliknya, semakin mendekati 1 dapat diartikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

Tabel 2. 40
Realisasi Indeks Gini Kabupaten Mojokerto

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini Mojokerto	0,325	0,294	0,327	0,338	0,337
Indeks Gini Jawa Timur	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
Indeks Gini Nasional	0,381	0,384	0,384	0,388	0,379

Sumber Data: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Indeks Gini Kabupaten Mojokerto pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil meskipun terjadi sedikit peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks Gini Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 0,325, yang menandakan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup rendah. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,294, yang merupakan angka terendah dalam periode analisis ini, menunjukkan penurunan ketimpangan pada tahun tersebut. Namun, setelah tahun 2021, nilai Indeks Gini Kabupaten Mojokerto kembali meningkat, mencapai 0,327 pada tahun 2022 dan 0,338 pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2024, Indeks Gini sedikit menurun menjadi 0,337, meskipun masih menunjukkan angka yang relatif stabil dalam kisaran 0,32 hingga 0,34 sepanjang periode tersebut. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Indeks Gini Nasional, Kabupaten Mojokerto memiliki angka yang lebih rendah. Pada tahun 2020, Indeks Gini Jawa Timur adalah 0,366, sedangkan pada tingkat nasional berada pada 0,381. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mojokerto lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan di Jawa Timur dan Indonesia. Tren ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, meskipun sedikit ada peningkatan ketimpangan yang teramati di

tingkat kabupaten, angka tersebut tetap berada di bawah ketimpangan yang tercatat di tingkat provinsi dan nasional. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam Indeks Gini Kabupaten Mojokerto, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mojokerto masih tergolong rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional, yang menandakan bahwa distribusi pendapatan di kabupaten ini lebih merata dibandingkan daerah lain.

Dalam kurun 5 tahun terakhir angka Indeks Gini Kab Mojokerto cukup fluktuatif dan indeks gini paling tinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada Tahun 2023. Kenaikan indeks Gini, yang menunjukkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan, dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab utama termasuk:

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Ketidakadilan dalam Distribusi Pendapatan: Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali tidak merata, di mana sebagian besar keuntungan dari pertumbuhan tersebut dinikmati oleh kelompok kaya sementara kelompok miskin tidak merasakan manfaat yang sama.

Kesenjangan dalam Akses Terhadap Kesempatan Ekonomi: Jika peluang kerja dan peningkatan pendapatan hanya tersedia bagi kelompok tertentu, ketimpangan akan meningkat.

2. Kebijakan Pajak dan Jaminan Sosial

Kebijakan Pajak yang Tidak Progresif: Sistem pajak yang lebih condong ke arah *flat rate* atau yang memberi insentif lebih banyak kepada individu kaya dapat memperbesar kesenjangan pendapatan. Pemotongan atau Pengurangan Program Sosial: Pengurangan dalam anggaran untuk program jaminan sosial atau kesejahteraan yang mendukung kelompok miskin dapat meningkatkan ketimpangan.

3. Perubahan Struktur Ekonomi

Otomatisasi dan Teknologi: Kemajuan teknologi dapat menyebabkan pengangguran atau pendapatan rendah bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, sementara pekerja di sektor teknologi atau kapitalis dapat memperoleh pendapatan yang sangat tinggi.

Globalisasi: Integrasi pasar global dapat menyebabkan pergeseran pekerjaan dari sektor tradisional ke sektor yang lebih menguntungkan bagi perusahaan besar, sering kali meningkatkan ketimpangan.

4. Pendidikan dan Keterampilan

Ketidaksetaraan dalam Pendidikan: Akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas dapat mengakibatkan perbedaan besar dalam pendapatan antara mereka yang memiliki keterampilan tinggi dan mereka yang tidak.

Peningkatan Keterampilan dan Kualifikasi: Kenaikan permintaan untuk keterampilan tertentu dapat memperbesar kesenjangan antara mereka yang memiliki keterampilan

tersebut dan mereka yang tidak.

5. Perubahan Demografis

Penuaan Populasi: Populasi yang menua dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan, terutama jika tidak ada kebijakan yang mendukung pensiun dan jaminan sosial yang merata.

Perubahan Struktur Keluarga: Pergeseran dalam struktur keluarga, seperti peningkatan jumlah rumah tangga tunggal, dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan.

6. Perbedaan dalam Kekayaan dan Investasi

Akumulasi Kekayaan: Individu atau kelompok yang sudah kaya cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakumulasi kekayaan melalui investasi dan aset, yang dapat memperlebar kesenjangan antara mereka dan yang kurang beruntung.

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Mojokerto agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik, karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Saat ini, Pemerintah kabupaten Mojokerto terus berupaya untuk menurunkan angka rasio gini, dengan strategi yang berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran.

c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan struktural. Di banyak daerah, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang kompleks akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang layak. Penduduk miskin umumnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan, sehingga meningkatkan Risiko kesenjangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan di daerah adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Banyak penduduk miskin yang hanya memiliki pendidikan rendah, sehingga sulit bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan dan terbatasnya peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Selain itu, minimnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga menjadi masalah, karena masyarakat miskin sering kali tidak mampu mendapatkan perawatan medis yang layak, yang pada akhirnya menghambat produktivitas mereka. Faktor lain yang turut memperburuk kemiskinan di daerah adalah ketimpangan pembangunan antara

perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, listrik, dan akses internet di daerah terpencil, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal serta memperlambat distribusi barang dan jasa. Sektor pertanian yang masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk miskin juga menghadapi berbagai tantangan, seperti harga komoditas yang tidak stabil, keterbatasan modal, serta perubahan iklim yang berdampak pada hasil panen. Selain faktor internal, kondisi ekonomi global dan nasional juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah. Krisis ekonomi, inflasi, serta dampak pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap.

Tabel 2. 41
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan Indonesia
Tahun 2020-2024 (000 Jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional
2020	118,80	4.419,10	26.424,02	10,57	11,09	9,78
2021	120,54	4.572,73	27.542,77	10,62	11,40	10,14
2022	111,03	4.181,29	26.161,16	9,71	10,38	9,54
2023	112,86	4.188,81	25.898,55	9,80	10,35	9,36
2024	108,72	3.982,69	25.219,20	9,37	9,79	9,03

Sumber: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, dan tingkat nasional menunjukkan tren yang positif dalam periode 2020-2024. Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi, namun menunjukkan tren penurunan dari 118,80 ribu jiwa (2020) menjadi 108,72 ribu jiwa (2024). Persentase penduduk miskin juga menurun dari 10,57% pada 2020 menjadi 9,37% pada 2024, menandakan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebelum akhirnya menurun secara signifikan. Dari 4,419 juta jiwa pada 2020 menjadi 3,982 juta jiwa pada 2024, dengan persentase kemiskinan yang turun dari 11,09% menjadi 9,79% pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi telah memberikan dampak yang baik. Sementara itu, di tingkat nasional, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami penurunan dari 26,424 juta jiwa pada 2020 menjadi 25,219 juta jiwa pada 2024. Persentase penduduk miskin nasional juga mengalami penurunan dari 9,78% pada 2020 menjadi 9,03% pada 2024, menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan secara nasional tetap berjalan efektif meskipun menghadapi tantangan, termasuk

dampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan data ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial ekonomi, baik di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, maupun secara nasional. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi, tren yang terus menurun mengindikasikan bahwa berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta kebijakan strategis lainnya telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 42
Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan		
	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional
2020	406.043	416.001	454.652
2021	417.784	429.133	472.525
2022	445.608	460.909	505.469
2023	486.520	507.286	550.458
2024	508.618	536.122	595.242

Sumber: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Di sisi lain Garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 406.043, dan pada 2024 meningkat menjadi 508.618. Meskipun ada kenaikan yang signifikan, peningkatan ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional. Di Jawa Timur, garis kemiskinan pada 2020 adalah 416.001 dan meningkat menjadi 536.122 pada 2024, sedangkan secara nasional, garis kemiskinan pada 2020 adalah 454.652 dan pada 2024 naik menjadi 595.242. Selisih antara Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur semakin besar setiap tahunnya, begitu juga dengan selisih antara Kabupaten Mojokerto dan tingkat nasional. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan yang lebih besar antara daerah dengan tingkat provinsi dan nasional dalam hal standar kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto lebih lambat dibandingkan dengan daerah lainnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi lokal yang berbeda. Meskipun demikian, peningkatan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto tetap menunjukkan bahwa biaya hidup dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penduduk semakin tinggi, mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Selain indikator *Headcount Index / Head Count Ratio* (P0) atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, indikator lain kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*, P1). Indeks kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan,

yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin. Rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin yang cenderung mendekati garis kemiskinan menunjukkan berkurangnya kedalaman kemiskinan.

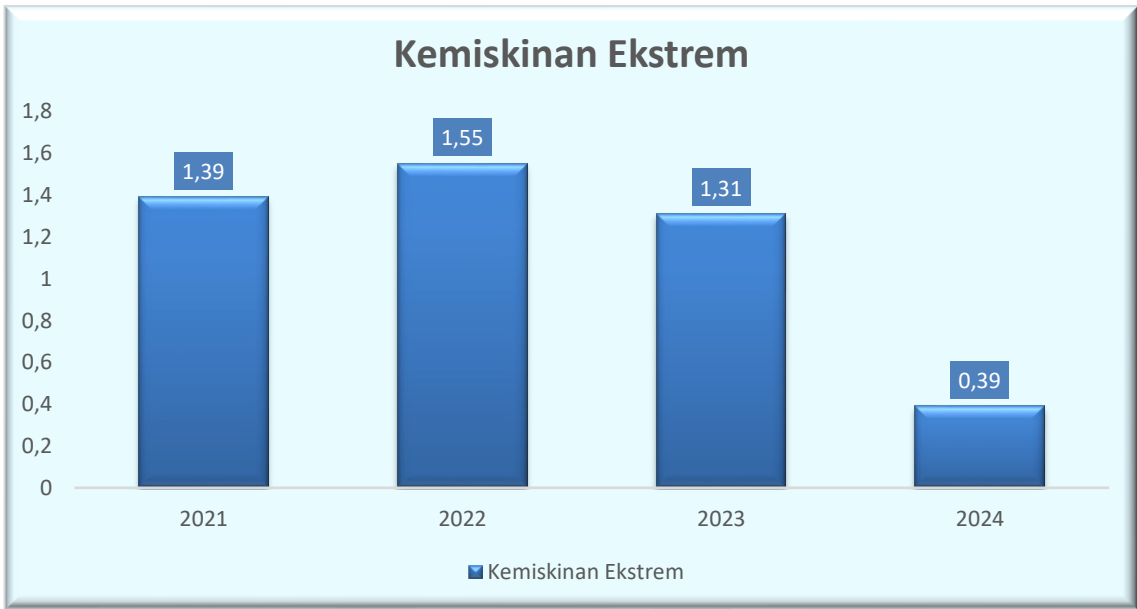
Di Kabupaten Mojokerto, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan perubahan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2020, indeks mencapai angka 1,95, yang menandakan kedalaman kemiskinan yang cukup tinggi. Namun, pada tahun 2021, ada perbaikan signifikan dengan penurunan menjadi 1,59, yang menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengurangi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin. Pada tahun 2022, indeks semakin membaik, turun menjadi 1,37, mencerminkan kemajuan yang baik dalam mengurangi kedalaman kemiskinan di daerah. Meskipun terjadi lonjakan pada tahun 2023, dengan indeks meningkat menjadi 1,73, pada tahun 2024, Kabupaten Mojokerto berhasil mencatatkan angka yang jauh lebih rendah, yakni 1,01. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan yang diterapkan mulai memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat miskin di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 43
Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan		
	Kabupaten Mojokerto	Prov. Jawa Timur	Nasional
2020	1,95	1,82	1,61
2021	1,59	1,84	1,71
2022	1,37	1,62	1,59
2023	1,73	1,63	1,53
2024	1,01	1,48	1,44

Sumber: BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Mojokerto cenderung mengalami penurunan seiring strategi penurunan angka kemiskinan ekstrem melalui : menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan, yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Persentase penduduk miskin ekstrem di Kabupaten tahun 2022 adalah 1,55% dan menurun di tahun 2023 menjadi 1,31% atau mengalami penurunan sebesar 0,24%. Berikut gambaran angka kemiskinan ektrem Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024 :



Gambar 2. 8 Angka Kemiskinan Ekstrem 2021-2024
Sumber Data : BPS Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Pada 2021, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 1,39%, yang kemudian meningkat sedikit pada 2022 menjadi 1,55%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada 2023, angka kemiskinan ekstrem kembali menurun menjadi 1,31%, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang mulai membawa dampak positif bagi masyarakat miskin. Untuk 2024 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 0,39%, yang mencerminkan optimisme dan keberhasilan dalam program-program pengentasan kemiskinan ekstrem. Dari data di atas, meskipun ada fluktuasi, Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan ekstrem, dengan harapan mencapai angka yang jauh lebih rendah pada 2024.

Strategi yang dilakukan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto adalah :

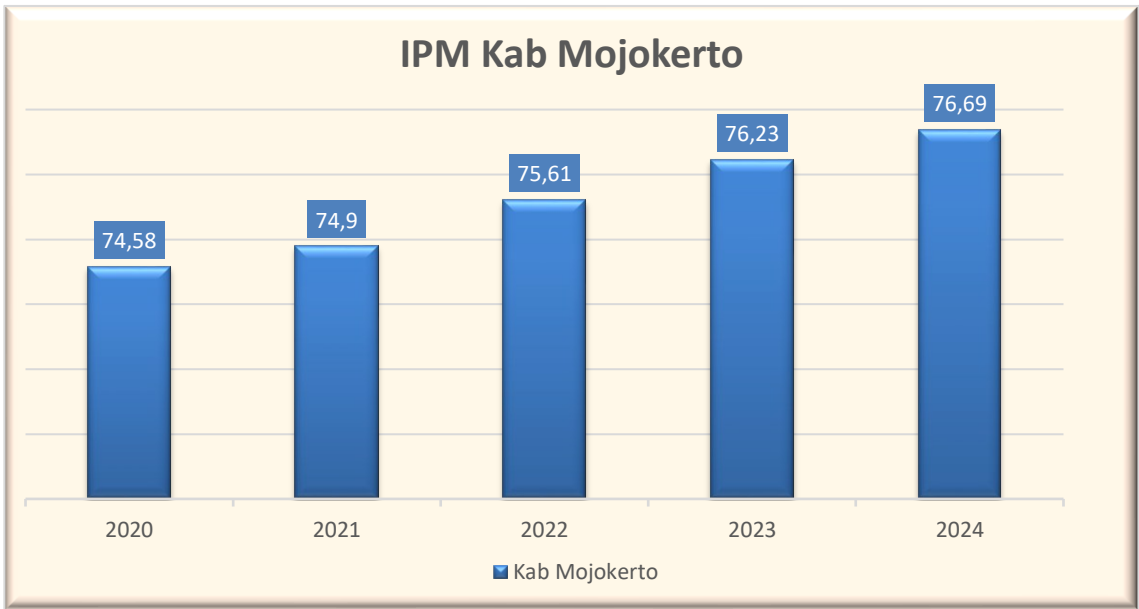
1. Menurunkan beban pengeluaran, meliputi perlindungan sosial, bantuan sosial dan jaminan sosial
2. Meningkatkan Pendapatan, meliputi pemberdayaan; Peningkatan Produktivitas dan Inklusi Keuangan; Pengembangan Potensi, Pelatihan dan Akses Pekerjaan; Akses Modal dan Asuransi, Akses dan Informasi Pasar
3. Pengurangan Kantong – Kantong Kemiskinan meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak, peningkatan akses masyarakat pada rumah layak huni, sumber penerangan, air minum layak dan akses jalan dan jembatan.

Selain data yang disajikan di atas terdapat indikator kemiskinan lainnya yaitu Persentase Kantong Kemiskinan. Penyebab kemiskinan terdiri atas berbagai faktor yang

kompleks dan saling berkaitan, di antaranya kondisi geografis, sarana prasarana yang kurang mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan terbatasnya akses sumber daya, distribusi barang, rendahnya pendidikan, potensi ancaman tingkat kesehatan, serta berujung pada rendahnya tingkat pendapatan, kepemilikan aset dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini disebut dengan kantong-kantong kemiskinan di suatu wilayah. Dengan ditetapkannya kantong-kantong kemiskinan, maka arah pembangunan bisa difokuskan/diprioritaskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Penentuan kantong kemiskinan diambil dari lokasi/wilayah kumuh di Kabupaten Mojokerto yang harus diselesaikan 5 tahun ke depan. Jumlah wilayah kumuh di Kabupaten Mojokerto ada 27 lokasi, di mana s.d tahun 2024 sudah 7 wilayah/lokasi yang ditangani. Capaian persentase kantong kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 25%.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum, gambaran komprehensif mengenai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia pada suatu wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota. Untuk memastikan relevansi capaian indeks pembangunan manusia, UNDP mengubah metodologi penghitungan dan komponen indeks pembangunan manusia. Perubahan dilakukan dengan maksud agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perubahan terletak pada indikator yang digunakan pada dimensi pengetahuan/pendidikan dari angka melek huruf yang dianggap tidak relevan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia berganti menjadi harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah dengan acuan 15 tahun berganti menjadi rata-rata lama sekolah dengan acuan 25 tahun. Selanjutnya pada metode IPM yang lama menggunakan indikator pengeluaran per kapita dengan 27 komoditas berganti menjadi 96 komoditas. Selain itu, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Dari cara penghitungan yang lama menggunakan rata-rata aritmatik berganti menjadi rata-rata geometrik. Berikut perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pusat, Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana berikut :



Gambar 2. 9 Perkembangan IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data yang diberikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, IPM tercatat sebesar 74,58, dan pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,42 poin menjadi 74,9. Peningkatan ini berlanjut pada 2022, dengan IPM mencapai 75,61, mengalami kenaikan 0,71 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, IPM kembali meningkat menjadi 76,23, dengan kenaikan 0,62 poin. Pada tahun 2024 menunjukkan angka IPM yang lebih tinggi lagi, yaitu 76,69, dengan kenaikan sebesar 0,46 poin dibandingkan tahun 2023. Dari tahun 2020 hingga 2024, IPM Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan total sebesar 2,11 poin, atau sekitar 2,83%. Peningkatan IPM yang terus menerus ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam kualitas hidup manusia di Kabupaten Mojokerto, dengan perbaikan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Selanjutnya akan kami sajikan perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto dengan Provinsi Jawa Timur kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana berikut :



Gambar 2. 10 Perkembangan IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto tahun 2024

Berdasarkan data yang diberikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto menunjukkan pencapaian yang lebih baik dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional antara 2020 hingga 2024. Pada 2020, IPM Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 74,58, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur (73,04) dan Nasional (71,94), menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik di Kabupaten Mojokerto. Peningkatan IPM ini berlanjut pada 2021 dan 2022, dengan Kabupaten Mojokerto terus mencatatkan angka yang lebih tinggi daripada Jawa Timur dan Nasional, mencapai 75,61 pada 2022. Pada 2023, IPM Kabupaten Mojokerto kembali menunjukkan angka yang lebih tinggi (76,23) dibandingkan dengan Jawa Timur (74,65) dan Nasional (74,39), mencerminkan perbaikan yang terus berlanjut. Pada tahun 2024 menunjukkan angka IPM yang lebih tinggi lagi di Kabupaten Mojokerto (76,69), sementara Jawa Timur diperkirakan mencapai 75,35 dan Nasional 75,02. Dapat disimpulkan dari data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto berhasil mencapai kemajuan yang lebih pesat dalam pembangunan kualitas hidup manusia, dengan IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, serta berada di atas rata-rata Jawa Timur dan Nasional.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah pencari pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu terserap dengan baik. Pengangguran sering kali menjadi permasalahan perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berikut gambaran TPT Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 :



Gambar 2. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Grafik tersebut menunjukkan tren tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, dan secara nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terdapat penurunan TPT di ketiga wilayah tersebut selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT nasional berada di angka 7,07%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur 5,84% dan Kabupaten Mojokerto 5,75%. Tahun berikutnya, 2021, terjadi penurunan TPT secara nasional menjadi 6,49%, diikuti oleh Jawa Timur 5,74%, dan Kabupaten Mojokerto 5,54%. Tren penurunan terus berlanjut di 2022, dengan nasional 5,86%, Jawa Timur 5,49%, dan Kabupaten Mojokerto 4,83%. Pada tahun 2023, angka pengangguran terus menurun, dengan TPT nasional 5,32%, Jawa Timur 4,88%, dan Kabupaten Mojokerto 4,07%. Hingga tahun 2024, angka TPT mengalami penurunan lebih lanjut, mencapai 4,91% secara nasional, 4,19% di Jawa Timur, dan 3,87% di Kabupaten Mojokerto. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan lapangan kerja, serta efektivitas program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Kabupaten Mojokerto menunjukkan perbaikan signifikan dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, menandakan pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik.

f. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Ada dua indeks yang digunakan untuk menghasilkan NTP, yaitu Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib).

Tabel 2. 44
Nilai Tukar Petani Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks yang diterima petani (It)	115,58	110,96	117,22	123,97	132,18
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	104,48	107,98	110,55	117,46	123,58
3.	Nilai Tukar Petani (NTP-P)	110,63	102,76	106,03	105,55	106,96

Sumber :Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2019, Indeks yang Diterima Petani (It) tercatat sebesar 115,58, sementara Indeks yang Dibayar Petani (Ib) berada di angka 104,48, menghasilkan Nilai Tukar Petani (NTP-P) sebesar 110,63. Nilai ini menunjukkan kondisi ekonomi petani yang cukup baik, di mana pendapatan yang diterima lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang harus mereka keluarkan. Memasuki tahun 2020, terjadi penurunan It menjadi 110,96, sementara Ib naik menjadi 107,98. Akibatnya, NTP-P turun drastis ke 102,76, yang menandakan bahwa kenaikan harga kebutuhan pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual hasil pertanian. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok dan memengaruhi harga komoditas pertanian. Pada tahun 2021, It kembali meningkat menjadi 117,22, menunjukkan pemulihan harga jual hasil pertanian. Namun, Ib juga naik menjadi 110,55, sehingga NTP-P hanya naik sedikit menjadi 106,03. Meskipun ada perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, daya beli petani belum sepenuhnya pulih karena biaya produksi terus meningkat. Tren positif berlanjut di tahun 2022, di mana It naik signifikan menjadi 123,97 dan Ib menjadi 117,46. Namun, NTP-P justru mengalami sedikit penurunan menjadi 105,55, yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga input produksi masih lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan harga jual hasil pertanian. Pada tahun 2023, It melonjak menjadi 132,18, sementara Ib juga naik ke 123,58. NTP-P mengalami kenaikan menjadi 106,96, menunjukkan adanya sedikit peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, karena kenaikan It dan Ib berjalan beriringan, daya beli petani masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat disimpulkan meskipun harga jual hasil pertanian terus meningkat dalam lima tahun terakhir, biaya produksi juga naik dengan kecepatan yang hampir sama. Hal ini menyebabkan daya beli petani hanya mengalami sedikit perbaikan, sehingga diperlukan kebijakan strategis untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi usaha tani agar kesejahteraan petani dapat lebih optimal.

g. Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Kabupaten Mojokerto merupakan bagian integral dari tren positif yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data kinerja perbankan syariah di tingkat provinsi menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan konsisten. Hal ini memberikan gambaran bahwa ekosistem ekonomi syariah di Jawa Timur semakin matang dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di tingkat kabupaten. Dengan laju pertumbuhan pembiayaan yang tinggi, sektor keuangan syariah diyakini mampu menjadi pendorong utama bagi sektor-sektor riil dan UMKM, serta menjadi solusi pembiayaan yang inklusif bagi masyarakat. Tabel berikut menyajikan indikator kinerja perbankan syariah sebagai landasan strategis untuk pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 45
Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah di Jawa Timur

Indikator	Nilai
Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah (Jatim, Juli 2024)	11,92 % (YoY)

Sumber : Kominfo Jawa Timur, 2024

Data ini menjadi landasan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk merumuskan kebijakan yang berfokus pada penguatan sektor keuangan syariah. Kebijakan tersebut dapat mencakup dukungan bagi lembaga keuangan mikro syariah, peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, dan fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Dengan memanfaatkan tren pertumbuhan regional ini, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan peran ekonomi syariah sebagai instrumen vital dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Mojokerto.

h. Indeks Daya Beli

Indeks Daya Beli/ Indeks Pengeluaran Kabupaten Mojokerto merupakan indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan. Daya beli masyarakat adalah salah satu alat ukur untuk mengestimasi pendapatan masyarakat secara riil. Dari data menunjukkan sejak tahun 2021 s.d 2024 indeks daya beli masyarakat Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan 0,021% Indeka Daya Beli Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan dari 2021 sebesar 0,78 , tahun 2022 sebesar 0,78 , tahun 2023 sebesar 0,79 dan pada tahun 2024 sebesar 0,80.

b. Kesehatan Untuk Semua

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH Kabupaten Mojokerto selama periode 2020-2024 terus-menerus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 12 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024, mencerminkan kemajuan dalam pembangunan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2020, AHH tercatat sebesar 74,16 tahun dan meningkat secara bertahap menjadi 74,21 tahun pada 2021, 74,48 tahun pada 2022, 74,74 tahun pada 2023, hingga mencapai 74,95 tahun pada 2024. Secara keseluruhan, terdapat kenaikan sebesar 0,79 tahun selama lima tahun terakhir. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti perbaikan akses dan mutu layanan kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang lebih baik, serta program intervensi kesehatan masyarakat yang dijalankan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Meski menunjukkan capaian positif, peningkatan AHH tetap memerlukan dukungan berkelanjutan melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar, peningkatan gizi masyarakat, dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat agar kualitas hidup masyarakat Mojokerto terus meningkat di masa mendatang.

b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Pada 2020, AKB tercatat sebesar 4,6, yang kemudian turun menjadi 4,1 pada 2021, mencatat penurunan sebesar 10,87%. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan bayi, program imunisasi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan ibu hamil dan pasca persalinan. Namun, pada 2022 dan 2023, angka kematian bayi kembali meningkat, masing-masing menjadi 4,5 dan 4,9, dengan kenaikan masing-masing sebesar 9,76% dan 8,89%. Lonjakan signifikan terjadi pada 2024, dengan AKB mencapai 5,9, meningkat sebesar 40,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sektor kesehatan ibu dan anak, seperti kekurangan tenaga medis, fasilitas neonatal yang belum optimal, serta masalah gizi dan infeksi pada bayi.



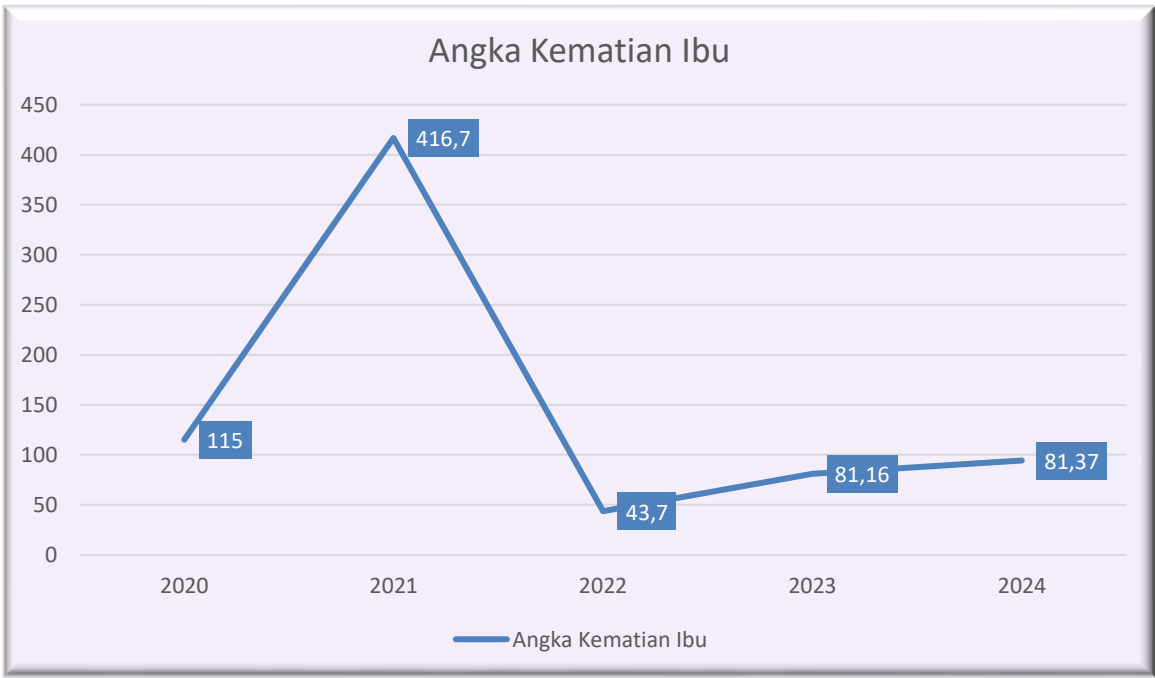
Gambar 2. 13 Angka Kematian Bayi
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Upaya penurunan angka kematian bayi tidak terlepas dari perbaikan kesehatan ibu, yang dilakukan melalui intervensi pada 1000 Hari Pertama Kelahiran, pemberian tablet Fe, dan peningkatan sosialisasi kesehatan reproduksi. Program lainnya seperti persalinan empat tangan, audit maternal perinatal, serta penguatan sistem rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit juga berperan penting. Untuk memperbaiki situasi, diperlukan penguatan pelayanan kesehatan neonatal, edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi baru lahir, serta program imunisasi dan gizi yang lebih luas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka kematian bayi dapat menurun dan kesejahteraan ibu serta bayi di Kabupaten Mojokerto dapat meningkat.

c. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020-2024. Pada 2020, AKI tercatat 115, namun terjadi lonjakan drastis pada

2021 menjadi 416,7, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Pembatasan mobilitas dan keterbatasan tenaga medis menyebabkan gangguan dalam layanan kesehatan ibu hamil dan persalinan. Memasuki 2022, AKI turun menjadi 43,7, mencerminkan pemulihan sistem kesehatan. Namun, pada 2023 dan 2024, AKI kembali meningkat menjadi 81,16 dan 81,37, menunjukkan adanya tantangan dalam pemerataan fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, dan faktor sosial ekonomi yang memengaruhi kesehatan ibu hamil. Berikut Angka kematian ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024:



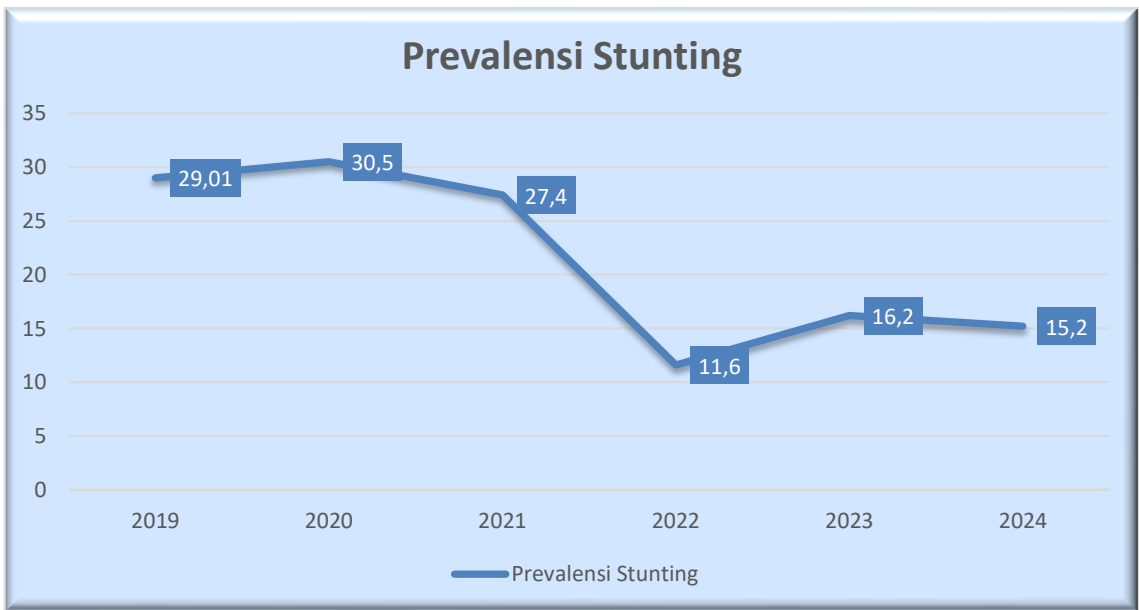
Gambar 2. 14 Angka Kematian Ibu
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Faktor pendorong capaian penurunan AKI antara lain peningkatan akses pemeriksaan kesehatan ibu hamil melalui ANC terpadu, kampanye pemberian tablet Fe, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, keberadaan program pemerintah yang mendukung kesehatan ibu dan anak turut berperan penting. Namun, faktor penghambat capaian penurunan AKI meliputi keterbatasan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah tertentu, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi perilaku hidup sehat ibu hamil. Selain itu, akses ke layanan kesehatan yang belum merata dan keterlambatan pemeriksaan kehamilan juga menjadi penghambat dalam menurunkan AKI di daerah ini.

d. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan masalah kesehatan yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian serius di banyak daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor kekurangan gizi, seringnya bayi atau anak terserang infeksi, kelahiran prematur,

dan berat badan lahir rendah. Namun, penyebab utama dari stunting adalah kekurangan gizi, yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak, serta dapat menghambat potensi mereka di masa depan. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, berbagai intervensi pemerintah dan sektor terkait telah dilaksanakan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan ibu serta anak.



Gambar 2. 15 Prevalensi Stunting
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

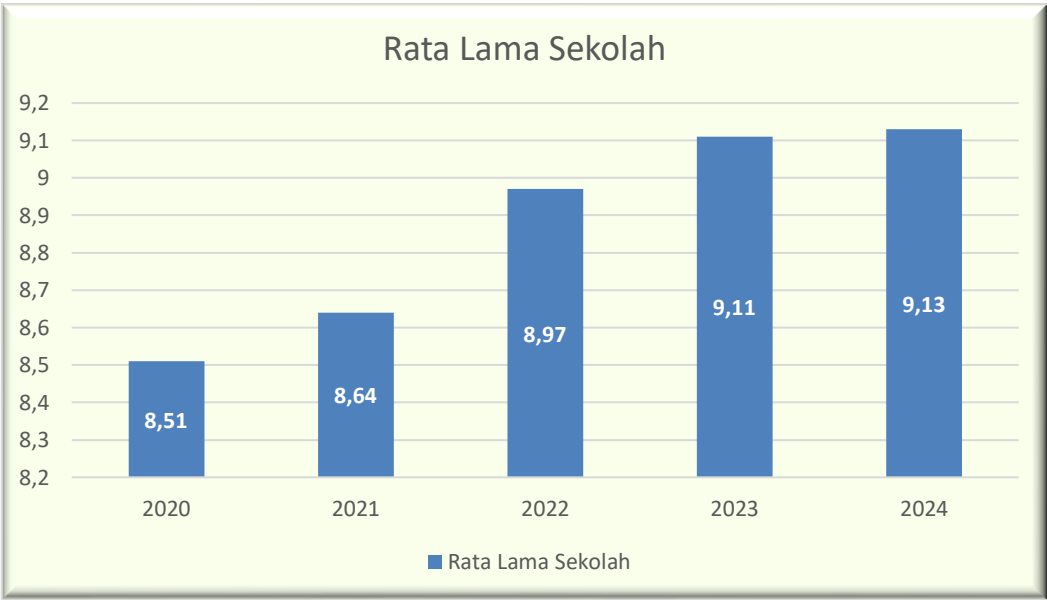
Pada 2024, prevalensi stunting kembali menunjukkan penurunan menjadi 15,2%, yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan intervensi yang diterapkan semakin membuahkan hasil, meskipun tantangan dalam mempertahankan penurunan angka stunting tetap ada. Faktor pendorong penurunan stunting ini bisa jadi terkait dengan keberhasilan program pemberian makanan tambahan, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Namun, tantangan yang masih dihadapi meliputi ketidakmerataan akses ke layanan kesehatan di beberapa daerah, keterbatasan pemahaman tentang pola makan sehat, dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kualitas gizi keluarga.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi, penurunan prevalensi stunting yang signifikan pada 2022 dan 2024 menunjukkan adanya perbaikan yang patut diapresiasi. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, bersama dengan sektor terkait, harus terus memperkuat program intervensi gizi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Dengan upaya berkelanjutan, diharapkan prevalensi stunting dapat terus menurun dan kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak, dapat meningkat secara signifikan.

3) Pendidikan Berkualitas dan Merata

a. Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas, dihitung berdasarkan jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan maupun sedang dijalani. RLS tidak hanya mencerminkan capaian pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia, peluang kerja, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.



Gambar 2. 16 Rata-rata Lama Sekolah

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Di Kabupaten Mojokerto, capaian RLS menunjukkan tren yang terus membaik selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,51 tahun, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 9,13 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menjadi indikator positif atas berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pemerataan fasilitas pendidikan, pelaksanaan program wajib belajar, penyediaan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Namun demikian, rata-rata tersebut masih berada di bawah standar pendidikan menengah atas (12 tahun), yang berarti sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan masih ada, terutama dalam menekan angka putus sekolah di tingkat SMP dan SMA, serta meningkatkan akses pendidikan di daerah.

Faktor pendorong utama capaian positif ini meliputi peningkatan kualitas tenaga pendidik, penyediaan sarana belajar yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak. Sementara itu, hambatan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, pernikahan dini, serta kurangnya motivasi belajar di kalangan remaja.

Untuk itu, ke depan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas cakupan program beasiswa dan pendidikan nonformal, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan menarik bagi semua kalangan, guna mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah yang lebih signifikan.

b. Harapan Lama Sekolah

Selain indikator Rata-rata Lama Sekolah, salah satu komponen penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS menggambarkan estimasi lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal di masa depan. Indikator ini mencerminkan tingkat keterjangkauan, partisipasi, dan keberlanjutan sistem pendidikan, serta menjadi cerminan dari efektivitas kebijakan wajib belajar yang dijalankan oleh pemerintah.



Gambar 2. 17 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto

Di Kabupaten Mojokerto, HLS menunjukkan tren peningkatan selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, angka HLS tercatat sebesar 12,61 tahun dan secara konsisten meningkat setiap tahun hingga mencapai 12,99 tahun pada tahun 2024. Selama lima tahun terakhir, HLS meningkat sebesar 3,01%. Meskipun pertumbuhan tahunan relatif kecil, tren yang stabil ini menunjukkan arah positif dalam pembangunan sektor pendidikan, di mana semakin banyak anak memiliki peluang dan harapan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi.

Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan melalui pembangunan infrastruktur sekolah dan pemerataan fasilitas belajar, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, dukungan program beasiswa dan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah telah mendorong partisipasi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk tetap bersekolah. Upaya peningkatan mutu pendidikan juga turut berperan penting, seperti peningkatan akreditasi

sekolah, pelatihan guru, serta pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Tidak kalah penting, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai jalan peningkatan kesejahteraan hidup juga menjadi penguat tren ini.

Sebagai kesimpulan, peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto mencerminkan adanya kemajuan yang berarti dalam aspek akses dan keberlanjutan pendidikan. Namun, peningkatan kuantitatif ini harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang menyeluruh untuk memperkuat kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi dan numerasi, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan karakter. Dengan langkah-langkah tersebut, peningkatan HLS tidak hanya menjadi capaian statistik, melainkan juga mencerminkan transformasi nyata dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

c. Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam konteks ini, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis secara teknis, tetapi lebih luas mencakup keterampilan dalam memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi tertulis secara kritis untuk menyelesaikan persoalan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, numerasi merujuk pada kemampuan menggunakan konsep bilangan dan keterampilan matematika secara fungsional, termasuk dalam memahami data, menghitung, mengukur, dan mengambil keputusan berbasis angka dalam berbagai konteks kehidupan. Kemampuan ini merupakan bagian penting dari kompetensi dasar abad ke-21 yang harus dimiliki setiap peserta didik untuk dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berbasis informasi.

Tabel 2. 46
Angka Literasi/Numerasi Tahun 2024

No	Indikator	Tahun 2024
1	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	71,56
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	79,54
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	64,83
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	68,24
5	Angka Partisipasi Sekolah (5–6) PAUD	89,95
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–15 SD/SMP	99,67
7	APS 7–18 Kesetaraan Kesetaraan	22,98
8	Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	83,06
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	87,12
10	Iklim Inklusivitas SD	67,64
11	Iklim Inklusivitas SMP	63,96
12	Iklim Keamanan SD	83,03

No	Indikator	Tahun 2024
13	Iklim Keamanan SMP	76,69
14	Iklim Kebinekaan SD	79,16
15	Iklim Kebinekaan SMP	74,68

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data tahun 2024, skor kemampuan literasi pada jenjang SD tercatat sebesar 71,56, sedangkan pada jenjang SMP mencapai 79,54. Di sisi lain, skor numerasi jenjang SD adalah 64,83 dan meningkat menjadi 68,24 pada jenjang SMP. Data ini menunjukkan bahwa capaian literasi cenderung lebih tinggi dibanding numerasi, baik di tingkat dasar maupun menengah. Meskipun terdapat peningkatan skor dari SD ke SMP, kemampuan numerasi masih berada di bawah tingkat yang diharapkan, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam strategi penguatan pembelajaran, terutama dalam hal berpikir logis, pemecahan masalah, dan penerapan matematika dalam konteks nyata.

Tingginya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun yang mencapai 99,67% menjadi modal kuat dalam pemerataan akses pendidikan dasar. Begitu pula dengan partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) untuk usia 5–6 tahun yang mencapai 89,95%, menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sejak dini. Namun, APS untuk jalur kesetaraan usia 7–18 tahun masih rendah di angka 22,98%, yang menunjukkan masih banyak anak dan remaja di luar sistem pendidikan formal yang belum terlayani secara optimal. Di sisi lain, kualitas satuan pendidikan PAUD juga cukup baik, tercermin dari 83,06% lembaga PAUD yang telah terakreditasi minimal B, serta 87,12% guru PAUD yang telah berkualifikasi minimal S1/D4.

Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek non-akademik dalam proses belajar mengajar. Iklim inklusivitas di SD dan SMP tercatat masing-masing sebesar 67,64 dan 63,96, menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan penerimaan dan penghargaan terhadap keragaman latar belakang peserta didik. Iklim keamanan berada dalam kategori cukup baik dengan skor 83,03 untuk SD dan 76,69 untuk SMP, sementara iklim kebinekaan mencatatkan skor 79,16 (SD) dan 74,68 (SMP), yang menunjukkan upaya penanaman nilai toleransi dan keberagaman sudah mulai membuahkan hasil, namun perlu terus diperkuat.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari Unsur-unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan

dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga telah menjadi salah satu unsur Indikator Kinerja Kunci (IKK) di bidang perpustakaan dengan bobot urusan sebesar 2% dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian seluruh pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang mencakup semua urusan yang menjadi kewenangannya, khususnya di bidang perpustakaan, guna mengukur capaian kinerja pemerintahan daerah di wilayahnya.

Tabel 2. 47
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022-2024

Indikator	IPLM		
	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kab Mojokerto	78,79	72,12	63,70
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur	15,70	15,79	78,60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Mojokerto Tahun 2024

Data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan penurunan yang signifikan selama tiga tahun terakhir, dari 78,79 pada tahun 2022 menjadi 72,12 di tahun 2023, dan semakin menurun ke angka 63,70 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kemunduran dalam kualitas dan akses literasi masyarakat, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya fasilitas literasi, menurunnya minat baca, atau kurang optimalnya program peningkatan literasi yang dijalankan. Beberapa faktor penghambat lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan ini antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang berkualitas, minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik literasi, kurangnya dukungan kebijakan daerah dalam pengembangan taman bacaan masyarakat, serta tantangan digital seperti dominasi konten hiburan di media sosial yang menggeser perhatian masyarakat dari aktivitas membaca. Penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan belum memberikan dampak yang signifikan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dan strategi baru yang lebih efektif untuk mengembalikan dan meningkatkan indeks ini di masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Mojokerto, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang dapat dilakukan. Pertama, perlu ditingkatkan ketersediaan perpustakaan, khususnya di tingkat kecamatan, kelurahan, dan instansi pemerintah daerah yang belum memilikinya, melalui koordinasi, advokasi, dan pembinaan. Kedua, perlu dilakukan penambahan koleksi perpustakaan baik

melalui alokasi anggaran oleh pemangku kebijakan terkait maupun bantuan koleksi bagi perpustakaan yang masih kekurangan. Ketiga, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga perpustakaan menjadi penting, melalui pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengelola perpustakaan. Keempat, guna meningkatkan kunjungan masyarakat, perlu penguatan layanan perpustakaan meliputi penambahan koleksi, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas layanan, serta tata kelola dan manajemen perpustakaan yang lebih baik. Kelima, pembinaan terhadap perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) juga harus terus dilakukan, terutama pada perpustakaan tingkat kecamatan, kelurahan, dan sekolah. Keenam, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, siswa, dan mahasiswa mengenai pentingnya perpustakaan dan budaya membaca. Ketujuh, peningkatan jumlah anggota perpustakaan dapat dicapai melalui sosialisasi tentang mekanisme pendaftaran dan manfaat menjadi anggota. Terakhir, perlu dilakukan perbaikan sistem pendataan dan pembaruan data perpustakaan secara menyeluruh agar sesuai dengan indikator yang digunakan dalam pengukuran IPLM.

e. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas budaya literasi di tengah masyarakat. Semakin tinggi nilai ini, semakin besar pula antusiasme masyarakat dalam membaca sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Data dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, menandakan adanya kemajuan dalam upaya pembangunan literasi di berbagai level.

Tabel 2. 48
Tingkat Kegemaran Membaca

Indikator	Tingkat Kegemaran Membaca				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	46,55	63,94	65,9	66,6	66,98

Sumber Data: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2020, nilai Tingkat Kegemaran Membaca berada di angka 46,55—angka yang relatif rendah dan mencerminkan tantangan awal dalam menumbuhkan minat baca masyarakat, terutama di tengah keterbatasan akses terhadap sumber bacaan dan infrastruktur literasi. Namun, tahun 2021 menunjukkan lonjakan signifikan menjadi 63,94. Peningkatan tajam ini kemungkinan besar didorong oleh akselerasi pemanfaatan teknologi dan media digital selama masa pandemi, ketika akses terhadap bahan bacaan digital meningkat, dan kegiatan literasi mulai banyak dilakukan secara daring.

Perkembangan positif ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Tahun 2022 mencatat peningkatan menjadi 65,9, lalu naik lagi menjadi 66,6 pada 2023, dan mencapai 66,98 pada

2024. Meski laju kenaikannya mulai melandai, tren ini tetap menunjukkan penguatan budaya baca yang semakin mengakar. Hal ini bisa dikaitkan dengan berbagai program strategis yang dijalankan, seperti penguatan peran perpustakaan daerah, peningkatan ketersediaan buku dan bahan bacaan, serta keterlibatan komunitas literasi dalam menggiatkan kampanye membaca di kalangan pelajar, keluarga, dan masyarakat umum.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Peningkatan nilai yang cenderung stagnan pada dua tahun terakhir menunjukkan perlunya inovasi dan pendekatan baru agar masyarakat tidak hanya memiliki akses baca, tetapi juga mengembangkan kebiasaan membaca sebagai kebutuhan. Dengan memperluas jangkauan program literasi, mengintegrasikan literasi digital dalam pendidikan, dan mendorong peran aktif keluarga serta masyarakat, maka pembangunan literasi akan semakin inklusif dan berkelanjutan.

4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan sosial daerah. Jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, merupakan instrumen penting dalam melindungi pekerja dari Risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan kematian. Hingga akhir tahun 2024, tingkat kepesertaan tenaga kerja dalam program ini tercatat sebesar 38,09% atau sejumlah 189.013 orang, dari total estimasi angkatan kerja aktif, dengan dominasi peserta berasal dari sektor formal. Sementara itu, sektor informal seperti petani, pelaku UMKM, buruh tani, pedagang kecil, dan pekerja sektor jasa informal masih menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah.

Melalui RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menargetkan peningkatan cakupan kepesertaan hingga mencapai 70% pada akhir periode perencanaan. Strategi yang akan ditempuh meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pekerja, fasilitasi pendaftaran dan pembayaran iuran bagi pekerja rentan, penguatan regulasi daerah yang mendorong kepatuhan pemberi kerja, serta integrasi program jaminan sosial dalam program pembangunan desa dan pemberdayaan UMKM. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah berharap jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diakses secara lebih luas dan merata, sekaligus menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto

b. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator penting yang mencerminkan sejauh mana pekerja di Kabupaten Mojokerto telah terlindungi oleh program jaminan sosial nasional. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah pekerja yang

terdaftar pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah total penduduk bekerja. Semakin tinggi cakupan kepesertaan, semakin baik tingkat perlindungan tenaga kerja terhadap berbagai Risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kerja.

Tabel 2. 49
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Penduduk Bekerja	Coverage
2021	132.272	460.045	28,75
2022	151.658	478.578	32,09
2023	162.971	486.404	33,51
2024	189.013	486.404	38,09

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, Tahun 2024

cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto dalam empat tahun terakhir. Jumlah tenaga kerja yang terdaftar meningkat dari 132.272 orang pada 2021 menjadi 189.013 orang pada 2024, atau bertambah 56.741 orang. Persentase cakupan juga naik signifikan dari 28,75% menjadi 38,09%, menunjukkan peningkatan perlindungan sosial ketenagakerjaan sebesar hampir 10 poin persentase dalam periode tersebut.

c. Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan

Dasar hukum utama penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia tercantum dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28H dan Pasal 34. Pasal 28H menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup sejahtera, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta jaminan sosial. Sementara Pasal 34 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Berdasarkan amanat tersebut, diterbitkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang melandasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan.

JKN merupakan program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Prinsip asuransi sosial melibatkan kegotongroyongan, kepesertaan wajib, iuran berdasarkan penghasilan, dan bersifat nirlaba. Sedangkan prinsip ekuitas menjamin pelayanan sesuai kebutuhan medis tanpa membedakan besaran iuran. Kepesertaan JKN terbagi dalam dua kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk fakir miskin yang iurannya ditanggung pemerintah, dan Non-PBI yang mencakup pekerja penerima upah, pekerja mandiri, serta bukan pekerja yang membayar iurannya sendiri atau melalui perusahaan.

Tabel 2. 50
Cakupan Jaminan Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	75,60%	73,4%	94,40%	95,20%	98,71%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto Tahun 2025

Pada tahun 2024, cakupan jaminan kesehatan penduduk di Kabupaten Mojokerto telah mencapai 98,71% dari total jumlah penduduk, menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepesertaan ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-PBI. Peserta PBI, yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, berjumlah 602.563 jiwa atau setara dengan 52% dari total peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 438.105 jiwa (38%) merupakan penerima bantuan dari APBN, sedangkan 164.458 jiwa (14%) dibiayai melalui APBD Kabupaten Mojokerto. Sementara itu, peserta Non-PBI yang mencakup pekerja penerima upah, pekerja mandiri, dan bukan pekerja berjumlah 536.816 jiwa atau 47% dari total peserta. Rinciannya meliputi 286.989 jiwa (25%) pekerja penerima upah, 228.575 jiwa (20%) pekerja mandiri atau bukan penerima upah, dan 21.252 jiwa (2%) kategori bukan pekerja.

Tingginya proporsi peserta PBI menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Mojokerto masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah untuk memperoleh perlindungan kesehatan. Meskipun demikian, partisipasi dari kelompok Non-PBI, terutama pekerja formal dan mandiri, mencerminkan adanya kesadaran dan kemandirian dalam menjamin akses layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu terus memperkuat sinergi lintas sektor, memperluas jangkauan sosialisasi, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas program JKN. Upaya ini penting untuk menutup kesenjangan 1,29% penduduk yang belum tercakup serta untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh di masa mendatang.

5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
a. Indeks Kesalehan Sosial

Salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial mencerminkan perilaku individu yang tidak hanya merujuk pada ketaatan dalam beribadah, namun juga merujuk pada kepedulian terhadap sesama manusia seperti kedermawanan, gotong royong, kepatuhan terhadap norma-

norma sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan alam seperti pelestarian lingkungan. Pada era urbanisasi, modernisasi, dan globalisasi seperti saat ini, sering kali membawa dampak pada perubahan pola hidup dan interaksi sosial yang dapat mempengaruhi dinamika hubungan sosial di dalam masyarakat multikultural. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya individualisme, melemahnya ikatan sosial, serta berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya nilai-nilai kesalehan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk merespons perubahan-perubahan tersebut, diperlukan suatu alat ukur yang dapat memberikan gambaran obyektif tentang sejauh mana masyarakat mewujudkan atau mempertahankan nilai-nilai kesalehan. Dalam konteks kesalehan sosial, kepedulian lingkungan memainkan peran yang sangat penting. Lingkungan yang sehat dan lestari adalah prasyarat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan mencakup tindakan-tindakan seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, mendukung program daur ulang, dan melestarikan sumber daya alam. Tindakan-tindakan ini tidak hanya berdampak pada kelestarian alam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi inti dari kesalehan sosial. Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 51

Indeks Kesalehan Sosial kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kesalehan Sosial	65,33	65,33	80,98	81,04	81,77

Sumber:Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dalam 4 (empat) tahun terakhir, IKS Kabupaten Mojokerto mengalami tren yang positif yaitu berada dalam kategori yang baik dan mengalami peningkatan indeks. Pada tahun 2020, IKS sebesar 64,70 (baik), tahun 2021 IKS sebesar 65,33 (baik), tahun 2022 IKS sebesar 80,98 (baik), dan tahun 2023 IKS sebesar 81,04 (baik). Hal tersebut menandakan bahwa program pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup efektif dalam meningkatkan kesalehan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap indikator, subdimensi, dan dimensi penyusun Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Kabupaten Mojokerto, diketahui bahwa IKS tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai mencapai 81,77. Indeks ini dibentuk oleh dua dimensi utama, yaitu kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan. Pada dimensi kepedulian sosial, subdimensi resiprositas mencatat skor tertinggi sebesar 9,72, sementara subdimensi sikap percaya memiliki skor terendah yakni 8,18. Sementara itu, dalam dimensi kepedulian lingkungan, penghematan air memperoleh nilai tertinggi sebesar 8,99, sedangkan pengurangan polusi udara menjadi subdimensi terendah

dengan nilai 5,37. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih berada di bawah kepedulian sosial. Seluruh dimensi yang diukur merupakan faktor signifikan yang membentuk Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Mojokerto.

b. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam pembangunan nasional. Ketika masyarakat hidup harmonis, terwujud kerukunan umat beragama, maka pembangunan sosial dan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di bidang agama, kerukunan umat beragama dengan menggunakan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Indeks ini mengukur 3 (tiga) dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dari capaian IKUB 2020-2024, menunjukkan bahwa indeks kerukunan umat beragama meningkat dari tahun ketahun. Artinya di Kabupaten Mojokerto toleransi antar umat beragama, saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas maupun kerjasama, keterlibatan, empati dan simpati antar umat beragama semakin tinggi. Berikut gambaran capaian IKUB Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 :

Tabel 2. 52
Capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama

No	Tahun	Capaian
1	2020	69.48
2	2021	70.33
3	2022	72.84
4	2023	73.51
5	2024	74,5

Sumber: Bappeda Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Pada tahun 2019, indeks kerukunan berada di angka 69,81, kemudian sedikit menurun menjadi 69,48 pada tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan pada tahun tersebut, indeks kembali naik signifikan menjadi 70,33 di tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian 72,84. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana indeks mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 73,51. Pada tahun 2024 IKUB naik signifikan menjadi 74,5. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek toleransi, kerja sama, dan harmoni antar umat beragama di Kabupaten Mojokerto. Faktor-faktor seperti program pemerintah, dialog antar umat beragama, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga kerukunan dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan indeks ini dari tahun ke tahun.

6) Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator yang dapat menunjukkan komitmen daerah dalam melakukan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus dikoordinasikan dan dilakukan secara terpadu dan holistic oleh semua Perangkat Daerah terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan. Indikator Perlindungan Anak di dukung 5 klaster sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) meliputi :

- 1. Hak sipil dan kebebasan
- 2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- 3. Hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 4. Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang
- 5. Hak perlindungan khusus anak

Tabel 2. 53

Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun (persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Jawa Timur	71,80	72,25	64,59	66,10	66,69
Indeks Perlindungan Anak (IPA) Mojokerto	71,8	72,25	67,79	69,11	69,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, Tahun 2024

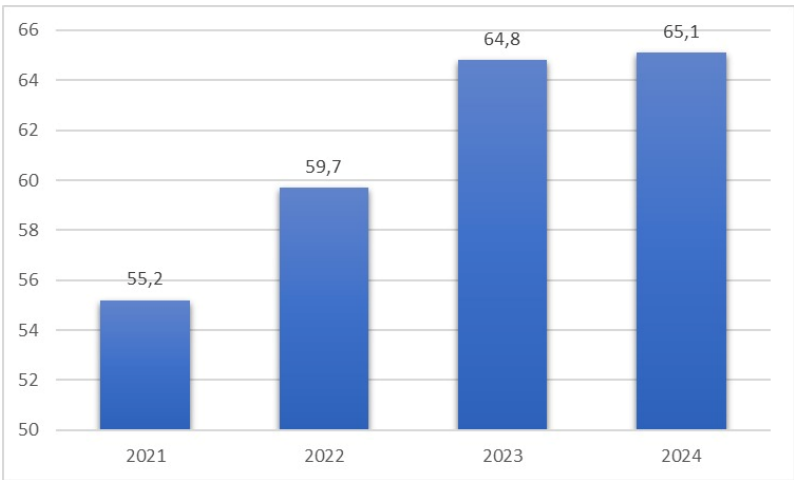
Pada tahun 2019, IPA tercatat sebesar 71,80% dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2020 menjadi 72,25%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan drastis hingga mencapai 64,59%, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, di mana kasus kekerasan anak, keterbatasan akses layanan perlindungan, serta faktor sosial ekonomi berkontribusi terhadap menurunnya perlindungan bagi anak-anak. Meskipun demikian, pada tahun 2022 angka ini menunjukkan pemulihan dengan sedikit kenaikan menjadi 66,10%. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan anak, termasuk program advokasi, peningkatan layanan pengaduan, serta edukasi terhadap masyarakat mengenai hak-hak anak.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021, adanya pemulihan di tahun 2022 menunjukkan bahwa langkah-langkah perlindungan anak mulai kembali berjalan ke arah yang lebih baik. Namun, untuk mencapai peningkatan

yang lebih optimal, perlu ada upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam memastikan akses terhadap layanan perlindungan anak yang lebih merata, serta pencegahan kasus kekerasan dan eksploitasi anak.

b. IBangga

Kabupaten Mojokerto telah menjadikan pembangunan keluarga sebagai salah satu pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, sejalan dengan amanat UU Nomor 52 Tahun 2009. Berdasarkan data terbaru, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Mojokerto menunjukkan kemajuan signifikan dari 55,18 pada 2021 menjadi 65,11 di 2024. Capaian ini menempatkan Mojokerto pada kategori berkembang (40-70), sekaligus melampaui rerata Provinsi Jawa Timur (62,7) dan nasional (62,4). Meskipun demikian, status tangguh (>70) belum tercapai, mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam pendekatan **multidimensional**.



Gambar 2. 18 iBangga dan Indikator Pembentuk, 2022-2024

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan Tahun 2024

Gambar di atas menunjukkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) berdasarkan data 2024 untuk Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka 62,7 dan terkategori berkembang (40-70) dengan tingkat variasi hampir merata. Sementara itu, Mojokerto mencapai iBangga 65,1 di tahun 2024. Capaian ini mencerminkan upaya dan perbaikan yang dilakukan dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, capaian indeks iBangga Mojokerto melampaui capaian Provinsi Jawa Timur (62,7) dan capaian nasional (62,4) yang berarti memiliki tingkat pembangunan keluarga yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rerata seluruh kota di Indonesia

c. Indeks Pembangunan Gender

Kesetaraan gender memiliki arti yang mendasar dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Ketika kesetaraan gender tercapai, semua individu memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan, tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan berkeadilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta kualitas kehidupan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dan laki-laki, kesetaraan gender juga berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, merangsang inovasi, serta meningkatkan stabilitas sosial dan politik. Indeks Pembangunan Gender (*Gender Development Index/GDI*) adalah salah satu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. GDI menggabungkan tiga dimensi penting, yaitu kesehatan (diukur melalui harapan hidup), pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan tingkat melek huruf perempuan dan laki-laki), serta pendapatan (diukur melalui pendapatan riil per kapita). Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang tingkat perkembangan dan partisipasi perempuan dalam masyarakat, GDI membantu mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai bidang, memberikan data empiris dalam mencapai kesetaraan gender, dan mendorong perhatian terhadap isu-isu kesetaraan gender dalam pembangunan.

Tabel 2. 54
Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85
Provinsi Jawa Timur	91,07	91,67	92,08	92,15	92,19
Kabupaten Mojokerto	91,10	91,24	91,37	91,63	91,84

Sumber : Dinas P2KBP2 Kab Mojokerto Tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengalami tren positif baik di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024. Secara nasional, IPG sedikit meningkat dari 91,06 pada tahun 2020 menjadi 91,85 pada tahun 2024. Meskipun angkanya stabil, terdapat peningkatan yang konsisten setiap tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor di Indonesia. Di tingkat Provinsi Jawa Timur, angka IPG mengalami kenaikan yang sedikit lebih tinggi dari nasional, dengan peningkatan dari 90,07 pada 2020 menjadi 92,19 pada 2024. Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur berhasil meningkatkan kesetaraan gender lebih baik dibandingkan tingkat nasional, dengan kenaikan sekitar 1,24 poin selama lima tahun. Untuk Kabupaten Mojokerto, meskipun terdapat kenaikan yang stabil, pergerakannya tidak sebesar di tingkat provinsi. IPG

Kabupaten Mojokerto meningkat dari 91,10 pada 2020 menjadi 91,84 pada 2024. Walaupun ada perbaikan, laju pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, yang menunjukkan adanya tantangan Kabupaten Mojokerto dalam penerapan kebijakan atau program yang mendukung kesetaraan gender. Artinya tingkat partisipasi perempuan di segala aspek yang ada di Kabupaten Mojokerto sudah tinggi yang di mana perempuan dilibatkan di berbagai macam hal. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Mojokerto semakin memiliki peran secara aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pembangunan Gender menjadi salah satu indikator untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam sektor politik dan ekonomi.

d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender merupakan perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif atau eksekutif sangat mempengaruhi status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut), PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Tabel 2. 55
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	75,57	76,26	76,59	76,9	77,62
Jawa Timur	73,03	72,36	74,42	74,9	75,32
Kabupaten Mojokerto	79,87	80,2	80,59	81,25	78,00

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Berdasarkan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren yang positif dengan angka IDG yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Mojokerto tercatat sebesar 79,87, dan menurun menjadi 78,00 pada tahun 2024, dengan penurunan total sebesar 1,87 poin. Angka ini menunjukkan belum optimalnya dalam pemberdayaan gender di daerah tersebut. Jika dibandingkan dengan tingkat Jawa Timur dan Nasional, Kabupaten Mojokerto selalu mencatatkan IDG yang lebih tinggi. IDG Jawa Timur cenderung mengalami fluktuasi, turun sedikit pada 2021, namun kembali meningkat pada 2022 dan 2023, mencapai 75,32 pada 2024. Sementara itu, IDG Nasional juga menunjukkan kenaikan yang konsisten, meskipun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Mojokerto, dengan angka mencapai 77,62 pada 2024. Kabupaten Mojokerto berhasil mempertahankan posisi yang lebih unggul dalam hal pemberdayaan gender dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur dan Nasional, mencerminkan upaya yang lebih efektif dalam meningkatkan peran serta dan kesejahteraan gender di daerah tersebut. Peningkatan capaian IDG Kab Mojokerto tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kontribusi ekonomi atau pendapatan bagi perempuan. Kondisi ini menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Mojokerto dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Kualitas hidup perempuan dan anak yang meningkat dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu tidak adanya atau rendahnya angka kekerasan pada perempuan dan anak.

e. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender adalah indikator baru yang menyempurnakan indikator ketimpangan gender sebelumnya dan disusun berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. IKG menunjukkan kerugian potensial dalam capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan dalam kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar 0-1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi).

Tabel 2. 56
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	0,476	0,449	0,460	0,440	0,423	0,347
Kabupaten Mojokerto	0,443	0,346	0,402	0,349	0,343	0,295

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2019, IKG Kabupaten Mojokerto berada di angka 0,443, yang sedikit lebih baik dibandingkan Jawa Timur dengan 0,476. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan drastis dalam IKG Kabupaten Mojokerto menjadi 0,346, yang menandakan peningkatan kesetaraan gender dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, terjadi kenaikan kembali dalam IKG Kabupaten Mojokerto menjadi 0,402, yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan ketimpangan gender dibanding tahun 2020. Sementara itu, angka IKG Jawa Timur juga mengalami kenaikan dari 0,449 ke 0,460. Namun, pada 2022, Kabupaten Mojokerto kembali mengalami penurunan ketimpangan gender dengan angka 0,349, yang lebih baik dibandingkan provinsi yang mengalami penurunan lebih signifikan ke 0,440. Tren positif berlanjut di tahun 2023, di mana IKG Kabupaten Mojokerto turun lagi menjadi 0,343, menunjukkan peningkatan kesetaraan gender lebih lanjut. Hal ini juga sejalan dengan tren di Jawa Timur, yang juga mengalami perbaikan dengan indeks turun ke 0,423. Pada tahun 2024 IKG Kab. Mojokerto 0,295 lebih atau turun signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan IKG di Kabupaten Mojokerto menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender, terutama dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 dan 2024. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021, secara umum Kabupaten Mojokerto memiliki IKG yang lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, menandakan bahwa kesenjangan gender di daerah ini lebih kecil dibandingkan rata-rata provinsi. Hal ini dapat menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi perempuan, Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik. Penurunan IKG tahun 2024 dipengaruhi oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan yang turun sedangkan perbaikan dimensi pemberdayaan dipengaruhi oleh perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas yang meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dalam rangka menurunkan ketimpangan gender maka dilakukan peningkatan partisipasi perempuan melalui pelatihan perempuan melalui pelatihan keterampilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Kondisi ini dikenal sebagai “bonus demografi”. Pada periode inilah ada peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Di satu sisi mereka dapat

mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Di sisi lain, mereka juga dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif, tetapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 2. 57
Komposisi Penduduk (Jiwa) dan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

Tahun	0 – 14 Tahun	15 – 64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (Jiwa)
2020	255.140	785.990	75.850	42,11
2021	254.840	791.420	80.520	42,37
2022	254.380	796.440	85.480	42,67
2023	253.720	801.020	90.710	43,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa struktur umur penduduk Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil Perbaikan Supas 2015, jumlah penduduk usia produktif tahun 2023 menjadi 801.020 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Mojokerto menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) pada tahun 2023 berjumlah 90.710 jiwa, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun penduduk usia lanjut meningkat tetapi karena penduduk usia muda (0-14 tahun) terus menurun menyebabkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*).

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur. Ini tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Rasio ketergantungan diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Kondisi ini dikenal sebagai “bonus demografi”. Pada periode inilah ada peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Di sisi lain,

mereka juga dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif, tetapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja. Pada tahun 2020 ada sebanyak 255.140 jiwa yang berusia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 254.840. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2023 komposisi penduduk berusia muda (0-14 tahun) memiliki jumlah yang tidak jauh berbeda yakni sebanyak 254.380, dan 253.720 jiwa. Struktur umur penduduk Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Berdasarkan Proyeksi Penduduk jumlah penduduk usia produktif mencapai 785.990 jiwa pada tahun 2020 hingga tahun 2023 menjadi 801.020 jiwa.

Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Mojokerto menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) pada tahun 2020 berjumlah 75.850 jiwa. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 80.520 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 85.480 dan 90.710 jiwa. Meskipun penduduk usia lanjut meningkat tetapi karena penduduk usia muda (0-14 tahun) terus menurun menyebabkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Mojokerto cenderung menurun setiap tahun.

b. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan suatu daerah, termasuk Kabupaten Mojokerto. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi mencerminkan sejauh mana masyarakat Mojokerto telah mengakses dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi, seperti diploma, sarjana, magister, atau doktor. Data ini tidak hanya menunjukkan tingkat literasi dan keterampilan masyarakat Mojokerto, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam penyusunan kebijakan pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Tabel 2. 58

Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

No	Jenis Kelamin	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	1.136.300	1.147.435	1.156.144
2	Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	52.242	110.212	115.534,00
3	Presentase Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	4,60%	9,61%	9,99%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan

baik dari segi jumlah absolut maupun persentasenya. Pada tahun 2022, dari total 1.136.300 penduduk, hanya 52.242 orang (4,60%) yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2023 menjadi 110.212 orang (9,61%) dari total 1.147.435 penduduk, menunjukkan peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam jumlah maupun persentase. Pada tahun 2024, jumlah penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi kembali meningkat menjadi 115.534 orang (9,99%) dari total 1.156.144 penduduk. Meskipun peningkatan dari 2023 ke 2024 tidak sebesar tahun sebelumnya, tren ini tetap menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam capaian pendidikan tinggi masyarakat.

Hal ini dapat mencerminkan meningkatnya aksesibilitas, kesadaran, dan dukungan terhadap pendidikan tinggi di kalangan penduduk usia produktif. Namun demikian, dengan persentase yang masih berada di bawah 10% pada tahun 2024, masih terdapat tantangan besar dalam mendorong lebih banyak penduduk untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi agar kualitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan.

c. Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2. 59
Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Mojokerto 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	0.63	0.64	0.65	0.66	0.66

Sumber Data: BPS Jawa Timur

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indeks Pendidikan Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan dalam periode 2019-2023. Pada tahun 2019, indeks pendidikan berada di angka 0,63 dan mengalami kenaikan bertahap setiap tahunnya, mencapai 0,64 pada 2020, 0,65 pada 2021, dan 0,66 pada 2022. Angka tersebut bertahan di 0,66 pada tahun 2023. Secara persentase, kenaikan indeks dari 2019 ke 2020 adalah sekitar 1,59%, dari 2020 ke 2021 naik 1,56%, dan dari 2021 ke 2022 meningkat 1,54%. Namun, pada 2023, tidak terjadi kenaikan, yang menunjukkan stagnasi. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan di

Kabupaten Mojokerto, meskipun laju pertumbuhannya relatif stabil dan cenderung melambat pada tahun terakhir. Kenaikan indeks ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program pendidikan, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Mojokerto sehingga berdampak produktivitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai Indeks Pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia.

d. Kondisi Ketenagakerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu sektor pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan), sektor industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi), dan sektor jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan/tanah, jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan). Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan mereka yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas (pertanian/nonpertanian), dan pekerja keluarga/tak dibayar dikategorikan kegiatan informal.

Tabel 2. 60
Status Pekerjaan Utama 2021-2023

No	Status Pekerjaan Utama	2021	2022	2023
1	Berusaha Sendiri	124.127	103.326	119.909
2	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Dibayar dan Buruh/Karyawan/Pegawai	299.030	254.689	265.695
3	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar dan Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	11.539	157.361	174.768
4	Pekerja Bebas	58.079	100.181	57.161
Jumlah		597.775	615.557	617.533

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Dalam periode 2021-2023, status pekerjaan utama di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi yang cukup signifikan di berbagai kategori. Jumlah pekerja yang berusaha sendiri

mengalami penurunan dari 124.127 orang pada 2021 menjadi 103.326 orang pada 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 119.909 orang pada 2023. Penurunan tajam pada 2022 disebabkan oleh dampak ekonomi setelah pandemi, yang membuat banyak pekerja mandiri kesulitan mempertahankan usahanya. Sementara itu, kategori berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai juga mengalami tren penurunan, dari 299.030 orang pada 2021 menjadi 254.689 pada 2022, sebelum naik sedikit menjadi 265.695 orang pada 2023. Hal ini mengindikasikan adanya pemulihan di sektor formal meskipun belum kembali ke angka sebelum 2022. Sebaliknya, jumlah pekerja dalam kategori berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar dan pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami lonjakan drastis, dari hanya 11.539 orang pada 2021 menjadi 157.361 orang pada 2022, lalu meningkat lagi menjadi 174.768 orang pada 2023. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan pekerja dalam sektor informal dan usaha berbasis keluarga, yang bisa mencerminkan ketidakstabilan ekonomi atau pergeseran pola kerja masyarakat pasca pandemi.

Sementara itu, jumlah pekerja bebas mengalami fluktuasi cukup signifikan. Pada 2021, jumlahnya mencapai 58.079 orang, melonjak drastis menjadi 100.181 orang pada 2022, sebelum turun kembali ke 57.161 orang pada 2023. Peningkatan pada 2022 disebabkan dengan meningkatnya jumlah pekerja sektor informal yang mencari penghasilan tambahan setelah pandemi, sementara penurunan pada 2024 bisa menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada pekerjaan tidak tetap akibat perbaikan kondisi ekonomi. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sektor informal mengalami pertumbuhan besar, sedangkan sektor formal dan pekerja mandiri menghadapi tantangan yang membuat jumlahnya berfluktuasi. Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan, diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan sektor formal, pemberdayaan usaha mandiri, serta peningkatan akses terhadap perlindungan sosial bagi pekerja informal.

Tabel 2. 61
Jumlah Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Mojokerto, 2021-2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2021	2022	2023	2024
1	<i>Agriculture</i> (Pertanian)	100,14	148,41	142,50	128,62
2	<i>Manufacture</i> (Industri Pengolahan)	221,77	199,29	161,06	227,64
3	<i>Service</i> (Jasa)	275,87	267,86	313,97	289,56
Jumlah		597.775	597,78	615,56	617,53

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan status pekerjaan utama jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai paling besar dibandingkan status pekerjaan yang

lain. Secara umum, sektor industri/ *manufacture* masih tetap menjadi lapangan usaha yang diminati bagi para tenaga kerja dan menyerap tenaga kerja selama tahun 2021 meskipun sedikit menurun dan banyak yang beralih pada sektor lainnya. Pergeseran tenaga kerja dari sektor primer (pertanian) ke sektor industri dan jasa-jasa. Hal ini menunjukkan bahwa minat penduduk Kabupaten Mojokerto pada pekerjaan di sektor pertanian semakin menurun. Sektor industri dan jasa-jasa dinilai sebagai ladang pekerjaan yang lebih menjanjikan di Kabupaten Mojokerto. Saat ini sektor jasa-jasa adalah sektor yang paling diminati oleh penduduk Kabupaten Mojokerto karena mudah juga hasilnya yang dinilai lumayan tanpa harus keluar rumah. Khusus pekerja bebas, tidak dibedakan lagi antara non pertanian dan pertanian.

Tabel 2. 62
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto 2021-2024

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja (15+ th)	897.979	906.653	893.299	908.607
2	Penduduk Usia Kerja (15+ th) Laki-Laki	451.507	450.776	446.883	453.267
3	Penduduk Usia Kerja (15+ th) Perempuan	446.472	455.877	446.416	455.340
4	Angkatan Kerja	632.808	646.778	647.752	671.806
5	Angkatan Kerja Laki-Laki	381.748	385.708	389.846	394.614
6	Angkatan Kerja Perempuan	251.060	261.070	257.906	277.192
7	Bekerja	597.775	615.557	617.533	645.825
8	Penduduk Laki-Laki Bekerja	363.193	371.706	372.377	378.965
9	Penduduk Perempuan Bekerja	234.582	243.851	245.156	266.860
10	Pencari Kerja	35.033	31.221	30.219	1.414
11	Penduduk Laki-Laki Pencari Kerja	18.555	14.002	17.469	635
12	Penduduk Perempuan Pencari Kerja	16.478	17.219	12.750	779
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,47	71,34	72,51	73,94%
14	TPAK Laki-Laki	85,5	85,57	87,24	87,06%
15	TPAK Perempuan	55,6	57,27	57,07	60,88%
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,54	4,83	4,67	3,87%
17	TPT Laki-Laki	4,86	3,63	4,48	3,97%
18	TPT Perempuan	6,56	6,6	4,94	3,73%
19	Bekerja Pada Sektor Pertanian	86.725	75.141	23.082	29.765
20	Bekerja Pada Sektor Non Pertanian	83,25	75,89	76,92	92.888
21	Bekerja Status Berusaha	20,76	32,71	37,80	29,77
22	Bekerja Status Buruh/Pekerja Bebas	9.897	39.700	349.92	128.623
23	Bekerja Status Pekerja Keluarga	9.552	11.311	12.318	81.072

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, 2024

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto periode 2021-2023, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam berbagai indikator tenaga kerja. Penduduk usia kerja (15+ tahun) mengalami fluktuasi, dengan peningkatan dari 897.979 orang pada 2021 menjadi 906.653 orang pada 2022, namun turun kembali menjadi 893.299 orang pada 2023. Angkatan kerja juga mengalami kenaikan dari 632.808 orang pada 2021 menjadi 646.778 orang pada 2022, dan terus meningkat menjadi 647.752 orang pada 2023, mencerminkan bertambahnya

partisipasi masyarakat dalam dunia kerja. Jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dari 597.775 orang pada 2021 menjadi 615.653 orang pada 2022, dan naik lagi menjadi 627.533 orang pada 2023. Namun, jumlah pencari kerja mengalami penurunan dari 35.033 orang pada 2021 menjadi 31.221 orang pada 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 30.219 orang pada 2023. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun kesempatan kerja meningkat, masih ada tantangan dalam menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia.

Dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), terjadi peningkatan dari 70,47% pada 2021 menjadi 71,34% pada 2022 dan mencapai 72,51% pada 2023, yang menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,54% pada 2021 menjadi 4,83% pada 2022 dan 4,67% pada 2023, menunjukkan perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja. Dari segi sektor pekerjaan, terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Persentase pekerja di sektor pertanian meningkat tajam dari 16,75% pada 2021 menjadi 24,11% pada 2022 dan 23,33% pada 2023, yang menunjukkan semakin banyak tenaga kerja yang bergeser ke sektor ini. Sebaliknya, pekerja di sektor non-pertanian mengalami penurunan dari 83,25% pada 2021 menjadi 75,89% pada 2022 dan 76,92% pada 2023. Dari sisi status pekerjaan, jumlah pekerja berstatus buruh/pekerja bebas mengalami lonjakan tajam dari 9,70% pada 2021 menjadi 39,70% pada 2022, kemudian meningkat drastis lagi menjadi 349,92% pada 2023, yang menandakan pergeseran besar ke sektor informal atau pekerjaan fleksibel.

Sementara itu, pekerja berstatus keluarga juga mengalami peningkatan dari 9,52% pada 2021 menjadi 12,28% pada 2023, yang bisa mencerminkan meningkatnya ketergantungan pada usaha keluarga. Data ini menunjukkan peningkatan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran, namun juga adanya pergeseran tenaga kerja ke sektor informal dan pertanian

2) IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan memegang peran strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto. Sebagai salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi, menyerap tenaga kerja secara signifikan, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Berikut Pertumbuhan PDRB Industri pengolahan dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2. 63
Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	0,16	5,35	6,58	5,78	5,89

Sumber:BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan di Kabupaten Mojokerto selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif yang konsisten. Pada tahun 2020, sektor ini hanya tumbuh sebesar 0,16%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memukul sektor industri secara nasional. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan pertumbuhan signifikan menjadi 5,35%, yang mencerminkan pemulihan awal kegiatan industri pasca pandemi.

Pertumbuhan terus meningkat pada tahun 2022, mencapai 6,58%, menjadi pertumbuhan tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Kenaikan ini mengindikasikan semakin membaiknya aktivitas industri pengolahan yang didorong oleh meningkatnya permintaan dan stabilitas pasokan. Meskipun pada tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan menjadi 5,78%, sektor ini tetap menunjukkan performa yang kuat dan stabil. Di tahun 2024, pertumbuhan kembali meningkat sedikit menjadi 5,89%, menunjukkan keberlanjutan pertumbuhan industri pengolahan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Dari data di atas menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Mojokerto memiliki daya tahan dan kapasitas pemulihan yang baik, serta berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Konsistensi pertumbuhan di atas 5% selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor ini telah menjadi sektor strategis yang perlu terus didukung, baik dari sisi infrastruktur, kemudahan investasi, penguatan SDM industri, hingga perluasan akses pasar.

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Sektor Akomodasi Makan dan Minum

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta akomodasi sektor makan dan minum memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah Kabupaten Mojokerto, terutama sebagai penyangga ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, dan sumber penghidupan utama masyarakat di wilayah pedesaan. Pertumbuhan PDRB sektor ini mencerminkan sejauh mana aktivitas ekonomi primer mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta ketahanan ekonomi lokal. Meskipun kontribusinya terhadap total PDRB cenderung lebih kecil dibanding sektor industri, sektor ini tetap strategis karena menyentuh langsung kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat.

Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di banyak wilayah di Kabupaten Mojokerto, kegiatan pertanian dan perikanan masih menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang menopang konsumsi dan distribusi produk hasil bumi. Oleh karena itu, menjaga pertumbuhan sektor ini tetap stabil dan berkelanjutan sangat penting, tidak hanya untuk

mendukung perekonomian daerah, tetapi juga untuk menciptakan pemerataan pembangunan antar kawasan.

Tabel 2. 64
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,59	1,03	1,38	4,36	0,13

Sumber:BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data di atas mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor akomodasi makan dan minum di Kabupaten Mojokerto masih sangat rentan terhadap perubahan kondisi eksternal dan memerlukan pendekatan penguatan struktural. Pengembangan teknologi pertanian, diversifikasi komoditas, peningkatan akses pasar, serta perlindungan terhadap petani dari Risiko ekonomi dan iklim menjadi hal penting agar sektor ini dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan ke depan.

c. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren pertumbuhan positif selama periode 2020 hingga 2024. Perkembangan sektor ini memberikan kontribusi strategis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto, mencerminkan perannya dalam mendorong perekonomian daerah.

Tabel 2. 65
Proporsi PDRB Akomodasi makan dan minum

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	1,94	1,94	2,01	2,04	2,03

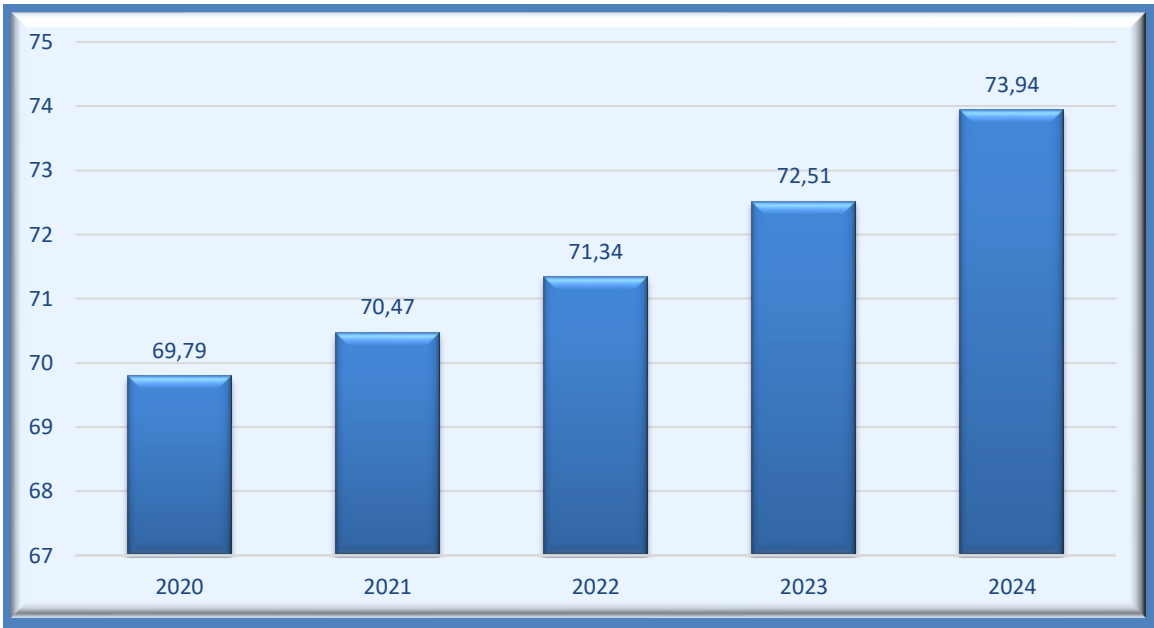
Sumber:BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, rasio PDRB sektor ini terhadap total PDRB tercatat sebesar 1,94 persen pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 2,01 persen pada tahun 2022, serta 2,04 persen pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 2,03 persen, kontribusi sektor ini tetap stabil dan menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang, terutama dengan dukungan sektor pariwisata, kuliner lokal, dan meningkatnya kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan di Kabupaten Mojokerto

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Berikut merupakan data Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020-2024:



Gambar 2. 19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mojokerto
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 69,79%, kemudian meningkat menjadi 70,47% di tahun 2021. Tren kenaikan ini terus berlanjut, mencapai 71,34% di 2022, lalu naik lagi menjadi 72,51% pada 2023, dan mencapai angka tertinggi sebesar 73,94% pada 2024. Peningkatan TPAK ini mencerminkan adanya pertumbuhan dalam keterlibatan masyarakat dalam pasar kerja, baik karena meningkatnya kesempatan kerja, kebijakan pemerintah yang mendukung ketenagakerjaan, atau perubahan sosial-ekonomi yang mendorong lebih banyak individu untuk bekerja. Kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun juga menunjukkan pemulihan dan perkembangan ekonomi yang lebih banyak tenaga kerja terserap dalam berbagai sektor. Jika tren ini terus berlanjut, dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. TPAK mampu mengungkap besar animo penduduk usia kerja untuk ikut aktif dalam kegiatan yang bersifat ekonomis. Secara umum, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan untuk aktif secara ekonomi sangat tinggi.

e. Indeks Inovasi Daerah

Harmonisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJ-PID) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan menyelaraskan arah pengembangan IPTEK dengan prioritas pembangunan daerah. Ini memastikan kontribusi IPTEK terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta mendukung visi, misi, dan program prioritas RPJMD secara efektif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), daerah diharapkan membentuk dan mengoptimalkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai koordinator, pengelola, dan penggerak kegiatan riset dan inovasi di tingkat daerah. Di Kabupaten Mojokerto, dukungan kebijakan terhadap riset dan inovasi mulai terbangun melalui beberapa instrumen berikut:

1. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto yang di dalamnya memuat tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
2. Ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai peraturan turunan operasional dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024.
3. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Jangka Menengah (RIPJM) yang fokus pada pengembangan teknologi dan inovasi.
4. Kebijakan sektoral di Perangkat Daerah (OPD) yang telah menginisiasi penerapan teknologi dan inovasi dalam pelayanan dan program mereka.

Namun, masih diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi program riset dan inovasi dalam satu platform daerah yang sesuai dengan ketentuan BAPPERIDA, dan pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten agar kebijakan tersebut dapat lebih efektif dalam mendorong PUD (Produk Unggulan Daerah) dan menyelesaikan PPD (Permasalahan Prioritas Daerah) berbasis teknologi dan inovasi.

Selain itu, diperlukan pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi yang merupakan salah satu pondasi strategis untuk mendukung penguatan Pengembangan Unggulan Daerah (PUD) dan penyelesaian Permasalahan Pembangunan Daerah (PPD). Melalui infrastruktur yang memadai, khususnya dalam jaringan telekomunikasi, internet, serta sistem informasi pemerintahan, menjadi fondasi dalam mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang terintegrasi di Kabupaten Mojokerto.

Kemitraan Riset dan Inovasi juga masih menjadi salah satu titik lemah di Kabupaten Mojokerto. Kondisi tersebut tampak jelas melalui proses difusi inovasi di Kabupaten Mojokerto yang masih terbatas pada inovasi yang dihasilkan oleh OPD maupun pelaku usaha lokal, serta saluran komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan inovasi tersebut, baik melalui media daring maupun pertemuan tatap muka. Jejaring Riset dan Inovasi yang seharusnya menjadi wadah partisipasi aktif dan interaksi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat luas dalam mendukung penyebaran inovasi, hingga saat ini belum terbentuk secara optimal. Walaupun sudah terdapat kemitraan dengan lembaga eksternal

seperti universitas dan konsultan swasta yang terlibat dalam pendampingan, kajian, maupun fasilitasi inovasi. Meskipun kemitraan ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat kapasitas teknis dan penyebaran informasi, keberadaan jejaring sosial internal di tingkat daerah masih perlu diperkuat agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya tersosialisasikan, tetapi juga benar-benar diadopsi, dimanfaatkan, dan dikembangkan lebih lanjut oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Mojokerto.

Tidak kalah pentingnya adalah penguatan budaya riset dan inovasi di daerah melalui dukungan sistem yang terintegrasi, penghargaan bagi pelaku inovasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Pada kondisi eksisting di Kabupaten Mojokerto, basis data tunggal untuk promosi dan kampanye produk unggulan daerah belum digunakan secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan kegiatan promosi masih berjalan secara parsial di masing-masing sektor, sehingga belum tercipta sinergi antar-OPD dalam mendorong daya saing produk daerah. Selain itu, kompetisi dan pemberian penghargaan yang berfokus pada riset dan inovasi dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) belum terlaksana. Padahal, langkah ini penting untuk memotivasi para pelaku inovasi baik dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, maupun akademisi.

Berangkat dari beragam kondisi riset dan inovasi daerah tersebut, Kabupaten Mojokerto menentukan Tema Superprioritas Produk Unggulan Daerah. Melalui pendekatan metodologis yang saintifik dan ilmiah serta analisis komparatif yang komprehensif, diperoleh hasil bahwa industri makanan yang sehat dan berdaya saing merupakan sektor unggulan di Kabupaten Mojokerto. Sektor tersebut memiliki potensi pasar yang luas, tren permintaan yang terus meningkat, serta peluang inovasi yang tinggi. Makanan olahan sehat, keripik, kerupuk, dan produk sejenis dapat dikembangkan dengan variasi yang beragam sesuai selera pasar lokal maupun nasional. Keunggulan lain dari industri makanan adalah kebutuhan modal yang relatif lebih kecil dan kemudahan proses produksinya, sehingga dapat dilakukan oleh lebih banyak lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro dan kecil. Dengan modal yang terjangkau, industri ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Penyusunan RIPJ-PID telah mengidentifikasi Produk Unggulan Daerah (PUD) dan Permasalahan Prioritas Daerah (PPD), antara lain:

Produk	Skor	Z-score
Kerupuk/Kerecek Rambak Sapi	100	1,949538
Gerabah dari Tanah Liat	96	1,690739
Pembuatan Patung Arca	96	1,690739
Keripik Singkong	92	1,43194
Jamu	92	1,43194
Kerajinan Bonsai/Buah Imitasi	92	1,43194
Produk Mebe	92	1,43194

Pembuatan Udeng (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Pembuatan Tote Bag (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Kerajinan dari <i>Fiberglass</i>	92	1,43194
Pembuatan Kaos (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Pembuat Topi (Oleh-oleh Khas Mojokerto)	92	1,43194
Layah	92	1,43194
Onde-onde	90	1,30254
Sambel wader	90	1,30254
Sarung Goyor	90	1,30254
Batik Tulis/Busana Batik (Sarung, Kain, Sajadah)	90	1,30254
Kerudung Bercorak Budaya Lokal	90	1,30254
Kerajinan Bunga Daur Ulang Sampah	90	1,30254
Aksesoris/Aksesoris Gantungan Kunci	90	1,30254
Pembuatan Tas/Tas Rajut/Tas Kulit	90	1,30254
Kerajinan Bunga dari Plastik	86	1,043741

Berikut hasil analisis yang menjadi Produk Unggulan Daerah

No.	Pembagian KBLI Produk Unggulan Prioritas	Produk
1	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	
	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	Genteng/Bata Gerabah Bata Merah
2	Industri makanan yang sehat dan berdaya saing	
	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	Keripik Kedelai, Samiler Kerupuk Ikan, Keripik Gadung Rambak, Keripik Pisang Rengginang, Kerupuk Beras
	Industri Makanan dan Masakan Olahan	Makanan Ringan, Kue basah Olahan Usus Jemblem Telur Asin
3	Industri kerajinan non logam	
	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	Anyaman Bambu Kerajinan Bambu Pigora
	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput, dan sejenisnya	Patung batu
	Industri Kain Sulaman	Sulam pita
	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya	Tas Dompet
	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari	Sepatu dan sandal
4	Industri kerajinan logam	
	Industri Pengolahan Logam Tidak Terdefinisi di Tempat Lain	Cor kuningan Perak

Penyelarasan dilakukan untuk memastikan bahwa IPTEK menjadi pilar strategis dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis inovasi. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan di Mojokerto, Jawa Timur, akan didukung oleh riset dan inovasi yang relevan, menjadikan program-program daerah lebih tepat sasaran dan berdaya saing.

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Data IID Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup dinamis seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 66
Indeks Inovasi Daerah

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45,31	55,25	51,74	62,07

Sumber:Kementrian dalam Negeri Tahun 2024

Untuk mendorong peningkatan kinerja Inovasi hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu mengintegrasikan inovasi ke dalam program prioritas daerah dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, khususnya terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan. Selain itu, perlu memprioritaskan inovasi di sektor infrastruktur digital dan sanitasi, serta memperluas cakupan layanan publik yang inovatif, terutama untuk menjangkau seluruh wilayah. Pemerintah juga perlu melibatkan lembaga penelitian atau instansi terkait dalam melatih ASN agar mampu menyusun *policy brief* berbasis bukti, yang kemudian dapat dijadikan sebagai salah satu indikator evaluasi inovasi daerah. Guna mempercepat pencapaian indeks inovasi, perlu dilakukan studi banding ke daerah yang lebih inovatif serta mengadopsi praktik terbaik dari daerah tersebut. Kabupaten Mojokerto juga diharapkan mampu mengidentifikasi *quick wins* serta menetapkan inovasi baru setiap tahunnya dengan dukungan data yang lengkap. Di sisi lain, inovasi juga perlu diarahkan pada sektor unggulan daerah seperti ekonomi kreatif, pertanian, dan pariwisata dengan melibatkan UMKM dan mendorong pengembangan produk unggulan berbasis teknologi. Kabupaten Mojokerto perlu menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID) serta mendorong lahirnya regulasi dan alokasi anggaran khusus untuk inovasi daerah. Terakhir, penguatan peran Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pusat data inovasi, penyedia regulasi, serta pelatihan pengisian aplikasi IID bagi perangkat daerah juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem inovasi daerah yang berkelanjutan

f. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator efisiensi investasi yang mengukur seberapa besar tambahan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (PDRB). Semakin rendah nilai ICOR, maka semakin efisien penggunaan modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan

menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Tabel 2. 67
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Mojokerto, 2020–2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	ICOR	-22,55	6,15	4,42	4,97	4,79

Pada tahun 2020, Kabupaten Mojokerto mencatat nilai ICOR negatif sebesar -22,55, yang mencerminkan ketidakefisienan tinggi dalam penggunaan modal akibat kontraksi ekonomi. Hal ini sejalan dengan penurunan PDRB sebesar Rp648,73 miliar meskipun investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih mencapai Rp14.630,54 miliar. Dampak pandemi COVID-19 menjadi faktor utama penyebab anomali ini, di mana investasi tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan signifikan. PDRB tumbuh sebesar Rp2.380,28 miliar, dan ICOR meningkat menjadi 6,15. Meskipun masih cukup tinggi, hal ini mencerminkan pemulihan ekonomi mulai terjadi, meski efisiensi investasi belum optimal. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan efisiensi yang lebih baik, dengan ICOR menurun menjadi 4,42, berkat peningkatan PDRB sebesar Rp3.501,14 miliar dan PMTB yang mencapai Rp15.483,07 miliar.

Pada tahun 2023, ICOR kembali sedikit naik menjadi 4,97, meskipun pertumbuhan PDRB (Rp3.282,84 miliar) dan PMTB (Rp16.316,04 miliar) masih menunjukkan performa yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi tidak sepenuhnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sebanding, karena struktur investasi yang belum sepenuhnya produktif atau faktor teknis lainnya.

Tahun 2024 menunjukkan nilai ICOR 4,79, sedikit lebih efisien dibanding tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan PDRB sebesar Rp3.544,97 miliar dan PMTB yang meningkat menjadi Rp16.966,51 miliar, efisiensi penggunaan modal menunjukkan tren perbaikan secara bertahap. Nilai ICOR ini cukup ideal dalam konteks pembangunan daerah, mencerminkan bahwa investasi yang dilakukan mulai memberikan hasil yang lebih optimal.

g. Daya Saing Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Berikut merupakan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data potensi Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 68
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PMDN	perusahaan	213	285	924	402	1610
PMA	perusahaan	249	193	314	148	701
Total	perusahaan	462	478	1238	550	2311

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi signifikan dalam periode 2020-2024, dengan lonjakan tajam pada tahun 2022 dan 2024. Pada tahun 2020, terdapat 213 perusahaan PMDN dan 249 perusahaan PMA, dengan total 462 investor. Tahun 2021 mengalami peningkatan kecil, dengan PMDN naik 33,8% menjadi 285 perusahaan, sementara PMA turun 22,5% menjadi 193 perusahaan, sehingga total investor mencapai 478 perusahaan atau naik 3,5% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan, dengan jumlah PMDN melonjak 224,2% menjadi 924 perusahaan, sedangkan PMA meningkat 62,7% menjadi 314 perusahaan, sehingga total investor mencapai 1.238 perusahaan, meningkat 159,1% dari tahun sebelumnya. Namun, tahun 2023 mengalami penurunan drastis, di mana PMDN turun 56,5% menjadi 402 perusahaan, dan PMA menurun 52,9% menjadi 148 perusahaan, sehingga total investor turun menjadi 550 perusahaan atau berkurang 55,6% dibanding tahun 2022. Tren kembali berubah signifikan pada tahun 2024, dengan jumlah investor melonjak tajam. PMDN meningkat 300,5% dari tahun sebelumnya menjadi 1.610 perusahaan, sementara PMA naik 373,6% menjadi 701 perusahaan. Total investor di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 mencapai 2.311

perusahaan, meningkat 320% dibanding tahun sebelumnya dan merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan pesat jumlah investor pada tahun 2022 dan 2024 menunjukkan adanya kebijakan atau kondisi ekonomi yang lebih mendukung investasi, baik dari dalam negeri maupun asing. Faktor-faktor seperti kemudahan perizinan, insentif investasi, serta perkembangan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto sangat berperan dalam menarik lebih banyak investor. Jika tren ini terus berlanjut, Kabupaten Mojokerto berpotensi menjadi salah satu daerah tujuan utama investasi di Indonesia. Berikut merupakan nilai investasi di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data potensi yang ada:

Tabel 2. 69

Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Investasi (Juta Rp)
2020	1.361.137
2021	856.699
2022	3.127.948
2023	2.505.519
2024	2.496.135,20

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi dalam periode 2019-2023. Pada 2019, nilai investasi tercatat sebesar Rp1.227.690 juta, kemudian meningkat sebesar 10,86% menjadi Rp1.361.137 juta pada 2020. Namun, pada 2021, investasi mengalami penurunan drastis hingga 37,07%, turun menjadi Rp856.699 juta. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi dan menurunkan minat investasi. Pada 2022, terjadi lonjakan besar dalam investasi, meningkat 265,16% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp3.127.948 juta. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi, meningkatnya kepercayaan investor, serta berbagai kebijakan yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Mojokerto. Namun, pada 2023, nilai investasi kembali mengalami penurunan sebesar 19,89%, turun menjadi Rp2.505.519 juta, meskipun masih jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum 2022. Di tahun 2024 menurun jika dibanding tahun 2023 menjadi Rp 2.496.135,20 Juta. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa investasi di Kabupaten Mojokerto sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, serta daya tarik daerah bagi investor. Meski terjadi penurunan pada 2024, nilai investasi masih relatif tinggi, yang menandakan bahwa Mojokerto tetap menjadi salah satu tujuan investasi yang potensial. Untuk menjaga tren positif ini, diperlukan strategi yang lebih kuat, seperti insentif bagi investor, peningkatan infrastruktur, serta penyederhanaan regulasi guna menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan stabil.

Tabel 2. 70
Jumlah Investasi PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024

Tahun	Nilai Investasi (Juta Rp)
2019	107.491
2020	119.641
2021	75.511
2022	1.323.684,85
2023	1.472.654
2024	1.481.607

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi yang signifikan dalam periode 2019-2024. Pada 2019, nilai investasi tercatat sebesar Rp107.491 juta, kemudian mengalami kenaikan sebesar 11,30% menjadi Rp119.641 juta pada 2020. Namun, pada 2021, terjadi penurunan drastis sebesar 36,87%, dengan nilai investasi turun menjadi Rp75.511 juta. Penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi global dan menurunkan minat investor asing. Pada 2022, investasi asing melonjak tajam mencapai Rp1.323.684,85 juta, meningkat 1.652,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi, meningkatnya daya tarik Kabupaten Mojokerto sebagai tujuan investasi asing. Tren positif ini berlanjut pada 2023, dengan investasi asing kembali meningkat sebesar 11,24% menjadi Rp1.472.654 juta. Pada tahun 2024 investasi PMA naik menjadi Rp1.481.607,00. Kenaikan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto semakin menjadi destinasi menarik bagi investor asing, didukung oleh kebijakan pro-investasi, peningkatan infrastruktur, serta stabilitas ekonomi daerah. Namun, untuk memastikan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan, pemerintah daerah perlu terus menjaga iklim investasi yang kondusif, menyederhanakan regulasi, serta memberikan insentif bagi investor asing agar semakin tertarik menanamkan modalnya di wilayah ini. Tabel di atas merupakan tabel yang menyajikan mengenai jumlah proyek dan nilai investasi yang disetujui serta realisasinya di Kabupaten Mojokerto baik itu investasi untuk penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dapat dilihat pada tabel tersebut di atas bahwa semua realisasi investasi sesuai dengan nilai pada persetujuan, hanya terdapat satu yang tidak sesuai yaitu investasi PMDN pada tahun 2024 di mana ternyata nilai realisasi investasi lebih besar dibandingkan dengan persetujuannya, hal tersebut dapat dikarenakan kurang telitinya perhitungan awal yang telah dilakukan sehingga terjadi ketidaksesuaian realisasi dengan persetujuan investasinya.

Tabel 2. 71

Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi Baru	Rp. Juta	N/A	N/A	4.451.633,35	3.978.173	3.977.742,20
PMA	Rp. Juta	119.641,00	75.511,00	1.323.684,85	1.472.654	1.481.607
PMDN	Rp. Juta	1.361.136,80	856.698,60	3.127.948,50	2.505.519	2.496.135,20

Sumber: DPMPSTP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data Fokus Iklim Berinvestasi di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam nilai investasi baru, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2022, total nilai investasi baru mencapai Rp 4.451.633,35 juta, tetapi mengalami penurunan sebesar 10,6% pada tahun 2023 menjadi Rp 3.978.173 juta dan sedikit menurun lagi sebesar 0,01% pada tahun 2024 menjadi Rp 3.977.742,20 juta. Dari segi PMA, investasi pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 119.641 juta, namun turun 36,9% menjadi Rp 75.511 juta pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, PMA mengalami lonjakan signifikan sebesar 1.653,6% menjadi Rp 1.323.684,85 juta, diikuti dengan peningkatan 11,2% pada tahun 2023 menjadi Rp 1.472.654 juta dan kenaikan lebih lanjut sebesar 0,6% pada tahun 2024 menjadi Rp 1.481.607 juta. Tren ini menunjukkan meningkatnya minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Mojokerto dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, investasi dari PMDN mengalami tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, PMDN tercatat sebesar Rp 1.361.136,80 juta, namun turun 37,1% pada tahun 2021 menjadi Rp 856.698,60 juta. Pada tahun 2022, terjadi lonjakan signifikan sebesar 265,2%, dengan nilai investasi mencapai Rp 3.127.948,50 juta. Namun, tahun 2023 mengalami penurunan 19,9% menjadi Rp 2.505.519 juta, diikuti dengan penurunan kecil sebesar 0,4% pada tahun 2024 menjadi Rp 2.496.135,20 juta. Meskipun nilai investasi baru mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir, tren investasi jangka panjang tetap menunjukkan peningkatan, terutama dalam hal PMA. Peningkatan investasi asing menunjukkan kepercayaan investor global terhadap Kabupaten Mojokerto, sedangkan penurunan investasi dalam negeri dapat menjadi perhatian untuk mempertahankan daya tarik bagi investor lokal. Untuk menjaga tren pertumbuhan, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam meningkatkan insentif investasi, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan regulasi yang lebih ramah bagi pelaku usaha.

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Indeks Ekonomi Hijau

Kabupaten Mojokerto akan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Ekonomi hijau

merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini diwujudkan melalui investasi hijau, pengembangan sektor ramah lingkungan, penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan rendah karbon. Sebagai alat ukur keberhasilan penerapan ekonomi hijau di tingkat daerah, pemerintah pusat melalui Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan Indeks Ekonomi Hijau (IEH) yang terdiri dari 16 indikator utama yang mencerminkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pilar ekonomi mencakup indikator seperti intensitas emisi, intensitas energi, PDB per kapita, serta produktivitas sektor pertanian, industri, dan jasa. Pilar sosial meliputi indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Sementara itu, pilar lingkungan melibatkan indikator seperti luas tutupan hutan, penggunaan energi baru dan terbarukan, kualitas air dan udara, penurunan emisi GRK, dan pengelolaan lahan gambut. Pemerintah pusat dan provinsi mendorong kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Mojokerto, untuk menjadikan IEH sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi hijau dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD, serta untuk memastikan pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.

b. Indeks Ekonomi Biru

Kabupaten Mojokerto, meskipun bukan daerah pesisir, tetap memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi biru secara regional, khususnya dalam konteks Provinsi Jawa Timur. Bagi Kabupaten Mojokerto, dukungan terhadap ekonomi biru dapat diwujudkan melalui sinergi antardaerah, terutama dengan wilayah pesisir di Jawa Timur, serta melalui penguatan rantai pasok sektor kelautan seperti pengolahan hasil perikanan, logistik, dan distribusi produk perikanan. Kabupaten Mojokerto juga memiliki potensi untuk berperan dalam penyediaan sumber daya manusia terlatih, teknologi pendukung industri kelautan, dan pengembangan riset berbasis darat yang mendukung sektor ekonomi pesisir meskipun belum optimal. Dengan demikian, meskipun secara geografis bukan daerah pesisir, Kabupaten Mojokerto tetap relevan dalam ekosistem ekonomi biru Jawa Timur, sekaligus turut mendorong pencapaian Indeks Ekonomi Biru melalui peran pendukung bukan peran utama.

4) Transformasi Digital

a. Indeks Masyarakat Digital

IMDI merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.

Indikator dari IMDI merupakan bentuk implementasi yang diadopsi oleh "G20 Toolkit for Measuring Digital Literacy and Digital Skills" yang terdiri dari 4 pilar yakni pilar infrastruktur dan ekosistem, pilar keterampilan, pilar pemberdayaan, dan pilar pekerjaan.

Tabel 2. 72
Indeks Masyarakat Digital

Indikator	2022	2023	2024
Indeks Masyarakat Digital	33,82	46,59	43,99

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Mojokerto tahun 2024, nilai IMDI tercatat sebesar 43,99, yang menempatkan kabupaten ini dalam kategori "Cukup". Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang hanya sebesar 33,82, menunjukkan adanya perkembangan positif meskipun belum signifikan. Secara rinci, skor tertinggi berada pada indikator Infrastruktur & Ekosistem dengan nilai 62,03, yang mencerminkan ketersediaan sarana dan prasarana digital yang relatif memadai. Namun, indikator Pemberdayaan mencatat skor terendah, yaitu hanya 21,13, menandakan masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan produktif. Keterampilan Digital juga masih cukup rendah di angka 57,94, begitu pula sektor Pekerjaan yang berada pada nilai 37,24, mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam dunia kerja.

Meskipun capaian nilai secara keseluruhan belum tergolong tinggi, peningkatan konsisten selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya komitmen dan arah kebijakan yang mulai berjalan ke arah yang benar. Hal ini menjadi landasan yang baik bagi pemerintah daerah untuk terus mendorong inisiatif transformasi digital, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Dengan evaluasi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Mojokerto memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem digital

Faktor yang dapat mendorong peningkatan ini antara lain adalah akses internet yang semakin luas, meningkatnya penggunaan perangkat digital, serta dorongan dari pemerintah dan sektor swasta dalam mempercepat transformasi digital. Berbagai program literasi digital dan adopsi teknologi dalam dunia usaha juga berperan dalam meningkatkan indeks ini.

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indeks yang dipergunakan untuk mengukur penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal. Pelaksanaan SPBE menjadi fondasi serta sebagai pengungkit (*enabler*) dari reformasi birokrasi melalui pelaksanaan transformasi digital dan Satu Data Indonesia (SDI) serta menjadi salah satu aspek dalam

reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan. Melalui penerapan SPBE secara terpadu dan menyeluruh, diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Berikut capaian data terkait capaian kinerja implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 73
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	2,71	2,73	3,52	4,16

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Peningkatan nilai SPBE ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan dari sisi teknologi, tetapi juga menggambarkan perubahan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih modern dan responsif. Faktor-faktor seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur TIK, serta komitmen pimpinan daerah dalam mengadopsi teknologi digital menjadi kunci penting dalam pencapaian ini. Keberhasilan ini sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Mojokerto dalam menyongsong era pemerintahan digital.

Berdasarkan pelaksanaan Transformasi Tata Kelola pada periode tahun 2025-2029 difokuskan untuk pencapaian Asta Cita, di mana pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah (TDP) berupa penerapan Pemerintah Digital (Pemdi) dengan aspek berupa: 1) Penguatan tata kelola Pemdi, 2) Penguatan teknologi Pemdi, 3) Pengembangan budaya dan kompetensi digital ASN, 4) Transformasi digital layanan publik prioritas, dan 5) Penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data. Target peran Pemdi sebagai pengungkit pembangunan 2025-2029, secara umum meliputi: 1) Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi, 3) Mewujudkan administrasi pemerintahan berbasis teknologi, seperti sistem pengadaan, sistem layanan aparatur negara, sistem kearsipan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, 4) Modernisasi teknologi sistem penerimaan negara, serta 5) Transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan (layanan siklus hidup). Berdasarkan hal tersebut, maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi Indeks Pemerintahan Digital pada tahun 2026.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk

perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

Tabel 2. 74
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam miliar rupiah)	23.272,79	23.692,56	26.498,53	28.572,87	30.323,12

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2024, PMTB mencapai puncaknya selama lima tahun terakhir dengan nilai Rp30.323,12 miliar. Lonjakan ini merupakan hasil dari konsistensi pemerintah daerah dalam mendorong percepatan investasi melalui penyederhanaan perizinan, penyediaan infrastruktur penunjang, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Kenaikan PMTB ini juga mencerminkan penguatan struktur ekonomi Mojokerto yang mulai mengarah pada hilirisasi industri, pengolahan hasil pertanian, dan integrasi dengan rantai pasok nasional maupun global.

b. Ekspor Barang dan Jasa



Gambar 2. 20
Net Ekspor Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mojokerto Menurut Pengeluaran 2020-2024

Selisih antara barang dan jasa yang keluar wilayah Kabupaten Mojokerto dengan barang dan jasa yang masuk ke wilayah Kabupaten Mojokerto (Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur, Provinsi lain, negara lain). Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa Net ekspor Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020-2024 terus menerus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Net ekspor di tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 12.900.136,20 juta yang awalnya 12.013.460,61 juta pada tahun 2022.

6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator penting dalam menilai seberapa baik suatu wilayah menyediakan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Di Kabupaten Mojokerto, indeks ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam menyokong transformasi menuju wilayah yang produktif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 2. 75

Indeks Infrastruktur Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Infrastruktur	-	14,229	14,248	12,418	13,225

Sumber:Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Indeks Infrastruktur di Mojokerto dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kesenjangan pembangunan antarwilayah, menetapkan prioritas penganggaran, serta menarik investasi melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan ramah investasi. Semakin tinggi kualitas dan aksesibilitas infrastruktur, maka semakin kuat pula fondasi Mojokerto dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Persentase Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni (RLH) merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Berdasarkan UU No. 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah turut menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 76

Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Mojokerto

Kabupaten/ Kota	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mojokerto	78,87%	80,34%	80,79%	81,82%

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022 dan BPS Jawa Timur 2024

Data menunjukkan bahwa secara umum kondisi perumahan di Kabupaten Mojokerto terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Persentase RLH setiap tahun terjadi peningkatan. Ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dari pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kualitas hunian melalui program rehabilitasi rumah, bantuan sosial perumahan, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan.

Meskipun terdapat peningkatan tren, masih ada pekerjaan besar, terutama untuk:

- Meningkatkan akses di daerah pedesaan.
- Memperbaiki kondisi di wilayah dengan angka sangat rendah.
- Fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada komponen seperti sanitasi, akses air minum, serta luas hunian per kapita.

c. Indeks Desa Membangun

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel 2. 77
Indeks Desa Membangun Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangu	0,771	0,7453	0.7663	0,8247	0,8732

Sumber:Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Mojokerto sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif dan progresif dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemandirian desa. Nilai IDM yang mencerminkan tingkat pembangunan desa dalam dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi ini, terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Ke depan, tantangan utama bukan lagi hanya menaikkan nilai IDM, tetapi bagaimana mempertahankan capaian tersebut secara berkelanjutan, serta memastikan bahwa tidak ada desa yang tertinggal dalam proses pembangunan.

d. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

1. Hunian Layak apabila memenuhi aspek fisik bangunan dan lingkungan, antara lain:

Aspek Teknis Bangunan

- a. Struktur bangunan kuat dan aman (tidak rawan roboh).
- b. Luas lantai minimum $\geq 7,2 \text{ m}^2$ per orang (idealnya $9 \text{ m}^2/\text{orang}$).
- c. Sirkulasi udara dan pencahayaan cukup.
- d. Bahan atap, dinding, dan lantai dalam kondisi baik dan permanen.
- e. Tersedia fasilitas MCK dan sanitasi layak.

Aspek Lingkungan

- a. Tidak berada di lokasi rawan bencana atau kawasan terlarang.
- b. Tidak menempati lahan milik orang lain secara ilegal.
- c. Memiliki akses terhadap air minum, listrik, dan drainase.

2. Hunian Terjangkau dikategorikan jika biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk perumahan tidak melebihi 30% dari total pendapatan bulanan. Indikator sebagai berikut:

- a. Rumah tangga dapat membeli/menyewa rumah tanpa beban keuangan berlebih.
- b. Tersedia skema pembiayaan (KPR FLPP, subsidi, sewa) untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
- c. Harga rumah atau sewa sesuai daya beli masyarakat lokal.

3. Hunian Berkelanjutan

Hunian dikatakan berkelanjutan apabila memperhatikan:

- a. Aspek sosial: mendorong kohesi sosial dan inklusivitas.
- b. Aspek lingkungan: efisiensi energi, penggunaan air, konservasi ruang terbuka.
- c. Aspek ekonomi: mendorong produktivitas dan mendukung akses ke pekerjaan serta fasilitas publik.

Ciri Hunian Berkelanjutan yaitu lokasi strategis dekat dengan transportasi umum, sekolah, pasar, layanan kesehatan. Menggunakan material ramah lingkungan dan tahan iklim. Sistem pengelolaan air limbah dan sampah memadai. Memiliki ruang terbuka hijau di sekitar.

Berdasarkan pengertian dan indikator di atas dapat dijelaskan perhitungan rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan sebagai berikut:

Layak : Struktur aman, ventilasi baik, MCK, luas min. 7,2 m²/orang

Terjangkau : Biaya < 30% pendapatan, KPR subsidi, tidak memberatkan MBR

Berkelanjutan : Lokasi strategis, efisiensi energi, lingkungan sehat

Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 78

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	95,07%	95,16%	95,19%	95,32%	95,34%

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2024

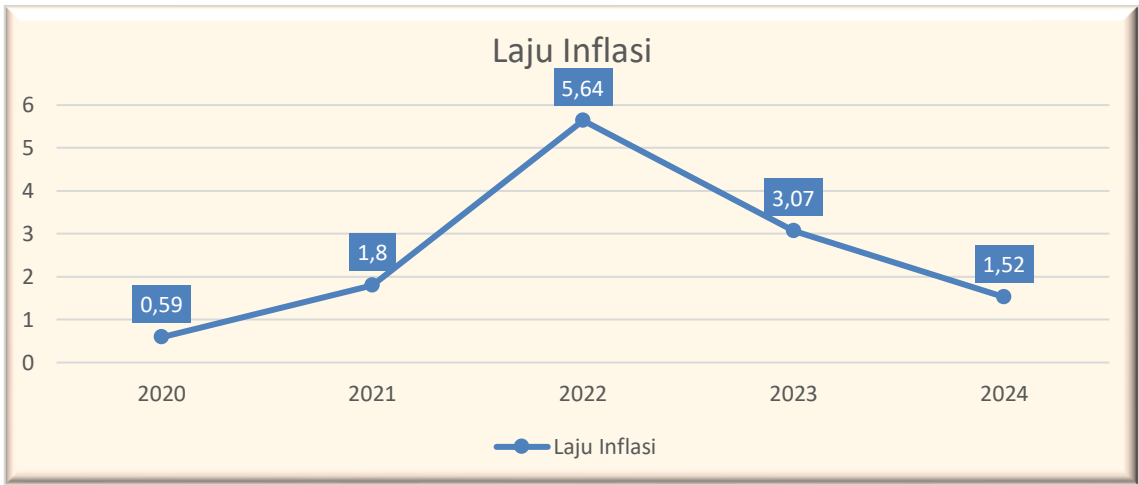
Berdasarkan data diatas menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Mojokerto atas rumah tangga dengan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Selain itu kemudahan akses untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten Mojokerto sangat terjangkau.

7) Stabilitas Ekonomi Makro

a. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari berbagai komoditi yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat. Indeks Harga

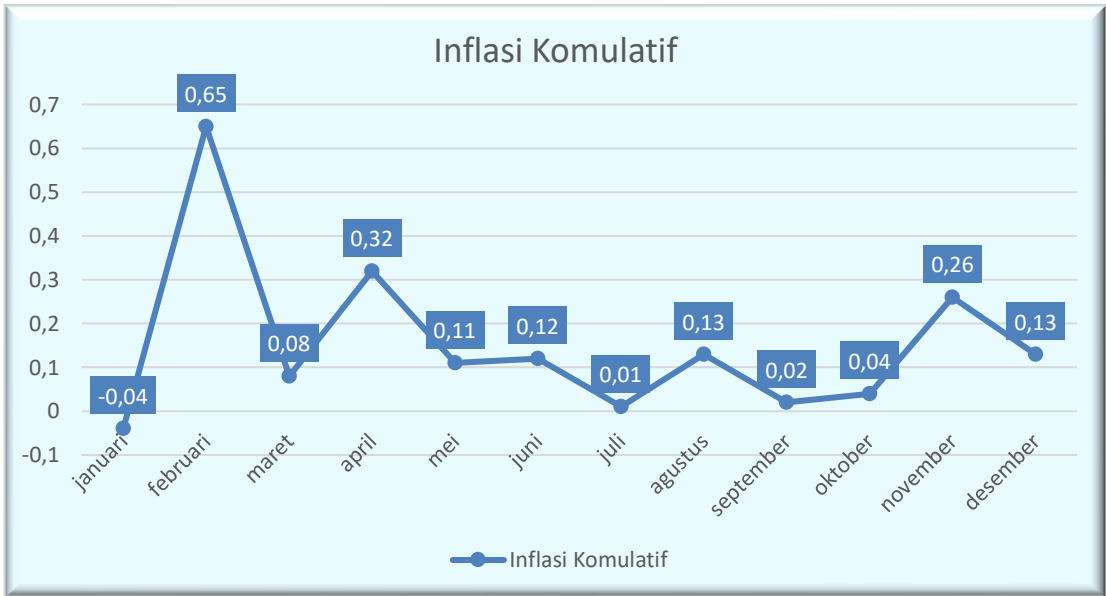
Konsumen (IHK) dihitung dari hasil pencatatan pergerakan harga ditingkat konsumen untuk beberapa komoditi secara periodik (mingguan). Kabupaten Mojokerto bukan menjadi Kabupaten/Kota sampel nasional penghitung IHK, sehingga tidak mempunyai angka IHK sendiri. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak Tahun 2017 berinisiatif untuk melakukan survey IHK tersendiri, agar dapat mengetahui kondisi fluktuasi perkembangan harga konsumen di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hasil penghitungan angka Inflasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 terlihat sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 21
Laju Inflasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber : Bappeda Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sebesar 0,59 persen. Nilai ini merupakan nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan inflasi kumulatif tahun 2019 yang mencapai 2,16 persen. Terjadi penurunan sebesar 72,68 persen pada inflasi kumulatif tahun 2019 dan tahun 2020. Anomali ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto saja namun juga di Provinsi Jawa Timur. BPS Jawa Timur merilis inflasi tahun kalender 2020 Jawa Timur sebesar 1,44 persen. Angka tersebut merupakan inflasi terendah dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mulai memasuki Indonesia pada awal Maret 2020, yang kemudian berlanjut hingga diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tanggal 14 Mei 2020 yang membuat perubahan pada pola inflasi secara nasional, provinsi, dan Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 2021, inflasi tahun kalender atau inflasi kumulatif Kabupaten Mojokerto sebesar 1,80 persen di mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi kumulatif pada tahun 2020 yang mencapai 0,59 persen. Terjadi peningkatan sebesar 205,09 persen pada inflasi kumulatif tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Mojokerto saja namun juga di Provinsi Jawa Timur. BPS Jawa Timur merilis inflasi tahun kalender 2021 Jawa Timur sebesar 2,91 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun kalender 2020. Nampaknya selama tahun 2021, kenaikan harga tersebut disertai dengan perbaikan kegiatan ekonomi, penurunan kasus COVID-

19, dan pelonggaran pembatasan mobilitas PPKM. Kemudian trend inflasi Kabupaten Mojokerto tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan yang menunjukkan bahwa terjadi pergerakan ekonomi menuju arah positif yang diindikasikan sebagai pemulihan ekonomi baik dari tingkat kab/kota, provinsi, maupun nasional. Perkembangan inflasi ini diperlukan untuk menjaga kestabilan perekonomian suatu daerah. Lebih lanjut pada tahun 2023, inflasi kumulatif Kabupaten Mojokerto mencapai 3,07 persen di mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi kumulatif tahun 2022 yang mencapai 5,64 persen. Inflasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 45,58 persen dari inflasi tahun 2022. Di tahun 2024 angka inflasi turun menjadi 1,52 lebih baik dari tahun 2023, Hal ini menunjukkan apabila tingkat harga mulai menurun, maka perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto masih perlu adanya perbaikan.



Gambar 2. 22
Inflasi Kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2024
Sumber: Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada bulan Desember 2024 Kabupaten Mojokerto mengalami inflasi sebesar 0,13 persen. Terdapat 4 (empat) kelompok komoditas yang memberikan andil inflasi di Kabupaten Mojokerto yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Hanya terdapat 1 (Satu) kelompok komoditas yang mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Sedangkan 6 (enam) delapan kelompok komoditas lainnya yaitu Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak memberikan andil terhadap inflasi di Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember 2024. Kemudian laju

inflasi tahun kalender (kumulatif) Kabupaten Mojokerto dari bulan Januari 2024 hingga bulan Desember 2024 sebesar 1,85 persen dan laju inflasi tahun ke tahun (YoY) periode bulan Desember 2023 sampai bulan Desember 2024 sebesar 1,85 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember 2024 adalah daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tomat sayur, bawang merah, cabai rawit, dan beras. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga rata-rata dari bulan lalu yaitu garam, kentang, gula pasir, batu bata, rampela hati ayam, teri, daging sapi, daging ayam kampung, dan minyak goreng. Kenaikan inflasi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember 2024 dipengaruhi oleh naiknya harga daging ayam ras. Kenaikan harga daging ayam menjelang Natal dan Tahun Baru dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya permintaan yang tinggi selama musim liburan besar. Konsumsi ayam meningkat tajam menjelang perayaan, sehingga berdampak pada kenaikan harga di pasar. Sedangkan untuk komoditas penyumbang deflasi tertinggi di Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember 2024 ialah garam yang terpantau mengalami penurunan harga. Secara umum, penurunan harga garam ini diduga disebabkan oleh faktor alam, khususnya hujan yang tidak merata di beberapa daerah. Selain itu, turunnya harga garam juga dikarenakan serapan garam industri dan konsumsi tidak maksimal. Hal itu disebabkan karena masih ada impor garam masuk sehingga mempengaruhi serapan garam. Selain itu, inflasi juga berdampak pada pajak daerah, untuk rasio pajak terhadap PDRB pada tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto adalah sebesar 0,35 %

b. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan instrumen penting dalam upaya memperkuat inklusi keuangan di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai salah satu target utama pembangunan dalam RPJPN 2025–2045 dengan capaian inklusi keuangan nasional sebesar 98% di tahun 2045. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melalui RPJMN 2025–2029 menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 91% pada 2025 dan 93% pada 2029. Pada tingkat daerah, percepatan inklusi keuangan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang membutuhkan sistem pemantauan efektif, berkelanjutan, serta berbasis data kredibel agar strategi dapat terus diperbaiki dan disparitas antarwilayah dapat diminimalisir. IKAD hadir sebagai indeks komposit berbasis data supply side dan demand side yang mengukur akses, penggunaan layanan, dan kedalaman keuangan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Indeks ini berfungsi memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, memantau efektivitas program TPAKD, melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), serta memberikan gambaran mendalam mengenai capaian inklusi keuangan. IKAD dapat digunakan untuk menyajikan peringkat capaian antar daerah, melakukan analisis perbandingan, memberi masukan kebijakan, dan mengevaluasi keberhasilan program.

Urgensinya terletak pada perannya sebagai indikator proxy inklusi keuangan di level kabupaten/kota, pemetaan akses keuangan daerah, dukungan terhadap strategi pengembangan inklusi keuangan lokal, serta sebagai pelengkap SNLIK dalam memberikan potret inklusi keuangan yang lebih detail dan komprehensif.

Tabel 2. 79
Indeks Akses Keuangan Daerah

Uraian	2022	2023	2024
Indeks Akses Keuangan Daerah	3,69	3,78	3.85

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024

Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 3,69 pada 2022, naik menjadi 3,78 pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 3,85 pada 2024. Meskipun Kabupaten Mojokerto masih dalam kategori berkembang tetapi memiliki peluang besar untuk mencapai kategori Hampir Unggul.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja dan transformasi birokrasi dalam hal efektivitas, efisiensi, dan pelayanan publik. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana reformasi birokrasi telah dilakukan dan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi dalam konteks tata kelola pemerintahan penting karena membantu pemerintah dalam mengukur, memantau, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efisiensi birokrasi. Sedangkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan alat untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah. IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan memasukkan indikator reformasi birokrasi dan IPP pada RPJMD dapat memastikan adanya upaya berkelanjutan dalam transformasi birokrasi dan pelayanan yang berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. IPP digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan. IPP mencakup berbagai aspek pelayanan publik, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, dan konsultasi. Manfaat dari IPP yaitu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan publik yang ada, menjadi dasar bagi perbaikan pelayanan publik di masa depan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggara pelayanan publik, mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan efisien. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 80
IRB dan IPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	64,75	64,35	64,91	86,36	85,58
2	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	-	3,31	3,67	4,27	4,30

Sumber: MenPAN RB Tahun 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja dan transformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Mojokerto semakin efektif, efisien dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Dalam pembangunan Reformasi Birokrasi terbagi atas reformasi birokrasi general dan tematik. Pembangunan RB General yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Reformasi tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab/mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan secara kolaboratif. RB Tematik diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pembangunan dengan pelaksanaan program-kegiatan yang bersifat *problem solving*. Pada tahun 2023 mengalami peningkatan capaian Indeks Reformasi. Sedangkan untuk Indeks Pelayanan Publik baru mulai dihitung pada tahun 2023, dan mengalami peningkatan pada tahun 2024.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Di Kabupaten Mojokerto, nilai SAKIP dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Tabel 2. 81
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	-	75,42	73,42	74,01	74,42

Sumber: Kementerian PAN RB Tahun 2024

Mulai tahun 2021, Kabupaten Mojokerto mulai menunjukkan capaian yang signifikan dengan nilai 75,42, yang tergolong dalam kategori “Baik”. Nilai ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam merancang program berbasis kinerja, mengukur hasil pembangunan secara sistematis, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai menjadi 73,42. Penurunan ini bisa

disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tantangan dalam penyesuaian sistem perencanaan dan pelaporan pasca pandemi, perubahan regulasi, atau perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhasil melakukan perbaikan di tahun-tahun berikutnya, dengan nilai 74,01 pada 2023 dan kembali naik menjadi 74,42 di tahun 2024.

Konsistensi nilai dalam kisaran “Baik” selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Mojokerto telah memiliki fondasi yang cukup kuat dalam menjalankan prinsip akuntabilitas publik. Hal ini tampak dalam penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi antara RPJMD, Renstra perangkat daerah, hingga evaluasi kinerja berbasis indikator. Selain itu, monitoring dan evaluasi internal oleh Inspektorat, pelibatan Bappeda dalam penyelarasan program, serta dorongan reformasi birokrasi turut memperkuat sistem pengelolaan kinerja pemerintah daerah.

Ke depan, untuk mendorong peningkatan nilai SAKIP ke level “A” atau “Sangat Baik”, Pemkab Mojokerto perlu terus menyempurnakan mekanisme manajemen kinerja berbasis *outcome*, memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam penggunaan data kinerja untuk pengambilan keputusan strategis.

Dengan demikian, tren SAKIP Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024 menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efektivitas birokrasi dan menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang akuntabel dan berorientasi hasil.

c. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional untuk kabupaten/kota, yang diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK, menunjukkan skor dan kategori integritas di berbagai daerah. Skor ini mencerminkan tingkat korupsi dan praktik baik yang terjadi di instansi pemerintah daerah.

Tabel 2. 82
Survey Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SPI	-	74,70	74,00	74,00	74,06

Sumber: Inspektorat Kab. Mojokerto Tahun 2024

d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dimensi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 6 dimensi, yaitu:

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, mencakup kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, mencakup penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar 20%, penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% di luar gaji, penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer, penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah, mencakup ketepatan waktu dalam penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan dan keteraksesan merupakan penyajian dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik.
4. Penyerapan anggaran, mencakup penyerapan anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga, dan anggaran belanja transfer.
5. Kondisi keuangan daerah, mencakup kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas Panjang, dan solvabilitas layanan.
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Tabel 2. 83

Capaian IPKD Kabupaten Mojokerto

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	32,578	64,836	79,454	79,311

Sumber: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Tahun 2024

Berdasarkan data di atas terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 hal ini menunjukkan upaya pemerintah kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan pengelolaan keuangan termasuk transparansi keuangan daerah kepada masyarakat serta kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Namun terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 dikarenakan pada nilai pada dimensi 1, 2 dan 3 terjadi penurunan.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Indikator persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan merupakan salah satu tolok ukur dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum, adil, dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Di Kabupaten Mojokerto, data dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan capaian luar biasa dalam aspek penegakan hukum daerah.

Tabel 2. 84

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	99,45%	100%	100%

Sumber: Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Keberhasilan penegakan hukum ini memberikan dampak langsung terhadap penguatan keamanan lokal, ketertiban sosial, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung demokrasi substansial di tingkat lokal, di mana hukum tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi HAM di berbagai sektor, termasuk hukum, keadilan, keamanan nasional, dan demokrasi. Persentase capaian aksi HAM mengindikasikan sejauh mana target yang ditetapkan dalam RANHAM telah tercapai oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Capaian rencana aksi ham di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut

Tabel 2. 85

Capaian Rencana Aksi HAM di Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rencana Aksi HAM	69,83%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Jawa Timur 2024

b. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi merupakan instrumen penting yang merefleksikan kualitas kehidupan demokrasi di suatu daerah, terutama terkait dengan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, pencapaian dalam Indeks Demokrasi menjadi bukti konkret bahwa pembangunan tidak hanya ditujukan untuk aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat pilar tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan partisipatif. Dengan demikian, penguatan Indeks Demokrasi di Kabupaten Mojokerto berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, memperkuat keamanan daerah, serta memantapkan praktik demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substansial yang benar-benar mencerminkan kehendak dan kesejahteraan rakyat.

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD menggunakan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang tentu saja disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Adapun Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen (lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi) yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi).

Berikut kami sajikan capaian data terkait capaian IDSD Pemerintah Kabupaten Mojokerto:

Tabel 2. 86
Indikator Kinerja IDSD Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja Kunci	Capaian		
	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	3,23	3,15	3,53

Sumber : BRIN Tahun 2024

Penilaian IDSD oleh BRIN baru dilaksanakan pada tahun 2022 dengan menggunakan konsep dan metode pengukuran yang mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF). Adapun pada periode sebelumnya, penilaian terhadap IDSD belum menggunakan nomenklatur Indeks Daya Saing

Daerah yang tentu saja memiliki konsep dan metode serta indikator yang berbeda.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai IDSD Kabupaten Mojokerto tahun 2023 (3,15) mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai tahun 2022 (3,23). Pada tahun 2024 IDSD naik signifikan menjadi 3,53. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Mojokerto masih belum optimal. Salah satu komponen yang perlu ditingkatkan adalah komponen sumber daya manusia. Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Adapun nilai pilar kesehatan berada di angka 4,06 dan pilar ketrampilan masih di angka 3,68.

Harmonisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RIPJ-PID) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan menyelaraskan arah pengembangan IPTEK dengan prioritas pembangunan daerah. Ini memastikan kontribusi IPTEK terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta mendukung visi, misi, dan program prioritas RPJMD secara efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan RIPJ-PID telah mengidentifikasi Produk Unggulan Daerah (PUD) dan Permasalahan Prioritas Daerah (PPD), antara lain:

Produk Unggulan Daerah (PUD):

- Industri Batu Bata dari tanah liat/keramik
- Industri Kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya
- Industri barang anyaman dari rotan dan bambu
- Industri makanan dan masakan olahan
- Industri kain sulaman

Permasalahan Prioritas Daerah (PPD):

- Peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.
- Belum adanya rantai produksi yang komprehensif dan diversifikasi produk yang berdaya saing.
- Pengembangan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung ekonomi, lingkungan hidup, fungsi kawasan, dan kualitas hidup masyarakat.
- Perlindungan sosial kelompok rentan dan masyarakat berkebutuhan khusus.
- Pengembangan organisasi pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis teknologi.

Dalam proses penyusunan RPJMD, program pengembangan PUD dan solusi atas PPD telah diakomodasi sebagai bagian dari rancangan program RPJMD. Artinya, setiap rencana aksi yang tertuang dalam RIPJ-PID, baik untuk mengembangkan potensi daerah maupun mengatasi masalah, akan terintegrasi dalam rencana kerja perangkat daerah terkait.

Penyelarasan dilakukan untuk memastikan bahwa IPTEK menjadi pilar strategis dalam

mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis inovasi. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan di Mojokerto, Jawa Timur, akan didukung oleh riset dan inovasi yang relevan, menjadikan program-program daerah lebih tepat sasaran dan berdaya saing.

4) Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut merupakan indikator variabel aspek pelayanan umum:

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara. Sedangkan urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

a) Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Pemerataan kesempatan memperoleh akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta peningkatan peranan kelembagaan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan selama Tahun 2020-2024, cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada indikator berikut :

Tabel 2. 87

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APM SD/ MI	97,78	97,25	95,6	97,44	99,52
2.	APM SLTP/MTS	83,84	97,25	83,89	85,92	87,87

Sumbe: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren yang beragam dalam rentang tahun 2020 hingga 2024. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), APM cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi. Tahun 2020, APM tercatat sebesar 97,78%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 97,25% dan mencapai titik terendah pada 2022 di angka 95,6%. Namun, tren positif kembali terlihat pada 2023 dengan kenaikan ke 97,44%, hingga akhirnya mencapai puncaknya di 99,52% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya peningkatan akses pendidikan dasar yang lebih baik.

Sementara itu, APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah

(MTs) menunjukkan dinamika yang lebih bervariasi. Tahun 2020, APM tercatat sebesar 83,84%, mengalami lonjakan signifikan pada 2021 hingga 97,25%. Namun, terjadi penurunan drastis pada 2022 menjadi 83,89%, yang hanya sedikit lebih tinggi dari tahun 2020. Selanjutnya, tren kenaikan perlahan terjadi pada 2023 dan 2024 dengan angka 85,92% dan 87,87%. Meskipun menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir, APM jenjang ini belum kembali ke tingkat tertinggi yang pernah dicapai pada 2021. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa di jenjang pendidikan menengah pertama, yang bisa jadi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, aksesibilitas, atau faktor sosial lainnya. Untuk menjaga dan meningkatkan APM, pemerintah perlu memperkuat akses pendidikan, terutama di tingkat pertama, melalui bantuan pendidikan, infrastruktur yang memadai, serta program yang mendorong siswa untuk tetap melanjutkan sekolah

B. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2. 88

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PAUD	100.2	91.39	101,97	72,48	N/A
2.	APK SD/MI	100.3	95.52	95,38	101,31	100,92
3.	APK SLTP/MTs	101.48	100.61	92,43	110,1	98,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), APK mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2020, APK tercatat sebesar 100,2%, namun turun drastis pada 2021 menjadi 91,39%. Meskipun sempat melonjak kembali pada 2022 hingga 101,97%, angka ini kembali merosot tajam pada 2023 dengan hanya 72,48%. Tidak tersedianya data untuk tahun 2024 membuat tren selanjutnya tidak dapat dianalisis secara pasti. Penurunan yang cukup signifikan ini dapat mencerminkan berbagai tantangan dalam partisipasi PAUD, seperti faktor ekonomi, kesadaran masyarakat, atau dampak pandemi yang masih terasa dalam beberapa tahun terakhir.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), APK juga mengalami fluktuasi. Tahun 2020, angka ini cukup tinggi di 100,3%, tetapi kemudian turun pada 2021 (95,52%) dan 2022 (95,38%). Namun, pada 2023, terjadi lonjakan hingga 101,31%, meskipun kembali sedikit menurun pada 2024 menjadi 100,92%. Secara keseluruhan, APK di jenjang ini relatif stabil, dengan angka di atas 95% yang menunjukkan akses pendidikan dasar masih cukup baik di Kabupaten Mojokerto.

Sementara itu, APK di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) menunjukkan perubahan yang lebih dinamis. Pada 2020, angka ini mencapai 101,48%, lalu turun tipis menjadi 100,61% pada 2021. Namun, pada 2022, terjadi penurunan cukup drastis ke 92,43%, yang mungkin mencerminkan tantangan dalam transisi siswa dari SD ke jenjang lebih tinggi. Menariknya, pada 2023, APK justru melonjak signifikan ke 110,1%, sebelum kembali menurun pada 2024 menjadi 98,77%. Lonjakan tajam ini bisa jadi disebabkan oleh kebijakan pendidikan tertentu atau peningkatan jumlah siswa yang terdaftar, sementara penurunan di tahun berikutnya menunjukkan perlunya evaluasi terhadap keberlanjutan partisipasi siswa di tingkat SMP/MTs.

Dari data di atas, meskipun ada peningkatan di beberapa tahun, fluktuasi yang cukup besar dalam APK menunjukkan adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi partisipasi siswa, baik dari segi kebijakan pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, maupun kesiapan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Mojokerto.

Perlu dilakukan pencermatan bahwasanya untuk penghitungan angka partisipasi kasar berdasarkan jumlah siswa seluruhnya dibanding jumlah siswa per kelompok usia jenjang pendidikan. Dalam hal angka partisipasi kasar menurun, bisa disebabkan karena ada siswa/pelajar Kabupaten Mojokerto pada jenjang pendidikan bersekolah di luar wilayah Kabupaten Mojokerto dan/atau sebaliknya.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Tabel 2. 89
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APS 7 - 12	99.75	99.70	99.57	98.57	99.82	99,52
APS 13 - 15	98.08	98.97	98.61	99.78	99.33	99,97
APS 16 - 18	81.80	81.32	82.34	86.76	81.91	85,84

Angka Partisipasi Sekolah (APS)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
APS 19 - 23	11,68	13,88	13,66	14,57	15,47	n/a

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

Pada kelompok usia 7-12 tahun (setara jenjang SD/MI), APS relatif stabil dengan nilai yang selalu mendekati 100%. Pada tahun 2019, APS tercatat sebesar 99,75% dan mengalami sedikit penurunan hingga 98,57% pada 2022. Namun, angka ini kembali meningkat signifikan pada 2023 menjadi 99,82%, meskipun sedikit turun lagi ke 99,52% pada 2024. Stabilitas angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak di kelompok usia ini telah mengakses pendidikan dasar secara optimal. Untuk kelompok usia 13-15 tahun (setara jenjang SMP/MTs), APS mengalami sedikit fluktuasi tetapi tetap berada pada tingkat yang tinggi. Pada 2019, angka ini berada di 98,08% dan meningkat ke 98,97% pada 2020. Setelah sedikit menurun pada 2021 (98,61%), angka ini mencapai puncaknya pada 2022 dengan 99,78%. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2023 (99,33%), APS kembali meningkat pada 2024 menjadi 99,97%. Tren ini mencerminkan keberlanjutan yang baik dari pendidikan dasar ke jenjang menengah pertama, dengan semakin banyak siswa yang tetap bersekolah pada usia ini.

Di kelompok usia 16-18 tahun (setara jenjang SMA/SMK/MA), APS menunjukkan tren naik-turun yang lebih mencolok. Pada 2019, angka ini berada di 81,80% dan sedikit menurun pada 2020 menjadi 81,32%. Namun, setelah itu terjadi peningkatan cukup signifikan hingga mencapai 86,76% pada 2022. Sayangnya, angka ini kembali menurun pada 2023 menjadi 81,91%, sebelum naik kembali pada 2024 ke 85,84%. Fluktuasi ini dapat mengindikasikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kelanjutan pendidikan di jenjang menengah atas, seperti keterbatasan ekonomi, aksesibilitas sekolah, atau preferensi siswa untuk memasuki dunia kerja lebih awal.

Sementara itu, kelompok usia 19-23 tahun (setara jenjang perguruan tinggi atau pendidikan nonformal) menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. APS pada kelompok ini berada di angka 11,68% pada 2019 dan terus meningkat hingga 15,47% pada 2023. Peningkatan ini menandakan adanya kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pendidikan tinggi, meskipun angka partisipasi masih jauh lebih rendah dibandingkan kelompok usia lainnya.

Berdasarkan data di atas, APS di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat baik di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Namun, fluktuasi pada jenjang menengah atas dan masih rendahnya partisipasi pendidikan pada usia 19-23 tahun menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

D. Literasi dan Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Tabel 2. 90

Literasi dan Numerasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Literasi dan Numerasi	Tahun	
	2023	2024
Literasi 7 - 12	78,81	88,09
Numerasi 7 - 12	64,68	65,81
Literasi 13 - 15	80,37	87,42
Numerasi 13 - 15	66,81	72,04
Literasi 16 - 18	70,12	81,40
Numerasi 16 - 18	55,88	70,67

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada periode 2020-2024, Kabupaten Mojokerto menunjukkan peningkatan signifikan dalam capaian literasi dan numerasi di berbagai kelompok usia. Pada kelompok usia 7-12 tahun, tingkat literasi meningkat dari 78,81 pada tahun 2023 menjadi 88,09 pada tahun 2024, sementara numerasi mengalami kenaikan dari 64,68 menjadi 65,81. Tren positif juga terlihat pada kelompok usia 13-15 tahun, di mana tingkat literasi bertambah dari 80,37 menjadi 87,42, dan numerasi meningkat dari 66,81 menjadi 72,04. Peningkatan paling mencolok terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun, dengan literasi yang melonjak dari 70,12 pada tahun 2023 menjadi 81,40 pada tahun 2024, serta numerasi yang mengalami pertumbuhan signifikan dari 55,88 menjadi 70,67. Capaian ini mencerminkan efektivitas berbagai program peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mojokerto, yang terus mendorong peningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik di berbagai jenjang usia meskipun masih terdapat siswa didik yang perlu ditingkatkan kompetensi literasinya.

E. Rasio Guru dan Murid

Rasio ini mengindikasikan perbandingan jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar.

Tabel 2. 91

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar				
	2020	2021	2022	2023	2024
SD / MI					
Jumlah Guru	6,404	5,453	6.386	6.692	6.702
Jumlah Murid	98,896	99,398	100.532	96.088	95.403
Rasio	1:15	1:18	1:16	1:14	1:14

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar				
	2020	2021	2022	2023	2024
SMP / MTs					
Jumlah Guru	3,196	3,287	3.075	3.530	3.629
Jumlah Murid	47,192	51,728	49.938	53.709	53.765
Rasio	1:15	1:15	1:16	1:16	1:15

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), jumlah guru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2020, jumlah guru tercatat sebanyak 6.404 orang, tetapi mengalami penurunan signifikan pada 2021 menjadi 5.453 orang. Namun, jumlah ini kembali meningkat menjadi 6.386 pada 2022 dan terus bertambah hingga 6.702 pada 2024. Sementara itu, jumlah murid di SD/MI relatif stabil namun mengalami sedikit penurunan dalam dua tahun terakhir. Dari 98.896 murid pada 2020, angka ini meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 100.532 murid. Namun, setelah itu jumlah murid mengalami penurunan menjadi 96.088 pada 2023 dan 95.403 pada 2024.

Rasio guru terhadap murid di SD/MI mengalami perubahan seiring dengan fluktuasi jumlah guru dan murid. Pada 2020, rasio tercatat 1:15, tetapi meningkat menjadi 1:18 pada 2021 akibat menurunnya jumlah guru. Setelah itu, rasio kembali membaik menjadi 1:16 pada 2022 dan stabil di 1:14 pada 2023 dan 2024, menunjukkan perbandingan yang lebih ideal antara guru dan murid.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), jumlah guru mengalami tren kenaikan. Dari 3.196 guru pada 2020, jumlah ini meningkat hampir setiap tahun, mencapai 3.629 pada 2024. Jumlah murid SMP/MTs juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Dari 47.192 murid pada 2020, angka ini mengalami lonjakan terbesar pada 2021 menjadi 51.728 murid. Setelah sedikit menurun pada 2022 (49.938 murid), jumlah murid kembali meningkat pada 2023 dan 2024, mencapai 53.765 murid. Rasio guru terhadap murid di jenjang SMP/MTs relatif stabil, berkisar antara 1:15 hingga 1:16. Pada 2020 dan 2021, rasio tetap di 1:15, lalu sedikit meningkat menjadi 1:16 pada 2022 dan 2023. Namun, pada 2024, rasio kembali membaik ke 1:15, menunjukkan keseimbangan yang relatif baik dalam distribusi tenaga pengajar terhadap jumlah murid.

Meskipun terdapat penurunan jumlah murid di SD/MI dalam dua tahun terakhir, rasio guru terhadap murid tetap terjaga di angka yang ideal. Sementara itu, di jenjang SMP/MTs, jumlah guru dan murid terus bertambah dengan rasio yang relatif stabil, menandakan adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah pertama di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 92

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
Jatirejo	356	4.681	1:13	194	2.175	1:11
Gondang	256	3.044	1:12	151	2.549	1:17
Pacet	385	5.563	1:14	223	2.886	1:13
Trawas	183	2.506	1:14	77	1.159	1:15
Ngoro	461	7.583	1:16	212	3.069	1:14
Pungging	368	5.408	1:15	302	7.261	1:24
Kutorejo	398	5.454	1:14	227	3.402	1:15
Mojosari	559	8.694	1:16	295	4.236	1:14
Bangsar	358	4.641	1:13	177	2.854	1:16
Mojoanyar	247	4.136	1:17	106	1.613	1:15
Dlanggu	331	4.931	1:15	131	2.234	1:17
Puri	457	6.423	1:14	184	2.521	1:14
Trowulan	398	6.250	1:16	207	3.055	1:15
Sooko	403	6.213	1:15	325	4.755	1:15
Gedeg	349	4.456	1:13	153	2.244	1:15
Kemlagi	363	5.153	1:14	173	2.732	1:16
Jetis	495	7.038	1:14	205	2.916	1:14
Dawarblandong	325	3.914	1:12	188	2.048	1:11

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Data jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 menunjukkan variasi rasio guru-murid antar kecamatan, baik di tingkat SD/MI maupun SMP/MTs. Pada jenjang SD/MI, kecamatan dengan jumlah murid terbanyak adalah Mojosari dengan 8.694 murid dan 559 guru, menghasilkan rasio 1:16. Sementara kecamatan dengan rasio terbaik (terkecil) adalah Mojoanyar dengan rasio 1:17 (247 guru dan 4.136 murid), yang berarti satu guru mengajar lebih banyak siswa dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Gondang memiliki rasio terbaik (1:12) dengan 256 guru dan 3.044 murid, menunjukkan bahwa distribusi guru di wilayah ini lebih ideal dibanding daerah lain. Pada jenjang SMP/MTs, kecamatan dengan jumlah murid terbanyak adalah Pungging, dengan 7.261 murid dan 302 guru, menghasilkan rasio tertinggi (1:24). Artinya, setiap guru di Pungging menangani lebih banyak murid dibanding kecamatan lain, yang dapat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Sebaliknya, kecamatan dengan rasio terbaik (terkecil) adalah Jatirejo dan Dawarblandong dengan rasio 1:11, yang menunjukkan bahwa beban pengajaran lebih ringan di daerah ini. Rasio guru-murid SD/MI berkisar antara 1:12 hingga 1:17, sedangkan SMP/MTs berkisar antara 1:11 hingga 1:24. Ketimpangan rasio ini menunjukkan bahwa

beberapa kecamatan mengalami kekurangan guru, terutama di Pungging pada jenjang SMP/MTs. Oleh karena itu, pemerataan distribusi guru perlu menjadi perhatian utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 93

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024

Aspek/Bidang/Urusan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Partisipasi Murni						
SD / MI / Paket A	99,49	97,25	89,34	95,6	97,44	99,52
SMP / MTs / Paket B	83,56	83,31	89,35	83,89	85,92	87,87
Angka Partisipasi Kasar						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	99,19	100,2	91,39	101,97	72,48	74,00
SD / MI	108,48	100,3	95,52	95,38	101,31	100,92
SMP / MTs	103,7	101,48	100,61	92,43	110,1	98,77
Angka Putus Sekolah						
SD / MI / Paket A	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
SMP / MTs / Paket B	0,16	0,16	0,1	0,1	0,1	0,1
Angka Pendidikan yang Ditamatkan						
SD / MI ke SMP / MTs	93,56	93,56	113,91	113,91	113,91	113,91
SMP / MTs ke SMA / SMK / MA	112,44	112,44	93,35	93,35	93,35	93,35
Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah						
SD / MI	1 / 148	1 / 148	1 / 168	1 / 168	1 / 168	1 / 168
SMP / MTs	1 / 224	1 / 224	1 / 247	1 / 247	1 / 247	1 / 247
Rasio Guru terhadap Murid						
SD / MI	1:15	1:15	1:18	1:16	1:14	1:14
SMP / MTs	1:16	1:15	1:15	1:16	1:16	1:15
Rasio Jumlah Kelas terhadap Murid						
SD / MI	1 / 23	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20	1 / 20
SMP / MTs	1 / 29	1 / 26	1 / 26	1 / 26	1 / 26	1 / 26
Angka Kelulusan						
SD / MI / Paket A	100	100	100	100	100	100
SMP / MTs / Paket B	100	100	100	100	100	100
Persentase Ruang Kelas sesuai Standar						
SD / MI	91,49	93,3	98,94	98,94	98,94	98,94
SMP / MTs	89,47	94,5	99,69	99,69	99,69	99,69
Angka Melek Huruf Usia > 15 tahun			95,09	96,09	95,62	95,53
Persentase Sekolah yang Menerapkan Budaya Baca	100	100	100	100	100	100
Fasilitas Pendidikan						
Sekolah SD / MI dengan Bangunan Baik	91,49	91,49	92	92,2	94,1	95,0

Aspek/Bidang/Urusan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sekolah SMP / MTs & SMA/SMK/MA dengan Bangunan Baik	89,47	89,47	89,48	89,53	89,61	89,70
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV						
PAUD	81,5	81,5	81,52	81,52	81,52	81,52
SD / MI	95	95	96,45	96,45	96,45	96,45
SMP / MTs	96,7	96,7	97,6	97,6	97,6	97,6
Persentase Guru Berkualifikasi Akademik S1/D4						
SD / MI	95	95	96,45	96,45	96,45	96,45
SMP / MTs	96,7	96,7	97,6	97,6	97,6	97,6
Persentase Guru Bersertifikat Pendidik						
SD / MI	60,9	54,33	45,97	55,09	45,97	50,00
SMP / MTs	62,8	52,87	42,68	59,44	42,68	50,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data perkembangan capaian pelayanan dasar bidang pendidikan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024, secara umum menunjukkan tren positif meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), partisipasi warga negara usia 5-6 tahun sempat mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2022, dari 100,23% di tahun 2021 menjadi 85,04%. Namun, capaian ini kembali meningkat menjadi 96,64% di 2023, dan hampir mencapai target penuh dengan 99,98% pada tahun 2024. Untuk Pendidikan Dasar, partisipasi anak usia 7-15 tahun menunjukkan penurunan yang relatif stabil, dari 100,74% di tahun 2020 menjadi 96,69% di tahun 2024. Walaupun demikian, capaian ini tetap berada dalam kategori sangat tinggi dan mendekati target nasional. Sementara itu, untuk Pendidikan Kesenjangan, capaian partisipasi warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan juga terjaga cukup baik, dengan angka di atas 95% setiap tahun. Tahun 2022 sempat turun menjadi 95,07%, namun kembali membaik menjadi 100% pada 2023, dan mencapai 96,78% di tahun 2024. Berikut disampaikan tabel capaian SPM pendidikan:

Tabel 2. 94
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100,30%	100,23%	85,04%	96,64%	99,98

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100,74%	99,55%	93,47%	95,77%	96,69
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,20%	100%	95,07%	100%	96,78

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data dari tahun 2024, capaian pelayanan dasar bidang pendidikan menunjukkan kinerja yang cukup baik namun masih menyisakan beberapa tantangan. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), target partisipasi sebesar 33.349 anak usia 5-6 tahun tercapai hampir sempurna, dengan realisasi 99,98% (hanya 8 anak yang belum terlayani). Namun dari sisi mutu, persentase partisipasi murni dan proporsi PTK bersertifikat masih rendah, masing-masing hanya mencapai 83,70% dan 70%, sementara partisipasi guru penggerak baru 2,85%. Pendidikan Dasar (usia 7-15 tahun) juga menunjukkan capaian partisipasi yang tinggi, dengan realisasi 96,69% dari target 154.824 anak. Akan tetapi, beberapa indikator mutu seperti kemampuan literasi dan numerasi di tingkat SD dan SMP masih di bawah target nasional, serta kecukupan formasi guru ASN juga menjadi masalah, di mana hanya 58,86% (SD) dan 7,51% (SMP) yang terpenuhi. Sementara itu, pada Pendidikan Kesetaraan (bagi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah), capaian partisipasi mencapai 96,78% dari target 3.601 orang. Meski partisipasi cukup baik, capaian mutu layanan kesetaraan masih rendah, terutama pada indikator kemampuan literasi dan numerasi yang hanya tercapai 44,28% dan 32,23%, serta iklim kebhinekaan dan inklusivitas yang juga belum optimal. Secara umum, capaian kuantitas pelayanan sudah mendekati target, namun kualitas layanan pendidikan, terutama dalam hal mutu pembelajaran dan ketersediaan tenaga pendidik berkualifikasi, masih perlu perhatian serius dan peningkatan berkelanjutan.

Tabel 2. 95
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pendidikan Tahun 2020-2024

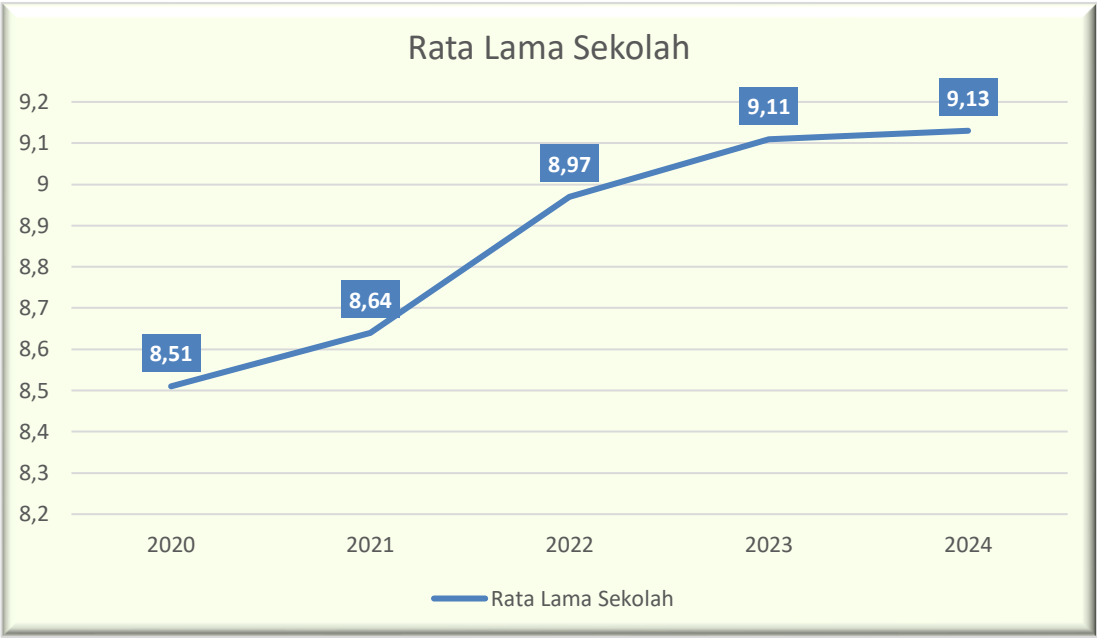
INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100,20%	93,89%	99,45%	103,68%	99,43%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100,30%	98,88%	98,04%	97,75%	95,72%
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	101,48%	97,73%	94,82%	100,82%	99,17%
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	98,96%	99,70%	100,00%	84,74%	85,67%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tingkat partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota menunjukkan capaian yang cukup baik secara umum, terutama pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah pertama. Meskipun demikian, terdapat tren penurunan partisipasi pada kelompok usia 7–12 tahun yang mengindikasikan perlunya penguatan akses dan layanan pendidikan dasar. Partisipasi pendidikan kesetaraan juga menunjukkan penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir, menandakan bahwa upaya menjangkau kelompok rentan atau yang tertinggal dari pendidikan formal perlu ditingkatkan. Fokus ke depan perlu diarahkan pada menjaga konsistensi partisipasi pendidikan dasar dan menengah, serta memperluas jangkauan program pendidikan kesetaraan, guna memastikan tidak ada warga usia sekolah yang tertinggal dari layanan pendidikan.

F. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dalam analisis ini indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto disajikan pada grafik berikut :



Gambar 2. 23 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024

Data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada 2020, rata-rata lama sekolah 8,51 tahun, meningkat menjadi 8,64 tahun di 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2022, dengan angka 8,97 tahun, dan terus naik menjadi 9,11 tahun pada 2023. Pada Tahun 2024 rata lama sekolah meningkat 9,13 lebih baik dari capaian 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan, dorongan terhadap wajib belajar, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Meskipun tren positif ini mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, rata-rata lama sekolah masih di bawah 12 tahun, yang berarti secara umum, masyarakat Kabupaten Mojokerto belum menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA/SMK secara penuh. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Mojokerto.

G. Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar



Gambar 2. 24 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, angka HLS tercatat sebesar 12,61 tahun, kemudian meningkat menjadi 12,88 tahun pada 2020, mengalami kenaikan sebesar 2,14%. Kenaikan ini terus berlanjut pada 2021 dengan angka 12,95 tahun, naik 0,54% dari tahun sebelumnya, dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 12,96 tahun pada 2022, dengan kenaikan 0,08%. Tren positif ini terus berlanjut dengan angka 12,97 tahun pada 2023, meningkat 0,08%, dan mencapai 12,99 tahun pada 2024, dengan pertumbuhan 0,15% dibanding tahun sebelumnya. Dalam periode 2019-2024, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mojokerto meningkat 3,01%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan partisipasi pendidikan, menggambarkan penduduk untuk menempuh pendidikan lebih lama. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan berbagai program pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b) Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola moralitas menurut umur. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH Kabupaten Mojokerto selama periode 2020-2024 terus-menerus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pada 2020, AHH tercatat sebesar 74,16 tahun, kemudian meningkat menjadi 74,21 tahun pada 2021, yang berarti mengalami kenaikan 0,07%. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada 2022, di mana AHH mencapai 74,48 tahun, naik sebesar 0,36% dari tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut hingga 2023, dengan AHH mencapai 74,74 tahun, meningkat 0,35% dibandingkan 2022. Pada Tahun 2020 hingga 2024, angka harapan hidup di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan sebesar 0,78%. Pada tahun 2024 angka harapan hidup Kabupaten Mojokerto meningkat menjadi 74,95 tahun lebih baik dari tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan layanan kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, serta akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan sanitasi. Meskipun angka ini menunjukkan perkembangan positif, upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk terus meningkatkan harapan hidup masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, memperluas akses terhadap air bersih, serta mendorong pola hidup sehat melalui program edukasi kesehatan. Dengan strategi yang tepat, angka harapan hidup dapat terus meningkat dan mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

B. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Kematian bayi adalah kematian terjadi antara waktu bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Penyebab kematian bayi yang dapat diidentifikasi antara lain adalah bayi berat badan lahir rendah (BBLR), Asfiksia (sesak nafas setelah bayi baru lahir), infeksi dan kelainan kongenital. Untuk menurunkannya dilakukan dengan intervensi di 1000 Hari Pertama Kelahiran, pemberian tablet Fe pada remaja putri, peningkatan sosialisasi tentang kesehatan

reproduksi. Untuk upaya penurunan kematian bayi, tidak bisa dipisahkan dari upaya penurunan kematian ibu melahirkan, karena merupakan satu kesatuan. Upaya yang dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu selain dengan kampanye pemberian tablet Fe, juga melaksanakan Persalinan empat tangan, pelaksanaan audit maternal perinatal, melaksanakan rapat koordinasi dengan penolong persalinan (bidang, dokter spesialis kandungan), meningkatkan program inovasi seperti pendampingan bumil risti, kelas Bapak dan meningkatkan kunjungan rumah ibu hamil.

Peningkatan akses ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter spesialis kandungan untuk deteksi dini RISIKO tinggi ibu hamil. Selain penguatan ke dalam Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penguatan pada kelembagaan Satgas Penakib (Satuan Tugas Penurunan Kematian Ibu dan Bayi), pengembangan Rumah Tunggu Kelahiran yang dibiayai oleh dana Jampersal (DAK), penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal dari Puskesmas ke Rumah Sakit serta penguatan keterlibatan masyarakat pada program Kesehatan Ibu dan Anak melalui P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Jumlah angka kematian bayi di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:



Gambar 2. 26 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2020, angka kematian bayi tercatat sebesar 4,6, kemudian mengalami penurunan menjadi 4,1 pada tahun 2021. Penurunan sebesar 10,87% ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan bayi, program imunisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kehamilan dan pasca persalinan. Namun, pada tahun 2022, angka kematian bayi kembali meningkat menjadi 4,5, atau mengalami kenaikan sebesar 9,76% dibanding tahun sebelumnya. Tren kenaikan terus berlanjut di tahun 2023, dengan angka kematian bayi mencapai 4,9, mengalami peningkatan 8,89% dibanding tahun 2022. Kenaikan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya

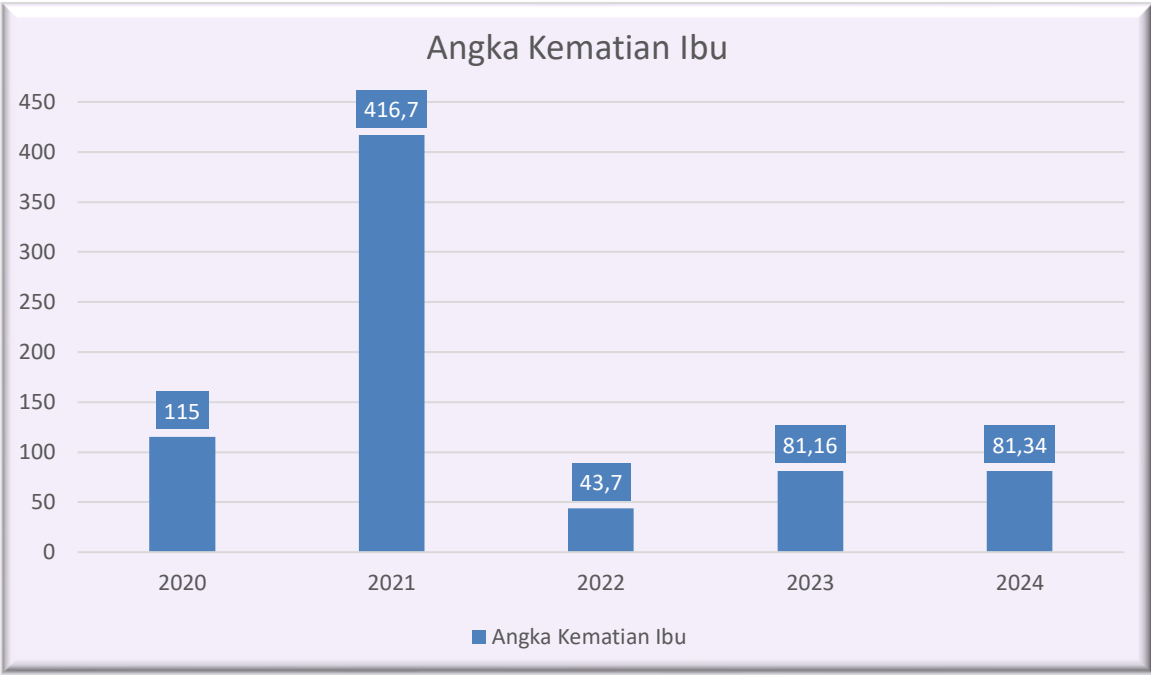
kasus bayi lahir prematur, infeksi pernapasan, gizi buruk, atau keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan di beberapa daerah.

Lonjakan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana angka kematian bayi meningkat tajam menjadi 6,9, mengalami kenaikan sebesar 40,82% dibanding tahun 2023. Lonjakan ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sektor kesehatan ibu dan anak, seperti kurangnya tenaga medis, fasilitas neonatal yang belum optimal, serta kemungkinan meningkatnya kasus penyakit menular yang menyerang bayi. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kematian bayi antara lain kurangnya perawatan prenatal, komplikasi saat persalinan, serta rendahnya cakupan ASI eksklusif dan gizi buruk pada bayi. Selain itu, kondisi lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan tingkat ekonomi keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab tingginya angka kematian bayi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan intervensi lebih lanjut dari pemerintah dan tenaga kesehatan, seperti peningkatan layanan kesehatan neonatal, edukasi kepada ibu mengenai pentingnya perawatan bayi baru lahir, serta peningkatan cakupan imunisasi dan program gizi untuk bayi. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan angka kematian bayi dapat ditekan sehingga kesejahteraan ibu dan bayi di Kabupaten Mojokerto dapat meningkat secara signifikan.

C. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu adalah kematian selama kehamilan dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kehamilan itu sendiri atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera. Upaya yang dilaksanakan untuk penurunan Angka Kematian Ibu antara lain, mempersiapkan kesehatan ibu di Hari Pertama Kehidupan, meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang reproduksi, kampanye pemberian tablet Fe pada remaja putri, peningkatan pemantauan kesehatan ibu hamil dengan ANC terpadu yang mewajibkan setiap Ibu hamil mengikuti pemeriksaan secara menyeluruh, mulai gigi, laboratorium dan konsultasi gizi. Berikut Angka kematian ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024:



Gambar 2. 27 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, angka kematian ibu tercatat sebesar 115, namun terjadi lonjakan drastis pada tahun 2021 hingga mencapai 416,7. Peningkatan tajam ini diduga kuat dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan gangguan pada layanan kesehatan ibu hamil dan persalinan. Pembatasan mobilitas serta keterbatasan tenaga medis akibat tingginya beban kerja dalam menangani pasien COVID-19 semakin memperburuk kondisi. Selain itu, infeksi COVID-19 pada ibu hamil meningkatkan Risiko komplikasi seperti preeklamsia, hipertensi, dan gangguan pernapasan yang berujung pada kematian. Memasuki tahun 2022, AKI mengalami penurunan signifikan menjadi 43,7, yang mencerminkan pemulihan sistem kesehatan seiring meredanya pandemi. Layanan kesehatan mulai kembali berjalan normal, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan meningkat, serta berbagai program pemerintah dalam bidang kesehatan ibu dan anak mulai dioptimalkan. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, angka kematian ibu kembali meningkat menjadi 81,16 dan 94,25. Kenaikan ini menunjukkan bahwa meskipun pandemi telah berakhir, masih terdapat tantangan dalam pemerataan fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga medis, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi pola hidup ibu hamil.

D. Balita Gizi Buruk

Balita hidup penderita gizi buruk dapat mengalami penurunan kecerdasan (IQ) hingga 10 persen. Keadaan ini memberikan petunjuk bahwa pada hakikatnya gizi yang buruk atau kurang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia. Seribu hari pertama kehidupan seorang anak adalah masa kritis yang menentukan masa depannya, dan pada

periode itu anak menghadapi gangguan pertumbuhan yang serius, yang menjadi masalah, lewat dari 1000 hari, dampak buruk kekurangan gizi sangat sulit untuk diobati.



Gambar 2. 28 Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Grafik ini menunjukkan peningkatan jumlah balita yang mengalami gizi buruk dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah balita gizi buruk tercatat sebanyak 137 anak, kemudian meningkat signifikan menjadi 231 anak pada tahun 2023. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah mencapai 317 anak. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masalah gizi buruk pada balita semakin memburuk setiap tahunnya. Kenaikan dari 2022 ke 2023 mencapai 94 kasus atau sekitar 68,6%, sedangkan dari 2023 ke 2024 bertambah 86 kasus atau sekitar 37,2%. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, angka gizi buruk berpotensi terus meningkat dan dapat berdampak pada kesehatan serta perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak, seperti pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, untuk mengatasi masalah ini melalui program pemberian gizi seimbang, edukasi kepada orang tua, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi balita. Diperlukan upaya strategis dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengendalikan tren kenaikan ini, seperti penguatan program edukasi gizi, pemberian bantuan makanan tambahan bagi balita kurang gizi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan jumlah balita gizi buruk dapat kembali menurun dalam beberapa tahun mendatang. Adapun Upaya yang dilakukan yaitu:

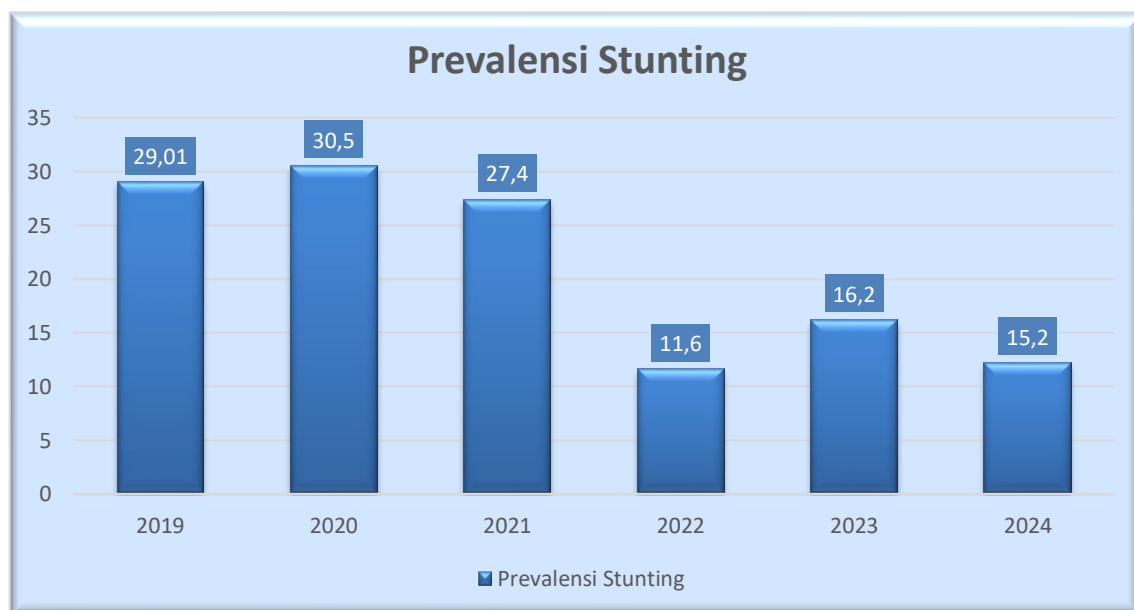
1. Memenuhi kebutuhan zat gizi pada ibu hamil. Antara lain kebutuhan karbohidrat, lemak, protein dan vitamin mineral dengan meningkatkan konsumsi sayur dan buah untuk meningkatkan hemoglobin melalui fe natural.

2. Suplementasi Tablet Fe perlu dilakukan untuk meningkatkan hemoglobin remaja putri untuk mencegah anemia, mencegah placenta tumbuh kecil saat hamil dan bayi tidak BBLR
3. Perbaikan Sanitasi/Kualitas Lingkungan Hidup
4. Pemberian zink sirup untuk balita yang utamanya berada di bawah garis merah untuk berat badannya

E. Prevelansi Stunting

Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab utama dari stunting adalah malnutrisi pada ibu hamil dan kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak. Banyak yang tidak menyadari bahwa tinggi pendeknya anak bisa menjadi tanda adanya masalah gizi kronis. Perlu diingat bahwa anak pendek belum tentu mengalami stunting. Namun anak yang mengidap kondisi ini pasti berperawakan pendek. Anak dengan asupan gizi terbatas sejak kecil dan telah berlangsung lama berisiko mengalami pertumbuhan yang terhambat.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang sudah ada sejak lama. Kondisi ini disebabkan oleh gizi buruk, terserang infeksi berkali-kali, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Namun, penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kekurangan gizi.



Gambar 2. 29 Prevalensi Stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

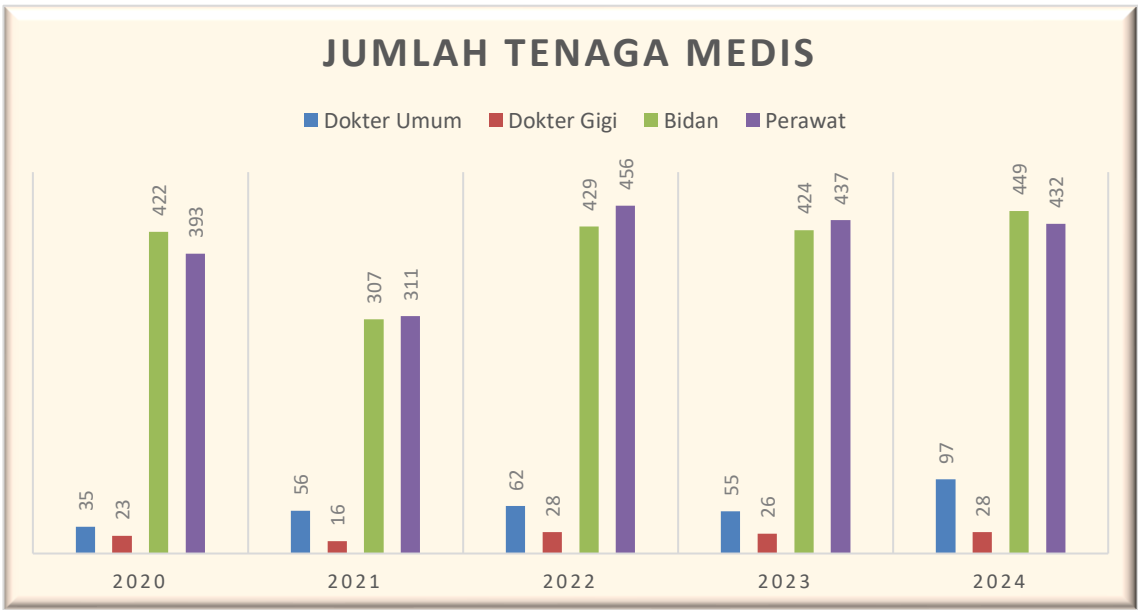
Data yang ditampilkan menunjukkan tren fluktuatif, dengan kecenderungan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, angka berada di 29,01, kemudian meningkat menjadi 30,5 pada 2020. Setelah itu, terjadi penurunan menjadi 27,4 pada 2021, menunjukkan penurunan sekitar 10,49% dari 2020. Penurunan paling tajam terjadi pada 2022,

di mana angka turun drastis menjadi 11,6, atau turun sebesar 57,66% dibandingkan 2021. Namun, pada 2023, terjadi kenaikan kembali menjadi 16,2, naik 39,66% dibandingkan tahun sebelumnya (2022).

Pada tahun 2024 Prevalensi stunting turun signifikan menjadi 9,6 lebih baik bila disbanding tahun 2023. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, intervensi program tertentu, atau perubahan kondisi sosial-ekonomi. Penurunan drastis pada 2022 dan 2024 mengindikasikan efektivitas kebijakan atau program intervensi tertentu, sementara kenaikan pada 2023 menunjukkan tantangan yang masih dihadapi dalam mempertahankan tren perbaikan.

F. Jumlah Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

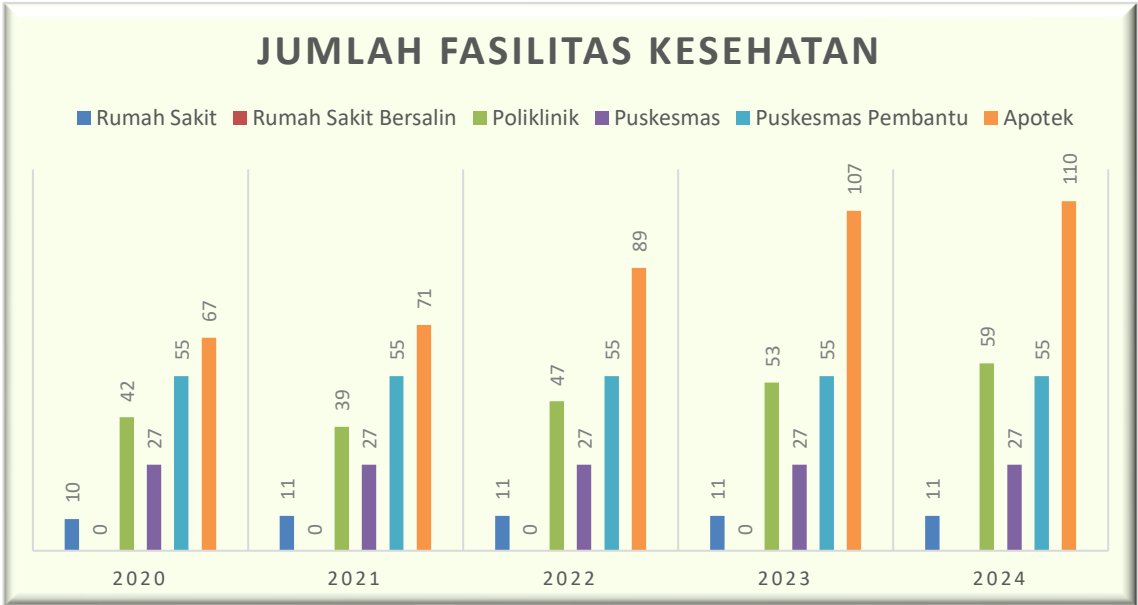
Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang terdiri dari medis, paramedis, administrasi, Jumlah tenaga medis maupun tenaga Kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 30 Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Medis, Paramedis dan lainnya Kabupaten Mojokerto
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah dokter umum di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami penurunan lalu kembali naik dari tahun 2021 sampai 2022, tetapi turun kembali pada tahun 2023 yang awalnya 62 menjadi 55. Sedangkan jumlah dokter gigi di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya fluktuatif, pada tahun 2019 yaitu 25, tahun 2020 yaitu 23, tahun 2021 yaitu 16, tahun 2022 yaitu 28 dan pada tahun 2023 sejumlah 26 dokter gigi. Selain itu untuk jumlah bidan juga fluktuatif terjadi penurunan drastis pada

tahun 2021 yang awalnya 422 menjadi 307 tetapi kembali naik pada tahun 2022 menjadi 429. Untuk jumlah perawat juga sama cenderung fluktuatif, terjadi penurunan di tahun 2021 yang awalnya 393 menjadi 311 lalu meningkat di tahun 2022 menjadi 456 dan turun di tahun 2023 menjadi 437. Selain tenaga paramedis yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto, fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan.



Gambar 2. 31 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah fasilitas kesehatan mengalami perkembangan dengan tren yang bervariasi dalam lima tahun terakhir. Jumlah rumah sakit relatif stabil, dari 10 pada 2020 hingga meningkat menjadi 11 sejak 2021, menunjukkan tidak ada ekspansi besar tetapi peningkatan kapasitas layanan. Sementara itu, rumah sakit bersalin yang masih ada pada 2019 hilang sepenuhnya sejak 2020, Poliklinik desa mengalami peningkatan signifikan dari 36 pada 2019 menjadi 53 pada 2023, menandakan upaya peningkatan akses kesehatan di tingkat desa. Di sisi lain, jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu tetap stagnan, masing-masing di angka 27 dan 55, menunjukkan bahwa fasilitas ini masih menjadi tulang punggung layanan kesehatan. Tren paling mencolok terjadi pada jumlah apotek, yang melonjak dari 60 pada 2019 menjadi 107 pada 2023, dengan kenaikan 78,33%, menandakan peningkatan permintaan layanan farmasi. Pertumbuhan fasilitas kesehatan lebih terfokus pada layanan primer, seperti poliklinik desa dan apotek, dibandingkan rumah sakit atau puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah lebih menitikberatkan pemerataan akses kesehatan daripada membangun fasilitas kesehatan besar.

Tabel 2. 96

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketersediaan Obat dan	98	98	100	*100	100

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Vaksin					
Jumlah Puskesmas yg Memiliki Rawat Inap	17	17	17	*17	17
Frekuensi Pengawasan Keamanan Obat (Bahan Berbahaya) dan Keamanan Pangan	73	44	44	*44	76
Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan (Hasil Industri dan Produksi Rumah Tangga)	132	123	123	*123	120
Frekuensi Promosi Kesehatan (Prohisan) kepada Masyarakat	10.243	12.16	12.16	*12160	12282
Angka Kematian Bayi (AKB)	4,6	4,1	72	*72	5,4
	76	65	4	4	95
Angka Kematian Ibu (AKI)	115	416,7	43,7	43,7	81,4
	19	66	7	*7	13
Angka Kematian Balita (AKABA)	4,6	4,1	81	*81	0,25
	77	65	5	5	4
Jumlah Balita Gizi Buruk	0,13	0,24	0,26	0,26	0,18
	112	142	137	*137	114
Balita Gizi Kurang	5,40	5,20	2,40	2,4	3,6
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	112	142	137	*137	114
Cakupan Ibu Hamil RISIKO Tinggi	29,06	27,4	27,4	*27,4	27,06
					4507
Persentase Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita TBC BTA	41,3	41,9	41,9	*41,9	82,45
	1.045	1.053	1.053	*1053	2033
Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC	85	88	89	90,9	91
Persentase Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita DBD	100	100	100	*100	100%
	97	71	72	*72	225
Persentase Cakupan Penemuan & Penanganan Penderita HIV	19%	40%	70%	*70%	100%
	63	47	175	*175	333
Jumlah Faskes yg Terstandar BLUD	27	27	27	27	27
Jumlah Faskes yg Terstandar Akreditasi	10	27	27	27	27
Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	74,16	74,21	74,48	74,74	74,95
Persentase Posyandu Aktif	81%	80%	97%	97%	99,84%
Cakupan Desa Siaga Aktif	304	304	304	304	304
Pratama	102	86	86	*86	0
Madya	154	133	133	*133	0
Purnama	40	80	80	*80	77,6
Mandiri	8	5	5	*5	22,4
Jumlah	304	304	304	304	304
Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	78,7	79,52	100	100	174.632
Persentase Rumah Tangga / KK yang Menggunakan Jamban Sehat	91,8	96	97	*97	351.416
Rasio Posyandu per 1.000 Balita	1,5	1,5	1,6	*1,6	21,72
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 1.000 Penduduk (1 Puskesmas 30.000 Jiwa per Wilayah)	0,12	0,12	7,04	7,04	38,48
Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk (1 RS 250.000 jiwa per Wilayah)	2,4	2,5	2,5	2,5	4.617
Rasio Dokter per 1.000 Penduduk	19,2	20,2	9,8	*9,8	11,90
(1 Puskesmas min. 2 Dokter)					
Rasio Tenaga Medis per 1.000 Penduduk (Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi; 1 Puskesmas min. 2 Dokter)	40,4	41,6	41,6	*41,6	41,22
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	129,9	112,84	115,69	115,69	107,01
	4.759	3.981	4.077	4.077	3568
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	94,6	92,99	95,85	95,85	100
	16.55	15.652	16.889	16.889	13810
Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	82,9	88,16	100	100	100
	252	268	304	304	304
Cakupan Balita Gizi Buruk	112	142	137		114

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kunjungan Bayi	99,6	95,96	93,4	93,4	94,4
	16.591	15.383	14.961	*14961	16034
Cakupan Puskesmas Standar (Rasio Puskesmas per Kecamatan)	100	100	100	100	100
	27	27	27	27	27
Cakupan Puskesmas Pembantu (Rasio Puskesmas Pembantu per Desa)	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang umumnya kuat, namun dengan beberapa fluktuasi yang perlu dicermati lebih lanjut. Pelayanan kesehatan ibu hamil mengalami sedikit penurunan dari 90,01% di 2020 ke 87% di 2022, namun berhasil mencapai 100% di tahun 2023 sebelum kembali turun menjadi 90,49% pada 2024. Tren serupa terjadi pada pelayanan kesehatan ibu bersalin, dengan capaian sempat menurun ke 87% pada 2022 dan kemudian kembali membaik ke angka 94,85% di 2024. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir memperlihatkan kecenderungan menurun lebih signifikan, dari hampir sempurna 99,86% pada 2020 menjadi hanya 86,12% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam deteksi dini dan pelayanan kesehatan neonatal yang perlu segera ditangani.

Sementara itu, pelayanan kesehatan balita menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, naik dari 68,83% pada 2020 hingga mencapai 100% pada 2023, meskipun di tahun 2024 sedikit menurun menjadi 87,64%. Konsistensi luar biasa terlihat dalam pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (7-15 tahun), yang berhasil mempertahankan capaian 100% selama lima tahun berturut-turut, menandakan bahwa layanan kesehatan di lingkungan sekolah berjalan sangat baik. Untuk kelompok usia produktif (15-59 tahun), peningkatan tajam tercatat dari hanya 14,29% pada tahun 2020 menjadi lebih dari 100% (100,77%) pada 2023 dan stabil di 100% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya perluasan akses layanan kesehatan yang masif bagi usia produktif, yang sebelumnya terabaikan. Demikian pula, pelayanan kesehatan usia lanjut (60 tahun ke atas) sempat turun drastis ke 75% di tahun 2021, namun kembali membaik menjadi 92,53% pada 2024, menandakan adanya peningkatan perhatian terhadap lansia. Pelayanan terhadap penyakit tidak menular menunjukkan konsistensi sangat tinggi. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan penderita diabetes melitus pada umumnya berada di angka 100%, dengan sedikit variasi, yang mencerminkan keberhasilan program pengendalian penyakit kronis. Demikian pula, pelayanan kesehatan bagi ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat), orang terduga TBC, dan orang dengan Risiko HIV memperlihatkan capaian layanan yang

selalu mencapai atau melebihi 100% dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa program kesehatan untuk kelompok rentan tersebut mendapatkan prioritas tinggi dalam pelaksanaan layanan. Pada tahun 2024, pelayanan dasar di Kabupaten Mojokerto untuk kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir menunjukkan pencapaian yang cukup baik, meskipun masih ada beberapa tantangan yang harus dibenahi. Pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai tingkat penerima layanan sebesar 90,71%, dengan persentase mutu layanan minimal sebesar 91,57%. Dari total 16.669 ibu hamil yang harus dilayani, sebanyak 15.084 berhasil mendapatkan pelayanan, meninggalkan 1.585 ibu hamil yang belum terlayani. Dalam aspek mutu, hampir semua indikator tercapai dengan baik, kecuali pada layanan vaksinasi Td, alat deteksi Risiko (HB, golongan darah, skrining triple eliminasi HIV, hepatitis B, sifilis), dan media KIE yang pencapaiannya masih sekitar 84–87%. Khusus alat deteksi glukoprotein urin, justru melebihi target (mencapai 140%), menunjukkan upaya pelayanan di bidang tersebut lebih dari memadai.

Dalam aspek ketersediaan tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan gizi, pelayanan untuk ibu hamil sudah tercapai 100%, menandakan bahwa SDM sudah terpenuhi secara optimal. Namun, perlu dicatat bahwa pelayanan kunjungan ibu hamil minimal enam kali baru tercapai 90,29%, mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dan dukungan logistik agar semua ibu hamil dapat memenuhi standar kunjungan tersebut. Untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin, pencapaian penerima layanan mencapai 94,01%, dengan tingkat mutu layanan 90,63%. Dari 16.669 target ibu bersalin, 15.811 sudah terlayani, dan 858 belum. Semua aspek mutu pelayanan, seperti penggunaan formulir partograf, rekam medis, buku KIA, serta media KIE, mencapai angka 94,85%, menunjukkan mutu layanan cukup konsisten. Ketersediaan tenaga medis spesialis obstetri dan ginekologi pun tercapai 100%, namun ada tantangan besar pada ketersediaan bidan, di mana hanya 36,23% bidan tersedia (dari 679 hanya 246 orang), sehingga dapat menjadi faktor kritis yang menghambat kualitas layanan persalinan. Untuk pelayanan bayi baru lahir, tingkat penerima layanan tercapai 87,44% dengan mutu layanan 92,73%. Dari 15.976 bayi yang harus dilayani, 13.758 telah mendapatkan pelayanan. Mutu pelayanan sebagian besar cukup tinggi, namun terdapat tantangan pada pemberian vaksin hepatitis B dosis tunggal, yang hanya mencapai 81,52%, lebih rendah dibandingkan item mutu lainnya seperti pemberian Vitamin K1, salep/tetes mata antibiotik, hingga media promosi yang rata-rata di kisaran 86,12%.

Tabel 2. 97
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,01%	87,64%	87%	100%	90,49
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94,88%	92,99%	87%	100%	94,85
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir usia (0-28) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,86%	95,95%	93%	100%	86,12
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita usia (12-59) bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68,83%	80,73%	90%	100%	87,64
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia 15-59 Tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,29%	70,38%	96%	100,77%	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	75%	100%	100%	92,53
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Orang Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan	100%	100%	58%	96,74%	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
		kesehatan sesuai standar					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	103,86%	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	92%	101,61%	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus HIV	Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	69%	103,24%	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang cukup positif, dengan sebagian besar indikator mengalami peningkatan signifikan. Pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar, penderita TBC, diabetes melitus, serta kelompok dengan Risiko HIV secara konsisten mencapai 100%, bahkan beberapa indikator melebihi target, mencerminkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok prioritas. Pelayanan untuk usia produktif juga mengalami lonjakan drastis dari 14,29% pada 2020 menjadi 100% pada 2024, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dalam menjangkau kelompok usia kerja.

Meski demikian, terdapat beberapa sektor yang masih perlu menjadi perhatian.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir menurun cukup tajam dari 100% pada 2023 menjadi 86,12% di tahun 2024, mengingat kelompok ini sangat rentan terhadap Risiko kematian neonatal

sesuai Permendagri 13 Tahun 2024 yang mana Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan di bidang kesehatan, namun telah ditambahkan layanan 5 SPM lainnya, yaitu Pendidikan, Sosial, Permukiman, Kebencanaan, Trantibunlimas. Telah dilaksanakan penandatanganan komitmen dengan 6 PD pengampu SPM dan masing-masing Kecamatan telah mengirimkan 1 posyandu pilot project untuk penerapan New Posyandu di Kabupaten Mojokerto

Tabel 2. 98
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Kesehatan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,12	0,14	0,12%	0,1155%%	0,1162%%
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	100%	36,36%	100,00%	100%%	100,00%
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	90,01%	87,64%	86,74%	91,3167%%	84,49%
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,88%	92,99%	87,18%	87,8055%%	82,85%
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,86%	95,96%	92,99%	100,00%	86,12%
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68,83%	80,73%	89,62%	100,00%	87,64%
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14,29%	70,38%	95,84%	100,00%	100,79%
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	75%	100,00%	100,00%	92,53%
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	58,33%	100,00%	102,37%
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100,00%	100,00%	101,90%
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100%	100%	91,61%	100,00%	109,06%

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase orang dengan RISIKO terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	65,99%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Rasio daya tampung rumah sakit rujukan masih tergolong rendah dan relatif stagnan di angka sekitar 0,11–0,14, yang mengindikasikan masih terbatasnya kapasitas layanan rujukan. Namun demikian, semua rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota telah terakreditasi secara penuh sejak 2022, menandakan peningkatan kualitas kelembagaan layanan. Dari sisi pelayanan kesehatan dasar, capaian terhadap ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir mengalami penurunan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, yang perlu menjadi perhatian khusus. Cakupan pelayanan balita juga sempat mencapai 100% pada 2023, namun sedikit menurun di tahun berikutnya. Sebaliknya, indikator pelayanan kesehatan untuk anak usia pendidikan dasar tetap konsisten di angka 100% selama lima tahun terakhir.

Indikator skrining kesehatan untuk usia produktif dan lansia menunjukkan peningkatan signifikan. Skrining usia 15–59 tahun meningkat tajam dari 14,29% (2020) menjadi 100,79% (2024), sementara untuk usia 60 tahun ke atas tetap tinggi meskipun sedikit menurun menjadi 92,53% pada 2024. Pelayanan bagi penderita penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus (DM) menunjukkan capaian yang sangat baik dengan nilai di atas 100% pada 2024, kemungkinan mencakup pasien yang belum terdata di awal atau cakupan yang melampaui target.

Pelayanan terhadap kelompok rentan seperti ODGJ berat, penderita TBC, dan Risiko HIV juga menunjukkan konsistensi capaian tinggi, bahkan beberapa indikator melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan khusus telah berjalan dengan baik dan menjangkau target populasi secara luas. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Sebagai fasilitas kesehatan utama di daerah, RSUD berfungsi sebagai pusat rujukan bagi layanan kesehatan primer seperti puskesmas dan klinik, serta menyediakan berbagai layanan medis yang lebih kompleks. Dengan fasilitas yang semakin berkembang, RSUD berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Selain itu,

RSUD juga berperan dalam menangani berbagai kasus medis darurat dan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan intensif. Keberadaan tenaga medis yang profesional, seperti dokter spesialis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, menjadikan RSUD sebagai pilar utama dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat. Dalam situasi pandemi COVID-19, misalnya, RSUD menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien, penyediaan layanan isolasi, serta pelaksanaan vaksinasi massal untuk menekan penyebaran virus di Kabupaten Mojokerto.

Tidak hanya dalam aspek pelayanan kesehatan, RSUD juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Sebagai institusi pelayanan publik, RSUD sering kali menjadi tempat pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan baru, termasuk dokter muda dan perawat yang sedang menjalani program pendidikan profesi. Dengan demikian, RSUD tidak hanya melayani masyarakat tetapi juga berkontribusi dalam mencetak tenaga kesehatan yang berkualitas dan siap melayani daerah. Lebih jauh, keberadaan RSUD turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam sektor kesehatan. Dengan meningkatnya kualitas layanan dan infrastruktur kesehatan, masyarakat Kabupaten Mojokerto tidak perlu mencari pengobatan ke luar daerah, sehingga biaya kesehatan lebih terjangkau. Selain itu, RSUD juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak tenaga medis dan non-medis, yang secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan dan pengembangan RSUD di Kabupaten Mojokerto menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan layanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut disampaikan angka morbiditas RSUD Basoeni dan RSUD Soekandar

Tabel 2. 99
Capaian Indikator Angka Morbiditas RSUD Basoeni

Indikator Angka Morbiditas per Rumah Sakit					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	RSUD Basoeni	RSUD Basoeni	RSUD Basoeni	RSUD Basoeni	RSUD Basoeni
BOR (<i>Bed Occupation Rate</i>)	42	52	50,29	73,1	69,16
LOS (<i>Length of Stay</i>)	3	4,2	4,36	3,34	3,12
TOI (<i>Turn Over Internal</i>)	5,6	10,9	4,75	1,61	2,58
BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	37	35,7	38,21	61,06	87,4
GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	43	76,6	34,85	33,78	31,71
NDR (<i>Net Death Rate</i>)	31	46	22,73	19,05	17,08

Sumber: RSUD Basoeni Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian indikator angka morbiditas RSUD Basoeni dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, dengan beberapa aspek mengalami perbaikan, sementara

yang lainnya menunjukkan fluktuasi. BOR (*Bed Occupation Rate*) mengalami peningkatan yang signifikan, dari 42% pada 2020 menjadi 69,16% pada 2024, mencerminkan penggunaan tempat tidur yang semakin optimal, terutama pada 2023 yang mencapai angka tertinggi 73,1%. Namun, angka ini juga menunjukkan adanya kapasitas yang semakin penuh di rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir. LOS (*Length of Stay*) cenderung menurun, dari 4,2 hari pada 2021 menjadi 3,12 hari pada 2024, yang dapat mengindikasikan peningkatan efisiensi dalam perawatan pasien, meskipun ada sedikit fluktuasi pada 2022 (4,36 hari). TOI (*Turn Over Internal*) menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 10,9 pada 2021 menjadi 2,58 pada 2024, yang menunjukkan berkurangnya rotasi pasien dalam rumah sakit, akibat kapasitas yang lebih penuh atau kebijakan perawatan yang lebih efisien. BTO (*Bed Turn Over*) mengalami peningkatan yang cukup besar, dari 37 pada 2020 menjadi 87,4 pada 2024, yang mencerminkan adanya rotasi tempat tidur yang lebih tinggi dan pemanfaatan ruang rumah sakit yang lebih maksimal. Sementara itu, GDR (*Gross Death Rate*) dan NDR (*Net Death Rate*) menunjukkan penurunan yang cukup baik. GDR turun dari 43 pada 2020 menjadi 31,71 pada 2024, dan NDR turun dari 31 pada 2020 menjadi 17,08 pada 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas perawatan dan penurunan angka kematian di rumah sakit. Meskipun ada beberapa fluktuasi, RSUD Basoeni menunjukkan capaian yang positif dalam beberapa indikator, dengan penurunan angka kematian dan peningkatan efisiensi penggunaan tempat tidur rumah sakit.

Tabel 2. 100
Capaian Angka Morbiditas RSUD Prof DR Soekandar

Capaian Indikator Angka Morbiditas per Rumah Sakit					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	RSUD Soekandar	RSUD Soekandar	RSUD Soekandar	RSUD Soekandar	RSUD Soekandar
BOR (Bed Occupation Rate)	51,27	59,79	64,7	76,65	92,65
LOS (Length of Stay)	3,76	4,31	4,28	4,53	3,5
TOI (Turn Over Internal)	3,94	3,14	2,52	1,35	0,28
BTO (Bed Turn Over)	45,30	46,71	51,12	62,87	96,11
GDR (Gross Death Rate)	93,24	76,54	53,28	53,47	49,1
NDR (Net Death Rate)	54,67	47,02	35,2	31,32	29,49

Sumber: RSUD Prof DR Soekandar Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian indikator angka morbiditas di RSUD Soekandar dalam periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan dan perbaikan dalam berbagai aspek layanan kesehatan. Salah satu indikator utama, yaitu *Bed Occupation Rate* (BOR) atau tingkat pemanfaatan tempat tidur, mengalami peningkatan signifikan dari 51,27% pada 2020 menjadi 92,65% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin banyaknya pasien yang mendapatkan layanan rawat inap, baik akibat peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan maupun efektivitas dalam

pemanfaatan fasilitas rumah sakit.

Length of Stay (LOS), yang menunjukkan rata-rata lama pasien dirawat di rumah sakit, mengalami sedikit fluktuasi. Pada 2020, LOS berada di angka 3,76 hari, meningkat hingga 4,53 hari pada 2023, kemudian turun menjadi 3,5 hari pada 2024. Penurunan LOS di tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dalam efisiensi pelayanan rumah sakit, di mana pasien dapat pulih lebih cepat atau mendapatkan perawatan yang lebih efektif sehingga waktu rawat inap bisa dipersingkat. Sementara itu, *Turn Over Internal* (TOI) atau rata-rata waktu tempat tidur kosong sebelum digunakan kembali mengalami penurunan drastis dari 3,94 hari pada 2020 menjadi hanya 0,28 hari pada 2024. Artinya, rotasi penggunaan tempat tidur menjadi lebih cepat, yang menunjukkan bahwa tingkat hunian rumah sakit semakin tinggi dan efisiensi pemanfaatan tempat tidur semakin baik. Indikator *Bed Turn Over* (BTO), yang mengukur frekuensi penggunaan tempat tidur dalam satu tahun, juga mengalami lonjakan tajam dari 45,30 kali pada 2020 menjadi 96,11 kali pada 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya jumlah pasien yang mendapatkan perawatan di RSUD Soekandar, sejalan dengan peningkatan BOR.

Dari sisi mortalitas, terdapat tren penurunan *Gross Death Rate* (GDR) dari 93,24 pada 2020 menjadi 49,1 pada 2024, serta *Net Death Rate* (NDR) dari 54,67 pada 2020 menjadi 29,49 pada 2024. Penurunan angka kematian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan efektivitas dalam penanganan pasien, baik dari segi perawatan medis, fasilitas kesehatan, maupun kompetensi tenaga medis di RSUD Soekandar. Dari data diatas capaian indikator angka morbiditas di RSUD Soekandar menunjukkan tren yang positif. Peningkatan BOR dan BTO, disertai dengan penurunan TOI, mengindikasikan bahwa rumah sakit semakin optimal dalam memberikan layanan kesehatan. Penurunan angka kematian juga menjadi indikator keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan medis. Dengan tren ini, diharapkan RSUD Soekandar terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanannya guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus mendapatkan prioritas juga dalam pembangunan. Pekerjaan umum ini meliputi urusan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan TPS. Berikut merupakan gambaran umum bidang pekerjaan umum di Kabupaten Mojokerto:



Gambar 2. 32 Realisasi Kondisi Jalan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2019, jalan dengan kondisi baik tercatat sebesar 520.491 atau 49.9% dari total jalan, mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 964.655 (92.7%). Namun, pada tahun 2024, kondisi jalan baik mengalami penurunan menjadi 776.838 (66.6%). Sebaliknya, jalan dengan kondisi sedang mengalami tren penurunan dari 236.687 (22.7%) pada tahun 2019 menjadi 51.407 (4.9%) pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat drastis ke 193.369 (16.6%) pada tahun 2024. Jalan dalam kondisi rusak menunjukkan perbaikan signifikan dari 284.976 (27.4%) pada tahun 2019 menjadi hanya 25.262 (2.4%) pada tahun 2023. Namun, kondisi ini memburuk pada tahun 2024 dengan peningkatan jalan rusak menjadi 196.182 (16.8%). Total panjang jalan yang dicatat tetap stabil dari 2019 hingga 2023, sekitar 1.041,32, tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 1.166,389, yang mencerminkan adanya perluasan jaringan jalan. Data ini menunjukkan adanya upaya perbaikan jalan yang cukup baik hingga tahun 2023 dengan dominasi kondisi jalan baik. Namun, peningkatan jalan rusak dan kondisi sedang di tahun 2024 perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pemeliharaan infrastruktur.

Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.

Tabel 2. 101 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan Kontruksi Beton (dari 1.041.324 km)	38,66	40,92	40,92	40,92	39,97
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	59,61	70	77,24	77,24	66,60
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	1 / 1124.3	1/1074,8	1/1074,8	1/1074,8	1/991,2165

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80,15	87,23	88,24	88,24	83,18
Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (minimal 1.5 m)	38,19	38,19	38,19	38,19	38,45
Panjang Jalan yg Memiliki Trotoar dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Lebar >1,5 M)	45,55	18,56	45,55	45,55	46,12
Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	59,61	75,92	77,24	77,24	66,60
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	56	56	55,85	55,85	60,77
	607	607	607	607	650
Tersedianya Data Kondisi Jalan dan Jembatan	1	1	1	1	1
Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	38,25	38,19	42,33	42,33	42,65
Jumlah Daerah Irigasi	365	365	365	365	365
Panjang Saluran Irigasi	1.239.256,00	1.239.256,50	1,240,795.01	1,240,795.01	1,240,795.01
Rasio Jaringan Irigasi	77	77	78	78	79
Luas Daerah Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	16,104	16,104	17,767	17,767	17,767
Persentase Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	62	37	42,33	42,33	65,33
Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada	75	75	75	75	75
Jumlah Jaringan Irigasi yg Direhabilitasi	8	6	6	6	15
Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	38,19	38,19	54,86	54,86	55,06
Jumlah Kumulatif Waduk / Embung yg Dinormalisasi	2	0	5	5	6
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	65	65	65	65	65
Jumlah Rencana Tata Ruang (RTRW / RUTRK, RDTRK, RTRK)	2	2	2	2	2
Persentase Perencanaan Tata Ruang pada Setiap Perijinan	100	100	100	100	100
Persentase Evaluasi Rencana Tata Ruang	100	100	100	100	100
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	100
Persentase Tersedianya Rencana Tata Ruang Rinci sesuai UU No. 26 Tahun 2007	11	11	11	11	11

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2024

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang periode 2020-2024 menunjukkan tren yang bervariasi di berbagai aspek infrastruktur. Persentase jalan dengan konstruksi beton mengalami peningkatan dari 38,66% pada 2020 menjadi 40,92% pada 2021-2023, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 39,97% pada 2024. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat signifikan dari 59,61% pada 2020 hingga mencapai 77,24% pada 2022-2023, sebelum mengalami penurunan cukup tajam menjadi 66,60% pada 2024, menunjukkan adanya potensi degradasi kualitas jalan. Hal serupa terjadi pada persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik, yang meningkat dari 80,15% (2020) menjadi 88,24% (2022-2023) sebelum turun drastis ke 83,18% pada 2024 karena penambahan panjang jalan. Rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk menunjukkan perbaikan, dari 1/1124,3 pada 2020 menjadi 1/991,22 pada 2024, yang menandakan peningkatan aksesibilitas jalan bagi masyarakat. Sementara itu, persentase jembatan dalam kondisi baik sempat menurun dari 56% (2020) menjadi 55,85% (2022-2023), tetapi mengalami kenaikan signifikan menjadi 60,77% pada 2024, yang mengindikasikan adanya rehabilitasi atau perbaikan jembatan. Pada sektor drainase dan irigasi, persentase saluran drainase dalam kondisi baik meningkat dari 38,19% (2020) menjadi 42,65% (2024), menunjukkan adanya peningkatan dalam sistem pengelolaan air. Jumlah daerah irigasi tetap 365 unit selama lima tahun, tetapi panjang saluran irigasi mengalami kenaikan, dari 1.239.256 meter pada 2020, naik ke 1 menjadi 1.240.795 meter pada 2024. Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 62% pada 2020 menjadi 65,33% pada 2024, mencerminkan adanya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Di sisi lain, sektor tata ruang dan kebinamargaan menunjukkan stabilitas, dengan persentase perencanaan tata ruang pada setiap perizinan, evaluasi rencana tata ruang, dan ketaatan terhadap RTRW tetap di angka 100% selama lima tahun. Capaian kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menunjukkan perbaikan di beberapa aspek, terutama dalam rehabilitasi jembatan dan jaringan irigasi, namun juga terdapat penurunan kualitas jalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Pada Tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten/Kota mengalami perkembangan signifikan dalam penyediaan pelayanan dasar di bidang air minum dan pengolahan air limbah domestik. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Pada tahun 2020, akses warga terhadap air minum layak berada di angka 88,21%, kemudian meningkat menjadi 95,95% pada 2021. Meski terjadi sedikit penurunan pada 2022 menjadi 88,95%, capaian ini kembali melonjak menjadi 94,19% pada 2023, dan akhirnya

mencapai 100% pada 2024. Ini berarti, pada tahun 2024, seluruh warga negara yang membutuhkan telah mendapatkan akses air minum baik melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan maupun non-perpipaan untuk kebutuhan domestik seperti minum, memasak, mencuci, mandi, dan menjaga kebersihan.

Sementara itu, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik juga menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2020, cakupan layanan ini baru mencapai 88,11%, namun pada 2021 justru mengalami penurunan menjadi 84,11%. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh tantangan teknis atau administratif dalam perluasan layanan sanitasi. Namun demikian, perbaikan yang cukup drastis terjadi pada 2022 dengan pencapaian 94,80%, diikuti peningkatan lagi pada 2023 hingga 99,55%, dan akhirnya juga berhasil mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian penuh ini menandakan bahwa semua warga telah mendapatkan layanan minimal pengelolaan air limbah domestik yang layak.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak. Pencapaian 100% akses air minum dan layanan air limbah domestik di tahun 2024.

Tabel 2. 102
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang membutuhkan (belum memiliki) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan untuk kebutuhan domestik (minum, masak, cuci pakaian, mandi, bersih rumah, hygiene)	88,21%	95,95	88,95%	94,19%	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada Kabupaten/Kota	88,11%	84,11	94,80%	99,55%	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 103
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	86,37%	95,95%	88,95%	94,19%	95,48%
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87,60%	85,38%	94,80%	99,50%	99,68%
Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	80,21%	87,72%	88,24%	89,74%	83,18%
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	6,62%	0,05%	18,73%	30,82%	38,71%
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2024

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa sebagian besar target telah berhasil dipenuhi secara konsisten. Rasio layanan irigasi, kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi telah mencapai angka 100% setiap tahun, mencerminkan tata kelola teknis yang optimal dan pengawasan yang efektif. Akses rumah tangga terhadap air minum layak melalui SPAM serta layanan pengolahan air limbah domestik juga mengalami peningkatan signifikan, masing-masing mencapai 95,48% dan 99,68% pada tahun 2024. terdapat sektor yang memerlukan perhatian khusus. Yaitu rasio tenaga operator/teknisi/analisis bersertifikat kompetensi memang meningkat setiap tahun, namun capaian 38,71% di 2024 masih menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga teknis belum tersertifikasi. Ke depan, perlu upaya lebih kuat dalam peningkatan kualitas SDM teknis melalui pelatihan dan sertifikasi,

Tabel 2. 104
Status dan Panjang Jalan

Status	Panjang Jalan (km)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan Kabupaten - 342 ruas	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.166,39
Jalan Perkotaan - 15 Ruas	18,108	18,108	18,108	18,108	20,794
Jalan Non Perkotaan / Poros Desa - 325 ruas	1.023,22	1.023,22	1.023,22	1.023,22	1.145,60
Total	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.041,32	1.166,39

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2024

Status dan panjang jalan di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan signifikan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 2020 hingga 2023, total panjang jalan tetap di angka 1.041,32 km, mencakup 342 ruas jalan kabupaten, 15 ruas jalan perkotaan, dan 325 ruas jalan non-perkotaan atau poros desa. Namun, pada tahun 2024, terjadi peningkatan total panjang jalan menjadi 1.166,39 km, yang mencerminkan adanya pembangunan atau pelebaran jalan baru. Peningkatan paling signifikan terjadi pada jalan kabupaten, yang bertambah dari 1.041,32 km (2020-2023) menjadi 1.166,39 km pada 2024, dengan kenaikan sebesar 12,01%. Jalan perkotaan juga mengalami peningkatan dari 18,108 km menjadi 20,794 km pada 2024, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 14,83%. Sementara itu, jalan non-perkotaan atau poros desa meningkat dari 1.023,22 km (2020-2023) menjadi 1.145,60 km pada 2024, dengan kenaikan sebesar 11,96%. Peningkatan total panjang jalan dari 1.041,32 km menjadi 1.166,39 km menunjukkan kenaikan sebesar 12,01% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya fokus pembangunan infrastruktur jalan, baik di wilayah kabupaten maupun desa, yang berpotensi meningkatkan konektivitas, akses ekonomi, serta mobilitas masyarakat. Namun, dengan bertambahnya panjang jalan, perlu adanya perhatian lebih terhadap pemeliharaan dan kualitas jalan agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.

Tabel 2. 105
Jenis, Jumlah dan Panjang Jembatan

Jenis Bahan	Jenis, Jumlah dan Panjang Jembatan									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang	Jumlah	Panjang
	(bh)	(m)	(bh)	(m)	(bh)	(m)	(bh)	(m)	(bh)	(m)
Beton	239	2,078	239	2,078	240	2,094	240	2,094	240	1980
Composit	228	1,507	228	1,507	228	1,507	228	1,507	228	3550,4
Besi / Baja	36	1,526	36	1,526	36	1,526	36	1,526	36	335,25
Lain-Lain	104	485	104	485	103	469	103	469	146	120
Total	607	5,596	607	5,596	607	5,596	607	5,596	650	5985,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Data jumlah dan panjang jembatan berdasarkan jenis bahan selama periode 2020-2024 menunjukkan stabilitas hingga 2023, namun terjadi peningkatan signifikan pada 2024. Jumlah jembatan tetap 607 unit dari 2020 hingga 2023, sebelum meningkat 7,08% menjadi 650 unit pada 2024. Panjang total jembatan juga mengalami kenaikan sebesar 6,96%, dari 5.596 meter pada 2020-2023 menjadi 5.985,65 meter pada 2024. Pada kategori beton, jumlah jembatan sedikit meningkat dari 239 unit (2020-2021) menjadi 240 unit pada 2022 dan tetap hingga 2024. Namun, panjangnya mengalami penurunan 5,44%, dari 2.094 meter (2022-2023) menjadi 1.980 meter pada 2024. Jembatan composite tetap 228 unit sepanjang lima tahun, tetapi panjangnya meningkat drastis sebesar 135,6%, dari 1.507 meter pada 2020-2023 menjadi 3.550,4 meter pada 2024. Ini menunjukkan adanya pembangunan atau perpanjangan jembatan composite secara signifikan. Jembatan berbahan besi/baja tetap stabil di 36 unit, tetapi panjangnya mengalami penurunan drastis 78,02%, dari 1.526 meter (2020-2023) menjadi 335,25 meter pada 2024. Ini bisa mengindikasikan adanya penggantian atau penghapusan beberapa jembatan baja. Kategori lain-lain mengalami fluktuasi, dengan jumlah jembatan berkurang dari 104 unit (2020-2021) menjadi 103 unit (2022-2023), sebelum meningkat 41,75% menjadi 146 unit pada 2024. Namun, panjang jembatan dalam kategori ini mengalami penurunan signifikan sebesar 74,41%, dari 469 meter (2022-2023) menjadi hanya 120 meter pada 2024. Meskipun jumlah total jembatan meningkat pada 2024, perubahan panjang jembatan dalam berbagai kategori menunjukkan adanya rekonstruksi, peningkatan kapasitas, atau perubahan material yang digunakan. Peningkatan panjang jembatan composite menjadi sorotan utama, sementara penurunan panjang jembatan baja dan beton memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan dampaknya terhadap konektivitas dan kapasitas infrastruktur transportasi.

Tabel 2. 106
Jumlah Daerah Irigasi Teknis, Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi

Jumlah Daerah Irigasi Teknis, Panjang Saluran dan Areal Sawah Irigasi									
Daerah Irigasi (DI)	2022			2023			2024		
	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Areal Luas Sawah Irigasi (Ha)
Teknis	230	1,004,053.01	15,462	230	1,004,053.01	15,462	230	1,004,053.01	15,462
Semi Teknis	48	77,422.00	834	48	77,422.00	834	48	77,422.00	834
Sederhana	87	159,320.00	1,461	87	159,320.00	1,461	87	159,320.00	1,461
Jumlah	365	1,240,795.01	17,757	365	1,240,795.01	17,757	365	1,240,795.01	17,757

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2024

Jumlah daerah irigasi teknis, panjang saluran, dan areal sawah irigasi pada periode 2022-2024 menunjukkan stabilitas dalam jumlah daerah irigasi (DI) dan luas sawah yang dilayani, namun terdapat sedikit perubahan dalam panjang saluran irigasi. Jumlah DI tetap 365 sepanjang periode, dengan luas sawah irigasi yang tidak mengalami perubahan di 17.757 hektar. Pada kategori irigasi teknis, jumlah DI tetap 230, dengan luas sawah 15.462 hektar. Namun, panjang saluran mengalami sedikit penurunan dari 1.037.141 meter pada 2022 menjadi 1.004.053,01 meter pada 2023 dan tetap bertahan hingga 2024. Irigasi semi teknis juga mengalami kondisi yang stabil, dengan jumlah 48 DI, panjang saluran 77.422 meter, dan luas sawah yang terlayani 834 hektare sepanjang tiga tahun. Untuk irigasi sederhana, jumlah DI tetap 87, luas sawah yang terlayani tetap 1.461 hektare, dan panjang saluran menunjukkan angka konsisten 159.320 meter sejak 2023 setelah sebelumnya tercatat 159.320 meter pada 2022, yang. Meskipun total panjang saluran mengalami sedikit penurunan dari 1.273.883 meter pada 2022 menjadi 1.240.795,01 meter pada 2023 dan tetap hingga 2024, luas sawah yang terlayani tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam panjang saluran tidak secara langsung mempengaruhi cakupan layanan irigasi terhadap lahan pertanian. Ke depan, pemeliharaan dan peningkatan efisiensi jaringan irigasi perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan produktivitas pertanian.

Tabel 2. 107

Kondisi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik, Sedang, Rusak

Kondisi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik, Sedang, Rusak (dalam meter)					
Kondisi	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	829,316.28	849,661.28	547,066.90	703,574.08	810.572,97
Sedang	208,392.03	198,392.03	124,928.48	122,202.00	64345,19
Rusak	201,464.01	191,119.01	568,799.63	415,018.92	365876,84
Jumlah	1,239,172.33	1,239,172.33	1,240,795.01	1,240,795.01	1.240.795,01

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2020, jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 829.316,28 66,9% dari total jaringan, mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 849.661,28 (68,6%). Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 547.066,90 (44,1%), sebelum kembali meningkat pada 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 703.574,08 (56,7%) dan 810.572,97 (65,3%). Sementara itu, kondisi sedang menunjukkan tren penurunan dari 208.392,03 (16,8%) pada tahun 2020 menjadi 64.345,19 (5,2%) pada 2024, yang mengindikasikan perbaikan atau perubahan kategori kondisi jaringan. Sebaliknya, kondisi rusak mengalami fluktuasi cukup besar. Pada tahun 2020, jaringan rusak tercatat 201.464,01 (16,3%), mengalami sedikit perbaikan pada 2021 menjadi 191.119,01 (15,4%). Namun, pada 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga 568.799,63 (45,8%), sebelum mengalami penurunan bertahap pada 2023 (415.018,92 atau 33,4%) dan 2024 (365.876,84 atau 29,5%). Total panjang jaringan irigasi tetap stabil di angka sekitar 1.240.795,01 sepanjang periode, menunjukkan bahwa perubahan

kondisi lebih disebabkan oleh perbaikan atau degradasi kualitas daripada penambahan atau pengurangan jaringan. Meskipun kondisi baik mengalami perbaikan dari tahun 2022 ke 2024, lonjakan kondisi rusak pada 2022 dan masih tingginya persentase jaringan rusak di 2024 menandakan perlunya perhatian lebih dalam pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi agar fungsinya tetap optimal. Kondisi jaringan irigasi yang baik di Kabupaten Mojokerto didukung oleh konstruksi yang berkualitas, pemeliharaan rutin, partisipasi aktif kelompok tani, manajemen air yang baik, Namun, keberlanjutan kondisi ini masih dihadapkan pada tantangan berupa alih fungsi lahan, Risiko kerusakan akibat bencana alam, sedimentasi tinggi, kurangnya koordinasi antar pihak, keterbatasan anggaran, serta potensi perusakan atau pencurian fasilitas irigasi.

Pemerataan dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung dapat diukur dengan indikator kinerja persentase infrastruktur kondisi baik.

Infrastruktur kondisi baik adalah prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih berfungsi optimal sesuai standar meliputi (jalan, drainase, irigasi, spam, sanitasi dan gedung). Pengelolaan sumber daya air telah memenuhi target dengan 100% luas daerah irigasi telah dilayani oleh jaringan irigasi. Akses terhadap air minum mencapai 95,48% dari target 95,50%. Pengelolaan sampah mencapai 9,54% dari target 10%. Sistem drainase mencapai 20,05% dari target 20%. Penataan bangunan gedung mencapai 47,77% dari target 20%, menunjukkan peningkatan kepatuhan. Namun, kemantapan jalan hanya mencapai 83,18% dari target 93% dikarenakan panjang jalan Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan seiring dengan pemberlakuan SK Status Ruas Jalan terbaru, dan tenaga konstruksi bersertifikasi mencapai 51,06% dari target 38%.

Capaian Persentase Infrastruktur Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 108

Persentase Infrastruktur Kondisi Baik Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	74,39%	61,03%	78,67%	80,57%

Sumber: DPUPR Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Tabel 2. 109

Persentase Kemantapan Jalan Kondisi Baik Tahun 2023-2024

Tingkat Kemantapan	Nilai	satuan	Status Ruas	Panjang	Jumlah
Kemantapan Tahun 2023	87,23	Persen	Lama	1.042,324	342,000
Kemantapan Tahun 2024	83,18	Persen	Baru	1.166,389	430,000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto, Tahun 2024

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat ditinjau dari persentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu milik sendiri dan bukan milik sendiri, seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 110
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga			
2022	94,53	5,47	100,00
2023	93,89	6,11	100,00
2024	95,90	4,10	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabpaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2023, persentase rumah tangga di Kabupaten Mojokerto yang memiliki rumah sendiri tercatat sebesar 93,89%, mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 94,53%. Sementara itu, jumlah rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri meningkat dari 5,47% pada tahun 2022 menjadi 6,11% pada tahun 2023. Tren ini mengindikasikan adanya perubahan dalam pola kepemilikan rumah yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, harga properti yang meningkat, serta urbanisasi yang menyebabkan lebih banyak rumah tangga tinggal di hunian sewa atau milik orang lain.

Namun, untuk tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan, dengan kepemilikan rumah diperkirakan meningkat menjadi 95,90%, sementara jumlah rumah tangga yang menghuni rumah bukan milik sendiri menurun menjadi 4,10%. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya efektivitas program perumahan yang memberikan akses lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki rumah sendiri. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, tingkat kepemilikan rumah di Kabupaten Mojokerto tetap berada pada angka yang tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih mampu memiliki hunian sendiri. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, terutama bagi kelompok dengan keterbatasan ekonomi.

Tabel 2. 111
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luas Kawasan Kumuh (dari 6 Desa)					
a. Luas Kawasan Kumuh sesuai SK Bupati (2016)	-	-	297,07	287,39	246.51

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
b. Luas Kawasan Kumuh sesuai SK Bupati (2016) yang Sudah Tertangani					
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH yang Direhabilitasi)	10,61	13,92	0,15	2,5	2,5
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	10.494	10.652	16.922	13.789	13.789
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	98,66	100,14	100	100	100

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data rumah tinggal hingga tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah rumah setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah rumah tercatat sebanyak 323.807 unit, kemudian meningkat menjadi 336.285 unit pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 339.850 unit pada tahun 2023 serta 2024. Meskipun jumlah rumah bertambah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) justru mengalami penurunan dari 15.987 unit (4,94%) pada tahun 2021 menjadi 15.891 unit (4,73%) pada tahun 2022. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan 15.479 RTLH (4,55%) dan semakin berkurang menjadi 15.443 unit (4,54%) di tahun 2024.

Tabel 2. 112

Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	99,32%	100	100%	100%	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	84,32%	100	100%	100%	100

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada Tahun (2020–2024), pelayanan dasar di bidang perumahan di Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian yang sangat positif dan progresif, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni untuk korban bencana serta masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah. Pada layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana, tingkat pencapaian pada tahun 2020 sudah tergolong tinggi, yaitu sebesar 99,32%. Meski masih terdapat sedikit kekurangan di tahun tersebut, upaya perbaikan yang dilakukan segera menunjukkan hasil nyata. Sejak tahun 2021 hingga 2024, tingkat pencapaian

mencapai 100% secara konsisten, yang berarti seluruh warga korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni berhasil difasilitasi secara penuh setiap tahunnya. Konsistensi ini mengindikasikan bahwa sistem tanggap darurat serta mekanisme rehabilitasi perumahan di daerah ini sudah berjalan sangat efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, pada layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Warga yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, pencapaian di tahun 2020 berada pada angka 84,32%. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu masih ada sebagian warga terdampak program relokasi yang belum sepenuhnya mendapatkan rumah layak huni. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024, tingkat capaian meningkat tajam menjadi 100% setiap tahunnya. Ini menandakan adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait, perbaikan dalam perencanaan program relokasi, serta penyediaan fasilitas perumahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data detail SPM Tahun 2024, pelayanan dasar dalam bidang perumahan untuk korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi menunjukkan hasil yang sangat baik dan terstruktur. Pada layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, seluruh penerima pelayanan yang tercatat telah mendapatkan akses penuh terhadap bantuan yang dibutuhkan. Dengan total 61 orang yang harus dilayani, semuanya telah mendapatkan layanan yang diperlukan, baik itu rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah, pemukiman kembali, maupun bantuan akses rumah sewa layak huni, yang masing-masing tercatat 100% terlayani. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat cepat dan efisien dalam menanggapi bencana dan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi para korban bencana. Sementara itu, dalam fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, meskipun tidak ada angka penerima layanan yang teridentifikasi secara langsung pada data ini, pencapaian 100% untuk seluruh tahapan seperti pendataan, perhitungan, dan perencanaan menunjukkan bahwa proses administratif dan perencanaan untuk program relokasi berjalan dengan sangat baik. Hal ini memberikan keyakinan bahwa jika terjadi relokasi, masyarakat yang terkena dampak akan mendapatkan solusi perumahan yang layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan sistem pelayanan yang sangat responsif dan terorganisir dengan baik, di mana baik korban bencana maupun masyarakat yang terkena relokasi telah mendapatkan hak mereka atas hunian yang layak. Program-program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperlihatkan keberhasilan dalam mengelola dan menanggapi situasi darurat serta perencanaan jangka panjang untuk penyediaan perumahan.

Tabel 2. 113
Indikator Kinerja Kunci Urusan Perumahan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	-	-	20,77%	16,64%	22,72%
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,85%	4,9	4,73%	4,63%	4,56%
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	3,62%	2,63	28,81%	17,72%	58,84%

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian IKK sektor perumahan dan permukiman menunjukkan hasil yang bervariasi selama tahun 2020 hingga 2024. Program penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana telah tercapai 100% secara konsisten setiap tahun, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam penanganan pascabencana. Penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha mengalami fluktuasi, meski cenderung meningkat pada 2024. Penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) terjadi secara bertahap, namun melambat dari tahun ke tahun. Sementara itu, jumlah perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menunjukkan peningkatan signifikan, khususnya pada tahun 2024.

e) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan pelayanan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana

sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan. Kejahatan merupakan bentuk kriminalitas yang masih mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto.



Gambar 2. 33 Angka Kriminalitas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan grafik angka kriminalitas dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, angka kriminalitas tercatat sebanyak 700 kasus. Jumlah ini kemudian menurun menjadi 615 kasus pada tahun 2023, menunjukkan penurunan sebesar 12,14%. Penurunan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2024, di mana angka kriminalitas turun hingga 324 kasus, atau berkurang sekitar 47,32% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam upaya pengendalian kriminalitas. Faktor-faktor seperti peningkatan patroli keamanan, efektivitas penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat dalam mencegah tindakan kriminal berkontribusi terhadap penurunan angka kejahatan ini. Jika tren positif ini terus berlanjut, diharapkan tingkat kriminalitas dapat semakin menurun di tahun-tahun berikutnya, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Capaian kinerja ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Tabel 2. 114
Capaian Kinerja Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah	%	100	100	100	100	100
Jumlah Penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali	4	4	5	3	4
Persentase Konflik SARA	%	0	0	0	0	0
Frekuensi Pemberian Wawasan Pendidikan Politik kepada Masyarakat	kali	1	1	1	2	2

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024*
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	kegiatan	1	1	1	2	2
Jumlah Pertemuan dengan Ormas, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama	kali	4	3	2	4	4
Frekuensi Komunikasi Pemerintah Daerah dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa	kali	4	4	4	4	4
Jumlah Ormas dan LSM yang terdaftar	jumlah	208	235	255	275	295
Jumlah Ormas dan LSM yang dibina	jumlah	150	150	150	150	150
Satuan Polisi Pamong Praja						
Persentase Peningkatan Trantibmas	%	5	3	8	9	10
Jumlah Demonstrasi	kegiatan	9	13	3	9	8
Persentase Penerimaan/Penanganan Unjuk Rasa	%	100	100	100	100	100
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	kegiatan	327	334	304	282	300
Penegakan Perda	%	93	113	109	96	100
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Tantribum terhadap Masyarakat dan Badan Usaha	kali	67	99	19	36	50
Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Persentase Deteksi Dini Keamanan Wilayah	%	n/a	n/a	100	100	100
Indeks Risiko Bencana	Indeks	123.74	110.73	119.86	106.07	115.53
Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan di Daerah Rawan Bencana	%	34	50	50	100	100
Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani sesuai Waktu Tanggap	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bakesbangpol, Satpol PP, BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam indeks Risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat Risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan Risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks Risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks Risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi

terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Pencapaian SPM selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam berbagai aspek pelayanan dasar, terutama terkait dengan ketentraman, ketertiban umum, serta penanganan bencana dan kebakaran. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara konsisten tercatat mencapai 100% pada tahun 2021 hingga 2024, dengan hanya sedikit penurunan pada tahun 2020 (99,32%), yang menunjukkan upaya maksimal dalam penegakan hukum Perda dan Perkada. Setiap standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP serta sarana dan prasarana penegakan hukum telah dipenuhi secara penuh, memastikan ketertiban umum yang terjaga dengan baik. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat juga tercatat sempurna, memperkuat kesiapan dalam menanggulangi gangguan ketertiban. Sementara itu, dalam bidang pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pencapaian penuh telah diraih setiap tahun, dengan seluruh indikator pada 100%. Pada tahun 2020 hingga 2024, program pemetaan daerah rawan bencana, sosialisasi tentang bencana, serta pemasangan rambu evakuasi berhasil dilaksanakan tanpa kendala. Pemerintah daerah juga aktif melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana, menjamin respons yang cepat dan tepat terhadap situasi darurat. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran juga menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Dalam hal ini, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 (88,24%), pencapaian kembali mencapai 99,36% pada tahun 2024. Selama periode ini, sistem waktu tanggap dan prosedur operasional penanganan kebakaran terjaga dengan sangat baik. Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan sumber daya manusia lainnya, serta sarana prasarana yang ada, mendukung layanan penyelamatan yang efektif bagi warga yang terdampak kebakaran. Dapat disimpulkan, pencapaian dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan komitmen pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Semua indikator pelayanan dasar yang terkait dengan ketertiban, bencana, dan kebakaran tercatat dengan angka yang sangat tinggi, menunjukkan kinerja optimal dalam melayani dan melindungi masyarakat. Lebih rinci capaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 115
Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	99,32%	100	100%	99,90%	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100	100%	100%	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100	100%	99,38%	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100	100%	100%	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100	88,24%	99,38%	99,36

Sumber: Satpol PP, BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum menunjukkan performa yang sangat baik selama periode 2020–2024. Hampir seluruh jenis pelayanan dasar mencapai target 100%, menunjukkan keandalan pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik, khususnya terkait penegakan hukum Perda, informasi rawan bencana, serta layanan evakuasi korban bencana. Meskipun demikian, pelayanan penyelamatan korban kebakaran sempat menurun pada tahun 2022 sebesar 88,24% dan belum sepenuhnya pulih ke angka maksimal, meskipun sudah mendekati 99,36% pada 2023. Capaian ini didorong oleh kesiapan personel dan sarana pendukung, sistem respons cepat, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta masukan dari masyarakat dan lembaga pengawas yang mendorong perbaikan berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan teknis di lapangan, hambatan geografis, keterbatasan pos damkar, armada dan SDM. Selain itu terdapat indikator

kinerja kunci urusan ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

Tabel 2. 116
Indikator Kinerja Kunci Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	956.393	1.122.165	100,00%	100,00%	100,00%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	956.393	922.578	17,6811%%	18,26%	32,54%
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	34.131	322.900	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	63,20%	100%	85,39%	66,05%	64,53%
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	22	20	13,9Menit	15,48Menit	15,85Menit

Sumber: Satpol PP, BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

f) Sosial

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Sosial berusaha melakukan bermacam-macam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dengan pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial. Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah (Pusat dan Daerah) dan masyarakat yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,–Berikut jumlah pemerlu penyandang kesejahteraan social tahun 2023 :

Tabel 2. 117
Jumlah Pemerlu PPKS Tahun 2020-2024

Status	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	719	196	77	77	0
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	8.358	7.861	5.555	5.553	0
Korban Bencana Alam	941	895	105	76	9.409
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	12	19	0	3	0
Korban Tindak Kekerasan	10	15	2	1	0
Korban Trafficking	0	0	0	0	0
Korban Penyalahgunaan NAPZA	44	43	51	49	0

Status	Jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bekas Warga Binaan LP	370	364	233	231	0
Kelompok Minoritas	121	113	23	20	0
Pemulung	253	257	286	282	7
Pengemis	99	105	68	67	5
Gelandangan	31	55	16	13	15
Tuna Susila	89	76	10	8	0
Penyandang Disabilitas	3.797	3.847	2.508	2.472	231
Lanjut Usia Telantar	13,55	9.525	2.369	1.137	64
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	16	19	4	3	0
Anak Korban Tindak Kekerasan	14	24	3	1	0
Anak Disabilitas	1.109	1.026	668	661	0
Anak Jalanan	109	100	16	13	0
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	23	39	13	12	55
Anak Telantar	3.942	4.841	253	243	1.014
Anak Balita Telantar	968	1.105	60	53	0

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Data jumlah Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan di berbagai kategori, yang dapat mengindikasikan peningkatan efektivitas program kesejahteraan sosial. Beberapa kelompok yang mengalami penurunan drastis antara lain Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, yang turun dari 7.865 orang pada 2019 menjadi 5.553 orang pada 2023, serta Korban Bencana Alam, yang berkurang dari 954 orang pada 2019 menjadi hanya 76 orang pada 2023. Demikian pula, jumlah Bekas Warga Binaan LP mengalami penurunan dari 369 orang pada 2019 menjadi 231 orang pada 2023, dan Lanjut Usia Telantar mengalami pengurangan signifikan dari 11.990 orang pada 2019 menjadi hanya 1.137 orang pada 2023. Selain itu, kategori Anak Telantar juga mengalami penurunan drastis dari 4.862 orang pada 2019 menjadi hanya 243 orang pada 2023, sementara Anak Balita Telantar yang pada 2019 berjumlah 1.120 orang turun menjadi hanya 53 orang pada 2023. Beberapa kategori lain seperti Korban Tindak Kekerasan, Gelandangan, dan Tuna Susila juga mengalami penurunan signifikan, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Namun, ada beberapa kategori yang relatif stabil atau sedikit mengalami fluktuasi, seperti Pemulung, yang hanya mengalami sedikit perubahan dari 265 orang pada 2019 menjadi 282 orang pada 2023, serta Korban Penyalahgunaan NAPZA, yang tetap berada di kisaran 40-an orang selama lima tahun terakhir. Sementara itu, kategori Korban Trafficking tetap nol selama periode tersebut, yang menunjukkan upaya penanggulangan yang efektif dalam aspek ini. Penurunan jumlah PPKS ini mencerminkan keberhasilan program sosial dalam mengurangi kerentanan masyarakat di berbagai sektor. Namun, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk

memastikan bahwa angka-angka tersebut terus menurun dan tidak kembali meningkat di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 118
Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	35,99%	100	100%	100%	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	100%	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100	100	100%	100%	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data yang disajikan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berhasil menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam hal rehabilitasi sosial dasar untuk kelompok rentan di luar panti dari tahun 2020 hingga 2024. Seluruh indikator menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dengan hasil 100% pada tahun 2021 hingga 2024. Dalam kategori rehabilitasi sosial dasar, penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, dan gelandangan serta pengemis semuanya berhasil mendapatkan pelayanan

kebutuhan dasar mereka secara menyeluruh, sebagaimana yang ditargetkan. Pada tahun 2020, terdapat sedikit kekurangan, terutama dalam hal jumlah penyandang disabilitas telantar dan lanjut usia telantar yang belum mendapatkan pelayanan penuh. Namun, mulai tahun 2021, angka pencapaian meningkat drastis, dengan semua kelompok yang dilayani tercatat mencapai 100% pada tahun 2021 hingga 2024. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil memperbaiki dan mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial, memastikan bahwa setiap individu dalam kelompok rentan ini mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Selain itu, sektor perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan pasca bencana menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap pemenuhan kebutuhan korban bencana. Selama lima tahun terakhir, seluruh korban bencana alam dan sosial telah tertangani dengan baik, dengan tingkat pencapaian layanan yang juga 100%. Pencapaian ini mencerminkan respon yang cepat dan efisien dalam memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak bencana, baik dari segi permakanan, sandang, maupun perlindungan sosial lainnya.

Berdasarkan data detail SPM Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan hasil yang sangat baik dalam memberikan pelayanan dasar kepada berbagai kelompok rentan melalui program rehabilitasi sosial. Pencapaian ini bisa dilihat pada hampir seluruh kategori yang dilayani, di mana tingkat pencapaian mencapai 100%, dengan tidak ada individu yang terabaikan dari pelayanan yang telah disediakan. Program rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu 80% penerima layanan dasar dan 20% pelayanan mutu minimal. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting seperti penyediaan permakanan, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual, serta sosial. Secara khusus, untuk kelompok penyandang disabilitas telantar, terdapat 230 orang yang mendapatkan layanan dengan 100% pemenuhan terhadap kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, sandang, dan kesehatan. Hal yang sama juga tercatat pada kelompok anak telantar, di mana sebanyak 1.035 orang menerima layanan penuh, termasuk fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan reunifikasi keluarga. Lanjut usia telantar dan gelandangan/pengemis juga menerima pelayanan yang sangat baik. Sebanyak 85 orang lanjut usia telantar memperoleh layanan yang meliputi kebutuhan dasar dan bimbingan sosial, sedangkan kelompok gelandangan dan pengemis sebanyak 15 orang pun berhasil dilayani dengan sempurna. Semua layanan yang disediakan, mulai dari penyediaan makanan, sandang, hingga akses ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar, tercatat 100% terlaksana. Namun, meskipun hasilnya sangat memuaskan, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan pelayanan untuk kelompok korban bencana. Dalam

hal ini, meskipun angka pencapaian untuk beberapa aspek seperti penyediaan permakanaan dan sandang tercatat tinggi, terdapat kekurangan pada beberapa layanan, seperti penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial. Sebagai contoh, dari 9.433 orang yang harus dilayani dalam hal dukungan psikososial, hanya sebagian kecil yang menerima layanan tersebut, menunjukkan adanya gap dalam penanganan psikososial bagi korban bencana.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa bidang yang masih memerlukan perhatian, pencapaian pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan rehabilitasi sosial dasar untuk kelompok rentan ini menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perlindungan sosial. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki area yang belum tercapai 100%, khususnya dalam penanganan korban bencana yang memerlukan layanan lebih intensif dan mendalam.

Tabel 2. 119
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Sosial Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian indikator kinerja kunci urusan sosial pada tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan seluruh indikator mencapai 100% setiap tahunnya. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti telah dilaksanakan secara menyeluruh. Demikian pula, kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat juga telah terpenuhi sepenuhnya di seluruh tahun pengamatan. Hal ini mencerminkan kinerja layanan sosial yang konsisten dan merata selama periode tersebut

b. Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan terpusat demi keseragaman ketertiban dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada Kabupaten.

Guna menertibkan administrasi kependudukan perlu standarisasi kepemilikan KTP berbasis NIK, Kepemilikan Akta Kelahiran dan kepemilikan penduduk wajib Kartu Keluarga yang memiliki kartu keluarga, yang masuk dalam kewenangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, yang bertugas untuk melakukan pencatatan, pendaftaran, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya terhadap peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian seseorang. Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil:

Tabel 2. 120
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Aplikasi Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	kecamatan	18	18	18	18	18
Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 Penduduk	orang	398	432	280	273	289,78
Rasio Bayi ber-Akte Kelahiran	%	99,55	99,38	99	99,75	99,97
Persentase Penduduk Wajib KK yang Memiliki KK	%	100	100	100	100	99,9
Kepemilikan KTP	%	99,58	99,47	99	99,75	99,6
	orang	882.352	839.382	847.276	863.480	876334
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100
	jiwa	882.352	839.382	847.276	863.480	876.342

Sumber:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data di atas dapat dijabarkan beberapa informasi penting terkait akselerasi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Di tahun 2024, Pembangunan dan Pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK), yakni aplikasi teknologi kependudukan dan pencatatan sipil, telah rampung dibangun dan telah diaplikasikan di semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari total 18 kecamatan, semuanya telah mengaplikasikan SIAK sebagai sarana akselerasi kependudukan dan pencatatan sipil. Artinya saat ini semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan pelayanan kependudukan seperti pengurusan KTP secara langsung. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan KTP, cukup datang ke kantor kecamatan masing-masing. Hal ini menjadikan pelayanan pengurusan KTP menjadi lebih efektif dan efisien, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

Penerapan aplikasi SIAK dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkorelasi terhadap peningkatan rasio penduduk ber-KTP. Mudahnya pelayanan KTP tentu memberikan dorongan bagi masyarakat yang belum ber-KTP untuk mengurus administrasi kependudukannya. Dari data tercatat jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas (wajib memiliki KTP) pada tahun 2019 berjumlah 861.241oran, tahun 2020 meningkat menjadi 882.352 , tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 839.382, pada tahun 2022 meningkat kembali 847.276 dan pada tahun 2023 penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 863.480 orang, sehingga penduduk yang telah memenuhi ketentuan wajib KTP sebesar 99,75%. Kemudahan kependudukan dan pencatatan sipil ini juga mengangkat peningkatan kepemilikan akte kelahiran. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk tahun 2019 sebanyak 384 orang, tahun 2020 meningkat menjadi 398, tahun 2021 meningkat drastis menjadi 432, tahun 2022 menurun sangat drastis menjadi 280 dan di tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 273.

Untuk capaian IKK administrasi kependudukan yang merupakan pelaksanaan kebijakan fungsi perlindungan sosial urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 121					
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Perekaman KTP Elektronik	99,58%	99,47	99,01%	99,75%	99,68%
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	30,40%	37,7	47,75%	60,29%	72,76%
Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	93,13%	95,06	96,26%	98,55%	99,02%
Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	20,83%	30,43	17,39%	23,91%	14,58%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Capaian indikator urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020–2024 menunjukkan tren positif. Perekaman KTP Elektronik stabil di atas 99%, kepemilikan KIA meningkat dari 30,40% menjadi 72,76%, dan akta kelahiran anak naik dari 93,13% menjadi 99,02%. Namun, indikator pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah justru menurun, dari 30,43% (2021) menjadi 14,58% (2024). Hal ini perlu menjadi perhatian karena menunjukkan rendahnya integrasi dan pemanfaatan data untuk mendukung layanan lintas sektor.

Di bawah ini menggambarkan beberapa penerbitan dokumen administrasi

kependudukan terlihat terjadi beberapa penurunan yang mencolok di tahun 2019-2023 seperti penerbitan Akta Perkawinan, dan Akta perceraian, sedangkan pada penerbitan dokumen lainnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan semakin tinggi sehingga dari tahun ke tahun penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan terus berkurang.

Adapun untuk kepemilikan akta di tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Untuk akte yang diterbitkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 122

Jumlah Kepemilikan Akte Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Akta Kelahiran	466.396	484.499	580.680	588.299	291.531
2.	Akta Kematian	12.579	13.391	10.545	10.548	58.435
3.	Akta Perkawinan	385	487	69	61	4.022
4.	Akta Perceraian	90	100	17	11	180
5.	Akta Pengesahan Anak	12	22	27	34	47
6.	Akta Pengangkatan Anak	19	27	29	34	20
7.	Akta Perubahan Nama	238	364	409	487	61
	Total	479.719	498.890	591.777	599.473	354.296

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto, Tahun 2024

Jumlah kepemilikan akta di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan dalam kurun waktu 2020-2024, terutama pada akta kelahiran, yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada 2019, jumlah akta kelahiran tercatat sebanyak 445.152, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 588.299 pada 2023, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada 2022. Peningkatan ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mencatat kelahiran atau adanya program administrasi kependudukan yang lebih masif. Sementara itu, akta kematian juga mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Jumlahnya meningkat dari 9.138 pada 2019 menjadi 13.391 pada 2021, sebelum mengalami penurunan di 2022 dan relatif stagnan di 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pencatatan yang lebih ketat atau berkurangnya jumlah kematian yang dilaporkan. Sebaliknya, akta perkawinan dan akta perceraian mengalami penurunan signifikan. Setelah mengalami peningkatan hingga 2021, jumlah akta perkawinan menurun drastis pada 2022 dan terus berkurang pada 2023. Hal serupa terjadi pada akta perceraian, yang sempat meningkat tetapi kemudian mengalami penurunan tajam pada 2022 dan 2023. Tren ini dapat mengindikasikan adanya perubahan dalam pola pernikahan dan perceraian, baik karena faktor sosial, ekonomi, maupun administrasi pencatatan. Di sisi lain, akta pengesahan anak dan akta pengangkatan anak menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke

tahun, mencerminkan meningkatnya kepedulian terhadap legalitas status anak dalam keluarga. Hal serupa juga terjadi pada akta perubahan nama, yang terus meningkat secara signifikan sejak 2019 hingga mencapai angka tertinggi pada 2023. Meskipun beberapa jenis akta mengalami penurunan, total jumlah kepemilikan akta di Kabupaten Mojokerto terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

b) Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berikut merupakan pembahasan mengenai ketenagakerjaan yang meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan istilah untuk orang yang bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah pencari pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu terserap dengan baik. Pengangguran sering kali menjadi permasalahan perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikut gambaran TPT Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024 :



Gambar 2. 34 Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

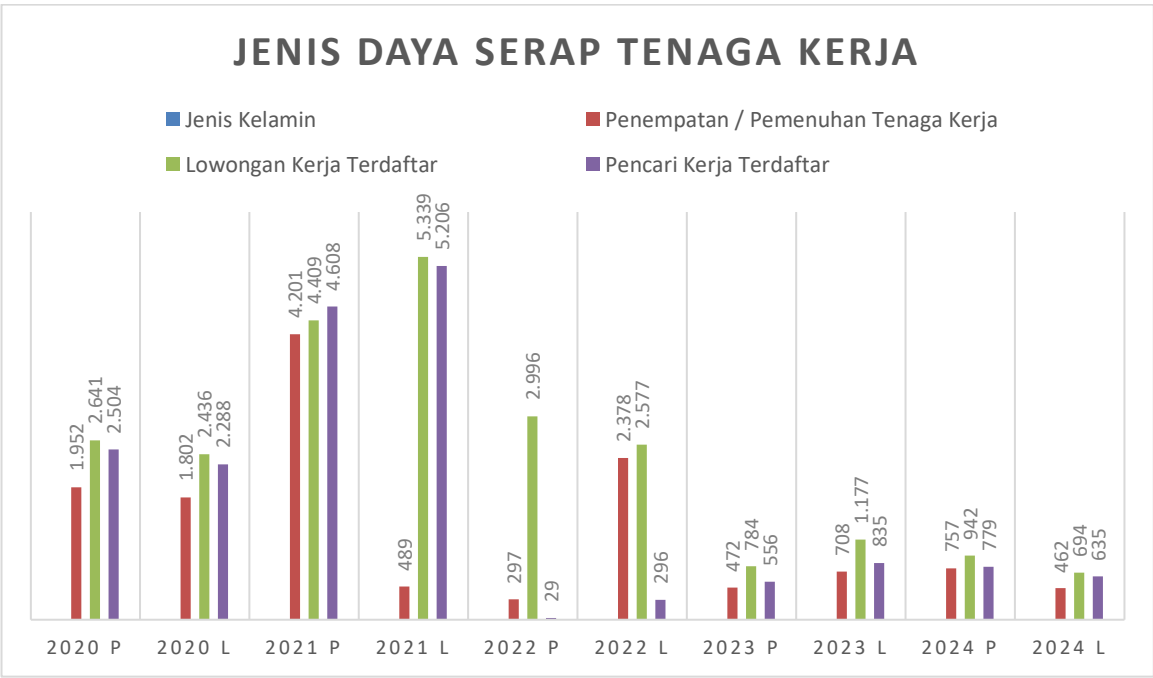
Grafik tersebut menunjukkan tren tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, dan secara nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Secara umum,

terdapat penurunan TPT di ketiga wilayah tersebut selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2020, TPT nasional berada di angka 7,07%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur 5,84% dan Kabupaten Mojokerto 5,75%. Tahun berikutnya, 2021, terjadi penurunan TPT secara nasional menjadi 6,49%, diikuti oleh Jawa Timur 5,74%, dan Kabupaten Mojokerto 5,54%. Tren penurunan terus berlanjut di 2022, dengan nasional 5,86%, Jawa Timur 5,49%, dan Kabupaten Mojokerto 4,83%. Pada tahun 2023, angka pengangguran terus menurun, dengan TPT nasional 5,32%, Jawa Timur 4,88%, dan Kabupaten Mojokerto 4,07%. Hingga tahun 2024, angka TPT mengalami penurunan lebih lanjut, mencapai 4,91% secara nasional, 4,19% di Jawa Timur, dan 3,87% di Kabupaten Mojokerto. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan lapangan kerja, serta efektivitas program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Kabupaten Mojokerto menunjukkan perbaikan signifikan dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur dan nasional, menandakan pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih baik

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut di antaranya adalah penduduk (sumber daya manusia). Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Terkait dengan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto, berikut disajikan grafik rasio daya serap tenaga di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024:



Gambar 2. 35 Jenis Daya Serap Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun Di tahun 2021, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam penempatan tenaga kerja, yaitu naik menjadi 489 laki-laki dan 4.201 perempuan. Lowongan kerja juga meningkat, dengan 5.339 untuk laki-laki dan 4.409 untuk perempuan. Jumlah pencari kerja laki-laki naik menjadi 5.206 orang, sedangkan perempuan menjadi 4.608 orang dibanding tahun sebelumnya.

Namun, pada 2022, terjadi penurunan drastis dalam penempatan tenaga kerja, yaitu turun menjadi hanya 296 laki-laki dan 297 perempuan. Lowongan kerja juga menurun menjadi 2.577 untuk laki-laki dan 2.996 untuk perempuan. Jumlah pencari kerja laki-laki berkurang menjadi 296, sementara perempuan turun drastis menjadi 29 orang.

Pada 2023, meskipun terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dibandingkan tahun 2022, yaitu naik menjadi 708 laki-laki dan 472 perempuan, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Lowongan kerja juga menurun lebih lanjut, menjadi 1.177 untuk laki-laki dan 784 untuk perempuan. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2023 adalah 835 laki-laki dan 556 perempuan. Pada 2024, penempatan tenaga kerja kembali menunjukkan kenaikan menjadi 694 laki-laki dan 757 perempuan. Lowongan kerja tercatat 635 untuk laki-laki dan 779 untuk perempuan, sedangkan jumlah pencari kerja terdaftar adalah 462 laki-laki dan 942 perempuan. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa meskipun ada peningkatan besar di tahun 2021, tren penempatan tenaga kerja mengalami penurunan drastis pada 2022 dan belum sepenuhnya pulih hingga 2023. Baru pada 2024 terlihat tanda-tanda perbaikan, meski masih lebih rendah dibanding capaian tahun 2021. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian antara lowongan kerja yang tersedia dengan keterampilan pencari kerja..

Tabel 2. 123

Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024

NO	Uraian	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024	632.808	646.778	647.752	671810
5	Jumlah Pelatihan yang Dilaksanakan Dinas	5	11	9	7
6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	94,46	95,17	95,33	96,13
7	Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2021 – 2024	70,47	71,34	72,51	73,94
8	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021 – 2024	L=18,555 P=16,478	L=14,002 P=17,219	L=17,469 P=12,750	L= 635 P = 779
9	Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri	932	932	932	932

NO	Uraian	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
11	Perubahan UMK tahun 2021-2024	4.279.787,17	4.354.787,17	4.504.787,17	4,624,787
12	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%
13	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	28,07%	25,24%	26,35%	52,83%
15	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	10,39%	19,96%	30,04%	11,59%
16	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota		82,10%	84,83%	86,21%
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,54	4,83	4,67	3,87
18	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	632.808	646.778	647.752	671.810
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,47	71,34	72,51	73,94
20	Rasio Penduduk yang Bekerja	66,57	67,89	69,13	71,08
21	Rasio Kesempatan Kerja	94,46	95,17	95,33	96,13
25	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	-	192 Orang	144 Orang	111 Orang
27	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja per Tahun	21 Kasus	20 Kasus	21 Kasus	14 Kasus
28	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	9 Kasus	8 Kasus	8 Kasus	5 Kasus
29	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	9.091 Orang	4.811 Orang	1180 Orang	1,414 Orang
30	Besaran Pekerja / Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	23.008 Orang	21.105 Orang	29.213 Orang	28,919 Orang
31	Besaran Pekerja / Buruh yang Menjadi Peserta Program BPJS	23.008 Orang	21.105 Orang	29.213 Orang	28.919 Orang
34	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	251.060	261.070	257.906	
36	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberikan	116 Orang	192 Orang	128 Orang	111 Orang

NO	Uraian	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
	Pelatihan				
37	Jumlah Tenaga Kerja Magang	729 Orang	194 Orang	86 Orang	86 Orang
38	Lowongan Kerja	37 Loker	46 Loker	1.961 Loker	1.636 Loker
39	Pencari Kerja Terdaftar	9.814	5.860	1.391	1.414
40	Pencari Kerja yang Ditempatkan	9.091	5.357	1.180	1.219
41	Jumlah Perselisihan HI	21	20	21	14
42	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan PK, PP, PKB	102 Perusahaan	186 Perusahaan	280 Perush	108 Perusahaan
43	Pertemuan Dewan Pengupahan	7	3	3	3
45	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan LKS Bipartit	6 Perusahaan	9 Perusahaan	7 Perusahaan	9 Perusahaan
46	Verifikasi SP / SB	3	2	4	1
47	Pembinaan HI	3	7	7	4
48	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	50 Perusahaan	30 Perusahaan	40 Perusahaan	40 Perusahaan
49	Pembinaan kesiapan peserta transmigrasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah angkatan kerja terus meningkat dari 632.808 orang pada 2021 menjadi 671.810 orang pada 2024, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang juga meningkat dari 70,47% menjadi 73,94%. Rasio kesempatan kerja mengalami peningkatan, mencapai 96,13% pada 2024, menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk usia kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami tren penurunan signifikan dari 5,54% pada 2021 menjadi 3,87% pada 2024, mengindikasikan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Namun, beberapa indikator menunjukkan tantangan dalam hal pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi mengalami penurunan dari 192 orang pada 2022 menjadi 111 orang pada 2024. Demikian pula, jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan drastis dari 9.091 orang pada 2021 menjadi hanya 1.219 orang pada 2024. Hal ini dapat mengindikasikan kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan keterampilan tenaga kerja. Jumlah lowongan kerja yang tersedia memang meningkat secara signifikan pada 2023 (1.961 lowongan), tetapi sedikit menurun pada 2024 (1.636 lowongan), yang masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi hubungan industrial, jumlah sengketa antara pekerja dan pengusaha menunjukkan tren penurunan, dari 21 kasus pada 2021 menjadi 14 kasus pada 2024, dengan jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama juga menurun. Hal ini dapat mengindikasikan

perbaikan dalam tata kelola hubungan industrial atau adanya mekanisme penyelesaian yang lebih efektif.

Kesimpulannya, meskipun terjadi peningkatan dalam kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran, terdapat tantangan dalam hal pelatihan tenaga kerja dan penempatan pencari kerja yang masih rendah. Upaya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang lebih masif, peningkatan sinergi antara dunia industri dan tenaga kerja, serta optimalisasi program penempatan tenaga kerja menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memastikan ketahanan ekonomi daerah yang lebih baik di masa depan.

Tabel 2. 124
Indikator Kincera Kunci Urusan Tenaga Kerja

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	68,89%	100	42,86%	100,00%	100,00%
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,03%	32	41,67%	26,35%	99,11%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	59109,98	10070461,19	97,7955Ket, D	108,468,172,7616Ket, D	103,716,449,7039Ket,D
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	48,72%	10,39%	19,9571%	30,04%	11,59%
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	90.17%	92,63	91,4164%%	84,83%	86,21%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian indikator kinerja kunci urusan tenaga kerja tahun 2020–2024 menunjukkan hasil yang bervariasi. Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja mencapai 100% dalam tiga dari lima tahun, menunjukkan perencanaan yang mulai konsisten. Persentase tenaga kerja bersertifikat meningkat tajam, terutama pada 2024 (99,11%), setelah sempat fluktuatif. Sementara itu, penempatan tenaga kerja melalui layanan antar kerja cukup tinggi, meskipun cenderung menurun sejak 2022.

Indikator yang perlu menjadi perhatian adalah rendahnya penerapan tata kelola kerja layak oleh perusahaan serta fluktuasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja di beberapa tahun. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pembinaan kepada perusahaan serta peningkatan akses sertifikasi dan pelatihan bagi tenaga kerja secara merata.

c) **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak-hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh regulasi. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan pengarusutamaan gender. Gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak harus digiatkan agar mengurangi jumlah kekerasan perempuan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan serta kualitas hidup perempuan dan anak.

Penanganan Anak Korban Kekerasan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak yang dimaksud dalam hal ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan perlindungan anak tersebut telah dilaksanakan dengan optimal oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat diketahui dari persentase penanganan anak korban kekerasan yang mencapai 100 persen sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal ini dikarenakan jumlah pengaduan dapat teratasi seluruhnya.

Tabel 2. 125
Penanganan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun (persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penanganan Anak Korban Kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 126
Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A Tahun 2019-2024

Jenis Kasus	Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A		
	2019	2020	2021
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	4	16	6

Jenis Kasus	Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A		
	2019	2020	2021
(KDRT)			
Pencabulan	3	1	5
Penganiayaan / Lainnya	3	1	1
Pemeriksaan	-	2	1
Penelantaran	2	2	2
Trafficking	-	-	-
Pornografi	1	-	2
Hak Asuh Anak	-	4	2
Pelecehan seksual	1	4	2
Bullying	1	-	1
Kekerasan lainnya	4	6	2
Total	19	36	24
Jenis Kasus	Jumlah Kasus yang Ditangani UPTD PPA		
	2022	2023	2024
Fisik	14	21	9
Psikis	11	9	9
Seksual	20	22	26
Eksplorasi	-	-	-
Trafficking	3	-	1
Penelantaran	1	4	-
Kekerasan Lainnya	10	3	4
Total	59	59	49

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah kasus yang ditangani oleh P2TP2A dan UPTD PPA Kabupaten Mojokerto pada periode 2019 hingga 2024, terlihat adanya dinamika dalam jumlah dan jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2019 hingga 2021, P2TP2A menangani kasus terbanyak pada tahun 2020 sebanyak 36 kasus, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Jenis kasus yang dominan selama periode ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan lonjakan signifikan pada 2020 sebanyak 16 kasus. Selain itu, kasus hak asuh anak dan pelecehan seksual juga mulai mencuat pada tahun yang sama. Namun, pada 2021 terjadi penurunan total kasus menjadi 24, meskipun kasus pencabulan meningkat menjadi lima kasus. Beberapa jenis kasus seperti *trafficking* dan eksploitasi tidak muncul dalam tiga tahun tersebut, mengindikasikan dua kemungkinan: rendahnya kejadian atau belum optimalnya pelaporan dan penanganan.

Mulai tahun 2022, penanganan kasus dilanjutkan oleh UPTD PPA dengan sistem klasifikasi yang berbeda, yakni berdasarkan bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, dan seksual. Kasus kekerasan seksual terus mendominasi dengan tren meningkat dari 20 kasus pada 2022 menjadi 26 kasus pada 2024. Sementara itu, kekerasan fisik mengalami penurunan signifikan dari 21 kasus pada 2023 menjadi 9 kasus pada 2024. Kasus kekerasan psikis relatif stabil, yaitu 11 kasus (2022), 9 kasus (2023), dan tetap 9 kasus pada 2024. Jenis kekerasan lainnya menunjukkan fluktuasi, sedangkan kasus *trafficking* dan penelantaran hanya muncul sporadis.

Secara keseluruhan, total kasus yang ditangani UPTD PPA mencapai puncaknya pada 2022 dan 2023 dengan 59 kasus, kemudian menurun menjadi 49 kasus pada 2024. Kesimpulannya, kasus kekerasan seksual perlu menjadi perhatian utama karena tidak hanya jumlahnya paling tinggi selama tiga tahun terakhir, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, kasus KDRT yang sempat melonjak pada 2020 dan kekerasan psikis yang stabil tiap tahun juga menandakan perlunya intervensi berkelanjutan. Penguatan sistem perlindungan, edukasi masyarakat, serta pemulihan korban menjadi langkah strategis untuk menekan angka kejadian dan dampak jangka panjang dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penanganan terus berjalan, perlindungan terhadap perempuan dan anak masih membutuhkan penguatan, baik dari segi pencegahan, pengaduan, hingga layanan pemulihan yang komprehensif.

Berikut adalah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin:



Gambar 2. 36 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Sumber: BPS Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data di atas mayoritas keterwakilan masih didominasi oleh laki-laki, sementara jumlah perempuan relatif lebih sedikit di hampir semua partai. Partai dengan jumlah keterwakilan tertinggi adalah PKB dengan 10 anggota, terdiri dari 8 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian, NasDem memiliki 8 anggota, dengan komposisi 6 laki-laki dan 2 perempuan. PAN dan PDIP masing-masing memiliki 6 anggota, namun PAN lebih didominasi laki-laki (3 laki-laki dan 3 perempuan), sedangkan PDIP memiliki 3 laki-laki dan 3 perempuan yang seimbang. Beberapa partai memiliki keterwakilan yang lebih kecil, seperti Demokrat dengan 5 anggota, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Partai Golkar, PPP, PKS, dan Gerindra memiliki jumlah anggota yang sama, yaitu 4 anggota laki-laki tanpa keterwakilan perempuan di PKS dan

Gerindra. Hanura dan PBB tidak memiliki keterwakilan sama sekali dalam data ini. Partai Perindo memiliki jumlah keterwakilan paling sedikit, hanya 1 laki-laki, tanpa keterwakilan perempuan. Dari data di atas, keterwakilan perempuan dalam politik masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meskipun ada beberapa partai seperti PDIP dan PAN yang menunjukkan keseimbangan gender, dominasi laki-laki masih sangat jelas dalam hampir semua partai. Upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik perlu terus didorong agar lebih setara dan representatif. Di mana belum semua partai politik ada perwakilan perempuan di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tabel 2. 127
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	kasus	36	24	59	62	48
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	‰	44,44	25,00	18,64	31	14,58
Cakupan Fasilitas Korban KDRT, Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual melalui P2TP2A	kasus	36	24	59	59	49
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,1	91,24	91,37	91,63	91,48

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian kinerja dalam perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020-2024. Jumlah fasilitas penyelesaian pengaduan terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan mengalami penurunan pada 2021 dengan hanya 24 kasus dibandingkan 36 kasus pada 2020. Namun, pada 2022 dan 2023, jumlahnya meningkat signifikan hingga mencapai 62 kasus sebelum kembali menurun menjadi 48 kasus pada 2024. Tren serupa juga terlihat pada cakupan fasilitas korban KDRT, tindak kekerasan, dan pelecehan seksual melalui P2TP2A, yang mengikuti pola peningkatan pada 2022 dan 2023 sebelum turun kembali pada 2024.

Sementara itu, rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami tren penurunan dari 44,44‰ pada 2020 menjadi 18,64‰ pada 2022, mencerminkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan KDRT. Namun, pada 2023 rasio ini kembali meningkat menjadi 31‰ sebelum menurun tajam ke 14,58‰ pada 2024, menunjukkan adanya fluktuasi dalam tren kasus KDRT di daerah tersebut.

Dari sisi Indeks Pembangunan Gender (IPG), terjadi peningkatan bertahap dari 91,1% pada 2020 menjadi 91,63% pada 2023, menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2024 naik sedikit menjadi 91,48%.

Dari data di atas menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga tren positif dalam perlindungan perempuan dan anak, terutama dengan adanya fluktuasi jumlah kasus dan rasio KDRT. Meskipun peningkatan IPG menunjukkan kemajuan dalam aspek pembangunan gender, keberlanjutan upaya perlindungan dan fasilitasi korban kekerasan tetap menjadi perhatian utama untuk memastikan tren penurunan kasus yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Tabel 2. 128

Indikator Kinerja Kunci Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,30%	1,49	2,84%	39,07%	50,60%
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,00%	0,01	0,02%	100,00%	100,00%
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	3,05	2,19	3,10%	2,65%	2,09%

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam belanja langsung APBD meningkat tajam dari hanya 1,30% pada 2020 menjadi 50,60% pada 2024, yang mencerminkan peningkatan komitmen pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Penanganan anak korban kekerasan juga mengalami kemajuan drastis, dari hampir tidak ada pada 2020–2022 menjadi 100% pada 2023 dan 2024. Sementara itu, rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, sempat berfluktuasi namun berhasil ditekan dari 3,10 pada 2022 menjadi 2,09 pada 2024. Indikator yang perlu terus diperhatikan adalah keberlanjutan penyerapan anggaran ARG agar tetap efektif mendukung program perlindungan, serta konsistensi dalam penanganan kasus kekerasan dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Diperlukan pemantauan yang lebih intensif terhadap tren kekerasan dan penguatan sistem pelaporan serta pelayanan korban, agar capaian positif

d) Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Dengan wilayah Kabupaten Mojokerto yang memiliki pegunungan dengan banyak mata air, sungai-sungai, beberapa cekdam dan embung yang multi guna diharapkan ketahanan pangan dapat dipenuhi.

Kondisi alam tersebut sangat potensial untuk kegiatan perikanan pada umumnya. Kegiatan perikanan budidaya berkembang pesat di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, sedangkan perikanan tangkap terkonsentrasi di perairan umum dan sekitarnya yang meliputi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu, Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, dan Jetis, meskipun di luar itu terdapat juga kegiatan perikanan tangkap di perairan umum lainnya, seperti sungai, cek-dam maupun embung. Perairan Umum Daratan (PUD) yang ada di Kabupaten Mojokerto meliputi 28 waduk seluas 53,53 Ha, 26 sungai dengan luas + 113 Ha, 2 buah Embung dengan luas + 0,170 Ha. Secara geografis maupun administratif, Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah laut untuk dikelola dan dapat mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.

a. Kondisi konsumsi pangan Kabupaten Mojokerto

Mengingat urgensi urusan pangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dan sekaligus bagi ketahanan pangan nasional, maka urusan pangan di Kabupaten Mojokerto masih perlu mendapatkan perhatian. Meskipun pemantauan terhadap stabilitas harga pangan telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi pada dasarnya capaian lain masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan pangan per kapita misalnya. Dari data capaian kinerja urusan pangan di Kabupaten Mojokerto antara 2020 hingga 2024, terdapat hubungan yang erat antara ketersediaan pangan, kecukupan energi, dan ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama per kapita menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan lonjakan pada 2021 dan 2022, namun menurun pada 2024, dipengaruhi oleh faktor produksi atau distribusi pangan. Meskipun demikian, Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat pada 2024, mencerminkan adanya perbaikan kualitas konsumsi pangan yang sejalan dengan keberagaman pangan yang lebih baik, setelah sempat turun pada 2022. Angka Kecukupan Energi (AKE) terus meningkat pesat, mencapai 185,24% pada 2024, menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dalam ketersediaan pangan utama, kecukupan energi masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, penanganan daerah rawan pangan menunjukkan penurunan jumlah desa yang terdampak pada 2022 dan 2023, namun kembali meningkat pada 2024, mengindikasikan adanya tantangan dalam mengatasi masalah rawan pangan. Frekuensi pemantauan harga pangan pokok yang stabil sepanjang tahun membantu menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat, sementara pengembangan lumbung pangan desa yang terus berkembang hingga mencapai 51 unit pada 2024 memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Dapat disimpulkan, meskipun terdapat fluktuasi dalam ketersediaan pangan utama dan jumlah daerah rawan pangan, upaya yang

dilakukan dalam pengembangan lumbung pangan desa, pemantauan harga pangan, serta peningkatan PPH dan AKE, menunjukkan langkah positif dalam menjaga ketahanan pangan dan kecukupan energi masyarakat.

Tabel 2. 129

Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian Kinerja Urusan Pangan						
Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Per Kapita Pangan Utama	kg/th	129,4	303,94	378.15	375.52	192,49
Pola Pangan Harapan (PPH)	%	-	81,8	74.72	78.13	82,72
Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	-	100	124.3	123.6	185,24
Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan	desa	-	19	2	2	18
Frekuensi Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok	kali	48	52	52	52	48
Jumlah Pengembangan Lumbung Pangan Desa	unit	47	48	50	51	51

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari tahun 2019 hingga 2024, ketersediaan kalori di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan signifikan, terutama pada kontribusi tiap kelompok bahan pangan. Pada tahun 2019, padi-padian mendominasi ketersediaan kalori dengan proporsi 57,8%, diikuti oleh buah dan biji berminyak yang memberikan kontribusi sebesar 18%. Daging dan telur juga berperan cukup signifikan, masing-masing dengan kontribusi 9,3% dan 4,2%, meskipun jumlahnya lebih kecil. Sumber karbohidrat tambahan dari makanan berpati berkontribusi 2,3%, sementara sayur-sayuran hanya memberikan kontribusi 2,8%, mencerminkan komponen kalori yang lebih kecil namun tetap penting dalam pola konsumsi. Namun, dari 2021 hingga 2024, terjadi penurunan signifikan dalam ketersediaan kalori dari beberapa bahan pangan. Padi-padian tetap menjadi sumber kalori utama meskipun proporsinya turun menjadi 43,02% pada 2023 dan 31,31% pada 2024, menunjukkan penurunan yang cukup besar dalam jumlah yang tersedia. Makanan berpati dan gula mengalami penurunan yang signifikan, dengan kontribusi hampir tidak ada pada 2024. Buah dan biji berminyak yang sebelumnya memberi kontribusi besar pada 2019, turun drastis pada 2021, namun kembali meningkat pada 2022 hingga 2024, mencerminkan fluktuasi dalam ketersediaan bahan pangan ini. Sayur-sayuran juga mengalami fluktuasi, dengan kontribusi mencapai 7,7% pada 2021, namun kembali turun menjadi 2,4% pada 2022 dan meningkat lagi menjadi 10,79% pada 2024. Daging dan telur mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2022, tetapi kembali meningkat pada 2024, dengan daging memberikan kontribusi paling besar pada 2024 sebesar 14,4%. Ikan dan susu memiliki kontribusi yang lebih kecil, meskipun ikan meningkat secara signifikan pada 2022. Dapat disimpulkan, meskipun padi-padian tetap menjadi kontributor utama dalam ketersediaan

kalori, terlihat adanya pergeseran dalam konsumsi bahan pangan lain dengan peningkatan pada kelompok daging dan sayur-sayuran di tahun-tahun terakhir. Namun, ketergantungan pada padi-padian tetap tinggi, sementara beberapa kelompok bahan pangan lainnya menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan dan pola konsumsi.

Tabel 2. 130
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pangan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,11%	3,16%	33,76%	56,40%	84,07%

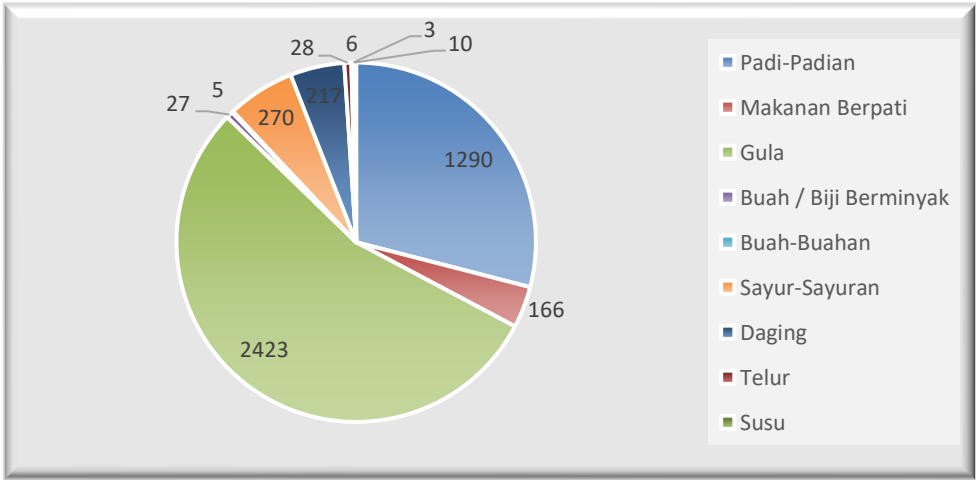
Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 131 Proporsi Ketersediaan Kalori Per Kapita berdasarkan Kelompok Bahan Pangan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024 (%)

Jenis Bahan Makanan	Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan (Kalori)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-Padian	2.667,00	-	233	1822	1762	1290
Makanan Berpati	332	-	56,32	232	218	166
Gula	519	-	2,38	225	224	2423
Buah / Biji Berminyak	208	-	0,66	158	154	27
Buah-Buahan	174	-	15,6	53	52	5
Sayur-Sayuran	56	-	13,07	39	28	270
Daging	151	-	0,25	92	121	217
Telur	61	-	19,14	33	74	28
Susu	72	-	4,61	4	10	6
Ikan	1	-	0,28	28	28	3
Minyak Lemak	487	-	4.341,89	302	297	10
Jumlah	4.728,00	-	4.687,20	2988	2968	4445

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan, Tahun 2024

Gambar 2. 37 Proporsi Ketersediaan Kalori Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (%)



Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto diolah, Tahun 2024

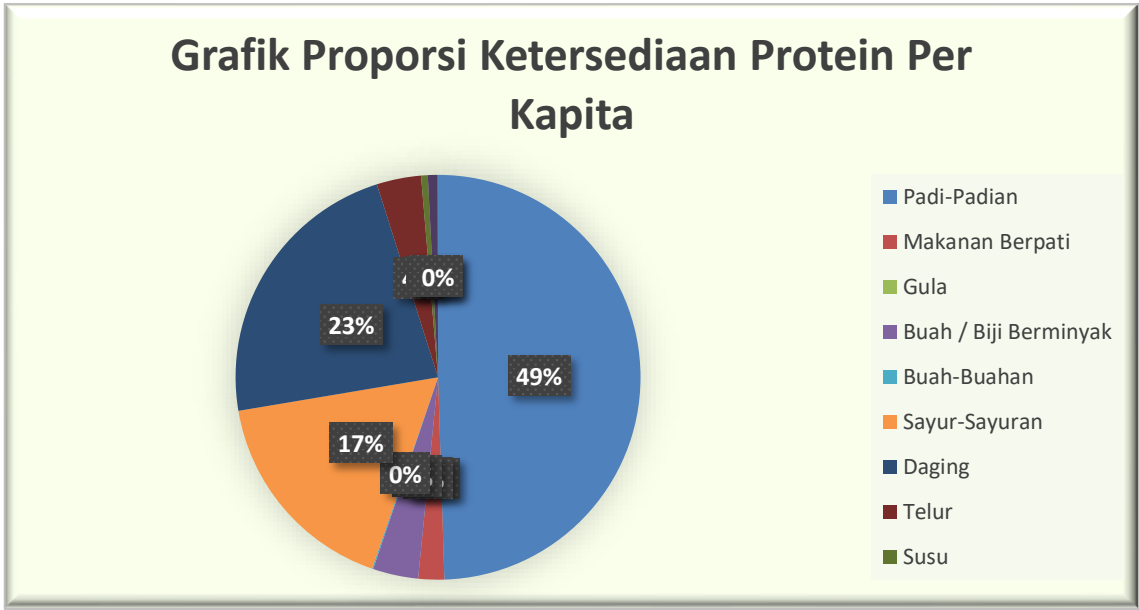
Data ketersediaan protein dari berbagai jenis bahan makanan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan beberapa tren dan pola yang menarik. Pada tahun 2019, total ketersediaan protein mencapai 112,2, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi 92,37, dan terus menurun hingga 63,25 pada tahun 2024. Padi-Padian merupakan penyumbang protein terbesar, meskipun mengalami penurunan dari 64,82 (2019) menjadi 31,31 (2024). Daging menunjukkan peningkatan kontribusi protein, dari 10,45 (2019) menjadi 14,4 (2024), sementara Telur mengalami fluktuasi dengan puncak pada tahun 2021 (15,31) dan penurunan drastis pada tahun 2024 (2,24). Sayur-Sayuran juga menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 (10,79), berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung rendah. Di sisi lain, bahan makanan seperti Gula, Buah-Buahan, dan Minyak Lemak memiliki kontribusi protein yang sangat kecil atau bahkan nol. Dapat disimpulkan bahwa, tren penurunan total ketersediaan protein mengindikasikan perlunya perhatian terhadap diversifikasi sumber protein dan peningkatan produksi bahan makanan kaya protein untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat

Tabel 2. 132 Proporsi ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan

Jenis Bahan Makanan	Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan (PROTEIN)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Padi-Padian	64,82	-	59	44,48	43,02	31,31
Makanan Berpati	2,59	-	5,21	1,79	1,73	1,31
Gula	0,21	-	0	0,01	0,01	0
Buah / Biji Berminyak	20,23	-	0,66	15,64	15,37	2,29
Buah-Buahan	1,8	-	1,8	0,64	0,64	0,06
Sayur-Sayuran	3,19	-	7,12	1,88	1,33	10,79
Daging	10,45	-	0,23	6,1	8,52	14,4
Telur	4,76	-	15,31	2,48	5,74	2,24
Susu	3,78	-	2,42	0,22	0,51	0,34
Ikan	0,2	-	0,62	5,22	5,18	0,49
Minyak Lemak	0,17	-	0	0,02	0,02	0,02
Jumlah	112,2	-	92,37	78,48	82,07	63,25

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Gambar 2. 38 Proporsi Ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (%)



Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 133
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kelompok Bahan Pangan	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
Padi-padian	53,76	0,5	26,88	25	25
Umbi-umbian	7,15	0,5	3,57	2,5	2,5
Pangan Hewani	9,95	2	19,91	19,91	24
Minyak dan Lemak	1,05	0,5	0,53	0,53	5
Buah/biji berminyak	0	0,5	0	0	1
Kacang- kacangan	1,14	2	2,28	2,28	10
Gula	100,94	0,5	50,47	2,5	2,5
Sayuran dan buah	11,25	5	56,23	30	30
Lain-lain	0	0	0	0	0
Jumlah	185,24		159,87	82,72	100

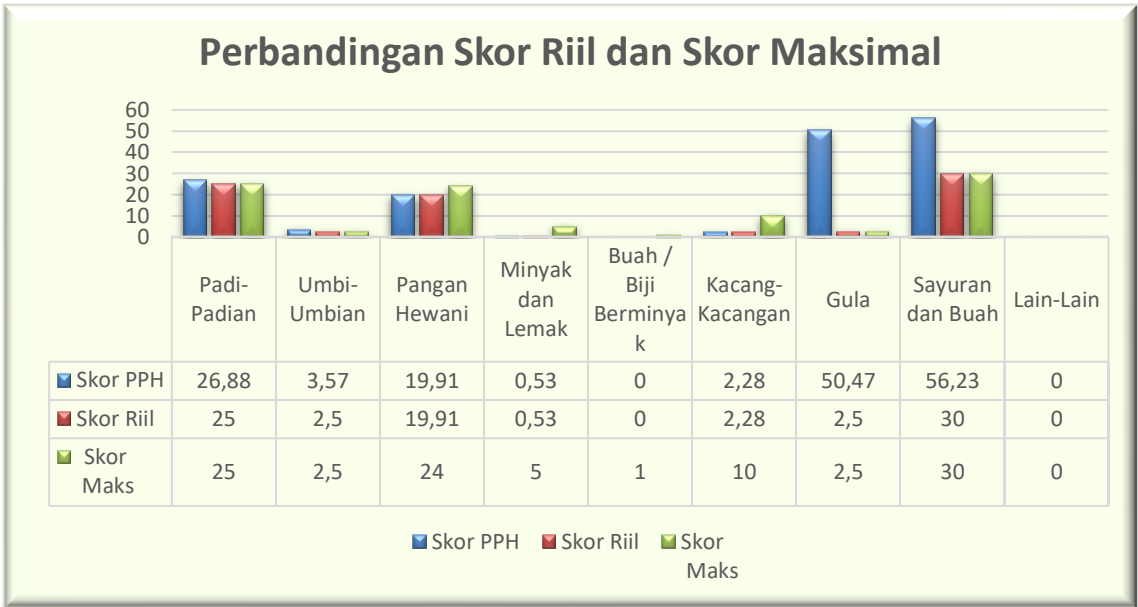
Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

b. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi penyediaan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. PPH ketersediaan berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan berupa jumlah dan komposisi pangan menurut jenis pangan secara agregat. Di samping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan pada tingkat

ketersediaan. Semakin tinggi skor PPH semakin baik mutu gizi dan keragaman pangan pada tingkat ketersediaan pangan.

Setelah dilakukan perhitungan ketersediaan masing-masing kelompok bahan makanan secara rinci telah dihasilkan energi yang dapat dihasilkan setiap jenis bahan makanan baik yang diproduksi oleh Kabupaten Mojokerto maupun yang didatangkan dari daerah lain (import). Rekapitulasi energi yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok komoditi bahan makanan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Perolehan skor PPH yang baru mencapai 82,72, hal ini menunjukkan bahwa keragaman produksi bahan pangan di Kabupaten Mojokerto masih belum maksimal mutu gizinya. Keragaman produksi yang belum optimal dapat dijelaskan dengan grafik di bawah ini.



Gambar 2. 39 Perbandingan Skor PPH dengan Skor Riil dan Skor Maksimal Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

c. Angka Kecukupan Energi (AKE)

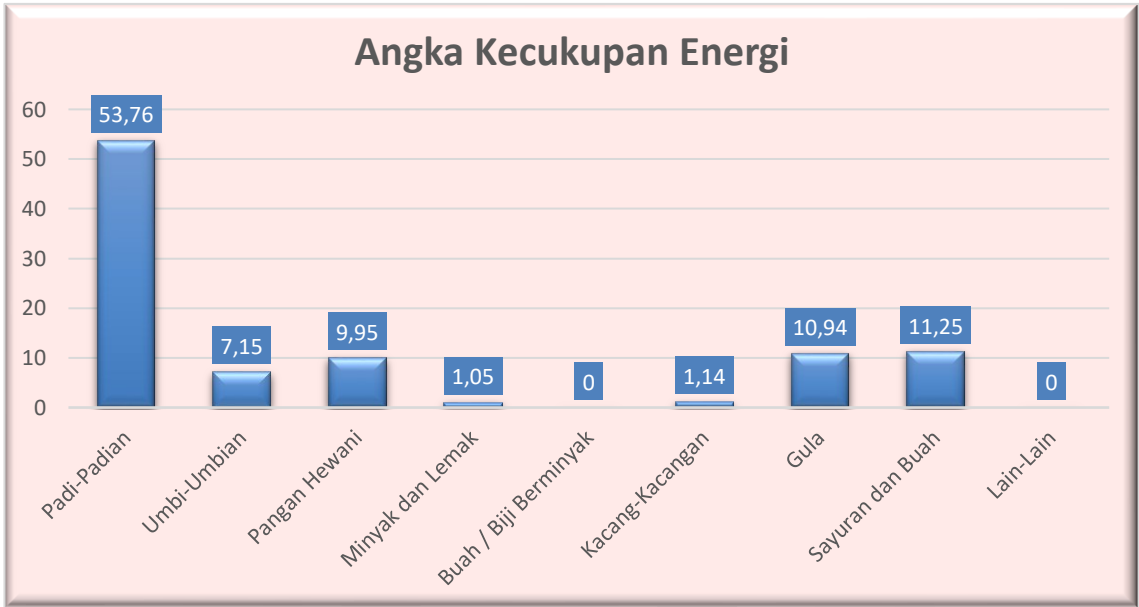
Dari data Angka Kecukupan Energi (AKE) di Kabupaten Mojokerto antara 2019 hingga 2024, terdapat perubahan signifikan dalam pola konsumsi kalori. Pada 2019, padi-padian menyumbang kontribusi terbesar, yaitu 121,2%, namun angka ini menurun tajam pada 2024 menjadi hanya 53,76%, menunjukkan penurunan drastis dalam ketergantungan terhadap karbohidrat utama ini. Umbi-umbian mengalami fluktuasi yang cukup besar, meningkat menjadi 25% pada 2021, namun kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi sumber energi nabati. Pangan hewani menunjukkan lonjakan kontribusi pada 2021 (36,5%), namun turun kembali pada 2022 dan stabil di sekitar 9,95% pada 2024, yang menunjukkan fluktuasi dalam konsumsi protein hewani. Minyak dan lemak berkontribusi lebih kecil, dengan penurunan signifikan dari 22,1% pada 2019

menjadi hanya 1,05% pada 2024, mencerminkan penurunan dalam konsumsi lemak. Buah/biji berminyak tidak lagi berkontribusi setelah 2021, yang menunjukkan hilangnya peran kelompok ini dalam asupan energi masyarakat. Kacang-kacangan juga mengalami penurunan yang cukup besar, dari 8,3% pada 2019 menjadi hanya 1,14% pada 2024. Gula menunjukkan peningkatan signifikan pada 2024 (10,94%) setelah kontribusinya sangat rendah pada 2021. Sementara itu, sayuran dan buah mengalami kontribusi yang relatif kecil namun meningkat pada 2024 (11,25%), yang mengindikasikan sedikit perubahan dalam pola makan yang lebih sehat di Kabupaten Mojokerto. Dari data di atas, meskipun padi-padian tetap menjadi sumber utama energi, ada pergeseran besar dalam sumber energi lainnya, dengan penurunan pada beberapa bahan pangan utama dan lonjakan pada konsumsi gula.

Tabel 2. 134
Angka Kecukupan Energi Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024

Jenis Bahan Makanan	Angka Kecukupan Energi					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	% AKE	% AKE	% AKE	% AKE	% AKE	% AKE
Padi-Padian	121,2	-	89,3	75,9	73,4	53,76
Umbi-Umbian	15,6	-	25	9,7	9,3	7,15
Pangan Hewani	10,9	-	36,5	6,1	9,1	9,95
Minyak dan Lemak	22,1	-	12,9	13	13	1,05
Buah / Biji Berminyak	1,1	-	-	0	0	0
Kacang-Kacangan	8,3	-	12,5	6,7	6,5	1,14
Gula	23,6	-	0,4	9,4	9,3	10,94
Sayuran dan Buah	10,3	-	6,7	3,5	3	11,25
Lain-Lain		-	0,7	0	0	0
Jumlah	213,1	-	184	124,3	123,6	185,24

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2024



Gambar 2. 40 Angka Kecukupan Energi (AKE) Berdasarkan Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2024 (%)

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto diolah, Tahun 2024

Tabel 2. 135
Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2024

Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Mojokerto					
2023			2024		
Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (ton)	(+ / -)	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (ton)	(+ / -)
334,788	112,191	222,597	221.361	126.877	94.484

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Dari data yang menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan beras di Kabupaten Mojokerto dari 2023 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi dalam pemenuhan kebutuhan beras. Pada tahun 2023, ketersediaan beras (334.788 ton) jauh lebih tinggi daripada kebutuhan beras (112,191 ton), dengan surplus yang sangat besar yaitu 222.587 ton. Namun, pada 2024, terjadi penurunan yang signifikan dalam ketersediaan beras (221,361 ton), sedangkan untuk kebutuhan beras mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (126,877 ton), menghasilkan defisit sebesar 94,484 ton. Dari data diatas, menunjukkan peningkatan kebutuhan yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan sumber daya beras di masa depan.

d. Penyediaan dan Keamanan Pangan

Selain memastikan kualitas pangan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berkomitmen pada ketersediaan dan keamanan pangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan aksi dalam bentuk pengawasan ketersediaan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan. Dalam hal distribusi pangan, selama 2019 pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan pemantauan dan analisa harga pokok. Kegiatan ini penting untuk menjamin lancarnya distribusi dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan di pasar. Selain itu, pemantauan ini juga untuk memastikan tidak adanya praktik-praktik pasar yang merugikan dan berdampak buruk pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengatasi kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan penanganan di 5 desa yang terindikasi memiliki masalah keamanan pangan. Penanganan tersebut penting untuk memastikan ketersediaan pangan di desa rawan pangan terutama di musim-musim rawan pangan. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pangan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melakukan pendampingan dan edukasi melalui program Desa Mandiri Pangan. Meskipun capaiannya masih kurang dari target, yakni lima desa, kegiatan ini telah dilaksanakan di empat desa. Hal ini berarti embrio munculnya desa mandiri pangan sudah terbentuk dan tinggal melakukan evaluasi dan memperbaiki, serta menduplikasikannya untuk desa-desa lainnya sehingga pengetahuan tentang kesadaran akan kemandirian pangan bisa disebarluaskan dan

diurusutamakan.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melaksanakan berbagai alternatif yang dapat dikembangkan bersama dengan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan daerah. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan pekarangan sebagai lahan produktif penghasil pangan. Pekarangan non-produktif ini kemudian diubah menjadi lahan produktif sederhana untuk menambah produksi pangan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Program ini merupakan satu dorongan kepada masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan lahan tak produktifnya menjadi salah satu sarana penghasil pangan. Selain itu program ini juga menjadi sarana kampanye kesadaran mandiri pangan bagi setiap masyarakat Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pemanfaatan pekarangan ini dilaksanakan di 18 titik di Kabupaten Mojokerto. Jumlah tersebut melampaui target sebelumnya yang mematok 10 titik.

e) Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini karena permasalahan lingkungan hidup timbul seiring dengan kemajuan segala bidang, termasuk kemajuan dunia usaha baik usaha rumah tangga, industri, pertambangan, pertanian dan perumahan, sehingga mutlak memerlukan kesadaran dan partisipasi dari segala pihak. Saat ini dirasakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Problematika terkait lingkungan hidup semakin kompleks terkait dengan gaya hidup masyarakat modern. Permasalahan lingkungan hidup harus mampu diselesaikan secara sistematis dan cepat, permasalahan lingkungan hidup dapat berakibat fatal seperti bencana alam jika tidak ditangani dengan serius. Salah satu hal yang menjadi problematika lingkungan hidup adalah urusan pengelolaan sampah upaya peningkatan layanan pengelolaan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup terus dilakukan. Sejak keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, target pengelolaan sampah di Indonesia ada 2 (dua) yaitu:

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;
2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah. Menindaklanjuti perintah Peraturan Presiden tersebut, Kabupaten

Mojokerto telah menerbitkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 Perbup tersebut memuat besaran target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana yang telah diamanatkan Perpres. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Mojokerto dalam menangani sampah, pada tahun 2018 masterplan pengelolaan sampah Kabupaten Mojokerto telah selesai disusun sebagai arahan untuk mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto dimulai dari sumber sampah baik itu dari permukiman, perkantoran maupun fasilitas umum, Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) dan/atau TPS 3R dan akhirnya menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini Kabupaten Mojokerto memiliki 1 (satu) TPA yang terletak di Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari yang saat ini memiliki luas sebesar 4 (empat) Ha setelah pada tahun 2017 diperluas sekitar 2,5 Ha. Konsep pengelolaan sampah yang digunakan adalah konsep 3R yaitu upaya pengurangan sampah, penggunaan kembali dan pendaur ulangan sampah.

1. Pemilahan/Pewadahan

Kegiatan pewadahan mempunyai tujuan :

- untuk mengisolasi sampah dalam suatu wadah yang ditentukan agar tidak berserakan
- untuk mempermudah proses penanganan selanjutnya yaitu pengumpulan.

Pewadahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a. Wadah sampah komunal yang dimiliki oleh beberapa sumber. Pewadahan dengan menggunakan tas kresek dan di bawah ke tempat pengumpulan terdekat
- b. Wadah sampah individual yang dimiliki oleh satu sumber. Melakukan pewadahan dengan menggunakan tas kresek atau bin milik perorangan dan di letakkan di depan rumah. Kegiatan pewadahan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di jalan yang dilewati truk sampah
- c. Pemilahan sampah dilakukan untuk memilah sampah menurut jenisnya sehingga mendukung kegiatan / proses penanganan selanjutnya. Pemilahan sampah di sumber sampah di Kabupaten Mojokerto sebagian sudah dilakukan. Pemilahan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan bank sampah. hasil dari bank swasta dijual ke pengepul atau ke BSI (bank sampah induk). Kegiatan pemilahan juga dilakukan di sekolah ADIWiyata di Kabupaten Mojokerto. Di seluruh Kabupaten Mojokerto saat ini sudah beroperasi 217 bank sampah dengan 1 bank sampah induk.

2. Pengumpulan

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan sampah yang sudah diwadahi oleh sumber agar dapat segera diangkut ke lokasi pengolahan dan/atau

pembuangan.

Sumber timbulan sampah terdapat berbagai jenis, ada tempat sampah terpilah berupa tong bin, keranjang sampah yang berada di rumah tangga dan tempat sampah dari kegiatan penyapuan jalan serta taman ataupun fasilitas umum. Pengumpulan setempat yang ada di Kabupaten Mojokerto terdiri atas TPS (Tempat Penampungan Sementara).

Sebagian besar pengumpulan sampah yang dilakukan oleh rumah tangga adalah :

a. Pengumpulan Individual Langsung

- Petugas pengumpul mendatangi sumber dengan menggunakan kendaraan pengumpul berukuran besar (*truck* sampah)
- Kendaraan pengumpul menempuh rute sesuai rencana yang dibuat
- Sampah dari setiap sumber dikumpulkan ke dalam kendaraan pengumpul
- Setelah penuh, kendaraan pengumpul akan langsung membawa sampah menuju lokasi pengolahan atau pembuangan akhir

b. Pengumpulan Komunal Tidak Langsung

- Tempat Penampungan Sementara (TPS) diletakkan pada lokasi yang disepakati dengan masyarakat
- Masyarakat membawa sampahnya secara sendiri-sendiri ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sesuai ketentuan jam pengumpulan
- Masyarakat meletakkan sampahnya ke dalam TPS secara benar. Selain TPS biasa, terdapat pula TPS 3R yang didalamnya terdapat kegiatan pemilahan dan pemanfaatan sampah. TPS 3R ini dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat Desa setempat. Saat ini Kabupaten Mojokerto telah membangun 5 (lima) TPS 3R yaitu:
 1. Desa Awang-Awang Kecamatan Mojosari
 2. Desa Pacet Kecamatan Pacet
 3. Desa Petak Kecamatan Pacet
 4. Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari
 5. Desa Tampungrejo Kecamatan Puri

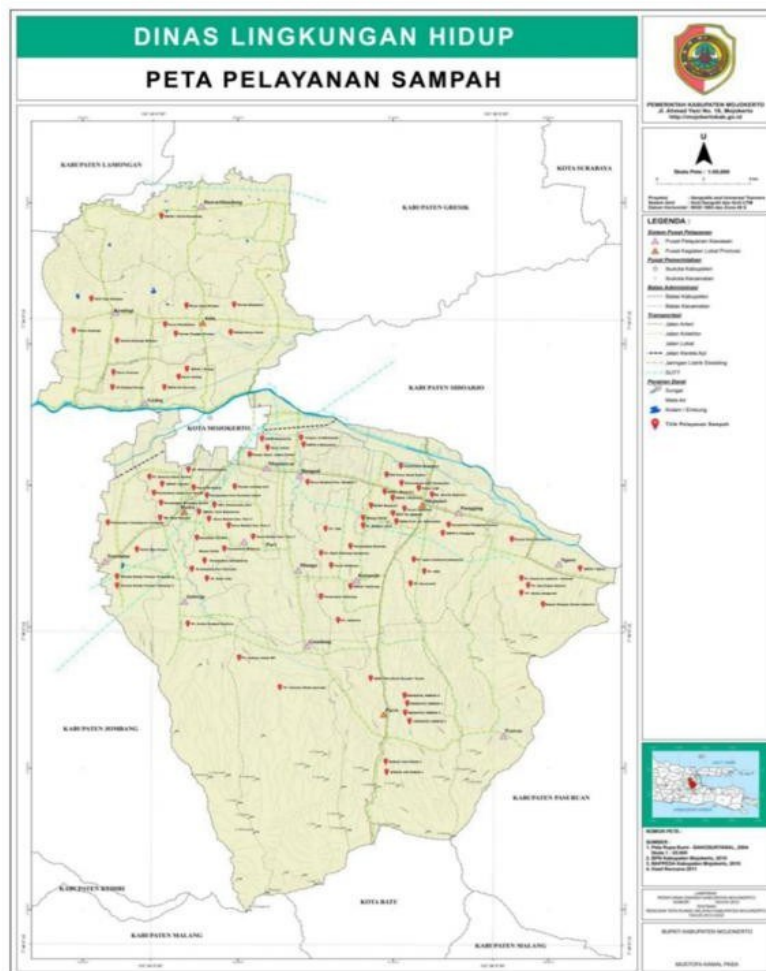
3. Pengangkutan

Kegiatan pengangkutan dilaksanakan untuk membawa sampah yang sudah terkumpul / dipindahkan ke lokasi pengolahan atau pembuangan akhir secara efisien. Sebagian besar masyarakat mengumpulkan sampah secara komunal dan melakukan pengumpulan secara mandiri (ada petugas yang di pekerjakan untuk mengumpulkan sampah dari rumah ke TPS sekitar perumahan). Pengumpulan sampah juga dilakukan dengan menggunakan kendaraan gerobak sampah atau motor 3 roda.

Pengangkutan Sampah oleh Pemkab Mojokerto dilakukan dengan *dump truck* dan *arm*

roll truck. Pengangkutan dengan dump truck dan arm roll truck dilakukan sebagai berikut :

- Pengangkutan dengan dilakukan oleh armada *arm roll truck* untuk melayani pengumpulan di TPS dan *dump truck* untuk pelayanan pengumpulan individual langsung.
- Rute pengangkutan sampah sudah ditetapkan dan sudah ada petugasnya masing-masing
- *Arm roll truck* memulai rute dengan meninggalkan *pool* kendaraan menuju lokasi TPS atau titik pengumpulan
- Setelah memuat sampah kedalam bak *truck*, pengemudi melanjutkan perjalanan ke Tempat Pengolahan atau ke Tempat Pengolahan Akhir, atau ke TPS berikutnya, atau ke sumber berikutnya sesuai rute yang telah ditentukan.
- Setelah menyelesaikan rute pertama dan membawa sampah yang diangkut ke TPA, *Arm roll truck* kembali menuju titik pengangkutan berikutnya sesuai rute yang telah ditentukan apabila tugas yang diberikan 2 shif.
- Setelah menyelesaikan seluruh rute yang ditugaskan, pengemudi membawa *Arm roll truck* kembali ke *pool* kendaraan, mencucinya dan memarkirnya pada tempat yang ditentukan.



Gambar 2. 41 Peta Pelayanan Sampah Kabupaten Mojokerto
Sumber: DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

4. Pemrosesan Akhir

Pembuangan akhir dimaksudkan untuk mengamankan sampah yang berasal dari kota di suatu tempat dengan metode dan cara sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan / masalah bagi lingkungan sekitarnya.

- a. Sistem Operasi yang digunakan adalah *Controlled Landfill* yaitu sistem penimbunan sampah lalu ditutup dengan tanah penutup secara berkala dilengkapi dengan unit pengolah lindi dan gas methan.
- b. Fasilitas TPA:
 - Papan nama
 - Kantor
 - Jalan masuk
 - Garasi alat bera
 - Garasi kendaraan
 - Tempat cuci kendaraan
 - Jembatan timbang
 - Gazebo
 - Taman
 - Sumur pantau
 - Kebun pembibitan
 - Parkir kendaraan
 - Zona aktif
 - Zona non aktif
 - IPAL Lindi
 - Unit Pemanfaatan Gas Methan
 - Ruang Pengomposan
 - Silo Pengomposan
 - Drainase

Tabel 2. 136
Volume Sampah TPA Karang Diyeng

Bulan	Volume Sampah TPA Karang Diyeng				
	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	1.494.660	929.010	1.859.660	2.490.781	1.982,21
Februari	1.602.010	963.960	2.103.820	2.395.449	2.050,47

Bulan	Volume Sampah TPA Karang Diyeng				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maret	1.705.780	1.260.590	2.551.660	2.481.069	1.968,19
April	1.489.830	1.426.720	2.624.110	2.450.899	1.852,70
Mei	1.220.960	1.426.720	2.249.160	2.485.501	2.102,25
Juni	1.325.450	1.009.540	2.369.332	2.400.081	1.891,52
Juli	1.243.240	193.190	1.927.520	2.230.929	2.159,83
Agustus	862.480	150.250	1.564.905	2.057.011	1.991,91
September	980.900	100.710	2.600.945	2.017.085	2.040,30
Oktober	1.339.220	160.090	2.910.355	1.930.478	2.077,32
November	1.383.280	208.640	2.078.734	2.094.157	1.957,30
Desember	1.064.670	119.430	2.202.049	-	2.134,17
Jumlah Sampah kg / tahun	15.712.480	7.948.850	27.042.250	25.033.440	24.208,15

Sumber: DLH Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Karang Diyeng dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada 2020, jumlah sampah yang dikelola mencapai 15.712.480 ton, Namun, pada 2021 terjadi penurunan tajam hingga hanya mencapai 7.948,85 ton, yang merupakan angka terendah dalam periode lima tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat karena pandemi Covid. Namun, tren berubah drastis pada 2022, di mana volume sampah melonjak lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya, mencapai 27.042,25 ton. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan sosial pasca pandemi, serta bertambahnya jumlah penduduk atau perubahan sistem pengelolaan sampah yang lebih masif. Pada 2023, jumlah sampah sedikit menurun menjadi 25.033,44 ton, dan kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 24.208,15.

Secara bulanan, volume sampah mengalami pola kenaikan yang cukup konsisten, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Maret, April, dan Oktober dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan-bulan tersebut terjadi peningkatan konsumsi masyarakat, baik karena faktor perayaan hari besar atau perubahan musim yang mempengaruhi produksi sampah. Berdasarkan data pengelolaan sampah di TPA Karang Diyeng menunjukkan tantangan besar dalam pengendalian volume sampah. Peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan limbah, seperti peningkatan kapasitas daur ulang, optimalisasi pengelolaan sampah organik, serta edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan menerapkan sistem pemilahan sejak dari rumah tangga

a. Kinerja Pengelolaan Sampah Terkait dengan Kebijakan dan Strategi Daerah

Berkaitan dengan Jakstrada, berikut capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 137
Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)(A)	168.323	172.984	164.117
2	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)(B)	44.681	35.088	48.454
3	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)(C)	49.269	39.704	38.623
4	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)(B+C)	93.949	74.792	87.077

Sumber Data : DLH Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dan peluang dalam sistem pengelolaan lingkungan. Timbulan sampah tahunan cenderung fluktuatif, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2023 sebesar 172.984 ton, lalu menurun pada 2024 menjadi 164.117 ton. Pengurangan sampah mengalami peningkatan signifikan, dari 35.088 ton di 2023 menjadi 48.454 ton di 2024, mencerminkan mulai efektifnya program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di tingkat rumah tangga maupun lembaga. Namun, penanganan sampah justru menunjukkan tren menurun, dari 49.269 ton di 2022 menjadi hanya 38.623 ton pada 2024. Hal ini menyebabkan total sampah yang berhasil dikelola pada 2024 (87.077 ton) masih belum menyamai capaian tahun 2022 (93.949 ton), meskipun mengalami perbaikan dibanding capaian terendah tahun 2023.

Beberapa faktor pendorong dari capaian ini antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah, keberadaan bank sampah dan program edukasi lingkungan, serta dukungan regulasi daerah yang mendorong pemilahan sampah dari sumbernya. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang perlu diatasi, seperti keterbatasan armada dan fasilitas pengangkutan, minimnya infrastruktur pengolahan sampah (seperti TPS 3R atau unit kompos), serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan sampah pasca-pengumpulan. Kesenjangan antara pengurangan dan penanganan menunjukkan bahwa pengelolaan hulu sudah mulai menunjukkan hasil, namun perlu diperkuat di hilir agar capaian pengelolaan sampah semakin optimal.

B. Kondisi Sungai Dan Waduk

Kondisi sungai di Kabupaten Mojokerto masih dalam kondisi yang baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji laboratorium yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto secara berkala pada tahun 2024. Adapun kondisi sungai dan hasil uji kualitas laboratoriumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 138
Inventarisasi Sungai Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

NO	Nama Wilayah UPT	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
1	Pandan	Kali Kletak	Trawas	1,74
2	Pandan	Kali Dlundung	Trawas	4,99

NO	Nama Wilayah UPT	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
3	Pandan	Kali Kukupan	Trawas	4,03
4	Pandan	Kali Sumbertowo	Trawas	7,78
5	Pandan	Kali Jurangrejo	Trawas	3,26
6	Mojosari	Kali Janjing	Trawas	14,38
7	Pandan	Kali Jubel	Pacet	12,6
8	Pandan	Kali Made	Pacet	12,41
9	Pandan	Kali Bulu Kidul	Pacet	3,48
10	Pandan	Kali Cumpleng	Pacet	14,98
11	Pandan	Kali Gembolo	Kutorejo	31,63
12	Mojosari	Kali Curahkates	Mojosari	3,23
13	Mojosari	Kali Curahlandak	Ngoro	5,25
14	Mojosari	Kali Curahlandak I	Ngoro	2,45
15	Mojosari	Kali Curahpancang	Ngoro	2,95
16	Mojosari	Kali Curah Jedog	Ngoro	2,23
17	Mojosari	Kali Curahnegoro	Ngoro	2,5
18	Mojosari	Kali Polaman	Ngoro	2,3
19	Mojosari	Kalu Sumberwaru	Ngoro	5,7
20	Mojosari	Kali Curah panggul	Ngoro	4,35
21	Mojosari	Kali Curah Klengkeng	Ngoro	10,12
22	Mojosari	Kali Sumber Pandokan	Pungging	2,5
23	Mojosari	Kali Kanigoro	Pungging	4
24	Mojosari	Kali Sumber Kali Urip	Pungging	3,71
25	Mojosari	Kali Sumber Pasinan	Pungging	9,67
26	Bangsals	Kali Sumber Wonodadi	Mojosari	7,45
27	Bangsals	Kali Sumber Kembar	Mojosari	6,35
28	Bangsals	Kali Sumber Wonosari	Mojosari	2,51
29	Bangsals	Kali Sumber Glogok	Kutorejo	8,91
30	Bangsals	Kali Sumber Ngrayunh	Kutorejo	6,06
31	Bangsals	Kali Tekuk	Bangsals	14,43
32	Pugeras	Kali Banyak	Kutorejo	5,56
33	Pugeras	Kali Judeg	Pacet	12,5
34	Pugeras	Kali Bangsals	Dlanggu	13,13
35	Bangsals	Kali Gayaman	Puri	3,62

NO	Nama Wilayah UPT	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (Km)
36	Brangkal	Kali Kintelan	Jatirejo	13,18
37	Brangkal	Kali Cemporat	Puri	5,5
38	Brangkal	Kali Sadar	Mojosari	23
39	Pugeran	Kali Klorak	Gondang	6,25
40	Pugeran	Kali Galuh	Gondang	13,12
41	Pugeran	Kali Klopo	Gondang	6,7
42	Pugeran	Kali Landean	Gondang	13,7
43	Pugeran	Kali Kromong	Pacet	14,24
44	Pugeran	Kali Pikatan	Pacet	22,32
45	Brangkal	Kali Brangkal	Trowulan	14,89
46	Sumengko	Kali Manting	Jatirejo	13,05
47	Sumengko	Kali Butek	Jatirejo	2,9
48	Sumengko	Kali Coban	Jatirejo	11,4
49	Sumengko	Kali Jurangcetot	Jatirejo	33,63
50	Sumengko	Kali Sumber Winong	Jatirejo	15
51	Gedeg	Kali Asin	Jetis	5,1
52	Gedeg	Kali Kwangen	Ngusikan	7,2
53	Gedeg	Kali Marmoyo	Kemlagi	20,45
54	Gedeg	Kali Sidoringin	Kemlagi	4,9
55	Gedeg	Kali Gedeg	Gedeg	4
56	Gedeg	Kali Kedungsoro	Gedeg	13,35
57	Gedeg	Kali Wonoayu	Gedeg	10,35
58	Gedeg	Kali Kedungsumur	Gedeg	6,65
59	Gedeg	Kali Brantas	Kab/Kota Mojokerto	19,55
60	Gedeg	Kali Surabaya	Gedeg	7,5
61	Bangsar	Kali Porong	Mojoanyar	28,29

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Tabel 2. 139
Inventarisasi Danau/Embung/Situ/Waduk Kabupaten Mojokerto

No	Nama Danau/Waduk/Embung	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Mojodadi	11	275,000
2	Mojodowo	12.78	319,500
3	Sukomulyo	35	875,000
4	Mojokumpul	1.5	37,500
5	Krikilan	0.8355	20,888
6	Gamping	45.37	1,134,250
7	Kupang	4.5	112,500
8	Pulorejo	15	375,000
9	Cinandang	1	25,000
10	Brayublandong	24.9	622,500
11	Cendoro	5	375,000
12	Simongagrok	1	25,000
13	Talumblandong	25	625,000
14	Pucuk	5	125,000
15	Banyulegi	7.7	192,500
16	Jatirowo	3	75,000

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

C. Kondisi Lahan/Tanah

Kondisi lahan atau kondisi tanah di Kabupaten Mojokerto setelah dilakukan analisa dan evaluasi hasilnya tidak melebihi ambang kritis dan cenderung produktif, karena lahan yang tersedia dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan, badan air dan beberapa ada menjadi non pertanian dan lahan kering. Ini berarti kalau kondisi lahan atau kondisi tanah yang ada di Kabupaten Mojokerto masih dalam batas wajar belum mengalami kerusakan yang signifikan. Adapun data mengenai evaluasi penggunaan tanah/lahan maupun data mengenai luasan tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 140
Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto

Nama Kawasan			Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
				Vege tasi	Area Terba ngun	TanahT erbuka	Badan Air
Kawasan Lindung Terhadap Kawasan	1.	Kawasan Hutan Lindung	4402.7	4402.7	-	-	-

Nama Kawasan			Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
				Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
	2.	Kawasan Bergambut	-	-	-	-	-
	3.	Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	-
Kawasan Perlindungan setempat	1.	Sempadan Pantai	-	-	-	-	-
	2.	Sempadan Sungai	2380	2380	-	-	-
	3.	Kawasan Sekitar Danau			-	-	-
	4.	Ruang Terbuka Hijau			-	-	-
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan cagar Budaya	1.	Kawasan Suaka Alam	-	-	-	-	-
	2.	Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya	-	-	-	-	-
	3.	Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut	11276	11276	-	-	-
	4.	Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	-	-	-	-	-
	5.	Kawasan Pantai Berhutan Bakau	-	-	-	-	-
	6.	Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	-	-	-	-	-
	7.	Taman Hutan Raya	10181	10181	-	-	-
	8.	Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	-	-	-	-	-
	9.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 141
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status di Kabupaten Mojokerto

No.	Fungsi	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	4.062,9
2.	Hutan Lindung	4.402,7
3.	Taman Nasional	0
4.	Taman Wisata Alam	0
5.	Taman Buru	0
6.	Cagar Alam	0
7.	Suaka Margasatwa	11.276
8.	Taman Hutan Rakyat	10.181
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	4.062,9

No.	Fungsi	Luas (Ha)
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0
3.	Hutan Kota	0
4.	Taman Hutan Rakyat	10.181
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	0

Sumber : Perum Perhutani KPH Mojokerto Tahun 2023

Tabel 2. 142
Luas Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Mojokerto

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	-
2.	Industri	-
3.	Perkebunan	445,36
4.	Pertambangan	-
5.	Sawah	14.160,40
6.	Hutan	-
7.	Padang rumput & semak-semak	-
8.	Rawa/Waduk	-
9.	Lahan kritis	-
10.	Lain-lain (Non Pertanian, Lahan Kering, Lahan Hutan & Badan Air)	82.329,89
Total		96.935,65

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Tahun 2024

D. Penyediaan/Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan pada tabel luas lahan menurut fungsi/status kawasan hutan, memang belum ada pemanfaatan ruang di Kabupaten Mojokerto yang dipakai untuk ruang terbuka hijau (RTH). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 143
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto

No	Fungsi	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	4,062.9
2.	Hutan Lindung	4402,7
3.	Taman Nasional	0
4.	Taman Wisata Alam	0
5.	Taman Buru	0
6.	Cagar Alam	0
7.	Suaka Margasatwa	11276
8.	Taman Hutan Rakyat	10181

No	Fungsi	Luas (Ha)
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	4,062.9
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0
3.	Hutan Kota	0
4.	Taman Hutan Rakyat	10181
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	18,08

Sumber : Perum Perhutani KPH Mojokerto, Tahun 2023

E. Sumber Daya Alam

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik.Sumberdaya ada yang dapat berubah (berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang maupun ada pula sumberdaya yang kekal (selalu tetap). Sumberdaya hayati adalah salah satu sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*) yang terdiri atas flora dan fauna. Sumberdaya hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumberdaya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya hayati diantaranya adalah flora dan fauna. Sumberdaya non hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak dapat mengalami kematian. Jenis- jenis sumberdaya non hayati diantaranya adalah bahan mineral, air dan udara. Sumber daya alam Kabupaten Mojokerto sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan, pertanian dan pemanfaatan hutan. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 144
Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mojokerto

No.	Lahan	(Ha)	Skala usaha	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Tambang	-	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
2.	Perkebunan	985.33	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	985.33	-
3.	Pertanian	37653.4	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	37.653,36	-
4.	Pemanfaatan Hutan	10871.8	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	87.49,8	-

No.	Lahan	(Ha)	Skala usaha	Luas (Ha)	Keterangan
			Rakyat	2.122	-

Sumber : Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Mojokerto 2024

F. Kondisi Udara

Kualitas udara berkaitan dengan pemakaian energi, terutama dari sector industri dan transportasi yang sebagian besar masih sangat tergantung kepada bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batubara. Kondisi udara Kabupaten Mojokerto belum mengalami pencemaran. Kondisinya masih dalam batas ambang wajar. Adapun titik pantau dan hasil uji laboratorium mengenai pencemarn dapa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 145
Kualitas Udara Ambien Di Kabupaten Mojokerto 2024

Polutan	Nama Kimia	Keterangan	Konsentrasi (µg/m³)	Status
PM2.5	Fine particles (≤ 2.5 µm)	Partikel halus	15.07	● Sedang
PM10	Coarse particles (≤ 10 µm)	Partikel kasar	23.04	● Baik
O ₃	Ozone	Ozon	26.08.00	● Baik
NO ₂	Nitrogen Dioxide	Nitrogen dioksida	09.03	● Baik
SO ₂	Sulphur Dioxide	Sulfur dioksida	05.06	● Baik
CO	Carbon Monoxide	Karbon monoksida	182.01.00	● Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 146
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk	-	1 : 8,497	1 : 8.497	1 : 8.497	1 : 8.497	1 : 8.497
BOD COD sesuai dengan Baku Mutu	ppm	BOD > 6 COD > 40	BOD > 6 COD > 40	BOD > 6 COD > 40	BOD > 6 COD > 40	BOD > 6 COD > 40
Luas RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan	km2	302,91	302,91	302,91	302,92	302,92
Luas Ruang Terbuka Hijau	km2	969,36	969,36	969,36	969,36	969,36

Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
per Satuan Luas Wilayah ber HPL / HGB						
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan	ha	335,62	335,62	335,62	335,63	335,63
Persentase Luas Cakupan Permukiman yang Dilayani Pengangkutan Sampah (dari luas wilayah Kab. Mojokerto)	%	77,78	83,33	83,33	99	99
Tersedianya TPS dan TPST	unit	79	71	71	71	71
Timbulan Sampah yang Ditangani	kg	15.712.480	17.177.578	22.519.949	22.272.304,00	22.272.304,00
Persentase Cakupan Area Pelayanan	kecamatan	14	15	15	15	15
Penegakan Hukum Lingkungan	%	73	100	100	100	100
Indeks Kualitas Air	Indeks	60	60	61.33	54.71	54.71
Indeks Kualitas Udara	Indeks	88.26	90,18	89.37	71,27	71,27
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	49,2	48,71	48.71	49.26	49.26.00
Limbah cair	%	19,00	19,00	19,00	19,00	19
Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup Kabupaten Mojokerto dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat yang saling berkaitan. Di antara faktor pendorongnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan yang diwujudkan melalui penegakan

hukum, keterbukaan informasi, serta perluasan cakupan layanan persampahan dan pelestarian ruang terbuka hijau. Ketersediaan sistem pemantauan kualitas lingkungan juga mendukung upaya pengendalian kerusakan lingkungan melalui pelaporan yang lebih sistematis dan terukur. Selain itu, partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam kegiatan pelestarian lingkungan turut memperkuat implementasi kebijakan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pengelolaan lingkungan. Kualitas air dan udara yang belum memenuhi baku mutu mengindikasikan adanya pencemaran yang belum tertangani secara optimal. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur seperti jumlah dan kapasitas tempat pengelolaan sampah serta layanan limbah cair yang belum berkembang menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tantangan lainnya mencakup kebutuhan peningkatan rasio fasilitas persampahan terhadap jumlah penduduk, serta upaya inovatif untuk meningkatkan kualitas lahan dan menurunkan beban pencemaran lingkungan secara keseluruhan.

Tabel 2. 147
Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	65,82	69,75	69,92	60,20	64,43
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	17,38%	24,57	48,52%	46,09%	50,41%
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	69,30%	33,16%	73,79%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kinerja urusan lingkungan hidup menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan serius, khususnya pada tahun 2023, berbagai indikator berhasil dipulihkan dan ditingkatkan kembali pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan yang tepat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dapat membawa perbaikan yang nyata terhadap kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto.

f) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memungkinkan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta

penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternative strategi pengelolaan pembangunan yang mewujudkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun kelembagaan dalam segala proses pembangunan.

Tabel 2. 148
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut Kecamatan

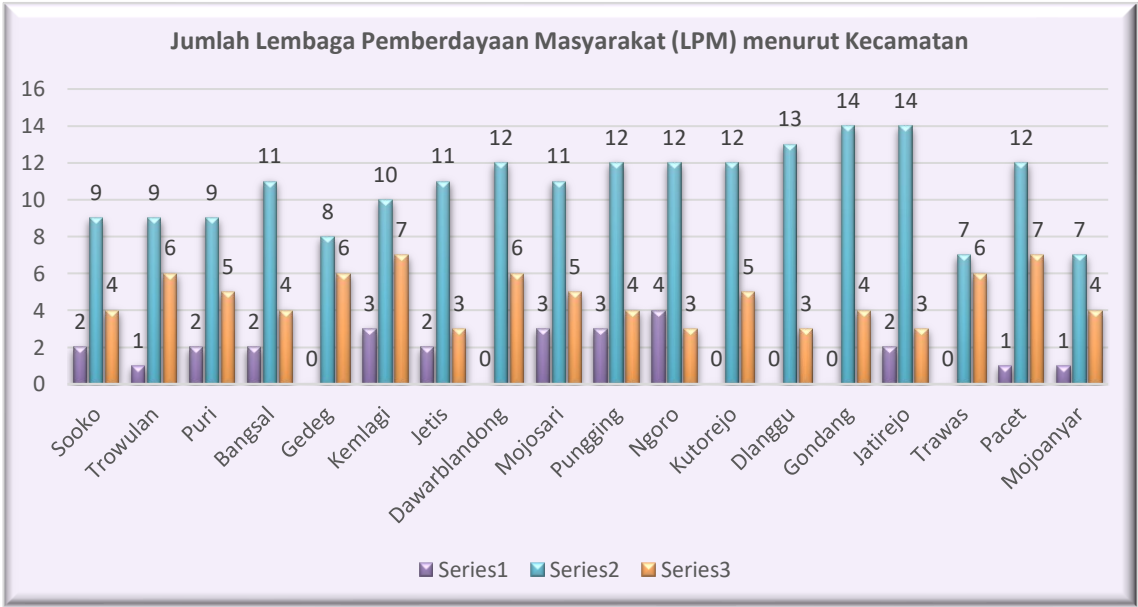
Kecamatan	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut Kecamatan								
	2022			2023			2024		
	Kurang Aktif	Cukup	Aktif	Kurang Aktif	Cukup	Aktif	Kurang Aktif	Cukup	Aktif
		Aktif			Aktif			Aktif	
Jatirejo	1	14	4	3	13	3	2	14	3
Gondang	0	14	4	1	13	4	0	14	4
Pacet	1	14	5	2	13	5	1	12	7
Trawas	0	7	6	0	7	6	0	7	6
Ngoro	4	12	3	3	13	3	4	12	3
Pungging	1	14	4	4	11	4	3	12	4
Kutorejo	0	12	5	2	10	5	0	12	5
Mojosari	1	13	5	2	12	5	3	11	5
Bangsals	2	11	4	4	9	4	2	11	4
Mojoanyar	0	8	4	1	7	4	1	7	4
Dlanggu	1	12	3	1	12	3	0	13	3
Puri	0	13	3	3	11	2	2	9	5
Trowulan	0	8	8	1	7	8	1	9	6
Sooko	0	12	3	2	10	3	2	9	4
Gedeg	1	10	3	2	9	3	0	8	6
Kemlagi	0	13	7	2	11	7	3	10	7
Jetis	0	13	3	2	11	3	2	11	3
Dawarblandong	1	12	5	1	12	5	0	12	6
Jumlah	13	212	79	36	191	77	26	193	85

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut kecamatan di Kabupaten Mojokerto, beberapa kecamatan menunjukkan pola yang menarik terkait tingkat aktivitas LPM mereka. Misalnya, Kecamatan Sooko menunjukkan stabilitas yang baik dengan tidak adanya LPM yang kurang aktif pada tahun 2022, dan mayoritas lembaga berada dalam kategori cukup aktif (12 LPM) dan aktif (3 LPM). Pada tahun 2023 dan 2024, meskipun ada sedikit penurunan pada jumlah LPM yang cukup aktif (menjadi 10 LPM pada 2023 dan 9 LPM pada 2024), jumlah LPM yang aktif tetap bertahan di angka 3 hingga 4. Hal ini menggambarkan upaya pemberdayaan yang cukup konsisten di kecamatan ini. Di sisi lain, Kecamatan Trowulan menunjukkan pola yang sedikit berbeda. Pada tahun 2022, kecamatan ini memiliki LPM yang cukup aktif (8 LPM) dan aktif (8 LPM). Namun, pada tahun 2023, ada sedikit perubahan dengan penurunan jumlah LPM yang cukup aktif (7 LPM) dan peningkatan jumlah LPM yang aktif (9 LPM), sementara pada tahun 2024, LPM yang aktif meningkat menjadi 6.

Perubahan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan kinerja LPM yang ada, meskipun dengan tantangan dalam mempertahankan jumlah lembaga yang aktif. Kecamatan Bangsal dan Pungging juga menunjukkan dinamika yang menarik. Keduanya memiliki LPM yang cukup aktif dan aktif pada tahun 2022, tetapi mengalami variasi dalam distribusi kategori di tahun-tahun berikutnya. Sebagai contoh, Kecamatan Bangsal pada tahun 2023 mencatatkan 4 LPM kurang aktif, tetapi jumlah yang cukup aktif tetap stabil dengan 9 LPM, dan jumlah aktif sedikit berkurang menjadi 4 LPM. Hal yang serupa terjadi di Pungging, yang menunjukkan jumlah LPM yang cukup aktif tetap dominan pada tahun 2023 (11 LPM), dengan sedikit penurunan pada tahun 2024.

Berdasarkan data, meskipun ada variasi antar kecamatan, banyak kecamatan yang menunjukkan upaya positif dalam pemberdayaan masyarakat dengan mempertahankan atau bahkan meningkatkan jumlah LPM yang aktif dan cukup aktif.



Gambar 2. 42 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Tahun 2024
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto antara tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek pemberdayaan, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dan pengembangan lembaga. Indeks Desa Membangun terus meningkat dari 0,7144% di 2020 menjadi 0,8492% pada 2024, mencerminkan peningkatan kualitas desa. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi juga mengalami lonjakan yang signifikan pada 2024, mencapai 1.890 lembaga, dibandingkan dengan 627 lembaga di tahun 2020. Frekuensi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan stabil, meski sedikit berkurang pada 2024. Program pemberdayaan PKK dan posyandu terus berjalan dengan baik, menunjukkan 100% keberlanjutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga meningkat, mencapai 100% pada 2022 hingga 2024.

Meski ada penurunan pada frekuensi peningkatan kapasitas aparatur desa, persentase lembaga pemberdayaan yang berprestasi menunjukkan kecenderungan positif, meningkat dari 20,07% di 2020 menjadi 27,96% di 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Tabel 2. 149
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	%	0,7144	0,7453	0,7663	0, 8247	0, 8492
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	lembaga	304	304	304	304	304
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Difasilitasi	lembaga	627	627	627	841	1.890
Frekuensi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	kali	23	28	28	28	19
Pelatihan bagi Lembaga Ekonomi Perdesaan	kali	6	6	6	6	4
Jumlah Kelompok Binaan PKK	kelompok	28,473	28,473	28,473	28,473	28,473
Persentase Pemberdayaan kepada Masyarakat, Kelompok / Organisasi / Kelembagaan di Desa / Kelurahan	%	100	100	100	100	100
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	100	100
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	97	98,7	100	100	100
Frekuensi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Desa	kali	5	7	7	5	4
Jumlah PKK Aktif	kelompok	323	323	323	323	323
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
Posyandu Aktif	unit	1,277	1,287	1,287	1,287	1,287
Persentase Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	70,6	70,03	72	78	78
Peningkatan Sarana Prasarana Pasar Desa	pasar desa	15	15	15	15	15
Rata-Rata Jumlah Binaan Lembaga Masyarakat	orang	1520	1520	1520	1520	1794
Persentase LPM Berprestasi	%	20,07	20,07	26,25	25,32	27,96
Rata-Rata Jumlah Binaan Kelompok Masyarakat	kelompok	28,473	28,473	28,473	28,473	28,473
Jumlah BUMDes	Lembaga	227	265	284	295	295
Jumlah BUMDesa aktif	Lembaga	156	184	219	244	264
Peningkatan Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan - Manajemen BUMDes	kecamatan	18	18	18	18	18

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi perdesaan	kecamatan	18	18	18	18	18
Peningkatan Kapasitas dan Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	desa	299	299	299	299	299
Peningkatan Pemanfaatan SDA dan TTG	kecamatan	18	18	18	18	18

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto pada periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek, meskipun ada stagnasi dalam beberapa indikator. Indeks Desa Membangun mengalami peningkatan yang konsisten dari 0,7144 pada tahun 2020 menjadi 0,8492 pada tahun 2024, mencerminkan kemajuan dalam pembangunan desa. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi meningkat drastis dari 627 lembaga pada tahun 2020-2022 menjadi 1.890 lembaga pada tahun 2024, yang menunjukkan perhatian besar terhadap penguatan kelembagaan desa. Namun, frekuensi pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan mengalami penurunan dari 28 kali pada tahun 2021-2023 menjadi 19 kali pada tahun 2024, serta pelatihan bagi lembaga ekonomi perdesaan menurun dari 6 kali pada 2020-2023 menjadi 4 kali pada tahun 2024. Selain itu, jumlah BUMDes meningkat dari 227 pada tahun 2020 menjadi 295 pada tahun 2023-2024, dengan BUMDes aktif yang juga mengalami peningkatan dari 156 pada 2020 menjadi 264 pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan dalam pengembangan ekonomi desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mencapai 100% sejak tahun 2022, menandakan tingkat keterlibatan masyarakat yang optimal. Rata-rata jumlah binaan lembaga masyarakat meningkat dari 1.520 orang pada 2020-2023 menjadi 1.794 orang pada 2024, sementara persentase LPM berprestasi juga mengalami kenaikan dari 20,07% pada 2020 menjadi 27,96% pada 2024. Di sisi lain, jumlah kelompok binaan PKK, PKK aktif, serta peningkatan kapasitas dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa stagnan selama lima tahun, yang menunjukkan perlunya inovasi dalam program pemberdayaan. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kelembagaan desa, serta memperkuat ekonomi perdesaan di Kabupaten Mojokerto

Tabel 2. 150
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	0%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	13,50%	37,42	38,24%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

Persentase pengentasan desa tertinggal meningkat secara signifikan dari 0% pada 2020 dan 2021 menjadi 100% sejak 2022, dan berhasil dipertahankan hingga 2024. Hal ini menandakan keberhasilan program percepatan pembangunan desa dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertinggal.

Selain itu, persentase peningkatan status desa mandiri juga menunjukkan kemajuan pesat, dari 13,50% pada 2020 meningkat menjadi 100% pada 2023 dan 2024. Kenaikan ini menggambarkan keberhasilan dalam mendorong desa untuk mencapai kemandirian melalui penguatan kapasitas lokal, pengelolaan sumber daya, serta partisipasi aktif masyarakat.

Dari data diatas menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan desa berhasil meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian desa secara signifikan, yang menjadi fondasi penting untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Tabel 2. 151
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk

Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2	2	1,95	1.94	1,95
Cakupan Perkawinan Pertama Penduduk Wanita Usia di Bawah 20 Tahun	%	17,16	17,76	12,81	13,68	11,21
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Tidak Ingin Anak Tetapi Tidak ber-KB (Unmet Need)	%	7,64	7,61	7,24	7,14	6,99
Cakupan Keaktifan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	%	97,21	98,32	96,16	97,40	99,74
Jumlah Peserta KB Aktif	KK	197.565	199.545	183.388	184.695	180.682
Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	Orang	2	2	2	2	2
Cakupan Keaktifan Anggota Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	93,75	86,61	88,70	94,16	99,66
Cakupan Keaktifan Anggota Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	%	93,42	93,73	88,99	95,93	99,42

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Mojokerto menunjukkan perjalanan yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikator utama, Total Fertility Rate (TFR), menunjukkan kestabilan di angka 2 dari tahun 2020 hingga 2022, sebelum akhirnya menurun sedikit menjadi 1,94 pada tahun 2023 dan 2024. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah anak yang dimiliki seorang perempuan sepanjang

hidupnya mulai berkurang, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sementara itu, angka perkawinan pertama bagi perempuan di bawah usia 20 tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2019 mencatat 13,93%, lalu melonjak tajam menjadi 24,42% pada 2020. Meskipun sempat turun pada 2021 dan naik lagi di 2022, pada 2023 dan 2024 trennya kembali menurun hingga mencapai 11,21%. Penurunan ini bisa menjadi sinyal positif bahwa kesadaran akan pentingnya usia pernikahan ideal semakin meningkat, mungkin karena edukasi dan sosialisasi yang semakin gencar dilakukan.

Di sisi lain, masih ada tantangan dalam cakupan pasangan usia subur yang tidak ingin memiliki anak tetapi tidak ber-KB (unmet need). Persentasenya terus meningkat dari 6,84% di tahun 2019 menjadi 19,67% pada 2022, sebelum akhirnya sedikit menurun ke angka 15,77% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran untuk membatasi jumlah anak, masih ada kendala dalam akses atau pemanfaatan layanan KB yang perlu menjadi perhatian.

Menariknya, keaktifan kelompok bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) juga mengalami pola yang beragam. Anggota aktif BKB dan BKL sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2022, tetapi berhasil meningkat signifikan di tahun 2023 dan hampir mencapai 100% pada 2024. Hal serupa terjadi pada BKR, yang sempat turun ke angka 45,95% pada 2022, tetapi kemudian melonjak hingga 99,66% pada 2024. Lonjakan ini menandakan bahwa program pembinaan keluarga semakin mendapatkan tempat di masyarakat, yang tentunya menjadi kabar baik bagi ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, rata-rata jumlah anak per keluarga cenderung stagnan di angka 3 sejak tahun 2020, menandakan bahwa sebagian besar keluarga masih memilih memiliki lebih dari dua anak. Hal ini mungkin terkait dengan faktor sosial dan budaya yang masih mempengaruhi preferensi jumlah anak dalam rumah tangga.

Perjalanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Mojokerto memperlihatkan bagaimana kebijakan, edukasi, serta akses terhadap layanan sangat memengaruhi pola pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan keluarga. Meskipun ada tantangan, seperti unmet need yang masih cukup tinggi, keberhasilan dalam menurunkan angka perkawinan dini dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program bina keluarga menjadi titik terang yang patut diapresiasi. Ke depan, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan inovatif, angka-angka ini bisa terus membaik demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

Tabel 2. 152
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
TFR (Angka Kelahiran Total)	2	2	1,95	1.94	1,95
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	80,62%	80,67%	80,73%	80,23%	80,06%
Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,64%	7,61%	7,24%	7,15%	6,99%

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Angka Kelahiran Total (TFR) relatif stabil di sekitar 2, dengan penurunan tipis pada 2022 dan 2023 lalu kembali ke 1,95 pada 2024. Persentase pemakaian kontrasepsi modern juga relatif konstan di kisaran 80%, meski sedikit menurun pada 2023 dan 2024. Sementara itu, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi menunjukkan tren penurunan bertahap, dari 7,64% pada 2020 menjadi 6,99% pada 2024, mengindikasikan perbaikan akses dan pemenuhan kebutuhan keluarga berencana. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan kestabilan program KB

Tabel 2. 153
Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan penduduk	0,81	0,14	0,42	0,70	1,11	1,22

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mojokerto selama periode 2019-2024 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,81 tahun 2019 menjadi 0,14 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana/KB di Kabupaten Mojokerto di periode tersebut cukup terkendali. Namun pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,42 persen terhadap jumlah penduduk tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,70kemudian meningkat 1,22 2024. Faktor dari penyebabnya antara lain jumlah kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), serta perpindahan (migrasi) antara satu daerah ke daerah lain. Keluarga berencana merupakan sebuah program pemerintah yang dicanangkan untuk menekan angka kelahiran yang semakin hari semakin tinggi. Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Sementara itu, Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan satu cara atau alat kontrasepsi.

Tabel 2. 154
Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana									
	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%	KK	%
	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
IUD	26.134	13,23	26.534	13,30	22.056	12,03	22.654	12,27	22.392	12,39
MOW	13.911	7,04	14.028	7,03	12.373	6,75	12.599	6,82	12.479	6,91
MOP	410	0,21	407	0,20	364	0,20	361	0,20	333	0,18
Kondom	6.452	3,27	6.852	3,43	5.490	2,99	5.526	2,99	4.897	2,71
Implant	24.346	12,32	25.172	12,61	20.973	11,44	22.462	12,16	21.711	12,02
Suntik	93.725	47,44	93.301	46,76	92.613	50,50	91.777	49,69	90.324	49,99
Pil	32.587	16,49	33.251	16,66	29.519	16,10	29.316	15,87	28.546	15,80
Jumlah PA	197.565		199.545		183.388		184.695		180.682	
Jumlah PUS	245.061		247.373		227.174		230.204		225.684	
% PA / PUS	80,62		80,67		80,73		80,23		80,06	

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Tren jumlah peserta aktif Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Mojokerto selama periode 2020-2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan sedikit menurun dalam beberapa metode kontrasepsi. Jumlah peserta aktif KB (PA) mengalami peningkatan dari 197.565 KK pada 2020 menjadi 199.545 KK pada 2021. Namun, setelah itu mengalami penurunan berturut-turut menjadi 183.388 KK pada 2022, 184.695 KK pada 2023, dan turun lagi menjadi 180.682 KK pada 2024. Hal ini juga sejalan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mengalami sedikit penurunan dari 245.061 pada 2020 menjadi 225.684 pada 2024. Dari segi metode kontrasepsi, metode suntik tetap menjadi pilihan terbanyak dengan jumlah peserta di atas 90.000 setiap tahunnya, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 93.725 peserta pada 2020 menjadi 90.324 peserta pada 2024. Metode pil juga cukup diminati, namun jumlah penggunaanya cenderung menurun dari 32.587 peserta pada 2020 menjadi 28.546 peserta pada 2024. Metode implan juga mengalami penurunan cukup signifikan dari 24.346 peserta pada 2020 menjadi 21.711 peserta pada 2024. Sementara itu, penggunaan IUD dan MOW relatif stabil meskipun mengalami sedikit penurunan dalam jumlah peserta, dengan IUD turun dari 26.134 peserta pada 2020 menjadi 22.392 peserta pada 2024 dan MOW turun dari 13.911 peserta menjadi 12.479 peserta dalam periode yang sama. Menariknya, metode kontrasepsi pria seperti kondom dan MOP mengalami tren penurunan cukup drastis. Pengguna kondom yang pada 2020 mencapai 6.452 peserta menurun menjadi 4.897 peserta pada 2024. Sementara itu, metode MOP (Metode Operasi Pria) yang awalnya

410 peserta pada 2020 turun menjadi hanya 333 peserta pada 2024, menunjukkan masih rendahnya partisipasi pria dalam program KB dibandingkan perempuan.

Dari segi efektivitas program, persentase peserta aktif KB dibandingkan jumlah Pasangan Usia Subur (PA/PUS) cenderung stabil di sekitar angka 80%. Pada 2020, angkanya berada di 80,62% dan mengalami sedikit fluktuasi hingga mencapai 80,05% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah peserta KB mengalami sedikit penurunan, cakupan program KB masih cukup terjaga dengan lebih dari 80% pasangan usia subur tetap berpartisipasi dalam program KB.

Meskipun program KB di Kabupaten Mojokerto masih cukup stabil dengan cakupan PA/PUS yang relatif tinggi, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, terutama dalam mempertahankan jumlah peserta aktif dan meningkatkan partisipasi pria dalam program KB. Penurunan jumlah peserta dalam beberapa metode seperti implan, pil, dan kondom menunjukkan perlunya strategi baru dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai manfaat berbagai metode KB. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan pria dalam program KB guna menciptakan keseimbangan dalam tanggung jawab perencanaan keluarga.

Tabel 2. 155
Keaktifan anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
JATIREJO	12	100,00	12	100,00	12	100,00	11	100,00	11	100,00
GONDANG	18	100,00	18	100,00	18	100,00	18	100,00	18	100,00
PACET	14	100,00	14	14,29	14	14,29	20	100,00	20	100,00
TRAWAS	14	92,86	14	92,86	14	92,86	14	64,29	14	100,00
NGORO	19	63,16	19	63,16	19	89,47	19	100,00	19	100,00
PUNGGING	10	70,00	6	100,00	6	100,00	19	94,74	19	100,00
KUTOREJO	10	100,00	10	100,00	10	100,00	17	100,00	17	100,00
MOJOSARI	10	100,00	10	100,00	10	100,00	20	100,00	20	100,00
DLANGGU	17	100,00	17	100,00	17	100,00	17	100,00	17	100,00
BANGSAL	18	100,00	7	100,00	7	100,00	8	100,00	8	100,00
PURI	17	100,00	17	100,00	17	100,00	18	100,00	18	100,00
TROWULAN	16	68,75	16	68,75	16	68,75	16	50,00	16	100,00
SOOKO	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00	10	100,00
GEDEG	15	100,00	10	30,00	10	30,00	14	85,71	14	92,86
KEMLAGI	20	100,00	20	100,00	20	100,00	20	100,00	20	100,00
JETIS	16	100,00	16	100,00	16	100,00	15	93,33	15	100,00
DAWARBLANDO	12	100,00	12		12		23		23	

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
NG				100,00		100,00		100,00		100,00
MOJOANYAR	8	100,00	11	100,00	11	100,00	12	100,00	12	100,00
Kabupaten Mojokerto	256	93,75	239	86,61	239	88,70	291	94,16	291	99,66

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan penyuluhan di Kabupaten Mojokerto selama tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan yang positif, baik dari sisi jumlah kelompok BKR maupun tingkat partisipasi dalam penyuluhan. Pada tahun 2020, dari total 256 kelompok BKR, sebanyak 240 atau 93,75% melaksanakan penyuluhan. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 86,61% (207 dari 239 kelompok). Meski sempat stagnan di tahun 2022 dengan persentase 88,70%, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 (94,16%) dan mencapai hampir sempurna pada tahun 2024 dengan tingkat partisipasi 99,66% (290 dari 291 kelompok BKR).

Secara wilayah, hampir semua kecamatan menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap pelaksanaan penyuluhan. Kecamatan seperti Jatirejo, Gondang, Kutorejo, Mojosari, Dlanggu, Bangsal, Puri, Sooko, Kemlagi, Jetis, Dawarblandong, dan Mojoanyar mempertahankan partisipasi 100% sepanjang lima tahun. Namun, beberapa kecamatan sempat mengalami kendala, seperti Pacet dan Gedeg, yang hanya mencatatkan 14,29% dan 30% partisipasi pada 2021 dan 2022, meskipun berhasil mencapai 100% pada 2023 dan 2024. Kecamatan Trowulan juga mengalami fluktuasi, dengan partisipasi terendah 50% di tahun 2023, tetapi meningkat tajam menjadi 100% di 2024.

Kesimpulannya, peningkatan capaian kegiatan penyuluhan BKR dalam lima tahun terakhir mencerminkan keberhasilan pembinaan dan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan. Meskipun sempat terjadi penurunan di beberapa wilayah, kondisi tersebut mampu diatasi hingga mencapai partisipasi hampir merata pada tahun 2024. Wilayah yang sempat stagnan seperti Pacet, Gedeg, dan Trowulan perlu tetap menjadi perhatian untuk memastikan keberlanjutan, motivasi kader, dan kualitas penyuluhan agar setara dengan wilayah lain yang telah stabil.

Tabel 2. 156
Cakupan Perkawinan pertama penduduk Wanita Usia di bawah 20 Tahun

Perkawinan pertama penduduk wanita usia di bawah 20 tahun	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah perkawinan di bawah 20	Jumlah perkawinan	Persentase (%)	Jumlah perkawinan di bawah 20	Jumlah perkawinan	Persentase (%)	Jumlah perkawinan di bawah 20	Jumlah perkawinan	Persentase (%)
JATIREJO	61	353	17,28	69	353	19,55	36	299	12,04
GONDANG	48	316	15,19	38	315	12,06	39	332	11,75
PACET	29	456	6,36	18	432	4,17	13	422	3,08

Cakupan Perkawinan pertama penduduk Wanita Usia di bawah 20 Tahun									
Perkawinan pertama penduduk wanita usia di bawah 20 tahun	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah perkawinan di bawah 20	Jumlah perkawinan	Persentase (%)	Jumlah perkawinan di bawah 20	Jumlah perkawinan	Persentase (%)	Jumlah perkawinan di bawah 20	Jumlah perkawinan	Persentase (%)
TRAWAS	26	255	10,20	19	234	8,12	13	234	5,56
NGORO	101	700	14,43	164	642	25,55	77	609	12,64
PUNGGING	54	629	8,59	42	608	6,91	43	546	7,88
KUTOREJO	118	461	25,60	83	463	17,93	77	460	16,74
MOJOSARI	35	587	5,96	76	519	14,64	46	527	8,73
DLANGGU	45	443	10,16	39	384	10,16	40	404	9,90
BANGSAL	46	358	12,85	37	343	10,79	26	248	10,48
PURI	85	530	16,04	52	484	10,74	54	522	10,34
TROWULAN	65	535	12,15	65	449	14,48	42	413	10,17
SOOKO	59	432	13,66	40	377	10,61	44	391	11,25
GEDEG	10	441	2,27	43	579	7,43	34	379	8,97
KEMLAGI	88	513	17,15	64	427	14,99	81	453	17,88
JETIS	62	518	11,97	87	533	16,32	85	485	17,53
DAWARBLANDONG	86	357	24,09	80	256	31,25	41	239	17,15
MOJOANYAR	30	295	10,17	39	316	12,34	24	308	7,79
Kabupaten Mojokerto	1048	8179	12,81	1055	7714	13,68	815	7271	11,21

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Beberapa kecamatan menunjukkan tren penurunan yang signifikan, seperti Ngoro yang pada tahun 2023 mencatat 164 kasus (25,55%), tetapi turun drastis menjadi 77 kasus (12,64%) pada tahun 2024. Dawarblandong juga mengalami penurunan dari 80 kasus (31,25%) pada tahun 2023 menjadi 41 kasus (17,15%) pada tahun 2024. Selain itu, Jatirejo, Mojosari, dan Pacet juga menunjukkan penurunan angka perkawinan dini yang cukup signifikan. Namun, beberapa kecamatan masih mencatat angka yang cukup tinggi, seperti Jetis yang mengalami peningkatan dari 87 kasus (16,32%) pada 2023 menjadi 85 kasus (17,53%) pada 2024, serta Kemlagi yang naik dari 64 kasus (14,99%) menjadi 81 kasus (17,88%).

Tingginya angka perkawinan dini di beberapa kecamatan diduga disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya norma sosial dan budaya yang masih mendukung pernikahan di usia muda, faktor ekonomi yang mendorong keluarga menikahkan anak lebih cepat untuk mengurangi beban finansial, serta tingkat pendidikan yang lebih rendah yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan dini. Meskipun demikian, tren penurunan yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan, yang kemungkinan besar merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah dan organisasi terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Program edukasi mengenai dampak perkawinan dini, peningkatan akses pendidikan, serta dorongan terhadap program keluarga berencana dan perlindungan anak berperan penting dalam menekan angka perkawinan dini. Secara keseluruhan, penurunan angka perkawinan dini dari 14% pada tahun 2023 menjadi 11% pada tahun 2024 merupakan perkembangan positif. Namun, upaya berkelanjutan dalam

pencegahan perkawinan usia muda, khususnya melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan akses pendidikan yang lebih luas, tetap diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini di masa mendatang.

Tabel 2. 157
Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre

Jumlah PIK Remaja yang Aktif									
Jumlah PIK Remaja yang Aktif	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah Kelompok PIK R	Jumlah PIK R yang aktif	Persentase	Jumlah Kelompok PIK R	Jumlah PIK R yang aktif	Persentase	Jumlah Kelompok PIK R	Jumlah PIK R yang aktif	Persentase
JATIREJO	5	4	80,00	5	4	80,00	5	5	100
GONDANG	6	5	83,33	10	10	100,00	11	11	100
PACET	4	4	100,00	4	4	100,00	5	5	100
TRAWAS	5	3	60,00	6	6	100,00	6	6	100
NGORO	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5	100
PUNGGING	5	3	60,00	5	2	40,00	5	5	100
KUTOREJO	5	4	80,00	5	5	100,00	5	5	100
MOJOSARI	2	2	100,00	6	6	100,00	6	6	100
DLANGGU	4	3	75,00	4	4	100,00	4	4	100
BANGSAL	4	3	75,00	4	4	100,00	6	6	100
PURI	4	4	100,00	4	4	100,00	6	6	100
TROWULAN	13	10	76,92	13	13	100,00	13	13	100
SOOKO	5	5	100,00	5	5	100,00	5	5	100
GEDEG	5	5	100,00	6	6	100,00	6	6	100
KEMLAGI	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100
JETIS	4	3	75,00	4	4	100,00	4	4	100
DAWARBLANDONG	14	8	57,14	16	15	93,75	20	20	100
MOJOANYAR	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100
Kabupaten Mojokerto	103	86	83,50	115	110	95,65	125	125	100

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Data perkembangan jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang aktif di Kabupaten Mojokerto dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, dari 103 kelompok PIK Remaja, sebanyak 86 kelompok atau 83,50% tercatat aktif. Angka ini meningkat menjadi 110 dari 115 kelompok (95,65%) pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan 100% kelompok PIK Remaja aktif, yakni 125 dari 125 kelompok. Jika ditinjau per kecamatan, sebagian besar wilayah telah mencapai tingkat keaktifan 100% pada tahun 2024. Kecamatan seperti Pacet, Ngoro, Mojosari, Kutorejo, Dlanggu, Bangsal, Sooko, Gedeg, Kemlagi, Mojoanyar, dan lainnya menunjukkan konsistensi dan peningkatan dalam pembinaan PIK Remaja. Beberapa wilayah seperti Trawas, Pungging, Dawarblandong, dan Jetis yang pada tahun 2022 mencatat tingkat keaktifan di

bawah 80%, berhasil meningkatkan partisipasi hingga maksimal di tahun 2024. Salah satu contoh signifikan adalah Dawarblandong, yang pada 2022 hanya memiliki 57,14% Kesimpulannya, pencapaian tahun 2024 menandai keberhasilan penuh dalam aktivasi kelompok PIK Remaja di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto. Seluruh kecamatan menunjukkan keterlibatan aktif yang mencerminkan keberhasilan program pembinaan genre (generasi berencana). Wilayah yang sempat tertinggal seperti Dawarblandong dan Pungging perlu terus mendapat perhatian, bukan hanya dalam hal jumlah dan keaktifan, tetapi juga kualitas dan kesinambungan program PIK Remaja ke depan.

Tabel 2. 158 PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

Kecamatan	Presentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)								
	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Jumlah PUS	Unmet Need	% Unmet need	Jumlah PUS	Unmet Need	% Unmet need	Jumlah PUS	Unmet Need	% Unmet need
JATIREJO	7.298	649	8,89	7.373	621	8,42	7.233	567	7,84
GONDANG	9.973	1.302	13,06	9.972	1.406	14,10	10.137	1.417	13,98
PACET	13.101	869	6,63	13.217	838	6,34	13.343	825	6,18
TRAWAS	5.682	677	11,91	5.921	504	8,51	6.154	515	8,37
NGORO	17.089	1.498	8,77	17.188	1.193	6,94	17.074	1.121	6,57
PUNGGING	14.425	830	5,75	14.966	1.223	8,17	14.112	1.114	7,89
KUTOREJO	11.548	994	8,61	11.771	882	7,49	13.921	870	6,25
MOJOSARI	15.808	703	4,45	16.100	1.020	6,34	12.696	900	7,09
DLANGGU	12.241	1.054	8,61	12.413	1.037	8,35	12.491	789	6,32
BANGSAL	9.620	973	10,11	9.786	997	10,19	9.717	911	9,38
PURI	16.256	1.136	6,99	15.928	1.178	7,40	15.800	1.162	7,35
TROWULAN	15.627	992	6,35	15.631	1.000	6,40	12.717	1.131	8,89
SOOKO	15.129	1.058	6,99	15.177	966	6,36	14.806	1.018	6,88
GEDEG	16.414	521	3,17	16.576	485	2,93	16.670	408	2,45
KEMLAGI	11.704	1.250	10,68	12.130	1.263	10,41	11.703	1.321	11,29
JETIS	18.044	861	4,77	18.666	837	4,48	19.340	856	4,43
DAWARBLANDONG	8.634	487	5,64	8.661	544	6,28	8.880	348	3,92
MOJOANYAR	8.581	586	6,83	8.728	454	5,20	8.890	503	5,66
Kabupaten Mojokerto	227.174	16.440	7,24	230.204	16.448	7,14	225.684	15.776	6,99

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Tabel 2. 159
Pencapaian Peserta KB Aktif Menggunakan MKEJ

Kecamatan	Pencapaian Peserta KB Aktif Menggunakan MKEJ									
	2023					2024				
	AKD R IUD	Vasekto mi MOP	Tubekto mi MOW	Susuk Implant	Jumlah Total	AKD R IUD	Vasekto mi MOP	Tubekto mi MOW	Susuk Implant	Jumlah Total
JATIREJO	744	1	631	649	2.025	782	2	616	649	2.049
GONDANG	1.677	30	721	1.827	4.255	1.734	30	735	1.951	4.450
PACET	2.002	13	661	2.169	4.845	2.066	12	653	2.241	4.972
TRAWAS	407	3	401	616	1.427	429	3	407	667	1.506
NGORO	1.467	11	1.094	1.316	3.888	1.528	11	1.121	1.352	4.012
PUNGGING	1.166	11	400	872	2.449	1.119	8	398	540	2.065
KUTOREJO	514	6	349	971	1.840	528	5	382	1.121	2.036
MOJOSARI	3.120	15	1.146	1.737	6.018	2.753	15	1.150	1.289	5.207
DLANGGU	1.540	63	1.095	1.436	4.134	1.590	48	1.063	1.576	4.277
BANGSAL	606	11	460	701	1.778	642	6	441	735	1.824
PURI	1.279	21	728	1.979	4.007	1.308	17	740	2.012	4.077
TROWULAN	908	10	775	1.646	3.339	600	11	580	744	1.935
SOOKO	2.017	5	885	918	3.825	1.981	4	846	900	3.731
GEDEG	1.913	22	917	1.716	4.568	1.953	22	926	1.781	4.682
KEMLAGI	1.138	58	884	1.526	3.606	1.021	60	910	1.383	3.374
JETIS	933	62	601	947	2.543	1.049	61	660	1.121	2.891
DAWARBLANDONG	338	10	382	661	1.391	347	8	361	829	1.545
MOJOANYAR	885	9	469	775	2.138	962	10	490	820	2.282
KAB MOJOKERTO	22.654	361	12.599	22.462	58.076	22.392	333	12.479	21.711	56.915

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Berdasarkan data peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Efektif Jangka Panjang (MKEJ) di Kabupaten Mojokerto tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan jumlah akseptor dari 58.076 menjadi 56.915, atau menurun sebanyak 1.161 akseptor. Penurunan ini paling menonjol pada metode implan, yang berkurang sebanyak 751 pengguna. Penurunan juga terjadi pada metode Vasektomi dan Tubektomi meski dalam jumlah kecil, sedangkan AKDR relatif stabil. Di tingkat kecamatan, Mojosari menunjukkan penurunan tajam sebanyak 811 akseptor, diikuti oleh Trowulan yang turun drastis sebesar 1.404 akseptor—penurunan terbesar secara absolut di seluruh kecamatan. Pungging dan Kemlagi juga mengalami penurunan cukup signifikan.

Sebaliknya, beberapa kecamatan menunjukkan tren positif, seperti Gondang, Pacet, Kutorejo, Jetis, dan Mojoanyar, yang berhasil meningkatkan jumlah peserta KB aktif meski dalam kondisi umum yang menurun. Hal ini mengindikasikan adanya keberhasilan dalam pelayanan, edukasi, dan akses program KB di wilayah tersebut.

Kesimpulannya, perhatian dan evaluasi lebih mendalam perlu difokuskan pada kecamatan Trowulan, Mojosari, dan Pungging karena mengalami penurunan signifikan dalam jumlah akseptor MKEJ. Diperlukan identifikasi penyebab penurunan, baik dari sisi layanan, sosialisasi, maupun kendala akses. Sementara itu, kecamatan-kecamatan dengan peningkatan capaian dapat dijadikan referensi praktik baik (*best practices*) untuk direplikasi di wilayah yang mengalami penurunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian peserta KB aktif dapat beragam, mulai dari kesadaran masyarakat akan penggunaan kontrasepsi jangka panjang, ketersediaan layanan kesehatan, hingga faktor sosial dan budaya di setiap wilayah. Peningkatan jumlah peserta di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa program sosialisasi dan aksesibilitas layanan KB masih berjalan dengan baik. Namun, penurunan di beberapa kecamatan menandakan perlunya evaluasi terhadap pendekatan yang digunakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB.

Tabel 2. 160
Kecamatan Peserta KB Aktif Menggunakan Non MKEJ

Kecamatan	Peserta KB Aktif Menggunakan Non MKEJ											
	2022				2023				2024			
	Suntik	Pil	Kondom	Total	Suntik	Pil	Kondom	Total	Suntik	Pil	Kondom	Total
JATIREJO	3.251	729	130	4.110	3.107	719	163	3.989	2.947	762	165	3.874
GONDANG	2.972	953	20	3.945	2.827	944	12	3.783	2.796	956	8	3.760
PACET	4.538	1.301	31	5.870	4.539	1.295	11	5.845	4.528	1.277	14	5.819
TRAWAS	2.552	563	32	3.147	2.676	575	33	3.284	2.751	602	34	3.387
NGORO	6.687	2.857	353	9.897	6.667	2.851	354	9.872	6.545	2.868	363	9.776
PUNGGING	7.774	1.223	164	9.161	7.755	1.232	200	9.187	7.620	1.081	132	8.833
KUTOREJO	5.265	2.364	86	7.715	4.942	2.538	134	7.614	5.422	4.090	205	9.717
MOJOSARI	4.787	2.114	762	7.663	4.483	1.785	637	6.905	3.157	1.251	471	4.879
DLANGGU	4.759	1.058	59	5.876	4.706	1.045	64	5.815	4.712	1.015	64	5.791
BANGSAL	4.706	1.094	419	6.219	4.335	1.230	531	6.096	4.392	1.171	481	6.044
PURI	5.196	2.970	779	8.945	5.036	2.904	794	8.734	5.128	2.790	761	8.679
TROWULAN	6.465	2.690	268	9.423	6.310	2.597	286	9.193	5.324	1.583	89	6.996
SOOKO	6.364	1.518	470	8.352	6.493	1.461	470	8.424	6.445	1.321	378	8.144
GEDEG	5.634	2.375	594	8.603	5.661	2.371	605	8.637	5.777	2.424	635	8.836
KEMLAGI	4.413	1.362	571	6.346	4.792	1.237	438	6.467	5.024	849	242	6.115
JETIS	9.117	2.233	526	11.876	9.300	2.294	554	12.148	9.404	2.321	623	12.348
DAWARBLANDONG	4.651	1.043	109	5.803	4.540	1.159	113	5.812	4.717	1.110	113	5.940
MOJOANYAR	3.482	1.072	117	4.671	3.608	1.079	127	4.814	3.635	1.075	119	4.829
KAB MOJOKERTO	92.613	29.519	5.490	127.622	91.777	29.316	5.526	126.619	90.324	28.546	4.897	123.767

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Secara spasial, kecamatan Jetis merupakan penyumbang tertinggi peserta KB non-MKEJ sepanjang tiga tahun, dengan tren yang terus meningkat dari 11.876 pada 2022 menjadi 12.348 pada 2024. Ngoro, Gedeg, dan Puri juga termasuk dalam kelompok kecamatan dengan jumlah pengguna non-MKEJ tinggi dan relatif stabil. Sebaliknya, Mojosari mengalami penurunan drastis dari 7.663 pada 2022 menjadi hanya 4.879 pada 2024, didominasi oleh penurunan

pengguna suntik dan kondom. Trowulan pun mengalami penurunan sangat tajam dari 9.423 pada 2022 menjadi hanya 6.996 pada 2024, khususnya pada metode pil dan kondom.

Kesimpulannya, meskipun penurunan penggunaan non-MKEJ bisa mencerminkan pergeseran ke metode kontrasepsi jangka panjang (yang lebih dianjurkan), perhatian khusus tetap perlu diberikan pada kecamatan Mojosari dan Trowulan yang menunjukkan penurunan drastis dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan potensi penurunan cakupan layanan KB secara umum di wilayah tersebut. Di sisi lain, Jetis patut diapresiasi karena konsisten menjaga bahkan meningkatkan jumlah peserta non-MKEJ, yang bisa mencerminkan layanan dan edukasi KB yang berjalan baik.

g) Perhubungan

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong-potong dan dapat terintegrasi dengan baik. Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.

Untuk mengetahui kelayakan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dihitung menggunakan indikator Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan indikator untuk mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi jalan di Kabupaten Mojokerto. Digunakan untuk menilai kondisi transportasi dan merencanakan pembangunan infrastruktur perhubungan. Beberapa indikator yang digunakan antara lain: Persentase jalan dalam kondisi baik, persentase rambu lalu lintas, Jumlah halte/terminal/parkir resmi, Kecelakaan lalu lintas (semakin rendah, semakin baik), Volume kendaraan terhadap kapasitas jalan (*V/C Ratio*). Indikator indeks infrastruktur LLAJ dijadikan indikator untuk mendukung misi 4 Bupati dan Wakil Bupati pada RPJMD Kabupaten Mojokerto. Selain itu capaian indikator kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 161
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kualitas dan Kuantitas Rambu Lalu Lintas, RPPJ,	58,60	67,43	27,00	43,09	46,87

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
APILL dan Marka Jalan					
Pemasangan Rambu Lalu-Lintas	42,00	33,00	99,00	99,00	107,00
Pemasangan APILL	8,00	3,00	8,00	-	7,00
Pengecatan Marka Jalan	1.160,00	2.700,00	2,26	231,00	484,00
Persentase Prasarana Penunjang LLAJ (Halte, <i>Guard Rail</i>)	35,00	31,00	-	-	-
Pemasangan <i>Guard Rail</i>	226,95	326,13	-	-	-
Fasilitas Keselamatan Jalan	67,72%	67,78%	68,06%	69,18%	73,6%
Jumlah Sarana Penunjang LLAJ (Halte, <i>Guard Rail</i> , <i>Delineator</i>)	47,09	49,28	-	2,00	-
Jumlah Orang / Barang Terangkut Angkutan Umum	216.480,00	72.883,00	59,02	32.176,00	36.351,00
Jumlah Orang / Barang melalui Terminal per Tahun	216.480,00	72.883,00	59,02	32.176,00	36.351,00
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	7.471,00	5.319,00	16,92	13.789,00	12.117,00
Jumlah Angkutan Darat	418.528,00	362.735,00	609.155,00	69.701,00	
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	7.471,00	7.687,00	16,92	13.789,00	12.117,00
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Pendapatan Bidang Perhubungan	7.797.274.849,00	8.022.616.092,00	6.213.213.100,00	6.410.110.371,00	4.952.581.003,00
Pemasangan Rambu Lalu-Lintas	455,00	468,00	99,00	99,00	107,00

Sumber : DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data di atas Persentase kualitas dan kuantitas rambu lalu lintas, RPPJ, APILL, dan marka jalan mengalami peningkatan dari 2020 ke 2021 (58,60% ke 67,43%), namun turun drastis pada 2022 (27%) dan mulai meningkat lagi pada 2023 dan 2024 (43,09% dan 46,87%). Pemasangan rambu lalu lintas relatif meningkat dari 42 unit pada 2020 menjadi 107 unit pada 2024, menunjukkan adanya upaya peningkatan keselamatan jalan. Sementara itu, pemasangan APILL sempat nihil pada 2023, namun kembali dilakukan pada 2024 dengan 7 unit. Pengecatan marka jalan juga mengalami ketidakstabilan, dari 1.160 km pada 2020 naik drastis ke 2.700 km

pada 2021, lalu turun tajam pada 2022 (hanya 2,26 km), dan kembali meningkat pada 2023 dan 2024.

Sarana prasarana penunjang LLAJ, seperti halte dan *guard rail*, mengalami penurunan signifikan setelah 2021, dengan nihilnya pemasangan *guard rail* maupun *delineator* dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini juga terlihat dari jumlah sarana penunjang yang menurun drastis pada 2023 hanya 2 unit, dibandingkan 49,28 unit pada 2021. Dalam hal angkutan umum, jumlah orang dan barang yang terangkut mengalami tren menurun, dari 216.480 orang/barang pada 2020 ke 36.351 orang/barang pada 2024. Tren serupa juga terjadi pada jumlah angkutan darat, yang turun drastis dari 609.155 unit pada 2022 ke 69.701 unit pada 2023. Namun, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) tetap stabil selama lima tahun terakhir di angka 15 hari, meskipun jumlah uji KIR mengalami fluktuasi.

Pendapatan bidang perhubungan menunjukkan tren penurunan, dari Rp7,79 miliar pada 2020 ke Rp4,95 miliar pada 2024. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh berkurangnya aktivitas transportasi serta jumlah angkutan yang beroperasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja sektor perhubungan menunjukkan tantangan dalam pemeliharaan infrastruktur dan layanan transportasi, meskipun ada upaya peningkatan di beberapa aspek seperti pemasangan rambu lalu lintas dan pengecatan marka jalan. Selain itu terdapat indikator kunci urusan perhubungan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 162
Indikator Kinerja Kunci Urusan Perhubungan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	70	70	70	75	65
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,44	0,44	0,44	0,47	0,47

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterhubungan suatu jaringan (misalnya jaringan jalan, jaringan transportasi, atau jaringan komunikasi) dibandingkan dengan jumlah hubungan maksimal yang mungkin terbentuk dalam jaringan tersebut. Sedangkan V/C Ratio (Volume per *Capacity Ratio*) di jalan Kabupaten/Kota relatif konstan di 0,44 pada 2020–2022 dan meningkat sedikit menjadi 0,47 pada 2023 dan 2024, mengindikasikan adanya peningkatan volume lalu lintas yang mulai mendekati kapasitas jalan. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya peningkatan konektivitas, peningkatan beban lalu lintas menjadi perhatian untuk pengelolaan transportasi dan infrastruktur jalan ke depan.

Tabel 2. 163
Jumlah Arus Penumpang Per Moda Transportasi Tahun 2024

N O	KECAMATAN	SEDAN DAN SEJENISNY A	JEEP DAN SEJENISNY A	STATION DAN SEJENISNY A	BUS DAN SEJENISNY A	TRUCK DAN SEJENISNY A	SEPEDA MOTOR	ALAT BERA T	JUMLA H
1	BANGSAL	202	159	2.188	69	1.257	25.989	9	29.873
2	DLANGGU	187	132	1.920	39	919	24.425	0	27.622
3	GONDANG	87	135	1.460	32	1.297	15.664	2	18.677
4	JATIREJO	96	161	1.393	98	1.663	16.492	3	19.906
5	KUTOREJO	162	149	1.976	32	1.499	27.473	2	31.293
6	MOJOSARI	326	316	3.889	116	3.451	40.538	6	48.642
7	NGORO	266	315	3.553	67	2.368	38.247	86	44.902
8	PACET	159	171	1.983	52	1.013	20.456	0	23.834
9	PURI	346	254	3.515	79	1.726	39.614	0	45.535
10	PUNGGING	245	296	3.235	63	2.568	36.312	21	42.740
11	SOOKO	389	353	4.025	35	1.683	40.197	0	46.682
12	TROWULAN	182	224	2.051	92	1.832	31.391	16	35.788
13	TRAWAS	54	67	839	15	488	10.091	0	11.554
14	MOJOANYA R	174	141	1.904	96	721	27.502	7	30.545
15	DAWAR	66	94	1.359	61	567	18.540	0	20.687
16	GEDEG	193	151	2.161	31	822	31.133	8	34.499
17	JETIS	290	195	3.050	78	1.601	43.748	2	48.964
18	KEMLAGI	130	95	1.546	44	1.080	24.713	0	27.608
JUMLAH		3.554	3.408	42.047	1.099	26.555	512.525	162	589.351

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data di atas sepeda motor mendominasi jumlah angkutan darat di Kabupaten Mojokerto dengan jumlah 512.525. Kemudian jenis moda station dan sejenisnya dengan capaian 42.047. Hal ini menunjukkan bahwa moda transportasi kepemilikan pribadi lebih mendominasi.

Tabel 2. 164
Pendapatan Bidang Perhubungan

Capaian Pendapatan Bidang Perhubungan						
Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp	4.201.347.305	4.417.053.382	3.993.460.000	4.097.574.191	4.322.304.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp	3.109.723.408	3.105.307.274	1.898.473.200	1.997.868.187	
Retribusi Terminal	Rp	41.409.057	42.605.779	10.750.000	3.867.389	
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp	443.612.917	456.433.331	309.929.900	310.402.441	504.337.600
Retribusi Ijin Trayek	Rp	1.182.162	1.216.327	600	398.163	
Jasa bengkel	Rp	-	-	-		
Total	Rp	7.797.274.849	8.022.616.092	6.213.213.100	6.410.110.371	4.952.581.003

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data capaian pendapatan bidang perhubungan dari tahun 2020 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan pada berbagai jenis retribusi. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan sebesar 2,87%, dari Rp 4.201.347.305 pada 2020 menjadi Rp 4.322.304.000 pada 2024, meskipun ada penurunan di tahun 2022 dan 2023. Retribusi pengujian kendaraan bermotor menunjukkan penurunan yang signifikan sebesar 35,89%, dari Rp 3.109.723.408 pada 2020 menjadi Rp 1.997.868.187 pada 2023, yang mencerminkan berkurangnya aktivitas pengujian kendaraan. Retribusi terminal mengalami penurunan yang tajam, terutama pada 2022 dan 2023, dengan total pendapatan yang turun drastis dari Rp 41.409.057 pada 2020 menjadi hanya Rp 3.867.389 pada 2023. Retribusi tempat khusus parkir mengalami kenaikan yang stabil, dengan pendapatan naik sebesar 13,7% dari Rp 443.612.917 pada 2020 menjadi Rp 504.337.600 pada 2024. Retribusi izin trayek juga mengalami penurunan yang signifikan, dengan penurunan sebesar 66,3% dari Rp 1.182.162 pada 2020 menjadi Rp 398.163 pada 2023.

Pendapatan total bidang perhubungan mengalami penurunan sebesar 36,45%, dari Rp 7.797.274.849 pada 2020 menjadi Rp 4.952.581.003 pada 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya aktivitas dalam berbagai sektor perhubungan akibat dampak dari pandemi atau pembatasan sosial. Meskipun ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, seperti retribusi parkir dan tempat khusus parkir, penurunan yang signifikan di sektor lain menunjukkan perlunya strategi pemulihan yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan dan aktivitas perhubungan umum. Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan beberapa indikator sebagai berikut :

- a. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum atau Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan, yakni di tahun 2019 sebanyak 744.285 penumpang, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 755.657 penumpang tetapi di tahun 2021-2023 mengalami penurunan terus-menerus menjadi 744.670 tahun 2021, 59.022 tahun 2022, 32.176 tahun 2023. Hal ini dikarenakan perbaikan angkutan umum yang berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Namun perlu dilakukan perbaikan terus menerus agar jumlah penumpang angkutan umum meningkat.

Tabel 2. 165

Jumlah Arus Penumpang Terangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun) Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah arus penumpang angkutan umum	755.657	744.670	59.022	32.176	36.351

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 166

Jumlah Terminal Bis Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Terminal Tipe B dan C	1	1	1	1	1

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 167

Data Perlintasan Sebidang

NO	NAMA TITIK PERLINTASAN SEBIDANG	KOORDINAT		PERLINTASAN SEBIDANG					PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG		KONDISI EKSISTING
		X	Y	DIJAGA PEMDA	DIJAGA PT. KAI	DIJAGA SUKARELAWAN	TIDAK DIJAGA	LIAR	FLYOVER	UNDERPASS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	JPL 52 (Kedawung) Desa Bicak, Kec. Trowulan Kab. Mojokerto	-7.495876	112.388312	5 Orang							Pos dan Palang Pintu Bersinyal
2	JPL 53 (Wates Lor) Desa Balongwono, Kec. Trowulan Kab. Mojokerto	-7.500478	112.380789	5 Orang							Pos dan Palang Pintu Bersinyal
3	JPL 38 (Jl. Bangsal) Dusun Damarsih, Desa Kepuhanyar, Kec. Mojoanyar	-7.469150	112.484120	5 Orang							Pos dan Palang Pintu Bersinyal

Sumber: DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

h) Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi instansi dan masyarakat, mengembangkan indrastruktur jaringan komunikasi data di instansi, serta mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui *e-government*. Pencapaian kinerja dalam mendukung keberhasilan urusan komunikasi dan informatika tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dengan capaian indikator keberhasilan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 168

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024

Kegiatan	Satuan	2022	2023	2024
Jumlah Sarana IT dan Jenis Media Informasi yang Digunakan (KIM, Wika FM, Tabloid Klik Mojo, Web, Media Sosial (Facebook, Instagram, Youtube), media luar ruang	Kelompok	6	6	5
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Yang Terbina	Kelompok	10	10	10
Jumlah Program Siaran Wika FM	program siaran	147	145	140
Jumlah Berita Yang Terpublikasi pada website https://mojokertokab.go.id/ dan https://diskominfo.mojokertokab.go.id	Berita	839	1295	1557
Jumlah Berita Yang Terpublikasi pada Media Sosial Pemda (Facebook : WIKAFM dan Diskominfo Kab Mojokerto)	Berita	1180	472	-
Jumlah Berita Yang Terpublikasi pada Media Sosial (Instagram : Ig Bupati Mojokerto, Ig Kominfokab_mojokerto, Ig wikafm.official)	Berita	1342	1274	1089
Jumlah Berita Yang Terpublikasi pada Media Sosial (Youtube : WIKA TV dan Youtube : Kominfo)	Berita	236	133	28
Jumlah Media Luar Ruang	Media	36	31	32
Jumlah Video Kaleidoskop Kegiatan Perangkat Daerah	Video	77	63	48
Kerjasama dengan Mass Media (Media Cetak dan Elektronik)	Media	94	83	84
Jumlah Berita yang Menjadi Isu Prioritas	berita	120	74	58
Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal	kali	2	40	26
Jumlah Aplikasi Layanan Informasi Pengaduan	kegiatan	3	3	3
Jumlah Pengaduan yang Masuk (SP4N LAPOR!)	pengaduan	123	155	182
Jumlah Pengaduan yang terselesaikan (SP4N LAPOR!)	pengaduan	82	121	133
Jumlah OPD Yang Terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah	OPD	57	46	46
Jumlah OPD yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	OPD	53	46	46
Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	OPD	57	46	46
Jumlah OPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus	OPD	57	46	46
Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik	OPD	57	46	46
Jumlah aplikasi (layanan publik dan administrasi) yang diselenggarakan secara online	aplikasi	223	302	302

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Penyelenggaraan komunikasi di Kabupaten Mojokerto didukung dengan adanya keberadaan Kantor Pos di Kabupaten Mojokerto. Salah satu fungsi keberadaan Kantor Pos adalah untuk membantu kelancaran komunikasi aktivitas masyarakat maupun komunikasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam aspek sarana IT dan jenis media informasi yang digunakan, terdapat penurunan dari 6 kelompok pada 2022-2023 menjadi 5 kelompok pada 2024. Sementara itu, jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang terbina tetap stagnan di angka 10 kelompok setiap tahun. Dari segi program siaran radio Wika FM, terjadi tren penurunan dari 147 program pada 2022 menjadi 140 program pada 2024.

Publikasi berita di website resmi pemerintah daerah menunjukkan peningkatan signifikan, dari 839 berita pada 2022 menjadi 1.557 berita pada 2024. Sebaliknya, jumlah berita yang dipublikasikan di media sosial Facebook mengalami penurunan drastis dari 1.180 berita pada 2022 menjadi hanya 472 berita pada 2023, bahkan tidak tercatat pada 2024. Tren serupa juga terlihat pada media sosial Instagram dan YouTube, dengan penurunan jumlah berita yang dipublikasikan.

Dari segi media luar ruang, jumlahnya sedikit berfluktuasi dengan penurunan dari 36 unit pada 2022 menjadi 31 unit pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 32 unit pada 2024. Produksi video kaleidoskop kegiatan perangkat daerah juga mengalami penurunan dari 77 video pada 2022 menjadi 48 video pada 2024. Sedangkan kerja sama dengan media cetak dan elektronik cenderung stabil di angka 83-94 media per tahun.

Penting untuk dicatat bahwa jumlah berita yang menjadi isu prioritas mengalami tren penurunan yang cukup tajam, dari 120 berita pada 2022 menjadi hanya 58 berita pada 2024. Sementara itu, jumlah penyiaran radio dan TV lokal mengalami lonjakan signifikan pada 2023 menjadi 40 kali, tetapi kembali turun menjadi 26 kali pada 2024.

Dari sisi layanan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!, jumlah pengaduan yang masuk meningkat dari 123 kasus pada 2022 menjadi 182 kasus pada 2024. Penyelesaian pengaduan juga meningkat meskipun tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pengaduan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 133 kasus pada 2024.

Di sisi infrastruktur teknologi informasi, jumlah OPD yang terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah, memiliki portal web sesuai standar, menggunakan pusat data pemerintah, serta memanfaatkan sertifikat elektronik mengalami penurunan signifikan dari 57 OPD pada 2022 menjadi 46 OPD pada 2023 dan tetap stagnan di angka yang sama pada 2024. Meski demikian, jumlah aplikasi layanan publik dan administrasi yang diselenggarakan secara online meningkat tajam dari 223 aplikasi pada 2022 menjadi 302 aplikasi pada 2023 dan 2024.

Indikator urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Mojokerto menunjukkan perkembangan positif dalam hal digitalisasi layanan, tetapi mengalami tantangan dalam hal optimalisasi media sosial dan publikasi informasi yang lebih luas. Penurunan beberapa

indikator, seperti jumlah berita prioritas dan penyiaran media lokal, mengindikasikan perlunya strategi yang lebih adaptif dalam penyebaran informasi serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan komunikasi publik

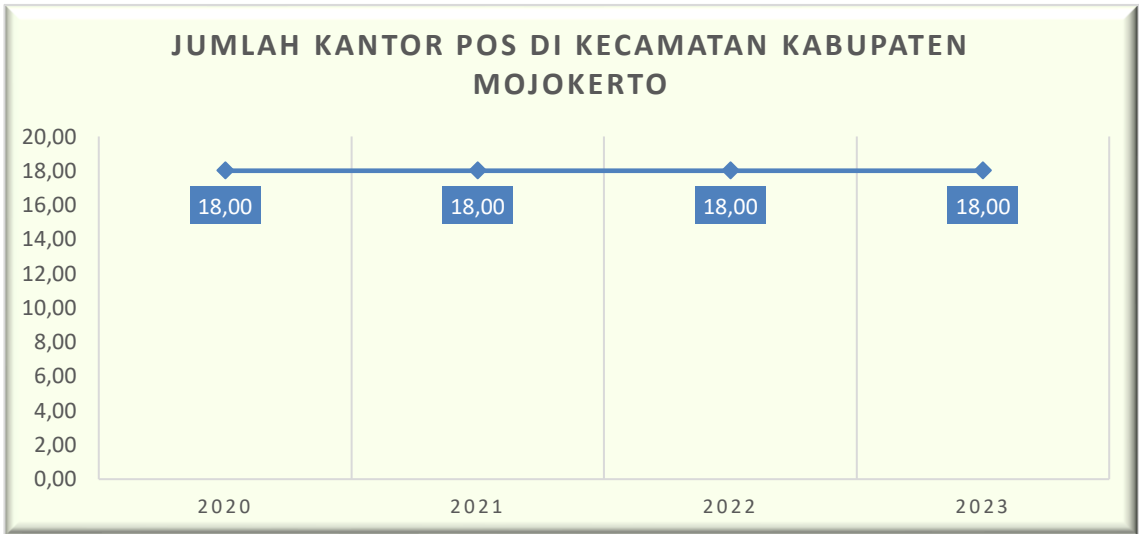
Tabel 2. 169
Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25%	2,17%	12,07%	22,07%	24,14%
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,68%	74,80%	77,65%	78,62%	1185,68%

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung internet selalu 100% sepanjang 2020–2024, menunjukkan akses digital yang sudah merata di lingkungan pemerintahan. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mengalami fluktuasi, mulai dari 25% pada 2020, turun drastis di 2021, lalu meningkat kembali hingga mencapai 24,14% pada 2024, menandakan progres yang terus berlanjut dalam digitalisasi layanan. Dapat disimpulkan, konektivitas dan digitalisasi layanan mengalami kemajuan, namun perlu perbaikan pada akurasi data dan pengukuran penyebaran informasi publik

Kabupaten Mojokerto memiliki kantor pos sejumlah 18 kantor yang tersebar dalam seluruh kecamatan.



Gambar 2. 43 Jumlah Kantor Pos di Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2023
Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

i) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Namun, berdasarkan pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan ini adalah sebatas pada urusan koperasi dan usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Berikut adalah jumlah koperasi menurut sektor usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 :

Gambar 2. 44
Jumlah Koperasi Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Sektor Usaha	Jumlah Koperasi menurut Sektor Usaha di Kabupaten Mojokerto							
	2021		2022		2023		2024	
	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3	0	3	0	3	0	3	0
Industri Pengolahan	3	0	1	7	1	0	1	0
Informasi dan Komunikasi	2	0	1	0	1	0	1	0
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2	0	1	0	1	0	1	0
Jasa Keuangan dan Asuransi	556	25	364	290	363	98	362	97
Jasa Lainnya	74	2	42	76	26	2	28	2
Penyediaan Akomodasi dan	42	3	20	46	12	2	14	2

Sektor Usaha	Jumlah Koperasi menurut Sektor Usaha di Kabupaten Mojokerto							
	2021		2022		2023		2024	
	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
Makan Minum								
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	47	11	31	48	22	16	22	14
Transportasi dan Pergudangan	3	0	1	1	1	0	1	0
Perdagangan Besar dan Ecer	-	-	-	-	7	0	4	3
Total	732	41	464	468	437	118	437	118

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data jenis koperasi yang tercatat pada 2020 hingga 2024, terdapat perkembangan yang cukup signifikan dalam modal sendiri dan volume usaha di berbagai kategori koperasi. Koperasi dengan kategori konsumen mencatatkan angka yang paling tinggi, baik dari sisi modal sendiri maupun volume usaha, mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2020, modal sendiri tercatat sebesar Rp212,68 miliar dan volume usaha sebesar Rp284,28 miliar, yang meningkat pada 2024 menjadi Rp430,79 miliar untuk modal sendiri dan Rp597,59 miliar untuk volume usaha, menunjukkan pertumbuhan yang substansial. Koperasi pemasaran menunjukkan fluktuasi dalam hal modal sendiri dan volume usaha. Meskipun volume usaha mengalami penurunan pada 2023, dari Rp34,00 miliar pada 2022 menjadi Rp25,88 miliar, modal sendiri pada 2024 tercatat sebesar Rp31,10 miliar, menunjukkan adanya perbaikan setelah penurunan beberapa tahun sebelumnya. Koperasi produsen juga mengalami fluktuasi yang serupa, dengan volume usaha yang terus meningkat di beberapa tahun, meskipun modal sendiri pada 2023 menurun menjadi Rp14,16 miliar. Namun, di 2024, kembali meningkat menjadi Rp40,99 miliar untuk modal sendiri dan Rp48,65 miliar untuk volume usaha, mencerminkan peningkatan yang solid.

Koperasi simpanan pinjaman menunjukkan tren yang sangat positif, dengan modal sendiri yang berkembang pesat dari Rp48,75 miliar pada 2020 menjadi Rp61,40 miliar pada 2022, dan volume usaha yang juga mengalami lonjakan besar, mencapai Rp153,82 miliar pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024, terjadi penurunan pada volume usaha dan modal sendiri, meskipun tetap berada pada level yang cukup tinggi, yakni Rp44,16 miliar untuk modal sendiri dan Rp83,37 miliar untuk volume usaha pada 2024.

Total modal sendiri dan volume usaha koperasi meningkat dari Rp316,42 miliar dan Rp455,83 miliar pada 2020, menjadi Rp413,50 miliar dan Rp409,76 miliar pada 2024. Meskipun terdapat fluktuasi di beberapa kategori, secara umum ada peningkatan yang menunjukkan penguatan sektor koperasi, dengan kategori konsumen dan simpanan pinjaman menjadi

kontributor utama dalam pertumbuhan ini. Data Jumlah Modal dan Volume Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Mojokerto 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 170
Jumlah Modal dan Volume Usaha Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Mojokerto 2020-2024

Jenis Koperasi		2020		2021		2022		2023		2024	
		Modal Sendiri	Volume Usaha	Modal Sendiri	Volume Usaha	Modal Sendiri	Volume Usaha	Modal Sendiri	Volume Usaha	Modal Sendiri	Volume Usaha
1	Jasa	0	0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp 2.951.662.778	Rp 858.346.400
2	Konsumen	Rp212,679,115,953	Rp284,277,581,490	Rp280,980,958,435	Rp336,440,174,613	Rp430,790,002,301	Rp597,590,233,959	Rp74,007,648,201	Rp29,648,306,297	Rp 294.300.548.163	Rp 247.233.747.727
3	Pemasaran	Rp26,849,465,197	Rp31,644,501,147	Rp29,833,674,032	Rp22,821,426,009	Rp32,303,357,326	Rp25,910,274,501	Rp34,002,500,216	Rp25,881,604,501	Rp 31.097.960.271	Rp 29.652.473.000
4	Produksi	Rp28,136,801,180	Rp31,376,643,713	Rp40,024,657,670	Rp53,897,469,917	Rp41,641,454,038	Rp42,219,404,717	Rp14,160,651,009	Rp26,203,705,687	Rp 40.992.250.704	Rp 48.647.635.374
5	Simpan Pinjam	Rp48,754,493,870	Rp108,533,734,947	Rp54,518,520,933	Rp108,748,335,749	Rp61,400,958,469	Rp153,820,391,990	Rp12,160,651,003	Rp23,512,900,906	Rp 44.158.139.338	Rp 83.366.686.679
JUMLAH		Rp316,419,876,200	Rp455,832,461,297	Rp405,357,811,070	Rp521,907,406,288	Rp566,135,772,134	Rp819,540,305,167	Rp134,331,450,429	Rp105,246,517,391	Rp 413.500.561.254	Rp 409.758.889.180

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah koperasi di Kabupaten Mojokerto antara 2021 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dalam jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di berbagai sektor usaha. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mencatatkan jumlah koperasi aktif yang jauh lebih banyak dibandingkan sektor lainnya, dengan angka yang cenderung stabil meskipun ada penurunan kecil dalam jumlah koperasi aktif dari 364 pada 2022 menjadi 362 pada 2024. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan signifikan pada jumlah koperasi aktif, dari 42 pada 2021 menjadi hanya 14 pada 2024, dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami fluktuasi, meskipun relatif stabil. Sektor Perdagangan Besar dan Ecer baru mulai menunjukkan koperasi aktif pada 2023 dan 2024, yang mencerminkan perubahan atau perkembangan dalam sektor tersebut. Sektor-sektor lainnya seperti Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menunjukkan jumlah koperasi aktif yang cukup kecil, namun tetap ada kestabilan antara tahun-tahun yang diamati. Meskipun ada fluktuasi jumlah koperasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tetap mendominasi, sedangkan sektor lainnya mencatatkan penurunan jumlah koperasi aktif, yang menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan usaha koperasi di sektor-sektor tersebut

Tabel 2. 171
Jumlah Usaha Mikro Kluster Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kegiatan Usaha	TOTAL
Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0
Pertambangan Dan Penggalian	27
Industri Pengolahan	5210
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin	45
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Dan Daur Ulang Sampah Dan Aktivitas Remediasi	210
Konstruksi	54
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	16648
Pengangkutan Dan Pergudangan	141
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	8727
Informasi Dan Komunikasi	212
Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	15
Real Estat	8
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	32
Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	165
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	0
Pendidikan	27
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	26
Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	57
Aktivitas Jasa Lainnya	3107
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	0
Aktivitas Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0
Jumlah Total	34711

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, terlihat bahwa jumlah koperasi aktif mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 sebanyak 712 unit menjadi 437 unit pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya penurunan minat atau efektivitas dalam mempertahankan koperasi yang aktif. Di sisi lain, persentase koperasi sehat mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada 2022 sebesar 42,18% dan sedikit meningkat pada 2024 menjadi 45,23%, meskipun masih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 99%. Persentase koperasi aktif juga menunjukkan penurunan yang serupa, dari 94,69% pada 2021 menjadi 48,24% pada 2023 dan baru meningkat sedikit pada 2024 menjadi 78,74%.

Frekuensi promosi Usaha Mikro (UM) menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 2 kali

pada 2020 menjadi 7 kali pada 2024. Namun, meskipun ada peningkatan frekuensi promosi, persentase usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk tetap rendah dengan hanya sedikit peningkatan, dari 0,93% pada 2022 menjadi 0,97% pada 2024. Adapun, pertumbuhan usaha mikro atau wira usaha baru menunjukkan tren positif, dengan peningkatan tahunan dari 0,43% pada 2020 menjadi 2,44% pada 2024, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pengembangan wirausaha baru dalam periode tersebut. Berdasarkan data diatas terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan, seperti frekuensi promosi dan pertumbuhan usaha mikro, capaian kinerja koperasi, terutama dalam hal koperasi aktif dan sehat, memerlukan perhatian lebih untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan sektor koperasi dan usaha mikro di masa mendatang. Berikut capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro:

Tabel 2. 172 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	17,98 %	15,52 %	13,12 %	39,35 %	44,62%
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	17,20 %	41,74 %	0,70 %	2,09 %	4,38%
Jumlah Koperasi Aktif	unit	712	732	467	467	437
Persentase Koperasi Sehat	%	80	99	42,18	40	45,23
Persentase Koperasi Aktif	%	92,1	94,69	48,24	48,24	78,74
Frekuensi promosi UM	kali	2	5		5	7
Persentase peningkatan Usaha Mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	%	Tidak dihitung	Tidak dihitung	0,93	1,85	0,97
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro / Wira Usaha Baru	%	0,43	0,52	1,14	2,07	2,44

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data koperasi yang tercatat berdasarkan jumlah anggotanya di berbagai kecamatan, dapat dilihat adanya variasi yang signifikan dalam jumlah anggota koperasi dari tahun ke tahun. Dalam aspek peningkatan koperasi yang berkualitas, terjadi penurunan berturut-turut dari tahun 2020 (17,98%) hingga 2022 (13,12%). Penurunan ini bisa dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak koperasi mengalami kesulitan operasional, terutama dalam hal permodalan, likuiditas, dan daya beli anggotanya. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga 39,35%, yang kemudian meningkat lagi menjadi 44,62% pada 2024. Kenaikan tajam ini mencerminkan keberhasilan berbagai program revitalisasi koperasi, seperti peningkatan tata kelola, digitalisasi koperasi, dukungan pendampingan kelembagaan, serta penguatan regulasi dan pembinaan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, tren pada indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Tahun 2020 mencatat peningkatan sebesar 17,20%, dan melonjak signifikan pada 2021 menjadi 41,74%. Kenaikan tajam ini dapat dikaitkan dengan maraknya gelombang wirausaha baru sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap PHK dan penurunan kesempatan kerja akibat pandemi. Banyak individu memulai usaha mikro sebagai solusi bertahan hidup di tengah krisis ekonomi. Namun, pada 2022 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 0,70%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan akses permodalan, penurunan daya beli masyarakat, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan terhadap pelaku usaha mikro. Perlahan, tren ini mulai pulih kembali pada 2023 (2,09%) dan meningkat di 2024 (4,38%), meskipun tidak setinggi masa lonjakan awal pandemi.

Tabel 2. 173
Indikator Kinerja Kunci Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	17,98%	15,52	27,19%	39,36%	44,62%
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	17,20%	41,74	0,70%	2,07%	4,38%

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah anggota koperasi meningkat pesat, dari 76.549 pada 2020 menjadi 119.695 pada 2024, menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup besar. Kecamatan Gondang, misalnya, mengalami lonjakan yang sangat besar pada 2021, dengan jumlah anggota mencapai 13.838, dibandingkan dengan 4.323 pada 2020, dan angka ini relatif stabil hingga 2024. Kecamatan Ngoro juga menunjukkan fluktuasi yang menarik, dengan penurunan tajam pada 2022 (dari 12.510 pada 2021 menjadi 3.629) namun kembali melonjak pada 2023 dan 2024 hingga mencapai 14.927 anggota. Selain itu, Kecamatan Kutorejo dan Mojosari juga mencatatkan peningkatan signifikan, masing-masing dari 1.233 menjadi 7.798, dan dari 4.093 menjadi 5.395. Sementara itu, kecamatan seperti Jatirejo, Trawas, dan Bangsal menunjukkan jumlah anggota yang lebih stabil, dengan fluktuasi yang tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Sooko, Gedeg, dan Puri menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan bahwa koperasi di wilayah ini cukup berkembang. Hal yang sama juga terlihat di kecamatan Jetis, yang meskipun mengalami penurunan tajam pada 2022, kembali meningkat pada 2023 dan 2024. Berdasarkan data diatas, meskipun terdapat variasi antar kecamatan, data menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam jumlah anggota koperasi di wilayah tersebut dari 2020 hingga 2024. Berikut disampaikan data koperasi berdasarkan anggotanya:

Tabel 2. 174
Data Koperasi Berdasarkan Jumlah Anggotanya

Data Koperasi Berdasarkan Jumlah Anggotanya					
Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Jatirejo	1.474	1.982	1.804	1.968	1.968
Gondang	4.323	13.838	13.528	13.635	13.635
Pacet	2.917	3.173	4.575	4.933	4.933
Trawas	528	517	612	692	692
Ngoro	12.471	12.510	3.629	14.927	14.927
Pungging	4.336	4.614	5.217	5.423	5.423
Kutorejo	1.233	7.734	7.680	7.798	7.798
Mojosari	4.093	4.897	5.253	5.395	5.395
Bangsar	1.157	1.814	1.804	1.810	1.810
Mojoanyar	6.192	6.257	5.940	6.841	6.841
Dlanggu	6.249	6.466	10.084	10.207	10.207
Puri	2.845	7.026	7.153	7.192	7.192
Trowulan	797	2.642	4.315	4.315	4.315
Sooko	5.528	6.669	8.425	9.706	9.706
Gedeg	8.488	7.540	7.805	8.822	8.822
Kemlagi	5.546	7.280	6.226	6.221	6.221
Jetis	6.914	7.148	3.351	7.233	7.233
Dawarblandong	1.458	2.330	2.577	2.577	2.577
JUMLAH	76.549	104.437	99.978	119.695	119.695

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data sebaran kelompok kategori usaha mikro di Kabupaten Mojokerto dari 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam jumlah usaha mikro di berbagai kategori. Total jumlah usaha mikro pada tahun 2020 tercatat sebesar 34.736 unit, yang kemudian meningkat menjadi 41.269 pada 2021, menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar. Namun, pada 2022 jumlah usaha mikro mengalami sedikit penurunan menjadi 41.291, meskipun tetap berada pada angka yang tinggi. Pada 2023 dan 2024, jumlah usaha mikro kembali turun menjadi 34.711 unit, yang sebanding dengan angka pada 2020, menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Melihat data per kategori, beberapa kelompok kategori usaha mikro mengalami fluktuasi yang cukup besar. Misalnya, kelompok dengan total tertinggi, yaitu kategori dengan 34.736 unit pada 2020, mengalami penurunan yang tajam pada 2023 (hanya 608 unit) dan kembali sedikit meningkat pada 2024 menjadi 608 unit. Beberapa kategori lain seperti yang memiliki angka lebih rendah, seperti kelompok dengan 784 unit pada 2020 yang meningkat signifikan pada 2021 hingga 1.847 unit, tetapi mengalami penurunan pada 2022 dan 2023. Sementara itu, ada kelompok yang menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, seperti kategori dengan 1.539 unit pada 2020, yang meningkat menjadi 1.960 pada 2021 dan kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya. Kategori-kategori tertentu bahkan mencatatkan angka yang sangat tinggi pada 2024, seperti kategori dengan 4.404 unit, yang menunjukkan pertumbuhan usaha mikro yang pesat pada beberapa wilayah. Berdasarkan data

dias, meskipun ada fluktuasi yang tajam, Kabupaten Mojokerto menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah usaha mikro di beberapa kategori, meskipun beberapa kategori lainnya mengalami penurunan. Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 175
Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto

Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto					
Kecamatan	Total 2020	Total 2021	Total 2022	Total 2023	Total 2024
Jatirejo	2.176	1.832	2.543	1.063	1063
Gondang	1.652	2.092	2.242	509	509
Pacet	2.906	2.481	2.327	1.690	1690
Trawas	1.940	1.428	1.960	1.172	1172
Ngoro	1.638	2.345	2.092	1.538	1538
Pungging	1.903	2.855	1.832	3.543	3543
Kutorejo	1.614	2.396	3.916	2.024	2024
Mojosari	3.366	3.120	2.217	608	608
Bangsar	1.878	2.543	2.396	1.225	1225
Mojoanyar	2.122	1.670	1.670	2.012	2012
Dlanggu	1.296	2.327	3.120	2.172	2172
Puri	1.933	2.132	2.345	3.776	3776
Trowulan	1.658	1.888	2.481	4.404	4404
Sooko	784	1.847	2.855	2.085	2085
Gedeg	1.539	1.960	2.132	1.030	1030
Kemlagi	1.786	2.195	1.847	798	798
Jetis	2.242	3.916	1.428	3.065	3065
Dawarblandong	2.303	2.242	1.888	1.997	1997
Jumlah	34.736	41.269	41.291	34.711	34711

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

j) Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah salah satu urusan yang menjadi indikator keterbukaan Pemerintahan Kabupaten terhadap usaha bagi masyarakat. Pengembangan iklim dan penanaman modal dilakukan dengan pemberian kemudahan-kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Hal ini sudah tertuang dalam urusan penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berikut adalah salah satu bidang dalam urusan penanaman modal yaitu penerbitan ijin usaha perdagangan:



Gambar 2. 45 Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Data menunjukkan perubahan signifikan dalam jumlah usaha berdasarkan skala dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tren pertumbuhan yang paling mencolok pada usaha mikro. Pada tahun 2020, total jumlah usaha mencapai 2.787 unit, dengan dominasi usaha mikro sebanyak 1.523 unit. Namun, terjadi pergeseran besar dalam komposisi usaha selama lima tahun terakhir. Usaha kecil mengalami penurunan drastis dari 1.034 unit pada 2020 menjadi hanya 12 unit pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 29 unit pada 2024. Secara persentase, usaha kecil mengalami penurunan hingga 98,85% dari 2020 ke 2023, dan meskipun ada kenaikan pada 2024, jumlahnya masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun awal. Tren serupa terlihat pada usaha menengah yang turun 99,54% dari 218 unit pada 2020 menjadi hanya 1 unit pada 2023, sebelum naik kembali menjadi 5 unit pada 2024. Sebaliknya, usaha mikro mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dari 1.523 unit pada 2020, jumlahnya melonjak menjadi 4.684 unit pada 2024, mencerminkan kenaikan sebesar 207,53% dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, usaha besar mengalami fluktuasi kecil, dari 12 unit pada 2020 menjadi 4 unit pada 2023, lalu meningkat kembali menjadi 5 unit pada 2024, menunjukkan penurunan sebesar 66,67% dari 2020 ke 2023 sebelum mengalami sedikit pemulihan. Berdasarkan data dapat diatas, jumlah total usaha terus meningkat setiap tahunnya, dari 2.787 unit pada 2020 menjadi 4.723 unit pada 2024, dengan total pertumbuhan 69,51%. Pertumbuhan ini didominasi oleh usaha mikro yang terus berkembang pesat, sementara usaha kecil dan menengah justru mengalami penyusutan drastis. Hal ini menunjukkan adanya perubahan struktur usaha dipengaruhi oleh faktor kemudahan permodalan, adaptasi terhadap kondisi ekonomi, serta perubahan pola usaha masyarakat.

Tabel 2. 176
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

NO	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal						
	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penyelesaian Izin	izin	978	1.009	863	935	773
2	Jumlah Penambahan Bangunan ber-IMB	unit	450	281	334	203	324
3	Frekuensi Promosi Daerah	kali	0	2	9	9	10
4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	11.37%	-36.96%	83.17%	-0,1027	-0,01%
5	PMA	%	11,30%	-36,88%	1652,96%	11,25%	0,61%
6	PMDN	%	10,86%	-37,06%	265%	-20%	-0,37%
7	Jumlah PMDN yang Disetujui	investor	213	285	924	402	1610
8	Nilai Investasi PMDN	Rp. Juta	1.361.136,80	856.698,60	3.127.949	2.505.519	2.496.135
9	Jumlah PMA	investor	249	193	314	148	701
10	Nilai Investasi PMA	Ribu US \$	119.641,00	75.511,00	1.323.684,85	1.472.654,00	1.481.607,00
11	Lama Proses Perijinan	hari kerja	2 s/d 15	2 s/d 15	2 s/d 15	2 s/d 15	2 s/d 15

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Mojokerto pada periode 2019–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam berbagai aspek. Dari sisi jumlah penyelesaian izin, terdapat fluktuasi dengan tren penurunan pada tahun 2024 menjadi 773 izin dari sebelumnya 935 izin pada 2023 dan 1.009 izin pada 2021. Jumlah penambahan bangunan ber-IMB juga mengalami penurunan drastis dari 450 unit pada 2020 menjadi hanya 203 unit pada 2023, sebelum meningkat kembali menjadi 324 unit pada 2024. Dalam aspek promosi daerah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari 0 kali pada 2020 menjadi 10 kali pada 2024, mencerminkan peningkatan upaya dalam menarik investor.

Di sisi nilai investasi, terdapat fluktuasi yang cukup tajam. Persentase peningkatan nilai investasi menunjukkan ketidakstabilan, dengan lonjakan drastis pada 2022 sebesar 83,17%, tetapi mengalami kontraksi pada tahun-tahun berikutnya, bahkan negatif di 2023 dan 2024. Tren serupa juga terlihat pada investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada 2022, PMA mengalami lonjakan signifikan sebesar 1652,96%, sedangkan PMDN meningkat 265%, namun kedua sektor ini kembali mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Dari segi jumlah investor, PMDN yang disetujui meningkat signifikan pada 2022 (924 investor) sebelum turun ke 402 investor pada 2023, kemudian melonjak drastis menjadi 1.610 investor pada 2024. Sementara itu, jumlah investor PMA mengalami tren menurun pada 2021 dan 2023, tetapi kembali meningkat menjadi 701 investor pada 2024. Dari segi nilai investasi, baik PMDN maupun PMA mengalami pertumbuhan

signifikan pada 2022 tetapi menurun kembali pada tahun berikutnya. Meski demikian, nilai investasi PMA masih menunjukkan pertumbuhan dari 1.323.684,85 ribu USD pada 2022 menjadi 1.481.607 ribu USD pada 2024.

Sementara itu, lama proses perizinan tetap konsisten dalam rentang 2 hingga 15 hari kerja selama periode tersebut, menunjukkan kestabilan dalam layanan administrasi investasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja penanaman modal Kabupaten Mojokerto menunjukkan pola fluktuatif dengan beberapa lonjakan signifikan, terutama pada 2022, yang diikuti oleh penyesuaian kembali di tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan investasi yang berkelanjutan serta perlunya strategi yang lebih adaptif dalam menarik investor dan mendorong stabilitas investasi.

Tabel 2. 177
Indikator Kinerja Kunci Urusan Penanaman Modal

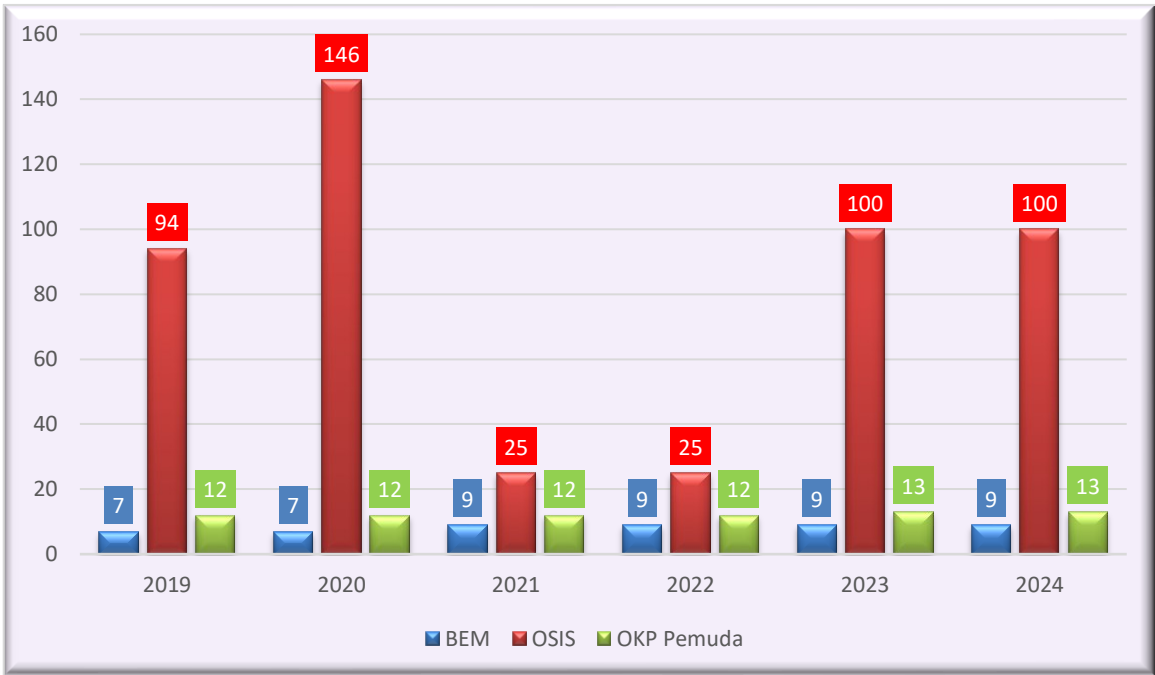
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	11,37%	-36,96	-25,18%	-10,27%	-24,45%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota menurun dari 11,37% pada 2020 menjadi negatif mulai 2021, dengan penurunan terbesar mencapai -36,96% pada 2021. Meskipun terjadi sedikit perbaikan pada 2023 (-10,27%), tren tetap negatif dan kembali pada 2024 (-24,45%). Hal ini mengindikasikan tantangan serius dalam menarik investasi, yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah

k) Kepemudaan dan Olahraga

Peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional penting dan dibuktikan dalam berbagai peran pemuda seiring dengan kehidupan suatu bangsa. Organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 46 Jumlah Organisasi Kepemudaan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2024

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto Tahun 2024

Grafik ini menunjukkan jumlah organisasi kepemudaan, yaitu BEM, OSIS, dan OKP Pemuda, dalam periode 2019 hingga 2024. OSIS mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan jumlah organisasi yang meningkat dari 94 pada 2019 menjadi 146 pada 2020, sebelum turun drastis ke angka 25 pada 2021 dan 2022. Namun, pada 2023 dan 2024, jumlahnya kembali naik menjadi 100 organisasi. Sementara itu, BEM menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil, dengan jumlah organisasi tetap di angka 7 pada 2019 dan 2020, lalu meningkat menjadi 9 sejak 2021 hingga 2024. OKP Pemuda juga menunjukkan kestabilan, dengan jumlah organisasi yang bertahan di angka 12 dari 2019 hingga 2022, sebelum mengalami sedikit peningkatan menjadi 13 pada 2023 dan 2024. Dari pola ini, dapat disimpulkan bahwa OSIS mengalami dinamika yang lebih besar dalam jumlah organisasi dibandingkan dengan BEM dan OKP Pemuda, yang cenderung mengalami pertumbuhan lebih stabil dari tahun ke tahun. Selain melalui organisasi kepemudaan seperti BEM OSIS dan OKP Pemuda, pemuda juga bisa berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kepemudaan.

Tabel 2. 178
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemuda dan Olahraga

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,12%	3,04	0,12%	0,61%	1,63%
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,19%	42,06	42,95%	63,58%	49,69%
Peningkatan prestasi olahraga	0	12 Medali/Penghargaan	56 Medali/Penghargaan	9 Medali/Penghargaan	83 Medali/Penghargaan

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada 2021 (3,04%), namun kembali menurun dan naik perlahan hingga mencapai 1,63% pada 2024. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan menunjukkan lonjakan besar dari kurang dari 1% pada 2020 menjadi puncak 63,58% pada 2023, kemudian menurun menjadi 49,69% pada 2024, menunjukkan minat dan keterlibatan yang tinggi meskipun ada sedikit penurunan akhir periode.

Sementara itu, prestasi olahraga mengalami peningkatan signifikan dengan jumlah medali/penghargaan yang diterima melonjak dari nol pada 2020 menjadi 83 pada 2024, meskipun sempat turun pada 2023. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan peningkatan keterlibatan pemuda dalam organisasi dan olahraga, dengan ruang untuk memperkuat partisipasi ekonomi mandiri yang masih relatif rendah. Kegiatan kepemudaan di Kabupaten Mojokerto antara lain :

Tabel 2. 179
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2022-2024

Jumlah Kegiatan Kepemudaan							
Nama Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan / Pelatihan Organisasi Kepemudaan	giat	1	1	-	0	-	
	orang	100	30	-	0	-	-
	lokasi	Pendopo Graha Maja Tama	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto	-	0	-	-
Penyuluhan narkoba	giat	1	1	-	1	-	-
	orang	100	50	-	80	-	-
	lokasi	Ruper Disparpora	Aula Gerakan Pramuka	-	Ruper DISBUDPORAPAR	-	-
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	giat	1	1	1	1	-	2
	orang	50	50	50	16	-	50
	lokasi	Wisata Desa Randugenengan	Ubalan Waterpark	Aula Disbudparpora	BLK Jabon	-	Royal Trawas Hotel
Seleksi PASKIBRAKA	giat	2	1	1	1	-	
	orang	304	300	300	300	-	
	lokasi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	Gor Mojosari dan Provinsi	-	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	giat	1	1	1	1	-	-
	orang	50	50	50	80	-	-
	lokasi	Lesehan Pringgoda di Pacet	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab.	Aula Disbudparpora	Aula Disbudparpora	-	-

Jumlah Kegiatan Kepemudaan							
Nama Kegiatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Mojokerto				
Lomba Kreativitas Pemuda (Baris Berbaris)	giat	1	-	1	-	1	-
	orang	400	-	336	-	300	-
	lokasi	GOR Mojosari	-	GOR Mojosari	-	GOR Mojosari	-
Lomba pemuda Pelopor	giat	-	-	-	-	-	1
	orang	-	-	-	-	-	165
	lokasi	-	-	-	-	-	Disbudporapar
Pembentukan Saka Pariwisata	giat	-	1	-	-	-	-
	orang	-	250	-	-	-	-
	lokasi	-	Gedung Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto	-	-	-	-
Jumlah	giat	7	5	4	4	1	3
	orang	1.004	480	736	736	300	215
	lokasi	6	6	2	2	1	2

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada periode 2022 hingga 2024, jumlah kegiatan kepemudaan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, terdapat empat kegiatan utama yang diselenggarakan, yaitu Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Seleksi PASKIBRAKA, Penyuluhan Narkoba, dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, dengan total peserta mencapai 736 orang dan dua lokasi kegiatan. Namun, pada 2023, jumlah kegiatan menurun drastis menjadi hanya satu kegiatan, yaitu Lomba Kreativitas Pemuda (Baris Berbaris) yang diikuti oleh 300 peserta dan berlangsung di GOR Mojosari. Penurunan ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, baik dari segi jumlah maupun cakupan peserta dan lokasi.

Pada 2024, jumlah kegiatan kembali meningkat menjadi tiga, yaitu Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Lomba Pemuda Pelopor, dengan jumlah peserta mencapai 215 orang. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan 2022, peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk kembali mengaktifkan kegiatan kepemudaan setelah mengalami penurunan drastis pada 2023. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan dinamika dalam program kepemudaan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kebijakan, anggaran, atau prioritas pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pemuda.

Pekembangan organisasi Olah Raga di Kabupaten Mojokerto secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 180
Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto						
Nama Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Atletik	organisasi	4	5	10	10	10
Sepak Bola	organisasi	45	48	48	48	48
Bola Voli	organisasi	18	20	20	20	20
Bola Basket	organisasi	14	16	16	16	16
Bilyar	organisasi	5	6	6	6	6
Bulu Tangkis	organisasi	6	7	7	7	7
Tenis Lapangan	organisasi	5	6	6	6	6
Tenis Meja	organisasi	8	9	9	9	9
Catur	organisasi	7	8	9	9	9
Karate	organisasi	18	20	20	20	20
Wushu	organisasi	3	4	4	4	4
Kempo	organisasi	2	3	3	3	3
Silat	organisasi	16	18	18		18
Takraw	organisasi	4	5	5	5	5
Selam	organisasi	2	3	3	3	3
Senam	organisasi	1	2	3	3	3
Bina Raga	organisasi	6	7	-	1	1
Renang	organisasi	8	9	9	9	9
Gulat	organisasi	2	3	3	3	3
Yudo	organisasi	2	3	3	3	3
Bridge	organisasi	1	2	2	2	2
BPOC	organisasi	1	2	-	-	-
Hoki	organisasi	4	5	5	5	5
PanjatTebing	organisasi	2	3	3	3	3
Drumband	organisasi	75	78	78	78	78
Taekwondo	organisasi	7	8	8	8	8
Paralayang	organisasi	1	2	2	2	2
Bola Tangan	organisasi	1	2	3	3	3
Pentaque	organisasi	1	2	2	2	2
Olahraga Wanita	organisasi	1	2	2	2	2
Soft Ball	organisasi	2	3	3	3	3
Jujitsu	organisasi	2	3	3	3	3
Muythai	organisasi	2	3	3	3	3
Jumlah		276	317	316	299	317

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto Tahun 2024

Perkembangan organisasi olahraga di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren yang cukup dinamis dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, jumlah organisasi olahraga tercatat sebanyak 276 organisasi, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 317 organisasi. Namun, pada tahun 2022 jumlahnya sedikit menurun menjadi 316 organisasi, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan hanya 299 organisasi yang tercatat. Meski demikian, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali ke 317 organisasi, menyamai angka tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2021. Beberapa cabang olahraga mengalami pertumbuhan signifikan, seperti atletik, yang meningkat dari 4 organisasi pada 2020

menjadi 10 organisasi pada 2022 dan stabil hingga 2024. Sepak bola, sebagai olahraga yang sangat populer, tetap menjadi cabang dengan jumlah organisasi terbanyak, yakni 48 organisasi sejak 2021. Cabang olahraga lain seperti bola voli, bola basket, karate, *drumband*, dan taekwondo juga menunjukkan pertumbuhan stabil.

Namun, ada beberapa cabang olahraga yang mengalami penurunan atau stagnasi, seperti bina raga, yang sempat hilang dari daftar pada tahun 2022, tetapi kembali muncul dengan 1 organisasi pada 2023 dan 2024. BPOC (kemungkinan besar mengacu pada olahraga untuk penyandang disabilitas) juga mengalami penurunan, dengan jumlah organisasi berkurang dari 2 pada 2021 menjadi nol pada 2022 dan seterusnya. Secara keseluruhan, perkembangan organisasi olahraga di Kabupaten Mojokerto menunjukkan pola yang fluktuatif, tetapi tetap mengalami pertumbuhan secara umum. Peningkatan jumlah organisasi olahraga menunjukkan adanya minat dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, serta upaya pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan berbagai cabang olahraga. Diharapkan, ke depan pembinaan dan pengelolaan organisasi olahraga ini dapat lebih optimal untuk menghasilkan atlet-atlet berprestasi.

Prestasi olahraga yang dicapai Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari perolehan medali pada kegiatan-kegiatan olahraga, antara lain:.

Tabel 2. 181
Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024

Tingkat Prestasi Olahraga (PELAJAR)												
Kegiatan	Capaian 2022				Capaian 2023				Capaian 2024			
	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD	1	1	7	9				0				
POPDA SMP				0				0				
POPDA SMA				0				0	3	6	5	14
Kejuaraan Dunia Bahrain Para Bulutangkis								0	1			1
Paralimpiade Paris Para Bulutangkis								0		1		1
Kejurda/Kejurnas bola voli				0				0				0
Kejurnas Hockey Indoor								0			2	2
Kejurnas Kabbadi								0			1	1
Kejurnas Kurash								0		1	1	2
Kejurnas Menembak								0			1	1
Kejurnas Judo								0			1	1

[illegible]

Tingkat Prestasi Olahraga (PELAJAR)												
Kegiatan	Capaian 2022				Capaian 2023				Capaian 2024			
	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah
Olahraga Masyarakat Daerah olahraga tradisional												
Festival Olahraga Masyarakat Daerah Binaraga dan Fisik										1		1
Festival Olahraga Masyarakat Daerah Pushbike										1		1
PIALA KAJATI JATIM Bulutangkis										1	2	3
PIALA GUBERNUR JAWA TIMUR Bulutangkis											1	1
Kejuaraan BNI Sirkuit Nasional A Bulutangkis											1	1
PIALA KAPOLDA JATIM Bulutangkis											1	1
INTERSIO CUP EAST JAVA OPEN 2024 Bulutangkis											2	2
Kejurnas karate				0				0				0
Kejurnas taekwondo				0				0				0
POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)				0				0				0
POSPEDA (Pekan Olahraga Pondok Pesantren)				0				0				0
Kejurda Kick Boxing				0				0				0
Kejurnas U-17 Bulu Tangkis				0				0				0
Sirnas (Walikota Surabaya Cup) Bulu Tangkis				0				0				0

Tingkat Prestasi Olahraga (PELAJAR)												
Kegiatan	Capaian 2022				Capaian 2023				Capaian 2024			
	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah
Kejurnas Bulu Tangkis U-13 di Purwokerto				0				0				0
Daihatsu Aspec Bulu Tangkis di Padang				0				0				0
Unibraw Open Bulu Tangkis Jawa Bali				0				0				0
Kejurprop Taekwondo				0				0				0
Kejur UPN Taekwondo Surabaya				0				0				0
Kejurprop Taekwondo di Pasuruan				0				0				0
Kejuaran Taekwondo UM Malang				0				0				0
Porprov				0	16	38	41	95				0
Kejurda Taekwondo				0				0				0
Kejurda Atletik				0				0				0
Kejurnas Atletik				0				0				0
Kejurda Selam				0				0				0
Kejurnas Selam				0				0				0
Kejurprov Gulat				0				0				0
Kejurprov Sepak bola				0				0				0
Kejurprov Wushu				0				0				0
Kejurprov Kick boxing				0				0				0
Kejurprov Bulutangkis											1	1
Kejurprov Catur									1	1	1	3
Kejurnas Hoki				0				0				0
ASEAN GAMES				0				0				0
Kelas WRABF 25 Meter KU Junior menembak	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1
PIALA PANGLIMA TNI 2024 TINGKAT NASIONAL Karate	-	-	-	-	-	-	-	-			2	2

Tingkat Prestasi Olahraga (PELAJAR)												
Kegiatan	Capaian 2022				Capaian 2023				Capaian 2024			
	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah	Em as	Pera k	Perung gu	Juml ah
INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI Hadang	-	-	-	-	-	-	-	-		1		1
INVITASI OLAHRAGA TRADISIONAL TINGKAT PROVINSI Dagongan	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1
WALIKOTA BATU CUP TINGKAT PROVINSI Karate	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1		4
RBC BATU TINGKAT JATIM Bulutangkis	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1
AIC MALANG TINGKAT JATIM Bulutangkis	-	-	-	-	-	-	-	-		1		1
PIALA BENDO SPORT TINGKAT JATIM Bulutangkis	-	-	-	-	-	-	-	-	2			2
PIALA DISPORA PASURUAN TINGKAT JATIM Bulutangkis	-	-	-	-	-	-	-	-	3		1	4
Jumlah				0	16	38	41	95	24	23	36	83

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto Tahun 2024

Pada periode 2022 hingga 2024, tingkat prestasi olahraga pelajar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, jumlah medali yang berhasil diraih masih nihil, menunjukkan minimnya capaian prestasi pada tahun tersebut. Namun, pada 2023 terjadi lonjakan prestasi dengan total 95 medali, yang terdiri dari 16 medali emas, 38 perak, dan 41 perunggu. Lonjakan ini didominasi oleh ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), yang menyumbangkan mayoritas perolehan medali. Pada tahun 2024, jumlah medali sedikit menurun menjadi 83 medali, yang terdiri dari 24 emas, 23 perak, dan 36 perunggu. Meskipun terjadi penurunan jumlah total, ada peningkatan jumlah medali emas, yang menunjukkan peningkatan kualitas dalam capaian prestasi. Tahun ini juga ditandai dengan keberhasilan pelajar dalam berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional, seperti Kejuaraan Dunia Bahrain Para Bulutangkis, Paralimpiade Paris, dan Pekan Paralimpiade Nasional. Selain itu, berbagai kejuaraan daerah dan nasional di cabang olahraga seperti bulutangkis, catur, atletik, dan menembak juga turut berkontribusi dalam perolehan medali.

Secara keseluruhan, tren prestasi olahraga pelajar menunjukkan perkembangan yang positif dalam dua tahun terakhir. Peningkatan jumlah medali emas pada 2024 menandakan adanya perbaikan kualitas atlet dan sistem pembinaan yang lebih baik. Dengan tren ini, diharapkan ke depan prestasi olahraga pelajar dapat terus meningkat dan berkontribusi dalam ajang yang lebih bergengsi.

I) Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah.

Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan statistik adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah tersebut.

Tabel 2. 182
Indikator Kinerja Kunci Urusan Statistik

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Berdasarkan data indikator kinerja kunci urusan statistik dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Mojokerto secara konsisten telah menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi

pembangunan daerah. Capaian 100% pada kedua indikator tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dari setiap OPD dalam memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mencerminkan terbangunnya budaya kerja berbasis data di lingkungan pemerintah daerah

Statistik sektoral mencakup semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD termasuk juga survei yang dilaksanakan oleh konsultan-konsultan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah. Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh berbagai pihak guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. Penerapan prinsip SDI di daerah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah daerah selaras dengan standar nasional dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan kebijakan.

Di tingkat daerah, implementasi SDI dilakukan melalui koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghasilkan data yang memenuhi standar, metadata yang jelas, interoperabilitas antar sistem, serta memiliki kode referensi yang seragam. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap data yang dikumpulkan dan dikelola memiliki satu standar dan tidak terjadi duplikasi atau ketidaksesuaian antara satu instansi dengan lainnya.

Sebagai contoh, dalam sektor pariwisata, data terkait jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, jumlah hotel, serta kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dikelola secara sistematis dan terintegrasi. Dengan menerapkan prinsip SDI, data ini tidak hanya dapat digunakan oleh dinas pariwisata tetapi juga oleh instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyusun strategi pengembangan wilayah berbasis data.

Selain itu, dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, penerapan SDI dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran. Misalnya, dalam distribusi bantuan sosial, pemerintah daerah dapat menggunakan data yang terintegrasi untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan tanpa tumpang tindih dengan program lain.

Namun, tantangan dalam penerapan SDI di daerah masih cukup besar, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, serta budaya birokrasi yang masih bersifat sektoral. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengembangkan infrastruktur digital agar implementasi SDI dapat berjalan efektif. Dengan penerapan prinsip Satu Data Indonesia yang optimal, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, mempercepat pembangunan, serta

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan di daerah.

m) Persandian

Urusan persandian ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan kebijakan pemantapan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pengelola administrasi daerah, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah dan peningkatan pengendalian serta pengawasan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Tugas dan fungsi persandian di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan persandian

Tabel 2. 183
Tingkat Keamanan Informasi

Uraian	2020	2021	2023	2023	2024
Tingkat keamanan Infromasi	N/A	20%	2,46%	50,3876 %	91,9380 %

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Mojokerto 2024

Indeks Keamanan Informasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan ketahanan sistem informasi suatu organisasi atau negara terhadap ancaman siber. Di Indonesia, indeks ini mengacu pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), serta peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), termasuk terkait manajemen Risiko keamanan sistem elektronik. Salah satu alat ukur yang digunakan adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang dikembangkan oleh BSSN, yang menilai kesiapan suatu organisasi dalam menerapkan keamanan informasi berdasarkan standar ISO 27001. Indeks ini mengevaluasi aspek kebijakan keamanan informasi, manajemen Risiko, perlindungan data, serta pemantauan dan evaluasi keamanan sistem.

Di tingkat nasional, Indonesia juga berpartisipasi dalam Indeks Keamanan Siber Nasional serta *Global Cybersecurity Index* (GCI) yang diterbitkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) guna mengukur tingkat keamanan siber secara global berdasarkan aspek hukum, kapasitas teknis, kerja sama internasional, serta pengembangan

sumber daya manusia. Penerapan indeks keamanan informasi sangat penting bagi sektor pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan infrastruktur kritis guna memastikan keamanan data dan transaksi elektronik. Salah satu contoh penerapan di tingkat daerah adalah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang berupaya meningkatkan keamanan sistem informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui koordinasi dengan BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kabupaten Mojokerto menerapkan kebijakan keamanan informasi, memperkuat enkripsi data, serta meningkatkan kesadaran aparatur sipil negara (ASN) terhadap ancaman siber. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keamanan data pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital agar tetap terjaga dari serangan siber dan kebocoran informasi.

n) **Kebudayaan**

Kabupaten mojokerto mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah grup kesenian yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Peningkatan ini berkaitan dengan beragam jenis kegiatan seni dan budaya di masyarakat seperti wayang kulit, ludruk, orkes melayu, campursari, kuda lumping, bantengan dan sebagainya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya untuk menampung apresiasi masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pelestarian budaya setempat. Selain pada bidang kesenian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendukung dalam pelaksanaan kegiatan olahraga.

Tabel 2. 184
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Gedung Kesenian	unit	1	1	1	1	1
Jumlah Inventarisasi dan Dokumentasi Kelompok Budaya	kelompok	24	24	24	24	24
Jumlah Fasilitasi Pergelaran Budaya	kali	2	2	2	2	1
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah	kali	5	35	8	5	1
Jumlah Group Kesenian	group	273	197	394	394	315
Kesenian Tradisional	jenis	365	34	-	22	315
Cagar Budaya	unit	46	46	20	120	40
Permuseuman	buah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya	kali	4	35	8	5	3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	unit	46	69	3	-	3
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	buah	-	49	-	-	-
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu		-	-	2	2	2

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto 2024

Dari segi fasilitas dan infrastruktur, jumlah Gedung Kesenian stagnan di angka satu unit, menandakan belum adanya peningkatan dalam pembangunan sarana kesenian. Selain itu, upaya pelestarian budaya melalui inventarisasi kelompok budaya tetap berjalan dengan 24 kelompok per tahun, tetapi jumlah cagar budaya mengalami ketidakstabilan, dengan lonjakan drastis dari 20 unit di 2022 menjadi 120 unit di 2023, lalu turun kembali menjadi 40 unit di 2024. Demikian pula dengan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang mengalami penurunan signifikan, dari 69 unit pada 2021 menjadi hanya 3 unit pada 2024.

Dalam penyelenggaraan seni dan budaya, terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan festival dan pertunjukan budaya. Jumlah festival seni daerah mencapai puncaknya pada 2021 dengan 35 kali penyelenggaraan, tetapi menurun drastis hingga hanya satu kali pada 2024. Hal serupa terjadi pada jumlah event seni dan budaya yang sempat melonjak tetapi kembali turun drastis di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, jumlah grup kesenian mengalami peningkatan signifikan setelah sempat menurun, meskipun masih membutuhkan dukungan lebih lanjut untuk keberlanjutannya. Dari segi revitalisasi dan pengelolaan cagar budaya, jumlah karya budaya yang direvitalisasi hanya tercatat pada 2021, sedangkan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu baru dimulai pada 2022 dan stagnan di angka dua unit hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya belum berjalan secara konsisten.

Berdasarkan temuan ini, ada beberapa permasalahan utama yang perlu diperbaiki, termasuk ketidakstabilan program dan anggaran, minimnya pembangunan infrastruktur budaya, penurunan jumlah event budaya, serta lemahnya keberlanjutan dalam upaya pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan, terutama dalam pendanaan dan program kebudayaan agar tidak terjadi fluktuasi drastis dari tahun ke tahun. Selain itu, peningkatan fasilitas budaya, penetapan festival seni sebagai agenda tahunan yang konsisten, serta perencanaan yang lebih matang dalam perlindungan cagar budaya menjadi langkah penting untuk memastikan sektor kebudayaan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku seni.

Tabel 2. 185
Indikator Kinerja Kunci Urusan Kebudayaan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Terlestarikannya Cagar Budaya	1,93%	100	5,27%	100,00%	100%%

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto 2024

Berdasarkan data indikator kinerja urusan kebudayaan tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Mojokerto mengalami

peningkatan yang signifikan. Setelah capaian awal yang rendah pada tahun 2020, terjadi lompatan besar pada tahun 2021 hingga mencapai 100%, yang kemudian sempat menurun pada 2022, namun kembali stabil di angka maksimal 100% pada tahun 2023 dan 2024. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku seni dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya daerah.

Tabel 2. 186
Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Mojokerto						
Nama Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Wayang Kulit	Organisasi	37	23	41	41	45
Ludruk	Organisasi	6	8	11	11	8
Orkes Melayu	Organisasi	115	65	145	145	137
Qosidah Modern	Organisasi	-	3	1	1	7
Campursari	Organisasi	20	25	46	46	48
Kuda Lumping	Organisasi	23	14	47	47	38
Bantengan	Organisasi	30	21	43	43	53
Pencak Silat	Organisasi	9	9	13	13	12
Sanggar Seni	Organisasi	7	4	5	5	8
Band	Organisasi	-	-	-	0	3
Elektone	Organisasi	18	15	25	25	25
Reog	Organisasi	1	1	4	4	2
Sholawat modern	Organisasi	-	1	-	0	
Karawitan	Organisasi	4	4	7	9	8
Layar Tancap	Organisasi	-	-	-	0	
MC	Organisasi	-	-	-	0	
Waranggono	Organisasi	-	-	-	0	
Event Organizer	Organisasi	-	1	-	0	
Musik Humor	Organisasi	3	2	4	4	
Rock dangdut	Organisasi	-	-		0	
Pramuseni	Organisasi	-	1		0	
Tradisional Kombang	Organisasi	-	-		0	
Jumlah		273	197	392	394	394

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Mojokerto 2024

Analisis kinerja atas seni budaya dilakukan terhadap indikator – indicator jumlah group kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada fokus seni budaya dan olahraga :

Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No	Capaian Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah group kesenian	365	387	392	394	315
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga	276	317	316	299	317
4	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto 2024

Kebudayaan dinilai sebagai salah satu indikator yang menentukan nilai kebergamaan suatu daerah. Potensi Kabupaten Mojokerto cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kesenian di Kabupaten Mojokerto, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat serta kreativitas seniman dan seniwati.

o) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang mempunyai banyak koleksi buku, map, hasil seni, CD dan lain sebagainya. Perpustakaan dilaksanakan untuk membudayakan gemar membaca di lingkup masyarakat. Penyelenggaraan perpustakaan juga difungsikan untuk meningkatkan kecerdasan kehidup masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak atau karya rekam. Ukuran keberhasilan urusan perpustakaan menggunakan indikator jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Peningkatan kualitas pelayanan informasi dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan pemasyarakatan minat baca, hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengetahuan, informasi minat baca masyarakat. Dengan keberhasilan urusan perpustakaan yang ditunjukkan oleh beberapa capaian indikatornya telah mencapai target, maka tujuan dan sasaran urusan perpustakaan tahun 2019-2023 ini bisa terwujud, hal ini tercapai karena dukungan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 187
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1.	SD	613	413	415	415	415
2.	MI	201	198	202	202	202
3.	SMP	213	124	125	125	250
4.	MTs	83	83	84	84	168
5.	SMA	88	40	40	39	78
6.	MA	48	48	48	48	96
7.	SMK	64	40	40	61	122
8.	Perpustakaan Keliling	3	3	3	3	3
9.	Instansi Pemerintah	3	3	2	3	6
10	Perguruan Tinggi	13	17	17	14	24
11	Umum	304	304	304	304	304
12	Perpustakaan Desa	82	82	82	82	82

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	Penerima Bantuan					
Jumlah		1.715	1.355	1.362	1.380	1.750

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

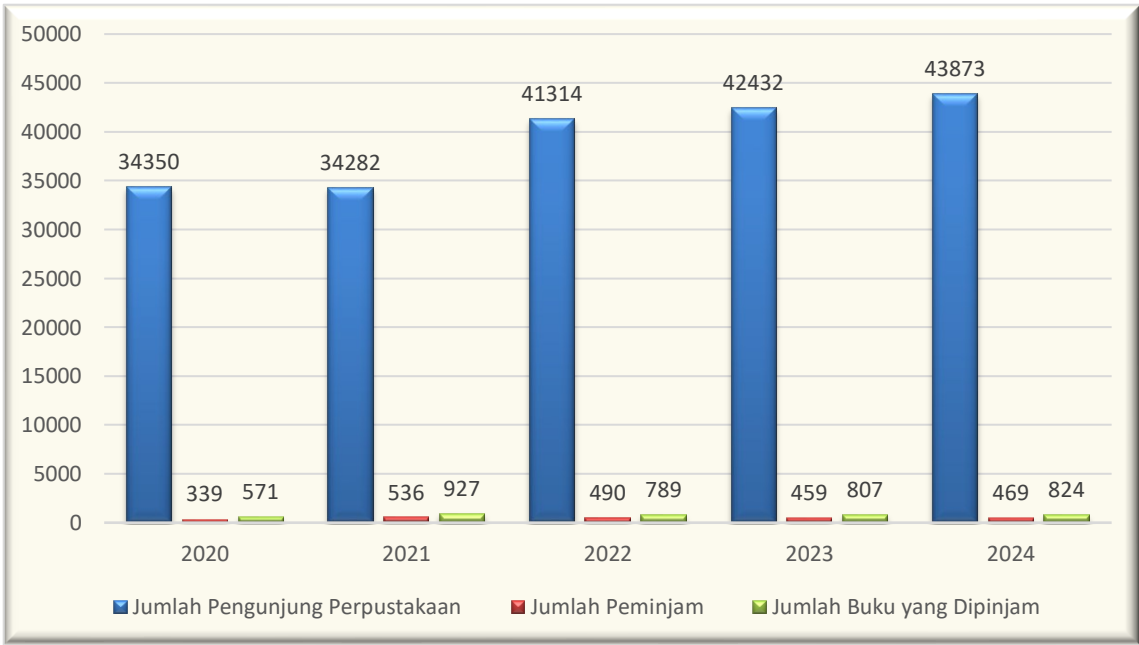
Jumlah perpustakaan pada tahun 2019-2023 ada penambahan pada sekolah-sekolah. Sedangkan Perpustakaan Desa Penerima Bantuan tetap sebanyak 82 perpustakaan. Perpustakaan Keliling 3 Pos, sedangkan untuk instansi pemerintah ada penambahan menjadi 6 pada tahun 2023. Untuk perpustakaan umum masih tetap pada 5 tahun terakhir sebanyak 304 perpustakaan.

Tabel 2. 188
Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2019-2023

Jenis Buku	Satuan	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Buku Non Fiksi	Judul	10.059	10.463	13.921	14,168	14.730
	Eksemplar	21.141	21.758	24.950	25,335	26.200
Buku Referensi	Judul	625	645	645	655	660
	Eksemplar	994	1.014	1.014	1,024	1.030
Buku Fiksi	Judul	7.401	8.075	8.261	8,635	8.900
	Eksemplar	9.821	11.886	12.047	13,144	13.850

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tahun 2019-2023 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya baik dari jenis buku non fiksi, buku referensi maupun buku fiksi.



Gambar 2. 47 Kegiatan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tahun 2020-2024 jumlah pengunjung perpustakaan terus mengalami peningkatan, sedangkan untuk peminjam maupun buku yang dipinjam cenderung mengalami fluktuatif.

Tabel 2. 189
Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Aspek Bidang	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan	Pemustaka	34.350	34.282	41.314	42.432	43.873
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,068	0,068	0,0951	0,0951	0,0951
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eksemplar	18.085	19.183	24.950	35.601	33.553
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	27	27	27	27	25
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Daerah	Eksemplar	31.956	34.658	35.317	35.601	33.553
Jumlah Perpustakaan (Instansi Pemerintah)	Unit	2	3	3	3	3

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 190
Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	63,64	65,9	66,6	66,98
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	12,14	13,24	72,12	63,70

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data indikator kinerja kunci urusan perpustakaan tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2021 hingga 2024, yakni dari 63,64 menjadi 66,98. Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023 sebesar 72,12, namun menurun kembali menjadi 63,70 pada tahun

2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun minat baca masyarakat terus meningkat, pembangunan literasi secara menyeluruh masih memerlukan penguatan agar dapat lebih konsisten

p) Kearsipan

Arsip bukan hanya sekedar hasil administrasi negara tetapi merupakan rekaman kegiatan sekaligus bukti akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan daerah. Arsip merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan sebagai bentuk pengorganisasian informasi guna mencapai tujuan dalam proses pembangunan. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan medis sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah terlaksana dengan baik, karena dukungan dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana kearsipan dan Pengadaan buku, rak buku dan box arsip. Demikian pula dengan Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sudah seluruh desa/kelurahan yang berjumlah 304 desa/kelurahan, yang juga termasuk pengelolaan arsip secara baku. Meningkatnya pemahaman kearsipan baik intern Pemerintah Daerah maupun masyarakat, mendorong terciptanya penataan arsip yang baik. Peningkatan SDM Pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pembinaan dan praktek pengelolaan arsip yang dalam tahun 2019 tidak ada kegiatan llau di tahun 2020 sebanyak 15 kegiatan, di tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 56 kegiatan dan terus berlanjut sampai tahun 2024.

Tabel 2. 191
Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembinaan dan Praktek Pengelolaan Arsip	SKPD	15	56	56	56	56

Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 192
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Instansi	2020	2022		2023		2024	
	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
Dinas Pendidikan	Baik	40,16	CC (Kurang)	60,37	B (Baik)	60,37	B (Baik)
Dinas Kesehatan	Baik	51,54	CC (Kurang)	60,38	B (Baik)	60,38	B (Baik)
RSUD Prof Dr. Soekandar	Baik	49,55	C (Kurrang)	62,89	B (Baik)	62,89	B (Baik)
RSUD RA. Basoeni	Baik	55,93	CC (Kurang)	62,08	B (Baik)	62,08	B (Baik)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baik	51,67	CC (Kurang)	60,01	B (Baik)	60,01	B (Baik)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Baik	34,5	C (Kurang)	61,61	B (Baik)	61,61	B (Baik)

Instansi	2020	2022		2023		2024	
	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
Permukiman dan Perhubungan							
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baik	39,04	C (Kurang)	60,05	B (Baik)	60,05	B (Baik)
Satuan Polisi Pamong Praja	Baik	42,03	C (Kurang)	60,3	B (Baik)	60,3	B (Baik)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Baik	40,6	C (Kurang)	60,15	B (Baik)	60,15	B (Baik)
Dinas Sosial	Baik	46,84	C (Kurang)	61,94	B (Baik)	61,94	B (Baik)
Dinas Tenaga Kerja	Baik	62,31	B (Baik)	60,86	B (Baik)	60,86	B (Baik)
Dinas Pangan dan Perikanan	Baik	38,39	C (Kurang)	60,33	B (Baik)	60,33	B (Baik)
Dinas Lingkungan Hidup	Baik	52,91	CC (Cukup)	61,8	B (Baik)	61,08	B (Baik)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baik	70,36	BB (Sangat Baik)	63,35	B (Baik)	82,82	A (Memuaskan)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baik	28,79	D(Sangat Kurang)	60,26	B (Baik)	60,26	B (Baik)
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Baik	56,26	CC (Cukup)	60,19	B (Baik)	60,19	B (Baik)
Dinas Komunikasi dan Informatika	Baik	26,17	D (Sangat Kurang)	60,04	B (Baik)	60,04	B (Baik)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Baik	56,22	CC (Cukup)	62,36	B (Baik)	62,36	B (Baik)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baik	84,73	A (Memuaskan)	60,61	B (Baik)	60,61	B (Baik)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Baik	84,73	A (Memuaskan)	85,22	A (Memuaskan)	88,16	A (Memuaskan)
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Baik	37,39	C (Kurang)	60,37	B (Baik)	60,8	B (Baik)
Dinas Pertanian	Baik	42,03	C (Kurang)	60,9	B (Baik)	66,39	B (Baik)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Baik	53,38	CC (Cukup)	61,08	B (Baik)	61,08	B (Baik)
Bagian Perencanaan dan Keuangan	Baik	68,22	B (Baik0	60,71	B (Baik)	77,35	BB (Sangat Baik)
Bagian Umum	Baik	71,44	BB (Sangat Baik)	73,39	BB (Sangat Baik)	84	A (Memuaskan)
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Baik	58,3	CC (Cukup)	68,28	B (Baik)	79,03	BB (Sangat Baik)
Bagian Pemerintahan	Baik	55,85	CC (Cukup)	60,69	B (Baik)	60,69	B (Baik)
Bagian Hukum	Baik	81,41	A (Memuaskan)	75,43	BB (Sangat Baik)	85,37	A (Memuaskan)

Instansi	2020	2022		2023		2024	
	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
Bagian Administrasi Pembangunan	Baik	55,85	CC (Cukup)	61,35	B (Baik)	61,35	B (Baik)
Bagian Organisasi	Baik	75,22	BB (Sangat Baik)	61,03	B (Baik)	61,03	B (Baik)
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Baik	38,46	C (Kurang)	60,07	B (Baik)	60,07	B (Baik)
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Baik	67,22	B (Baik)	60,07	B (Baik)	60,07	B (Baik)
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baik	57,47	CC (Cukup)	61	B (Baik)	61	B (Baik)
Sekretariat DPRD	Baik	34,34	C (Kurang)	63,82	B (Baik)	73,93	BB (Sangat Baik)
Kecamatan Sooko	Baik	22,07	D (Sangat Kurang)	63,4	B (Baik)	63,04	B (Baik)
Kecamatan Trowulan	Baik	32,51	C (Kurang)	63,4	B (Baik)	63,04	B (Baik)
Kecamatan Puri	Baik	38,54	C (Kurang)	61,08	B (Baik)	61,08	B (Baik)
Kecamatan Bangsal	Baik	36,49	C (Kurang)	60,56	B (Baik)	60,56	B (Baik)
Kecamatan Gedeg	Baik	27,3	D (Sangat Kurang)	63,61	B (Baik)	63,61	B (Baik)
Kecamatan Kemlagi	Baik	30,53	C (Kurang)	60,45	B (Baik)	60,45	B (Baik)
Kecamatan Jetis	Baik	30,63	C (Kurang)	63,89	B (Baik)	63,89	B (Baik)
Kecamatan Dawarblandong	Baik	28,03	D (Sangat Kurang)	60,45	B (Baik)	60,45	B (Baik)
Kecamatan Mojosari	Baik	25,08	D (Sangat Kurang)	60,24	B (Baik)	60,24	B (Baik)
Kecamatan Pungging	Baik	47,01	C (Kurang)	60,63	B (Baik)	60,63	B (Baik)
Kecamatan Ngoro	Baik	29,27	D (Sangat Kurang)	60,45	B (Baik)	60,45	B (Baik)
Kecamatan Kutorejo	Baik	17,52	D (Sangat Kurang)	61,69	B (Baik)	61,69	B (Baik)
Kecamatan Dlanggu	Baik	29,79	D (Sangat Kurang)	60,24	B (Baik)	60,24	B (Baik)
Kecamatan Gondang	Baik	28,16	D (Sangat Kurang)	62,19	B (Baik)	62,19	B (Baik)
Kecamatan Jatirejo	Baik	27,35	D (Sangat Kurang)	60,13	B (Baik)	60,13	B (Baik)
Kecamatan Trawas	Baik	23,23	D (Sangat Kurang)	63,68	B (Baik)	63,68	B (Baik)
Kecamatan Pacet	Baik	21,32	D (Sangat Kurang)	61,02	B (Baik)	61,02	B (Baik)
Kecamatan Mojoanyar	Baik	10,59	D (Sangat Kurang)	60,24	B (Baik)	60,24	B (Baik)
Inspektorat	Baik	57,35	CC (Cukup)	73,17	BB (Sangat Baik)	83,13	A (Memuaskan)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baik	64,93	B (Baik)	65,99	B (Baik)	77,35	A (Memuaskan)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baik	68,49	B (Baik)	72,77	BB (Sangat Baik)	83,27	A (Memuaskan)
Badan Pendapatan Daerah	Baik	27,48	D (Sangat Kurang)	61,18	B (Baik)	71,67	BB (Sangat Baik)
Badan Kepegawaian	Baik	58,27	CC (Cukup)	75,56	BB (Sangat Baik)	82,23	A (Memuaskan)

Instansi	2020	2022		2023		2024	
	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
Pendidikan dan Pelatihan					Baik)		

Sumber:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten MojokertoTahun 2024

Analisis hasil monitoring dan evaluasi bidang kearsipan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan kearsipan di berbagai instansi. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak instansi yang memperoleh predikat C (Kurang) dan D (Sangat Kurang), tetapi pada 2023 hampir semua instansi mengalami perbaikan dengan mayoritas memperoleh kategori B (Baik). Salah satu indikator perbaikan terlihat pada Dinas Pendidikan, yang mengalami peningkatan dari CC (Kurang) pada 2022 menjadi B (Baik) pada 2023 dengan nilai 60,37. Dinas Kesehatan, RSUD Prof. Dr. Soekandar, dan RSUD RA. Basoeni juga menunjukkan tren positif dengan perbaikan ke kategori B (Baik). Selain itu, beberapa instansi seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Bagian Hukum tetap mempertahankan predikat yang sangat baik (BB atau A).

Kenaikan yang paling mencolok terjadi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sooko, Trowulan, Puri, Bangsal, dan Gedeg, yang sebelumnya berada di kategori D (Sangat Kurang), tetapi berhasil meningkat hingga kategori B (Baik) pada 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan upaya dalam tata kelola kearsipan di tingkat kecamatan. Namun, masih ada beberapa instansi yang mengalami sedikit penurunan nilai, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sebelumnya mendapatkan A (Memuaskan) pada 2022, tetapi turun ke B (Baik) pada 2023.

Dalam rangka meningkatkan penataan arsip pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke beberapa kecamatan dengan sampel beberapa desa/kelurahan serta Instansi yang hasilnya rata-rata dalam kategori baik.

Tabel 2. 193
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	%	79,43	74,27	81,85	86,42	82,95
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	%	5,35	61	61	70	72
Jumlah OPD yang Menerapkan Standarisasi Pengelolaan Arsip	unit	34	34	34	40	43
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	dokumen	5,39	5,39	5,39	6,2	6,5
Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	kegiatan	34	34	34	56	56

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Analisis capaian kinerja urusan kearsipan Kabupaten Mojokerto selama periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam berbagai aspek pengelolaan arsip.

Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem tata kelola arsip yang lebih baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu indikator utama adalah Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan, yang mengalami kenaikan dari 79,43% pada 2020 menjadi 82,95% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Mojokerto semakin baik setiap tahunnya, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada 2022 ketika nilai audit naik dari 74,27% menjadi 81,85%, dan terus meningkat pada 2023. Selain itu, Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku juga mengalami lonjakan signifikan dari 5,35% pada 2020-2022 menjadi 61% pada 2021 dan 72% pada 2024. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak perangkat daerah yang menerapkan standar baku dalam pengelolaan arsip, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam dokumentasi administrasi pemerintahan. Dari segi jumlah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip juga meningkat, dari 34 unit pada 2020-2022 menjadi 43 unit pada 2024. Peningkatan ini berkontribusi pada sistem pengelolaan arsip yang lebih sistematis dan terstruktur di lingkungan pemerintahan daerah. Jumlah pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah juga mengalami pertumbuhan, dari 5,39 dokumen pada 2020-2022 menjadi 6,5 dokumen pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dalam hal pencatatan dan penataan arsip daerah, yang berkontribusi pada transparansi dan efisiensi kerja pemerintahan. Sementara itu, penerapan pengelolaan arsip secara baku juga menunjukkan kemajuan signifikan, dari hanya 34 kegiatan pada 2020 menjadi 56 kegiatan pada 2024¹. Lonjakan ini menunjukkan adanya kesadaran dan upaya yang lebih kuat dalam menerapkan sistem pengelolaan arsip yang terstandarisasi di berbagai sektor. Capaian kinerja urusan kearsipan di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang sangat baik dalam lima tahun terakhir. Peningkatan nilai audit, jumlah OPD yang menerapkan standar pengelolaan arsip, serta peningkatan dalam pendataan dan penataan dokumen menunjukkan bahwa tata kelola arsip semakin membaik. Ke depan, upaya harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku guna mencapai efisiensi administrasi yang lebih optimal.

Tabel 2. 194
Indikator Kinerja Kunci Urusan Kearsipan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	29.358	176.890	177,816,25	750.008	322,144,25

¹

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	-	-	650	687

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data indikator kinerja kunci urusan kearsipan tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas dan pertanggungjawaban nasional, dengan kenaikan dari 29.358 pada tahun 2020 menjadi 750.008 pada tahun 2023, meskipun menurun kembali menjadi 322.144,25 pada tahun 2024. Sementara itu, indikator keberadaan dan keutuhan arsip mulai terdata pada tahun 2023 dan menunjukkan tren positif, meningkat dari 650 menjadi 687 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola kearsipan sebagai fondasi penting untuk mendukung akuntabilitas, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan konsistensi dalam pengelolaannya.

c. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sektor kelautan dan perikanan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan secara intensif, efisien dan terintegrasi antara sentra produksi budidaya dan tangkap dengan pengolahan dan pemasaran hasil sehingga menjadi Kawasan ekonomi unggulan daerah yang berdampak terhadap peningkatan nelayan dan pembudidaya.

Capaian target indikator sasaran bidang perikanan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2020 - 2024 sebagaimana terlihat dari tabel capaian sebagai berikut:

Tabel 2. 195
Capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pembinaan usaha budidaya ikan	-	-	100	100	100
2.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari kolam	1.217.360	1.416.500	1.557.200	1.751.699	1.750.904

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari keramba	420	1.800	2.300	3.199	4640
4.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari waduk	68,9	44,55	58,72	59,00	71,8
5	Frekuensi sosialisasi konsumsi ikan produksi perikanan	18	18	18	18	18

Sumber:Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian indikator kinerja bidang perikanan Kabupaten Mojokerto untuk periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek. Salah satu yang menonjol adalah jumlah produksi ikan konsumsi dari kolam yang terus meningkat setiap tahunnya, dari 1.217.360 kg pada 2020 menjadi 1.750.904 kg pada 2024. Peningkatan serupa juga terjadi pada produksi ikan konsumsi dari keramba, yang mengalami lonjakan pesat dari 420 kg pada 2020 menjadi 4.640 kg pada 2024, menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang semakin efektif. Di sisi lain, produksi ikan dari waduk menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil, meskipun tetap ada peningkatan kecil dari 68,9 kg pada 2020 menjadi 71,8 kg pada 2024. Aspek persentase pembinaan usaha budidaya ikan baru dimulai pada 2022 dengan pencapaian 100% pada tahun tersebut hingga 2024, mencerminkan komitmen yang kuat dalam pengembangan usaha perikanan. Sementara itu, frekuensi sosialisasi konsumsi ikan tetap konsisten pada angka 18 setiap tahun, menunjukkan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan. Kinerja bidang perikanan Kabupaten Mojokerto selama periode ini menunjukkan progres yang baik, dengan perhatian yang terus meningkat pada pengembangan usaha dan produksi perikanan. Secara umum capaian kinerja bidang perikanan telah memenuhi target hanya target untuk produksi ikan konsumsi dari keramba yang tidak mencapai target yaitu sebesar 59%.

Tabel 2. 196
Indikator Kinerja Kunci Urusan Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) (dalam Kilogram)	1.372.580	1.584.100	1.719.720	1.688.365	1.786.410

Sumber:Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data indikator kinerja kunci urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Mojokerto tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa total produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya, menunjukkan tren peningkatan secara umum. Hal ini mencerminkan pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan yang cukup stabil serta adanya

upaya berkelanjutan dalam meningkatkan hasil produksi perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Adapun beberapa program yang dilakukan pada urusan bidang perikanan yaitu:

1) Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi benih ikan baik di UPR maupun BBI dan peningkatan produksi budidaya ikan, perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2020-2024 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 197
Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024

Kegiatan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah produksi benih UPR	Ekor	3.440.000	5.155.000	5.395.000	6.364.500	7.545.000
Jumlah BBI	Unit	1	1	1	1	1
Jumlah produksi benih BBI	Ekor	3.003.070	3.152.400	3.281.330	3.484.030	860.000
Produksi Ikan di Kolam	ton	.,217,360	1.416,500	1.557,200	1.752,000	1750,9
Produksi Ikan di Karamba Tancap	ton	-	1,8	2,3	2,3	4,64

Sumber: Dinas Pangan & Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian produksi perikanan budidaya Kabupaten Mojokerto untuk periode 2020-2024 menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa indikator kunci. Jumlah produksi benih UPR (Usaha Pembenihan Rakyat) mengalami lonjakan signifikan, dimulai dari 3.440.000 ekor pada 2020 dan terus meningkat hingga mencapai 7.545.000 ekor pada 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam memperbanyak benih ikan untuk mendukung kegiatan budidaya. Jumlah BBI (Budi Daya Benih Ikan) tetap stabil pada angka 1 unit sepanjang periode, menunjukkan bahwa jumlah fasilitas atau sarana yang digunakan dalam produksi benih tetap tidak berubah. Di sisi lain, jumlah produksi benih BBI juga mengalami peningkatan meskipun tidak sebesar benih UPR, dimulai dari 3.003.070 ekor pada 2020 hingga mencapai 860.000 ekor pada 2024, meskipun ada penurunan tajam pada tahun terakhir yang patut menjadi perhatian. Dalam hal produksi ikan di kolam, ada tren peningkatan yang stabil dari 1.217,360 ton pada 2020 menjadi 1.750,9 ton pada 2024, meskipun terdapat penurunan kecil pada tahun 2023.

Sementara itu, produksi ikan di karamba tancap mengalami perkembangan yang baik, meningkat dari 0 pada 2020 menjadi 4,64 ton pada 2024, menunjukkan pemanfaatan metode budidaya baru yang semakin efektif. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi, capaian produksi perikanan budidaya menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan di sebagian

besar kegiatan, khususnya dalam pembenihan dan produksi ikan dari kolam dan karamba.

2) Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mojokerto, pada program ini Dinas Pangan dan Perikanan melakukan pembinaan pada nelayan di perairan umum untuk melakukan penangkapan yang ramah lingkungan. Adapun rincian capaian kinerja penangkapan ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 198
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024

No.	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi perikanan tangkap	156	165,8	160,22	168,34	170,51
2.	Cakupan binaan kelompok nelayan	11	14	21	21	50

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mojokerto untuk periode 2020-2024 menunjukkan tren yang stabil dengan sedikit peningkatan setiap tahunnya. Produksi perikanan tangkap dimulai pada 156 ton pada 2020 dan terus meningkat menjadi 170,51 ton pada 2024, meskipun ada sedikit penurunan pada 2022 (160,22 ton) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan yang stabil ini mencerminkan adanya keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap yang efektif dan peningkatan kapasitas nelayan dalam menghasilkan tangkapan ikan. Selain itu, cakupan binaan kelompok nelayan menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 11 kelompok pada 2020 menjadi 50 kelompok pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam pemberdayaan nelayan, dengan peningkatan jumlah kelompok yang dibina, yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan tangkap di masa mendatang. Berdasarkan data diatas, meskipun produksi perikanan tangkap menunjukkan pertumbuhan yang stabil, fokus pada pembinaan kelompok nelayan yang semakin berkembang dapat memperkuat kinerja perikanan tangkap di Kabupaten Mojokerto di masa depan.

3) Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Dengan kegiatan Peningkatan SDM, dan Kelembagaan Usaha Pokdakan. Pada kegiatan ini dilaksanakan penyusunan program penyuluh perikanan di 18 kecamatan. Melalui kegiatan ini pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan penyuluhan dapat terlaksana di kelompok pembudidaya ikan dan nelayan penangkapan ikan. Perkembangan kenaikan kelas kelompok perikanan tahun 2019-2023 seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 199
Perkembangan Kenaikan Kelas Kelompok Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Kelas/Kelompok	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pemula	Kelompok	142	142	142	136	136
Lanjut	Kelompok	-	-	-	-	-
Madya	Kelompok	40	52	52	50	50
Utama	Kelompok	-	-	-	-	-
Jumlah	Kelompok	182	194	194	186	186

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Perkembangan kenaikan kelas kelompok perikanan di Kabupaten Mojokerto antara 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam distribusi kelompok berdasarkan tingkat kemajuan mereka. Kelompok Pemula tetap stabil pada angka 142 kelompok dari 2020 hingga 2021, namun mengalami penurunan menjadi 136 kelompok pada 2023 dan 2024. Penurunan ini disebabkan oleh keberhasilan beberapa kelompok pemula yang berhasil berkembang, sehingga mereka tidak lagi tergolong pemula dan beralih ke kelas yang lebih tinggi. Sementara itu, Kelompok Madya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 40 kelompok pada 2020 menjadi 50 kelompok pada 2023 dan 2024, menunjukkan bahwa ada kemajuan dalam kualitas dan kapasitas kelompok-kelompok ini, yang berhasil naik kelas dari pemula ke madya. Kelompok madya yang stabil pada 50 kelompok menandakan adanya perkembangan yang signifikan dalam kapasitas kelompok perikanan di Kabupaten Mojokerto selama lima tahun terakhir

Jumlah kelas kelompok Lanjut tidak ada di tahun 2019-2023 kosong, hal ini disebabkan karena adanya perubahan indikator penilaian kelas kelompok sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I Nomor Kep.14/MEN/2013 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

4) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pada program ini tahun 2023 melakukan kegiatan sosialisasi/pembinaan kader GEMARIKAN 304 Desa/Kelurahan bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan, sehingga produksi perikanan dapat terserap di pasar domestik. Hal ini juga dapatmenumbuh kembangkan sentra sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Di samping itu Dinas Pangan dan Perikanan juga melakukan kegiatan promosi produk pada acara pameran pembangunan untuk memperkenalkan produk-produk hasil olahan perikanan, mengadakan lomba cipta menu masak ikan tingkat Kecamatan maupun Kabupaten guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan.

Gambaran di atas merupakan upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama jika dilihat dari aspek ketersediaan dan kerawanan, distribusi, serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Adapun upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam urusan pangan ini melahirkan prestasi. Di tingkat Baperwil Bojonegoro, Dinas dan Tim Penggerak PKK (Pokja III) Kabupaten Mojokerto meraih juara harapan II dalam Festival Makanan Khas Daerah. Tentu ini menjadi pemantik bagi kegiatan kegiatan berikutnya untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik. Secara umum, urusan pangan Kabupaten Mojokerto telah mampu melaksanakan prioritas daerah di tahun 2023 terutama dalam poin peningkatan ketahanan pangan serta kualitas dan keanekaragaman gizi masyarakat.

b) Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pariwisata dan kebudayaan jika dilihat dari segi letak dimana Kabupaten Mojokerto berada pada jalur poros Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertasusila), memberi peluang cukup besar untuk dijadikan destinasi wisata.

Tabel 2. 200
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6,33%	-98,79%	0.3670 %	547.92 %	107,63%
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-55,42%	-34,31%	99.450 %	43.3566 %	7,15%
Tingkat Hunian Akomodasi	5,89%	33,44%	31,62%	42.6807 %	42,18%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	N/A	3,08	0,37%	2.0370 %	2,03%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	N/A	0,43	0,918%	1.3259 %	3,74%

Sumber:Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang sangat fluktuatif dalam capaian kinerja sektor pariwisata, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat. Pada tahun 2020 dan 2021, kinerja sektor ini sangat tertekan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan perjalanan internasional maupun domestik, penutupan destinasi wisata, serta penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menjadi faktor penghambat utama yang menjelaskan penurunan drastis dalam pertumbuhan jumlah

wisatawan mancanegara (-98,79% pada 2021) dan perjalanan wisatawan nusantara (-55,42% pada 2020). Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan rendahnya kepercayaan wisatawan juga memperburuk kondisi pada saat itu.

Namun, sejak 2022, sektor pariwisata menunjukkan pemulihan signifikan. Faktor pendorong utama dalam proses ini mencakup pelonggaran kebijakan pembatasan perjalanan, program vaksinasi massal, peningkatan kepercayaan publik, serta promosi dan inovasi digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata. Upaya revitalisasi destinasi, peningkatan kualitas layanan akomodasi, serta penyelenggaraan event-event berskala lokal dan nasional turut mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan tingkat hunian akomodasi. Lonjakan pertumbuhan wisatawan mancanegara sebesar 547,92% pada 2023 dan kenaikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD hingga 3,74% pada 2024 menjadi indikator keberhasilan dari strategi-strategi tersebut. Meski demikian, masih terdapat tantangan atau faktor penghambat yang perlu diantisipasi. Beberapa di antaranya adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur antar daerah, keterbatasan anggaran promosi, serta kurangnya SDM pariwisata yang terlatih secara profesional. Selain itu, fluktuasi kondisi global seperti geopolitik dan krisis ekonomi juga berpotensi memengaruhi kestabilan kunjungan wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sektor ini secara berkelanjutan, perlu adanya sinergi lintas sektor, peningkatan investasi di bidang infrastruktur pariwisata, serta penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen destinasi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Tabel 2. 201
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pariwisata

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	6,33%	-100	13,80%	547,92%	107,63%
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-55,42%	-42,66	92,29%	43,36%	7,15%
Tingkat Hunian Akomodasi	5,89%	33,44%	31,63%	42,68%	42,18%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	N/A	3,08%	0,37%	2,04%	2,03%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	N/A	0,43%	0,92%	1,33%	3,74%

Sumber:Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Berdasarkan data indikator kinerja kunci urusan pariwisata Kabupaten Mojokerto tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata mengalami fluktuasi pascapandemi. Pertumbuhan wisatawan mancanegara sempat menurun pada 2021, namun naik tajam hingga 547,92% pada 2023, menunjukkan pemulihan dan peningkatan daya tarik

wisata daerah. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mengalami fluktuasi, dengan peningkatan tertinggi pada 2022 sebesar 92,29%, namun melambat hingga hanya 7,15% pada 2024. Tingkat hunian akomodasi terus menunjukkan tren positif sejak 2020, stabil di atas 40% sejak 2023. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB sempat menurun pada 2022 namun kembali meningkat dan stabil di kisaran 2% pada 2023 dan 2024, sedangkan kontribusinya terhadap PAD terus meningkat signifikan hingga mencapai 3,74% pada 2024. Data ini mencerminkan bahwa sektor pariwisata mulai pulih dan tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, meskipun masih memerlukan penguatan dalam konsistensi pertumbuhan dan diversifikasi destinasi

Obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Mojokerto berada di 93 lokasi dan berdasarkan kategori jenis destinasi terbagi dalam beberapa jenis potensi wisata, yaitu wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religi, serta wisata belanja dan kuliner seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 202
Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1.	Gunung Penanggungan	Trawas
2	Air Terjun Dlundung	
3	Air Terjun Desa Duyung	
4	Air Terjun Desa Kemendung	
5	Wisata Tubing Dlundung	
6	Wisata Hutan Pinus	
7	Camping area Dlundung	
8	Camping area Joloundo	
9	PPLH Seloliman	
10	Air Terjun Grenjengan	
11	Air Terjun Watu Gilang	
12.	Gunung Pundak	Pacet
13	Gunung Welirang	
14	Air Terjun Coban Cangu	
15	Air Terjun Coban Surodadu	
16	Air Terjun Coban Waru	
17	Air Terjun Coban Watu ondo / Kembar	
18	Air Terjun Coban watu gedek	
19	Air Terjun Coban Curah watu	

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
20	Air Terjun Watu lumpang	
21	Wisata Rafting	
22	Air Terjun Grenjengan	
23	Air Terjun Watu Adem	
24	Air Terjun Desa Bulak kunci	
25	Spot foto desa sendi	
26	Wisata Hutan Pinus	
27	Bumi Perkemahan Claket	
28	Area camping Desa Nogosari	
29	Pemandian Air Panas	
30	Puncak Watu jengger	Jatirejo
31	Air Terjun Tujuh Bidadari	
32	Air Terjun Coban Kabejan	
33	Wisata akar seribu	Gondang
34	Tubing akar seribu	
35	Goa Selopayung	
36	Wisata Edukasi Lembah Mbencirang	
37	Ekowisata Tanjungan	Kemlagi
38	Wana Wisata Watu Blorok	

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 203
Potensi Wisata Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Duyung Trawas Hill	Trawas
2	Fresh Green	
3	Joglo Park	Pacet
4	Pacet Mini Park	
5	Wisata Ubalan	
6	Claket Adventure Park	
7	Pacet Hills	
8	Petik strawberry	
9	Taman Kelinci	
10	Pemandian Balekambang	Gondang
11	Lembah Bencirang	
12	Waterpark Sooko	Sooko

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
13	Kolam renang rolak songo	Mojoanyar
14	Kolam renang Tirta anandiri	
15	Kolam renang MK Tirta	Ngoro
16	D & N waterland	
17	Kolam Renang BBB	Mojosari
18	Dewa Jembul (Desa Wisata Jembul)	Jatirejo
19	Wisata Desa Randugenengan	Dlanggu
20	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
21	MKP Brantas	Gedeg

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 204
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Edukasi dan Minat Khusus

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Kampung main Majapahit	Trowulan
2	Museum Majapahit	
3	Wisata Dayang Sumbi	Puri
4	PPLH Seloliman	Trawas
5	Kampung Organik Brenjonk	
6	Jalur Pendakian Puncak Gunung Penanggungan	
7	Perkebunan Organik Ashitaba dan Kopi	
8	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
9	Kampung Coklat Desa Randugenengan	
10	Lembah Mbencirang	Gondang
11	Wisata Trail Kawasan Hutan Watu Blorok	Jetis
12	TPA Belahan Tengah	Mojosari

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 205
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Sejarah dan Religi

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Kampung Majapahit	Trowulan
2	Budha Tidur	
3	Candi Brahu	
4	Candi Gentong	
5	Makam Siti Inggil	
6	Situs Watesumpak	

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
7	Makam Putricampa	
8	Makam Troloyo	
9	Situs Kedaton	
10	Gapura Wringin lawang	
11	Gapura Bajangratu	
12	Situs Watesumpak	
13	Petirtaan Tikus	
14	Candi Minakjinggo	
15	Situs kolam segaran	
16	Pendopo Agung	
17	Situs Kanal Air	
18	Petilasan Hayam wuruk	
19	Situs Lantai segi enam	
20	Makam Panjang	
21	Gapura Jedong	Ngoro
22	Situs Pasetran	
23	Candi Bangkal	
24	Candi Genting	
25	Situs Makam Mendhek	
26	Situs Klinterejo	Sooko
27	Petilasan Tribuna Tunggadewi	
28	Candi Kesimantengah	Pacet
29	Prasasti Petak	
30	Situs Goa Gembyang	
31	Temuan lencana girindrawardhana	
32	Jubel Waterleideng	
33	Situs Makam Krapyak	
34	Prasasti Rejoso	Gondang
35	Situs Kemasantani	
36	Situs Lindudewi	
37	Peninggalan Pabrik Kesono	
38	Situs Balekambang	
39	Situs Umpak Jabung	Jatirejo
40	Situs Makam Kiageng jabung	
41	Situs Makam Kunitir	
42	Candi Grinting	
43	Situs Watu Dakon	Pungging

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
44	Sumur gantung	Kemlagi
45	Situs Gapuro	
46	Situs Mojolebak	
47	Temuan Lencana Girindrawardhana	Kutorejo
48	Reco Lanang	Trawas
49	Candi Jolotundo	
50	Situs Kemasantani	
51	Candi Carik	
52	Candi Centong	
53	Candi Kelir	
54	Candi Kendalisodo	
55	Candi Lemari	
56	Candi Lurah	
57	Candi Meja	
58	Candi Naga	
59	Candi Penanggungan	
60	Candi Pendowo	
61	Candi Putri	
62	Candi Yudho	
63	Situs Balekambang	
64	Candi Kama I	
65	Candi Kama II	
66	Candi Kama III	
67	Situs Sumber Tiri	Mojosari
68	Makam Sayyid Mahmud Ibrahim	Puri
69	Situs Makam Tumenggung Prawirosono	Bangsar

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 206
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Pusat Oleh-oleh Kabupaten Mojokerto	Mojosari
2	Kampung Pengrajin Sepatu	Sooko
3	Kampung Pengrajin Cor Kuningan	Trowulan
4	Kuliner sambal wader	
5	PPST / Pusat Perkulakan Sepatu	

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
6	Kampung Krecek Rambak	Bangsals
7	Pusat Kuliner Sendi	Pacet
8	Coklat Majapahit	Dlanggu
9	Warung Desa	Trawas
10	UTC/UPC	
11	Arum Manis	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 207
Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 - 2024

Kecamatan	2023			2024		
	Jumlah			Jumlah		
	Hotel	Kamar	Tamu	Hotel	Kamar	Tamu
Pacet	4	159	12.812	5	189	13.962
Trawas	10	545	59.336	11	640	86.037
Pungging	1	36	3.217	1	36	3.760
Puri	1	65	14.996	2	204	46.796
Jumlah	16	805	90.361	19	1.069	150.555

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Perkembangan tingkat hunian hotel di Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren positif dari tahun 2023 ke 2024, dengan peningkatan jumlah hotel, kamar, dan tamu yang menginap. Pada tahun 2023, terdapat 16 hotel dengan 805 kamar, sementara pada 2024 jumlahnya meningkat menjadi 19 hotel dengan 1.069 kamar. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,75% dalam jumlah hotel dan 32,8% dalam jumlah kamar. Kecamatan yang mengalami penambahan hotel adalah Pacet, Trawas, dan Puri, sedangkan Kecamatan Pungging tetap dengan satu hotel yang ada. Selain peningkatan fasilitas, jumlah tamu yang menginap juga mengalami lonjakan signifikan. Pada tahun 2022, jumlah tamu tercatat sebanyak 90.361 orang, sedangkan pada 2023 meningkat menjadi 150.555 orang, atau naik sebesar 66,6%. Kecamatan Puri mencatat pertumbuhan tertinggi dalam jumlah tamu, dari 14.996 tamu pada 2022 menjadi 46.796 tamu pada 2023. Kecamatan Trawas juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, dari 59.336 tamu menjadi 86.037 tamu. Tren ini menunjukkan bahwa sektor perhotelan di Kabupaten Mojokerto terus berkembang, dan didorong oleh meningkatnya daya tarik wisata, peningkatan kualitas layanan, serta bertambahnya jumlah kamar dan hotel yang tersedia

c) Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan, pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Mojokerto yang didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan serta peternakan. Potensi sumber daya alam dan kondisi alam yang mendukung tersebut menjadikan dasar bagi Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto untuk membentuk sentra-sentra potensi komoditas pertanian dan perkebunan. Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman perkebunan serta ternak-ternak unggulan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi: Perencanaan Jalan Usaha Tani (JUT), Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT Cor), Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Pembangunan Dam Parit, dan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan. Urusan Pertanian juga didukung oleh bidang peternakan dan perkebunan, dimana Pemerintah mencanangkan Program UPSUS (Upaya Khusus) yang dilakukan dalam rangka mendukung terlaksananya Nawacita yaitu Swasembada Pangan. Untuk mendukung keberhasilan program ini, maka salah satunya melalui bantuan sarana dan prasarana.

Tabel 2. 208
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Palawija

Jenis Komoditi	2022			2023			2024		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/ Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/ Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/ Ha)
Padi	52.757,02	324.230,37	59,16	51.416,41	315.201,08	59,99	52.136	318.064,60	61,53
Jagung	27.959,47	242.084,56	77,02	30.014	249.434,96	77,27	33.563	264.019,21	74,02
Kedelai	939,57	1.622,79	14,31	1.075,15	1.778,30	16,54	849	1.402,45	16,53
Kacang tanah	529,04	321,75	17,07	497,75	713,68	14,34	533	859,84	16,14
Ubi kayu	479,74	13.183,65	271,56	391,57	10.205,57	260,64	322	8.217,46	254,92
Ubi jalar	2.578,83	89.256,85	366,14	1.744,50	61.256,47	351,14	1.507	54.271,19	360,24

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun anggaran 2024 Produksi Padi terus meningkat dari satu tahun sebelumnya. Diikuti dengan kenaikan pada produksi Jagung yang mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Produksi tanaman pangan lainnya seperti kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami fluktuasi selama periode 2022 hingga 2024. Sedangkan untuk perkembangan produktivitas tanaman sayur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 209
Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2022–2024

Jenis Komoditi	2022		2023		2024	
	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi	Luas Panen	Produksi
	(Ha)	(ton)	(Ha)	(ton)	(Ha)	(ton)
Bawang Daun	213	2.703,9	217.00	2.479.83	198	2.087,30
Kubis			13.00	334.00	31	735
Sawi	74	1363,1	69.00	710.00	84,4	1.332,7
Wortel			14.00	260.00	22	410
Cabe besar	39	407,335	43.50	355.39	29	451,24
Cabe kecil	3.879,5	8.031,028	3.243,00	6.904.33	3.476,7	7.971,94
Tomat	110	4172,25	79.00	3.995.86	104,50	6.091,33

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Realisasi tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran beberapa jenis tanaman mengalami peningkatan produksi dan produktivitas dari tahun sebelumnya, seperti tanaman bawang daun sawi, cabe kecil dan tomat. Sedangkan untuk jenis tanaman sayur seperti kentang, kubis, wortel, cabe besar, justru mengalami penurunan produksi dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup tinggi menjelang musim panen sehingga menyebabkan banyak tanaman yang busuk sebelum dipanen. Penurunan produksi tanaman sayuran juga disebabkan karena luas areal tanam yang berkurang, beralih ke tanaman lain yang lebih mempunyai nilai ekonomis tinggi. Untuk perkembangan produktivitas tanaman hias dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 210
Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias Tahun 2022 - 2024

Jenis Komoditi	2022			2023			2024		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)
Krisan	40.000	3.200.000	80	73.000	2.780.900	38,09	42.000	159.798	3,80
Mawar	2.500	9.000	3,6	12.500	109.000	8,72	500	1.800	3,60
Anggrek	1.340	57.140	42,64	2.675	74.100	27,70	2.049	90.917	44,37

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tanaman hias menunjukkan fluktuasi, dengan krisan dan mawar cenderung menurun, sedangkan anggrek relatif stabil dan kembali meningkat sehingga berpotensi menjadi komoditas unggulan. Adapun perkembangan produktivitas tanaman buah dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 2. 211
Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah Tahun 2022 - 2024

Jenis Komoditi	2022			2023			2024		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas

	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)
Alpukat	31.954	18.812,29	0,59	9.710,5	2.673,29	27,53	9.140	2.382	2,61
Mangga	509.252	228.093,29	0,45	207.269,83	23.216,54	11,20	127.622	9.295	0,73
Rambutan	88.609	12.036,85	0,14	30.181	2.821,59	1,34	33.502	654	0,20
Durian	61.479	22.479,75	0,37	28.043,5	2.103,21	7,50	20.115	1.561	0,78
Pisang	1.134.982	199.958,55	0,18	268.274,5	10.407,89	3,88	221.518	17.296	0,78
Salak	58.841	2.176,52	0,04	7.595,25	101,82	1,34	1.882	30	0,16
Kelengkeng	1.702	202,67	0,12	499,08	42,81	8,58	496	44	0,89
Manggis	0	0	0	105	1,58	1,50	130	2	0,02
Nangka	43.266	18.945,24	0,44	15.102,42	975,62	6,46	11.961	915	0,78
Jeruk	46.957	5.672,54	0,12	22.766,08	1.055,34	4,64	15.870	598	0,64

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara umum produksi buah mengalami fluktuasi pada tiga tahun terakhir, komoditas tersebut adalah buah alpukat, rambutan, durian, pisang, salak, nangka, dan jeruk. Sedangkan komoditi kelengkeng dan mangga mengalami penurunan. Satu-satunya komoditi yang mengalami peningkatan adalah buah mangga. Untuk perkembangan produktivitas tanaman obat dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2. 212
Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka

Jenis Komoditi	2022			2023			2024		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)
Jahe	297.385	411.863	1,38	262.291	337.762,8	1,29	31.011	67.762	2,18
Temulawak	60.267	95.192	1,58	35.027	121.516	3,47	5.212	18.195	3,49
Kencur	8.035	12.874	1,6	13.135	20.252,8	1,54	552	982	1,78
Kunyit	361.305	1.814.347	5,02	230.258	911.759,6	3,96	35.882	69.357	1,93
Laos	102.578	494.168	4,82	35.316	295.580	8,37	6.100	14.433	2,37

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara umum semua produksi tanaman biofarmaka mengalami fluktuasi. Untuk perkembangan produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2. 213
Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2023 - 2024

Jenis Komoditi	2023			2024		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)	(Ha)	(ton)	(Kw/Ha)
Kopi	235	330,52	1.544,88	333,10	330,60	1.931,14
Cengkeh	58,3	32,45	708,29	52,30	32,65	4.652,14
Kapuk	38	14,75	438,31	51	22,12	2.305,47
Tebu	5.622,04	502.686,38	88.366,37	6.402,58	527.911,11	81.237
Tembakau	354,27	3.880,56	10.906,25	659	10.078,20	15.293
Kakao	114,4	107,98	9.923,16	71,40	108,04	923,25

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Produk perkebunan mengalami peningkatan produktivitas tahun 2024. Tebu tetap menjadi komoditas terbesar dengan produksi tertinggi meski produktivitas sedikit menurun. Sementara itu, kakao cenderung stagnan dengan hasil relatif kecil dibandingkan komoditas lainnya. Kenaikan produksi tanaman tembakau terjadi, karena didukung dengan adanya program DBHCHT (cukai). Kenaikan produksi tersebut, karena didukung dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman kakao serta dikarenakan luas panen yang bertambah atau meningkat sehingga produksinya juga meningkat. Penurunan produksi tanaman perkebunan seperti kelapa, kapuk, dan tebu dikarenakan menurunnya luas areal tanam akibat alih fungsi lahan.

Melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak, dengan kegiatan: Pendataan Masalah Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemis, Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah, Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak, serta Operasionalisasi Laboratorium Keswan dan Puskesmas, telah dilakukan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2. 214
Perkembangan Pelayanan Kesehatan Hewan

Kegiatan	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Vaksinasi Ternak	ekor	9.071	15.500	60.250	103.765	129.355
Pengobatan	ekor	1.637	2.247	1.250	152.990	152.797
Pemeriksaan Penyakit Ternak	ekor	2.974.246	1.161.071	814.929	152.990	152.990

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Kesehatan hewan pada tahun 2023 mengalami peningkatan untuk vaksinasi ternak selama lima taun terakhir. Pelayanan kesehatan berupa pengobatan ternak terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2024, tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Pemeriksaan penyakit ternak menurun Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja bidang peternakan, di mana rincian indikator capaian kinerja bidang peternakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 215
Capaian Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024

Kegiatan	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Populasi						
Sapi potong	ekor	51.913	51.913	39.662	40.417	36.259
Sapi perah	ekor	2.284	2.284	1.302	1.346	1.371

Kegiatan	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kerbau	ekor	250	251	139	125	88
Kuda	ekor	230	192	108	94	170
Kambing	ekor	44.650	40.393	37.947	36.009	36.472
Domba	ekor	18.203	17.218	9.560	8.305	14.679
Babi	ekor	5.980	6.650	3.630	3.455	4.000
Kelinci	ekor	5.669	6.363	4.395	5.392	3.836
Ayam petelur	ekor	967.585	946.855	669.485	800.663	778.499
Ayam broiler	ekor	12.003.945	10.414.545	10.371.907	10.078.244	1.300.900
Ayam buras	ekor	632.837	678.463	616.770	649.402	392.861
Itik	ekor	320.353	323.968	299,517	292.801	336.542
Produksi						
Daging sapi	kg	933.221	926.566	986,244	998,326	50.871
Daging kambing	kg	433.735	349.537	325,317	311,314	42.000
Daging domba	kg	181.99	103.303	48,656	103,303	19.774
Daging ayam petelur	kg	373.868	285.791	0	285,791	35.199
Daging ayam broiler	kg	16.065.185	19.730.149	25.049.860	27.182.257	3.754.139
Daging ayam buras	kg	153.45	143.835	978.447	999.527	67.667
Telur ayam ras	butir	9.327.953	9.217.531	8.482.242	9.460.804	18.775
Telur ayam buras	butir	357.172	349.449	373,279	364,185	861.539
Telur itik	butir	2.300.510	2.273.137	2.135.746	2.124.976	222.609
Telur puyuh	butir	15.547	26.68	16,773	29,596	2.491
Produksi susu	ltr	4.485.400	4.376.326	3.214.227	3.262.490	4.176.591

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Untuk capaian indikator kinerja populasi pada jenis ternak hanya kelinci yang mengalami kenaikan disetiap tahun selama lima tahun terakhir, jenis ternak lain seperti kerbau, kuda, kambing, domba, dan babi mengalami penurunan. Beberapa jenis komoditi yang mengalami fluktuasi tetapi jumlahnya cenderung menurun pada tahun 2024 adalah sapi potong, sapi perah, ayam broiler, dan itik. Sedangkan untuk produksi, hampir seluruh ternak mengalami fluktuasi produksi, kecuali pada jenis daging ayam petelur yang mengalami penurunan dan jenis daging ayam broiler yang mengalami peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 tetapi data menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terjadi pada produksi daging ayam buras pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga tahun 2023.

Tabel 2. 216
Capaian Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020 - 2024

No.	Kegiatan	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peternak Rakyat	orang	90.750	91.500	91.825	92.256	92.556
	Perusahaan Peternakan :						
2	Ayam Petelur	RTP	24	20	20	20	21
3	Ayam Pedaging	RTP	12	12	12	12	12
4	Sapi Potong	RTP	1	2	2	2	3
5	Breeder	RTP	1	1	1	1	1
6	Babi	RTP	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Untuk capaian indikator kinerja keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peternakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 2020 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya disajikan rincian indikator capaian kinerja urusan pertanian pada tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 217
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Produktivitas pertanian per ha per tahun	Kw/Ha/Tahun	757,68	721,35	791.3336	759.6962	730.9311
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	314.	300,14	57,957	-82.2075	-81,79
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Ha	kw / ha	60,46	61,88	59,16	59.98	61,53
Jumlah Produksi Padi	ton	305.874,16	326.665,92	324.230,37	315.201,08	318.064,60
Jumlah Produksi Jagung	ton	155.838,81	182.002,99	242.084,56	249.434,96	264.019,21
Jumlah Produksi Kedelai	ton	1.263,50	1.739,65	1.622,79	1.778,30	1.402,45
Jumlah Kelompok Tani	kelompok	1.113	1.112	1.112	1.112	1.125
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	%	7,96	7,67	7,54	7,57	8,16
Produksi Sektor Pertanian (Sayur)	kw	9.534	592.598	670.7	18.670,00	28.941,78
Produksi Sektor Pertanian (Tanaman Hias)	tangkai	57.641	11.786	17.621	2.855.000,00	984.885
Produksi Sektor Pertanian (Buah)	kw	462.913	43.696	3.266.140	36,783.00	36.078.00
Produksi Sektor Pertanian (Biofarmaka)	kg	1.188.765	2.215.140,5	2.828.444	1.688.871,20	232.344,5
Padi	kw / ha	59,91	-	-	59.988	61,53
Jagung	kw / ha	51,45	61,88	59,16	77.269	74,02
Kedelai	kw / ha	1.263,50	63,01	77,02	16.540	16,53
Buah Mangga	kg / pohon	41	239,56	365,65	1.120,00	13.158

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Padi	ton	305.874,16	3	80	315.201,08	318.064,60
Jagung	ton	155.838,81	326.665,92	324.230,37	249.434,96	264.019,21
Kedelai	ton	1.263,50	182.002,99	242.084,56	1.778,30	1.402,45
Mangga	kwintal	176.335	15.26	22.48	232.165,43	9.295
Kopi	ton	158,4	2,3	2,3	330,52	330,60
Cengkeh	ton	26,7	168,9	0	32,45	32,65
Kapukrandu	ton	35,6	28,25	28,25	876,62	22,12
Telur	ton	2.673.229	21.539	27.389	1.836,23	12.426.357
Susu	ton	4.485.400	11.867	11.008	608,57	4.176.591
Sapi Potong	ekor	51.913	4.376	3.214	36.210,00	36.259
Sapi Perah	ekor	2.284	51.913	39.662	1.243,00	1.371
Kambing	ekor	44.65	2.284	1.302	34.889,00	36.472
Domba	ekor	18.203	40.393	37.947	11.895,00	14.679
Ayam Petelur	ekor	967.585	17.218	9.56	650.540,00	778.499
Ayam Pedaging	ekor	12.003.945	946.855	669.485	1.280.900,00	1.300.900
Itik	ekor	320.353	10.414.545	10.371.907	254.367,00	336.542

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 218
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Produktivitas pertanian per ha per tahun (Ton/Ha)	7,577	7,214	7,913	7,597	7,309
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	13,08%	300,15%	57,96%	-82,21%	-81,79%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Produktivitas pertanian per ha mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024, dengan angka tertinggi pada 2022 sebesar 7,913 ton/ha, namun cenderung menurun kembali pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 dengan persentase negatif yang tinggi, menandakan keberhasilan pengendalian penyakit dan peningkatan kesehatan hewan

d) Perdagangan

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global.

Berdasarkan data yang ada, terlihat adanya beberapa dinamika yang cukup menarik dalam aspek atau bidang urusan terkait ekspor dan pengembangan pasar serta usaha informal. Jumlah sosialisasi kebijakan ekspor menunjukkan kegiatan yang cukup terbatas, hanya tercatat satu kali pada 2021 dan dua kali pada 2022, tetapi tidak ada kegiatan yang tercatat pada 2023 dan 2024, yang mengindikasikan berkurangnya fokus pada sosialisasi kebijakan ekspor dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, ekspor bersih perdagangan mengalami lonjakan yang sangat besar pada 2023, dengan nilai mencapai US\$70,47 miliar, yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nilai ekspor pada 2024 tercatat sebesar US\$74,52 miliar, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil dalam sektor ekspor. Hal ini menandakan adanya peningkatan yang signifikan dalam volume ekspor meskipun jumlah sosialisasi kebijakan ekspor tidak meningkat tajam.

Pada sisi revitalisasi pasar, jumlah pasar yang telah direvitalisasi menunjukkan peningkatan yang baik dari 6 pasar pada 2020 menjadi 14 pasar pada 2022, meskipun jumlahnya menurun menjadi 2 pasar pada 2024. Penurunan ini dapat mencerminkan berkurangnya fokus atau kendala dalam melakukan revitalisasi pasar pada tahun-tahun terakhir.

Jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan) mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan penurunan tajam dari 54.915 unit pada 2020 menjadi 21.056 unit pada 2024. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan dalam jumlah alat pengukuran yang beredar, yang berhubungan dengan pembatasan aktivitas atau perubahan kebijakan dalam pengawasan alat pengukuran.

Adapun cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal relatif stabil, dengan jumlah kelompok yang dibina tetap berada pada angka sekitar 13 kelompok pada 2022 hingga 2024, meskipun sempat menurun menjadi 13 kelompok pada 2021 dan 2022 dari 14 kelompok pada 2020. Terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan signifikan, seperti ekspor bersih perdagangan, beberapa area lainnya seperti revitalisasi pasar dan jumlah UTTP mengalami penurunan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan sektor ini ke depan.

Tabel 2. 219
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sosialisasi Kebijakan Ekspor	kali	-	1	2	-	-
Ekspor Bersih Perdagangan	US \$	423.442.990	422.037.326	461.014.825	70.465.696.521	74.523.188.890
Jumlah Pasar yang Telah Direvitalisasi	pasar	6	12	14	14	2
Jumlah UTTP	unit	54.915	27.487	32	33.765	21.056
Cakupan Bina	kelomp	14		13	13	

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kelompok Pedagang / Usaha Informal	ok		14			13

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 220
Indikator Kinerja Kunci Urusan Perdagangan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100,00%	100,00%	99,25%
Persentase kinerja realisasi pupuk	82,03%	65,46	56,61%	64,11%	73,26%
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%	50,05	100,00%	100%	98,96%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan konsisten di angka hampir 100%, hanya sedikit menurun menjadi 99,25% pada 2024, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam perizinan usaha. Kinerja realisasi pupuk mengalami penurunan signifikan dari 82,03% pada 2020 ke angka terendah 56,61% pada 2022, kemudian membaik kembali menjadi 73,26% pada 2024, namun belum mencapai target optimal. Persentase alat ukur dan perlengkapannya yang bertanda tera sah berfluktuasi, turun pada 2021 (50,05%) dan naik menjadi 100% pada 2023, kemudian kembali mendekati 100% pada 2024, mencerminkan pengawasan yang ketat dan upaya peningkatan akurasi alat ukur di pasa

Selain itu, urusan perdagangan ini juga memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya.

Tabel 2. 221
Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Komoditi Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2024

Jenis Komoditi	2023		2024	
	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan
Plastik dan Barang dari Plastik	12.399.052	Vietnam,Korea, Uruguai, Malaysia, Turkey, Thailand, Philipines, Sout Africa, Australia, Canada, India, China, Singapore, Japan,	12.746.225	Vietnam,Korea, Uruguai, Malaysia,Turkey, Thailand, Philipines, Sout Africa, Australia, Canada, India, China,

Jenis Komoditi	2023		2024	
	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan
		Taiwan, Zordan		Singapore, Japan, Taiwan, Zordan
Kertas/ Karton	6.973.726	Japan, Taiwan, China, Philipines, Japan, New Zealand, Ecuador, Korea, Thailand, Usa	7.113.201	Japan, Taiwan, China, Philipines, Japan, New Zealand, Ecuador, Korea, Thailand, Usa
Perangkat Musik	4.865.635	Malaysia, Thailand, Vietnam, Kazakastan, China, Japan	5.108.917	Malaysia, Thailand, Vietnam, Kazakastan, China, Japan
Alumunium/bar ang daari alumunium	4.169.620	Thailand, Australia, New Zaeland, Usa, India, Japan, Arab Saudy, Panama, Chile, Columbia, China, Malaysia	4.240.504	Thailand, Australia, New Zaeland, Usa, India, Japan, Arab Saudy, Panama, Chile, Columbia, China, Malaysia
Produk Alas Kaki	2.443.642	Vietnam, Japan, Thailnad, Australia, Singapore, Malaysia, Japan, China, Korea, Philiphines, Uruguai	2.516.951	Vietnam, Japan, Thailnad, Australia, Singapore, Malaysia, Japan, China, Korea, Philiphines, Uruguai
Peralatan Listrik	1.511.398	Usa, Thailand, Singaphore, Pakistan, Unitet Kingdom,	1.532.558	Usa, Thailand, Singaphore, Pakistan, Unitet Kingdom,
Kayu/ Barang dari kayu	977.356	Saudy Arabia, Oman, Iraq, Taiwan, India, China, Usa, China, Australia, Malaysia	1.045.771	Saudy Arabia, Oman, Iraq, Taiwan, India, China, Usa, China, Australia, Malaysia
Benda dari besi	556.039	Saudy Arabia, Australia, Netherland, China, India, Thailand, Vietnam, Malaysia	579.393	Saudy Arabia, Australia, Netherland, China, India, Thailand, Vietnam, Malaysia
Kapas	473.406	Phliphines, Usa, Malysia, Canada, Australia, Qatar	499.444	Phliphines, Usa, Malysia, Canada, Australia, Qatar

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data nilai ekspor ke negara tujuan Kabupaten Mojokerto dari 2019 hingga 2023, terdapat sejumlah pola yang dapat diamati dalam hubungan perdagangan internasional. Nilai ekspor ke negara tujuan Japan menunjukkan angka yang signifikan dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor ke Jepang tercatat sebesar US\$79,1 juta, yang meningkat pesat menjadi US\$308,8 juta pada 2023, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi sekitar US\$289,6 juta. Ini menandakan bahwa Jepang merupakan pasar utama yang

terus tumbuh bagi produk ekspor Kabupaten Mojokerto.

Negara-negara lain juga mencatatkan fluktuasi yang beragam. USA, yang merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama lainnya, mengalami penurunan nilai ekspor dari US\$76,6 juta pada 2020 menjadi US\$29,2 juta pada 2023, dengan sedikit kenaikan pada 2024 menjadi US\$29,7 juta. Hal ini mencerminkan perubahan permintaan atau kondisi pasar di Amerika Serikat. Sementara itu, negara-negara seperti China, Germany, dan Italy mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam nilai ekspor mereka selama periode tersebut. Misalnya, ekspor ke China yang pada 2020 mencapai US\$14,6 juta, terus menurun setiap tahunnya, mencapai hanya sekitar US\$1,65 juta pada 2023, meskipun ada lonjakan kembali pada 2024 menjadi US\$12,66 juta. Germany dan Italy juga menunjukkan penurunan yang serupa dalam beberapa tahun terakhir.

Negara tujuan ekspor Thailand dan Malaysia menunjukkan penurunan yang signifikan pada 2023. Ekspor ke Thailand yang sempat mencapai US\$27,7 juta pada 2020 menurun tajam pada 2023 menjadi hanya sekitar US\$2,18 juta, dengan sedikit pemulihan pada 2024. Begitu pula dengan Malaysia, yang mencatatkan penurunan dari US\$19,9 juta pada 2020 menjadi hanya sekitar US\$5,25 juta pada 2023, meskipun ada sedikit kenaikan pada 2024.

Di sisi lain, beberapa negara seperti United Kingdom dan France menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Ekspor ke France pada 2020 tercatat US\$12,4 juta, namun menurun tajam menjadi hanya US\$751 ribu pada 2023, dengan sedikit peningkatan pada 2024. Demikian pula, ekspor ke United Kingdom menurun dari US\$11,7 juta pada 2020 menjadi hanya sekitar US\$429 ribu pada 2023, dengan kenaikan pada 2024.

Meskipun ada beberapa negara yang menunjukkan penurunan signifikan dalam nilai ekspor, pasar-pasar utama seperti Jepang dan Amerika Serikat tetap menjadi tujuan ekspor yang penting bagi Kabupaten Mojokerto, dengan Jepang terutama mencatatkan pertumbuhan yang sangat positif dalam beberapa tahun terakhir. Data nilai ekspor ke negara tujuan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 222
Nilai Ekspor ke Negara Tujuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024

Negara Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
Lainnya	132.878.924	66.439.462	33.219.731	20.160.282	360.821.351,52
France	12.387.559	6.193.779	2.345.568	751.351	1.588.542,00
United Kingdom	11.743.907	5.871.953	2.506.362	429.614	4.286.771,80
China	14.650.920	7.325.460	3.662.730	1.653.398	12.655.872,76
Jerman	19.960.547	9.980.273	4.990.136	211.597	10.653.761,01
Italy	11.322.445	5.661.222	2.830.611	45.193	7.333.278,26
Malaysia	19.870.861	9.935.431	7.593.136	5.250.841	7.651.982,76
Thailand	27.744.056	20.808.042	13.872.028	2.182.585	14.762.991,00
Netherland	15.755.707	8.204.505	3.775.600	326.652	6.178.816,01

Negara Tujuan	2020	2021	2022	2023	2024
USA	76.624.159	52.914.104	47.420.110	29.204.049	29.737.398,91
Japan	79.098.241	193.962.236	273.060.477	308.826.232	289.561.122,87

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data realisasi ekspor Kabupaten Mojokerto menurut bulan dari 2019 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam nilai ekspor bulanan, dengan beberapa bulan menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya, pada bulan Agustus 2023, nilai ekspor mencapai puncaknya dengan angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 16,3 triliun rupiah, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, seperti Januari 2023 dengan nilai ekspor hanya sekitar 4,5 triliun rupiah. Meskipun ada variasi signifikan dalam ekspor bulanan, total ekspor tahun 2023 tercatat mencapai 70,47 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) yang tercatat sekitar 46,1 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekspor yang substansial pada tahun 2023.

Untuk tahun 2024, meskipun data nilai ekspor bulanan menunjukkan variasi, dengan bulan Maret mencatatkan angka tertinggi pada 53,3 juta dolar AS, total kumulatif ekspor diharapkan akan mencapai sekitar 74,52 triliun rupiah. Ini mengindikasikan adanya upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan volume ekspor, meskipun ada fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam pemantauan dan strategi ekspor.

Realisasi ekspor Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren yang positif dengan adanya kenaikan nilai ekspor yang signifikan pada beberapa bulan tertentu dan total ekspor tahunan yang terus mengalami peningkatan. Realisasi Ekspor 2019-2024 adala sebagai berikut:

Tabel 2. 223
Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Bulan

Realisasi Ekspor Kaupaten Mojokerto Menurut Bulan				
Bulan	2020	2021	2023	2024
Januari/January	43.767.601	48.437.604	4.506.999.087	48.660.600,43
Februari/February	33.079.459	38.702.967	3.243.174.437	41.420.588,70
Maret/March	38.188.619	41.625.595	6.478.452.638	53.385.757,38
April/April	28.823.183	31.993.733	3.585.492.149	69.608.874,00
Mei/May	31.609.825	34.413.616	3.462.245.188	66.306.949,15
Juni/June	35.201.442	33.986.992	3.587.132.226	74.353.304,98
Juli/July	32.876.144	37.764.827	6.152.596.693	66.768.641,32
Agustus/August	32.812.776	38.062.820	16.309.735.042	68.457.621,56
September/September	30.989.987	33.779.086	6.059.311.070	73.179.661,08
Oktober/October	37.963.665	43.658.215	4.630.162.140	64.866.425,30
Nopember/November	37.799.642	38.933.631	9.094.774.383	75.866.743,00
Desember/December	38.924.983	39.655.739	3.355.621.468	42.356.722,00
Jumlah/Total	422.037.326	461.014.825	70.465.696.521	74.523.188.890,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data jumlah pedagang pasar dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa pasar kelas I mencatatkan jumlah pedagang yang stabil setiap tahunnya, dengan total pedagang yang terdiri dari 438 kios, 1.648 los, dan 821 lesehan, sehingga totalnya selalu mencapai 2.907 pedagang per tahun. Ini menunjukkan bahwa pasar kelas I cenderung konsisten dalam jumlah pedagangnya, tanpa ada perubahan yang signifikan dalam distribusi jenis tempat berjualan.

Untuk pasar kelas III, jumlah pedagangnya juga tetap stabil selama tiga tahun, dengan distribusi 311 kios, 49 los, dan 35 lesehan, yang menghasilkan total 395 pedagang per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kelas III memiliki jumlah pedagang yang konstan, sama seperti pasar kelas I, meskipun dengan jumlah pedagang yang lebih sedikit. Jumlah total pedagang di pasar Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 hingga 2024 tetap konsisten, yaitu 3.302 pedagang setiap tahun. Tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah atau distribusi jenis tempat berjualan di pasar kelas I dan kelas III. Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024 sebagai berikut

Tabel 2. 224
Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024

Jenis Pasar	Jumlah Pedagang Pasar											
	2022				2023				2024			
	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total
Kelas I	438	1648	821	2907	438	1648	821	2907	438	1648	821	2907
Kelas II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelas III	311	49	35	395	311	49	35	395	311	49	35	395
Total	749	1697	856	3302	749	1697	856	3302	749	1697	856	3302

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

e) Perindustrian

Urusan perindustrian mengemban tugas utama untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menyelaraskan jenis industri yang berkembang dengan potensi sumber daya lokal untuk menciptakan rantai pemasokan industri, penataan Kawasan industri dan peruntukan industri serta meminimalisir limbah dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan urusan industri diarahkan untuk terus meningkatkan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto. Sehingga pelaksanaan urusan perindustrian akan lebih difokuskan pada upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor industri baik kecil, menengah, maupun industri besar. Pembangunan industri yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memacu pembangunan sektor sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri.

Di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga berdampak pada meluasnya kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian.

Tabel 2. 225
Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2024

Klasifikasi Industri	2022		2023		2024	
	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
Makanan, minuman, tembakau	10	23.564	212	9.677	136	6.718
Tekstil, pakaian jadi, kulit dan alas kaki	9	4.033	96	5.475	35	4.783
Kayu, rotan, bamboo dan perabot rumah tangga	19	5.330	86	7.485	59	6.556
Kertas, barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	9	7.202	116	6.609	51	5.387
Pupuk, kimia dan barang dari bahan kimia, barang dari karet dan plastic	41	12.870	174	6.801	132	4.602
Semen, barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara	22	7.548	85	6.036	76	5.422
Logam dasar	15	4.243	30	3.593	85	3.408
Alat angkutan, mesin dan peralatannya	8	6.458	50	485	23	426
Industri pengolahan lainnya	9	5.353	33	1.408	22	1.333
Jumlah	142	76.601	882	47.569	619	38.635

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Perkembangan jumlah perusahaan dan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto pada periode 2022-2024 menunjukkan fluktuasi, terutama dalam sektor industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, serta alat angkutan dan mesin. Pada tahun 2022, jumlah perusahaan tercatat sebanyak 142 dengan 76.601 tenaga kerja, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 619 perusahaan dengan total tenaga kerja sebanyak 38.635 orang. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan baik dari segi jumlah perusahaan maupun penyerapan tenaga kerja.

Sektor industri makanan, minuman, dan tembakau mengalami peningkatan jumlah perusahaan dari 10 menjadi 138, dengan tenaga kerja yang bertambah dari 23.564 orang pada tahun 2022 menjadi 6.718 orang pada 2024. Sektor tekstil, pakaian jadi, kulit, dan alas kaki juga mengalami pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang signifikan, dari 4.033 orang pada tahun 2022 menjadi 4.783 orang pada tahun 2024, dengan jumlah perusahaan yang stabil

Perkembangan industri di Kabupaten Mojokerto dalam periode 2022–2024 memperlihatkan adanya ketidakseimbangan. Peningkatan jumlah perusahaan yang tinggi pada tahun 2023 tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang optimal, bahkan cenderung menurun hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan perusahaan baru tidak otomatis menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, melainkan lebih banyak didorong oleh faktor efisiensi, modernisasi, dan pergeseran struktur industri. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan memastikan industri yang berkembang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Capaian Kinerja urusan perindustrian sebagai berikut:

Tabel 2. 226
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	kali	2	8	7	17	11
Jumlah Sentra Industri Kecil Potensial yang Dikembangkan	lokasi	-	5	15	92	105
Pertumbuhan Industri	unit	12.260	10.454	13.477	15.977	16.362

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data capaian kinerja urusan perindustrian, dapat dilihat adanya peningkatan yang signifikan dalam beberapa indikator. Jumlah pembinaan industri kecil dan menengah (IKM) menunjukkan tren yang positif, dengan lonjakan tajam pada 2023 yang mencapai 17 kali pembinaan, setelah sebelumnya tercatat 2 kali pada 2020 dan 8 kali pada 2021. Namun, pada 2024, jumlah pembinaan sedikit menurun menjadi 11 kali, yang masih menunjukkan upaya yang cukup intens dalam pengembangan sektor IKM. Jumlah sentra industri kecil potensial yang dikembangkan mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada 2021, tercatat ada 5 lokasi sentra, yang kemudian melonjak drastis menjadi 92 lokasi pada 2023, dan terus bertumbuh menjadi 105 lokasi pada 2024. Ini menunjukkan adanya fokus yang kuat dalam mengembangkan sentra industri kecil yang berpotensi, sebagai bagian dari penguatan sektor industri di Kabupaten Mojokerto. Pertumbuhan industri juga menunjukkan angka yang stabil dan terus berkembang. Pada 2020, terdapat 12.260 unit industri, yang kemudian meningkat menjadi 16.362 unit pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya perkembangan industri yang konsisten setiap tahun, yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal dan menciptakan lebih banyak peluang usaha. Meskipun ada sedikit penurunan dalam jumlah pembinaan IKM pada 2024, capaian kinerja sektor perindustrian menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang signifikan dalam pengembangan sentra industri kecil dan pertumbuhan jumlah unit industri. Ini menunjukkan adanya komitmen untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah di daerah tersebut

Tabel 2. 227
Indikator Kinerja Kunci Urusan Perindustrian

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	99,30%	-4,84	34,5929%%	2,47%	2,41%
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	80%	100	100,00%	50,00%	100,00%
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100	16,6667%%	100,00%	55,05%
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	0	0,00%	100,00%	100,00%
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2024

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah mengalami fluktuasi, dengan penurunan pada 2021, kenaikan tinggi di 2022, dan pertumbuhan yang relatif kecil namun stabil pada dua tahun terakhir. Pencapaian sasaran pembangunan industri menunjukkan kinerja yang baik secara umum, dengan sebagian besar tahun mencapai target 100%, kecuali pada 2023 yang turun menjadi 50%. Pemantauan dan pengawasan terhadap izin usaha dan perluasan industri serta kawasan industri berfluktuasi, dengan beberapa capaian maksimal di beberapa tahun, namun juga terdapat penurunan drastis terutama pada pengawasan izin usaha industri kecil dan menengah pada 2022.

Kinerja perindustrian secara keseluruhan menunjukkan adanya kemajuan dalam pencapaian target pembangunan industri dan pengawasan izin, namun masih perlu

peningkatan konsistensi dalam pemantauan serta stabilisasi pertumbuhan industri kecil dan menengah agar dapat mendukung pengembangan industri di Kabupaten Mojokerto

f) Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan dengan urgensi yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Program transmigrasi secara regulasi masih bergantung pada pemerintah pusat/provinsi, baik untuk sarana dan prasarana maupun lokal transmigrasi, sehingga keberhasilan program/kegiatan transmigrasi di daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat/Provinsi.

Capaian indikator kinerja bidang Transmigrasi tahun 2019 hingga tahun 2023 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 228
Capaian Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 202 – 2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembinaan kesiapan peserta transmigrasi	KK	3	3	3	1	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

a. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

a) Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya Perencanaan Tata Ruang, Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Fisik dan Prasarana.

Tabel 2. 229
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2020- 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan	tidak	tidak	tidak	tidak	tidak

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama tiga tahun terakhir, persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Mojokerto dalam kondisi baik.

Tabel 2. 230
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Ketaatan terhadap RTRW	Kondisi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Mojokerto dalam periode 2020-2024 tetap berada dalam kategori "Baik", menunjukkan konsistensi dalam kepatuhan terhadap perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan ruang dan penggunaan lahan di daerah tersebut berjalan sesuai dengan regulasi, sehingga dapat mendukung pembangunan yang terstruktur dan berkelanjutan. Keberlanjutan kondisi "Baik" ini didukung oleh pengawasan yang efektif dari pemerintah daerah, kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan tata ruang, serta perencanaan yang matang dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah. Konsistensi dalam ketaatan terhadap RTRW juga menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang yang diterapkan relatif stabil dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pembangunan. Namun, meskipun kondisinya stabil, tantangan tetap ada, seperti potensi alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, urbanisasi yang cepat, serta kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala dan penegakan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan tata ruang tetap selaras dengan perkembangan ekonomi, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

b) Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang penting dalam pemerintahan, analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan secara efektif. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif. Tata kelola keuangan daerah menunjukkan konsistensi yang baik dengan persentase OPD (Organisasi

Perangkat Daerah) yang mencapai 100% setiap tahun, serta opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK yang tetap diterima sepanjang 2021 hingga 2024. Namun, terdapat fluktuasi dalam alokasi belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan. Persentase belanja pendidikan pada 2023 menurun menjadi 19%, jauh dari target 20%, tetapi kembali meningkat menjadi 26% pada 2024. Begitu juga dengan belanja kesehatan yang mengalami penurunan pada 2022 dan 2023 (masing-masing 13%), meskipun ada kenaikan pada 2024 menjadi 18%. Penetapan APBD juga selalu tepat waktu selama periode yang diamati. Meskipun ada penurunan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Dapat disimpulkan tata kelola keuangan daerah tetap solid dengan pengelolaan yang baik dan tepat waktu.

Keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan dalam urusan keuangan salah satunya adalah dengan mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu Kabupaten Mojokerto menargetkan perolehan nilai WTP pada tiap tahunnya.

Tabel 2. 231
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024
Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan yang baik	%	100	100	100	100
Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	30%	32%	19%	26%
Persentase belanja kesehatan (20%)	%	22%	13%	13%	18%
Penetapan APBD	Tepat/Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara garis besar, data anggaran belanja Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023 dan 2024 menunjukkan sejumlah perubahan signifikan dalam sektor-sektor tertentu. Alokasi anggaran mengalami peningkatan antara tahun 2023 dan 2024, baik sebelum maupun setelah perubahan, dengan kenaikan total anggaran sebesar 9,49% pada 2023 dan 6,96% pada 2024. Sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah Kesatuan Bangsa dan Politik pada 2023 dengan kenaikan sebesar 315,04% karena dalam mendukung Pilkada serentak, meskipun anggaran untuk beberapa sektor lainnya, seperti Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, mengalami pengurangan signifikan. Sektor-sektor wajib pelayanan dasar seperti Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan peningkatan belanja, meskipun persentasenya bervariasi, dengan Pendidikan meningkat 4,83% pada 2024 setelah perubahan anggaran. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengalami peningkatan substansial, begitu pula dengan sektor-sektor lain seperti Sosial, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan, yang mencatatkan

kenaikan anggaran meskipun ada beberapa perubahan yang tidak signifikan di sektor tertentu. Peningkatan anggaran ini mencerminkan prioritas daerah terhadap beberapa sektor penting sambil mempertahankan keseimbangan dalam alokasi sumber daya untuk kebutuhan lainnya.

Tabel 2. 232
Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023-2024

Urusan	2023				2024			
	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
Pendidikan	744.127.035.284,00	744.753.865.905,00	626.830.621,00	0,08	747.196.633.031,00	783.288.433.195,00	36.091.800.164,00	4,83
Kesehatan	484.494.575.091,00	575.552.212.026,00	91.057.636.935,00	18,79	465.496.090.867,00	554.316.373.137,00	88.820.282.270,00	19,08
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	243.284.800.709	257.689.725.709,00	14.404.925.000,00	5,92	399.528.499.000,00	422.419.398.477,00	22.890.899.477,00	5,73
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.908.945.000	17.849.298.000,00	4.940.353.000,00	38,27	10.013.417.000,00	11.012.826.104,00	999.409.104,00	9,98
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	23.853.870.146,00	23.643.164.041,00	(210.706.105,00)	-0,88	22.401.531.196,00	23.037.515.026,00	635.983.830,00	2,84
Sosial	18.491.704.531,00	19.922.809.277,00	1.431.104.746,00	7,74	13.729.379.540,00	15.419.906.990,00	1.690.527.450,00	12,31
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			-				-	
Tenaga Kerja	7.558.676.600,00	8.646.140.400,00	1.087.463.800,00	14,39	9.863.911.600,00	10.560.086.840,00	696.175.240,00	7,06
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	583.154.575,00	-	(583.154.575,00)	-100,00	302.880.137,00	267.455.137,00	(35.425.000,00)	-11,70
Pangan	7.247.379.900,00	7.804.498.063,00	557.118.163,00	7,69	6.904.621.900,00	7.673.885.900,00	769.264.000,00	11,14
Pertanahan					45.000.000,00	123.000.000,00	78.000.000,00	173,33
Lingkungan Hidup	27.415.934.000,00	29.062.760.057,00	1.646.826.057,00	6,01	22.865.085.600,00	23.908.175.500,00	1.043.089.900,00	4,56
Administrasi Kependudukan dan Capil	7.873.276.800,00	8.573.557.554,00	700.280.754,00	8,89	7.683.107.550,00	8.025.239.500,00	342.131.950,00	4,45
Pemberdayaan Masyarakat Desa	14.764.763.608,00	16.658.398.608,00	1.893.635.000,00	12,83	14.179.356.717,00	16.444.654.117,00	2.265.297.400,00	15,98

Urusan	2023				2024			
	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.263.425.825,00	20.795.893.333,00	2.532.467.508,00	13,87	19.837.359.775,00	20.163.610.275,00	326.250.500,00	1,64
Perhubungan	2.596.000.000,00	-	(2.596.000.000,00)	-100,00	3.311.577.300,00	4.110.414.526,00	798.837.226,00	24,12
Komunikasi dan Informatika	19.756.080.000,00	22.501.598.000,00	2.745.518.000,00	13,90	16.161.036.500,00	18.885.884.991,00	2.724.848.491,00	16,86
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.177.343.400,00	5.420.247.981,00	(757.095.419,00)	-12,26	4.803.921.380,00	4.989.764.380,00	185.843.000,00	3,87
Penanaman Modal	8.189.638.000,00	13.602.260.000,00	5.412.622.000,00	66,09	4.682.478.600,00	4.745.514.600,00	63.036.000,00	1,35
Kepemudaan dan Olah Raga	9.941.750.000,00	23.429.479.920,00	13.487.729.920,00	135,67	8.813.500.000,00	9.733.500.000,00	920.000.000,00	10,44
Kebudayaan	1.657.848.960,00	-	(1.657.848.960,00)	-100,00	1.241.696.900,00	1.091.696.900,00	(150.000.000,00)	-12,08
Perpustakaan	4.532.633.400,00	4.501.765.361,00	(30.868.039,00)	-0,68	4.283.248.400,00	4.222.946.400,00	(60.302.000,00)	-1,41
Kearsipan	60.000.000,00	-	(60.000.000,00)	-100,00	53.000.000,00	53.000.000,00	-	0,00
Statistik	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-100,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	0,00
Persandian	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	-100,00	50.000.000,00	48.000.000,00	(2.000.000,00)	-4,00
Urusan Pilihan		-	-				-	
Kelautan dan Perikanan	930.631.000,00		(930.631.000,00)	-100,00	2.055.907.660,00	1.909.907.660,00	(146.000.000,00)	-7,10
Pariwisata	11.953.771.960,00	-	(11.953.771.960,00)	-100,00	9.900.211.600,00	10.001.277.600,00	101.066.000,00	1,02
Pertanian	28.547.352.570,00	29.362.237.480,00	814.884.910,00	2,85	26.836.755.665,00	29.349.538.551,00	2.512.782.886,00	9,36
Perdagangan	10.347.411.577,00	11.535.775.713,00	1.188.364.136,00	11,48	9.415.165.415,00	10.013.659.215,00	598.493.800,00	6,36
Perindustrian	1.345.023.475,00	-	(1.345.023.475,00)	-100,00	425.000.000,00	383.562.000,00	(41.438.000,00)	-9,75
Transmigrasi	-	-	-			-	-	
Kehutanan	-	-	-			-	-	
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		-	-				-	

Urusan	2023				2024			
	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
Administrasi Pemerintahan	81.343.541.404,00	86.059.826.943,00	4.716.285.539,00	5,80	71.582.112.207,00	78.046.413.579,00	6.464.301.372,00	9,03
Pengawasan	14.947.728.906,00	14.614.350.906,00	(333.378.000,00)	-2,23	13.072.787.361,00	13.397.204.152,00	324.416.791,00	2,48
Perencanaan	12.076.286.231,00	12.540.261.092,00	463.974.861,00	3,84	11.379.314.660,00	12.324.280.356,00	944.965.696,00	8,30
Kuangan	716.085.370.717,00	805.281.944.977,00	89.196.574.260,00	12,46	723.547.780.318,00	739.761.519.205,00	16.213.738.887,00	2,24
Kepegawaian	8.065.834.333,00	10.318.448.756,00	2.252.614.423,00	27,93	7.956.434.983,00	7.906.034.383,00	(50.400.600,00)	-0,63
Pendidikan dan Pelatihan	2.070.910.000,00	-	(2.070.910.000,00)	-100,00	2.279.037.921,00	2.309.037.921,00	30.000.000,00	1,32
Penelitian dan Pengembangan	740.696.000,00	-	(740.696.000,00)	-100,00	367.500.000,00	551.432.000,00	183.932.000,00	50,05
Sekretariat DPRD	79.374.748.120,00	88.357.433.936,00	8.982.685.816,00	11,32	97.379.282.016,00	110.251.727.016,00	12.872.445.000,00	13,22
Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	63.650.858.821,00	60.783.448.289,00	(2.867.410.532,00)	-4,50	56.496.347.356,00	56.710.893.624,00	214.546.268,00	0,38
Kesatuan Bangsa dan Politik	10.564.706.901,00	43.848.026.617,00	33.283.319.716,00	315,04	71.322.399.901,00	71.101.960.901,00	(220.439.000,00)	-0,31
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian			-				-	
T o t a l	2.706.223.707.844,00	2.963.109.428.944,00	256.885.721.100,00	9,49	2.887.663.370.056,00	3.088.759.730.158,00	201.096.360.102,00	6,96

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

c) Pengawasan

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan penyelenggaraan pemerinatahan daerah adalah usaha, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aparat pengawas internal pemerintah. Untuk itu terdapat penilaian *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* Komisi Pemberantasan Korupsi (MCSP KPK) bertujuan untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah. Dengan menerapkan MCSP, diharapkan pemerintah daerah dapat

menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Indikator MCSP KPK yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, Manajemen ASN, pengelolaan BUMD, optimalisasi pajak. Realisasai MCSP KPK terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 233

Capaian MCSP KPK Kab. Mojokerto Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	MCSP KPK	82,97%	87,69%	94,97%	94,25%	97,44%

Sumber Data: Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Tahun 2025

Selainn itu dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai Norma dan Standar Audit Pemerintah, dengan realisasi indikator sebagaimana terlihat dari capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 234

Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penanganan Pengaduan Administratif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Persentase penanganan pengaduan administratif selama lima tahun berturut-turut mencapai 100%, yang berarti seluruh pengaduan yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kinerja ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menangani pengaduan administratif. Konsistensi capaian 100% juga menunjukkan bahwa tidak ada backlog atau pengaduan yang tertunda dari tahun ke tahun. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh sistem pengelolaan pengaduan yang baik, koordinasi yang efektif antar instansi, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam penyelesaian setiap kasus administrasi

Tabel 2. 235

Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 - 2024

Tindak Lanjut Pemeriksaan Reguler (Keuangan)	2022		2023		2024	
	Kerugian	Kewajiban Setor	Kerugian	Kerugian	Kewajiban Setor	Kerugian
Jumlah	1.234	1.048	1.054	963	468	225
Nilai (Rp)	6.719.746.987		8.810.504.954		5.774.006.188,29	
Setor (Rp)		3.862.060.392		5.984.647.278		1.139.453.445,19
Sisa (Rp)		2.857.686.595		2.825.857.676		4.634.552.743,10

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Hasil pemeriksaan reguler di Kabupaten Mojokerto selama periode 2022-2024 menunjukkan tren penurunan dalam jumlah kasus kerugian keuangan daerah. Pada tahun 2022,

tercatat sebanyak 1.234 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp6,72 miliar. Jumlah ini kemudian naik menjadi 1.054 kasus pada tahun 2023 dengan total kerugian Rp8,8 miliar, dan lebih lanjut berkurang menjadi 468 kasus pada tahun 2024 dengan nilai kerugian Rp5,7 miliar. Dalam hal kewajiban setor, terjadi peningkatan dari tahun 2022 ke 2023, namun sedikit menurun pada tahun 2024. Pada 2022, kewajiban setor yang tercatat mencapai Rp3,86 miliar, yang kemudian menurun menjadi Rp5,9 miliar pada 2023, dan kembali menurun menjadi Rp1,13 miliar pada 2024. Adapun sisa kewajiban yang belum terselesaikan juga mengalami fluktuasi signifikan dari Rp2,86 miliar pada 2022 menjadi Rp2,82 miliar pada 2023 dan meningkat di angka Rp4,63 miliar pada 2024. Pola ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan reguler. Meskipun jumlah kasus dan nilai kerugian mengalami fluktuasi, pemerintah daerah terlihat semakin efektif dalam menindaklanjuti kewajiban setor dan mengurangi sisa kewajiban yang belum terpenuhi. Ke depan, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan serta penguatan sistem pengawasan diharapkan dapat semakin menekan angka kerugian dan mempercepat penyelesaian kewajiban setor

Tabel 2. 236
Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Sub Kelompok Temuan*)	2024			
	Jumlah Kejadian	Selesai	%	Nilai Kerugian (Rp)
Temuan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan				
Kerugian Negara / Daerah Atau Kerugian Negara / Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan Milik Negara / Daerah	80	49	61,25%	3.818.921.361
Potensi Kerugian Negara / Daerah Atau Kerugian Negara / Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan Milik Negara / Daerah	2	1	50,00%	50.000.000
Kekurangan Penerimaan Negara / Daerah Atau Perusahaan Milik Negara / Daerah	54	28	51,85%	1.635.853.839
Administrasi	89	56	62,92%	269.230.989
Indikasi Tindak Pidana	0	0	0,00%	-
Sub Total Kejadian	225	134	45,20%	5.774.006.188
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan	48	20	41,67%	0
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	119	82	68,91%	0
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	72	49	68,06%	0
Sub Total Kejadian	239	151	59,54%	0
Temuan 3 E				
Ketidakhematan / Pemborosan / Ketidakekonomisan	1	0	0,00%	0
Ketidakefisienan	2	2	100,00%	0
Ketidakefektifan	1	1	100,00%	0
Sub Total Kejadian	4	3	66,67%	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Pada tahun 2024, hasil pengawasan di Kabupaten Mojokerto menunjukkan berbagai temuan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, kelemahan sistem pengendalian intern, serta aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dari 225 kejadian yang tercatat dalam temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan, sebanyak 134 kasus atau 45,2% telah ditindaklanjuti. Temuan terbesar dalam kategori ini adalah kasus kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, dengan jumlah 410 kejadian dan nilai kerugian mencapai Rp3,18 miliar. Dari jumlah tersebut, 80 kejadian telah terselesaikan dengan tingkat penyelesaian 61,25%. Selain itu, terdapat 54 kejadian terkait kekurangan penerimaan negara/daerah, dengan nilai Rp1,65 miliar dan tingkat penyelesaian 51,85%. Dalam aspek kelemahan sistem pengendalian intern, tercatat 239 kejadian, dengan tingkat penyelesaian yang cukup tinggi, mencapai 59,54%. Di antaranya, kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mencatat 48 kejadian dengan 20 di antaranya telah ditindaklanjuti (41,67%). Sementara itu, kelemahan dalam struktur pengendalian intern sepenuhnya terselesaikan dengan tingkat penyelesaian 100%. Sedangkan dalam kategori temuan 3E (Efisiensi, Ekonomi, dan Efektivitas), terdapat enam kasus yang mencakup ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Semua kejadian dalam kategori ini telah diselesaikan, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Secara umum, hasil pengawasan di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa mayoritas temuan telah ditindaklanjuti dengan baik. Tingkat penyelesaian yang tinggi dalam berbagai aspek pengawasan mencerminkan upaya yang serius dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam penanganan kasus ketidakpatuhan yang memiliki dampak finansial signifikan, terutama dalam mengurangi potensi kerugian daerah

Tabel 2. 237
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Tahun 2023

Sub Kelompok Rekomendasi	2023	
	Jumlah Kejadian	%
Penyetoran ke Kas Negara / Daerah, Kas BUMN/D, dan Masyarakat	600	49.88%
Pengembalian Barang Kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat	0	0.00%
Perbaikan Fisik Barang / Jasa dalam Proses Pembangunan Atau Penggantian Barang / Jasa Oleh Rekanan	3	0.25%
Penghapusan Barang Milik Negara / Daerah	0	0.00%
Pelaksanaan Sanksi Administrasi Kependagawaian	326	27.10%
Perbaikan Laporan dan Penertiban Administrasi / Kelengkapan Administrasi	135	11.22%
Perbaikan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan	1	0.91%
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	1	0.08%

Sub Kelompok Rekomendasi	2023	
	Jumlah Kejadian	%
Pendukung Sistem Pengendalian		
Perubahan Atau Perbaikan Prosedur, Peraturan dan Kebijakan	135	11.22%
Perubahan Atau Perbaikan Struktur Organisasi	1	0.08%
Koordinasi Antar Instansi Termasuk Juga Penyerahan Penanganan Kasus Kepada Instansi yang Berwenang	0	0.00%
Pelaksanaan Penelitian Oleh Tim Khusus Atau Audit Lanjutan Oleh Unit Pengawas Intern	0	0.00%
Pelaksanaan Sosialisasi	1	0.08%
Lain-Lain	0	0.00%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Hasil audit kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Mojokerto tahun 2023 menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan serta administrasi pemerintahan. Dari total temuan, sebanyak 600 kejadian atau 49,88% direkomendasikan untuk dilakukan penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat, menjadikannya rekomendasi yang paling dominan. Selain itu, terdapat 326 kejadian (27,10%) yang direkomendasikan untuk dikenakan sanksi administrasi kepegawaian, mencerminkan perlunya peningkatan kepatuhan aparatur terhadap regulasi yang berlaku. Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi serta perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan masing-masing direkomendasikan dalam 135 kejadian (11,22%). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan langkah perbaikan dalam sistem administrasi dan regulasi guna mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang. Beberapa rekomendasi lainnya mencakup perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan (3 kejadian atau 0,25%), perbaikan sistem dan prosedur akuntansi serta pelaporan (1 kejadian atau 0,91%), peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian (1 kejadian atau 0,08%), perubahan atau perbaikan struktur organisasi (1 kejadian atau 0,08%), serta pelaksanaan sosialisasi (1 kejadian atau 0,08%). Hasil audit ini menegaskan bahwa meskipun sudah ada langkah-langkah pengawasan yang baik, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi yang perlu ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memperkuat sistem tata kelola pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta meminimalisir Risiko ketidakpatuhan

d) Kepegawaian dan Pendidikan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sumber daya aparatur, merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang professional. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, berkompetensi dan professional. Cakupan realisasi Urusan Kepegawaian tahun 2019 sampai 2023 seperti yang diuraikan di atas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 238
Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Mojokerto

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Frekuensi Diklat PNS	kali	-	15	35	44	35
Diklat Pim Tingkat II	orang	-	2	0	8	2
Diklat Pim Tingkat III	orang	40	8	14	14	2
Diklat Pim Tingkat IV	orang	-	40	0	11	4
Diklat Teknis	orang	90	931	5.147	9.727	11.978
Diklat Fungsional	orang	5	3,18	55	5	14
Tugas Belajar	orang	2	2	4	237	85
Jumlah Pelanggaran Disiplin	orang	8	13	13	9	8
Persentase Pegawai yang Bernilai SKP Baik	%	99,02	99,04	99,66	99,79	99,80
Pegawai yang Pernah Mengikuti Pendidikan & Latihan Struktural	ASN	40	50	14	33	33
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	hari / 4 bulan	120 Hari / 4 Bulan	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	persen	56	2,13	77,4	155,6	37
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	ASN	28	24	32	32	32
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	jabatan	3.003	2.427	2.201	1.800	1.650
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	PNS	4.694	4.717	4.544	4.468	4.191
Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah	PNS	23	12	95	80	161
Persentase pelanggaran pegawai	%	N/A	0,18	0,19	0,14	0,14

Sumber : BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Dari data capaian kinerja urusan kepegawaian dan pendidikan di Kabupaten Mojokerto selama periode 2020–2024, Frekuensi pelaksanaan diklat bagi PNS mengalami peningkatan signifikan dari 15 kali pada 2021 menjadi 44 kali pada 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 35 kali pada 2024. Diklat teknis menjadi program yang paling banyak diikuti, dengan jumlah peserta meningkat drastis dari 90 orang pada 2020 menjadi 11.978 orang pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius dalam peningkatan kompetensi ASN di berbagai bidang teknis. Namun, jumlah peserta Diklat Pim Tingkat II, III, dan IV mengalami fluktuasi, dengan penurunan signifikan pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya,

Di sisi lain, jumlah ASN yang mendapatkan kesempatan tugas belajar meningkat pada 2023, yakni mencapai 237 orang, meskipun kembali turun menjadi 85 orang pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya dorongan besar untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ASN, meskipun jumlahnya kembali berkurang. Sementara itu, jumlah pelanggaran disiplin ASN cenderung stabil di

kisaran 8–13 kasus per tahun, yang menunjukkan efektivitas pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai.

Dari segi jabatan, terjadi penurunan jumlah jabatan administrasi di instansi pemerintah, dari 3.003 jabatan pada 2020 menjadi 1.650 pada 2024. Sebaliknya, jumlah jabatan fungsional tertentu juga mengalami tren penurunan, dari 4.694 jabatan pada 2020 menjadi 4.191 pada 2024. Hal ini terjadi restrukturisasi birokrasi yang lebih efisien, dengan pergeseran dari jabatan administratif ke jabatan fungsional yang lebih spesifik.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan. Namun, fluktuasi jumlah peserta diklat struktural dan tugas belajar perlu diperhatikan agar regenerasi kepemimpinan tetap berjalan optimal. Penurunan jumlah jabatan administrasi dan fungsional juga karena adanya transformasi birokrasi yang perlu diimbangi dengan penguatan kompetensi SDM agar pelayanan publik tetap optimal.

Selain itu terdapat indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Manfaat perhitungan IP ASN digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN, digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional serta digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Capaian IP ASN Kab. Mojokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 239

Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2024

No	Uraian Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Profesionalisme ASN	n/a	67,22	86,23	82,51	Rilis bulan Oktober 2025

Sumber Data: BKPSDM Kab. Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kualitas ASN di Kabupaten Mojokerto, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan terjadi perbedaan komposisi dalam penilaian dan bobot dimensi penilaian terhadap IP ASN.

Tabel 2. 240
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024

Tingkat Pendidikan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
SD	orang	56	48	33	22	20
SLTP	orang	209	183	135	110	81
SLTA	orang	1.377	1.221	1.074	897	808
D1	orang	35	30	16	12	12
D2	orang	731	512	190	144	130
D3	orang	568	524	562	491	450
D4	orang	159	146	174	192	207
S1	orang	4.095	3.955	4.024	3.850	3.583
S2	orang	493	547	567	580	578
S3	orang	2	2	2	2	4
Jumlah	orang	7.725	7.168	6.777	6.300	5.873

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Jumlah pegawai di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan signifikan sebesar 23,94% dalam lima tahun, dari 7.725 orang pada 2020 menjadi 5.873 orang pada 2024. Penurunan ini terjadi di hampir semua tingkat pendidikan, terutama pada lulusan SLTA, yang mengalami penurunan sebesar 41,32% dari 1.377 orang pada 2020 menjadi 808 orang pada 2024. Lulusan SD turun 64,29%, dari 56 orang pada 2020 menjadi 20 orang pada 2024, sementara lulusan SLTP berkurang 61,24%, dari 209 orang menjadi 81 orang. Pada jenjang diploma, jumlah pegawai lulusan D1 turun 65,71% dari 35 orang menjadi 12 orang, sementara D2 mengalami penurunan drastis 82,22%, dari 731 orang pada 2020 menjadi hanya 130 orang pada 2024. Sedangkan D3 mengalami penurunan yang lebih moderat, yaitu 20,77%, dari 568 orang menjadi 450 orang. Di sisi lain, pegawai dengan pendidikan lebih tinggi menunjukkan tren stabil hingga meningkat. Lulusan D4 naik 30,19%, dari 159 orang pada 2020 menjadi 207 orang pada 2024. Lulusan S1, meskipun sempat mengalami kenaikan pada 2022, secara keseluruhan menurun 12,52% dari 4.095 orang pada 2020 menjadi 3.583 orang pada 2024. Lulusan S2 justru mengalami kenaikan 17,22%, dari 493 orang menjadi 578 orang dalam lima tahun. Pegawai bergelar S3, meskipun jumlahnya masih sangat kecil, mengalami peningkatan sebesar 100%, dari 2 orang pada 2020 menjadi 4 orang pada 2024. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran ke arah peningkatan kualitas SDM, dengan penurunan jumlah pegawai berpendidikan rendah dan peningkatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, penurunan total jumlah pegawai juga mengindikasikan adanya efisiensi dalam manajemen kepegawaian, dengan fokus pada kompetensi dan kualifikasi pendidikan.

Tabel 2. 241
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan

Pangkat / Golongan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Golongan I	orang	124	83	74	39	25
Golongan II	orang	1.497	1.28	1.213	987	824

Pangkat / Golongan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Golongan III	orang	3.903	3.839	3.696	3.666	3.539
Golongan IV	orang	2.201	1.966	1.794	1.608	1.485
Jumlah	orang	7.725	7.168	6.777	6.300	5.873

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto, Tahun 2024

Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan memperoleh aparatur pemerintah daerah yang profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD dapat dicapai. Data jumlah pegawai menurut pangkat/golongan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang signifikan, dengan total pegawai berkurang dari 7.725 orang menjadi 5.873 orang (penurunan 24%). Penurunan terbesar terjadi di Golongan I (80%) dan Golongan II (45%), sementara Golongan III, yang merupakan golongan dengan jumlah pegawai terbanyak, relatif stabil dengan penurunan hanya 9%. Golongan IV juga mengalami penurunan sebesar 33%. Secara komposisi, proporsi pegawai Golongan III meningkat dari 50,5% menjadi 60,3%,.

Tabel 2. 242
Realisasi Pemberian Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS
Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kenaikan Pangkat	orang	870	1.255	1.214	1156	1.056
2. Kenaikan Gaji Berkala	orang	79	110	46	14	16
3. Pensiun :						
a. Aktif	orang	472	422	439	439	378
b. Dini	orang	7	9	15	8	11
c. Janda / Duda	orang	76	89	88	32	47
Jumlah	orang	1.504	1.885	1.802	1649	1.508

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Realisasi pemberian kenaikan pangkat, gaji berkala, dan pensiun PNS di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan beberapa pola. Kenaikan pangkat cenderung fluktuatif, dengan puncak tertinggi pada tahun 2021 (1.255 orang) dan penurunan bertahap hingga 1.056 orang pada tahun 2024. Sementara itu, kenaikan gaji berkala mengalami penurunan drastis dari 79 orang pada tahun 2020 menjadi hanya 16 orang pada tahun 2024, mengindikasikan perubahan kebijakan atau pengetatan persyaratan. Untuk pensiun, jumlah pensiun aktif relatif stabil dengan sedikit penurunan dari 472 orang (2020) menjadi 378 orang (2024), sedangkan pensiun dini dan janda/duda menunjukkan fluktuasi tanpa tren yang jelas. Jumlah total realisasi menurun dari 1.504 orang (2020) menjadi 1.508 orang (2024)

Tabel 2. 243
Realisasi Eselon PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 - 2024

Nama Eselon	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Eselon II	orang	28	24	32	32	32
Eselon III	orang	163	189	164	170	166

Nama Eselon	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Eselon IV	orang	526	223	202	225	219
Eselon V	orang	-	-	-	-	-
Jumlah	orang	717	436	398	427	417

Sumber: BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Realisasi eselon PNS Kabupaten Mojokerto dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam distribusi jabatan struktural. Pada tahun 2020, total eselon mencapai 717 orang, namun terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 436 orang, terutama akibat berkurangnya jumlah Eselon IV dari 526 orang menjadi hanya 223 orang. Tren ini mencerminkan adanya restrukturisasi atau penyesuaian kebijakan dalam pengisian jabatan eselon yang diganti menjadi jabatan fungsional. Sementara itu, Eselon II dan III relatif stabil, dengan Eselon II berkisar antara 24-32 orang dan Eselon III antara 163-189 orang. Pada tahun 2024, total eselon mencapai 417 orang, menunjukkan penurunan sebesar 42% dibandingkan tahun 2020, yang mengindikasikan penyetaraan peta jabatan yang semula menempati jabatan eselon IV berubah menjadi Jabatan Fungsional.

e) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (litbang) adalah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang litbang, dinilai dengan indikator kinerja “persentase hasil litbang yang menjadi dasar kebijakan daerah”. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan litbang yang dibutuhkan oleh kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.

Tabel 2. 244
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	2022	2023	2024
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	100	100	100
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100
Penerapan SIDA :				
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	100	100
Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan	%	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan seluruh indikator mencapai angka 100%. Implementasi rencana kelitbangan terlaksana sepenuhnya dalam dua tahun berturut-turut, menandakan bahwa seluruh perencanaan penelitian dan pengembangan dapat

direalisasikan tanpa hambatan berarti. Selain itu, pemanfaatan hasil kelitbangan juga mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa setiap hasil penelitian dan pengembangan berhasil digunakan secara optimal dalam kebijakan dan program daerah. Dalam aspek penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah juga mencapai 100% pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan inovasi daerah yang diterapkan juga menunjukkan angka 100%, yang berarti bahwa setiap kebijakan inovatif yang dirumuskan berhasil diimplementasikan dengan baik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Mojokerto dalam mengelola dan memanfaatkan penelitian serta pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah yang berbasis inovasi.

f) Sekretariat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya maka daerah dituntut untuk mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan daerah satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal oleh karenanya telah dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan baik antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga seperti tabel berikut ini:

Pembangunan Hukum di Kabupaten Mojokerto secara umum telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pembangunan hukum yang dilaksanakan dititikberatkan untuk melaksanakan pembentukan beberapa produk hukum daerah dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah dituangkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Capaian penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan hukum tahun 2019 - 2024 seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 245
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Judul Data	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Bagian Pemerintahan						
1	Nilai LPPD	tidak keluar	tidak keluar	rendah	sedang	belum keluar	belum keluar
2	Dokumen SPM	71,85	75,56	75,56	77,58	98,3	98,36
3	Dokumen Sinergitas Kecamatan	18	18	18	18	18	18
4	Dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi	1	1	1	1	1	1
5	Dokumen Fasilitasi	1	1	1	1	1	1

No	Judul Data	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Penegasan Batas Daerah						
6	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PATEN	1	1	1	1	1	1
7	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Kelurahan	5	5	5	5	5	5
8	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1
9	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	1	1	1	1	1	1
10	Dokumen Evaluasi Otonomi Daerah	4	4	4	4	4	4
11	Laporan Fasilitasi Pelaksanaan PAW	6	6	6	6	6	6
12	Dokumen Kesepakatan Bersama yang Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama	-	-	-	60	60	60
	Bagian Perencanaan dan Keuangan						
1	IKM Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	-	-	97,25
2	Dokumen Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah	-	-	-	12	12	12
3	Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	-	-	-	-	12	12
4	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	1	1
5	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	86	
6	Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah	-	-	-	-	1	1
7	Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah	-	-	-	-	2	2
8	Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	1
9	Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah	-	-	-	2	2	2
10	RKA Sekretariat Daerah	2	2	2	2	2	2
11	DPA Sekretariat Daerah	2	2	2	2	2	2
	Bagian Hukum						
1	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	44,79 (Kurang)	-	82,12 (Sangat Baik)	82,12 (Sangat Baik)
2	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	-	56,21 (Cukup)	77,62 (Baik)
3	Peraturan Daerah yang diundangkan	11	7	15	10	6	7

No	Judul Data	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Peraturan Bupati yang diundangkan	97	72	104	53	55	48
5	Keputusan Bupati yang ditetapkan	1,351	523	534	554	413	865
6	Keputusan Sekretaris Daerah yang ditetapkan	7	20	29	17	22	14
7	Peraturan Desa yang dievaluasi	120	117	113	124	60	14
8	Kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	6	8	10	4	14	16
9	Produk Hukum yang didokumentasikan di JDIH	19	26	93	33	35	26
	Bagian PBJ						
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	belum ada	belum ada	34,74	68,00	75,37	80,33
2	Maturitas UKPBJ	belum ada	belum ada	level 2	level 2	level 3	level 3
3	Dokumen Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang selesai tepat waktu	N/A	N/A	97 %	99%	100%	100 %
4	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	97 %	97 %	70 dokumen	70 dokumen
5	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	N/A	N/A	12 bulan	12 bulan	5 dokumen	3 dokumen
6	Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	100 peserta	100 peserta	300 orang	350 orang
	Bagian Organisasi						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	63.86 (B)	64.75 (B)	64,35 (B)	64,91 (B)	86,36 (A-)	85,58 (A-)
2	Nilai SAKIP	74.98 (BB)	75.38 (BB)	75,42 (BB)	73,42 (BB)	74,01 (BB)	74,42
3	IKM Pemda	84.09 (Baik)	79.05 (Baik)	84,12 (Baik)	86,16 (Baik)	87,93 (Baik)	89,97
4	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	99,63	N/A	74,36	78,5	87,05	93,85
5	Dokumen Hasil Tingkat Kematangan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1
6	Dokumen Hasil SAKIP Perangkat Daerah	48	58	48	58	58	48
7	Dokumen Hasil SKM Perangkat Daerah	1	1	1	1	1	1
8	Dokumen Kelembagaan	1	1	1	1	1	1
9	Dokumen Analisis Jabatan	1	1	1	1	1	1
10	Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1

No	Judul Data	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	Dokumen Rencana Aksi RB General	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
12	Dokumen Rencana Aksi RB Tematik	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
13	Dokumen Monitoring Evaluasi RB General	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
14	Dokumen Monitoring Evaluasi RB Tematik	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
15	Dokumen Budaya Kerja	1	1	1	1	1	1
16	Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP)	-	-	-	-	1	1
17	Dokumen Standar Pelayanan	-	-	-	-	1	1
18	Dokumen Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP)	-	-	-	-	1	1
19	Dokumen Pemantauan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI)	-	-	-	-	1	1
20	Perbup Pakaian Dinas	-	-	-	-	1	-
21	Dokumen Perjanjian Kinerja	2	2	2	2	2	2
22	Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1
	Bagian Administrasi Pembangunan						
1	Dokumen Pedoman Umum/Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan	1	1	1	1	1	1
2	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3
3	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan	12	12	12	12	12	12
	Bagian Kesejahteraan Rakyat						
1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69,81	69,48	70,33	72,84	73,51	74,5
2	Dokumen Safari Ramadhan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
3	Dokumen Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
4	Dokumen Semaan Al-Qur'an	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
5	Dokumen Sholawatan dan Siraman Rohani	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
6	Dokumen Peringatan Hari Besar Keagamaan	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
7	Dokumen Hibah	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
8	Dokumen Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
9	Dokumen Beasiswa Masyarakat Miskin	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1

No	Judul Data	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Berprestasi						
10	Dokumen Pemberian Insentif Guru TPQ	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
11	Dokumen Fasilitasi Pendampingan Bantuan dan Kegiatan Sosial	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
12	Dokumen Senam Kesegaran Jasmani	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
13	Dokumen Pembinaan dan Pelatihan terkait Kesejahteraan Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1
	Bagian PKP						
1	IKM Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-
2	Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	N/A	N/A	N/A	N/A	21	314 laporan
3	Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	N/A	N/A	N/A	N/A	972	983 laporan
4	Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	N/A	N/A	N/A	N/A	12	282 laporan
	Bagian Perekonomian dan SDA						
1	Laporan Peningkatan Laba BUMD						
2	Tingkat Kesehatan BUMD	-	-	-	-	3,65	3,68
3	Dokumen Kebijakan Sumber Daya Alam	1 kebijaka n	1 kebijaka n	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan
4	Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokume n	2 dokume n	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen
5	Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6	Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 dokume n	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
7	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokume n	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
8	Dokumen Hasil	1	1	1	1	1 dokumen	1 dokumen

No	Judul Data	Capaian					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	dokumen	dokumen	dokumen	dokumen		
	Bagian Umum						
1	IKM Bagian Umum	N/A	N/A	N/A	88,37	88,37	90,08
2	Dokumen Kepegawaian Sekretariat Daerah	N/A	N/A	N/A	159 dokumen	157 dokumen	154 dokumen
3	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	N/A	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan
4	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	N/A	N/A	1 laporan	12 laporan	12 laporan

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara umum, kinerja pemerintahan daerah mengalami peningkatan di berbagai sektor dari tahun 2019 hingga 2024. Beberapa indikator utama menunjukkan perkembangan positif, seperti peningkatan Indeks Tata Kelola PBJ, IKM Pemda, serta peningkatan kualitas kebijakan hukum dan reformasi hukum. Di sektor pemerintahan dan perencanaan keuangan terdapat peningkatan dalam nilai SPM, realisasi anggaran, dan nilai SAKIP, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi. Bagian hukum dan pengadaan barang/jasa menunjukkan peningkatan signifikan dalam Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, serta Dokumen Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang selesai tepat waktu mencapai 100% tepat waktu sejak 2023. Dalam aspek kesejahteraan rakyat, Indeks Kerukunan Umat Beragama terus meningkat.

g) Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Capaian kinerja dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 246
Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Pembahasan Raperda	raperda	13	15	18	18	22
Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Agama	kali	8	12	12	12	18
Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD						
Rapat Pimpinan	kali	20	24	22	24	24
Rapat Badan Musyawarah	kali	15	20	28	24	24

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rapat Konsultasi	kali	6	10	10	6	4
Rapat Komisi Internal	kali	12	15	18	35	16
Rapat Komisi Eksternal	kali	0	8	14	0	3
Rapat Badan Anggaran Internal	kali	11	10	12	11	16
Rapat Badan Anggaran Eksternal	kali	2	4	6	9	15
Rapat Pansus Raperda	kali	13	16	14	11	5
Rapat Pansus Non Raperda	kali	0	0	6	0	1
Rapat Badan Kehormatan	kali	6	4	4	3	1
Rapat Kerja / Dengar Pendapat	kali	3	0	23	10	12
Badan Pembentukan Perda	kali	9	12	12	6	1
Rapat Gabungan	kali	10	12	10	12	12
Rapat-rapat Paripurna						
Rapat Paripurna	kali	31	33	32	38	40
Penjaringan Spirasi Masyarakat Pada Masa Reses	ok	3	3	3	3	2
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah						
Pimpinan Dprd	oh	0	0	28	34	32
Anggota Dprd	oh	0	0	0	0	0
Komisi-Komisi	oh	22	20	32	33	32
Badan Kehormatan	oh	0	0	1	0	0
Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD						
Ketua	ok	6	5	5	6	6
Wakil Ketua 3 Orang	ok	6	5	5	6	6
Anggota 46 Orang	ok	6	5	5	6	6
Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota DPRD	kali	1	1	1	1	1
Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah						
Kunker Ke Luar Jawa						
Pimpinan	ok	0	0	0	9	16
Komisi-Komisi	ok	0	6	6	24	23
Badan Musyawarah	ok	0	2	2	1	5
Badan Anggaran	ok	0	2	2	1	1
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	ok	0	0	1	2	6
Badan Kehormatan	ok	0	1	1	0	5
Panitia Khusus	ok				6	2
Kunjungan Kerja Ke Jateng / Jabar / DKI						
Pimpinan	ok	20	24	21	55	14
Komisi-Komisi	ok	35	36	32	122	39
Badan Musyawarah	ok	2	4	1	4	1
Badan Anggaran	ok	5	6	1	6	4
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	ok	0	2	1	9	4
Badan Kehormatan	ok	0	2	1	8	1

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan Kerja ke Jatim						
Pimpinan	ok	8	6	4	12	2
Komisi-Komisi	ok	15	16	8	38	26
Badan Musyawarah	ok	3	4	1	8	1
Badan Anggaran	ok	8	8	1	4	2
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	ok	6	6	1	9	1
Badan Kehormatan	ok	4	3	1	5	1

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 247
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020-2024

Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Prosentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	65,4	70,16	71,26	92,96	93,00

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Dalam perspektif umum, ada dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Arah kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Mojokerto baik dalam perencanaan maupun implementasinya diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan ekonomi makro Nasional tahun 2024 adalah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga terdapat tiga kerangka arah kebijakan yang ditetapkan. Pertama, meningkatkan pertumbuhan potensi Indonesia dengan

transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa. Kedua, menjaga stabilitas makro ekonomi dengan stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan. Ketiga, memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan, dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Pada level Provinsi, kebijakan makro maupun mikro ekonomi telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain tiga (3) aspek ekonomi utama, yaitu:

1. Aspek Produksi UMKM dan Besar, pada prinsipnya adalah bagaimana peran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mendesain aspek peningkatan produksi pada berbagai komoditas dalam skala usaha UMKM dan Besar agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing lebih tinggi serta terjaga baik dari aspek harga yang kompetitif, kualitas, serta kecepatan pengiriman.
2. Aspek pembiayaan yang kompetitif dan efisien, pada prinsipnya adalah peran Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mendesain kebijakan fiskal ke dalam sistem perbankan untuk pembiayaan yang kompetitif dan efisien khususnya bagi UMKM serta sektor riil lainnya, sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan lebih efisien yang dengan demikian akan memiliki daya saing yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui upaya antara lain :
 - a. Mendorong perbankan untuk mengoptimalkan skema-skema kredit yang kompetitif untuk sektor riil;
 - b. Skema kredit dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil baik dengan skema pinjaman bunga murah 6%, Apex bank Jatim dan BPR di Jawa Timur, Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida, Pembiayaan sektor pertanian melalui penempatan modal di PT Bank UMKM, serta *loan agreement* Pemprov Jatim dan Bank Jatim serta Linkage Program dengan BPR Kab/Kota dalam pengembangan Industri Primer;
 - c. Mengoptimalkan pola-pola kerja sama pemerintah-swasta;
 - d. Mendorong peran Perseroan maupun BUMN dalam mengalokasikan pemanfaatan CSR/PKBL untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil.
3. Aspek Pemasaran, pada prinsipnya adalah peran pemerintahan Provinsi Jawa Timur dalam mendesain pemasaran yang kompetitif serta skala pasar yang lebih luas yang memungkinkan produk UMKM khususnya dan usaha besar memiliki kepastian tujuan pasar. Optimalisasi peran 26 Kantor Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Provinsi Mitra serta peningkatan kapasitas 6 Etalase Perdagangan Jawa Timur di 5 Negara

menjadi pendorong dan bentuk fasilitasi yang lebih riil pada pengembangan aspek pemasaran untuk utamanya menguasai pasar domestik dan juga pasar global.

Selanjutnya, pada tingkat lokal Kabupaten Mojokerto, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan karena semakin membaiknya kinerja sektor Industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia. Geliat ekonomi di sektor Industri pengolahan semakin meningkat yang berdampak kepada aktivitas perdagangan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti peningkatan dan pelebaran jalan raya, serta penyelesaian akhir proyek jalan tol yang melintas di Kabupaten Mojokerto, juga mempercepat laju pertumbuhan sektor konstruksi. Indikator ekonomi makro mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak dan Tingkat Suku Bunga. Perlu dilakukan stabilitas dalam sektor (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). Faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, di dukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga;
2. Investasi tetap tumbuh stabil didorong oleh investasi industri, dikarenakan lokasi Mojokerto strategis untuk membangun perusahaan. Diharapkan Mojokerto dapat menarik investasi selain bidang industri yaitu investasi bidang pariwisata.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target PAD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja daerah. Dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dilakukan melalui berbagai metode pengelolaan. Ini tidak lain sebagai bentuk restrukturisasi pemerintah sebagai tindak lanjut reformasi. Dampak reformasi ini juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mempertimbangkan terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah 2019-2024

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut: APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Agar kapasitas fiskal meningkat, maka Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimalkan potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik melalui prinsip *value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur akuntabilitas dan pengendalian dari *intern* pemerintah daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui proses penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran ini disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dalam konteks kinerja pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari 2 aspek yakni kinerja pelaksanaan APBD dan kinerja Neraca Daerah.

1) Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan aspek belanja terdiri dari belanja operasi, belanja barang jasa dan belanja modal. Di sisi lain, aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 2. 248
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	Relaisasi Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah					
1.A	Pendapatan Asli Daerah	537.297.509.364,79	625.418.916.520,09	676.708.151.150,77	656.126.287.019,54	719.744.298.887,33
1.B	Pendapatan Transfer	1.545.284.939.184,00	1.892.338.932.255,00	1.779.742.323.295,00	1.952.423.671.884,00	2.072.793.395.997,00
1.C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	320.080.802.000,00	89.190.709.657,45	80.784.949.622,00	-	14.971.729.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.402.663.250.548,79	2.606.948.558.432,54	2.537.235.424.067,77	2.608.549.958.903,54	2.807.509.423.884,33
2	Belanja Daerah					
2.A	Belanja Operasi	1.541.563.060.206,29	1.627.564.911.485,46	1.709.049.408.436,19	1.749.284.603.751,19	1.865.164.204.622,74
2.B	Belanja Modal	302.408.774.473,42	299.815.498.723,11	341.126.974.163,51	368.834.887.917,88	459.808.161.556,66
2.C	Belanja Tidak Terduga	106.659.968.262,00	26.300.682.093,48	4.567.036.920,00	1.394.558.239,00	523.774.591,00
2.D	Belanja Transfer	454.267.099.991,00	489.625.679.310,00	566.105.513.590,00	595.579.745.619,00	574.490.050.062,00
	JUMLAH BELANJA	2.404.898.902.932,71	2.443.306.771.612,05	2.620.848.933.109,70	2.715.093.795.527,07	2.899.986.190.832,40
	SURPLUS/ DEFISIT	(2.235.652.383,92)	163.641.786.820,49	(83.613.509.041,93)	(106.543.836.623,53)	(92.476.766.948,07)
3	Pembiayaan Daerah					
3.A	Penerimaan Pembiayaan	351.685.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	426.235.454.984,97	304.598.443.487,15
3.B	Pengeluaran Pembiayaan	3.156.000.000,00	-	-	71.000.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETO	348.529.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	355.235.454.984,97	304.598.443.487,15

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 249
Realisasi APBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Periode 2020–2024

NO	URAIAN	Relaisasi Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah					
1.A	Pendapatan Asli Daerah	537.297.509.364,79	625.418.916.520,09	676.708.151.150,77	656.126.287.019,54	719.744.298.887,33
1.A.1	Pajak Daerah	312.056.853.898,34	350.609.777.259,00	369.860.322.350,00	369.537.744.691,00	395.837.254.177,50
1.A.2	Retribusi Daerah	35.758.916.644,00	29.248.498.473,73	24.458.005.164,77	31.114.926.163,76	300.233.377.986,53
1.A.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.916.358.680,20	5.421.264.091,85	9.043.413.586,63	10.417.837.280,95	11.207.692.993,61
1.A.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	184.565.380.142,25	240.139.376.695,51	273.346.410.049,37	245.055.778.883,83	12.465.973.729,69
1.B	Pendapatan Transfer	1.545.284.939.184,00	1.892.338.932.255,00	1.779.742.323.295,00	1.952.423.671.884,00	2.072.793.395.997,00
1.B.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.377.990.193.355,00	1.673.663.558.562,00	1.566.631.185.413,00	1.694.143.157.286,00	1.810.397.854.197,00
	Dana Transfer Umum	1.014.618.320.374,00	1.037.042.335.602,00	1.049.856.270.879,00	1.055.000.407.697,00	1.109.586.880.000,00
	DBH	99.115.017.374,00	133.323.491.602,00	148.298.248.752,00	107.483.443.294,00	116.350.169.000,00
	DAU	915.503.303.000,00	903.718.844.000,00	901.558.022.127,00	947.516.964.403,00	993.236.711.000,00
	Dana Transfer Khusus.	269.598.001.981,00	309.180.219.960,00	240.405.071.734,00	344.946.689.689,00	347.565.771.197,00
	DAK Fisik	47.380.663.758,00	85.348.797.087,00	64.112.396.929,00	42.385.338.681,00	26.148.220.115,00
	DAK Non Fisik	222.217.338.223,00	223.831.422.873,00	176.292.674.805,00	302.561.351.008,00	321.417.551.082,00
	Dana Insentif Daerah	93.773.871.000,00	88.878.204.000,00	23.003.791.000,00	-	54.818.754.000,00
	Dana Desa	-	238.562.799.000,00	253.366.051.800,00	294.196.059.900,00	298.426.449.000,00
1.B.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	167.294.745.829,00	218.675.373.693,00	213.111.137.882,00	258.280.514.598,00	262.395.541.800,00
1.C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	320.080.802.000,00	89.190.709.657,45	80.784.949.622,00	-	14.971.729.000,00
1.C.1	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	320.080.802.000,00	89.190.709.657,45	80.784.949.622,00	-	14.971.729.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.402.663.250.548,79	2.606.948.558.432,54	2.537.235.424.067,77	2.608.549.958.903,54	2.807.509.423.884,33
2	Belanja Daerah					
2.A	Belanja Operasi	1.541.563.060.206,29	1.627.564.911.485,46	1.709.049.408.436,19	1.749.284.603.751,19	1.865.164.204.622,74

NO	URAIAN	Relaisasi Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.A.1	Belanja Pegawai	859.503.050.561,65	929.951.169.942,00	954.870.472.831,77	921.800.933.771,19	976.295.889.000,00
2.A.2	Belanja Barang dan Jasa	571.601.346.687,64	634.842.541.472,46	678.109.055.382,42	673.553.783.286,00	714.273.166.142,07
2.A.3	Belanja Hibah	107.851.162.957,00	60.355.050.391,00	56.877.580.014,00	147.470.288.694,00	168.581.222.980,67
2.A.4	Belanja Bantuan Sosial	2.607.500.000,00	2.416.149.680,00	19.192.300.208,00	6.459.598.000,00	6.013.926.500,00
2.B	Belanja Modal	302.408.774.473,42	299.815.498.723,11	341.126.974.163,51	368.834.887.917,88	459.808.161.556,66
2.B.1	Belanja Modal Tanah	6.982.312.000,00	-	-	451.920.000,00	-
2.B.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.355.609.108,63	104.811.036.524,44	142.712.370.741,00	71.157.661.706,88	92.745.876.964,00
2.B.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.140.114.763,62	65.889.374.107,15	54.631.465.793,51	146.020.359.519,00	67.446.102.364,66
2.B.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.602.603.723,17	127.674.766.562,52	141.402.319.949,00	150.499.982.193,00	297.769.176.878,00
2.B.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	328.134.878,00	1.440.321.529,00	2.380.817.680,00	704.964.499,00	1.681.355.350,00
2.B.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	165.650.000,00
2.C	Belanja Tidak Terduga	106.659.968.262,00	26.300.682.093,48	4.567.036.920,00	1.394.558.239,00	523.774.591,00
2.C.1	Belanja Tidak Terduga	106.659.968.262,00	26.300.682.093,48	4.567.036.920,00	1.394.558.239,00	523.774.591,00
2.D	Belanja Transfer	454.267.099.991,00	489.625.679.310,00	566.105.513.590,00	595.579.745.619,00	574.490.050.062,00
2.D.1	Belanja Bagi Hasil	43.744.025.191,00	35.965.689.310,00	40.281.253.390,00	43.211.642.719,00	42.812.626.062,00
2.D.2	Belanja Bantuan Keuangan	410.523.074.800,00	453.659.990.000,00	525.824.260.200,00	552.368.102.900,00	531.677.424.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.404.898.902.932,71	2.443.306.771.612,05	2.620.848.933.109,70	2.715.093.795.527,07	2.899.986.190.832,40
	SURPLUS/ DEFISIT	(2.235.652.383,92)	163.641.786.820,49	(83.613.509.041,93)	(106.543.836.623,53)	(92.476.766.948,07)
3	Pembiayaan Daerah					
3.A	Penerimaan Pembiayaan	351.685.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	426.235.454.984,97	304.598.443.487,15
3.A.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	351.685.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	426.235.454.984,97	248.691.630.864,15
3.A.2	Pencairan Dana Cadangan					55.000.000.000,00
1.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					906.812.623,00
3.B	Pengeluaran Pembiayaan	3.156.000.000,00	-	-	71.000.000.000,00	-

NO	URAIAN	Relaisasi Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
3.B.1	Pembentukan Dana Cadangan				55.000.000.000,00	
3.B.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.156.000.000,00			16.000.000.000,00	
3.B.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.B.4	Pembayaran Hutang Jangka Pendek					
	PEMBIAYAAN NETO	348.529.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	355.235.454.984,97	304.598.443.487,15

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

a. Pendapatan Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 77 Tahun 2020, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas. Demikian pula objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah pembagian jenis pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, kabupaten, dan jenis pajak dapat tidak dipungut apabila memenuhi ketentuan. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari

represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah di mana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pajak Daerah Kabupaten Mojokerto meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 4 UU 1/2022 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali

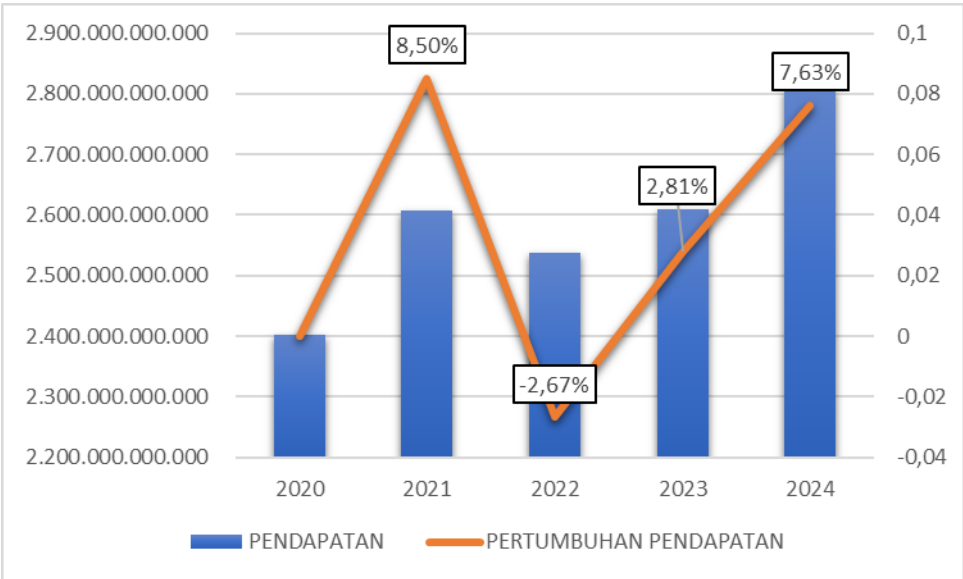
dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan dari sisi eksternal, BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini antara lain adalah Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 250
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	Realisasi Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah					
1.A	Pendapatan Asli Daerah	537.297.509.364,79	625.418.916.520,09	676.708.151.150,77	656.126.287.019,54	719.744.298.887,33
1.A.1	Pajak Daerah	312.056.853.898,34	350.609.777.259,00	369.860.322.350,00	369.537.744.691,00	395.837.254.177,50
1.A.2	Retribusi Daerah	35.758.916.644,00	29.248.498.473,73	24.458.005.164,77	31.114.926.163,76	300.233.377.986,53
1.A.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.916.358.680,20	5.421.264.091,85	9.043.413.586,63	10.417.837.280,95	11.207.692.993,61
1.A.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	184.565.380.142,25	240.139.376.695,51	273.346.410.049,37	245.055.778.883,83	12.465.973.729,69
1.B	Pendapatan Transfer	1.545.284.939.184,00	1.892.338.932.255,00	1.779.742.323.295,00	1.952.423.671.884,00	2.072.793.395.997,00
1.B.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.377.990.193.355,00	1.673.663.558.562,00	1.566.631.185.413,00	1.694.143.157.286,00	1.810.397.854.197,00
	Dana Transfer Umum	1.014.618.320.374,00	1.037.042.335.602,00	1.049.856.270.879,00	1.055.000.407.697,00	1.109.586.880.000,00
	DBH	99.115.017.374,00	133.323.491.602,00	148.298.248.752,00	107.483.443.294,00	116.350.169.000,00
	DAU	915.503.303.000,00	903.718.844.000,00	901.558.022.127,00	947.516.964.403,00	993.236.711.000,00
	Dana Transfer Khusus.	269.598.001.981,00	309.180.219.960,00	240.405.071.734,00	344.946.689.689,00	347.565.771.197,00
	DAK Fisik	47.380.663.758,00	85.348.797.087,00	64.112.396.929,00	42.385.338.681,00	26.148.220.115,00
	DAK Non Fisik	222.217.338.223,00	223.831.422.873,00	176.292.674.805,00	302.561.351.008,00	321.417.551.082,00
	Dana Insentif Daerah	93.773.871.000,00	88.878.204.000,00	23.003.791.000,00	-	54.818.754.000,00
	Dana Desa	-	238.562.799.000,00	253.366.051.800,00	294.196.059.900,00	298.426.449.000,00
1.B.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	167.294.745.829,00	218.675.373.693,00	213.111.137.882,00	258.280.514.598,00	262.395.541.800,00
1.C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	320.080.802.000,00	89.190.709.657,45	80.784.949.622,00	-	14.971.729.000,00
1.C.1	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	320.080.802.000,00	89.190.709.657,45	80.784.949.622,00	-	14.971.729.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.402.663.250.548,79	2.606.948.558.432,54	2.537.235.424.067,77	2.608.549.958.903,54	2.807.509.423.884,33

Sumber Data: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Gambar 2. 48 Pertumbuhan Pendapatan 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Berdasarkan data realisasi pendapatan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika yang menarik dalam komposisi penerimaan daerah. Secara total, pendapatan mengalami kenaikan dari Rp2,4 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,8 triliun pada tahun 2024, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2022. Kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, meskipun terdapat penurunan signifikan dalam pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

PAD terus meningkat dari Rp537 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp719 miliar pada tahun 2024, mencerminkan upaya yang lebih optimal dalam menggali potensi penerimaan daerah. Komponen terbesar PAD adalah Pendapatan Pajak Daerah, yang mengalami pertumbuhan stabil dari Rp312 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp395 miliar pada tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas dalam pemungutan pajak atau perluasan basis pajak daerah.

Sementara itu, Pendapatan Retribusi Daerah menunjukkan tren yang berlawanan. Setelah menurun dari Rp35 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp24 miliar pada tahun 2022, pos ini melonjak drastis menjadi Rp305 miliar pada tahun 2024. Lonjakan signifikan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan baru dalam pemungutan retribusi atau perluasan objek retribusi yang dikelola pemerintah daerah.

Di sisi lain, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, dari Rp4,9 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp11,2 miliar pada tahun 2024, menunjukkan adanya upaya peningkatan pengelolaan aset daerah. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah menunjukkan fluktuasi, dengan puncak tertinggi sebesar Rp273 miliar pada tahun 2022, sebelum menurun drastis menjadi hanya Rp6,9 miliar pada

tahun 2024, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait kontribusi pos ini dalam struktur PAD.

Dana Perimbangan tetap menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan daerah, dengan tren meningkat dari Rp1,28 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,45 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang mendominasi, meskipun sempat menurun pada tahun 2021 dan 2022 sebelum kembali meningkat menjadi Rp993 miliar pada tahun 2024.

Selain itu, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) cenderung fluktuatif. Setelah mengalami lonjakan dari Rp99 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp148 miliar pada tahun 2022, pos ini kembali menurun sebelum sedikit naik menjadi Rp116 miliar pada tahun 2024. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan pola yang berfluktuasi, tetapi secara keseluruhan mengalami tren peningkatan dari Rp269 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp347 miliar pada tahun 2024, mengindikasikan adanya peningkatan bantuan spesifik dari pemerintah pusat untuk mendanai program tertentu di daerah.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan signifikan selama periode lima tahun terakhir. Dari Rp581 miliar pada tahun 2020, pendapatan di pos ini menyusut drastis menjadi hanya Rp14 miliar pada tahun 2024. Penurunan tajam ini bisa jadi disebabkan oleh berkurangnya sumber-sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam PAD atau Dana Perimbangan, yang berpotensi mengurangi diversifikasi sumber pendapatan daerah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus untuk mengidentifikasi faktor penyebabnya dan mencari strategi baru dalam menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Secara keseluruhan, peningkatan total pendapatan didorong oleh pertumbuhan PAD dan Dana Perimbangan, dengan kontribusi terbesar dari Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Pajak Daerah. Namun, fluktuasi dalam Dana Bagi Hasil serta penurunan tajam pada pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah menunjukkan perlunya evaluasi kebijakan penerimaan daerah. Selain itu, lonjakan drastis pada Pendapatan Retribusi Daerah di tahun 2024 mengindikasikan adanya kebijakan baru yang berhasil atau perluasan objek retribusi yang dikelola pemerintah daerah. Ke depan, optimalisasi PAD, stabilisasi Dana Perimbangan, serta diversifikasi sumber pendapatan lainnya menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan yang

Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

b. Belanja Daerah

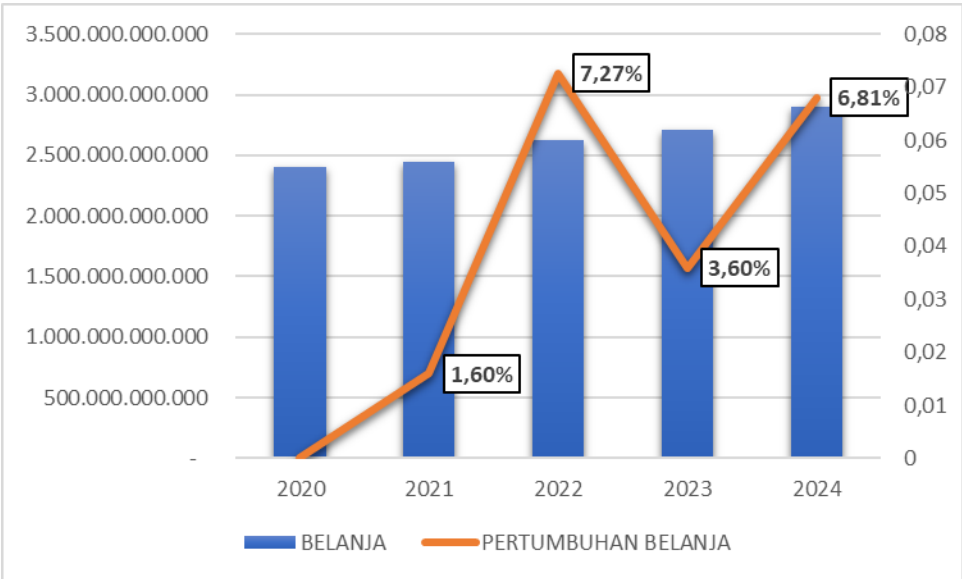
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali, serta pengeluaran lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas daerah dalam satu tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Mojokerto membagi belanja daerah ke dalam empat kategori utama, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Belanja Modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran, mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Belanja Tidak Terduga diperuntukkan bagi pengeluaran insidental seperti penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Adapun Belanja Transfer mencakup belanja bagi hasil dan bantuan keuangan yang ditransfer ke pemerintah desa atau pihak lain dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan APBD Pemerintah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu tahun 2020-2024 konsisten mengalami perkembangan yang positif.

Rincian perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 251
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	Relaisasi Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Belanja Daerah					
2.A	Belanja Operasi	1.541.563.060.206,29	1.627.564.911.485,46	1.709.049.408.436,19	1.749.284.603.751,19	1.865.164.204.622,74
2.A.1	Belanja Pegawai	859.503.050.561,65	929.951.169.942,00	954.870.472.831,77	921.800.933.771,19	976.295.889.000,00
2.A.2	Belanja Barang dan Jasa	571.601.346.687,64	634.842.541.472,46	678.109.055.382,42	673.553.783.286,00	714.273.166.142,07
2.A.3	Belanja Hibah	107.851.162.957,00	60.355.050.391,00	56.877.580.014,00	147.470.288.694,00	168.581.222.980,67
2.A.4	Belanja Bantuan Sosial	2.607.500.000,00	2.416.149.680,00	19.192.300.208,00	6.459.598.000,00	6.013.926.500,00
2.B	Belanja Modal	302.408.774.473,42	299.815.498.723,11	341.126.974.163,51	368.834.887.917,88	459.808.161.556,66
2.B.1	Belanja Modal Tanah	6.982.312.000,00	-	-	451.920.000,00	-
2.B.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.355.609.108,63	104.811.036.524,44	142.712.370.741,00	71.157.661.706,88	92.745.876.964,00
2.B.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.140.114.763,62	65.889.374.107,15	54.631.465.793,51	146.020.359.519,00	67.446.102.364,66
2.B.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	96.602.603.723,17	127.674.766.562,52	141.402.319.949,00	150.499.982.193,00	297.769.176.878,00
2.B.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	328.134.878,00	1.440.321.529,00	2.380.817.680,00	704.964.499,00	1.681.355.350,00
2.B.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	165.650.000,00
2.C	Belanja Tidak Terduga	106.659.968.262,00	26.300.682.093,48	4.567.036.920,00	1.394.558.239,00	523.774.591,00
2.C.1	Belanja Tidak Terduga	106.659.968.262,00	26.300.682.093,48	4.567.036.920,00	1.394.558.239,00	523.774.591,00
2.D	Belanja Transfer	454.267.099.991,00	489.625.679.310,00	566.105.513.590,00	595.579.745.619,00	574.490.050.062,00
2.D.1	Belanja Bagi Hasil	43.744.025.191,00	35.965.689.310,00	40.281.253.390,00	43.211.642.719,00	42.812.626.062,00
2.D.2	Belanja Bantuan Keuangan	410.523.074.800,00	453.659.990.000,00	525.824.260.200,00	552.368.102.900,00	531.677.424.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.404.898.902.932,71	2.443.306.771.612,05	2.620.848.933.109,70	2.715.093.795.527,07	2.899.986.190.832,40
	SURPLUS/ DEFISIT	(2.235.652.383,92)	163.641.786.820,49	(83.613.509.041,93)	(106.543.836.623,53)	(92.476.766.948,07)

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Gambar 2. 49 Pertumbuhan Belanja 2020-2024

Berdasarkan data belanja daerah dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat tren peningkatan belanja secara konsisten, dari Rp2,4 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp2,9 triliun pada tahun 2024. Mari kita analisis lebih dalam setiap komponennya:

Belanja Operasi mengalami kenaikan yang stabil dari Rp1,54 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,86 triliun pada tahun 2024. Komponen terbesar adalah Belanja Pegawai, yang terus meningkat dari Rp859 miliar di tahun 2020 menjadi Rp976 miliar di tahun 2024, mencerminkan adanya penyesuaian gaji, tunjangan, atau penambahan pegawai. Belanja Barang dan Jasa juga menunjukkan tren kenaikan dari Rp571 miliar di tahun 2020 menjadi Rp714 miliar di tahun 2024, yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan operasional pemerintah daerah. Yang menarik adalah Belanja Hibah yang sempat turun drastis di tahun 2021 dan 2022, namun melonjak signifikan di tahun 2023 dan 2024 menjadi Rp168 miliar, yang disebabkan oleh kebijakan peningkatan dukungan kepada lembaga sosial atau komunitas. Sebaliknya, Belanja Bantuan Sosial cenderung fluktuatif dengan angka yang relatif kecil, berkisar antara Rp2,6 miliar hingga Rp6 miliar, menunjukkan prioritas yang lebih rendah dibandingkan pos lainnya.

Belanja Modal mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp302 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp459 miliar pada tahun 2024. Pos ini digunakan untuk investasi aset jangka panjang dan infrastruktur. Komponen terbesar adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, yang melonjak dari Rp96 miliar di tahun 2020 menjadi Rp297 miliar di tahun 2024, menandakan adanya fokus besar pada pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, Belanja Modal Tanah hanya muncul di tahun 2020 dan 2023, sementara Belanja Modal Peralatan dan Mesin cenderung fluktuatif, dengan angka tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp142 miliar sebelum turun menjadi Rp92 miliar di tahun 2024. Belanja Modal Gedung dan Bangunan juga berfluktuasi, dengan lonjakan signifikan di tahun 2023 sebelum kembali menurun pada tahun 2024. Ini bisa mengindikasikan adanya proyek pembangunan besar yang selesai dalam kurun waktu

tertentu.

Belanja tidak terduga Pos ini mengalami penurunan drastis dari Rp106 miliar di tahun 2020 menjadi hanya Rp523 juta di tahun 2024. Ini mungkin disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat setelah puncak pandemi COVID-19.

Belanja Transfer juga mengalami peningkatan secara umum dari Rp454 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp531 miliar pada tahun 2024. Belanja Bagi Hasil cenderung stabil di kisaran Rp40-43 miliar setiap tahunnya, sementara Belanja Bantuan Keuangan terus meningkat dari Rp410 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp531 miliar pada tahun 2024, mencerminkan komitmen yang lebih besar untuk mendukung pemerintah desa atau lembaga lainnya di daerah.

Secara keseluruhan, peningkatan belanja daerah menunjukkan fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan pegawai, yang tercermin dari kenaikan belanja pegawai dan belanja modal infrastruktur. Penurunan belanja tidak terduga mengindikasikan situasi yang lebih stabil, sementara lonjakan belanja hibah dan bantuan keuangan menunjukkan adanya perhatian lebih pada dukungan komunitas dan pembangunan daerah. Namun, perlu dicermati efisiensi penggunaan anggaran agar belanja yang meningkat sejalan dengan hasil yang dicapai

Tabel 2. 252
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	2.408.824.186.634,90	2.096.872.534.075,43	87,05
2020	2.700.485.472.703,51	2.404.898.902.932,71	89,05
2021	2.760.095.112.268,00	2.443.306.771.612,05	88,52
2022	2.990.550.815.911,00	2.620.848.933.109,70	87,64
2023	2.963.109.428.944,00	2.715.093.795.527,07	91,63
2024	3.088.759.730.158,00	2.899.986.190.832,40	93,89

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 2. 253
Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Mojokerto

Tahun	APBD	Belanja pegawai	TPG	%
2019	2.408.824.186.634,90	904.511.791.678,00	184.398.675.480,00	29,89
2020	2.700.485.472.703,51	859.503.050.561,65	158.466.073.800,00	25,96
2021	2.760.095.112.268,00	929.951.169.942,00	170.965.139.000,00	27,50
2022	2.990.550.815.911,00	954.870.472.831,77	149.237.495.160	26,94
2023	2.963.109.428.944,00	921.800.933.771,19	142.320.654.000,00	26,31
2024	3.088.759.730.158,00	976.295.889.000,00	190.413.345.796,00	25,44

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

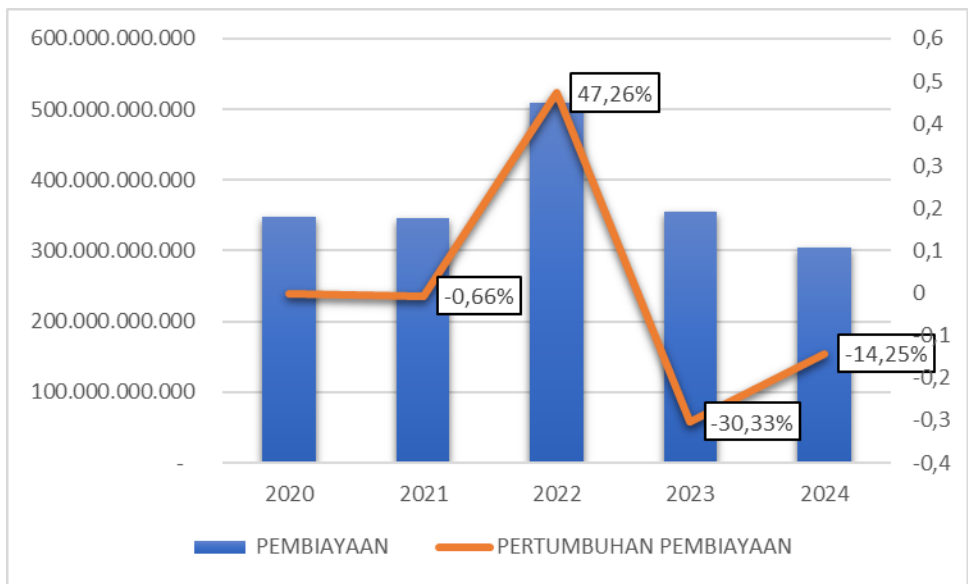
1. **Penerimaan Pembiayaan** bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020-2024:

Tabel 2. 254
Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2024

NO	URAIAN	Relaisasi Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Pembiayaan Daerah					
3.A	Penerimaan Pembiayaan	351.685.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	426.235.454.984,97	304.598.443.487,15
3.A.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	351.685.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	426.235.454.984,97	248.691.630.864,15
3.A.2	Pencairan Dana Cadangan					55.000.000.000,00
1.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					906.812.623,00
3.B	Pengeluaran Pembiayaan	3.156.000.000,00	-	-	71.000.000.000,00	-
3.B.1	Pembentukan Dana Cadangan				55.000.000.000,00	
3.B.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.156.000.000,00			16.000.000.000,00	
3.B.3	Pembayaran Pokok Utang					
3.B.4	Pembayaran Hutang Jangka Pendek					
	PEMBIAYAAN NETO	348.529.673.129,33	346.224.427.240,41	509.848.964.026,90	355.235.454.984,97	304.598.443.487,15

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Gambar 2. 50 Pertumbuhan Pembiayaan 2020-2024

Sumber: BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Penerimaan pembiayaan sangat bergantung pada SiLPA, yang jumlahnya cukup fluktuatif, menandakan adanya efisiensi atau realisasi belanja yang belum maksimal di beberapa tahun. Pengeluaran pembiayaan hanya terjadi di tahun-tahun tertentu, dengan fokus pada pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal, yang mencerminkan strategi kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak adanya pembayaran utang dalam lima tahun terakhir menunjukkan posisi fiskal yang relatif sehat, dengan Risiko pembiayaan yang rendah. Perlu diwaspadai penurunan penerimaan pembiayaan di tahun 2024, yang mungkin berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah atau efisiensi belanja yang lebih baik.

d. Neraca Daerah

Aset, Hutang (Kewajiban), dan Ekuitas Dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Lebih lanjut, sebagaimana dielaborasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi

manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel

berikut:

Tabel 2. 255
Realisasi Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	489.232.845.554,77	704.106.351.662,97	549.018.125.659,23	353.435.864.041,36	343.338.877.872,00
	B. Investasi Jangka Panjang	78.869.532.191,19	85.955.452.947,27	90.117.317.571,27	109.646.129.252,80	111.773.587.764,55
	C. Aset Tetap	5.370.947.927.636,15	5.452.288.983.269,55	5.425.896.293.253,87	5.425.516.507.741,47	5.414.877.584.149,78
	D. Dana Cadangan				55.000.000.000,00	
	E. Aset Lainnya	9.989.486.574,09	12.096.409.280,87	24.888.583.852,71	31.573.335.751,25	11.599.469.721,85
	F. Properti Investasi					144.986.482.692,00
	JUMLAH ASET	5.949.039.791.956,20	6.254.447.197.160,66	6.089.920.320.337,08	5.975.171.836.786,88	6.026.576.002.200,18
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	34.414.101.774,42	86.119.473.478,10	81.764.896.172,67	76.054.304.435,12	79.397.268.550,45
	B. Kewajiban Jangka Panjang					
	JUMLAH KEWAJIBAN	34.414.101.774,42	86.119.473.478,10	81.764.896.172,67	76.054.304.435,12	79.397.268.550,45
3	EKUITAS					
	Ekuitas	5.914.625.690.181,78	6.168.327.723.682,56	6.008.155.424.164,41	5.899.117.532.351,76	5.947.178.733.649,73
	JUMLAH EKUITAS	5.914.625.690.181,78	6.168.327.723.682,56	6.008.155.424.164,41	5.899.117.532.351,76	5.947.178.733.649,73
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.949.039.791.956,20	6.254.447.197.160,66	6.089.920.320.337,08	5.975.171.836.786,88	6.026.576.002.200,18

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto 2024

Tabel 2. 256
Perkembangan Neraca Daerah Tahun 2020-2024

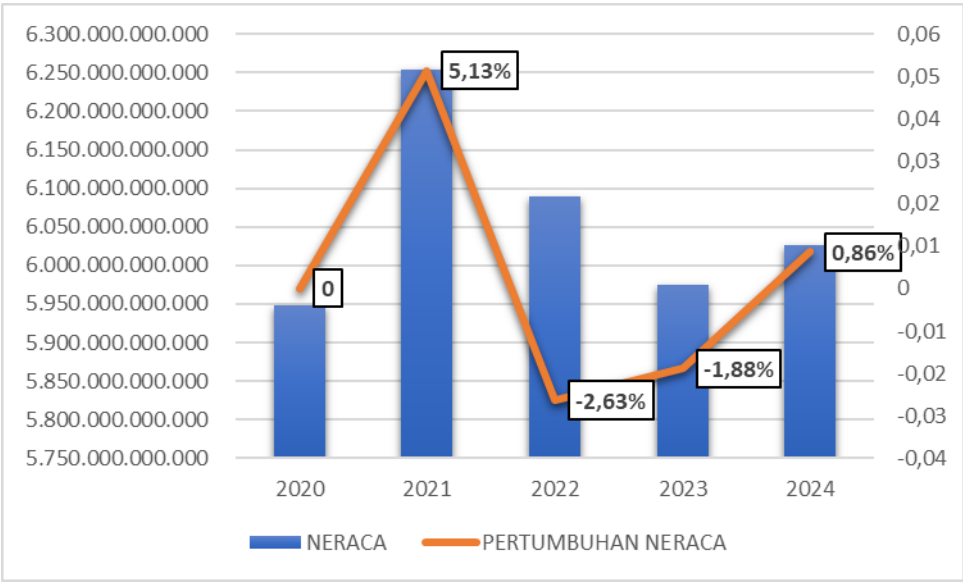
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
1.1.	ASET LANCAR					
	Kas di Kas Daerah	302,273,957,827.35	439,325,171,949.98	325,574,098,043.29	207,586,133,851.84	183.302.859.221,46
	Kas di Bendahara Penerimaan	5,631,000.00		669,000.00	222,000.00	37.200,00
	Kas Bendahara Pengeluaran	19,000,000.00		0.00		0,00
	Kas di BLUD	34,815,529,626.55	70,337,295,254.43	100,244,367,669.61	37,899,919,116.53	26.150.184.345,91
	Kas di Bendahara JKN Kapitasi	6,432,122,086.96	0.00	0.00	3,190,371,679.00	2.563.734.296,00
	Kas Bendahara Pengeluaran - BOS	1,560,506,163.55	203,746,856.49	416,320,272.07	14,971,714.07	104.861.475,71
	Stara Kas dan Kas Lainnya	1,208,448,882.00	7,907,006.00	12,514,967.00	19,380,087	3.568.704,00
	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	Piutang Pendapatan	105.952.506.574,50	164,309,003,027.50	133,226,540,759.14	130,258,863,301.21	152.326.779.881,63
	Piutang Lainnya	22.235.976.803,37	895,436,721.13	540,309,548.85	478,758,852.00	478,758,852.00
	Penyisihan Piutang	(42.029.236.349.25)	(51,648.659.121.43)	(60,476,724,266.56)	(69,098,321,262.93)	(64.332.332.926,65)
	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Persediaan	56,758,402,939.74	80,676,449,968.87	49,480,029,665.83	43,085,564,702.64	41.740.426.821,94
	JUMLAH ASET LANCAR	489,232,845,554.77	704,106,351,662.97	549,018,125,659.23	353,435,864,041.36	343.338.877.872,00
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG					
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi dalam royek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Dana Bergulir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Non Permanen Lainnya	2,963,980,524.52	1,814,084,250.16	1,814,084,250.16	1,814,084,250.16	
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2,963,980,524.52	1,814,084,250.16	1,814,084,250.16	1,814,084,250.16	0.00
	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	75,905,551,666.67	84,141,368,697.11	88,303,233,321.11	107.832.045.002,64	111.773.587.764,55
	Investasi Permanen Lainnya	0.00				
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	75,905,551,666.67	84,141,368,697.11	88,303,233,321.11	107.832.045.002,64	111.773.587.764,55
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	78,869,532,191.19	85,955,452,947.27	90,117,317,571.27	109,646,129,252.80	111.773.587.764,55
1.3.	ASET TETAP					
	Tanah	2,799,995,034,420.86	2,889,784,877,420.86	2,889,784,877,420.86	2,890,273,032,420.86	2.805.503.700.758,25
	Peralatan dan Mesin	967,786,116,749.26	1,074,739,247,465.70	1,215,274,494,483.60	1,267,733,057,741.55	1.360.295.606.118,69
	Gedung dan Bangunan	1,370,950,825,551.90	1,445,650,667,453.34	1,508,369,493,244.72	1,652,016,796,625.72	1.716.594.750.217,42
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,762,019,206,870.08	3,029,631,771,910.32	3,174,513,108,296.92	3,321,441,857,601.92	3.633.234.980.292,05
	Aset Tetap Lainnya	6,605,634,141.99	6,838,707,027.99	11,139,670,174.49	15,629,496,523.49	16.710.610.823,47
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	16,740,132,200.00	12,206,142,377.00	6,797,610,038.00	9,443,840,013.60	4.491.454.680,00
	Akumulasi Penyusutan	(2,553,149,022,297.94)	(3,006,562,430,385.66)	(3,379,982,960,404.72)	(3,731,021,573,185.67)	(4.121.953.518.740,10)
	JUMLAH ASET TETAP	5,370,947,927,636.15	5,452,288,983,269.55	5,425,896,293,253.87	5,425,516,507,741.47	5.414.877.584.149,78
1.4.	DANA CADANGAN					
	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	55,000,000,000.00	0.00
	JUMLAH DANA CADANGAN	0.00	0.00	0.00	55,000,000,000.00	0.00
1.5.	ASET LAINNYA					

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	43,779,824,703.37	43,577,104,121.04	43,304,771,604.39	43,187,620,737.67	42.588.368.168,05
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aset Tidak Berwujud	6,120,949,152.00	7,788,184,895.00	8,763,787,297.00	9,149,192,897.00	9.538.442.897,00
	Aset Lain-lain	85.799.834.658,45	53.056.805.187,10	51.577.673.109,58	55,525.876,341.38	29.242.934.394,79
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(4,701,035,752.00)	(5,976,763,737.75)	(7,051,838,087.00)	(7,996,483,998.25)	(8.797.925.859,50)
	Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(43,743,275,603.37)	(43.556.218.921,04)	(43,286,292,964.39)	(43.144.535.249,88)	(42.588.368.168,05)
	Penyisihan Piutang Aset lain-Lain	(77.266.810.584,36)	(42.792.702.263,48)	(28.419.517.106,87)	(25.148.334.976,67)	(18.383.981.710,44)
	JUMLAH ASET LAINNYA	9,989,486,574.09	12,096,409,280.87	24,888,583,852.71	31,573,335,751.25	11.599.469.721,85
	JUMLAH ASET	5,949,039,791,956.20	6,254,447,197,160.66	6,089,920,320,337.08	5,975,171,836,786.88	6.026.576.002.200,18
2	KEWAJIBAN					
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21,174,841.00	7,907,006.00	12,514,967.00	19,380,087.00	3.568.704,00
	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Diterima Dimuka	3,310,627,466.42	2,165,105,362.42	2,280,907,830.67	3,358,414,638.52	4.149.909.329,25
	Utang Beban	29,872,894,897.00	56,234,544,918.28	56,575,945,975.00	51.806.947.415,60	74.805.590.920,20
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,209,404,570.00	27,711,916,191.40	22,895.527.400.00	20.869.562.294,00	438.199.597,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	34,414,101,774.42	86,119,473,478.10	81,764.896.172.67	76,054,304,435.12	79.397.268.550,45
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Lainnya					
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	34,414,101,774.42	86,119,473,478.10	81,764.896.172.67	76,054,304,435.12	79.397.268.550,45
3	EKUITAS DANA					
3.1.	EKUITAS	5,914,625,690,181.78	6,168,327,723,682.56	6,008,155.424.164.41	5,899,117,532,351.76	5.947.178.733.649,73
	JUMLAH KEWAJIBAN DANA EKUITAS DANA	5,949,039,791,956.20	6,254,447,197,160.66	6,089,920,320,337.08	5,975,171,836,786.88	6.026.576.002.200,18

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024



Gambar 2. 51 Pertumbuhan Neraca Tahun 2020-2024

Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, serta aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya). Semua aset tersebut dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Di sisi lain, kondisi keuangan daerah bisa dikatakan baik jika rasio antara kewajiban (hutang) dan asset daerah adalah kecil. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa jika rasio antara jumlah hutang dan jumlah aset semakin kecil persentasenya, maka kondisi keuangan pemerintah daerah tersebut semakin sehat (baik).

Data tentang rasio antara jumlah Kewajiban (Hutang) dan jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2019-2023 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 257
Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tahun Anggaran	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban	%
2019	5,946,657,032,180.40	29,903,160,130.60	0,50%
2020	5,949,039,791,956.20	34,414,101,774.42	0,57%
2021	6,256,289,304,653.94	83,314,895,242.82	1,33%
2022	6,089,920,320,337.08	81,764,896,172.67	1,34%
2023	5,975,171,836,786.88	76,054,304,435.12	1,27%
2024	6.007.952.251.770,23	71.923.686.852,05	1,20%

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Rasio hutang terhadap total aset menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nilai *leverage* menunjukkan kisaran angka di bawah di bawah 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto didanai dari modal sendiri. Tingkat *leverage* tersebut mengindikasikan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada kondisi yang sehat. Sedangkan rasio aktivitas yang dihitung rata-rata umur piutang, menunjukkan lama terbayarnya piutang yang cukup pendek. Kondisi ini juga menunjukkan membaiknya kemampuan untuk aktivitas kinerja keuangan. Secara umum kondisi keuangan yang dicerminkan melalui rasio neraca dan APBD dapat ditunjukkan pada uraian di bawah ini.

Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Pemerintah Kabupaten.

Tabel 2. 258
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan+ Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian + Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau PemDa Lainnya)	Rasio Kemandirian (2/3*100)
1	2	3	4
2019	554,999,510,278.91	2,009,370,003,796.00	27.62
2020	537,297,509,364.79	1,865,365,741,184.00	28.80
2021	625,418,916,520.09	1,981,529,641,912.45	31.56

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan+ Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian + Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau PemDa Lainnya)	Rasio Kemandirian (2/3*100)
1	2	3	4
2022	676,708,151,150.77	1,860,527,272,917.00	36.37
2023	656,126,287,019.54	1,952,423,671,884.00	33.61
2024	719,744,298,887.33	2,072,793,395,997.00	34.72

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Secara umum, Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa dikatakan cukup bagus. Secara konseptual bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan Pemkab terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana tertuang dalam tabel di atas, terjadi perkembangan mulai tahun 2019 sebesar 27,62%, naik menjadi 28,80% pada Tahun 2020, hingga mengalami kenaikan menjadi 36,37% pada Tahun 2022. Namun menurun menjadi 33,61% satu tahun berikutnya yakni pada Tahun 2023. Pada tahun 2024 naik menjadi 34,72%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap Pemerintah Pusat secara rata-rata semakin berkurang dari tahun ke tahun.

2) Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total Pendapatan dan Penerimaan Daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan Lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah.

Tabel 2. 259
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

No	U R A I A N	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	2,709,981,615,797	2,851,837,319,792	2,968,026,150,217	3,022,814,619,088	3,061,994,595,983	3,116,459,919,645
1.A	Pendapatan Asli Daerah	710,974,249,945	871,880,408,642	881,794,443,850	896,586,360,508	908,898,087,718	923,556,049,472
1.B	Pendapatan Transfer	1,999,007,365,852	1,979,956,911,150	2,086,231,706,367	2,126,228,258,580	2,153,096,508,265	2,192,903,870,172
1.C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	3,013,673,234,158	3,069,365,339,477	3,074,323,941,150	3,122,111,662,958	3,189,681,941,174	3,213,449,846,459
2.A	Belanja Operasi	1,940,734,956,866	1,958,599,150,246	2,033,321,349,990	2,075,374,377,189	2,120,066,547,833	2,111,447,937,663
2.B	Belanja Modal	503,960,775,491	517,388,290,946	447,624,692,875	453,359,387,484	476,237,495,056	508,624,010,511
2.C	Belanja Tidak Terduga	3,153,451,274	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
2.D	Belanja Transfer	565,824,050,527	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285
	Surplus/Defisit	(303,691,618,361)	(217,528,019,685)	(106,297,790,933)	(99,297,043,870)	(127,687,345,191)	(96,989,926,814)
3	Pembiayaan						
3.A	Penerimaan Pembiayaan	303,691,618,361	217,528,019,685	136,297,790,933	129,297,043,870	157,687,345,191	96,989,926,814
3	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	303,691,618,361	217,528,019,685	136,297,790,933	129,297,043,870	157,687,345,191	96,989,926,814
3.B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-
	Pembiayaan Neto	303,691,618,361	217,528,019,685	106,297,790,933	99,297,043,870	127,687,345,191	96,989,926,814

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

Tabel 2. 260
Proyeksi APBD Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Periode 2026–2030

No	U R A I A N	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	2,709,981,615,797	2,851,837,319,792	2,968,026,150,217	3,022,814,619,088	3,061,994,595,983	3,116,459,919,645
1.A	Pendapatan Asli Daerah	710,974,249,945	871,880,408,642	881,794,443,850	896,586,360,508	908,898,087,718	923,556,049,472
1.A.1	Pajak Daerah	389,044,500,000	520,729,995,869	530,185,975,485	538,018,765,117	544,619,140,419	550,431,523,228
1.A.2	Retribusi Daerah	306,387,556,951	326,755,740,392	336,131,020,792	342,857,986,103	348,255,145,825	356,780,248,742
1.A.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,207,692,994	12,038,409,877	12,025,239,724	12,205,618,320	12,449,730,686	12,698,725,300
1.A.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	4,334,500,000	12,356,262,504	3,452,207,850	3,503,990,968	3,574,070,787	3,645,552,203
1.B	Pendapatan Transfer	1,999,007,365,852	1,979,956,911,150	2,086,231,706,367	2,126,228,258,580	2,153,096,508,265	2,192,903,870,172
1.B.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,761,274,207,352	1,849,591,933,030	1,950,652,129,122	1,985,225,498,245	2,006,453,637,517	2,040,395,284,594
	DBH	114,902,944,352	119,518,371,440	124,299,106,298	129,271,070,550	134,441,913,371	137,130,751,639
	DAU	966,979,164,000	1,033,334,039,920	1,110,667,401,517	1,120,654,097,577	1,128,830,638,553	1,135,607,466,710
	DAK Fisik	27,444,617,000	29,646,746,480	30,832,616,339	32,065,920,993	32,386,580,203	34,015,528,989
	DAK Non Fisik	332,628,699,000	353,378,849,200	367,514,003,168	382,214,563,295	386,036,708,928	405,453,208,743
	Dana Insentif Fiskal	29,129,746,000	16,264,551,680	16,915,133,747	17,591,739,097	18,295,408,661	18,661,316,834
	Dana Desa	290,189,037,000	297,449,374,310	300,423,868,053	303,428,106,734	306,462,387,801	309,527,011,679
1.B.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	237,733,158,500	130,364,978,120	135,579,577,245	141,002,760,335	146,642,870,748	152,508,585,578
1.C	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Daerah	3,013,673,234,158	3,069,365,339,477	3,074,323,941,150	3,122,111,662,958	3,189,681,941,174	3,213,449,846,459
2.A	Belanja Operasi	1,940,734,956,866	1,958,599,150,246	2,033,321,349,990	2,075,374,377,189	2,120,066,547,833	2,111,447,937,663
2.A.1	Belanja Pegawai	1,004,029,940,156	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258
2.A.2	Belanja Barang dan Jasa	758,394,417,418	808,871,762,761	865,116,904,094	871,239,685,542	879,705,099,160	923,690,348,319
2.A.3	Belanja Hibah	172,354,650,942	112,957,052,513	118,604,905,138	154,535,150,889	190,761,907,915	137,300,003,311
2.A.4	Belanja Bantuan Sosial	5,955,948,350	4,331,699,715	17,160,905,500	17,160,905,500	17,160,905,500	18,018,950,775

No	U R A I A N	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.B	Belanja Modal	503,960,775,491	517,388,290,946	447,624,692,875	453,359,387,484	476,237,495,056	508,624,010,511
2.B.1	Belanja Modal Tanah	-	150,000,000,000				
2.B.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,760,078,754	58,357,200,569	61,275,060,597	64,338,813,627	67,555,754,309	73,635,772,196
2.B.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72,344,044,615	137,285,660,147	213,097,686,082	214,327,278,437	216,548,119,726	225,285,630,827
2.B.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	325,038,762,790	171,455,390,830	172,961,906,796	174,403,256,019	191,843,581,621	209,412,568,087
2.B.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,684,109,332	94,039,400	94,039,400	94,039,400	94,039,400	94,039,400
2.B.6	Belanja Modal Aset Lainnya	133,780,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000
2.C	Belanja Tidak Terduga	3,153,451,274	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
2.C.1	Belanja Tidak Terduga	3,153,451,274	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
2.D	Belanja Transfer	565,824,050,527	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285
2.D.1	Belanja Bagi Hasil	62,164,038,527	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000
2.D.2	Belanja Bantuan Keuangan	503,660,012,000	509,377,898,285	509,377,898,285	509,377,898,285	509,377,898,285	509,377,898,285
	Surplus/Defisit	(303,691,618,361)	(217,528,019,685)	(106,297,790,933)	(99,297,043,870)	(127,687,345,191)	(96,989,926,814)
3	Pembiayaan						
3.A	Penerimaan Pembiayaan	303,691,618,361	217,528,019,685	136,297,790,933	129,297,043,870	157,687,345,191	96,989,926,814
3.A.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	248,691,618,361	217,528,019,685	136,297,790,933	99,297,043,870	97,687,345,191	96,989,926,814
3.A.2	Pencairan Dana Cadangan	55,000,000,000	-	-	30,000,000,000	60,000,000,000	-
3	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	303,691,618,361	217,528,019,685	136,297,790,933	129,297,043,870	157,687,345,191	96,989,926,814
3.B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-
3.B.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	-
3.B.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
3.B.3	Pembayaran Pokok Utang						
3.B.4	Pembayaran Utang Jangka Pendek						
	Pembiayaan Neto	303,691,618,361	217,528,019,685	106,297,790,933	99,297,043,870	127,687,345,191	96,989,926,814

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk 5 Tahun ke depan diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang cukup dinamis selama beberapa tahun terakhir, maka pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 difokuskan pada:

1. Peningkatan volume PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Pemkab melalui Peraturan Daerah. Di samping itu juga dilakukan dengan jalan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada Bagi Hasil Pajak Daerah.
7. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan
9. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah.

10. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
11. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Mojokerto.
12. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
13. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
14. Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi ETPD guna meningkatkan transparansi keuangan daerah serta mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka optimalisasi PAD;
15. Pengembangan transaksi pembayaran digital dan mewujudkan keuangan yang inklusif serta meningkatkan integritas ekonomi dan keuangan digital.

Sedangkan untuk Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, khususnya dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanaan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program- program dan

kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.

3. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
4. Optimalisasi Belanja Daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif
5. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.

Di samping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2025-2029 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain

- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja; Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 3) Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek Pengeluaran Pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya mencakup pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

1. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
3. Kebijakan yang dilakukan dalam konteks Pengeluaran Pembiayaan harus mempertimbangkan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan

Tabel 2. 261
Perkembangan Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan	2.402.663.250.549	2.606.948.558. 433	2.537.235.424.068	2.608.549.958. 904	2.807.509.423. 884
	dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	2.404.898.902.933	2.443.306.771. 612	2.620.848.933.110	2.715.093.795. 527	2.899.986.190. 832
3	Pengeluaran Pembiayaan	3.156.000.000	-	-	71.000.000. 000	-
	Defisit Riil	(5.391.652. 384)	163.641.786. 820	(83.613.509. 042)	(177.543.836. 624)	(92.476.766. 948)

2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah sebagai rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan RPJMD. Dengan mengetahui permasalahan dan isu strategis daerah diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan dan isu strategis tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional, maupun tingkat nasional.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan.

Tabel 2. 262
Identifikasi Permasalahan Pembangunan

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.1	Pendidikan	1. Masih terdapatnya anak putus sekolah, anak tidak sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah 2. Belum optimalnya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan. 3. Ketersediaan guru yang kurang merata.
1.2	Kesehatan	1. Angka Kematian Ibu dan Neonatal Tinggi. 2. Masih belum optimalnya pengembangan sistem informasi kesehatan/digitalisasi data. 3. Masih tingginya kasus balita gizi buruk dan gizi kurang. 4. Masing tingginya angka stunting. 5. Peningkatan penyebaran penyakit menular seperti TB, Malaria, dan Dengue. 6. Tingginya kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kanker. 7. Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat. 8. Meningkatnya perokok aktif. 9. Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil. 10. Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan).

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		11. Pemantauan kualitas air secara rutin untuk mencapai target akses air minum aman.
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Air Minum : 1. Akses layak air minum belum mencapai 100%. 2. Akses layak perpipaan PDAM dan non PDAM belum 30%. 3. Terdapat <i>idle capacity</i> yang masih bisa di manfaatkan. 4. Terdapat daerah rawan air yang kebutuhan air minumnya harus segera dipenuhi. Aspek Teknis Persampahan : 1. Masih ada 58,5 % sampah belum terkelola. 2. Belum meratanya TPS 3R dan bank sampah kelurahan/desa. 3. Banyak infrastruktur persampahan (TPS 3R dan TPST) yang belum beroperasi. 4. Membutuhkan penambahan lahan baru dan kebutuhan sarana prasarana pendukungnya untuk pengembangan TPA Karangdiyeng, Desa Karangdiyeng agar bisa mencapai target pelayanan, diperkirakan umur TPA Karangdiyeng akan penuh dalam waktu 4 tahun lagi. 5. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 6. Kurangnya armada pengangkutan persampahan. 7. Kurangnya pemilahan sampah dari sumbernya. 8. Kebutuhan sarana dan prasarana TPS3R pada lokasi pembangunan kawasan pedesaan Kecamatan Gondang (5 Desa). Aspek Teknis Air Limbah Domestik : 1. Masih terdapat akses belum layak 0,5% (1.782 RT). 2. Akses aman masih 0,03 %. 3. Terdapat MCK kombinasi + IPAL komunal ada 9 unit : 8 unit berfungsi tetapi kurang optimal, 1 unit IPAL berfungsi tetapi belum ada sambungan rumah dikarenakan kondisi lokasi IPAL beda elevasi IPAL komunal belum berfungsi optimal (rata-rata pemakaian masih 33,3 %). Aspek Regulasi Air Limbah Domestik : 1. Draft perda air limbah domestik masih proses pengesahan. 2. Belum ada regulasi pelaksanaan LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal). Aspek Kelembagaan Air Limbah Domestik : 1. Belum terbentuknya UPTD air limbah domestik aspek pendanaan air limbah domestik 2. Pendanaan terbesar masih APBN dan APBD Kabupaten. 3. Belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa terkait sanitasi. Irigasi : 1. Kebutuhan pembangunan irigasi primer dalam rangka

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		pembangunan kawasan perdesaan. 2. Kebutuhan embung air mendukung pertanian di desa Kemasantani, padi dan Kebontunggul. Akses Jalan 1. Penurunan kualitas jalan yang semakin cepat karena lalu lintas yang padat, penambahan beban dan jumlah kendaraan serta perubahan iklim yang ekstrem. 2. Belum berjalannya skema pembiayaan dari swasta, yang berdampak pada beban proporsi APBD karena Kebutuhan anggaran yang besar untuk menangani seluruh ruas jalan. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas, Banyak pekerja konstruksi yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, serta kurangnya jumlah tenaga ahli dalam bidang teknik dan manajemen proyek. 2. Masih kurangnya Regulasi daerah terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah kabupaten 3. Belum terdatanya proyek swasta yang berjalan di wilayah kabupaten 4. Belum optimalnya Pengawasan dan Pembinaan tertib usaha dan penyelenggaraan jasa konstruksi Penataan Ruang 1. Perlunya optimalisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Mojokerto. 2. Perlunya penguatan upaya pencegahan terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi non-pertanian. 3. Perlunya pengelolaan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis dan kawasan rawan bencana
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Minimnya penanganan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). 2. Kurangnya pemeliharaan PSU perumahan yang sudah diserahkan ke pemda. 3. Minimnya penanganan kawasan permukiman kumuh.
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	BAKESBANGPOL 1. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat. BPBD 1. Jumlah anggota TRC yang memenuhi standarisasi dan sertifikasi kompetensi SDM penanggulangan bencana masih kurang. 2. Kurang kuatnya kelembagaan melalui DESTANA (Desa Tangguh Bencana) untuk membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai bentuk Pengurangan RISIKO Bencana (PRB). 3. Kurangnya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam bidang proteksi kebakaran untuk Pengembangan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL).

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		SATPOL PP - Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya. - Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal.
1.6	Sosial	- Jangkauan, mutu, dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang. - Masih adanya penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang tidak terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. - Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan PPKS.
II.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2.1	Tenaga Kerja	- Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). - Tingginya RISIKO Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto. - Lemahnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64 tahun. - Kurangnya kebijakan mengenai responsif gender untuk mendukung pemberdayaan perempuan. - Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal. - Meningkatnya angka pernikahan anak.
2.3	Pangan	- Belum optimalnya distribusi pangan dan panjangnya rantai pemasaran sehingga berpengaruh pada fluktuasi harga pangan - Belum optimalnya diversifikasi pangan (penganekaragaman konsumsi pangan) - Belum optimalnya ketersediaan pangan daerah sehingga diperlukan penguatan cadangan pangan - Belum optimalnya mutu dan keamanan pangan - Masih tingginya angka pemborosan pangan (<i>food loss</i>) di masyarakat yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.
2.4	Lingkungan Hidup	- Rendahnya kesadaran masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. - Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup. - Meningkatnya pencemaran air, udara, tanah, dan polusi perairan. - Rendahnya jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. - Pengelolaan TPS3R yang belum optimal. - Pengelolaan TPA yang belum optimal. - Rendahnya jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). - Kebutuhan sarana pengangkutan sampah dan kotoran hewan ternak.
2.5	Administrasi Kependudukan dan	Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian Masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
	Pencatatan Sipil	2. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa. 2. Masih banyak desa yang belum tertib dalam pengelolaan asetnya.
2.7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Unmet Need masih tinggi. 2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
2.8	Komunikasi dan Informatika	1. Belum optimalnya integrasi data dan informasi Perangkat Daerah yang memenuhi standar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Belum optimalnya implementasi Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah. 3. Belum optimalnya layanan komunikasi publik yang mengimplementasikan strategi komunikasi publik dalam menginformasikan kinerja lembaga dan potensi daerah. 4. Belum optimalnya keamanan teknologi informasi. 5. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2.9	Statistik	1. Kurangnya kesadaran atau pemahaman dari OPD terkait tentang pentingnya metadata, cara menyusun metadata, serta cara menggunakan dan mengelolanya dengan baik.
2.10	Persandian	2. Teknologi terkait keamanan informasi yang memiliki harga tinggi
2.11	Koperasi, Usaha Mikro	1. Pengembangan/diversifikasi usaha pada koperasi umum rendah. 2. Kesadaran/minat masyarakat berkoperasi masih rendah. 3. Kurangnya peluang produk UMKM untuk masuk dalam rantai pasok perdagangan baik skala lokal regional maupun global. 4. Masih rendahnya pertumbuhan wirausaha baru. 5. Kurang optimalnya jaringan kemitraan antara pelaku usaha mikro dengan pelaku usaha menengah dan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto. 6. Masih rendahnya jumlah usaha mikro formal.
2.12	Penanaman Modal	1. Belum optimalnya peningkatan iklim investasi dan usaha. 2. Belum semua kecamatan memiliki regulasi tentang RDTR sehingga mengurangi minat calon investor untuk menanamkan modalnya di Kab. Mojokerto.
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	1. Belum optimalnya pembinaan pemuda dalam pengembangan prestasi pemuda. 2. Kurangnya peran aktif organisasi kepemudaan dalam kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		kepemudaan. 3. Kurangnya minat pemuda untuk berwirausahak 4. Belum optimalnya pembinaan atlet dalam pengembangan prestasi olahraga. 5. Kualitas dan kuantitas atlet dan pelatih olahraga belum memenuhi standar. 6. Rendahnya kesadaran pengguna fasilitas olahraga dalam menjaga fasilitas olahraga.
2.14	Kebudayaan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan even seni/budaya baik ditingkat daerah maupun luar daerah. 2. Rendahnya minat masyarakat terhadap seni budaya tradisional. 3. Kurangnya motivasi anggota komunitas seni dalam rangka pengenalan seni tradisi baik di kota maupun untuk pentas seni ke luar. 4. Kurangnya pengenalan dan pemberdayaan seni/budaya daerah di kalangan pelajar. 5. Kurangnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya. 6. Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representatif. 7. Pelestarian Benda Cagar Budaya masih lemah, masih banyak kekayaan budaya berupa benda cagar budaya yang dimiliki perorangan. 8. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pertumbuhan & perkembangan kebudayaan.
2.15	Perpustakaan	1. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). 2. Masih rendahnya tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2.16	Kearsipan	1. Belum optimalnya penyelenggaraan kearsipan dan pengelolaan arsip dinamis di lembaga pencipta arsip, perangkat daerah Kabupaten. 2. Masih adanya arsip inaktif yang tersimpan di lembaga kearsipan tetapi belum memiliki daftar akses arsip. 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan arsip.
2.17	Perhubungan	1. Perlunya penambahan titik lokasi ATCS dalam rangka mendukung <i>smart city</i> . 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan. 3. Tingkat Keselamatan LLAJ di Kabupaten Mojokerto belum optimal. 4. Kebutuhan sarana dan prasarana angkutan wisata dalam rangka mendukung kawasan agrowisata pertanian terpadu.
III.	URUSAN PILIHAN	

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
3.1	Perikanan	1. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan. 2. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat berupa ketersediaan benih ikan dan pakan ikan dengan harga relatif murah dan berkualitas. 3. Belum optimalnya PDRB sub kategori perikanan.
3.2	Pariwisata	1. Belum optimalnya kunjungan wisatawan. 2. Kurangnya jangkauan promosi untuk obyek wisata daerah.
3.3	Pertanian	1. Produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan masih rentan dengan perubahan iklim sebagai dampak adanya pemanasan global.
3.4	Perindustrian dan Perdagangan	1. Masih banyaknya alat UTP yang belum di tera/tera ulang. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan tera/tera ulang alat UTPnya. 3. Minimnya kesadaran pelaku usaha/industri terhadap pemenuhan ketentuan dalam perizinan berusaha sektor industri 4. Minimnya kompetensi teknis dan manajerial SDMI 5. Regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten 6. Minimnya daya saing dan inovasi industri 7. Adanya ketidaknyamanan pelaku industri dalam menjalankan kegiatan usahanya bahkan berhenti beroperasi karena adanya kendala eksternal 8. Minimnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam kegiatan industri terutama skala kecil dan menengah 9. Kurangnya ketersediaan (kuantitas dan kualitas) bahan baku 10. Rendahnya daya saing produk IKM dengan produk fabrikasi dalam negeri atau luar negeri 11. Kinerja perdagangan yang kurang berdaya saing yang disebabkan belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar rakyat serta kebersihan pasar rakyat 12. Belum optimalnya kinerja pengelolaan pasar dikarenakan kurangnya SDM Pengelola Pasar yang kompeten 13. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga 14. Masih rendahnya citra produk skala ekspor dari IKM /UMK 15. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri 16. Perlunya pengadaan alat standar baru untuk menunjang pelayanan metrologi legal yang optimal 17. Kurangnya fasilitasi pelayanan tera/tera ulang 18. Perlunya pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana penunjang pelayanan tera/tera ulang 19. Perlunya fasilitasi anggaran SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pelayanan tera/tera ulang 20. Pengawasan kemetrologian kurang maksimal 21. Penyuluhan kemetrologian dilaksanakan kurang maksimal
IV.	URUSAN FUNGI PENUNJANG	
4.1	Administrasi Pemerintahan	1. Belum optimalnya penataan organisasi perangkat daerah yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah

NO	BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		2. Koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kesejahteraan rakyat belum optimal 3. Perencanaan program dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja 4. Koordinasi pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antara pemerintah daerah dengan desa, belum berjalan efektif 5. Belum optimalnya penyelenggaraan keprotokolan dan diseminasi informasi pimpinan daerah kepada masyarakat. 6. Belum optimalnya pemanfaatan e-procurement secara maksimal, dan belum meratanya kompetensi SDM pengadaan. 7. Belum optimalnya sinergi antar perangkat daerah dalam pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam 8. Sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik belum sepenuhnya terintegrasi dan berbasis data real time 9. Belum optimalnya Tingkat Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah 10. Penyusunan Anjab dan ABK belum optimal karena masih dinamisnya perubahan peraturan perundang-undangan terkait Anjab dan ABK dari Beragam Instansi Pembina Jabatan. 11. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia untuk memfasilitasi hubungan masyarakat dan anggota DPRD
4.2	Pengawasan	1. Kepatuhan pengelola keuangan, kepegawaian, dan barang terhadap ketentuan belum optimal. 2. Penguatan Maturitas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah belum optimal.
4.3	Perencanaan Pembangunan	1. Belum optimalnya penyediaan data terbaru dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi. 2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah. 3. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal. 4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan. 5. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.
4.4	Keuangan	1. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak secara tepat waktu. 2. Masih terdapat potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan.
4.5	Kepegawaian	1. Kurangnya pemahaman PNS terhadap peraturan kepegawaian. 2. Masih rendahnya kesadaran PNS untuk melengkapi data kepegawaian perorangan.

2.3.2. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan keberterimaan dan keberlanjutan prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1) Isu Internasional

ISU STRATEGIS BIDANG SOSIAL

1. Penurunan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Terjadinya gangguan kesehatan fisik maupun mental secara kronis maupun akibat kejadian luar biasa yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor usia, gaya hidup, perubahan iklim, serta tingkat pencemaran lingkungan.

2. Erosi terhadap Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil

Menurunnya jaminan perlindungan atas hak dasar individu dan kebebasan sipil, termasuk hak atas hidup, pendidikan, pekerjaan, kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan perlindungan terhadap privasi.

3. Tingginya Ketimpangan Pendapatan dan Kekayaan

Ketidakseimbangan distribusi ekonomi antarwilayah maupun antarkelompok sosial yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan serta berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

4. Ancaman Penyakit Menular

Peningkatan potensi penyebaran penyakit akibat virus, bakteri, parasit, dan jamur, termasuk penyakit zoonotik, patogen buatan, serta resistensi antimikroba yang

diperburuk oleh dampak perubahan iklim dan mobilitas global.

5. Ketimpangan Akses terhadap Infrastruktur Layanan Dasar dan Jaminan Sosial
Masih terbatasnya atau tidak meratanya ketersediaan dan keterjangkauan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, sanitasi, serta sistem jaminan sosial dan pensiun.
6. Terbatasnya Kesempatan Kerja dan Rendahnya Mobilitas Ekonomi
Kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan kebutuhan tenaga kerja, termasuk dampak dari otomatisasi, transformasi digital, dan transisi energi yang tidak inklusif.
7. Peningkatan Migrasi dan Pengungsian yang Terpaksa
Terjadinya perpindahan penduduk secara masif akibat konflik, bencana, diskriminasi, perubahan iklim, maupun ketimpangan ekonomi yang tidak tertangani secara sistemik.
8. Polarisasi Sosial dan Fragmentasi Masyarakat
Menguatnya perbedaan pandangan politik, budaya, dan ideologi dalam masyarakat yang berdampak terhadap melemahnya kohesi sosial dan stabilitas nasional.

ISU STRATEGIS BIDANG TEKNOLOGI

1. Risiko Sosial dan Ekonomi akibat Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI)
Konsekuensi negatif dari penerapan teknologi AI, termasuk Generative AI, yang mempengaruhi pasar kerja, privasi data, keamanan digital, dan tatanan sosial.
2. Potensi Ancaman dari Teknologi Frontier
Timbulnya Risiko baru dari kemajuan teknologi mutakhir seperti komputasi kuantum, bioteknologi, geoengineering, dan antarmuka otak-komputer terhadap stabilitas ekonomi, keamanan, dan etika.
3. Peningkatan Sensor dan Pengawasan yang Melampaui Batas
Meluasnya praktik pemantauan dan pembatasan komunikasi yang dapat mengancam hak privasi dan kebebasan berekspresi, baik di ranah fisik maupun digital.
4. Ancaman Spionase dan Perang Siber
Meningkatnya aktivitas peretasan, sabotase digital, dan pencurian data yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara yang dapat mengganggu infrastruktur penting dan keamanan nasional.
5. Penyebaran Misinformasi dan Disinformasi
Persebaran informasi yang tidak akurat secara masif yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga otoritatif dan mengganggu pengambilan keputusan publik.
6. Meningkatnya Risiko Perilaku Merugikan di Ruang Digital
Tingginya potensi gangguan kesehatan mental akibat perilaku daring yang merugikan,

termasuk perundungan, pelecehan, serta eksploitasi terhadap kelompok rentan terutama anak-anak.

ISU STRATEGIS BIDANG GEOPOLITIK

1. Konflik Bersenjata dan Ketegangan Internasional

Meningkatnya intensitas konflik antarnegara atau dalam negeri, termasuk perang proksi, terorisme, kudeta, dan kekerasan politik, yang berpotensi menimbulkan instabilitas regional dan global.

2. Ancaman Senjata Biologis, Kimia, dan Nuklir

Potensi krisis besar akibat pelepasan zat atau teknologi berbahaya secara sengaja maupun tidak sengaja, yang bersumber dari fasilitas militer, laboratorium, maupun infrastruktur energi.

3. Konfrontasi Geoekonomi

Penggunaan instrumen ekonomi strategis seperti sanksi, tarif, dan pembatasan investasi untuk memengaruhi dominasi politik dan ekonomi antarnegara.

4. Meningkatnya Kekerasan Sosial Domestik

Kecenderungan meningkatnya kekerasan dalam negeri, termasuk kerusuhan sosial, kekerasan berbasis gender, dan tindak kekerasan kolektif lainnya.

ISU STRATEGIS BIDANG LINGKUNGAN

1. Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem

Menurunnya populasi flora dan fauna serta kerusakan habitat alami yang berdampak terhadap ketahanan pangan, kelangsungan hidup, dan keseimbangan lingkungan hidup.

2. Perubahan Iklim dan Sistem Bumi yang Tidak Dapat Dibalikan

Perubahan permanen pada sistem iklim global yang dapat memicu bencana ekologis besar seperti mencairnya lapisan es kutub dan terganggunya arus laut global.

3. Peningkatan Frekuensi dan Intensitas Bencana Hidrometeorologis

Bencana seperti banjir, kekeringan, badai tropis, dan kebakaran hutan yang semakin sering terjadi dan menyebabkan kerusakan luas.

4. Krisis Sumber Daya Alam (Air dan Pangan)

Tingginya tekanan terhadap sumber daya alam akibat eksploitasi berlebihan, degradasi lingkungan, dan ketidakmampuan sistem distribusi memenuhi kebutuhan masyarakat.

5. Bencana Alam Non-Meteorologis

Risiko gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai geomagnetik yang berdampak besar terhadap keselamatan dan ekonomi.

6. Tingkat Polusi Lingkungan yang Mengkhawatirkan

Pencemaran udara, air, dan tanah yang berasal dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga, termasuk pencemaran oleh zat kimia berbahaya dan radioaktif.

ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI

1. Pecahnya Gelembung Aset

Kondisi di mana harga aset (seperti properti, saham, dan kripto) tidak mencerminkan nilai riil, sehingga rentan terhadap penurunan tajam yang dapat memicu krisis ekonomi.

2. Konsentrasi Kepemilikan atas Sumber Daya dan Teknologi Strategis

Penguasaan atas sumber daya penting oleh segelintir pihak yang berdampak pada kontrol distribusi dan penetapan harga secara sepihak.

3. Meningkatnya Kejahatan Ekonomi dan Aktivitas Ilegal

Tumbuhnya aktivitas kriminal lintas batas, termasuk kejahatan siber, pencucian uang, perdagangan ilegal, dan penghindaran pajak, yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

4. Tingginya Beban dan Risiko Utang

Akumulasi utang negara, perusahaan, atau rumah tangga yang tidak terkendali dan berpotensi menimbulkan kebangkrutan dan krisis fiskal.

5. Disrupsi terhadap Rantai Pasok Global

Gangguan besar terhadap distribusi barang dan jasa esensial seperti energi, pangan, alat kesehatan, dan komponen teknologi yang berdampak pada kelangsungan ekonomi global.

6. Kerapuhan Infrastruktur Kritis

Rentannya sistem infrastruktur penting seperti energi, keuangan, telekomunikasi, dan transportasi terhadap kerusakan fisik, serangan siber, atau bencana alam.

7. Kelesuan dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Prospek pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau resesi berkepanjangan yang berdampak pada stabilitas makro dan investasi.

8. Inflasi yang Tidak Terkendali

Kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang melemahkan daya beli masyarakat dan meningkatkan beban hidup.

9. Kelangkaan Tenaga Kerja dan Ketidaksesuaian Keterampilan

Kesenjangan antara kebutuhan pasar tenaga kerja dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai.

2) Isu Nasional

Isu Kewilayahan

- Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena persebaran pusat ekonomi yang tidak merata antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur (Bali), serta daerah kepulauan.

- Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir utara Pulau Jawa, gempa bumi, dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa.
- Degradasi lingkungan seperti penurunan muka tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan polusi udara akibat aktivitas industri.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian.
- Belum optimalnya upaya pengurangan tingkat pengangguran karena adanya.
- *Mismatch* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
- Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta *scarring effect* akibat pandemi COVID-19.

Isu Strategis Transformasi Sosial

Kesehatan untuk Semua

Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan, dan pemerataan kapasitas dan *responsiveness* sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif

Isu Strategis Transformasi Ekonomi

- Deindustrialisasi dini, ditunjukkan oleh penurunan rasio PDB industri pengolahan per PDB dari 32,0% (2002) menjadi 18,3% (2022).
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja, dimana produktivitas TK Indonesia tahun 2020 setara dengan produktivitas TK Jepang di tahun 1960-an (APO, 2022).
- Kompleksitas dan daya saing produk, produk UNCTAD industri pengolahan semakin kehilangan daya saingnya di pasar global padahal Malaysia dan Thailand semakin bergerak ke arah ekspor produk knowledge intensive (Basri, 2023; , 2021).
- Adopsi teknologi kian masif, sementara TK di industri pengolahan masih didominasi oleh unskilled labour (89,3%, 2022) dan hanya 18,6% lulusan pendidikan tinggi yg berasal dari

program STEAM (BPS, 2022; WEF, 2020; WB, 2017).

- *Mismatched* produksi dengan permintaan global, contoh untuk produk HS 85, Indonesia mengekspor produk yang permintaannya melambat dalam 5 tahun terakhir (Trademap, 2023).
- Rendahnya kemampuan inovasi, dalam Global Innovation Index tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-75 dari 132 negara.
- Tuntutan energi hijau semakin besar, sementara penggunaan energi fosil di industri pengolahan masih di atas 60% (IESR, 2022).

Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

- Integritas Partai Politik belum tercapai karena biaya politik tinggi, pendanaan parpol dari negara belum memadai, dan tata kelola parpol belum optimal (meliputi ketiadaan standar etik parpol, demokrasi internal belum optimal, kaderisasi berjenjang belum terlembaga, rekrutmen politik secara tertutup, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol belum optimal).
- Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif.
- Hiper regulasi; kewenangan regulasi yang tersebar; belum memadai SDM regulasi; partisipasi yang belum optimal.
- Belum adanya sistem penilaian Kementerian/Lembaga/Daerah terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas.
- Belum meratanya akses pelayanan publik bagi masyarakat.
- Belum diterapkannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D (Isu Transformasi Manajemen ASN).
- Belum terintegrasinya proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi.

Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

- Risiko *climate action*; De-globalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang, Konfrontasi geo-ekonomi; *Asset bubble burst*; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga *higher for longer*; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China, AS dan Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim; potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi.
- Insurgensi; konflik internal termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan dari serangan siber.

- Dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok global dan tren *global economic decoupling*; belum terselesaikannya perundingan batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia.
- Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi perang yang semakin kompleks dan sarat penggunaan senjata *Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya.
- Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM; Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan Kelembagaan penegak hukum yang belum profesional.
- Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) Informasi dan komunikasi publik belum merata; (4) Permasalahan politik *electoral* seperti, politik uang, politisasi isu SARA; (5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

- Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama.
- Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif, ditandai dengan capaian IKUB di tahun 2023 sebesar 76,02.
- Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan.
- Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global.
- Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Kearifan lokal belum dipertimbangkan sebagai modal dasar.
- Pembangunan dan penggerak transformasi Masyarakat, ditandai dengan capaian IPK di tahun 2022 sebesar 55,13.
- Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda.

- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal.
- Ketimpangan gender yang masih tinggi.
- Kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif menjadi sulit terwujud.
- Kualitas air, udara, tutupan lahan, dan air laut semakin menurun. Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia masih rendah (63) atau baru berada pada peringkat 152 dari 220 wilayah global. Biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan menjadi tinggi.
- Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 yang cukup signifikan akibat pembuangan limbah secara ilegal.
- Terdapat setidaknya sepuluh provinsi yang status TPA-nya sudah melebihi kapasitas daya tampungnya, antara lain: Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DIY, dan Banten, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku.
- Laju Kepunahan Spesies global semakin cepat dan sudah puluhan hingga ratusan kali lebih tinggi daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.
- Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan dan peningkatan kualitas pangan yang dikonsumsi.
- Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan, Tingginya fluktuasi harga pangan antarwaktu dan antar wilayah.
- Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan penyedia komoditas pangan.
- Efisiensi perusahaan dan pemanfaatan energi yang belum berjalan baik.
- Kurangnya eksplorasi.
- Institusi pengelolaan energi yang belum efisien, didominasi oleh BUMN energi dan peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam permasalahan pengelolaan energi.

Isu Strategis RPJMN

- **Rendahnya Produktivitas**

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Mengacu pada rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015–2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010–2015 (dari -0,9 persen ke -0,3 persen). Capaian tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1,78 persen ketika masih berada pada posisi menuju negara maju pada periode 1971–1995, dan Tiongkok sebesar 2,12 persen selama kurun waktu 2005–2022. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya

manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan; produktivitas sektor ekonomi yang rendah; kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal; serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan *daycare* berkualitas yang terjangkau.

Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005–2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010–2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015–2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen

- **Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai *Programme for International Student Assessment*, siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86

persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak Risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- **Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat**

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019–2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

- **Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

- **Krisis Lingkungan**

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (*triple planetary crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50–75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (*Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022*). Kerugian ekonomi akibat Risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024). Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (*Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019*). Sementara itu, Risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (*United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022*). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara, dengan indeks kualitas udara mencapai 2,5 (*World Health Organization, 2021*). Sekitar 20 persen dari 20 ribu sumur air minum rumah tangga tercemar limbah domestik maupun industri (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa degradasi lingkungan berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, ketahanan pangan, dan akses terhadap air bersih.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kolaboratif dalam mengatasi krisis lingkungan, melalui penguatan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta pengendalian polusi secara terintegrasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut pada tingkat lokal, terutama melalui perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (*Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021*).

Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (*United Nations Environment Programme, 2023*), turut berkontribusi dalam krisis tersebut. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak

lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko *Triple Planetary Crisis* berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang, dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan

- **Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan Risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negaranegara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas, Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan. Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek

perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tecermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh *The Federal Reserve*. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negaranegara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global. Faktor gejolak geopolitik, telenan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tecermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bereifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

- **Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah**

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan prasyarat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/*Corruption Perception Index* Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan Risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran

kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya Risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan

3) Isu Regional

Isu utama di wilayah Jawa adalah padatnya jumlah penduduk dan terkonsentrasinya pengembangan industri di pesisir utara Wilayah Jawa serta kurangnya pengelolaan potensi wilayah khususnya di wilayah selatan. Kondisi ini mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya jumlah tenaga kerja informal dan pengangguran, serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat pengembangan industri di Wilayah Jawa dan menjadi isu regional antara lain yaitu: a. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri. b. Masih terdapatnya beberapa faktor penghambat perkembangan sumber daya manusia seperti (1) masih terbatasnya akses pendidikan pada daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau; (2) tingginya PTM dan besarnya jumlah penduduk yang mengalami stunting dan insidensi TB; (3) pelayanan kesehatan lansia menjadi tantangan dengan tingginya penduduk lansia; dan (4) masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha. c. Produksi tenaga listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan bauran pembangkit listrik terbarukan relatif rendah; d. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif; e. Kebutuhan rumah tangga di Wilayah Jawa terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga masih belum dapat terpenuhi; f. Kapasitas fiskal di Jawa sudah tinggi, terutama di wilayah barat dan timur; g. Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan banjir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air; h. Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam.

4) Isu Provinsi Jawa Timur

Pemantapan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Daerah

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Namun, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, minimnya rencana teknis pengembangan wilayah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah, khususnya antara wilayah utara dan selatan serta kepulauan. Kesenjangan ini diperkuat oleh keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur ekonomi, dan belum efektifnya implementasi konsep pengembangan wilayah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan

kebijakan yang tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur melalui strategi penataan Ruang sebagai berikut:

- memperkuat fungsi pusat kolektif dan distribusi nasional pada sektor perdagangan dan jasa baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional
- meningkatkan penyediaan infrastruktur Wilayah pendukung kemudahan investasi pembangunan
- meningkatkan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara Kawasan Metropolitan dan perkotaan lainnya serta perdesaan; dan

Penanggulangan Kemiskinan dengan Perluasan Kesempatan Kerja; Perluasan Akses Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup; Perluasan Akses Pasar Kerja Untuk Pekerjaan Yang Layak dan Meningkatkan Pendapatan; Perluasan Akses Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Miskin; Pengembangan Program-Program Ekonomi Dan Kewirausahaan serta Program-Program Yang Efektif Untuk Mengatasi Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Jawa Timur bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh faktor struktural seperti rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingginya tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan ekonomi. Sektor informal dan usaha mikro belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Diperlukan pendekatan holistik berupa peningkatan akses layanan dasar, perluasan akses pasar kerja yang layak, serta penguatan kewirausahaan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Peningkatan Akses Pendidikan, Kesehatan dan Standar Hidup yang Layak dan Berkualitas.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan. Keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok rentan, menyebabkan tingginya pengangguran dan kesenjangan sosial. Pertumbuhan penduduk yang pesat pascapandemi turut menambah tekanan pada layanan dasar. Upaya pengembangan sumber daya manusia difokuskan pada pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan. Dalam menghadapi permasalahan tersebut tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan kebijakan yang tertuang dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur melalui strategi penataan Ruang meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar publik yang mendukung konektivitas dan ketersediaan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan dalam mengatasi ketimpangan antar Wilayah;

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kepemimpinan yang Baik

Reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Prosedur yang rumit dan pelayanan yang lambat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur sipil

negara, perbaikan sistem pelayanan, serta penegakan hukum yang humanis dan partisipatif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Kepemimpinan daerah juga perlu bersifat visioner, global, namun berpijak pada nilai-nilai budaya lokal.

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana Alam dengan Mengutamakan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan menyebabkan degradasi ekosistem, penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatnya Risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Masalah ini diperparah oleh alih fungsi lahan dan lemahnya pengendalian tata ruang. Diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, konservasi berbasis kearifan lokal, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha. Untuk mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pemerintah provinsi Jawa timur menetapkan strategi penataan ruang

- mengembangkan konektivitas infrastruktur perkotaan metropolitan bagi terwujudnya pengembangan Kawasan Perkotaan berbasis ekologi melalui pengembangan kota kompak Compact City skala regional sebagai upaya pengendalian *urban sprawl*;
- mengintegrasikan sistem Permukiman yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan dalam sinergitas ruang darat dan pesisir kelautan serta kepulauan

Penguatan Kedaulatan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Provinsi Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi besar dalam produksi berbagai komoditas strategis. Namun, ketersediaan dan distribusi pangan belum stabil karena lemahnya logistik dan tingginya permintaan dari luar daerah. Untuk menjamin ketahanan pangan dan mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, diperlukan upaya regenerasi petani, peningkatan efisiensi produksi, serta hilirisasi produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

5) Isu Strategis KLHS

Masih kurangnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan akibat aktivitas manusia, khususnya di Kecamatan Bangsal, Mojosari, Ngoro, dan Sooko yang masih defisit daya dukung lingkungan. Meskipun telah tersedia dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Mojosari dan Kutorejo, proses pengangkutan sampah terganggu karena kerusakan alat berat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga memperparah kondisi, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti program “Desa Bersinar” dan sarasehan strategi pengelolaan sampah. Dari segi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), kondisi lingkungan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. IKLH

sempat mencapai puncak di tahun 2021, namun terus merosot hingga 60,20 pada 2023. Penurunan juga terjadi pada kualitas air dan udara, sementara kualitas lahan stagnan tanpa peningkatan signifikan. Dalam hal kebencanaan, banjir menjadi salah satu bencana utama yang terjadi di banyak kecamatan, disebabkan oleh curah hujan tinggi, kerusakan sistem pengaliran air, dan penggundulan hutan. Selain itu, tanah longsor tercatat terjadi di Kecamatan Pacet dan Kutorejo, sedangkan angin kencang berdampak di lebih dari 15 kecamatan. Bencana kebakaran juga cukup sering terjadi dan tersebar hampir di seluruh wilayah, menyebabkan kerusakan signifikan pada pemukiman dan infrastruktur. Meski begitu, tren Indeks Risiko Bencana (IRB) menunjukkan perbaikan. Dari tahun 2019 hingga 2023, indeks ini terus menurun dari 140,94 menjadi 91,17. Penurunan ini mencerminkan peningkatan mitigasi bencana, sistem peringatan dini, serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Namun, kesiapsiagaan dan upaya pengurangan Risiko tetap perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.

Masih kurangnya penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik/infrastruktur

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,15%, sedikit melambat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 5,82%. Industri pengolahan menjadi sektor dominan dengan kontribusi sebesar 57,17% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang tercatat sebesar Rp 104,36 triliun atas dasar harga berlaku. Di sisi lain, aksesibilitas wilayah dari segi angkutan umum menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah penumpang dari tahun 2021 ke 2023, meskipun perbaikan infrastruktur jalan menunjukkan tren positif dengan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik dan penurunan jalan rusak secara konsisten. Akses rumah tangga terhadap air minum mengalami fluktuasi, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 95,95%, kemudian turun pada 2022 dan naik kembali menjadi 94,19% di tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam distribusi dan penyediaan air minum. Sementara itu, layanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 69,46% pada 2019 menjadi 99,5% pada 2023. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan pengelolaan limbah domestik demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Masih kurangnya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing

Kabupaten Mojokerto menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek pembangunan, seperti penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejak 2022 yang mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 4,1 per 1.000 kelahiran hidup pada 2023. Namun, tantangan masih ada, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja akibat dominasi pekerja tidak terampil, meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI)

dan kasus balita gizi buruk di 2023, serta turunnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dari 78,79 menjadi 72,12. Dari sisi pendidikan, partisipasi sekolah dasar menunjukkan perbaikan, namun partisipasi pada jenjang usia 16–23 tahun masih tergolong rendah. Rasio ketergantungan juga sedikit meningkat, menandakan beban penduduk produktif yang kian besar. Secara umum, meskipun terdapat perbaikan di beberapa sektor, Kabupaten Mojokerto masih perlu memperkuat kualitas SDM, layanan kesehatan ibu dan anak, serta literasi masyarakat guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023, dengan kenaikan tertinggi pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, dan penurunan signifikan pada 2022. Namun, pada 2023 kembali terjadi kenaikan karena meningkatnya garis kemiskinan akibat kenaikan harga barang dan jasa. Sebagian besar penduduk miskin adalah mereka yang berpendidikan rendah dan tidak bekerja, serta belum sepenuhnya mendapatkan akses air layak dan sanitasi. Meski bantuan sosial seperti Rastra/BPNT semakin menjangkau lebih banyak penduduk miskin, cakupannya belum sepenuhnya merata. Garis kemiskinan di Mojokerto meningkat 23,48% dari 2019 ke 2023, menunjukkan naiknya kebutuhan pengeluaran minimum bulanan. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan bahwa pada 2020 dan 2023, kondisi kemiskinan di Mojokerto lebih parah dibanding provinsi dan nasional. Program jaminan sosial juga belum optimal, dengan hanya 83,16% penduduk terdaftar dan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan masih rendah (38,52%), disebabkan oleh kendala sumber daya, koordinasi antar lembaga, hingga kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat serta data yang tidak akurat.

Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah

Meskipun Kabupaten Mojokerto telah mencapai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,80 pada tahun 2024, yang menunjukkan kategori Sangat Baik, masih terdapat beberapa kekurangan dalam tata kelola pemerintahan yang perlu diperbaiki. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah implementasi kebijakan pelayanan terpadu online yang masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun sistem ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021, pelaksanaannya di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Jetis, masih menemui hambatan. Tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini meliputi koordinasi antarinstansi yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola layanan berbasis elektronik. Kelemahan lainnya adalah belum adanya rencana induk tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang komprehensif. Ketiadaan dokumen perencanaan yang jelas dapat menghambat efisiensi dan integrasi sistem informasi dalam pemerintahan. Tanpa strategi yang terarah, pemanfaatan teknologi dalam tata

kelola pemerintahan dan pelayanan publik menjadi kurang maksimal.

6) Isu Strategis RTRW

Sebagai bagian integrasi dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dokumen RPJMD perlu diselaraskan dengan arah kebijakan penataan ruang wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto memuat isu-isu strategis. Berikut isu strategis RTRW Kab Mojokerto:

1. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu terwujudnya kondisi wilayah yang berkembang, produktif, responsif, yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan demokratis.
2. Berkembangnya wilayah Kabupaten Mojokerto dengan memanfaatkan peluang sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Propinsi Jawa Timur dan adanya akses yang cukup baik dengan Kota Surabaya, serta memperhatikan kepentingan nasional dari aspek ekonomi, sosial-politik, dan pertahanan keamanan.
3. Berkembangnya wilayah Kabupaten Mojokerto dengan memanfaatkan posisi geografisnya sebagai kawasan di sekitar pusat pertumbuhan yang strategis secara ekonomi khususnya dalam menangkap peluang ekonomi akibat adanya keterkaitan antar wilayah.
4. Meningkatnya perekonomian wilayah dan berkurangnya ketimpangan antar bagian wilayah yang relatif maju dengan bagian wilayah yang terbelakang/terisolasi, melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya dan pengembangan sistem keterkaitan.
5. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan Kabupaten Mojokerto secara berimbang, serasi dan optimal.
6. Pemanfaatan kawasan-kawasan yang memiliki fungsi lindung dan harus dilindungi (kawasan lindung).
7. Optimalisasi pemanfaatan kawasan-kawasan yang memiliki potensi sumberdaya untuk dapat dibudidayakan (kawasan budidaya).
8. Pengembangan struktur dan sistem kota-kota atau sistem pusat-pusat permukiman dan pelayanan yang terintegrasi sebagai media perkembangan wilayah dan transfer pembangunan (pusat-pusat pertumbuhan).
9. Identifikasi dan pengelolaan kawasan-kawasan prioritas/tertentu yang perlu segera memperoleh dukungan penataan ruang.
10. Pengembangan sistem infrastruktur (sarana dan prasarana) transportasi, listrik, telepon, air minum, irigasi, dan sebagainya. wilayah seperti
11. Terciptanya mekanisme pengelolaan tata ruang yang menjamin terwujudnya visi dan misi penataan ruang.
12. Mewujudkan tata lingkungan yang serasi antara sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan sehingga terwujud

kehidupan masyarakat yang sejahtera.

7) Isu Strategis RPJPD

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci daya saing daerah dalam menghadapi persaingan global. Strategi yang diutamakan meliputi penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan, pengembangan inovasi dan teknologi, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta penguatan karakter dan soft skills masyarakat.

Optimalisasi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan penanganan penduduk miskin

Isu ini menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin. Pendekatan dilakukan melalui penguatan program jaminan sosial, rehabilitasi sosial yang efektif, serta penanganan kemiskinan secara terintegrasi lintas sektor.

Penguatan ekonomi daerah dan peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur

Penguatan ekonomi dilakukan melalui pengembangan UMKM, diversifikasi ekonomi lokal, serta peningkatan daya saing produk daerah. Diperlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai seperti rumah layak huni, air bersih, sanitasi, dan transportasi publik yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan pengelolaan kebencanaan

Perlindungan lingkungan dan pengurangan Risiko bencana menjadi prioritas melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengendalian pencemaran, sistem pengelolaan sampah dan limbah, serta penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim dan manajemen Risiko bencana berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat.

Pemeliharaan dan pelestarian unsur-unsur kebudayaan untuk mewujudkan ketahanan sosial budaya

Pemeliharaan dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan dilakukan melalui dokumentasi, pendidikan, festival, perlindungan hukum, ekonomi kreatif, dan promosi budaya. Upaya ini bertujuan menjaga jati diri daerah serta memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi tantangan zaman.

Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas untuk ketenteraman daerah

Ketenteraman daerah dijaga melalui peningkatan keamanan publik, penegakan hukum yang adil, kerjasama antar lembaga, serta peningkatan kesadaran sosial dan stabilitas sosial-politik. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan masyarakat dan kelangsungan pembangunan.

Peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan dan kepemimpinan di daerah

Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, inovasi pelayanan publik, kepemimpinan visioner, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Penerapan teknologi informasi, pengambilan keputusan berbasis data, dan sistem pengawasan

yang kuat menjadi fondasi pemerintahan yang efektif dan responsif.

8) Isu Strategis Kabupaten Mojokerto

Isu strategis Kabupaten Mojokerto ini dikelompokkan menjadi 5 isu strategis utama yang mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang baik di tingkat Nasional, Regional dan Lokal. Adapun ke 5 isu strategis tersebut adalah:

1. Isu strategis dibidang kualitas sumber daya manusia

1) Peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata

Untuk meningkatkan layanan dan akses pendidikan yang merata dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan: Melakukan pembangunan baru atau renovasi sekolah-sekolah yang ada untuk memastikan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai dan aman bagi semua siswa sesuai SNP.
- b. Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan: Melakukan pelatihan berkelanjutan untuk guru-guru dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
- c. Program Bantuan Biaya Pendidikan: Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan agar mereka dapat mengakses pendidikan formal tanpa hambatan finansial yang berarti.
- d. Pengembangan Kurikulum Lokal: Mengintegrasikan aspek lokal dalam kurikulum untuk meningkatkan relevansi pembelajaran terhadap kebutuhan dan konteks lokal masyarakat, serta pengembangan potensi budaya dan bahasa daerah.
- e. Inklusi Pendidikan: Meningkatkan akses dan dukungan untuk siswa berkebutuhan khusus atau disabilitas melalui penyediaan fasilitas dan program pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- f. Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan: Mendorong integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan akses ke materi pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, dan meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan.
- g. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Mengadakan kampanye informasi dan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, pentingnya pendidikan bagi anak-anak, dan peran aktif orang tua dalam pendidikan anak.
- h. Kolaborasi dengan *stakeholder*: Membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk

mendukung implementasi kebijakan dan program-program pendidikan yang merata dan berkelanjutan.

2) Pemerataan penyediaan fasilitas layanan kesehatan

Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan dilaksanakan melalui strategi:

- a. Peningkatan ketersediaan fasyankes dasar dan rujukan.
- b. Penyempurnaan standar pelayanan kesehatan.
- c. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan.
- d. Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan *telemedicine*, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak.
- e. Penguatan kemampuan Rumah Sakit.
- f. Penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem, melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan sistem koordinasi jejaring dan jaringan puskesmas, penguatan promotif, preventif dan penemuan dini kasus melalui penguatan UKBM, praktek mandiri, klinik pratama, penguatan aksi multisektoral melalui pelibatan seluruh *stakeholder*, dan penguatan konsep wilayah kerja.
- g. Penguatan kepemimpinan dan manajemen di dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer sebagai sebuah sistem.
- h. Perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3) Peningkatan layanan balita gizi buruk dan stunting

Percepatan penurunan stunting setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi terintegrasi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga Risiko stunting. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang secara langsung mempengaruhi pemenuhan gizi dan perkembangan janin dan anak terutama sampai berusia kurang dari 23 bulan.

- Pendekatan Intervensi Gizi Terintegrasi

Intervensi ini bertujuan untuk memastikan kecukupan gizi ibu hamil dan anak serta penurunan faktor Risiko infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif adalah intervensi yang secara tidak langsung mempengaruhi kejadian stunting. Intervensi ini mencakup utamanya meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum dan sanitasi, keamanan pangan dan bantuan sosial. Jika kedua intervensi ini dapat dilakukan dengan terintegrasi, tepat waktu dan tepat sasaran maka banyak manfaat yang dapat diperoleh sepanjang kehidupan manusia. Manfaat yang memberikan dampak positif untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia. Fokus intervensi gizi spesifik dan intervensi akan dilakukan pada masa inkubasi terjadinya kasus stunting, dengan melakukan refocusing intervensi gizi secara terpadu dan terintegrasi maka diharapkan kejadian kasus stunting dapat di cegah secara dini dan simultan.

- Pendekatan Multisektor dan Multipihak

Kolaborasi pada level pemerintah daerah dan pemerintah desa, hal ini penting untuk dilakukan mengingat sistem perencanaan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sudah sangat terdesentralisasi hingga ke level desa. Koordinasi ini harus dilakukan dari mulai fase perencanaan sampai dengan evaluasi hasil implementasinya pada level pendampingan keluarga berisiko stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga. Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, mitra pembangunan, media massa, dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan stunting baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pendekatan Berbasis Keluarga Berisiko

Pendekatan keluarga berisiko dalam upaya percepatan penurunan stunting memiliki sedikitnya 5 kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a) penyediaan data keluarga berisiko stunting;
- b) pendampingan keluarga berisiko stunting;
- c) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- d) surveilans keluarga berisiko stunting; dan
- e) audit kasus stunting.

4) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi perlindungan sosial adaptif terintegrasi

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana disebutkan pada pasal 17 Permendagri No. 53/2020, adalah:

- 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin: hal mendasar yang perlu dilakukan adalah penyempurnaan dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan dan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, serta pengurangan kesenjangan antar penduduk maupun kelompok.
- 2) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin: dengan peningkatan daya saing kegiatan ekonomi produktif
- 3) pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil: dan mengembangkan inovasi daerah program penanggulangan kemiskinan yang bernuansa pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan
- 4) sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, maka penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan (dalam hal ini TKPK Kabupaten Mojokerto) adalah sebuah keniscayaan. Dua hal penting dalam penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan adalah:
 - penguatan Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola dan menyajikan data-data kemiskinan menjadi informasi yang *up to date*; dan
 - meningkatkan keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (*corporate social responsibility*), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Media Massa melalui kemitraan dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Mojokerto

Kebijakan Umum:

- 1) Sinkronisasi data penerima bantuan (warga miskin) agar tepat sasaran;
- 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial;
- 3) Koordinasi antar lembaga social dalam meningkatkan modal social masyarakat; dan
- 4) Penataan kawasan perkampungan yang lebih aman, nyaman, sehat, dan teratur.

Kebijakan khusus:

- 1) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan pendidikan:
 - Memperluas akses pendidikan untuk semua kalangan masyarakat untuk pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan biaya terjangkau;

- Peningkatan kualitas hasil pendidikan (mutu lulusan);
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik;
- Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah (pendidikan);
- Peningkatan kapasitas manajemen sekolah.

2) Kebijakan pemenuhan hak atas layanan kesehatan:

- Memperluas akses kesehatan untuk semua kalangan masyarakat dengan biaya terjangkau;
- Pemenuhan kapasitas tenaga kesehatan;
- Pengembangan RSUD melalui pola BLUD.

3) Kebijakan pemenuhan hak atas pekerjaan dan berusaha:

- Meningkatkan kesempatan kerja melalui pertumbuhan jumlah investor;
- Meningkatkan upaya perlindungan ketenagakerjaan;
- Peningkatan kerjasama tripartite;
- Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pemberdayaan masyarakat dan balai latihan kerja (BLK);
- Mengembangkan sektor industri kecil, menengah dan kreatif;
- Penguatan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.

4) Kebijakan pemenuhan hak atas pangan:

- Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat yang berkelanjutan;
- Membangun kawasan pertanian berbasis potensi wilayah;
- Penganekaragaman produksi pangan;
- Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang;
- Peningkatan perlindungan konsumen;
- Melakukan gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT) berbasis teknologi informasi.

5) Kebijakan pemenuhan hak atas perumahan:

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan pedesaan;
- Pengembangan lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat;
- Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan sanitasi yang sehat.

6) Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih:

- Peningkatan perlindungan terhadap sumberdaya air dan jaminan akses masyarakat miskin ke air bersih dan sanitasi;

- Peningkatan peran serta lembaga dan organisasi masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya air;
- Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin mengenai pengelolaan sumber daya air dan sanitasi layak;
- Pengembangan mekanisme penyediaan air bersih bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan air.

7) Kebijakan pemberdayaan perempuan:

- Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- Mengembangkan SDM perempuan yang berdaya saing sehingga memiliki akselerasi dan eksistensi peran perempuan dalam pengembangan organisasi;
- Meningkatkan kepekaan social dan solidaritas pendampingan terhadap kasus-kasus KDRT dan pelecehan seksual; dan
- Mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta perlindungan anak.

2. Isu strategis bidang ekonomi dan infrastruktur

1) Penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kewilayahan

Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah wilayah hinterland mengalami pengurusan sumberdaya yang berlebihan. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah terjadi dalam bentuk buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi. Karena itu perlu dikembangkan konsep pembangunan antar wilayah yang berimbang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai simpul pertumbuhan yang terintegrasi dengan strategi penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara, dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan di wilayah selatan serta perdagangan dan jasa di wilayah tengah;
- b. mendorong pengembangan kawasan industri dan permukiman di wilayah utara;
- c. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan bersejarah dan potensi alam;
- d. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air dan kekeringan;

- e. mengendalikan kegiatan pertambangan batuan; dan
 - f. mengendalikan kualitas lingkungan hidup
 - g. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya; dan
- mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan.

2) Peningkatan kontribusi non industri pengolahan terhadap PDRB

Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, perekonomian dapat tumbuh dengan baik di luar sektor industri pengolahan. Ini melibatkan upaya dalam meningkatkan kualitas sektor-sektor lain, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan.

1. Pengembangan Sektor Pertanian

Diversifikasi Produk melalui Peningkatan berbagai jenis tanaman dan ternak untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen, seperti sistem irigasi yang efisien dan pupuk organik dan pengolahan hasil pertanian dengan membangun fasilitas pengolahan untuk menambah nilai produk pertanian dan membuka pasar baru.

2. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan destinasi wisata dan promosi destinasi wisata yang menarik, seperti alam, budaya, dan sejarah lokal. Peningkatan infrastruktur pendukung seperti akomodasi, restoran, dan transportasi. Pemasaran dan *branding* menggunakan media sosial, kampanye pemasaran, dan kerjasama dengan agen perjalanan untuk menarik wisatawan.

3. Peningkatan Sektor Jasa

Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, akses modal, dan pasar. Fasilitasi pelaku bisnis lokal untuk bertransaksi secara online dan mencapai pelanggan global. Meningkatkan layanan profesional seperti hukum, akuntansi, dan konsultasi.

4. Inovasi dan Teknologi

Mendukung pengembangan startup teknologi dengan akses ke pendanaan, inkubator, dan akselerator. Penerapan solusi digital untuk efisiensi operasional di berbagai sektor. Penelitian dan Pengembangan Investasi untuk menciptakan inovasi baru yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

5. Sektor Pendidikan dan Pelatihan

Berinvestasi dalam sistem pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan

pasar kerja. Menyediakan pelatihan keterampilan teknis dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan industri. Membangun Kerjasama Industri-Pendidikan melalui kemitraan antara institusi pendidikan dan dunia usaha untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar.

6. Pengembangan Infrastruktur

Peningkatan jaringan transportasi untuk mempermudah pergerakan barang dan orang. Memperluas akses internet dan teknologi informasi di seluruh wilayah untuk mendukung ekonomi digital.

7. Sektor Kesehatan

Membangun dan Meningkatkan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan menarik investasi dalam sektor medis. Mengembangkan sektor pariwisata medis dengan menawarkan layanan kesehatan berkualitas tinggi.

8. Pembangunan Kewirausahaan

Menyediakan pusat inkubasi dan akselerator untuk mendukung pengusaha baru. Mendanai dan memfasilitasi akses modal untuk startup dan usaha kecil. Memberikan bimbingan dan jaringan untuk pengusaha agar mereka dapat mengembangkan bisnis mereka.

9. Ekonomi Kreatif

Mendukung sektor seni, desain, dan budaya yang dapat menarik wisatawan dan menciptakan peluang kerja. Mendorong pengembangan produk kreatif seperti desain fashion, musik, dan film yang memiliki nilai tambah tinggi.

10. Sektor Perdagangan

Membantu usaha lokal untuk memasuki pasar ekspor dengan pelatihan dan akses ke informasi pasar internasional.

3) Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh, Sumber Daya Alam, dan RTLH

• **Prasarana Air Bersih**

Jumlah sumur gali, sumur pompa, mata air, dan jumlah pengolahan air bersih/air minum.

• **Sumber Daya Alam**

Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup.

• **Sanitasi**

Jumlah MCK umum sejumlah 54 unit dan yang memiliki jamban keluarga sebanyak 357

kepala keluarga.

- **Air Limbah**

Perencanaan IPAL Komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan.

- **Drainase**

Saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, dan cek dam.

- **Persampahan**

Skala individu (masyarakat), skala lingkungan (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta).

- **Penanganan Kawasan Kumuh**

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”. Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemiskinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran/sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

- **Prasarana SDA**

Prasarana SDA adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh: Waduk/reservoir, bangunan-bangunan irigasi, bangunan pengatur sungai/perlindungan tebing sungai. Proyek rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengejar target rehabilitasi nasional seluas 3,3 juta jaringan irigasi dalam lima tahun ke depan. Pemerintah menginginkan agar proyek rehabilitasi irigasi dapat lebih modern dari segi fisik dan sistem manajemennya. Hal tersebut untuk memastikan pemanfaatan irigasi benar-benar optimal untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

- **Penataan Ruang**

Selain itu, Penataan Ruang perlu mendapatkan perhatian difokuskan pada percepatan

penyusunan RDTR dengan mengatasi kendala peta dasar, asistensi dari PPIDS dan BIG, dan tumpang tindih rencana tata ruang. Data teknis seperti RTH, jaringan drainase, dan persampahan perlu dilengkapi untuk mendukung perencanaan yang akurat.

- **Disparitas pembangunan antar wilayah**

Selanjutnya, disparitas pembangunan antar wilayah seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak dieleminir secara bertahap dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks (seperti masalah kependudukan, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan). Oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor biofisik/karakteristik wilayah (sumberdaya alam), sumberdaya buatan (ketersediaan sarana dan prasarana sosial-ekonomi), sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, karakteristik struktur ekonomi wilayah, dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas tersebut diharapkan dapat dikembangkan kebijakan dan strategi dalam rangka mengurangi tingkat disparitas yang terjadi.

Perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, peningkatan jalan kabupaten masih belum 100% dan kondisi jembatan belum sesuai lebar jalan yang ada serta masih kurangnya penerangan jalan (LPJU). Untuk itu dibutuhkan arah kebijakan untuk memperkuat konektivitas fasilitas wilayah pertumbuhan atau kawasan potensial. Kedua, Peningkatan infrastruktur fisik dan pranata social dalam rangka mewujudkan lingkungan yang layak huni aman dan nyaman bagi warga. Ketiga, mendorong nilai investasi dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya peningkatan nilai investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Isu strategis tatakelola pemerintahan dan layanan publik

1) Optimalisasi digitalisasi layanan serta kompetensi dan kapasitas ASN dalam menunjang pelayanan public

Dalam mendorong penguatan digitalisasi pada daerah secara jelas dan terarah, diperlukan pengukuran transformasi digital yang mencakup aspek infrastruktur, pemerintah, ekonomi, masyarakat, dan ekosistem digital. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan melihat sejauh mana digitalisasi telah terserap, yang dapat dilihat pada tiga tahapan yaitu fondasi, adopsi, dan akselerasi. Dalam mendukung kelancaran transformasi digital ke depan, pembentukan landasan hukum menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Landasan hukum ini memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengarahkan segala aspek utama dalam pelaksanaan transformasi digital, serta menjamin keberlanjutan dan implementasi inisiatif digital di masa mendatang. Landasan hukum yang memperkuat transformasi digital dapat berbentuk instrumen hukum rancangan peraturan formal atau masuk ke dalam dokumen perencanaan Landasan hukum tersebut dapat mencakup

panduan, tujuan, strategi, hingga kerangka hukum yang diperlukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan inisiatif digital di seluruh entitas pemerintahan.

Intervensi peningkatan kapasitas SDM digital di Kabupaten Mojokerto tidak lagi terkonsentrasi pada literasi pada tingkat dasar melainkan dapat meningkat menjadi pemberian literasi tingkat menengah dan lanjutan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat digital Kabupaten Mojokerto yang telah digital literate namun belum diberdayakan dengan maksimal. Salah satu treatment yang sesuai, salah satu contohnya adalah pembuatan hub-hub digital yang akan mengakomodir berbagai inovasi masyarakat sebagai upaya peningkatan peran dalam bidang ekonomi serta persaingan global. Namun, kebijakan pada peningkatan kapasitas SDM digital di Kabupaten Mojokerto juga harus menjangkau segmen masyarakat wilayah pedesaan melalui berbagai stimulus percepatan penerapan digitalisasi agar tidak terjadi disparitas yang semakin tinggi pada literasi digital.

Untuk mengakselerasi keterampilan digital ASN dilakukan dengan upskilling dan reskilling pada ASN di Kab Mojokerto, secara sistematis, dimulai dari sektor-sektor atau wilayah yang diprioritaskan. Pemerintah akan menyediakan dan memperluas akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang *up-to-date* sesuai perkembangan tren penerapan teknologi. Akses pelatihan dapat ditingkatkan dengan mendorong pengembangan ekosistem pelatihan digital menyebar untuk mendorong akselerasi *skill* yang tepat, pemerintah akan menyusun mekanisme pemutakhiran peta-peta okupasi layanan pekerjaan terkait digital agar secara cepat dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan.

2) Misinformasi dan disinformasi

Misinformasi dan disinformasi memiliki potensi bahaya yang serius dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan pribadi. Berikut beberapa bahaya utama dari kedua misinformasi dan disinformasi:

- Mengganggu kebenaran dan kepercayaan publik: Misinformasi dan disinformasi bisa merusak persepsi publik terhadap fakta dan kebenaran. Ini dapat mengaburkan garis antara informasi yang benar dan salah, sehingga masyarakat sulit untuk membuat keputusan yang tepat.
- Polarisasi dan konflik sosial: Penyebaran informasi yang salah sering kali menyebabkan pembentukan pandangan ekstrem dan pemisahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Hal ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan bahkan memicu konflik antar kelompok.
- Kehilangan kepercayaan pada institusi dan media: Penyebaran misinformasi dan disinformasi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat pada media, pemerintah, dan

lembaga lainnya yang penting untuk fungsi demokrasi dan stabilitas sosial.

- Dampak kesehatan masyarakat: Misinformasi terkait dengan kesehatan, seperti vaksinasi atau pengobatan alternatif yang tidak teruji, dapat mengancam kesehatan masyarakat secara
- Peran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menangani penyebaran informasi palsu, sangat penting. Berikut adalah beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menghadapi penyebaran informasi palsu:
 - a. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi media dan digital masyarakat. Ini mencakup upaya pendidikan untuk membantu masyarakat mengenali informasi yang tidak benar atau palsu. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menggelar kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat agar dapat mengevaluasi dan mengkritik informasi yang ditemui secara online.
 - b. Penyediaan Informasi yang Benar: Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menyediakan sumber informasi kesehatan yang resmi dan mudah diakses oleh masyarakat, seperti situs web resmi, portal kesehatan, atau pusat informasi kesehatan yang dapat dijadikan referensi. Melalui otoritas kesehatan yang sah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat menyampaikan informasi medis yang akurat dan *up-to-date* kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat kesehatan.
 - c. Peraturan dan Hukum: Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat mengembangkan serta memperkuat regulasi dan hukum terkait penyebaran informasi medis palsu atau tidak benar. Ini dapat termasuk Peraturan Daerah yang memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu yang merugikan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga dapat bekerja sama dengan platform media sosial dan perusahaan teknologi untuk merumuskan peraturan atau protokol yang membatasi penyebaran konten yang tidak benar atau berbahaya.
 - d. Monitoring dan Pelaporan: Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat membangun sistem pemantauan dan pelaporan yang memungkinkan untuk mendeteksi dan merespons dengan cepat penyebaran informasi yang tidak benar. Hal ini dapat melibatkan kerja sama dengan lembaga swasta, akademisi, dan kelompok masyarakat untuk mengidentifikasi serta melaporkan konten yang mencurigakan.
 - e. Komunikasi dalam Situasi Krisis: Saat menghadapi situasi krisis kesehatan,

Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus memiliki strategi komunikasi yang efektif dan konsisten. Tujuannya adalah memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi kepanikan dan meminimalkan dampak negatif penyebaran informasi palsu.

- f. Pendidikan Etika Digital: Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang etika digital, termasuk pentingnya membagikan informasi yang benar dan melakukan verifikasi keaslian informasi sebelum menyebarkannya. Ini dapat membantu mengurangi penyebaran informasi palsu.
- g. Kolaborasi dengan Media: Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat berkolaborasi dengan media massa untuk mendorong praktik jurnalisme yang akurat dan berintegritas. Ini dapat mencakup pelatihan dan pemberian pedoman kepada wartawan dan penyiar agar dapat menyampaikan berita yang benar.

4. Isu Strategis bidang Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

1) Penanganan dan Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup

Upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasaan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan:

1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan.
2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk.
3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
4. Melakukan penghijauan.
5. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.
6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

Pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai usaha sadar bencana untuk mengurangi dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup sampai pada tahap minimum dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan haruslah pembangunan yang bersifat anti-lingkungan hidup diganti dengan pembangunan ramah lingkungan, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial-budayanya.

Pengelolaan sampah memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lingkungan (*environmental management*), pengelolaan lingkungan dapat dilakukan bila telah dilakukan kajian secara menyeluruh. Pengelolaan lingkungan harus dilakukan dengan mengintegrasikan antara lingkungan fisik alami, manusia, dan sistem sosialnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan berdampak pada peningkatan volume timbulan sampah yang dihasilkan. Dengan adanya peningkatan volume sampah yang dihasilkan dan tanpa diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik, akan mengakibatkan permasalahan pada lingkungan yang dapat mengganggu aktifitas manusia maupun pencemaran lingkungan. Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah :

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

2) Ketangguhan terhadap Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Efektifitas program penanganan perubahan iklim setiap sektor dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pembangunan yang berketahanan iklim (*climate resilience development*), dapat ditingkatkan dengan membangun sinergitas kegiatan aksi adaptasi antar sektor.

Sasaran pembangunan setiap sektor tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal tanpa didukung oleh sektor lain. Oleh karena itu, penetapan langkah aksi adaptasi setiap sektor dalam rangka membangun ketahanan kebutuhan dasar (pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, pemukiman dan infrastruktur), ketahanan ekosistem dan ketangguhan bencana, perlu melihat keterkaitan program antar sektor. Hal ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam membangun sinergitas dan mengisi kesenjangan kegiatan aksi adaptasi yang perlu dikembangkan agar sasaran dapat dicapai. Strategi Adaptasi perubahan Iklim adalah sebagai berikut:

1. Penurunan RISIKO kejadian krisis air bersih melalui percepatan capaian 100% SR,

perlindungan sumber mata air dan peningkatan kelembagaan SPAM Desa.

2. Pengentasan kawasan permukiman kumuh.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan lingkungan.
4. Restorasi ekosistem hutan dan sungai.
5. Penurunan RISIKO bencana hidrometeorologi melalui peningkatan Ketangguhan Daerah (aksi mitigasi, kesiapsiagaan dan rehabilitasi).
6. Peningkatan layanan irigasi pertanian dengan peningkatan jaringan irigasi, perbaikan embung di daerah rawan kekeringan.
7. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Sejalan dengan amanat Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. RPJMD menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Selain itu, RPJMD juga harus disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) agar sejalan dengan visi pembangunan nasional dan daerah.

Salah satu elemen utama dalam RPJMD adalah visi pembangunan daerah, yang merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah disampaikan saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi ini menjadi landasan utama dalam merancang arah pembangunan daerah, dengan tujuan menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan komitmen nyata yang harus diterjemahkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan dalam mewujudkan visi ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU ADIL DAN MAKMUR

Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar untuk membawa Kabupaten Mojokerto menuju perkembangan yang lebih baik di berbagai sektor. Visi ini mengandung makna mendalam yang mencerminkan harapan akan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Mojokerto. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun ke depan, kata "**LEBIH**" memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode

sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat perubahan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

2. Makna " **Lebih Maju** " dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global. Dari perspektif ekonomi makro, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan investasi, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta penguatan ekosistem industri dan perdagangan. Sementara itu, pada tingkat mikro, fokus utama adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.
3. Makna " **Lebih Adil** " dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil - hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari kemajuan yang dicapai. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan berarti bahwa hasil dari berbagai program pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar secara adil di seluruh wilayah dan kelompok sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
4. Makna " **Lebih Makmur** " dalam visi pembangunan Kabupaten Mojokerto mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik dan merata.

Kemakmuran yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana publik.

Misi

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

"Catur Abhipraya Mubarak" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman Masyarakat
- 3) Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut maka dijelaskan dari masing – masing misi tersebut adalah sebagai berikut :

ABHIPRAYA MUBAROK SATU

“Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pemerintahan guna memastikan akses yang lebih luas dan mudah bagi seluruh warga.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik terus diperkuat dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan berjalan secara adil dan merata.

Ketenteraman dan keamanan masyarakat merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik, di mana pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan mampu membangun kepercayaan publik serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas sosial. Sinergi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan sistem keamanan yang kuat akan menciptakan lingkungan yang harmonis, memungkinkan pembangunan berjalan optimal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di daerah.

Misi ini merupakan fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih makmur. Selain melalui inovasi pelayanan yang selama ini sudah dilakukan perlu juga upaya peningkatan pelayanan publik melalui pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Kabupaten Mojokerto sesuai amanah Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri nomor 30 tahun 2012 dan surat mendagri tentang perlunya pemindahan ibu kota Kabupaten Mojokerto yang saat ini pusat pemerintahannya berada di wilayah Kota Mojokerto serta didukung Perda Kabupaten Mojokerto nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012 -2032.

ABHIPRAYA MUBAROK DUA

“Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat

Pendidikan menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang memiliki daya saing tinggi. Upaya dilakukan dengan memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan mutu pembelajaran, serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik agar dapat mencetak lulusan yang unggul, kreatif, dan inovatif. Selain itu, kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya meningkatkan, pelatihan, serta fasilitas pendukung bagi pendidik dan tenaga kependidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan berkualitas.

Misi ini mencakup upaya - upaya dalam merumuskan kebijakan strategis dan program bagi peningkatan kualitas pendidikan dari anak usia dini sampai pendidikan dasar, peningkatan program makanan tambahan bagi anak sekolah, serta evaluasi dan sanksi berat bagi pendidik yang nakal. Di samping itu yang penting dilakukan juga adalah meningkatkan kesejahteraan pendidik terutama pendidik sekolah swasta, meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kualitas koperasi - koperasi di sekolah.

Di sektor Kesehatan, peningkatan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi prioritas. Pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai, penyediaan tenaga medis yang kompeten, serta program kesehatan preventif dan promotif dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Akses layanan kesehatan yang mudah dan berkualitas akan mendorong terbentuknya keluarga yang sehat dan sejahtera, sebagai fondasi utama dalam pembangunan SDM yang unggul.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu adanya peningkatan kualitas kesehatan. Upaya - upaya yang perlu dilakukan antara lain : peningkatan pelayanan tenaga Kesehatan peningkatan sarana prasarana baik di posyandu, puskesmas maupun rumah sakit daerah memberikan makan gratis bergizi bagi ibu hamil dan balita menambah tenaga medis dan paramedis.

Melalui sinergi antara pendidikan berkualitas, kesejahteraan tenaga pendidik, serta peningkatan layanan kesehatan, diharapkan terwujud SDM yang tidak hanya unggul dalam kecerdasan dan keterampilan, tetapi juga memiliki karakter kuat, berdaya saing tinggi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

ABHIPRAYA MUBAROK TIGA

“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.”

Misi ini dalam rangka mendukung terwujudnya sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang kuat melalui kemandirian ekonomi yang lebih berbasis masyarakat. Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui :

Penguatan jaring ekonomi yang berorientasi pada pasar desa, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, perbankan serta optimalisasi BUMDesa

- Pengembangan industri pada semua tingkatan (besar, menengah, kecil) sesuai kemampuan dan kewenangan serta pengembangan Koperasi dan UM (Usaha Mikro)
- Mempermudah investasi baik dalam negeri (PMDN) maupun pemodal asing (PMA)
- meningkatkan PAD baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. optimalisasi pemasaran hasil - hasil pertanian, peternakan, *home industry*. meningkatkan profesionalisme BUMD dan BUMDesa.

Misi ini mengacu pada upaya menciptakan sistem ekonomi yang kuat, mandiri, dan

berkelanjutan dengan memberdayakan berbagai sektor ekonomi lokal. Industri pada semua tingkatan, baik kecil, menengah, maupun besar, didorong untuk berkembang melalui peningkatan daya saing dan produktivitas.

Koperasi dan usaha mikro menjadi bagian penting dalam memperkuat perekonomian rakyat dengan memberikan peluang usaha yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, BUMDesa berperan sebagai penggerak ekonomi berbasis desa yang memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Dapat disimpulkan bahwa Misi ini menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

ABHIPRAYA MUBAROK EMPAT

“Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan”

Misi ini mengacu pada upaya pembangunan infrastruktur yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan daerah. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas juga mendukung peningkatan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Infrastruktur sosial, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi, diperkuat guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini juga menitikberatkan pada penguatan akses sosial dan budaya dengan menyediakan ruang publik yang inklusif dan nyaman, serta menjaga keberlanjutan ekosistem melalui pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi penunjang ekonomi dan layanan publik, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur merupakan hal strategis yang perlu dilakukan baik infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi maupun infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, kantor, stadion, tempat wisata yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta sumber-sumber lain yang sah.

Adapun tujuan dari misi ini adalah :

- mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan di semua sektor

- mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.
- menumbuhkembangkan pusat - pusat ekonomi di tingkat desa
- meningkatkan pengelolaan aset pemerintah daerah yang tidak terurus dan menjadi beban pembiayaan daerah melalui alih fungsi penggunaan aset daerah.
- meningkatkan PAD melalui pengelolaan kerja sama dengan pihak swasta (pengelolaan pariwisata, pasar dan parkir).

Tabel 3. 1
Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

VISI	ASPEK VISI	MISI
TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR	MAJU	MISI 2 Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman Masyarakat
		MISI 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan
	ADIL	MISI 1 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	MAKMUR	MISI 3 Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera

Visi Kabupaten Mojokerto "**Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur**" diibaratkan sebagai atap utama dari bangunan pemerintahan dan pembangunan daerah. Atap ini menjadi tujuan akhir yang menaungi seluruh unsur pembangunan, yang hanya dapat berdiri tegak jika didukung oleh pilar-pilar kuat yang merepresentasikan misi daerah.

1. Pilar-Pilar Kesejahteraan dan Kemajuan

Pilar-pilar dalam gambar melambangkan **misi utama** yang menopang visi besar Kabupaten Mojokerto:

Misi 3 - Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.

Misi 4 - Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Dua pilar ini menunjukkan bahwa ekonomi yang mandiri dan infrastruktur yang memadai adalah faktor utama dalam mencapai masyarakat yang lebih maju, adil, dan makmur. Tanpa

kedua aspek ini, bangunan kesejahteraan akan runtuh.

2. Balok Penghubung sebagai Tata Kelola Pemerintahan

Di atas pilar-pilar ini terdapat balok penghubung yang melambangkan Misi 1 - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Balok ini berperan sebagai penjaga stabilitas, memastikan bahwa seluruh elemen pembangunan berjalan dalam sistem yang baik, bersih, dan adil.

3. Fondasi sebagai Penguatan SDM dan Kesejahteraan Sosial

Fondasi dalam struktur ini melambangkan Misi 2 - Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketenteraman Masyarakat. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan ekonomi dan infrastruktur tidak akan bisa bertahan dalam jangka panjang. Fondasi ini adalah dasar utama yang menjamin keberlanjutan dan daya saing Kabupaten Mojokerto.



Gambar 3. 1
Kedudukan dan Peran Visi Misi RPJMD 2025-2029

Filosofi bangunan ini menggambarkan bahwa visi besar Kabupaten Mojokerto hanya dapat terwujud jika didukung oleh pilar ekonomi dan infrastruktur, diperkuat oleh tata kelola pemerintahan yang baik, dan bertumpu pada fondasi SDM yang unggul. Seperti sebuah

bangunan yang kokoh, keseimbangan antara semua elemen ini harus tetap terjaga agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 3. 2 Keselarasan Catur Abhipraya Mubarak dengan ASTA CITA - PHTC dan NAWA BHAKTI SATYA

Catur Abhipraya Mubarak	Asta Cita (Nasional)	PHTC (Nasional)	Nawa Bhakti (Provinsi)
Abhipraya Mubarak 1 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PHTC 6 Menyesuaikan/menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara	Nawa Bhakti 6 – Jatim Berkah Amanah Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna, dan antikorupsi; memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur, dan berjiwa Pancasila
Abhipraya Mubarak 2 Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat	Asta Cita 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PHTC 1 Memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita PHTC 2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten PHTC 4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Nawa Bhakti 3 – Jatim Cerdas Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses pendidikan untuk semua (education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan Nawa Bhakti 4 – Jatim Sehat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan penyediaan Universal Health Coverage (UHC). Nawa Bhakti 8 – Jatim Harmoni Menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis melalui penumbuhan nilai-nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, pengarusutamaan gender, serta memajukan seni budaya dan prestasi olahraga.

Catur Abhipraya Mubarak	Asta Cita (Nasional)	PHTC (Nasional)	Nawa Bhakti (Provinsi)
Abhipraya Mubarak 3 Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera	Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Asta Cita 6 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PHTC 3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional PHTC 5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menekan kemiskinan absolut PHTC 8 Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	Nawa Bhakti 1 – Jatim Sejahtera Mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu dengan memperkuat basis pendataan dan program pemberdayaan serta memprioritaskan warga miskin di kelompok rentan di antaranya difabel dan lansia melalui pemberdayaan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu Nawa Bhakti 2 – Jatim Kerja Memperluas lapangan kerja yang berkualitas melalui peningkatan kewirausahaan baru (start-up) pengembangan ekonomi kreatif, iklim investasi, stabilitas ekonomi serta pengendalian harga kebutuhan pokok, dan penguasaan keterampilan abad 21 (21st century skills) yang sedang saing Nawa Bhakti 7 – Jatim Agro Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dengan tata niaga yang mendukung, termasuk kepada sarana produksi, pembiayaan, daya dukung, infrastruktur pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.

Catur Abhipraya Mubarak	Asta Cita (Nasional)	PHTC (Nasional)	Nawa Bhakti (Provinsi)
Abhipraya Mubarak 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan”	Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk masyarakat adil dan makmur.	PHTC 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan penyediaan rumah murah bersanitasi bagi yang membutuhkan, terutama generasi milenial, Gen Z, dan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).	Nawa Bhakti 5 – Jatim AksesMemperkuat konektivitas antarwilayah dan intra-aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan. Nawa Bhakti 9 – Jatim Lestari Menjaga kelestarian lingkungan hidup demi pembangunan yang berkelanjutan, serta mendorong ekonomi hijau dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan lintas sektoral.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hierarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan

Tujuan dalam RPJMD merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode RPJMD. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Dengan menerapkan prinsip *measurable* dan *tangible*, setiap pencapaian pembangunan dapat dievaluasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, RPJMD ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

Tabel 3. 3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur											
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	85,58	86,36	86,50	86,65	86,78	86,92	87,06	
		Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	82,51	82,80	83,00	83,30	83,60	84,00	84,50	
MISI 2 : Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	4,30	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	74,42	79,05	80,35	81,35	82,15	83,2	83,8	
		Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih	Nilai MCSP KPK	97,44	97,50	97,60	97,70	97,80	97,90	98,00	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	79,31	79,31	79,50	79,55	79,60	79,75	79,90	
MISI 3 : Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera		Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Indeks SPBE/Indeks Pemerintah Digital	4,16	4.21	1,81-2,1	1,91-2,24	2,01-2,39	2,11-2,53	2,21-2,68	
	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,69	77,45-77,80	77,52-78,12	77,78-78,68	78,05-79,25	78,32-80,52	78,68-81-24	
			Indeks Kesalehan Sosial	81,77	82,47	83,17	83,87	84,57	85,27	85,97	
MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,99	13,00	13,02	13,09	13,18	13,24	13,28	
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,13	9,52	9,65	9,78	9,97	10,09	10,17	
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup	74,95	75,07	75,33	75,58	75,84	76,10	76,35	
			Prevalensi Stunting	15,3	11,75	11,33	10,91	10,49	9,04	8,66	
		Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat	Indeks Daya Beli	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	
		Meningkatnya kualitas pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	91,84	91,94	92,04	92,14	92,24	92,34	92,44	
		Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragam Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB),	74,50	75.12	75.96	76.80	77.64	78.48	79.32	
	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,34	4,32-5,30	4,38-5,32	4,51-5,83	4,61-5,45	4,68-5,46	4,76-5,42	
		Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	0,01	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,87	4,15-3,60	4,14-3,42	4,13-3,23	4,05-3,09	4,00-3,01	3,95-2,96	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	65.534.970,00	69.693.602,00	74.646.688,00	75.600.500,00	76.423.223,00	77.024.056,00	77.940.423,00	
		Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	35,89	43.07	43.94	44.16	44.38	44.82	45.27	
		Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	9,37	7,57-8,90	7,53-8,62	7,39-8,24	7,22-7,95	5,02-7,48	4,73-6,53	
		Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Gini Rasio	0,34	0,322-0,362	0,317-0,357	0,312-0,352	0,307-0,347	0,302-0,342	0,297-0,337	
		Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Mandiri	0,43	0,47	0,57	0,67	0,77	0,88	0,99	
		Menurunnya Wilayah Kantong kemiskinan	Persentase Wilayah Kantong Kemiskinan	25	37	49	61	73	85	100	
		Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di semua sektor	Indeks Infrastruktur	12,418	13,304	13,374	13,444	13,514	13,584	13,600	
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	70,95	71,490	72,130	73,100	73,770	74,770	75,800	
			Persentase Infrastruktur kondisi baik	67,430	67,870	68,520	69,010	69,510	70,160	70,660	
		terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	IKLH	64,43	68,82	68,90	68,98	69,05	69,13	69,21	
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks risiko Bencana (IRB)	108.77	104,73-102,18	102,18-99,74	99,74-97,43	97,43-95,22	95,22-93,10	93,10-90,30	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata.

Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat

3.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Mojokerto, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut.

Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto secara efektif dan berkelanjutan. Dalam merumuskan strategis, merujuk pada SDG's. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur berdasarkan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia. Tujuan yang dicanangkan bersama oleh negara-negara pada resolusi PBB ini, diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Strategi Kabupaten Mojokerto berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan secara detail dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Mojokerto 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
VISI: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur				
Misi 1 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik Misi 2 Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat. Misi 3 Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera. Misi 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.			Kepala Daerah
		Terwujudnya Profesionalitas ASN	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas serta kapabilitas pegawai dalam rangka pengelolaan/manajemen perubahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menerapkan praktik tata kelola yang baik	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Implementasi Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Ini termasuk optimalisasi dan percepatan pengembangan sistem e-government untuk pelayanan publik yang lebih baik. 2 Reformasi Hukum dan Regulasi: Menguatkan kerangka hukum dan regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan serta kepastian hukum bagi semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dapat meliputi revisi beragam peraturan/regulasi dan kebijakan terkait yang diidentifikasi sudah kurang relevan dan memerlukan pembaharuan.	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Perpustakaan dan Kearsipan; Kecamatan; ; Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Komunikasi dan Informatika; Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	1 Penguatan Kapasitas Kelembagaan: Penting untuk membangun kapasitas lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menyediakan dan menunjang beragam layanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 2 Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi serta re-design program-program pelayanan publik agar dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan program tersebut di tingkat lokal. 3 Inovasi dalam Tata Kelola: Mendorong inovasi dalam praktek tata kelola untuk meningkatkan responsivitas, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi dalam menghadapi tantangan baru serta perubahan yang lebih cepat. 4 Penguatan Penelitian dan Inovasi: Mendorong inovasi di sektor-sektor kunci melalui dukungan terhadap riset dan pengembangan (penguatan budaya dan ekosistem riset dan pengembangan), memfasilitasi transfer teknologi dari sektor formal ke sektor informal, serta pengoptimalan penerapan/hilirisasi invensi dan inovasi yang berasal dari masyarakat akar rumput, kaum pelajar, dan warga masyarakat lainnya	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang perencanaan; Sekretariat Daerah; Inspektorat Daerah; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan
		Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih	1 Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit: Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga pengawasan atau lembaga audit internal untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan atau organisasi berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 2 Melakukan reformasi dalam tata kelola ekonomi dan pemerintahan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Sekretariat Daerah; Inspektorat Daerah; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Keuangan
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Peningkatan Efisiensi Biaya: Mengidentifikasi dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi inefisiensi, memperbaiki manajemen anggaran, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang perencanaan; Inspektorat Daerah; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Keuangan
		Meningkatnya kualitas digitalisasi pemerintahan	Peningkatan Keterbukaan dan Transparansi: Membuat informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja publik lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan kinerja dan keuangan secara terbuka, portal transparansi, atau publikasi data	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Komunikasi dan Informatika, statistik; persandian; perpustakaan dan kearsipan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			terbuka (open data).	
	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter			Kepala Daerah
	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	1 Meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan terutama di daerah pedesaan. 2. Penyediaan Transportasi dan Bantuan Biaya: Memastikan bahwa anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses pendidikan dengan menyediakan transportasi sekolah gratis atau subsidi biaya pendidikan. 3. Pengembangan Metode pembelajaran: Merancang metode pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Ini dapat mencakup pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran atau penekanan pada keterampilan hidup. 4. Peningkatan Kualitas Pengajar: Melakukan pelatihan dan pengembangan guru secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan memotivasi. 5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Membangun sistem pemantauan yang kuat untuk memantau kehadiran siswa, kualitas pembelajaran, dan pencapaian akademik. Adapun evaluasi, penting untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan. 6. Kemitraan dengan Komunitas dan Orang Tua: Melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam mendukung pendidikan anak-anak, baik dalam memberikan dukungan moral, partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah, maupun mendukung kebijakan percepatan wajib belajar. 7. Inovasi dalam Pendidikan: Mendorong inovasi dalam metode pembelajaran dan pendekatan yang dapat meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, seperti penggunaan teknologi atau pengembangan model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan keterampilan kritis. 8. Penyesuaian dan Dukungan untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Memastikan bahwa ada dukungan khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau kondisi yang memerlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda, untuk memastikan bahwa mereka juga dapat menyelesaikan pendidikan dasar dalam waktu yang ditentukan	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pendidikan; kebudayaan; kepemudaan dan olahraga	
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1. Penguatan Sistem Primer Kesehatan: Fokus pada pelayanan kesehatan primer sebagai pintu gerbang utama untuk akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau. 2. Penggunaan Teknologi Informasi: Mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan manajemen data pasien, sistem informasi kesehatan, e-health, dan telemedicine guna meningkatkan efisiensi dan akses pelayanan kesehatan. 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya melalui pelatihan, pengembangan karir, dan motivasi. 4. Penguatan Infrastruktur Kesehatan: Membangun dan memperluas infrastruktur kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk fasilitas kesehatan, laboratorium, dan rumah sakit. 5. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit: Meningkatkan program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, termasuk vaksinasi, peningkatan gizi, promosi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta screening penyakit. 6. Peningkatan Akses Obat dan Peralatan Medis: Memastikan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau dan peralatan medis yang berkualitas, serta memperbaiki distribusi dan penggunaannya.	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			7. Integrasi Kesehatan Mental: Menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan mental, mengurangi stigma, dan meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental di masyarakat. 8. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program kesehatan. 9. Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan: Memastikan pembiayaan yang mencukupi dan berkelanjutan untuk sistem kesehatan, serta meningkatkan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas. 10. Penelitian dan Inovasi: Mendorong riset dan inovasi dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas diagnosa, pengobatan, dan pengendalian penyakit, serta mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 11. Penguatan Sistem Keamanan dan Kualitas Pelayanan: Memastikan keamanan pasien dan kualitas pelayanan dengan standar yang tinggi, termasuk pengawasan dan audit internal yang terstandarisasi serta bermutu tinggi. 12. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kebersihan, dan akses terhadap layanan kesehatan, serta meningkatkan partisipasi dalam keputusan terkait kesehatan mereka sendiri. 13. Penguatan peran dan sinergi perangkat daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penyediaan sarana prasarana, penguatan SDM kesehatan dan kader, serta integrasi layanan dasar lainnya di Posyandu. Dengan demikian, "new" Posyandu dapat berfungsi sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat yang komprehensif, inklusif, dan berkesinambungan sesuai mandat SPM	
		Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat	1 Pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga bahan pokok dan penguatan distribusi logistik. 2 Peningkatan produktivitas UMKM dan usaha mikro melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran digital. 3 Penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri lokal, pariwisata, dan sektor ekonomi kreatif. 4 Penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan langsung dan subsidi tepat sasaran. 5 Mendorong kemitraan usaha antara pelaku besar dan pelaku usaha kecil untuk memperluas peluang pasar. 6 Peningkatan akses pembiayaan murah dan mudah melalui koperasi desa, dan BPR 7 Pengembangan pasar rakyat yang modern untuk meningkatkan daya saing produk lokal. 8 Pemberdayaan kelompok rentan dan marginal agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 9 Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas peluang usaha dan pemasaran produk lokal.	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan; Pangan, kelautan, dan Perikanan
		Meningkatnya kualitas pembangunan Gender	Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemenuhan hak-hak anak (Hak Sipil dan kebebasan, Hak Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternatif, Kesehatan Dasar dan kesejahteraan serta Perlindungan Khusus pada Anak).	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama	1 Mendukung dan mempromosikan keberlanjutan budaya lokal, nilai-nilai tradisional, serta praktik-praktik kearifan lokal. Hal ini termasuk mendukung seni dan budaya, bahasa daerah, upacara adat, dan tradisi kehidupan masyarakat 2 Penanganan Konflik Sosial dan Penguatan Keharmonisan Sosial: Mendorong dialog antar	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; sekretariat daerah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, membangun kesadaran tentang keragaman budaya, serta mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan. 1 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kehidupan Demokrasi yang Sehat 2 Memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam penanganan permasalahan keamanan. 3 Pemanfaatan Teknologi untuk Keamanan 4 Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota partai politik mengenai pentingnya etika politik, kejujuran, dan transparansi	
	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi			Kepala Daerah
		Meningkatnya Investasi	1 Mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas 2 Menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperluas jaringan distribusi dan membuka peluang bisnis baru 3 Mengadopsi teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, 4 Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan agar lebih kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar. 5 Meningkatkan Pemasaran dan Branding 6 Mendorong reformasi kebijakan untuk menyederhanakan regulasi bisnis dan perizinan, memperbaiki iklim investasi, dan mengurangi birokrasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang penanaman modal, tenaga kerja; pekerjaan umum dan penataan ruang; kesatuan bangsa dan politik; Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat
		Menurunnya Angka Pengangguran	1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan individu dalam menghadapi pasar kerja yang semakin dinamis. Melalui pendidikan formal atau pelatihan keterampilan, masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Fokus pada pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja dalam menghadapi tantangan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis. Ini mencakup pengembangan keterampilan digital dan teknologi informasi.	Perangkat Daerah pelaksana urusan Tenaga Kerja; Perindustrian dan Perdagangan; Koperasi dan Usaha Mikro
		Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	Pembangunan Industri dan Ekonomi Kreatif: Mendukung pembangunan industri-manufaktur yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi, serta mempromosikan ekonomi dan industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Strategi untuk pengembangan kawasan peruntukan industri dan pariwisata yang mendukung sektor pertanian meliputi: a. menyediakan lahan dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri; b. mengembangkan akses jaringan jalan pada kawasan peruntukan industri dengan jaringan jalan arteri dan kolektor primer; c. mengendalikan perkembangan industri besar dan menengah hanya pada lokasi kawasan peruntukan industri; d. menyediakan instalasi pengolahan limbah pada setiap Kawasan Peruntukan Industri; e. mengembangkan pariwisata alam dan desa wisata; f. meningkatkan fasilitas pendukung dalam mengembangkan pariwisata budaya; dan g. meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi pada setiap kawasan pariwisata. Mendorong penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan; Koperasi dan Usaha Mikro; Pangan; Kelautan dan perikanan; Pertanian; Pariwisata

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1 Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap aspek kebijakan ekonomi, ter masuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular serta prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan lainnya 2 Mendorong kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk memfasilitasi investasi dan pengelolaan proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berkelanjutan 1 Pengembangan Kewirausahaan dan Usaha Kecil Menengah (UKM): Memberikan dukungan kepada kewirausahaan dan UKM melalui fasilitasi akses ke modal, pelatihan pengembangan bisnis, dan akses pasar yang lebih luas baik domestik, regional, maupun internasional. 2 Meningkatkan akses masyarakat, terutama di daerah pedesaan, terhadap layanan keuangan seperti kredit mikro, tabungan, dan asuransi untuk mendukung usaha produktif dan pengembangan ekonomi lokal. 3 Memfokuskan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal atau masyarakat yang rentan dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. 4 Mendorong adopsi teknologi digital dan e-commerce untuk meningkatkan efisiensi bisnis, akses pasar, dan konektivitas yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah 1 Mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap budaya lokal dan lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi komunitas lokal. 2 Memberdayakan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan, memperkuat peran mereka dalam ekonomi lokal, serta meningkatkan akses mereka terhadap beragam layanan publik baik layanan dasar dan pilihan.	
		Optimalisasi Peningkatan PAD	1 Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah 2 Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Daerah 3 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Daerah 4 Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 5 Peningkatan Pembiayaan Inovatif	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang keuangan; inspektorat daerah; Komunikasi dan informatika
	Menurunkan Angka Kemiskinan			Kepala Daerah
		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Menengah ke Bawah	Mendorong sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pengoptimalan diversifikasi tanaman pangan, konservasi air, serta akses yang lebih baik terhadap pasar bagi para petani kecil Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan di Desa Mengembangkan program pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku UMKM 1 Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. 2 Memperkuat fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik desa 3 Mendukung pertanian organik dan ramah lingkungan yang mengutamakan keberlanjutan, serta mendorong diversifikasi produk pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani 4 Meningkatkan kapasitas aparat desa melalui pelatihan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, serta pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pertanian; Tenaga Kerja; Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; Perindustrian dan Perdagangan; Koperasi dan Usaha Mikro
		Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	1 Program Jaminan Sosial: Ini mencakup program-program seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial bagi warga lanjut usia, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Program ini memberikan perlindungan finansial kepada individu dan keluarga saat menghadapi Risiko	Perangkat daerah pelaksana urusan Sosial; Kesehatan; Pendidikan; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Tenaga Kerja; Industri dan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			kehilangan pendapatan atau biaya kesehatan yang tinggi. 2 Bantuan Sosial: Bantuan sosial meliputi program-program seperti bantuan tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan untuk keluarga miskin atau warga masyarakat marjinal lainnya. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan langsung kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 3 Program Pekerjaan dan Pemberdayaan Ekonomi: Ini mencakup program-program seperti program pekerjaan sementara, bantuan untuk usaha kecil dan menengah, serta program pelatihan untuk kewirausahaan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi yang produktif. 4 Asuransi dan Perlindungan Kesehatan: Program-program ini mencakup asuransi kesehatan atau skema pembiayaan kesehatan yang dirancang untuk mengurangi Risiko finansial yang ditimbulkan oleh biaya kesehatan yang tinggi.	Perdagangan; Koperasi dan Usaha Mikro
		Menurunnya Wilayah Kantong Kemiskinan	1 Mengembangkan program subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat membeli atau menyewa rumah yang layak huni 2 Mendorong pembangunan rumah sederhana yang memenuhi standar kesehatan dan layak huni dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpendapatan rendah 3 Mengadakan program penghijauan di kawasan kumuh untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup 4 Menyediakan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah 5 Melakukan revitalisasi kawasan perkotaan yang telah mengalami urban decay dengan membangun perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas hidup 6 Memperbaiki dan menyediakan fasilitas umum seperti taman kota, pusat komunitas, dan ruang publik yang inklusif dan ramah lingkungan untuk mendukung kehidupan sosial 7 Mengembangkan kawasan perkotaan dengan prinsip keberlanjutan, baik dalam pengelolaan energi, pengelolaan sampah, maupun dalam pembangunan yang berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan efisiensi energi 8 Mendorong pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, termasuk penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan energi yang efisien, dan penghijauan area perumahan	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang perumahan rakyat; dan Kawasan permukiman; Perhubungan; pekerjaan umum dan penataan ruang; pangan, perikanan dan kelautan
	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur berkelanjutan disemua sektor			Kepala Daerah
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	1 Menambah fasilitas pendukung halte, stasiun, dan tempat parkir yang nyaman dan mudah diakses oleh pengguna transportasi publik 2 Mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik untuk mengawasi operasional transportasi publik 3 Meningkatkan aksesibilitas transportasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat dengan menyediakan rute yang mencakup daerah pemukiman padat, daerah terpencil, dan akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan 4 Memperbaiki sistem pengamanan di perlintasan sebidang, dengan membangun pagar pembatas, menyediakan petugas keamanan, serta pemasangan sinyal dan lampu peringatan yang lebih jelas untuk mencegah kecelakaan 5 Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan kawasan produktif.	Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perhubungan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			6 Pengembangan jaringan transportasi publik yang terjangkau, aman, dan ramah lingkungan. 7 Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana air bersih melalui pengembangan jaringan perpipaan dan sumur bor. 8 Peningkatan akses sanitasi layak dan aman melalui pembangunan serta perbaikan fasilitas sanitasi di permukiman dan fasilitas umum. 9 Peningkatan infrastruktur listrik dan telekomunikasi untuk menjangkau daerah terpencil atau blank spot. 10 Penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan drainase untuk mengurangi Risiko genangan dan kerusakan lingkungan. 11 Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal. 12 Peningkatan infrastruktur penunjang kawasan strategis seperti pasar, 13 Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan yang memadai, meliputi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan jalan umum, pagar pengaman, fasilitas penyeberangan, dan perlengkapan pengendali kecepatan di titik rawan kecelakaan,	
		terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	1 Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta memberdayakan mereka dalam mengelola Risiko dan ancaman yang timbul. 2 Melindungi, melestarikan, dan mengelola secara berkelanjutan sumber daya alam dan ekosistem esensial, yang merupakan dasar bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. 3 Meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan untuk mengurangi Risiko banjir dan mengatur suhu kota 4 Meningkatkan vegetasi di area rawan bencana 5 Penguatan Tata Kelola Persampahan Terintegrasi, dengan mengembangkan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (pengurangan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan akhir) secara berkelanjutan berbasis masyarakat dan teknologi ramah lingkungan. 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana, seperti pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan modernisasi armada pengangkut sampah untuk menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa dan kawasan terpencil. 7 Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan, melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola sampah, pembentukan unit kerja pengelolaan sampah di tingkat desa, serta penguatan peran Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 8 Edukasi dan Kampanye Publik, dengan mengencakan sosialisasi program 3R (Reduce, Reuse, Recycle), edukasi pemilahan sampah rumah tangga, dan pelibatan aktif sekolah, komunitas, serta pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. 9 Kebijakan dan Regulasi Daerah, melalui penyusunan atau peninjauan kembali Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan sampah, termasuk sanksi dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. 10 Kemitraan dan Inovasi, dengan mendorong kerja sama dengan sektor swasta, LSM, dan lembaga riset untuk mengembangkan teknologi pengolahan sampah yang efisien dan mendukung ekonomi sirkular. 11 Penguatan sistem pengelolaan limbah industri melalui pembangunan dan optimalisasi Instalasi 12 Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu serta penerapan teknologi ramah lingkungan. 13 Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah industri yang	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			tidak sesuai 14 Peningkatan kapasitas industri dalam pengelolaan limbah melalui pendampingan teknis, 15 Pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pengelolaan limbah untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau. 16 Optimalisasi pemantauan kualitas air secara berkala	
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	1 Perlindungan Terhadap Bencana dan Krisis: Strategi ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini, pengelolaan Risiko bencana, dan bantuan tanggap darurat untuk membantu individu dan komunitas dalam menghadapi bencana alam atau krisis lainnya. 2 Memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana alam, termasuk promosi budaya sadar dan tanggap bencana, pengembangan sistem peringatan dini, rencana tanggap darurat, serta rehabilitasi pasca-bencana.	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Strategi Pencapaian Misi 1

Strategi pembangunan Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu sasaran utama adalah terwujudnya integritas dan profesionalisme ASN, yang dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas ASN agar mereka lebih efektif dalam pengelolaan perubahan dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas ASN juga akan mendukung tercapainya tujuan terwujudnya ketenteraman masyarakat. Untuk itu, strategi yang diambil antara lain memperkuat koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam penanganan masalah keamanan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan sistem keamanan. Selain itu, pemberian pelatihan mengenai etika politik dan transparansi kepada anggota partai politik juga menjadi langkah penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat.

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan publik, peningkatan kinerja layanan pemerintah daerah menjadi fokus utama. Salah satu strategi yang diterapkan adalah implementasi teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Perbaikan ini akan lebih efektif jika diiringi dengan reformasi hukum dan regulasi, yang tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Selanjutnya, untuk terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kabupaten Mojokerto mengedepankan penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program-program pelayanan publik. Hal ini penting agar layanan publik dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi strategi penting, agar tata kelola semakin efisien dan dapat menghadapi tantangan yang semakin dinamis.

Terkait dengan penguatan birokrasi yang bersih, salah satu langkah strategis yang diambil adalah penguatan sistem pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan pula reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang mampu mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memastikan bahwa seluruh prosedur administratif dan pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Sementara itu, untuk terwujudnya pengelolaan dan kemandirian keuangan berkualitas, strategi yang diterapkan meliputi peningkatan efisiensi biaya dalam pengelolaan anggaran daerah, dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan prioritas pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Terakhir, dalam rangka mempercepat inovasi dalam pelayanan publik, Kabupaten Mojokerto mengimplementasikan peningkatan keterbukaan dan transparansi melalui penerapan open data. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja publik secara terbuka, yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah dan memperkuat akuntabilitas. Strategi-strategi ini saling mendukung dan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan berorientasi pada kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Strategi Pencapaian Misi 2

Sasaran: Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Berkarakter
Untuk mencapai sasaran terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, berbagai strategi pengembangan pendidikan telah disusun secara komprehensif. Salah satu strategi utama adalah ekspansi akses pendidikan, dengan fokus pada peningkatan akses anak-anak di daerah pedesaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Sebagai pendukungnya, penyediaan transportasi dan bantuan biaya pendidikan sangat penting, khususnya untuk anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah atau berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Melalui subsidi biaya pendidikan atau transportasi sekolah gratis, anak-anak di daerah tersebut dapat mengakses pendidikan dengan lebih mudah.

Strategi pengembangan metode pembelajaran juga menjadi perhatian utama. Metode yang relevan, efektif, dan memotivasi untuk memastikan bahwa anak-anak memperoleh keterampilan yang dibutuhkan sangat diperlukan. Ini meliputi penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan penekanan pada pengembangan keterampilan hidup. Selain itu, untuk memastikan kualitas pengajaran yang maksimal, dilakukan peningkatan kualitas pengajar melalui pelatihan dan pengembangan secara berkala. Guru yang berkualitas akan memberikan pembelajaran yang relevan, efektif, dan efisien. Terakhir, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kehadiran siswa, kualitas pembelajaran, dan pencapaian akademik akan memastikan bahwa setiap hambatan dalam proses belajar-mengajar dapat segera diatasi.

Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
Pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau di Kabupaten Mojokerto bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang merata bagi masyarakat. Salah satu strategi utama adalah penguatan sistem primer kesehatan sebagai pintu gerbang utama bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau. Dengan pemanfaatan teknologi informasi (TIK) seperti e-health dan telemedicine, layanan kesehatan dapat lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, seperti pelatihan tenaga medis,

termasuk dokter, perawat, dan bidan, sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Selain itu, penguatan infrastruktur kesehatan dengan membangun dan memperluas fasilitas kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di sisi lain, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit menjadi bagian integral dalam memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, melalui program vaksinasi, penyuluhan gizi, dan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Peningkatan akses obat dan peralatan medis yang terjangkau juga sangat penting agar setiap individu dapat memperoleh layanan medis yang berkualitas tanpa terbebani biaya.

Sasaran: Meningkatkan Akses Keterjangkauan Daya Beli Masyarakat terhadap Kebutuhan Pokok Masyarakat Untuk memastikan masyarakat memiliki daya beli yang cukup terhadap kebutuhan pokok, berbagai strategi ekonomi dilakukan, termasuk penguatan ekonomi lokal dan peningkatan akses pendidikan serta pelatihan. Strategi ini mendukung pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Stabilitas harga dan pengendalian inflasi menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan ekonomi yang langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau juga penting dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia, salah satu langkah yang diambil adalah upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak-hak anak, yang mencakup hak sipil, pendidikan, serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Perlindungan terhadap anak-anak melalui lingkungan keluarga yang sehat dan pengasuhan alternatif menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia yang berkualitas.

Sasaran: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Mempunyai Kerukunan Umat Beragama Tinggi Pembangunan kerukunan umat beragama di Kabupaten Mojokerto mencakup dua strategi utama: pertama, mendukung keberlanjutan budaya lokal yang melibatkan pelestarian seni, budaya, bahasa daerah, dan tradisi kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga identitas budaya yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Kedua, strategi dalam penanganan konflik sosial dengan mengembangkan dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda dan meningkatkan kesadaran tentang keragaman budaya. Masyarakat didorong untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

Strategi Pencapaian Misi 3

Pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal merupakan langkah strategis untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Salah satu sasaran utama dalam mencapai tujuan ini adalah pembangunan industri dan ekonomi kreatif, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Dalam hal ini, industri-manufaktur yang berkelanjutan akan didorong untuk berkembang, sementara sektor industri kreatif juga dipromosikan sebagai sumber utama pendapatan ekonomi daerah. Penggunaan teknologi inovatif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pertanian, energi, dan industri lainnya menjadi strategi penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

Strategi mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular dalam kebijakan ekonomi daerah akan memastikan bahwa setiap proses produksi dan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Kemitraan strategis antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil akan menjadi pendorong utama untuk menarik investasi dan mengelola proyek pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri.

Selain itu, pengembangan pariwisata, khususnya pariwisata sejarah dan eco-tourism, menjadi sektor penting dalam perekonomian daerah. Strategi ini bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata yang berkelanjutan, memperhatikan dampaknya terhadap budaya lokal dan lingkungan. Keberlanjutan pariwisata tidak hanya menjanjikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat yang adil bagi komunitas lokal. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan terkait pariwisata akan memperkuat peran mereka dalam ekonomi lokal dan memperluas akses terhadap berbagai layanan publik, termasuk layanan dasar.

Pengembangan jasa perbankan dan investasi juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Reformasi kebijakan yang menyederhanakan regulasi bisnis dan perizinan akan memperbaiki iklim investasi, yang secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berbisnis. Mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar serta menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, akan membuka peluang bisnis baru dan memperluas jaringan distribusi. Penggunaan teknologi informasi juga akan meningkatkan efisiensi operasional, yang pada gilirannya dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih kompetitif di pasar global.

Pengembangan koperasi dan usaha mikro menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan memberikan dukungan kepada kewirausahaan dan UKM melalui akses modal, pelatihan, dan akses pasar yang lebih luas, ekonomi daerah dapat tumbuh lebih inklusif.

Di samping itu, akses keuangan yang lebih mudah, terutama di daerah pedesaan, akan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka. Penerapan teknologi digital dan e-commerce dalam usaha mikro akan meningkatkan efisiensi bisnis dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil, sekaligus meningkatkan konektivitas mereka dengan pasar yang lebih luas.

Terakhir, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketahanan fiskal daerah. Strategi seperti diversifikasi sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, serta pengelolaan sumber daya daerah yang lebih berkualitas akan meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara lebih efektif. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembiayaan inovatif juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan yang mendukung ekonomi daerah.

Setiap strategi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, sektor industri, pariwisata, jasa keuangan, serta koperasi, Kabupaten Mojokerto dapat mencapai perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, stabil, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Strategi Pencapaian Misi 4

Pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman memiliki keterkaitan yang erat dengan strategi untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah. Salah satu strategi utama untuk mencapai sasaran ini adalah dengan mengembangkan program subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat membeli atau menyewa rumah yang layak huni. Selain itu, pemerintah daerah mendorong pembangunan rumah sederhana yang memenuhi standar kesehatan dan layak huni dengan harga terjangkau, yang dapat memberikan solusi untuk masalah pemukiman yang tidak layak huni. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, diadakan program penghijauan di kawasan kumuh, yang juga memberikan dampak positif terhadap kualitas udara dan lingkungan sekitar.

Selain itu, penyediaan fasilitas dasar seperti sanitasi, listrik, air bersih, dan sistem pembuangan limbah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Revitalisasi kawasan perkotaan yang telah mengalami urban decay menjadi strategi yang efektif untuk memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan perumahan yang ramah lingkungan serta pengelolaan energi yang efisien juga menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini akan mendukung terbentuknya perumahan yang ramah lingkungan dan mendorong penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas, strategi untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas sangat penting untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Salah satu strategi yang diterapkan adalah menambah fasilitas pendukung seperti halte, stasiun, dan tempat parkir yang nyaman dan mudah diakses oleh pengguna transportasi publik. Mengembangkan sistem manajemen transportasi publik yang lebih baik juga bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi atau daerah terpencil yang membutuhkan akses ke fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Untuk memperbaiki keamanan di perlintasan sebidang, dilakukan pemasangan pagar pembatas, sinyal, dan lampu peringatan yang lebih jelas untuk mencegah kecelakaan.

Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau juga menjadi bagian dari strategi yang mendukung kualitas hidup di kota. Dengan meningkatkan jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau, kita dapat mengurangi Risiko banjir dan mengatur suhu kota dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kualitas udara. Selain itu, peningkatan vegetasi di area rawan bencana dapat membantu mitigasi Risiko bencana alam, memberikan perlindungan terhadap ancaman perubahan iklim, dan mendukung keberagaman hayati.

Untuk mendukung pencapaian Misi 4 Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan sasaran strategis “terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas”, diperlukan strategi khusus yang secara eksplisit menargetkan peningkatan pengelolaan persampahan. Hal ini menjadi krusial mengingat data pada Bab II dan III menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan di Kabupaten Mojokerto masih belum optimal, dengan rendahnya tingkat pengurangan dan penanganan sampah, serta terbatasnya cakupan pelayanan pengelolaan sampah. Strategi yang dapat diterapkan antara lain penguatan kelembagaan dan tata kelola melalui penyesuaian regulasi daerah yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif berbasis prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), serta penyusunan kebijakan insentif bagi rumah tangga dan pelaku usaha yang aktif dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan investasi pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti pengembangan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R), perbaikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) agar lebih ramah lingkungan, serta penerapan teknologi pengolahan sampah seperti komposting dan pengolahan energi dari sampah (*waste to energy*). Selain aspek teknis, peningkatan kapasitas

sumber daya manusia pengelola sampah dan penyuluhan kepada masyarakat juga perlu digalakkan untuk membangun budaya sadar lingkungan. Pendekatan kolaboratif dengan melibatkan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia pendidikan dapat mendorong inovasi dan perluasan cakupan program pengelolaan sampah. Dengan strategi yang terarah dan terintegrasi, pengelolaan persampahan dapat menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mojokerto, serta mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pencapaian pembangunan daerah yang inklusif dan ramah lingkungan.

Untuk meningkatkan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum, dan gedung yang memadai, pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Investasi dalam infrastruktur modern dan berkelanjutan akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi, yang pada gilirannya akan memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan membuka peluang ekonomi baru. Lingkungan hidup yang berkualitas juga merupakan sasaran penting dalam pembangunan daerah ini, yang dicapai dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelestarian dan pengelolaan secara berkelanjutan sumber daya alam sangat penting agar ekosistem tetap terjaga, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

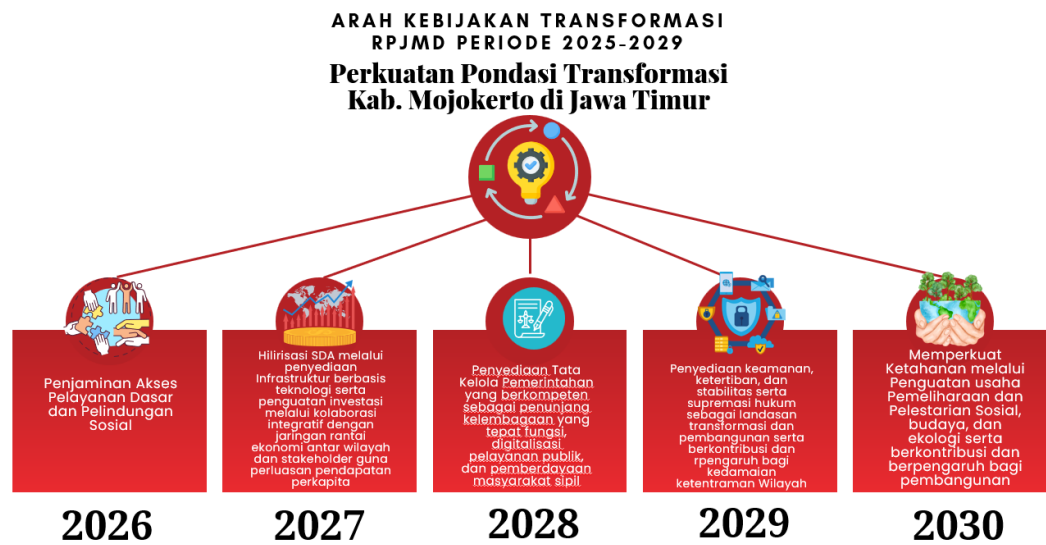
Terakhir, dalam menghadapi pencegahan dan penanggulangan bencana, strategi pembangunan yang mencakup sistem peringatan dini dan pengelolaan Risiko bencana akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim juga perlu diperkuat dengan pengembangan budaya sadar dan tanggap bencana serta rencana tanggap darurat yang lebih efektif, sehingga masyarakat dapat mengurangi dampak bencana yang terjadi.

Strategi tersebut saling mendukung dan terintegrasi untuk menciptakan daerah yang tidak hanya memiliki infrastruktur yang layak dan berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan keselamatan publik.

3.2.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Untuk memudahkan pemahaman terhadap kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun, terlebih dahulu disederhanakan dalam agenda atau tema RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi,

tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas agar RPJMD mudah dituangkan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan



Gambar ini menggambarkan arah kebijakan transformasi di Kabupaten Mojokerto untuk periode 2025-2029 dengan fokus pada penguatan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Kelima kebijakan utama yang digambarkan dalam gambar ini saling terkait satu sama lain dan membentuk suatu siklus pembangunan yang saling mendukung dan memperkuat.

1. **Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial (2026):** Dimulai dengan memastikan akses pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang merata. Kebijakan ini menjadi fondasi utama, karena memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasar yang esensial, seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tanpa akses ini, transformasi lebih lanjut tidak dapat terlaksana dengan maksimal.
2. **Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Penyediaan Infrastruktur (2027):** Langkah selanjutnya adalah hilirisasi SDA melalui penyediaan infrastruktur berbasis teknologi yang mampu mempercepat proses distribusi dan akses ekonomi antar wilayah. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dan jaringan ekonomi antar wilayah akan memperluas pendapatan per kapita. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mendukung kemajuan ekonomi, tetapi juga akan memperkuat pelayanan dasar yang sudah dimulai pada tahap sebelumnya.
3. **Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang Kompeten (2028):** Sebagai pilar ketiga, kebijakan ini menekankan pada pentingnya tata kelola pemerintahan yang kompeten. Pemerintah yang mampu menjalankan fungsi administrasi, melaksanakan digitalisasi

pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat sipil, akan meningkatkan efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan. Dengan tata kelola yang baik, pengelolaan sumber daya dan kebijakan akan lebih tepat sasaran, mempercepat proses transformasi yang diinginkan.

- 4. Penyediaan Keamanan, Ketertiban, dan Stabilitas (2029): Keamanan dan stabilitas merupakan aspek yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan landasan yang kuat berupa keamanan dan supremasi hukum. Dengan terciptanya ketertiban dan kepastian hukum, semua kebijakan yang telah diterapkan akan berjalan dengan lancar, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang stabil.
- 5. Memperkuat Ketahanan melalui Pelestarian Sosial dan Ekologi (2030): Di tahap terakhir, kebijakan ini mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya, dan ekologi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan, serta memperkuat ketahanan masyarakat dan wilayah dari berbagai tantangan eksternal. Dengan pelestarian ini, pembangunan akan lebih berkelanjutan dan berpengaruh positif bagi masa depan.

Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mojokerto lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk “Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial”, Dalam upaya mewujudkan layanan dan jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah arah kebijakan yang menjadi Fokus sesuai dengan RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045:

Tabel 3. 5
Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2026

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1	Transformasi Sosial	1	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, Kesehatan, ruang terbuka hijau dan fasilitas komunal pendukung Kesehatan.
				2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan Kesehatan <i>universal</i>
				3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan Kesehatan primer dan

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
					rujukan
				4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
				5	Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
				6	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
				7	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
				8	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
		2	Pendidikan berkualitas dan merata	1	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)
				2	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah
				3	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rentan dan/atau bagi yang memiliki prestasi
				4	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
				5	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
				6	Penguatan kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literasi, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
				7	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
				8	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
				9	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
				10	Peningkatan kualitas Pendidikan guru dan tenaga kependidikan
				11	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan
				12	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan jaminan sosial adaptif terintegrasi
				13	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
				14	Peningkatan akses Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi
				15	Beasiswa Pendidikan dasar, menengah dan tinggi berbasis keunggulan wilayah dan bertaraf global
				16	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren
		3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Percepatan Pembangunan dan penuntasan kemiskinan
				2	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi. Rumah

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
					layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas)
				3	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique dan high value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal dan non fiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
				4	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien
				5	Perluasan penyediaan bantuan sosial, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
				6	Perluasan penyediaan jaminan sosial, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
				7	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
				8	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
				9	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau
				10	Penataan kawasan kumuh
				11	Percepatan eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga
				12	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan Kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan
		4	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
				2	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
				3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
				4	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dna logistic yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistic, sarana dan prasarana perkeretaapian, Kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)

Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 ditujukan untuk **“Hilirisasi SDA melalui penyediaan Infrastruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan per kapita”**. Arah pembangunan Kabupaten Mojokerto yang berfokus pada **Inovasi, Produktivitas Ekonomi, Penerapan Ekonomi Hijau, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional**, serta **Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**, sangat mendukung kebijakan strategis yang telah dirancang untuk mencapai tujuan

pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Setiap arah kebijakan yang ditetapkan memiliki hubungan yang erat satu sama lain untuk mempercepat transformasi ekonomi. Keterhubungan antara arah pembangunan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Mojokerto menciptakan sinergi yang mendukung transformasi ekonomi. Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang akan dilakukan:

Tabel 3. 6
Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2027

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
1	Transformasi Ekonomi	1	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian
				2	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca dan lainnya).
				3	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
				4	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
				5	Modernisasi sarana produksi perikanan.
				6	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi
				7	Peningkatan produktivitas BUMD
				8	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing
		2	Penerapan Ekonomi Hijau	1	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
				2	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keuangan wilayah (industri pengolahan makanan dan minuman, <i>industry consumer goods</i>)
				3	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
		3	Transformasi Digital	1	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi Pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i> .
				2	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pengelola perikanan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan <i>melalui digital marketplace/platform</i> .
				3	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital
				4	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
		4	Integrasi Ekonomi Domestik dan Nasional	1	Pengembangan <i>closed loop model</i> budidaya perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan sebagainya
				2	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan
				3	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
				4	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
				5	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
				6	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan sebagainya
				7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
				8	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
				9	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
				10	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa
				11	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (<i>atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages</i>)
				12	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
				13	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas Unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
				14	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan Nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan
				15	Pengembangan ekosistem ekonomi syariah daerah yang terintegrasi dengan rantai nilai nasional dilakukan melalui penguatan industri halal dan UMKM halal, akselerasi fasilitasi sertifikasi halal, serta optimalisasi pengelolaan dan literasi dana sosial syariah (ZISWAF) guna mendukung perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian Indeks Zakat Nasional.
		5	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
				2	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, <i>karakter, dan dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik <i>pariwisata urban tourism</i>
				3	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
				4	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
				5	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan
				6	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
					kawasan perkotaan.
				7	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan
				8	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistic yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistic, sarana dan prasarana perkeretaapian, Kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)
				9	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri;
				10	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
				11	Arah kebijakan pembangunan berbasis kawasan Kab. Mojokerto sebagai salah satu pusat utama rencana pengembangan Kawasan industri (Gerbang kertasusila Plus)
				12	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal
				13	Peningkatan tata Kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik masal
				14	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet
				15	Peningkatan prasarana perkeretaapian khususnya pada ruas Wonokromo-Mojokerto (pembangunan jalur ganda) dan penanganan perlintasan sebidang mengingat masih terdapat perlintasan di 3 titik yang belum terdapat palang pintu
				16	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah

Arah Kebijakan Tahun 2028

Arah kebijakan pembangunan tahun 2028 ditujukan untuk **“Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi,**

digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil”. Transformasi tata kelola yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta penyempurnaan sistem manajemen aparatur negara dan pemerintahan daerah, merupakan langkah penting untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang ada di dalam transformasi tata kelola bertujuan untuk memperkuat kapabilitas pemerintahan daerah, memperbaiki pelayanan publik, serta memastikan tata kelola yang baik di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang akan dilakukan:

Tabel 3. 7
Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2028

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
3	Transformasi Tata Kelola	1	Transformasi Tata Kelola	1	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan
				2	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat
				3	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
				4	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi
				5	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
				6	Pengembangan karier ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
				7	Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang tertib dan berintegritas menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bebas korupsi
				8	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik
				9	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
		2	Implementasi Transformasi	1	Penguatan kerja sama antar desa dan kecamatan dalam pengelolaan wilayah
				2	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.
				3	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan Risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies
				4	dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir
				5	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara
				6	kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i> , dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
				7	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses <i>ke green/low- cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya,
				8	terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), dan sektor- sektor ekonomi hijau
				9	Percepatan pelaksanaan reforma agraria
				10	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara Pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat baik dalam dan luar negeri
				11	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
				12	Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
				13	Sinkronisasi Substansi dan Periodisasi dokumen perencanaan
				14	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemda
				15	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah serta pengaturan kembali kewenangan pusat- daerah dan hubungan keuangan antara pusat- daerah guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
					berkeadilan, merata dan berkelanjutan
				16	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen Risiko
		4	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
				2	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
				3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
				4	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dna logistic yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistic, sarana dan prasarana perkeretaapian, Kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)

Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah kebijakan pembangunan tahun 2029 ditujukan untuk **“Penyediaan keamanan, ketertiban, dan stabilitas serta supremasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan berpengaruh bagi kedamaian ketenteraman Wilayah”**. Transformasi yang diarahkan untuk **memantapkan stabilitas demokrasi dan ketertiban umum (trantibumlinmas)** di daerah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Stabilitas sosial dan politik yang kuat akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan yang ada mendukung arah pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang aman, demokratis, dan stabil secara ekonomi, serta meningkatkan daya saing investasi. Berikut adalah beberapa kebijakan strategis yang akan dilakukan:

Tabel 3. 8
Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2029

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
4	Memantapkan Stabilitas Demokrasi dan Trantibumlinmas Daerah	1	Stabilitas, Demokrasi dan trantibumlinmas Daerah	1	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
				2	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
				3	Penguatan keamanan dan ketertiban
				4	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan, pengumpulan dan pengolahan

					data terkait penanganan gangguan Trantibumlinmas
		2	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1	Pengendalian inflasi
		3	Daya saing Iklim Investasi	1	Penguatan integritas partai politik
		4	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
				2	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
				3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
				4	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dna logistic yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistic, sarana dan prasarana perkeretaapian, Kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)

Arah Kebijakan Tahun 2030

Arah kebijakan pembangunan tahun 2030 ditujukan untuk **“Memperkuat Ketahanan melalui Penguatan usaha Pemeliharaan dan Pelestarian Sosial, budaya, dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan wilayah”**

Tabel 3. 9

Prioritas Arah Kebijakan Tahun 2030

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1	Beragama dan bermaslahat	1	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
				2	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
		2	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	1	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
				2	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan
				3	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan
				4	Peningkatan ketahanan keluarga pendukung berbasis kearifan lokal
		3	Lingkungan Hidup Berkualitas	1	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
				2	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
				3	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
				4	o WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik Surabaya- Sidoarjo- Mojokerto-Pasuruan: • Pengembangan TPST Regional Gerbangkertasusila • Inisiasi Pengembangan SPAL Regional WM Surabaya • Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja,

TRANSFORMASI		ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN	
		4	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1	MBR, Gen Z, dan milenial di WM Surabaya (PHTC) • Peningkatan SPAM Mojolagres - o Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik - o Provinsi Jawa Timur Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui: • Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan • Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR
				2	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
				3	Penguatan distribusi pangan, Peningkatan daya beli masyarakat dengan program intervensi ekonomi seperti subsidi pangan, padat karya, dan pemberdayaan usaha pangan lokal, Optimalisasi fungsi lumbung pangan desa dan Peningkatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan.
		5	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1	Pengelolaan Risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
				2	Memantapkan ketahanan sosial dan ekologi pengembangan dekarbonisasi
				3	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin.
				4	Pengembangan mitigasi struktural dan non struktural di daerah rawan bencana tinggi
		6	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
				2	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan
				3	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.
				4	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistic yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (jalan tol/jalan logistic, sarana dan prasarana perkeretaapian, Kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)

Highlight Indikasi Intervensi

Kawasan Gerbangkertasusila, yang mencakup Gresik, Bangkalan, Kabupaten dan Kota

Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan Jombang, merupakan Kawasan Strategis Nasional sekaligus pusat pertumbuhan metropolitan terbesar di Jawa Timur. Kawasan ini didorong oleh sektor industri, terutama manufaktur, makanan, minuman, dan sektor terkait, dengan dukungan infrastruktur maju, konektivitas regional kuat, serta kemudahan logistik domestik dan internasional. Wilayah hinterland seperti Tuban, Bojonegoro, dan Jombang berkontribusi melalui sektor agrominapolitan dan industri migas, menjadikan Gerbangkertasusila sebagai pusat investasi, inovasi, dan penggerak utama pembangunan Jawa Timur maupun nasional. Berikut adalah highlight indikasi intervensi yang dapat menjadi fokus penguatan peran kawasan gerbangkertasusila:

Tabel 3. 10
Highlight Indikasi Intervensi di Kawasan Gerbangkertosusila

Kawasan Gerbangkertosusila	Highlight Indikasi Intervensi
Kota Surabaya (PKN) Kabupaten Gresik (PKN) Kabupaten Sidoarjo (PKN) Kabupaten Mojokerto (PKN) Kota Mojokerto (PKN) Kabupaten Lamongan (PKN) Kabupaten Bangkalan (PKN) Kabupaten Tuban (PKW) Kabupaten Bojonegoro (PKW) Kabupaten Jombang (PKL)	Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, dan Kab. Mojokerto) dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan: 1. Peningkatan kualitas dan penataan WM Surabaya, antara lain melalui:- ● Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Surabaya ● Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ● Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH ● Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ● Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan ● Penyusunan <i>metropolitan statistical area</i>. - Pengembangan dan pemantapan fasilitas pengelolaan limbah industri dan fasilitas pelayanan Kesehatan - Pengembangan taman keanekaragaman hayati 2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Gresik (meliputi kota industri) sebagai salah satu sentral dari WM Surabaya, antara lain:- ● Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ● Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ● Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ● Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan ● Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Wilayah Metropolitan 3. Pengembangan dalam urusan pendidikan ● Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah 4. Pengembangan infrastruktur perkotaan:- ● Pengembangan TPST Regional Gerbangkertasusila ● Inisiasi Pengembangan SPAL Regional WM Surabaya ● Peningkatan SPAM Mojolagres ● Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di WM Surabaya, termasuk pengendalian banjir Kali Buntung dan Kali Lamong ● Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Keraton Majapahit Trowulan 5. Pengembangan sistem rumah perumahan:- ● Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di WM Surabaya (PHTC) 6. Pengembangan dalam urusan perindustrian:- ● Pengembangan

Kawasan Gerbangkertosusila	Highlight Indikasi Intervensi
	koridor industri Gresik - Surabaya - Sidoarjo - Mojokerto - Pasuruan (sektor industri prioritas: industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, hilirisasi tembaga, industri logam, besi, dan baja, industri mesin dan perlengkapan, dan industri makanan dan minuman) • Hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu <i>raw sugar</i> , GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan <i>bioplastic</i>
Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Provinsi di DPP Surabaya – Ziarah Waliullah – Trowulan dan sekitarnya	1. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan 2. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata 3. Perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan 4. Perkuatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif 5. Perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata 6. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata 7. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam perwujudan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat 8. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara 9. Peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata 11. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata 12. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata provinsi dan dinamika pasar nasional dan global 13. Peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Jawa Timur 14. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan 15. Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Timur di dalam dan luar negeri 16. Penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata 17. Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata 18. Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata 19. Pengembangan kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal 20. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau

Kawasan Gerbangkertosusila	Highlight Indikasi Intervensi
	21. Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan 22. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang pariwisata 23. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas (Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, dan Kab. Jombang)	1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah Pusat, antara lain pada D.I. Delta Brantas, D.I. Menturus, D.I. Mrican, D.I. Padi Pomahan, dan D.I. Waduk Bening 2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah 3. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 4. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) 5. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 6. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 7. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area, terutama pada Sub-DAS Konto, dan Sub-DAS Brangkal 8. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS dan Konto, Sub-DAS Brangkal 9. Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas 10. Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto) 11. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik 12. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern) benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen; 13. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama 14. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya loka), peningkatan produktivitas peta, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
Kawasan Komoditas Unggulan Tebu lingkaran Kelud-Kawi- Arjuna-Welirang (Kab Sidoarjo, Kab Jombang, Kab Mojokerto))	1. Peningkatan Produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) 2. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) 3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian

Kawasan Gerbangkertosusila	Highlight Indikasi Intervensi
	(tebu) 4. Pengendalian OTP dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu) 5. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian (tebu)

Adapun beberapa hal arah kebijakan RTRW Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1) **Perwujudan Rencana Struktur Ruang**, termasuk di antaranya adalah :

- a) Perwujudan Sistem Pusat Pemukiman (Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal/PKL yaitu pengembangan dan pemantapan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan penyusunan dan penetapan RDTR, perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan/PPK yaitu pengembangan pusat pelayanan kawasan dan penyusunan serta penetapan RDTR, perwujudan pusat pelayanan lingkungan yaitu pengembangan pusat pelayanan lingkungan);
- b) Perwujudan Jaringan Prasarana (perwujudan sistem jaringan transportasi yaitu perwujudan sistem jaringan jalan dan perwujudan sistem jaringan kereta api serta perwujudan sistem jaringan sungai/danau/penyeberangan, perwujudan sistem jaringan energi yaitu perwujudan jaringan infrastruktur minyak/gas bumi dan perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, perwujudan sistem jaringan telekomunikasi yaitu perwujudan jaringan tetap dan perwujudan jaringan bergerak, Perwujudan sistem jaringan sumber daya air yaitu perwujudan jaringan irigasi dan perwujudan sistem pengendalian banjir serta perwujudan bangunan sumber daya air, Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya yaitu perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM, perwujudan Sistem Pengolahan Air Limbah/SPAL, perwujudan Sistem Pengolahan Limbah bahan Berbahaya dan Beracun/B3, perwujudan sistem jaringan persampahan dan perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana serta perwujudan sistem drainase).

2) **Perwujudan Rencana Pola Ruang**, termasuk di antaranya adalah :

- a) Perwujudan Kawasan Hutan Lindung (Perwujudan badan air yaitu pemeliharaan kualitas sumber air dan pengembangan tampungan air berupa bendungan/embung, Perwujudan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu pelestarian terhadap kawasan hutan lindung serta pelestarian dan pengendalian kawasan resapan air, Perwujudan kawasan perlindungan setempat yaitu pengembangan/ rehabilitasi/ revitalisasi/ peningkatan fungsi sempadan sungai dan pengembangan/ rehabilitasi/revitalisasi/ peningkatan kawasan sekitar waduk serta perlindungan terhadap kawasan spiritual dan kearifan

lokal, Perwujudan kawasan konservasi yaitu perlindungan dan pelestarian Taman Hutan Raya R. Soerjo, Perwujudan kawasan cagar budaya yaitu perlindungan kawasan cagar budaya dan pengembangan sarana dan prasarana situs sejarah Trowulan serta perlindungan benda/bangunan/struktur/situs cagar budaya di Trowulan dan Gunung Penanggungan);

- b) Perwujudan Kawasan Budi Daya (Perwujudan badan jalan yaitu pengembangan badan jalan, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap yaitu pelestarian hutan produksi tetap dan rehabilitasi hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan perkebunan rakyat yaitu pengembangan kawasan perkebunan rakyat, perwujudan kawasan pertanian yaitu perwujudan kawasan tanaman pangan, perwujudan kawasan hortikultura dan perwujudan kawasan perkebunan serta perwujudan kawasan peternakan, Perwujudan kawasan peruntukan industri yaitu pengembangan kawasan peruntukan industri, pengembangan kawasan industri meliputi kawasan industri eksisting dan yang direncanakan, pengembangan kawasan peruntukan industri besar, pengembangan industri kecil/menengah, pengembangan sentra industri kecil dan menengah/SIKM, penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri, pembangunan dan peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri, Perwujudan kawasan pariwisata yaitu pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan wisata alam, pengembangan wisata budaya, pengembangan wisata buatan, pengembangan desa wisata, pengembangan *showroom/ studio project* untuk proses kegiatan pembibitan/pengolahan/pengemasan dan pemasaran potensi hortikultura dan perkebunan pendukung wisata, pembangunan dan peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pariwisata serta pengembangan, peningkatan pusat kegiatan pariwisata, Perwujudan kawasan permukiman yaitu perwujudan kawasan permukiman perkotaan, perwujudan kawasan permukiman perdesaan, Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan yaitu pengamanan wilayah pertahanan LANTAMAL V di Pucuk dan Jatirowo serta Desa Bendung, pengamanan Batalyon Lintas Udara 503, pengamanan Sekolah Polisi Negara/SPN, pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas aset pertahanan dan keamanan).

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten, adalah Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yaitu (pementapan dan pengembangan kawasan agropolitan, pementapan dan pengembangan kawasan baru, yang meliputi : Kawasan Perkotaan *Interchange* Mlirip/Kota Mandiri Canggü, Kawasan Perkotaan *Interchange* Pagerluyung, Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai Pendukung Kawasan Industri Jetis, Kawasan Perkotaan Airlangga City).

Dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Mojokerto menetapkan dua kawasan strategis utama, yakni Kawasan Agropolitan dan Kawasan Perkotaan Baru. Kawasan Agropolitan difokuskan pada wilayah Kecamatan Pacet dan Kecamatan Gondang yang memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, peternakan, dan agroindustri. Pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Pacet dirancang sebagai kawasan agropolitan terpadu yang terdiri atas pusat sentra agropolitan, sub pusat kegiatan, dan kawasan penyangga. Pacet berperan sebagai pusat utama dengan fungsi sebagai kawasan prasarana dan pelayanan umum, pusat sirkulasi serta lokasi pemasaran, sekaligus desa penghasil beragam komoditas seperti aneka bunga, bawang putih, bawang prei, tomat, ubi, jagung, padi, dan cengkeh, serta pengembangan ternak lebah madu dan kambing. Sub pusat pengembangan meliputi Desa Kemiri, Petak, dan Claket dengan fungsi produksi komoditas hortikultura, peternakan, hingga home industri pengolahan ubi jalar, serta fasilitas pasar agribisnis seperti Mojo Kembang Park. Kawasan penyangga di Sajen, Trawas, dan Gondang menguatkan fungsi produksi dan konservasi dengan dukungan kampung ternak, pertanian organik, dan sentra buah unggulan seperti durian dan pisang cavendis. Komoditas unggulan di kawasan ini antara lain bawang merah, vanili, bawang daun, susu sapi, dan bunga krisan, sebagaimana dirinci dalam masterplan kawasan agropolitan Pacet.

Lebih luas lagi, pengembangan kawasan agropolitan hortikultura juga mencakup berbagai kecamatan sebagai pusat produksi buah-buahan unggulan. Kecamatan Pacet, Gondang, dan Trawas menjadi sentra agropolitan alpukat, durian, rambutan, dan salak, sedangkan Kecamatan Jatirejo, Ngoro, Kutorejo, hingga Mojoanyar turut mendukung pengembangan komoditas jeruk keprok siam dan buah lainnya. Sebagai pelengkap, kawasan strategis lainnya adalah Kawasan Perkotaan Baru, yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan

baru dan perluasan wilayah perkotaan. Kawasan ini meliputi Kota Mandiri Cangu di Kecamatan Jetis, Pagerluyung di Gedeg, Dawarblandong di Kecamatan Dawarblandong, dan Airlangga *City* di Ngoro. Kawasan perkotaan baru ini diarahkan untuk mendukung distribusi aktivitas ekonomi, pemukiman, jasa, dan perdagangan secara terpadu dengan kawasan perdesaan, sehingga menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Mojokerto. Integrasi kawasan agropolitan dan perkotaan baru menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis potensi lokal dan keunggulan spasial.

3.2.2 Program Prioritas Daerah

Program prioritas pembangunan daerah adalah program yang secara langsung menopang perwujudan visi misi kepala daerah terpilih sebagaimana direpresentasikan dalam janji kampanye sebagai program unggulan. Bupati Mojokerto terpilih periode RPJMD 2025-2029 mengusung 4 kelompok program prioritas yang terdiri dari 34 program. Berbasis pada analisis konten unsur visi dan misi Bupati Mojokerto terpilih dan mengikuti regulasi nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program prioritas dan program unggulan pembangunan Kabupaten Mojokerto 2025-2029.

Berikut disampaikan program unggulan RPJMD 2025-2029:

Program Unggulan Misi 1 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik;

Program Kepala Daerah

- a. Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN, penguatan sistem pengawasan internal;
- b. Pelatihan lanjutan dan pengembangan karir, implementasi kode etik dan disiplin ASN;
- c. Pengembangan sistem akuntansi berbasis teknologi, audit internal berkala;
- d. Peningkatan layanan terpadu satu pintu, pengembangan aplikasi layanan publik;
- e. Sosialisasi dan pelatihan anti korupsi, penguatan fungsi inspektorat;
- f. Implementasi sistem *e-government* dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik.
- g. Pengembangan Infrastruktur Digital;

Program Unggulan

1. Kampung Platform Digital;
2. WAJIB DEDISER (Desa Digital Service);
3. Digitalisasi Pemerintahan (e-Government);
4. MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital.

Program Unggulan Misi 2 Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat;

Program Kepala Daerah

- a. Peningkatan program makanan tambahan bagi anak sekolah;
- b. Peningkatan gaji dan guru, program perumahan;
- c. Pengembangan kualitas koperasi - koperasi di sekolah;
- d. Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler;
- e. Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, program bantuan pendidikan,
- f. Kampanye literasi, pelatihan peningkatan keterampilan numerasi;
- g. Pendirian sekolah vokasi, kerja sama dengan industri untuk magang dan praktik kerja;
- h. Pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- i. Penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan maternal dan neonatal;
- j. Vaksinasi massal, kampanye pencegahan penyakit menular;
- k. Pemberian makanan tambahan untuk balita, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui;
- l. Kampanye kesehatan lingkungan, program sanitasi dan akses air bersih;
- m. Kampanye hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular;
- n. Penyuluhan kesehatan mental, pengembangan layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan.
- o. Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat;

Program Unggulan

1. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
2. Pemberian beasiswa hafidz / hafidzah
3. Program muatan lokal sejarah Majapahit
4. Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ
5. Meningkatkan kesejahteraan guru sekolah swasta
6. Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)
7. Program SUJU (Susu Jumat) :
8. KONTER (Konsultasi Dokter) secara online
9. Pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan guru;
10. Sosialisasi dan pendaftaran peserta baru, peningkatan layanan kesehatan melalui BPJS
11. Pemberdayaan Seni dan Budaya

Program Unggulan Misi 3 Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera;

Program Kepala Daerah

- a. Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi UMKM;
- b. Pendampingan koperasi, akses modal untuk koperasi;
- c. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa;
- d. Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi;
- e. Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal;
- f. Pengembangan lembaga keuangan mikro, akses kredit bagi pelaku usaha;
- g. Program Pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dan Berbasis Komunitas.
- h. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan;
- i. Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana penunjang Pariwisata;
- j. Peningkatan Kualitas daya saing Tenaga Kerja dan Akses Kesempatan Kerja (Pelatihan Kerja Kompetensi, Vokasi dan pameran bursa kerja);
- k. Program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan.

Program Unggulan

1. Pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Majapahit.
2. BBM (Beli Beli Mojokerto).
3. Mileneal Eksport (Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport).
4. Mileneal Kreatif (Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub).
5. UMKM Naik kelas (Program Pemberdayaan UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana);
6. Peduli Pangan (*Food Estate*).
7. Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal);
8. Perekonomian Tematik (mengadakan *event* setiap bulan dengan tema yang berbeda);
9. Optimalisasi wiaata religi
10. *Produktivity Center* (Pusat Produktivitas)
11. Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
12. Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga)
13. Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
14. PENDOPO (Pembangunan Desa Berbasis Produksi);
15. Pelatihan bagi pesantren berbasis vokasi;

Program Misi 4 Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

Program Kepala Daerah

- a. Pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan;
- b. Pembangunan sistem air bersih, pembangunan sanitasi di pedesaan;
- c. Pembangunan Infrastruktur layanan umum;
- d. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan;
- e. Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana.

Program unggulan

1. Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru dari wilayah kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto;
2. Pembangunan *sport center* berskala nasional
3. Pembangunan waduk (embung) di wilayah utara sungai
4. Penyediaan sumur-sumur dalam (pantek) untuk mengantisipasi sumur kering
5. Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar
6. Program Bedah Rumah

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang erat dan substansial dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto, karena kedua dokumen tersebut saling melengkapi dan mengintegrasikan aspek pembangunan jangka menengah dengan perencanaan tata ruang wilayah. RPJMD sebagai panduan pembangunan selama lima tahun ke depan harus selaras dengan RTRW yang mengatur pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan lingkungan, dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai melalui sinkronisasi antara program prioritas dan program perangkat daerah dalam RPJMD dengan Indikasi Program Utama dalam draft RTRW Kab Mojokerto. Dengan demikian, sinkronisasi antara RPJMD dan RTRW menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Mojokerto. Selain itu program prioritas dan program perangkat daerah juga diselaraskan untuk mendukung program strategis nasional meliputi:

- a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 2) Sekolah Rakyat; dan
 - 3) Pembangunan 3 Juta Rumah.
- b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras

Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

- c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - 2) Makan Bergizi Gratis
- d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Mengengah.
- e. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Pengendalian Inflasi:
 - 2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: dan
 - 3) Kemudahan perizinan di daerah.
- f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden

Berikut Ini disampaikan Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

RPJMD:

Tabel 3. 11

Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur						
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik MISI 2 : Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat MISI 3 : Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera MISI 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan, Akuntabel dan Responsif.	Sasaran : Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Program Kepala Daerah : pengembangan karir, implementasi kode etik dan disiplin ASN;
		Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		
		Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
	Tujuan : Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	Sasaran : Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Program Kepala Daerah : Pelatihan dan sertifikasi untuk ASN
	Tujuan : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Publik	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Tujuan : Menurunkan Angka Kemiskinan		Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	Tujuan : Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur berkelanjutan disemua sektor	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan Bencana	indeks kesiapsiagaan masyarakat	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Sasaran : Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penyelesaian penanganan pascabencana		
		Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
		Sasaran : Meningkatkan akses keterjangkauan daya beli masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanganan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindaklanjuti		
		Sasaran : Meningkatkan kualitas pembangunan Gender	Meningkatnya Kualitas Layanan Pasca Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase layanan pasca kebakaran dan non kebakaran yang ditindaklanjuti		
		Sasaran : Terwujudnya	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Unggulan Kepala Daerah : Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama				Program Unggulan Kepala Daerah : Pemberian beasiswa Hafidz/Hafidzoh
		Sasaran : Meningkatnya Investasi				Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ
		Sasaran : Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Sasaran : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Sasaran : Optimalisasi Peningkatan PAD	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
		Sasaran : Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
		Sasaran : Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Meningkatnya layanan administrasi Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi sekretariat DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil- hasil Riset dan Inovasi Daerah	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Sasaran : Menurunnya Wilayah Kantong kemiskinan	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Indeks Kegemaran Membaca (TGM)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Program Kepala Daerah : Kampanye literasi, pelatihan peningkatan keterampilan numerasi
		Sasaran : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Sasaran : terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah		
		Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bidang/Tematik yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			perbaikan tata kelola bagi organisasi Perangkat	Persentase OPD yang melaksanakan Perbaikan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Program Kepala Daerah : penguatan sistem pengawasan internal. audit internal berkala
			Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Aspek Pelaporan Kinerja (SAKIP)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang di tindaklanjuti	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Program Kepala Daerah : Sosialisasi dan pelatihan anti korupsi, penguatan fungsi inspektorat
				Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI		
			Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Minimal level 3	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Program Kepala Daerah : penguatan sistem pengawasan internal. audit internal berkala
			Meningkatkan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM		
			Optimalnya tatakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		
			Penganggaran yang berorientasi kinerja dan tepat waktu	Persentase PD yang menyusun anggaran berorientasi kinerja dan tepat waktu	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Minimal level 3	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Program Kepala Daerah : penguatan sistem pengawasan internal. audit internal berkala
			Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Program Unggulan Kepala Daerah : Kampung Platform Digital
						Program Unggulan Kepala Daerah : Digitalisasi Pemerintahan (e-Government)
						Program Unggulan Kepala Daerah : MPP (Mall Pelayanan Publik) Digital
						Program Unggulan Kepala Daerah : WAJIB DEDISER (Desa Digital Service)
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Program Kepala Daerah : Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik
			Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Program Kepala Daerah : Kampanye literasi, pelatihan peningkatan keterampilan numerasi
				Indeks Kegemaran Membaca (TGM)		
			Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Meningkatkan kesejahteraan guru sekolah swasta

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				APM SD		Program Unggulan Kepala Daerah : Pembangunan dan renovasi sekolah, pelatihan guru
				APM SLTP		Program Kepala Daerah : Integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler
				APM KESETARAAN		Program Kepala Daerah : Pengembangan kualitas koperasi - koperasi di sekolah
						Program Kepala Daerah : Peningkatan program makanan tambahan bagi anak sekolah
						Program Kepala : Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi dan kurang mampu, program bantuan pendidikan
			Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Program Kepala Daerah : Kampanye literasi, pelatihan peningkatan keterampilan numerasi
				Indeks Kegemaran Membaca (TGM)		
			Meningkatnya keikutsertaan kontingen daerah dalam event olahraga resmi	Jumlah keikutsertaan kontingen daerah dalam event olahraga resmi	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kepramukaan	persentase partisipasi pemuda dalam kepramukaan	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Program muatan local sejarah Majapahit
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Program Unggulan Kepala Daerah : Pemberdayaan Seni dan Budaya
			Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun	01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Unggulan Kepala Daerah : Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)
				Angka Populasi Bebas Penyakit Menular		Program Unggulan Kepala Daerah : Program SUJU (SUSU JUMAT)
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular		Program Unggulan Kepala Daerah : KONTER (Konsultasi Dokter) secara online

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart		Program Unggulan Kepala Daerah : Sosialisasi dan pendaftaran peserta baru, peningkatan layanan kesehatan melalui BPJS
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat		
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		Program Kepala Daerah : Penyuluhan kesehatan mental, pengembangan layanan kesehatan mental di fasilitas kesehatan
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna		Program Kepala Daerah : Kampanye hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular;
				Persentase Lanjut Usia yang Mandiri		Program Kepala Daerah : Kampanye kesehatan lingkungan, program sanitasi dan akses air bersih
				Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun		Program Kepala Daerah : Pemberian makanan tambahan untuk balita, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB		Program Kepala Daerah : Vaksinasi massal, kampanye pencegahan penyakit menular
				Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		Program Kepala Daerah : Penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan maternal dan neonatal
				Nilai ASPAK RS		Program Kepala Daerah : Pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar	01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu		
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat	Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup	01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			bidang kesehatan	sehat		
				Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Program Unggulan Kepala Daerah : Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)
			Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang sudah sesuai standart Pengelolaan Pasar	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Terwujudnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UUTP yang ditera-tera ulang dalam tahun berjalan	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku,		
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk UMKM/IKM yang difasilitasi Promosi dan Pemasarannya	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Program Unggulan Kepala Daerah : BBM (Beli Beli Mojokerto)
						Program Kepala Daerah : Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal
						Program Kepala Daerah : Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi
			Terwujudnya Kemandirian Pangan	Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)
			Terwujudnya Ketersediaan Pangan yang beranekaragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)(%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)
			Terwujudnya penurunan jumlah Desa rentan rawan pangan Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Desa rentan rawan pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)
				Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
						tangga)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		Program Kepala Daerah : Program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			Meningkatnya Penanganan Konflik	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Program Kepala Daerah : Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat
				Persentase Konflik Sosial di Kab Mojokerto yang terselesaikan	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Terlaksananya penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase pelanggaran Perda yang tertangani		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Unggulan Kepala Daerah : Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
						Program Unggulan Kepala Daerah : Pemberian beasiswa Hafidz/Hafidzoh
						Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ
			Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Jumlah investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Terkelolanya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan jalan mantap terhadap total jalan kabupaten	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Menurunnya Angka Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		
			Meningkatnya Penanganan Konflik	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Penanganan Konflik	Persentase Konflik Sosial di Kab Mojokerto yang terselesaikan	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Terlaksananya penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase pelanggaran Perda yang tertangani		
			Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro di bidang Ketenagakerjaan	Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Masyarakat/ Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian Dan Kemampuan Kerja	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Program Unggulan Kepala Daerah : Pelatihan bagi pesantren berbasis vokasi

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya akses kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Program Kepala Daerah : Peningkatan Kualitas daya saing Tenaga Kerja dan Akses Kesempatan Kerja (Pelatihan Kerja Kompetensi, Vokasi dan pameran bursa kerja)
			Menurunnya Angka Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial		
			Meningkatnya volume usaha koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Program Kepala Daerah : Pengembangan lembaga keuangan mikro, akses kredit bagi pelaku usaha
			Meningkatnya pertumbuhan wirausaha	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Program Kepala Daerah : Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi UMKM
			Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal		
			Meningkatnya usaha mikro yang berkembang usahanya	Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Program Unggulan Kepala Daerah : UMKM NAIK KELAS (Program Pemberdayaan UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana)
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Program Unggulan Kepala Daerah : Milenial Ekspor (Program pelatihan bagi pemula untuk mengekspor)
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk UMKM/IKM yang difasilitasi Promosi dan Pemasarannya	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Program Unggulan Kepala Daerah : BBM (Beli Beli Mojokerto)
						Program Kepala Daerah : Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal
						Program Kepala Daerah : Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi
			Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan	Persentase Sarana Pertanian Layak Pakai dan Layak Fungsi yang digunakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Kepala Daerah : Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan
				Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura :		Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			kesejahteraan petani	Padi (ton)		Program Unggulan Kepala Daerah : Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal)
				Jagung (ton)		
				Kedelai (ton)		
				Bawang Merah (ton)		
				Cabai (ton)		
			Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mendukung peningkatan produksi pertanian	Cakupan Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatkan kesehatan hewan, memastikan keamanan produk hewan dan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit zoonosis dan bahaya lainnya yang terkait dengan hewan dan produk hewan	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular		
			Melindungi masyarakat dari ancaman bencana pertanian dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Memfasilitasi pelaku usaha di bidang pertanian dalam mendapatkan izin usaha	Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kab/Kota yang terfasilitasi	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
			Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam mengelola usaha taninya dengan lebih baik dan menguntungkan serta mencapai kehidupan yang lebih layak	Persentase Kelembagaan Kelompok Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan		
			Terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Terwujudnya peningkatan produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Terwujudnya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Tingkat Kepuasan Pelayanan Perijinan	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase koperasi aktif	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Persentase koperasi berkualitas		
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Sehat	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas dan pengetahuan manajerial SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya volume usaha koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Program Kepala Daerah : Pengembangan lembaga keuangan mikro, akses kredit bagi pelaku usaha
			Meningkatnya pertumbuhan wirausaha	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Program Kepala Daerah : Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi UMKM
			Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal		
			Meningkatnya usaha mikro yang berkembang usahanya	Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Program Unggulan Kepala Daerah : UMKM NAIK KELAS (Program Pemberdayaan UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana)
			Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Peningkatan Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang sudah sesuai standart Pengelolaan Pasar	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Terwujudnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Program Unggulan Kepala Daerah : Milenial Eksport (Program pelatihan bagi pemula untuk mengeksport)
			Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UUTP yang ditera-tera ulang dalam tahun berjalan	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku,		
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk UMKM/IKM yang difasilitasi Promosi dan Pemasarannya	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Program Unggulan Kepala Daerah : BBM (Beli Beli Mojokerto)
						Program Kepala Daerah : Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal
						Program Kepala Daerah : Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi
			Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Terwujudnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laport data Industri	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya destinasi wisata baru	Presentase pertumbuhan destinasi wisata baru	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Program Unggulan Kepala Daerah : Pengembangan wisata alam dan buatan berkarakter budaya Majapahit
						Program Unggulan Kepala Daerah : Optimalisasi Wisata Religi
						Program Kepala Daerah : Program Pengembangan Pariwisata yang terintegrasi dan Berbasis Komunitas
						Program Kepala Daerah : Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasaranan penunjang Pariwisata
			Meningkatnya kualitas promosi wisata	Jumlah kerja sama promosi wisata dengan mitra eksternal	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persentase tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Program Unggulan Kepala Daerah : Milenial Kreatif (Pembangunan Mojokerto Kreatif Hub)
			Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Program Unggulan Kepala Daerah : Perekonomian Tematik (mengadakan event setiap bulan dengan tema yang berbeda)
			Tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani	Persentase Sarana Pertanian Layak Pakai dan Layak Fungsi yang digunakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Program Kepala Daerah : Pengembangan Infrastruktur Pertanian dan Perikanan
				Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura :		Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)
				Padi (ton)		Program Unggulan Kepala Daerah : Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal)
				Jagung (ton)		
				Kedelai (ton)		
				Bawang Merah (ton)		
				Cabai (ton)		
			Meningkatnya akses kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Program Kepala Daerah : Peningkatan Kualitas daya saing Tenaga Kerja dan Akses Kesempatan Kerja (Pelatihan Kerja Kompetensi, Vokasi dan pameran bursa kerja)
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Program Unggulan Kepala Daerah : PENDOPO (Pembangunan Desa Berbasis Produksi)
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif		Program Kepala Daerah : Productivity Center (Pusat Produktifitas)
			Meningkatnya volume usaha koperasi	Pertumbuhan volume usaha koperasi		Peningkatan Kemandirian Ekonomi Desa
					2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Program Kepala Daerah : Pengembangan lembaga keuangan mikro, akses kredit bagi pelaku usaha

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya pertumbuhan wirausaha	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Program Kepala Daerah : Pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi UMKM
			Meningkatnya jumlah usaha mikro informal menjadi formal	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi usaha mikro formal		
			Meningkatnya usaha mikro yang berkembang usahanya	Persentase usaha mikro yang telah terfasilitasi pengembangan usaha	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Program Unggulan Kepala Daerah : UMKM NAIK KELAS (Program Pemberdayaan UMKM agar naik kelas semua tingkatan dengan diberikan sarana dan prasarana)
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Program Unggulan Kepala Daerah : Milenial Eksport (Program pelatihan bagi pemula untuk mengekspor)
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk UMKM/IKM yang difasilitasi Promosi dan Pemasarannya	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Program Unggulan Kepala Daerah : BBM (Beli Beli Mojokerto)
						Program Kepala Daerah : Fasilitasi industri kreatif, program promosi produk lokal
						Program Kepala Daerah : Peningkatan akses pasar, program inovasi dan teknologi
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		Program Kepala Daerah : Program pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan
			Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
			Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
			Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			rehabilitasi sosial PPKS			
			Meningkatnya kualitas perlindungan sosial pada masa bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif		
			Meningkatnya Pengelolaan Pedidikan	APM PAUD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				APM SD		
				APM SLTP		
				APM KESETARAAN		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Program Unggulan Kepala Daerah : Pemberian beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu
						Program Unggulan Kepala Daerah : Pemberian beasiswa Hafidz/Hafidzoh
						Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan guru madin dan TPQ
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun	01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Program Unggulan Kepala Daerah : Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)
				Angka Populasi Bebas Penyakit Menular		Program Unggulan Kepala Daerah : Program SUJU (SUSU JUMAT)
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular		Program Unggulan Kepala Daerah : KONTER (Konsultasi Dokter) secara online
				Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart		Program Unggulan Kepala Daerah : Sosialisasi dan pendaftaran peserta baru, peningkatan layanan kesehatan melalui BPJS
				Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat		
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan		Program Kepala Daerah : Penyuluhan kesehatan mental, pengembangan layanan kesehatan mental di fasilitas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
						kesehatan
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna		Program Kepala Daerah : Kampanye hidup sehat, deteksi dini penyakit tidak menular;
				Persentase Lanjut Usia yang Mandiri		Program Kepala Daerah : Kampanye kesehatan lingkungan, program sanitasi dan akses air bersih
				Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun		Program Kepala Daerah : Pemberian makanan tambahan untuk balita, edukasi gizi bagi ibu hamil dan menyusui
				Angka Keberhasilan Pengobatan TB		Program Kepala Daerah : Vaksinasi massal, kampanye pencegahan penyakit menular
				Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup		Program Kepala Daerah : Penyuluhan kesehatan ibu dan anak, peningkatan layanan kesehatan maternal dan neonatal
				Nilai ASPAK RS		Program Kepala Daerah : Pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
			Terwujudnya Kemandirian Pangan	Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)
			Terwujudnya Ketersediaan Pangan yang beranekaragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)(%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)
			Terwujudnya penurunan jumlah Desa rentan rawan pangan	Persentase Desa rentan rawan pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Program Unggulan Kepala Daerah : Peduli Pangan (Food Estate)
			Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum aman	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program Kepala Daerah : Pembangunan sistem air bersih, pembangunan sanitasi di pedesaan
			Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Program Kepala Daerah : Pembangunan sistem air bersih, pembangunan sanitasi di pedesaan
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana/relokasi program pemerintah	Persentase warga korban bencana yang memperoleh RLH	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya penanganan rumah tidak layak huni dalam 1 (satu) kabupaten	Persentase rumah tidak layak huni yang telah di bangun kembali sesuai rencana aksi	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Program Unggulan Kepala Daerah : Program Bedah Rumah
			Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Program Unggulan Kepala Daerah : Pembangunan waduk (embung) di wilayah utara Sungai
						Program Unggulan Kepala Daerah : Penyediaan sumur-sumur dalam (pantek) untuk mengantisipasi sumur kering
						Program Unggulan Kepala Daerah : Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar
			Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum aman	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Program Kepala Daerah : Pembangunan sistem air bersih, pembangunan sanitasi di pedesaan
			Lingkungan bersih dan berkelanjutan	Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPAL yang layak	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Program Kepala Daerah : Pembangunan sistem air bersih, pembangunan sanitasi di pedesaan
			Berkurangnya genangan dan banjir di kawasan permukiman	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Program Unggulan Kepala Daerah : Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar
			Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Program Unggulan Kepala Daerah : Pembangunan Pusat Pemerintahan Baru dari wilayah kota Mojokerto ke wilayah Kabupaten Mojokerto
						Program Unggulan Kepala Daerah : Pembangunan sport center berskala nasional
						Program Unggulan Kepala Daerah : Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan jalan mantap terhadap total jalan kabupaten	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program Kepala Daerah : Pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan jembatan
						Program Unggulan Kepala Daerah : Pengembangan wilayah perbatasan Mojokerto dengan wilayah sekitar
			Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan permukiman	Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya Pengembangan sistem manajemen keselamatan jalan	Konektivitas Darat	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana/relokasi program pemerintah	Persentase warga korban bencana yang memperoleh RLH	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya penanganan rumah tidak layak huni dalam 1 (satu) kabupaten	Persentase rumah tidak layak huni yang telah di bangun kembali sesuai rencana aksi	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Program Unggulan Kepala Daerah : Program Bedah Rumah
			Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP'	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Hidup Yang Ditindaklanjuti	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Menurunnya Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase parameter kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang terkelola	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Program Kepala Daerah : Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Ket
1	2	3	4	5	6	7
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase lembaga masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan Bencana	indeks kesiapsiagaan masyarakat	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Program Kepala Daerah : Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penyelesaian penanganan pascabencana		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	% Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Program Kepala Daerah : Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana
			Meningkatnya Kualitas Layanan Penanganan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	% kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindaklanjuti		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pasca Kebakaran dan Non Kebakaran	% layanan pasca kebakaran dan non kebakaran yang ditindaklanjuti		

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian Visi misi kepala daerah terpilih. Pendanaan dalam bentuk penganggaran, tidak dapat serta merta menjadi penjamin bahwa suatu tujuan atau sasaran dapat dengan mudah dicapai. Oleh karenanya, diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh/komprehensif, terpadu antar pemangku kepentingan, sinergitas dan aspek keberlanjutan yang ujung-ujungnya dapat membawa masyarakat dan daerah ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari perencanaan yang baik, sistematis dan terarah, penganggaran sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti halnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen pemerintah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan meminimalisasi pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah. Dengan mengedepankan pada prinsip perencanaan penganggaran yang efektif dan efisien serta mengacu pada fungsi APBD sebagaimana tersebut di atas,

Gambaran atau postur perencanaan pendanaan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

U R A I A N	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Daerah	2,851,837,319,792	2,968,026,150,217	3,022,814,619,088	3,061,994,595,983	3,116,459,919,645
Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)			30,000,000,000	60,000,000,000	
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	217,528,019,685	136,297,790,933	99,297,043,870	97,687,345,191	96,989,926,814
Total Penerimaan	3,069,365,339,477	3,104,323,941,150	3,152,111,662,958	3,219,681,941,174	3,213,449,846,459
(proyeksi Belanja)					
dikurangi					
Belanja Pegawai	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258
Pembentukan Dana Cadangan		30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000	
Kapasitas Riil	2,036,926,704,219	2,041,885,305,892	2,089,673,027,700	2,157,243,305,916	2,181,011,211,201

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

Tabel 4. 2
Proporsi Anggaran Program Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas Alokasi Belanja Daerah

U R A I A N	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil	2,036,926,704,219	2,041,885,305,892	2,089,673,027,700	2,157,243,305,916	2,181,011,211,201
Prioritas 1	1,425,848,692,954	1,429,319,714,124	1,462,771,119,390	1,510,070,314,141	1,526,707,847,840
Prioritas 2	509,231,676,055	510,471,326,473	522,418,256,925	539,310,826,479	545,252,802,800
Prioritas 3	101,846,335,211	102,094,265,295	104,483,651,385	107,862,165,296	109,050,560,560

Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penganggaran belanja daerah, perlu disusun suatu perencanaan penganggaran dengan mengedepankan urgensi atau berbasis kebutuhan riil yang langsung mendukung dalam pelayanan publik, baik pelayanan yang bersifat administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sementara itu Kerangka Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 3

Kerangka Belanja Daerah Tahun 2026-2030 Kabupaten Mojokerto (dalam Rupiah)

No	U R A I A N	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
2	Belanja Daerah	3,013,673,234,158	3,069,365,339,477	3,074,323,941,150	3,122,111,662,958	3,189,681,941,174	3,213,449,846,459
2.A	Belanja Operasi	1,940,734,956,866	1,958,599,150,246	2,033,321,349,990	2,075,374,377,189	2,120,066,547,833	2,111,447,937,663
2.A.1	Belanja Pegawai	1,004,029,940,156	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258	1,032,438,635,258
2.A.2	Belanja Barang dan Jasa	758,394,417,418	808,871,762,761	865,116,904,094	871,239,685,542	879,705,099,160	923,690,348,319
2.A.3	Belanja Hibah	172,354,650,942	112,957,052,513	118,604,905,138	154,535,150,889	190,761,907,915	137,300,003,311
2.A.4	Belanja Bantuan Sosial	5,955,948,350	4,331,699,715	17,160,905,500	17,160,905,500	17,160,905,500	18,018,950,775
2.B	Belanja Modal	503,960,775,491	517,388,290,946	447,624,692,875	453,359,387,484	476,237,495,056	508,624,010,511
2.B.1	Belanja Modal Tanah	-	150,000,000,000				
2.B.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104,760,078,754	58,357,200,569	61,275,060,597	64,338,813,627	67,555,754,309	73,635,772,196
2.B.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72,344,044,615	137,285,660,147	213,097,686,082	214,327,278,437	216,548,119,726	225,285,630,827
2.B.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	325,038,762,790	171,455,390,830	172,961,906,796	174,403,256,019	191,843,581,621	209,412,568,087
2.B.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,684,109,332	94,039,400	94,039,400	94,039,400	94,039,400	94,039,400
2.B.6	Belanja Modal Aset Lainnya	133,780,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000	196,000,000
2.C	Belanja Tidak Terduga	3,153,451,274	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000
2.C.1	Belanja Tidak Terduga	3,153,451,274	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000

No	U R A I A N	BASELINE 2024	2026	2027	2028	2029	2030
2.D	Belanja Transfer	565,824,050,527	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285	578,377,898,285
2.D.1	Belanja Bagi Hasil	62,164,038,527	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000	69,000,000,000
2.D.2	Belanja Bantuan Keuangan	503,660,012,000	509,377,898,285	509,377,898,285	509,377,898,285	509,377,898,285	509,377,898,285

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

4.1.2 Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah serta memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dirancanglah program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Penyusunan program ini berlandaskan pada janji politik Kepala Daerah periode 2025-2030, yang menjadi pedoman utama dalam merumuskan kebijakan strategis daerah. Di samping itu, proses ini juga mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah guna memastikan bahwa target dan alokasi anggaran yang disusun dapat berjalan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Proses penyusunan program pembangunan Kabupaten Mojokerto lima tahun ke depan dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Penyusunan ini melibatkan perumusan indikasi rencana program prioritas yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan, melalui kompilasi hasil verifikasi terhadap aspek perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya Renstra PD menjadi dasar penyusunan Renja PD. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan fokus pembangunan daerah.

Selain itu, penyajian program dan anggaran indikatif yang didasarkan pada aspek pembangunan dan urusan pemerintahan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci mengenai program-program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini bertujuan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Rincian mengenai program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Dalam proses penyusunan program Perangkat Daerah, terdapat beberapa prinsip utama yang dijadikan pedoman, yaitu:

- 1 Berpedoman pada visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD sebagai arah pembangunan.
- 2 Mampu menjawab permasalahan serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian daerah.
- 3 Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mendukung pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
- 4 Memastikan perangkat daerah mendukung program prioritas dan program unggulan Kepala Daerah
- 5 Mengoperasionalkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah secara sinergis dan terpadu.

Gambaran umum tentang program Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung program disajikan dalam tabel berikut, yang merinci berbagai aspek pembangunan serta prioritas kerja untuk mendukung pencapaian tujuan

pembangunan jangka menengah Kabupaten Mojokerto.

Dengan penyusunan program yang terarah dan berlandaskan pada data serta kebutuhan nyata masyarakat, diharapkan pembangunan Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Berikut tabel program perangkat daerah:

Tabel 4. 4
Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1,01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				551.451.748.020		552.360.879.620		552.716.769.600		553.387.769.600		554.847.769.600	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pendidikan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	551.451.748.020	90,9	552.360.879.620	91	552.716.769.600	91,1	553.757.769.600	91,25	554.847.769.600	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,3	89		90		90,5		91		91,5		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				198.633.741.780		201.392.227.748		202.472.948.748		203.992.288.748		204.607.288.748	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pendidikan
	Meningkatnya Pengelolaan Pedidikan	APM PAUD	80,00%	80,00%	198.633.741.780	80,00%	201.392.227.748	80,00%	202.472.948.748	80,00%	203.992.288.748	80,00%	204.607.288.748	
		APM SD	75,00%	75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		
		APM SLTP	75,00%	75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		75,00%		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		APM KESETARAAN	15,0 0%	15,0 0%		15,00 %		15,00 %		15,00 %		15,00 %		
1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
01.02 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				385.103.0 73.301		388.263.28 4.122		391.811.6 95.054		396.468.3 18.967		409.482.564. 413	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	385.103.0 73.301	90.09 .00	388.263.28 4.122	91	391.811.6 95.054	91,1	396.468.3 18.967	91,25	409.482.564. 413	
		2. Persentase Realisasi Anggaran PD	93	92%		93%		94%		95%		96%		
		RSUD SOEKANDAR	100, 00%	100 %		100%		100%		100%		100%		
		RSUD BASUNI	86,7 0%	91%		92%		93%		94%		95%		
		Capaian Akreditasi RS Soekandar	Parip urna	Pari pur na		Parip urna		Parip urna		Parip urna		Parip urna	Capaian Akreditasi RS Soekandar	
		Capaian Akreditasi RS Basoeni	Parip urna	Pari pur na		Parip urna		Parip urna		Parip urna		Parip urna	Capaian Akreditasi RS Basoeni	
01.02 .02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				144.783.4 27.992		143.025.39 8.109		142.303.8 04.338		139.194.0 08.569		152.953.856. 782	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														kesehatan
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	IK 1: Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun	73%	73%	144.783.427.992	62%	143.025.398.109	53%	142.303.804.338	45%	139.194.008.569	38%	152.953.856.782	
		IK 2: Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	10%	10%		10%		10%		10%		10%		
		IK 3: Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	52%	52%		54%		56%		58%		60%		
		IK 4: Persentase Fasilitas Kesehatan Sesuai Standart	87%	87%		89%		91%		92%		93%		
		IK 5: Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat	70%	70%		70%		70%		70%		70%		
		IK 6: Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	78	78		79		79,5		80		80,5		
		IK 7: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	36,5	36,5		44		62,5		75,5		83,5		
		IK 8: Persentase Lanjut Usia yang	74,3(2023	77,0%		79,0%		81,0%		83,0%		85%		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Mandiri	)											
		IK 9: Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun	12,4(2023)	11,40%		10,40%		9,40%		8,40%		7,40%		
		IK 10: Angka Keberhasilan Pengobatan TB	91,70%	90%		90%		90%		90%		90%		
		IK 11: Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	86%	86%		89%		92%		95%		98		
		IK 12: Nilai ASPAK RS	80%	80%		85%		90%		95%		95%		
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				6.762.227.081		6.765.483.446		6.768.902.629		6.772.492.772		6.776.262.421	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	IK 1: Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	3,4:1000	3,4:1000	6.762.227.081	3,4:1000	6.765.483.446	3,4:1000	6.768.902.629	3,4:1000	6.772.492.772	3,4:1000	6.776.262.421	
01.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				694.500.000		705.475.000		718.248.750		733.223.688		750.900.497	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan distribusi	IK 1: Persentase fasilitas kesehatan	88%	88%	694.500.0	90%	705.475.00	93%	718.248.7	95%	733.223.6	98%	750.900.497	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	yang memiliki obat, vaksin, dan BMHP sesuai standar			00		0		50		88			
		IK 2: Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu	85%	85%		86%		87%		88%		89%		
01.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				248.311.340		249.017.474		249.237.971		250.391.456		250.936.774	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kesehatan
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	IK 1: Persentase penduduk menerapkan perilaku hidup sehat	19	19	248.311.340	21	249.017.474	23	249.237.971	25	250.391.456	26	250.936.774	
		IK 2: Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg aktif	79	80		80		80		80		80		
1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.235.062.560		26.553.062.560		27.290.062.560		28.060.062.560		29.390.062.560	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														pekerjaan umum dan penataan ruang
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	26.235.062.560	90,9	26.553.062.560	91	27.290.062.560	91,1	28.060.062.560	91,25	29.390.062.560	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	88,3	89		90		90,5		91		91,5		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				28.162.545.350		28.178.799.885		28.186.679.874		28.505.347.861		28.755.882.647	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Meningkatnya ketersediaan dan kontinuitas suplai air irigasi	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berfungsi	65,33	68,00	28.162.545.350	69	28.178.799.885	70	28.186.679.874	71	28.505.347.861	72	28.755.882.647	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				9.726.010.000		9.788.611.000		9.857.472.100		9.933.219.310		10.016.541.241	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														penataan ruang
	Terpenuhinya kebutuhan dasar air minum masyarakat	Persentase rumah tangga memperoleh akses air minum aman	94,5	96,5 0	9.726.010. 000	97,50	9.788.611.0 00	98,00	9.857.472. 100	99,50	9.933.219. 310	100,0 0	10.016.541.2 41	
1.03. 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				3.300.000. 000		3.300.000.0 00		3.300.000. 000		3.300.000. 000		3.300.000.00 0	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Lingkungan bersih dan berkelanjutan	Persentase desa yang memiliki sarana pengelolaan sampah sesuai standar	9	11,0 0	3.300.000. 000	12,00	3.300.000.0 00	13,00	3.300.000. 000	14,00	3.300.000. 000	15,00	3.300.000.00 0	
1.03. 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.800.000. 000		25.900.000. 000		9.900.000. 000		12.900.00 0.000		15.900.000.0 00	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Terjaganya kualitas lingkungan dan kesehatan	Persentase rumah tangga yang	99	100, 00	4.800.000.	100,0 0	25.900.000.	100,0 0	9.900.000.	100,0 0	12.900.00	100,0 0	15.900.000.0	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	masyarakat	memperoleh layanan SPAL yang layak			000		000		000		0.000		00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000		29.000.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Berkurangnya genangan dan banjir di kawasan permukiman	Persentase kawasan dengan sistem drainase yang berfungsi baik	20	22,00	29.000.000.000	23,00	29.000.000.000	24,00	29.000.000.000	25,00	29.000.000.000	26,00	29.000.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				20.700.000.000		120.700.000.000		120.700.000.000		120.700.000.000		150.700.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Persentase bangunan gedung yang memiliki PBG dan SLF	10	12,00	20.700.000.000	13,00	120.700.000.000	14,00	120.700.000.000	15,00	120.700.000.000	16,00	150.700.000.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	LINGKUNGANNYA				00		0		00		00			pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Terwujudnya bangunan aman dan berfungsi sesuai peruntukannya	Penataan bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan	99	100, 00	300.000.0 00	100,0 0	300.000.00 0	100,0 0	300.000.0 00	100,0 0	300.000.0 00	100,0 0	300.000.000	
1.03. 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				105.400.0 00.000		105.400.00 0.000		105.400.0 00.000		105.400.0 00.000		105.400.000. 000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Meningkatnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase peningkatan jalan mantap terhadap total jalan kabupaten	83	85,0 0	105.400.0 00.000	86,00	105.400.00 0.000	87,00	105.400.0 00.000	88,00	105.400.0 00.000	89,00	105.400.000. 000	
1.03. 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				1.700.000. 000		1.700.000.0 00		1.700.000. 000		1.700.000. 000		1.700.000.00 0	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														ruang
	Meningkatnya profesionalitas SDM jasa konstruksi	Persentase peningkatan SDM jasa konstruksi bersertifikat	51	53,00	1.700.000.000	54,00	1.700.000.000	55,00	1.700.000.000	56,00	1.700.000.000	57,00	1.700.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
	Meningkatnya kepatuhan pembangunan terhadap tata ruang	Persentase kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW dan RDTR	100	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	
1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				72.570.720.000		73.099.696.600		73.367.420.998		73.643.177.128		73.927.205.942	Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	Meningkatnya Kualitas	Tingkat Kepuasan	90,7	90,8		90,9		91		91,1		91,25		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Pengguna Layanan Kesekretariatan	1		72.570.720.000		73.099.696.600		73.367.420.998		73.643.177.128		73.927.205.942	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,36%	90,36%		90,50%		90,65%		90,80%		91,00%		
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				735.000.000		910.000.000		910.000.000		915.000.000		1.915.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana/relokasi program pemerintah	Persentase warga korban bencana yang memperoleh RLH	100%	100%	735.000.000	100%	910.000.000	100%	910.000.000	100%	915.000.000	100%	1.915.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.555.000.000		1.555.000.000		1.595.000.000		1.595.000.000		1.595.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	Meningkatnya kualitas kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang	23%	24%	1.555.000.000	26%	1.555.000.000	28%	1.595.000.000	30%	1.595.000.000	32%	1.595.000.000	

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
06	TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	Daerah pelaksana urusan bidang pertanahan
	Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	100 %	100 %	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				102.000.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pertanahan
	Terlaksananya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan Luas tanah untuk kegiatan masyarakat	100 %	80%	102.000.000.000	80%	20.000.000	80%	20.000.000	80%	20.000.000	80%	20.000.000	
2.10.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						3.100.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000		3.100.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pertanahan
	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk	Persentase tahapan persiapan	80%	-		80%	3.100.000.0	80%	3.100.000.	80%	3.100.000.	80%	3.100.000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	kepentingan umum	pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum					00		000		000		0	
2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				4.749.624.708		6.217.251.104		6.777.254.606		7.880.111.210		8.261.600.124	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang perhubungan
	Meningkatnya Pengembangan sistem manajemen keselamatan jalan	Konektivitas Darat	65,0 %	66,0 %	633.312.354	66,5 %	1.492.125.552	67,0 %	1.722.127.303	68,0 %	1.923.555.605	69,0 %	2.514.300.062	
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	73,6 %	74,0 %	4.116.312.354	75,0 %	4.725.125.552	76,0 %	5.055.127.303	77,0 %	5.956.555.605	78,0 %	5.747.300.062	
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM													
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.086.511.000		3.721.329.850		3.795.930.000		3.851.788.000		3.865.565.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														Politik
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	80,5	80,55	4.086.511.000	80,6	3.721.329.850	80,65	3.795.930.000	80,7	3.851.788.000	80,75	3.865.565.000	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,36%	90,36%		90,50%		90,65%		90,80%		91,00%		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.032.003.152		1.032.500.000		1.045.000.000		1.137.625.000		1.140.381.250	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan Masyarakat	100%	100%	1.032.003.152	100,00%	1.032.500.000	100,00%	1.045.000.000	100,00%	1.137.625.000	100%	1.140.381.250	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA				5.956.681.901		6.126.685.000		36.126.685.000		66.126.685.000		6.126.685.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	SERTA BUDAYA POLITIK													Politik
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	Tingkat Partispasi Masyarakat Dalam Pemilu (% Kehadiran Yg Pasti Ikut Memilih); (Partisipasi Pemilih Pemula Yang Meningkat); (Partisipasi Aktif Dari Parpol Dalam Mensosialisasikan Pemilu)	83,61%	84%	5.956.681.901	85%	6.126.685.000	87,50%	36.126.685.000	93%	66.126.685.000	94,00%	6.126.685.000	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.460.000.000		2.681.750.000		2.859.337.500		3.043.054.375		3.208.207.094	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Legalitas Ormas	Persentase Ormas Yang Memiliki Izin	26,30%	29,00%	2.460.000.000	30,00%	2.681.750.000	33,00%	2.859.337.500	35,00%	3.043.054.375	40,00%	3.208.207.094	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				105.000.000		110.250.000		115.762.500		121.550.625		127.628.156	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Meningkatnya Penanganan Konflik	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	38%	43%	105.000.000	45%	110.250.000	48%	115.762.500	50%	121.550.625	52,50 %	127.628.156	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				930.000.000		1.170.000.000		1.850.250.000		1.855.762.500		1.861.550.625	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Penanganan Konflik	Persentase Konflik Sosial di Kab Mojokerto yang terselesaikan	79,18%	81,50%	930.000.000	83%	1.170.000.000	84,50 %	1.850.250.000	86%	1.855.762.500	87,50 %	1.861.550.625	
1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.769.668.400		7.821.518.000		7.847.226.001		7.923.731.821		8.083.393.048	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	7.769.668. 400	90,9	7.821.518.0 00	91	7.847.226. 001	91,1	7.923.731. 821	91,25	8.083.393.04 8	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,3 6%	90,3 6%		90,50 %		90,65 %		90,80 %		91,00 %		
1.05. 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.882.534. 723		3.935.000.0 00		4.004.950. 000		4.085.896. 500		4.429.309.25 5	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Terlaksananya penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Prosentase penyelesaian gangguan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	90,0 0%	90,0 0%	3.882.534. 723	90,00 %	3.935.000.0 00	90,00 %	4.004.950. 000	90,00 %	4.085.896. 500	90,00 %	4.429.309.25 5	
		Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	90,0 0%	90,0 0%		90,00 %		90,00 %		90,00 %		90,00 %		
1.05. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				7.744.599. 733		7.834.599.7 33		7.839.599. 733		7.922.531. 588		8.000.464.92 4	Perangkat Daerah pelaksana

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	KABUPATEN/KOTA													urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	7.744.599. 733	90,9	7.834.599.7 33	91	7.839.599. 733	91,1	7.922.531. 588	91,25	8.000.464.92 4	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%		91%		91%		91%		91%		
1.05. 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.224.000. 000		2.224.000.0 00		2.274.000. 000		2.416.525. 000		2.681.000.00 0	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan Bencana	indeks kesiapsiagaan masyarakat	65	65	1.050.000. 000	70	1.050.000.0 00	75	1.050.000. 000	80	1.075.000. 000	85	1.275.000.00 0	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu	100 %	100 %	824.000.0 00	100%	824.000.00 0	100%	824.000.0 00	100%	891.525.0 00	100%	956.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		tanggap												
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase penyelesaian penanganan pascabencana	65%	65%	350.000.000	65%	350.000.000	65%	400.000.000	65%	450.000.000	65%	450.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.910.000.000		3.850.000.000		3.855.000.000		3.855.000.000		3.855.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	% Wilayah Manajemen Kebakaran yang terbentuk	20%	20%	810.000.000	20%	2.750.000.000	20%	2.755.000.000	20%	2.755.000.000	20%	2.755.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Penanganan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran	% kejadian kebakaran dan Non Kebakaran yg ditindaklanjuti	100 %	100 %	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Pasca Kebakaran dan Non Kebakaran	% layanan pasca kebakaran dan non kebakaran yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	
1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.366.020.		6.467.436.5		6.625.720.		6.759.833.		6.856.356.83	Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				690		55		627		105		2	pelaksana urusan bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,0 0%	90,0 0%	6.366.020. 690	90,00 %	6.467.436.5 55	90,00 %	6.625.720. 627	90,00 %	6.759.833. 105	90,00 %	6.856.356.83 2	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,8 3%	96,1 2		96,14		96,16		96,18		96,2		
1.06. 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				381.028.7 60		412.131.63 6		423.344.8 00		448.679.2 80		458.547.208	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	75,0 0%	100, 00%	381.028.7 60	100,0 0%	412.131.63 6	100,0 0%	423.344.8 00	100,0 0%	448.679.2 80	100,0 0%	458.547.208	
1.06. 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.893.299. 150		2.082.629.0 65		2.290.891. 972		2.319.981. 169		2.371.979.28 6	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai	50,0 0%	0,21	1.893.299. 150	0,5	2.082.629.0 65	1	2.290.891. 972	1,25	2.319.981. 169	1,5	2.371.979.28 6	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		standar												
1.06. 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				7.910.415. 740		8.701.457.3 14		9.241.603. 045		9.464.095. 699		9.901.639.68 5	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Desa yang updating SIKS-NG	55,0 0%	90,0 0%	326.572.2 40	91,00 %	359.229.46 4	92,00 %	365.152.4 10	93,00 %	370.000.0 00	94,00 %	398.134.417	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial PPKS	Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha	12,0 0%	12,0 5%	7.583.843. 500	15,00 %	8.342.227.8 50	17,00 %	8.876.450. 635	20,00 %	9.094.095. 699	22,00 %	9.503.505.26 8	
1.06. 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				210.000.0 00		231.000.00 0		254.100.0 00		279.510.0 00		307.461.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial pada masa bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat	100, 00%	100, 00%	170.000.0 00	100,0 0%	187.000.00 0	100,0 0%	205.700.0 00	100,0 0%	226.270.0 00	100,0 0%	248.897.000	
	Meningkatnya kualitas pendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif	100, 00%	100, 00%	40.000.00 0	100,0 0%	44.000.000	100,0 0%	48.400.00 0	100,0 0%	53.240.00 0	100,0 0%	58.564.000	
1.06. 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM				15.000.00		16.500.000		18.150.00		19.965.00		21.961.500	Perangkat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	PAHLAWAN				0				0		0			pelaksana urusan bidang Sosial
	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100, 00%	100, 00%	15.000.00 0	100,0 0%	16.500.000	100,0 0%	18.150.00 0	100,0 0%	19.965.00 0	100,0 0%	21.961.500	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
2.07. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.210.985. 492		6.311.957.4 77		6.381.445. 499		6.489.547. 684		6.529.095.02 3	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretariatan	88,2 5	90	6.210.985. 492	90	6.311.957.4 77	90	6.381.445. 499	90	6.489.547. 684	90	6.529.095.02 3	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,0 0%	90,8 1%		90,82 %		90,83 %		90,84 %		90,85 %		
2.07. 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				50.000.00 0		150.000.00 0		50.000.00 0		150.000.0 00		50.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Makro dan Mikro di bidang Ketenagakerjaan	Persentase Program Dan Kegiatan Yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	100,0%	100,0%	50.000.000	100,0%	150.000.000	100,0%	50.000.000	100,0%	150.000.000	100,0%	50.000.000	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya Masyarakat/ Pencari Kerja Yang Memiliki Keahlian Dan Kemampuan Kerja	Persentase lulusan peserta pelatihan berbasis kompetensi	89,60%	92,5%	775.000.000	93%	775.000.000	93,5%	775.000.000	94%	775.000.000	95%	775.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Tenaga Kerja
	Meningkatnya akses kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja	Persentase perusahaan penyedia informasi lowongan kerja pada tahun n	15,50%	16,5%	275.000.000	17%	275.000.000	17,5%	275.000.000	18%	275.000.000	19%	275.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900		4.495.749.900	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														Tenaga Kerja
	Menurunnya Angka Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan	85,71%	86,50%	4.495.749.900	87%	4.495.749.900	87,50%	4.495.749.900	88%	4.495.749.900	89%	4.495.749.900	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Jaminan Sosial	11,7%	35%		35,5%		36%		36,5%		37%		
3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
3.32.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang transmigrasi
	Meningkatnya Penempatan Transmigran	Persentase calon transmigran yang ditempatkan		100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	
2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.682.005.395		5.889.000.000		6.020.000.000		6.151.000.000		6.278.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														anak
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	5.682.005.395	90,9	5.889.000.000	91	6.020.000.000	91,1	6.151.000.000	91,25	6.278.000.000	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5	96,6		96,65		96,7		96,75		96,75		
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				215.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya perlindungan Perempuan	Prosentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	100	100	215.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	100	370.000.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				108.080.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000		290.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berprespektif Gender dan Hak Anak sesuai Standart	3	3	108.080.000	3	290.000.000	3	290.000.000	3	290.000.000	3	290.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				61.218.800		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)	66,22	66,24	61.218.800	66,25	105.000.000	66,26	105.000.000	66,27	105.000.000	66,28	105.000.000	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				70.950.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Prosentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komperhensif	100	100	70.950.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	100	215.000.000	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79,36	79,38		79,39		79,4		79,41		79,42		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				456.143.600		590.000.000		600.000.000		630.000.000		650.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	11,77	11,79	128.071.800	11,8	195.000.000	11,81	200.000.000	11,82	215.000.000	11,83	230.000.000	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	60,88	61,88	328.071.800	62,38	395.000.000	62,88	400.000.000	63,39	415.000.000	63,89	420.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				84.040.000		85.000.000		86.000.000		88.000.000		90.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan	96,92	97,10	84.040.000	97,20	85.000.000	97,30	86.000.000	97,40	88.000.000	97,50	90.000.000	
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				1.590.051.300		2.210.400.000		2.210.400.000		2.210.400.000		2.210.400.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	1,95	1,95	1.590.051.300	1,95	2.210.400.000	1,95	2.210.400.000	1,95	2.210.400.000	1,95	2.210.400.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 (Age Specific Fertility Rate / ASFR (15-19))	14,8	14,78		14,77		14,76		14,75		14,74		
2.14.03	PROGRAM KELUARGA BERENCANA				6.463.655.000		6.519.200.000		6.519.200.000		6.519.200.000		6.519.200.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern contraceptive (mCPR)	80,06	80,08	6.463.655.000	80,09	6.519.200.000	80,10	6.519.200.000	80,11	6.519.200.000	80,12	6.519.200.000	
		Prevalensi Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (Unmed Need)	6,99	6,9	-	6,85	-	6,8	-	6,75	-	6,7		
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				6.163.716.100		7.165.521.100		7.175.521.100		7.185.521.100		7.195.521.100	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	97,9 1	97,9 3	6.163.716. 100	97,94	7.165.521.1 00	97,95	7.175.521. 100	97,96	7.185.521. 100	97,97	7.195.521.10 0	
2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2.12. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.510.655. 200		7.675.767.1 10		7.851.466. 673		7.950.910. 207		8.057.201.22 7	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	7.510.655. 200	90,9	7.675.767.1 10	91	7.851.466. 673	91,1	7.950.910. 207	91,25	8.057.201.22 7	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,2 5%	95,0 0%		95,15 %		95,25 %		95,35 %		95%		
2.12. 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				167.645.0 00		275.000.00 0		302.500.0 00		332.750.0 00		336.025.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kependudukan dan pencatatan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														sipil
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	99,67%	99,77%	167.645.000	99,78%	275.000.000	100,00%	302.500.000	100,00%	332.750.000	100,00%	336.025.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				71.000.000		150.000.000		165.000.000		181.500.000		190.650.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,02%	99,50%	71.000.000	99,56%	150.000.000	99,62%	165.000.000	99,68%	181.500.000	99,70%	190.650.000	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				131.000.000		150.000.000		186.500.000		187.515.000		188.966.500	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil
	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara efektif	Presentase tersedianya data dan informasi kependudukan	100,00%	100,00%	131.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	186.500.000	100,00%	187.515.000	100,00%	188.966.500	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Pencatatan Sipil yang akurat dan terbaru												
2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.379.788.094		6.428.688.094		6.553.688.094		6.678.688.094		6.838.688.094	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	6.379.788.094	90,9	6.428.688.094	91	6.553.688.094	91,1	6.678.688.094	91,25	6.838.688.094	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,20 %	94,30 %		94,40 %		94,5 %		94,60 %		94,60 %		
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				200.000.000		200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa dengan penataan desa sesuai	14%	40%	200.000.000	55%	200.000.000	70%	200.000.000	80%	250.000.000	85%	250.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		ketentuan												
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				250.000.000		250.000.000		250.000.000		290.000.000		350.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	70%	74%	250.000.000	74%	250.000.000	74%	250.000.000	74%	290.000.000	74%	350.000.000	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				11.750.000.000		12.400.000.000		12.600.000.000		12.800.000.000		12.850.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	93%	11.750.000.000	93%	12.400.000.000	93%	12.600.000.000	93%	12.800.000.000	93%	12.850.000.000	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,				2.925.000.000		2.925.000.000		3.050.000.000		3.175.000.000		3.300.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT													Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya	22%	24%	2.575.000.000	26%	2.575.000.000	28%	2.650.000.000	30%	2.725.000.000	32%	2.800.000.000	
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	79%	350.000.000	80%	350.000.000	80%	400.000.000	81%	450.000.000	81%	500.000.000	
2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.318.049.000		6.538.249.000		6.669.049.000		6.800.049.000		6.989.549.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pangan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	6.318.049.000	90,9	6.538.249.000	91	6.669.049.000	91,1	6.800.049.000	91,25	6.989.549.000	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,36%	90,36%		90,50%		90,65%		90,80%		91,00%		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				500.000.000		500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														pangan
	Terwujudnya Kemandirian Pangan	Jumlah Desa yang diberi bantuan pembangunan lumbung pangan dan pendukung lainnya	1 Desa	1 Desa	500.000.000	1 Desa	500.000.000	1 Desa	1.000.000.000	1 Desa	1.000.000.000	1 Desa	1.000.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.165.000.000		1.835.000.000		1.595.000.000		1.545.000.000		1.580.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pangan
	Terwujudnya Ketersediaan Pangan yang beranekaragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)(%)	82,72%	83,00%	1.165.000.000	83,20%	1.835.000.000	83,40%	1.595.000.000	83,60%	1.545.000.000	83,80%	1.580.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				50.000.000		20.000.000		20.000.000		22.000.000		22.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pangan
	Terwujudnya penurunan jumlah Desa rentan rawan pangan	Persentase Desa rentan rawan pangan	4,90%	4,30%	50.000.000	3,90%	20.000.000	3,60%	20.000.000	3,30%	22.000.000	3,00%	22.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				60.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000	Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang pangan
	Terwujudnya tingkat keamanan pangan yang	Persentase Pangan Segar Asal	93,40%	94,20%	60.000.000	94,20%	60.000.000	94,20%	65.000.000	94,20%	70.000.000	94,20%	75.000.000	

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
06	DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				255.000.000		330.000.000		300.000.000		270.000.000		280.000.000	Daerah pelaksana urusan bidang kelautan dan perikanan
	Terwujudnya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	257,00%	2,00 %	255.000.000	2,00 %	330.000.000	2,00 %	300.000.000	2,00 %	270.000.000	2,00 %	280.000.000	
2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.589.859.968		13.897.352.966		13.940.220.615		14.020.231.643		14.239.243.226	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja PD	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	91%	91%	13.589.859.968	91%	13.897.352.966	91%	13.940.220.615	91%	14.020.231.643	91%	14.239.243.226	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,95%	93,97%		94%		94%		94%		94%		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				178.406.150		187.826.458		196.692.780		206.527.419		216.853.790	Perangkat daerah pelaksana

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														urusan bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP'	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Hidup Yang Ditindaklanjuti	58,46%	100,00%	178.406.150	100%	187.826.458	100%	196.692.780	100%	206.527.419	100%	216.853.790	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				948.386.134		1.077.048.921		1.169.813.453		1.264.466.212		1.361.101.610	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup
	Menurunnya Pencemaran dan / Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase parameter kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	32,95%	38%	948.386.134	38%	1.077.048.921	46%	1.169.813.453	54%	1.264.466.212	54%	1.361.101.610	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				3.482.129.601		3.656.236.081		3.739.047.885		3.831.000.279		3.932.550.293	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH yang terkelola	100%	100%	3.482.129.601	100%	3.656.236.081	100%	3.739.047.885	100%	3.831.000.279	100%	3.932.550.293	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN				50.000.00		55.000.000		60.000.00		65.000.00		70.000.000	Perangkat daerah

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				0				0		0			pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang dikelola	43,5 8%	44%	50.000.00 0	43,61 %	55.000.000	43,62 %	60.000.00 0	43,63 %	65.000.00 0	43,64 %	70.000.000	
2.11. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				239.800.0 00		266.790.00 0		280.129.5 00		294.135.9 75		308.842.774	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	58,0 0%	58,1 8%	239.800.0 00	58,19 %	266.790.00 0	58,20 %	280.129.5 00	58,24 %	294.135.9 75	58,29 %	308.842.774	
2.11. 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				255.000.0 00		268.750.00 0		273.687.5 00		289.371.8 75		292.946.406	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
11	PERSAMPAHAN				59.195.75 2.402		8.030.000.0 00		8.230.000. 000		7.890.000. 000		7.400.000.00 0	daerah pelaksana urusan bidang Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64	64,2	59.195.75 2.402	64,3	8.030.000.0 00	64,4	8.230.000. 000	64,5	7.890.000. 000	64,6	7.400.000.00 0	
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
2.16. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.878.703. 460		6.123.876.5 64		6.232.837. 861		6.420.127. 997		6.605.891.83 6	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	5.878.703. 460	90,9	6.123.876.5 64	91	6.232.837. 861	91,1	6.420.127. 997	91,25	6.605.891.83 6	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,3 0%	96,4 0%		96,50 %		96,60 %		96,70 %		96,80 %		
2.16. 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				5.125.000. 000		5.325.000.0 00		5.675.000. 000		5.825.000. 000		6.175.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Komunikasi

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														dan Informatika
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah	100,00%	100,00%	5.125.000.000	100,00%	5.325.000.000	100,00%	5.675.000.000	100,00%	5.825.000.000	100,00%	6.175.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				8.675.000.000		8.890.000.000		8.950.000.000		9.070.000.000		9.190.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya Digitalisasi Penyelenggaraan Layanan Publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	24,00%	26,00%	8.675.000.000	28,00%	8.890.000.000	29,00%	8.950.000.000	31,00%	9.070.000.000	32,00%	9.190.000.000	
2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		350.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Statistik

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	100,00%	300.000.000	100,00%	310.000.000	100,00%	320.000.000	100,00%	330.000.000	100,00%	350.000.000	
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				300.000.000		300.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Persandian
	Meningkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	375	400	300.000.000	430	300.000.000	460	350.000.000	490	350.000.000	500	350.000.000	
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH													
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.782.366.000		4.821.884.300		4.962.978.515		5.099.127.441		5.205.833.813	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Koperasi dan Usaha Mikro

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.325.795. 000		5.640.213.8 50		6.036.174. 550		6.262.933. 300		6.301.029.96 5	daerah pelaksana urusan bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	6.325.795. 000	90,9	5.640.213.8 50	91	6.036.174. 550	91,1	6.262.933. 300	91,25	6.301.029.96 5	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,3 6%	90,3 6%		90,50 %		90,65 %		90,80 %		91,00 %		
2.18. 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				125.000.0 00		225.000.00 0		250.000.0 00		180.000.0 00		320.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	100, 00%	100, 00%	125.000.0 00	100,0 0%	225.000.00 0	100,0 0%	250.000.0 00	100,0 0%	180.000.0 00	100,0 0%	320.000.000	
2.18. 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				170.000.0 00		170.000.00 0		170.000.0 00		270.000.0 00		250.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya Jumlah investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan	5%	5%	170.000.0	5%	170.000.00	5%	170.000.0	5%	270.000.0	5%	250.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		investor yang berinvestasi			00		0		00		00			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				150.000.000		425.000.000		475.000.000		550.000.000		625.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Penanaman Modal
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	83%	83%	150.000.000	86%	425.000.000	88%	475.000.000	89%	550.000.000	90%	625.000.000	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				135.000.000		225.000.000		185.000.000		200.000.000		360.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Penanaman Modal
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 %	100 %	135.000.000	100%	225.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	12 laporan	360.000.000	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Penanaman

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														Modal
	Terkelolanya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100 %	100 %	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.429.294.896		4.459.294.896		4.499.294.896		4.529.294.896		4.923.756.497	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	4.429.294.896	90,9	4.459.294.896	91	4.499.294.896	91,1	4.529.294.896	91,25	4.923.756.497	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,02%	88%		88,2%		88,40%		88,6%		88,8%		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				882.500.000		912.500.000		942.500.000		972.500.000		875.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perpustakaan
	Meningkatnya Literasi Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	63,7	72,35	882.500.000	72,45	912.500.000	72,55	942.500.000	72,65	972.500.000	72,65	875.000.000	
		2. Indeks	66,9	67,2		67,3		67,4		67,5		67,5		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Kegemaran Membaca (TGM)												
2,24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				140.000.000		150.000.000		165.000.000		180.000.000		185.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kearsipan
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja	100,00%	100,00%	140.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	165.000.000	100,00%	180.000.000	100,00%	185.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kearsipan
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an	100 %	100,00%	20.000.000	100,00%	25.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	35.000.000	100,00%	40.000.000	
2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA													
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.953.421.777		6.903.596.000		6.748.196.000		6.832.053.000		7.062.496.000	Perangkat daerah pelaksana

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	KABUPATEN/KOTA													urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	6.953.421.777	90,9	6.903.596.000	91	6.748.196.000	91,15	6.832.053.000	91,25	7.062.496.000	
		Persentase Realisasi Anggaran PD	91,49%	95,00%		95,20%		95,40%		95,60%		95,80%		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kapasitas pemuda	jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan kompetensi/keterampilan	300 pemuda	300 pemuda	200.000.000	350 pemuda	250.000.000	300 pemuda	250.000.000	350 pemuda	300.000.000	400 pemuda	300.000.000	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				5.661.421.304		5.775.000.000		5.875.000.000		5.975.000.000		6.000.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya	Jumlah	500	500		1000		500		1000		500		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	keikutsertaan kontingen daerah dalam event olahraga resmi	keikutsertaan kontingen daerah dalam event olahraga resmi	kontingen	kontingen	5.661.421.304	kontingen	5.775.000.000	kontingen	5.875.000.000	kontingen	5.975.000.000	kontingen	6.000.000.000	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				250.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		350.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kepramukaan	persentase partisipasi pemuda dalam kepramukaan	40%	40%	250.000.000	42%	250.000.000	43%	300.000.000	44%	300.000.000	45%	350.000.000	
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.335.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		1.350.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	10,0 %	10,0 %	1.335.000.000	10,0 %	1.200.000.000	10,0 %	1.200.000.000	12,0 %	1.250.000.000	15,0 %	1.350.000.000	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				100.000.000		125.000.000		125.000.000		150.000.000		200.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang kebudayaan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian	persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	10,3 7%	10,3 7%	100.000.0 00	10,45 %	125.000.00 0	10,52 %	125.000.0 00	10,67 %	150.000.0 00	10,67 %	200.000.000	
2.22. 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				200.000.0 00		250.000.00 0		250.000.0 00		250.000.0 00		250.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang kebudayaan
	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	10,7 1%	100 %	200.000.0 00	100%	250.000.00 0	100%	250.000.0 00	100%	250.000.0 00	100%	250.000.000	
3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3.26. 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.010.000. 000		4.000.000.0 00		4.130.000. 000		4.295.000. 000		4.200.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pariwisata
	Meningkatnya destinasi wisata baru	Presentase pertumbuhan destinasi wisata baru	5%	5%	3.010.000. 000	6%	4.000.000.0 00	7%	4.130.000. 000	8%	4.295.000. 000	10%	4.200.000.00 0	
3.26. 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.320.000. 000		1.260.000.0 00		1.590.000. 000		1.440.000. 000		1.540.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pariwisata
	Meningkatnya kualitas promosi wisata	Jumlah kerja sama promosi wisata	4 mitra	4 mitra	1.320.000.	4 mitra	1.260.000.0	5 mitra	1.590.000.	5 mitra	1.440.000.	6 mitra	1.540.000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		dengan mitra eksternal			000		00		000		000		0	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				55.000.000		50.000.000		175.000.000		20.000.000		175.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pariwisata
	Meningkatnya ekosistem ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual	22%	22%	55.000.000	25,00 %	50.000.000	27,00 %	175.000.000	30,00 %	20.000.000	32,00 %	175.000.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				400.000.000		650.000.000		600.000.000		450.000.000		600.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pariwisata
	Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif	persentase tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	8,00 %	8,00 %	400.000.000	10,00 %	650.000.000	12,00 %	600.000.000	15,00 %	450.000.000	17,00 %	600.000.000	
3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.587.924.500		23.710.000.000		23.825.000.000		23.958.000.000		24.068.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pertanian
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian serta	Tingkat kepuasan pengguna layanan kesekretariatan	85%	85%	23.587.924.500	87%	23.710.000.000	89%	23.825.000.000	90%	23.958.000.000	91%	24.068.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	perencanaan dan keuangan													
		Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	93,66%	93,70%		93,80%		93,90%		94%		94%		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				9.043.387.300		8.680.000.000		8.250.000.000		8.643.000.000		9.038.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pertanian
	Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani	Persentase Sarana Pertanian Layak Pakai dan Layak Fungsi yang digunakan	0,9		9.043.387.300		8.680.000.000		8.250.000.000		8.643.000.000		9.038.000.000	
		Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura :					8.010.000.000		8.690.000.000		9.093.000.000		9.538.000.000	
		Padi (ton)		321.420,71		323.027,82		324.642,96		326.266,17		327.897,50		
		Jagung (ton)		266.002,65		267.332,67		274.739,45		277.486,84		271.362,74		
		Kedelai (ton)		1416,06		1.423,14		1.430,25		2.075,14		1.444,59		
		Bawang Merah		8.97		9.014		9.059		11.74		9.150		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		(ton)		0,03		,88		,96		0,48		,79		
		Cabai (ton)		8.09 2,12		8.132 ,59		8.173 ,24		8.173 ,24		8.255		
3.27. 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				2.281.082. 685		2.280.000.0 00		2.965.000. 000		3.070.000. 000		3.125.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pertanian
	Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mendukung peningkatan produksi pertanian	Cakupan Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	27.5 35 ha	27.5 35 ha	2.281.082. 685	27.53 5 ha	2.280.000.0 00	27.53 5 ha	2.965.000. 000	27.53 5 ha	3.070.000. 000	27.53 5 ha	3.125.000.00 0	
3.27. 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				800.000.0 00		920.000.00 0		985.000.0 00		1.055.000. 000		1.040.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pertanian
	Meningkatkan kesehatan hewan, memastikan keamanan produk hewan dan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit zoonosis dan bahaya lainnya yang terkait dengan hewan dan produk hewan	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	50,0 0%	50,0 0%	800.000.0 00	55,00 %	920.000.00 0	60,00 %	985.000.0 00	65,00 %	1.055.000. 000	70,00 %	1.040.000.00 0	
		Persentase Penurunan Kejadian Penyakit	81,7 9%	49,0 0%		48,00 %		47,00 %		46,00 %		45,00 %		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Hewan Menular												
3.27. 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				100.000.0 00		150.000.00 0		175.000.0 00		200.000.0 00		250.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pertanian
	Melindungi masyarakat dari ancaman bencana pertanian dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	100, 00%	100, 00%	100.000.0 00	100,0 0%	150.000.00 0	100,0 0%	175.000.0 00	100,0 0%	200.000.0 00	100,0 0%	250.000.000	
3.27. 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				15.000.00 0		20.000.000		25.000.00 0		25.000.00 0		30.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pertanian
	Memfasilitasi pelaku usaha di bidang pertanian dalam mendapatkan izin usaha	Presentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kab/Kota yang terfasilitasi	100, 00%	100, 00%	15.000.00 0	100,0 0%	20.000.000	100,0 0%	25.000.00 0	100,0 0%	25.000.00 0	100,0 0%	30.000.000	
3.27. 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				825.000.0 00		975.000.00 0		1.000.000. 000		1.025.000. 000		1.055.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Pertanian
	Meningkatkan	Persentase	0%	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam mengelola usaha taninya dengan lebih baik dan menguntungkan serta mencapai kehidupan yang lebih layak	Kelembagaan Kelompok Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		%	825.000.000	%	975.000.000	%	1.000.000.000	%	1.025.000.000	%	1.055.000.000	
		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	4,00 %	4,00 %		4,00 %		4%%		5%%		5,00 %		
3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.030.423.900		8.281.223.900		8.335.223.900		8.406.223.900		8.500.223.900	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perdagangan
	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi, Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,4	84,43	8.030.423.900	84,44	8.281.223.900	84,45	8.335.223.900	84,46	8.406.223.900	84,46	8.500.223.900	
		Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	3	1		1		1		1		1		
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN				250.000.0		100.000.00		100.000.0		100.000.0		100.000.000	Perangkat daerah

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
05	PENGEMBANGAN EKSPOR				200.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000		300.000.000	daerah pelaksana urusan bidang Perdagangan
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	6,50 %	6,70 %	200.000.000	7	200.000.000	7.3	250.000.000	7.5	250.000.000	7.8	300.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				400.054.150		410.000.000		425.000.000		435.000.000		440.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perdagangan
	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UUTP yang ditera-tera ulang dalam tahun berjalan	95,00%	95	400.054.150	95,25	410.000.000	95,25	425.000.000	95,5	435.000.000	95,5	440.000.000	
		Persentase Kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku,	7,00 %	7.2		7.5		8		8.2		8.5		
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				280.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perdagangan
	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk UMKM/IKM yang difasilitasi Promosi	60,00%	62	280.000.000	65	300.000.000	67	300.000.000	70	300.000.000	70	300.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		dan Pemasarannya												
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
3.31. 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				835.000.0 00		845.000.00 0		855.000.0 00		860.000.0 00		865.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perindustrian
	Terwujudnya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	3,00 %	3.1	835.000.0 00	3.2	845.000.00 0	3,25	855.000.0 00	3.3	860.000.0 00	3,35	865.000.000	
3.31. 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				132.000.0 00		110.000.00 0		110.000.0 00		120.000.0 00		125.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perindustrian
	Terwujudnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Lapor data Industri	65,0 0%	65,1	132.000.0 00	65,15	110.000.00 0	65,2	110.000.0 00	65,25	120.000.0 00	65,3	125.000.000	
3.31. 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				50.000.00 0		55.000.000		60.000.00 0		65.000.00 0		70.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Perindustrian
	Terwujudnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	60,0 0%	60,1 0%	50.000.00 0	60,15	55.000.000	60,20 %	60.000.00 0	60,25	65.000.00 0	60,3	70.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4,01	SEKRETARIAT DAERAH													
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.237.511.645		52.963.594.942		53.930.945.106		54.628.985.156		55.068.488.906	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang sekretariat daerah
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Publik	93,87	93,87	50.668.413.580	93,88	52.153.594.942	98,89	53.110.945.106	98,9	53.798.985.156	98,91	54.218.488.906	
	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Aspek Pelaporan Kinerja (SAKIP)	11,47	12,55	487.724.565	12,75	610.000.000	12,85	620.000.000	12,9	630.000.000	13	650.000.000	
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi	49,5	49,8	81.373.500	50,1	200.000.000	50,2	200.000.000	50,3	200.000.000	50,4	200.000.000	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				53.299.956.880		53.534.356.880		55.479.290.000		57.274.924.000		58.462.416.400	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang sekretariat daerah
	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	2,61	2,63	3.145.000.000	2,64	3.145.000.000	2,65	3.250.000.000	2,66	3.500.000.000	2,67	3.500.000.000	
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,12	82,13	50.154.956.880	82,14	50.389.356.880	82,15	52.229.290.000	82,16	53.774.924.000	82,17	54.962.416.400	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
4.01. 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				2.715.390. 550		3.107.100.0 00		3.525.000. 000		3.965.000. 000		4.075.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang sekretariat daerah
	Meningkatnya Kinerja TPID Kabupaten Mojokerto	Nilai Kinerja TPID	80,5 4	81,0 4	644.390.5 50	81,29	902.100.00 0	81,54	1.200.000. 000	81,79	1.500.000. 000	82,04	1.500.000.00 0	
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	82,1 2	82,1 3	1.086.000. 000	82,14	1.220.000.0 00	82,15	1.340.000. 000	82,16	1.480.000. 000	82,17	1.590.000.00 0	
	Optimalnya tatakelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80,3 3	80,3 5	985.000.0 00	80,36	985.000.00 0	80,37	985.000.0 00	80,38	985.000.0 00	80,39	985.000.000	
4,02	SEKRETARIAT DPRD													
4.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				50.300.00 0.000		50.955.000. 000		52.610.00 0.000		56.065.00 0.000		53.920.000.0 00	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang sekretariat DPRD
	Meningkatnya layanan administrasi Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan layanan administrasi sekretariat DPRD	100	100	37.500.00 0.000	100	38.155.000. 000	100	38.550.00 0.000	100	38.900.00 0.000	100	38.770.000.0 00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta	1. Nilai IKM PD	93	94	12.800.00 0.000	94,5	12.800.000. 000	95	14.060.00 0.000,00	95,5	17.165.00 0.000,00	96	15.150.000.0 00,00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Perencanaan dan Keuangan													
		2. Persentase Realisasi Anggaran PD	86	86,5		87		87,5		88		88,5		
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				72.610.000.000		78.570.000.000		84.630.000.000		91.890.000.000		96.750.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang sekretariat DPRD
	Meningkatnya dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	72.610.000.000	100	78.570.000.000	100	84.630.000.000	100	91.890.000.000	100	96.750.000.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6,01	INSPEKTORAT DAERAH													
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.112.770.892		17.194.612.410		17.311.352.125		17.407.220.413		17.532.220.413	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	17.112.770.892	90,9	17.194.612.410	91	17.311.352.125	91,1	17.407.220.413	91,25	17.532.220.413	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,3	88		90,5		90,65		0,908		0,91		
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.536.668.000		1.638.338.800		1.698.591.680		1.709.467.448		1.759.467.448	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang di tindaklanjuti	83,68%	83,70%	1.536.668.000	83,72%	1.638.338.800	83,74%	1.698.591.680	87,76%	1.709.467.448	86,78%	1.759.467.448	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI	83,68%	83,70%		83,72%		83,74%		87,76%		86,78%		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.409.975.800		1.425.133.380		1.438.186.718		1.445.006.050		1.455.006.050	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Inspektorat Daerah
	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan indeks penerapan Manajemen Risiko (Manajemen	100%	100%	1.409.975.800	92%	1.425.133.380	100%	1.438.186.718	100%	1.445.006.050	100%	1.455.006.050	

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
02	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.264.235. 200		1.352.731.6 64		1.447.422. 880		1.548.742. 482		1.657.154.45 6	daerah pelaksana urusan bidang perencanaan
	Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan Pemerintah Daerah	90	91	964.235.2 00	92	1.031.731.6 64	93%	1.103.952. 880	94%	1.181.229. 582	95%	1.263.915.65 3	
	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah	85%	86%	110.000.0 00	87%	117.700.00 0	88%	125.939.0 00	89%	134.754.7 30	90%	144.187.561	
	Meningkatnya Kualitas Data Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Pembangunan yang Didukung Data Terstandar (konsep, metadata, sumber, satuan, jadwal publikasi jelas)	80%	81%	190.000.0 00	82%	203.300.00 0	83%	217.531.0 00	84%	232.758.1 70	85%	249.051.242	
5.01. 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.717.167. 650		2.847.449.3 86		3.046.621. 042		3.259.884. 515		3.488.076.43 2	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang perencanaan
	Terwujudnya Sinergi Perencanaan	Persentase Keselarasan antar	90%	91%	2.569.167.	92%	2.749.009.3	93%	2.941.440.	94%	3.147.340.	95	3.367.654.70	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Pembangunan Bidang/Tematik	dokumen perencanaan bidang/tematik			650		86		042		845		5	
	Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bidang/Tematik yang efektif	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang/Tematik	85%	86%	148.000.000	87%	98.440.000	88%	105.181.000	89%	112.543.670	90%	120.421.727	
5,05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.173.406.195		1.646.794.629		1.860.621.252		2.134.739.525		2.130.225.272	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang penelitian dan pengembangan
	Meningkatnya Kesesuaian Agenda Riset Daerah dengan Isu Strategis Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah pada Program Penelitian dan Pengembangan	80%	81%	743.381.154	82%	1.186.667.835	83%	1.339.010.083	84%	1.432.740.789	85%	1.533.032.644	
	Meningkatnya Kualitas Riset Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Sesuai Standar Komunitas Ilmiah	74%	76%		77%		78%		79%		80%		
	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Litbang	85,00%	86,00%	430.025.041	87,00%	460.126.794	88,00%	521.611.169	89,00%	701.998.736	90,00%	597.192.628	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		dan Inovasi Daerah												
5.05. 03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				258.000.000		562.700.000		990.742.000		1.011.618.725		1.133.871.751	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang penelitian dan pengembangan
	Meningkatnya Kesesuaian Agenda Riset Daerah dengan Isu Strategis Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah pada Program Riset dan Inovasi Daerah	81,00%	81,00%	258.000.000	82,00%	562.700.000	83,00%	990.742.000	84,00%	1.011.618.725	85,00%	1.133.871.751	
	Meningkatnya Kualitas Riset Daerah	Persentase Hasil Riset dan Inovasi Sesuai Standar Komunitas Ilmiah	76,00%	76,00%		77,00%		78,00%		79,00%		80,00%		
	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil-hasil Riset dan Inovasi Daerah	86,00%	86,00%		87,00%		88,00%		89,00%		90,00%		
5,02	KEUANGAN													
5.02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				51.187.130.064		50.652.930.964		54.174.274.060		59.072.751.466		59.072.751.466	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														keuangan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	51.187.13 0.064	90,9	50.652.930. 964	91	54.174.27 4.060	91,1	59.072.75 1.466	91,25	59.072.751.4 66	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%		91%		91%		91%		91%		
5.02. 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				602.049.0 64.300		601.758.54 3.500		602.219.0 22.800		601.765.5 02.000		601.765.502. 000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang keuangan
	Penganggaran yang berorientasi kinerja dan tepat waktu	Persentase PD yang menyusun anggaran berorientasi kinerja dan tepat waktu	100 %	100 %	1.164.760. 643	100%	1.220.225.4 35	100%	1.275.690. 228	100%	1.331.155. 020	100%	1.331.155.02 0	
	Penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan sesuai ketentuan	100 %	100 %	718.764.0 00	100%	862.516.00 0	100%	1.034.020. 000	100%	1.241.024. 000	100%	1.241.024.00 0	
	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang dikonsolidasi sesuai ketentuan	100 %	100 %	410.500.0 00		424.500.00 0		443.000.0 00		465.000.0 00		465.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	terpenuhinya kebutuhan anggaran untuk menunjang urusan tersebut, serta terlaksananya pengelolaan keuangan daerah	Persentase Pelaksanaan Bantuan Keuangan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	599.755.039.657		599.251.302.065	100%	599.466.312.572	100%	598.728.322.980	100%	598.728.322.980	
	Penganggaran yang berorientasi kinerja dan tepat waktu	Persentase PD yang menyusun anggaran berorientasi kinerja dan tepat waktu	100%	100 %	1.164.760.643	100%	1.220.225.435	100%	1.275.690.228	100%	1.331.155.020	100%	1.331.155.020	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.500.804.800		3.604.378.700		3.795.516.800		3.835.516.800		3.835.516.800	
	Meningkatnya OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD	100 %	100 %	3.500.804.800	100%	3.604.378.700	100%	3.795.516.800	100%	3.835.516.800	100%	3.835.516.800	
5,02	KEUANGAN													
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				32.109.157.998		33.483.136.021		34.150.395.128		35.376.779.260		36.483.539.561	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang keuangan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	32.109.157.998	90,9	33.483.136.021	91	34.150.395.128	91,1	35.376.779.260	91,25	36.483.539.561	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	90%		91%		91%		91%		91%		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
5.02. 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				7.569.460. 637		7.868.759.1 06		8.050.244. 698		8.205.726. 521		8.232.837.66 5	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang keuangan
	Tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	101, 31%	100 %	7.569.460. 637	100%	7.868.759.1 06	100%	8.050.244. 698	100%	8.205.726. 521	100%	8.232.837.66 5	
5,03	KEPEGAWAIAN													
5.03. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.580.723. 000		6.325.223.0 00		6.385.223. 000		6.385.223. 000		6.330.223.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	6.580.723. 000	90,9	6.325.223.0 00	91	6.385.223. 000	91,1	6.385.223. 000	91,25	6.330.223.00 0	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,3 6%	90,3 6%		90,50 %		90,65 %		90,80 %		91,00 %		
5.03. 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.016.500. 000		1.823.500.0 00		1.622.500. 000		1.631.400. 000		1.651.190.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang kepegawaian
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi	Persentase Perencanaan	78%	79%	751.024.2	80%	776.959.32	81%	729.371.5	82%	772.005.2	83%	820.671.680	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Kepegawaian	Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi			09		9		17		38			
	Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	98%	98,5 %	917.918.477	98,55 %	843.667.958	98,6 %	719.994.840	98,65 %	692.800.427	98,7 %	669.521.705	
	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,51%	99,55%	347.557.314	99,6 %	202.872.714	99,65 %	173.133.643	99,7 %	166.594.335	99,75 %	160.996.615	
5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.208.963.000		2.376.663.500		2.428.214.250		2.544.175.475		2.588.418.985	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang pendidikan dan pelatihan
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	253 %	255 %	2.208.963.000	260%	2.376.663.500	265%	2.428.214.250	270 %	2.544.175.475	275 %	2.588.418.985	
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7,01	KECAMATAN													
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.482.699.705		2.882.699.705		2.882.699.705		2.989.075.745		3.008.075.745	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Sooko)
	Meningkatnya Kualitas	Tingkat Kepuasan	100	100		100		100		100		100		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Pengguna Layanan Kesekretariatan			3.482.699.705		2.882.699.705		2.882.699.705		2.989.075.745		3.008.075.745	
		Persentase Realisasi Anggaran PD	91,63%	92,00%		92,00%		92,00%		92,50%		92,50%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Sooko)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase Layanan yang Diselenggarakan Sesuai Standar	81%	81%	40.000.000	82%	40.000.000	83%	40.000.000	84%	45.000.000	85%	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.000		260.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Sooko)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	300.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.574.857.620		2.607.857.798		2.669.239.878		2.817.442.398		3.092.647.724	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.841.447.000		3.082.699.705		3.092.825.745		3.195.025.745		3.253.325.745	daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Puri)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	84,95	85,5	2.841.447.000	86	3.082.699.705	86,5	3.092.825.745	87	3.195.025.745	87,5	3.253.325.745	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,76%	95,00%		95,15%		95,30%		95,45%		95,60%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Puri)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100,00%	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	45.000.000	100,00%	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.000		260.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Puri)
	Terwujudnya Sinergitas	Persentase Hasil	23	23		23		23		23		23		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Koordinasi yang Ditindaklanjuti	lapor an	lapo ran	240.000.0 00	lapor an	260.000.00 0	lapor an	260.000.0 00	lapor an	280.000.0 00	lapor an	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.827.104. 667		2.827.104.6 67		2.927.104. 667		2.927.104. 667		3.027.104.66 7	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Bangsal)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	100	100	2.827.104. 667	100	2.827.104.6 67	100	2.927.104. 667	100	2.927.104. 667	100	3.027.104.66 7	
		Persentase Realisasi Anggaran PD	94,7 6%	95,0 0%		95,15 %		95,30 %		95,4 5%		95,60 %		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Bangsal)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	81%	81%	40.000.00 0	82%	40.000.000	83%	40.000.00 0	84%	45.000.00 0	85%	50.000.000	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.0 00		260.000.00 0		260.000.0 00		280.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
06	DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				259.060.600		260.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Gedeg)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjti	100 %	100 %	259.060.600	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.836.316.250		2.887.480.840		2.967.610.440		3.005.871.484		3.049.158.632	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Kemlagi)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	95	95,4	2.836.316.250	95,8	2.887.480.840	96,2	2.967.610.440	96,6	3.005.871.484	97	3.049.158.632	
		Persentase Realisasi Anggaran PD	94,1 6%	94,2 4%		94,28 %		94,32 %		94,36 %		94,40 %		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Kemlagi)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Persentase layanan yang	100 %	100 %	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	(Kualitas Pelayanan)	diselenggarakan sesuai standar			0				0		0			
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.0 00		260.000.00 0		260.000.0 00		280.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Kemlagi)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjti	100 %	100 %	240.000.0 00	100%	260.000.00 0	100%	260.000.0 00	100%	280.000.0 00	100%	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.529.862. 250		2.699.862.2 50		2.680.862. 250		2.670.862. 250		2.670.862.25 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Jetis)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	2.529.862. 250	90,9	2.699.862.2 50	91	2.680.862. 250	91,1	2.670.862. 250	91,25	2.670.862.25 0	
		Persentase Realisasi Anggaran PD	95,0 0%	95,0 0%		95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Dawarblandon g)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %	100 %	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.000		260.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Dawarblandon g)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjti	100 %	100 %	240.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.766.539.500		7.821.539.500		7.824.539.500		7.927.539.500		8.034.539.500	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Mojosari)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	88,8 6	88,8 6	7.766.539.500	88,8	7.821.539.500	88,9	7.824.539.500	90	7.927.539.500	90,2	8.034.539.500	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Kuangan													
		Persentase Realisasi Anggaran PD	91,0 0%	91%		91,20 %		91,50 %		91,70 %		92%		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Mojosari)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100, 00%	100, 00%	40.000.00 0	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.00 0	100,0 0%	45.000.00 0	100,0 0%	50.000.000	
7.01. 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				3.000.000. 000		3.000.000.0 00		3.000.000. 000		3.000.000. 000		3.000.000.00 0	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Mojosari)
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100, 00%	100, 00%	3.000.000. 000	100,0 0%	3.000.000.0 00	100,0 0%	3.000.000. 000	100,0 0%	3.000.000. 000	100,0 0%	3.000.000.00 0	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				300.000.0 00		300.000.00 0		300.000.0 00		300.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Mojosari)

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	90%	90,0 0%	300.000.0 00	90,00 %	300.000.00 0	90,00 %	300.000.0 00	90,00 %	300.000.0 00	90,00 %	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.612.097. 039		2.712.097.0 39		2.812.097. 039		2.924.943. 831		3.058.039.89 9	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Pungging)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	2.612.097. 039	90,9	2.712.097.0 39	91	2.812.097. 039	91,1	2.924.943. 831	91,25	3.058.039.89 9	
		Persentase Realisasi Anggaran PD	90,3 6%	90,3 6%		90,50 %		90,65 %		90,80 %		91,00 %		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Pungging)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100 %	100, 00%	40.000.00 0	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.00 0	100,0 0%	45.000.00 0	100,0 0%	50.000.000	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.0 00		260.000.00 0		260.000.0 00		280.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														urusan bidang Kecamatan (Pungging)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	90%	90%	240.000.000	90%	260.000.000	90%	260.000.000	90%	280.000.000	90%	300.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.506.786.400		2.663.985.040		2.795.203.544		2.852.843.899		3.089.548.289	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Ngoro)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	2.506.786.400	90,9	2.663.985.040	91	2.795.203.544	91,1	2.852.843.899	91,25	3.089.548.289	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		90,00%		90,10%		90,20%		90,30%		90,40%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Ngoro)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100,00%	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	45.000.000	100,00%	50.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.000		260.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Ngoro)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	100,00%	240.000.000	100,00%	260.000.000	100,00%	260.000.000	100,00%	280.000.000	100,00%	300.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.509.722.261		2.609.722.261		2.792.422.261		2.865.226.819		3.026.466.697	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Kutorejo)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	2.509.722.261	90,9	2.609.722.261	91	2.792.422.261	91,1	2.865.226.819	91,25	3.026.466.697	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	97,86%	94,22%		94,48%		94,67%		94,85%		94,90%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Kutorejo)
	Meningkatnya Kualitas	Persentase	100,	100,		100,0		100,0		100,0		100,0		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	layanan yang diselenggarakan sesuai standar	00%	00%	40.000.00 0	0%	40.000.000	0%	40.000.00 0	0%	45.000.00 0	0%	50.000.000	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				300.000.0 00		260.000.00 0		260.000.0 00		280.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Kutorejo)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100, 00%	100, 00%	300.000.0 00	100,0 0%	260.000.00 0	100,0 0%	260.000.0 00	100,0 0%	280.000.0 00	100,0 0%	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.381.416. 000		2.416.199.7 03		2.536.080. 000		2.645.580. 000		2.821.525.74 5	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Dlanggu)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	2.381.416. 000	90,9	2.416.199.7 03	91	2.536.080. 000	91,1	2.645.580. 000	91,25	2.821.525.74 5	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,3 6%	90,3 6%		90,50 %		90,65 %		90,80 %		91,00 %		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang

[illegible]

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
02	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Gondang)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100, 00%	100, 00%	40.000.00 0	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.00 0	100,0 0%	45.000.00 0	100,0 0%	50.000.000	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.0 00		260.000.00 0		260.000.0 00		280.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Gondang)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	240.000.0 00	100%	260.000.00 0	100%	260.000.0 00	100%	280.000.0 00	100%	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.882.699. 705		2.982.699.7 05		3.082.699. 705		3.189.075. 745		3.208.075.74 5	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Jatirejo)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	908 0,00 %	2.882.699. 705	90,9	2.982.699.7 05	91	3.082.699. 705	91,1	3.189.075. 745	91,25	3.208.075.74 5	
		Persentase	90,3	95%		95%		95%		95%		95%		

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
		Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	6%											
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Jatirejo)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	80,0 0%	81,0 0%	40.000.00 0	82,00 %	40.000.000	83,00 %	40.000.00 0	84,00 %	45.000.00 0	85,00 %	50.000.000	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.0 00		260.000.00 0		260.000.0 00		280.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Jatirejo)
	Terwujudnya sinergitas antara pemerintahan desa dan pemerintahan daerah	Persentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	60,0 0%	60,0 0%	240.000.0 00	60,00 %	260.000.00 0	60,00 %	260.000.0 00	62,00 %	280.000.0 00	64,00 %	300.000.000	
7.01. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.444.834. 302		2.543.234.3 02		2.615.234. 302		2.715.136. 991		2.822.449.30 4	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Trawas)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	2.444.834. 302	90,9	2.543.234.3 02	91	2.615.234. 302	91,1	2.715.136. 991	91,25	2.822.449.30 4	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	Perencanaan dan Keuangan													
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,81%	93%		93,10%		93,15%		93,20%		93,25%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Trawas)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	80,00%	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	45.000.000	100,00%	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.000		260.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Trawas)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti	100%	100,00%	240.000.000	100,00%	260.000.000	100,00%	260.000.000	100,00%	280.000.000	100,00%	300.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.782.699.705		2.882.699.705		2.982.699.705		3.189.075.745		3.208.075.745	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
														(Pacet)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	2.782.699.705	90,9	2.882.699.705	91	2.982.699.705	91,1	3.189.075.745	91,25	3.208.075.745	
		Persentase Realisasi Anggaran PD	95%	95%		95%		95%		95%		95%		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Pacet)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	80%	81%	40.000.000	82%	40.000.000	83%	40.000.000	84%	45.000.000	85%	50.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.000		260.000.000		260.000.000		280.000.000		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Pacet)
	Terwujudnya sinergitas antara pemerintahan desa dan pemerintahan daerah	Persentase Hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	60%	60%	240.000.000	60%	260.000.000	60%	260.000.000	62%	280.000.000	64%	300.000.000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				2.755.195.		2.816.500.0		2.955.200.		3.194.800.		3.239.400.00	Perangkat daerah

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcome	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				350		00		000		000		0	pelaksana urusan bidang Kecamatan (Mojoanyar)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,7 1	90,8	2.755.195. 350	90,9	2.816.500.0 00	91	2.955.200. 000	91,1	3.194.800. 000	91,25	3.239.400.00 0	
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,3 6%	90,3 6%		90,50 %		90,65 %		90,80 %		91,00 %		
7.01. 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.00 0		40.000.000		40.000.00 0		45.000.00 0		50.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Mojoanyar)
	Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100, 00%	100, 00%	40.000.00 0	100,0 0%	40.000.000	100,0 0%	40.000.00 0	100,0 0%	45.000.00 0	100,0 0%	50.000.000	
7.01. 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				240.000.0 00		260.000.00 0		260.000.0 00		280.000.0 00		300.000.000	Perangkat daerah pelaksana urusan bidang Kecamatan (Mojoanyar)
	Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa	Persentase hasil koordinasi yang di	100 %	100 %	240.000.0	100%	260.000.00	100%	260.000.0	100%	280.000.0	100%	300.000.000	

Kode	Bidang Urusan/Program/Outcom e	Indikator Outcome	Base line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17
	dan Pemerintah Daerah	tindaklanjuti			00		0		00		00			
TOTAL					3.069.365. 339.477	-	3.074.323.9 41.150	-	3.122.111. 662.958	-	3.189.681. 941.174	-	3.213.449.84 6.459	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini berisi penetapan indikator kinerja daerah dan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, ukuran keberhasilan tersebut berupa indikator-indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam periode perencanaan lima tahunan ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja prioritas daerah, mencakup bidang pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. IKU tersebut di dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

No	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun						Ket
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	85,58	86,36	86,50	86,65	86,78	86,92	87,06	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,69	77,45-77,80	77,52-78,12	77,78-78,68	78,05-79,25	78,32-80,52	78,68-81-24	
3	Indeks Kesalehan Sosial	81,77	82,47	83,17	83,87	84,57	85,27	85,97	
4	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,34	4,32-5,30	4,38-5,32	4,51-5,83	4,61-5,45	4,68-5,46	4,76-5,42	
5	Persentase Penduduk Miskin	9,37	7,57-8,9	7,53-8,62	7,39-8,24	7,22-7,95	5,02-7,48	4,73-6,53	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,87	4,15-3,60	4,14-3,42	4,13-3,23	4,05-3,09	4,00-3,01	3,95-2,96	
7	Gini Rasio	0,34	0,322-0,362	0,317-0,357	0,312-0,352	0,307-0,347	0,302-0,342	0,297-0,337	
8	Indeks Infrastruktur	12,418	13,304	13,374	13,444	13,514	13,584	13,600	
9	IKLH	64,43	68,82	68,90	68,98	69,05	69,13	69,21	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 disusun untuk memastikan arah pembangunan berjalan terukur, tepat sasaran, dan akuntabel. IKD menjadi instrumen utama dalam mengukur kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan daerah. IKD dalam RPJMD ini dikelompokkan dalam empat aspek utama, yakni: Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Pelayanan Umum. Selain itu Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan daerah, IKK berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan. Berikut ini disajikan dalam tabel target IKD dan IKK sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,41	89,40	90,39	91,38	92,37	93,36	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalance of Undernourishment</i>)	%	5,12	4,91	4,71	4,50	4,30	4,09	
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	99	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak	%	88,23	87,67	87,11	86,56	86,00	85,44	
5	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	34,01	35,31	36,62	37,92	39,22	40,53	
6	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh	%	44,47	44,67	44,87	45,07	45,27	45,47	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	pengumpulan sampah (% RT)								
7	Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	215.896,07	220.213,99	224.618,27	229.110,63	233.692,85	238.366,70	
8	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	%	7,53	8,46	9,40	10,33	11,27	12,20	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	23,31	27,96	32,61	37,25	41,9	45	
10	Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Indeks	71,490	72,130	73,100	73,770	74,770	75,800	
11	Persentase Infrastruktur kondisi baik	%	67,870	68,520	69,010	69,510	70,160	70,660	
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	104,73-102,18	102,18-99,74	99,74-97,43	97,43-95,22	95,22-93,10	93,10-90,30	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PDRB Per Kapita	Rp Juta	98,85 - 101,84	99,51 - 108,11	100,86 - 114,39	101,20 - 120,67	102,55 - 126,95	103,90 - 133,23	
2	Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup	Tahun	75,07	75,33	75,58	75,84	76,10	76,35	
3	Prevalensi Stunting	%	11,75	11,33	10,91	10,49	9,04	8,66	
4	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,65	9,78	9,97	10,09	10,17	
5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,00	13,02	13,09	13,18	13,24	13,28	
6	Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD	Angka	74,06	76,56	79,06	81,56	84,06	86,56	
7	Skor Kemampuan Literasi SMP	Angka	80,64	81,74	82,84	83,94	85,04	86,14	
8	Skor Kemampuan Numerasi SD	Angka	67,73	70,63	73,53	76,43	79,33	82,23	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
9	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Angka	69,74	71,24	72,74	74,24	75,74	77,24	
10	Angka Partisipasi Sekolah (5–6) PAUD	Angka	92,38	94,8	97,23	99,65	100	100	
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–15 SD/SMP	Angka	99,74	99,82	99,89	99,96	100	100	
12	APS 7–18 Kesetaraan Kesetaraan	Angka	27,08	31,18	35,27	39,37	43,47	47,57	
13	Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD	Angka	83,47	83,88	84,3	84,71	85,12	85,53	
14	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	Angka	83,03	83,53	84,03	84,53	85,03	85,53	
15	Iklim Inklusivitas SD	Angka	70,14	72,64	75,14	77,64	80,14	82,64	
16	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	66,36	68,76	71,16	73,56	75,96	78,36	
17	Iklim Keamanan SD	Angka	83,93	84,83	85,73	86,63	87,53	88,43	
18	Iklim Keamanan SMP	Angka	78,19	79,69	81,19	82,69	84,19	85,69	
19	Iklim Kebinekaan SD	Angka	80,16	81,16	82,16	83,16	84,16	85,16	
20	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	75,68	76,68	77,68	78,68	79,68	80,68	
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	64	65	66	67	68	69	
22	Indeks Masyarakat Digital	Angka	48,00	49,85	51,70	53,55	55,40	57,25	
23	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,24	42,18	45,36	47,30	50,48	52,76	
24	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	75.12	75.96	76.80	77.64	78.48	79.32	
25	Indeks Perlindungan Anak	Angka	66,55	67	67,45	67,9	68,35	68,8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
26	iBangga	Angka	65,11	65,12	65,13	65,14	65,15	65,16	
27	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,337	0,319	0,309	0,300	0,291	0,282	
28	Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,94	92,04	92,14	92,24	92,34	92,44	
29	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	80,37 – 90,77	78,37 – 89,77	76,37 – 88,77	74,37 – 87,77	72,37 – 86,77	70,37 – 85,77	
30	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,37	10,48	10,62	10,77	11,13	12,32	
31	Indeks Zakat Nasional	%	46	50	54	58	62	66	
32	% Keluarga Miskin dan Rentan yang Mandiri	%	0,47	0,57	0,67	0,77	0,88	0,99	
33	Persentase Wilayah Kantong Kemiskinan	%	37%	49%	61%	73%	85%	100%	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	57,32	57,96	57,97	57,98	58,00	58,01	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,93 - 2,31	1,95 - 2,35	1,96 - 2,39	1,97 - 2,41	1,98 - 2,44	2,00 - 2,46	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	3,57	3,57	3,57	3,58	3,58	3,58	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74,82	75,87	76,93	77,98	79,03	80,08	
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	64,46	69,25	74,03	78,82	83,60	88,39	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	25,13-26,70	25,20-26,81	25,26-26,82	25,30-26,83	25,33-26,85	25,35-26,86	
7	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.	16.133,68	16.804,19	18.697,22	19.367,73	21.260,76	21.931,26	
8	Indeks Infrastruktur / Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	13,304	13,374	13,444	13,514	13,584	13,6	
9	Persentase Desa Mandiri	%	58,53	59,53	60,54	61,54	62,88	63,81	Pada Tahun 2025 dihitung berdasarkan Indeks Desa
10	Tingkat Inflasi	%	2,92	2,90	2,88	2,86	2,84	2,82	
11	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	0,09 - 2,90	0,15 - 2,55	0,18 - 2,74	0,21 - 2,89	0,25 - 3,01	0,27 - 3,16	
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	61,38	61,88	62,38	62,88	63,39	63,89	
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	82,9	84,04	85,8	87,57	89,18	90,94	
14	ICOR	Indeks	4,53	4,97	4,97	4,96	4,96	4,95	
15	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,91	3,94	3,97	4,00	4,03	4,05	
16	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	5	5	5,04	5,05	5,05	5,05	
17	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	%	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	
18	Indeks Daya Beli	Indeks	0,82	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
19	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	Rupiah	69.693.602,00	74.646.688,00	75.600.500,00	76.423.223,00	77.024.056,00	77.940.423,00	
20	Rasio/Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	43.07	43.94	44.16	44.38	44.82	45.27	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	57,3	57,4	57,5	57,6	57,7	57,8	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ^(a)	Angka	4,21	1,81 - 2,1	1,91 - 2,24	2,01 - 2,39	2,11 - 2,53	2,21 - 2,68	Pada tahun 2026 perhitungan menggunakan Indeks Pemerintahan Digital
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
4	Persentase Penegakan Perda	%	90	91	92	93	94	95	
5	Persentase Capaian Aksi HAM	%	94,2	94,3	94,4	94,5	94,6	94,7	
6	Indeks Demokrasi Indonesia	%	81,71	84,45	87,18	89,91	92,65	95,38	
7	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,68	3,86	4,04	4,22	4,40	4,58	
8	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,80	83,00	83,30	83,60	84,00	84,50	
9	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	
10	Nilai SAKIP	Nilai	79,05	80,35	81,35	82,15	83,2	83,8	
11	Nilai MCSP KPK	Nilai	97,50	97,60	97,70	97,80	97,90	98,00	
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	79,31	79,50	79,55	79,60	79,75	79,90	
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	PENDIDIKAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	92,38%	94,8%	97,23%	99,65%	100%	100%	
	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99,74%	99,82%	99,89%	99,96%	100%	100%	
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	27,08%	31,18%	35,27%	39,37%	43,47%	47,57%	
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		74,06	76,56	79,06	81,56	84,06	86,56	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		64,83	7,63	73,53	76,43	79,33	82,23	
	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		79,54	81,74	82,84	83,94	85,04	86,14	
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		68,24	71,24	72,74	74,24	75,74	77,24	
	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		83,47%	83,88%	84,3%	84,71%	85,12%	85,53%	
	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV		83,03%	83,53%	84,03%	84,03%	85,03%	85,53%	
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD		83,93	84,83	85,73	86,63	87,53	88,43	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP		78,19	79,69	81,19	82,69	84,19	85,69	
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD		80,16	81,16	82,16	83,16	84,16	85,16	
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP		75,68	76,68	77,68	78,68	79,68	80,68	
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD		70,14	72,64	82,16	75,14	80,14	82,64	
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP		66,36	68,76	77,68	71,16	75,96	78,36	
2	KESEHATAN								
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		0.117	0.118	0.119	0.12	0.121	0.122	
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase orang dengan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	RISIKO terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar								
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota		95,50%	97,00%	97,50%	98,00%	99,50%	100,00%	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		84,00%	85,00%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang		52,00%	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	57,00%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	memiliki sertifikat kompetensi								
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	PERUMAHAN RAKYAT								
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani		25%	28%	31%	34%	37%	40%	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		4.53%	4.52%	4.51%	4.50%	4.49%	4.48%	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		60%	62%	64%	66%	68%	70%	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Perda dan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	Perkada yang ditegakkan								
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		18,35%	18,44%	18,52%	18,61%	18,70%	18,78%	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		65%	65%	65%	65%	65%	65%	
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		16,25	16,15	16,05	15,95	15,85	15,75	
6	SOSIAL								
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota								
7	TENAGA KERJA								
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		12%	13%	14%	15%	16%	17%	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		88%	89%	90%	91%	92%	92%	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Persentase ARG pada		11,80	11,85%	11,90%	11,95%	1200%	12,05%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	belanja langsung APBD								
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		2.0899	2.0899	2.0899	2.0899	2.0899	2.0899	
9	PANGAN								
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		85%	86%	87%	88%	89%	90%	
10	LINGKUNGAN HIDUP								
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota		48.50%	48.60%	48.70%	48.80%	48.90%	49.00%	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		42.00%	41.82%	41.82%	41.82%	41.76%	41.71%	
11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL								
	Perekaman KTP Elektronik		90,5	90,8	91	91,15	91,35	91,36%	
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari		99,75%	99,77%	99,78%	99,79%	99,80%	99,81	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	yang memiliki KIA								
	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran		62,00%	64,00%	66,00%	68,00%	70,00%	72%	
	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		99,50%	99,56%	99,62%	99,68%	99,74%	99,76%	
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	TFR (Angka Kelahiran Total)		1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)		80,07%	80,08%	80,09%	80,10%	80,11%	80,12%	
	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)		6,99%	6,9%	6,85%	6,8%	6,75%	6,7%	
14	PERHUBUNGAN								
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota		75	75,2	75,4	75,6	75,8	76	
	V/C <i>Ratio</i> di Jalan Kabupaten/Kota		0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	0.49	
15	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		25%	26%	28%	29%	31%	32%	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		45.000%	46.000%	47.000%	48.000%	49.000%	50.000%	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha		5%	6%	7%	8%	9%	10%	
17	PENANAMAN MODAL								
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota		0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi		1.70%	1.73%	1.75%	1.80%	1.82%	1.85%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	mandiri								
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		50%	52%	55%	57%	60%	62%	
	Peningkatan prestasi olahraga		92 Medali/ Penghargaan	100 Medali/ Penghargaan	110 Medali/ Penghargaan	115 Medali/ Penghargaan	125 Medali /Penghargaan	130 Medali /Penghargaan	
19	STATISTIK								
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20	PERSANDIAN								
	Tingkat keamanan informasi pemerintah		92%	93%	94%	95%	96%	97%	
21	KEBUDAYAAN								
	Terlestarikannya Cagar Budaya		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	
22	PERPUSTAKAAN								
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		67,1	67,2	67,3	67,4	67,5	67,6	
	Indeks Pembangunan		72,25	72,35	72,45	72,55	72,65	72,75	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	Literasi Masyarakat								
23	KEARSIPAN								
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		322.16	322.17	322.20	322.21	322.22	322.24	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		688,5	690,2	691,8	693,5	695,2	698,5	
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)		100%	100 %	100%	100%	100%	100%	
25	PARIWISATA								
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per	%	9.50%	9.80%	10.00%	10.35%	10.50%	11.00%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	kebangsaan								
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	7.50%	8.00%	8.25%	8.50%	8.75%	9.00%	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	42.50%	43.00%	43.25%	43.50%	44.00%	44.35%	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2.04%	2.05%	2.06%	2.07%	2.08%	2.10%	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3.80%	3.85%	3.90%	3.95%	3.98%	4.00%	
26	PERTANIAN								
	Produktivitas pertanian per ha per tahun	Kw/ha	73.2479 kw/ha	73.8030 kw/ha	74.358 kw/ha	74.9137 kw/ha	75.4734 kw/ha	75.5069 kw/ha	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	
27	PERDAGANGAN								
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	75.00%	76.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	
	Persentase alat-alat ukur,	%	96,98%	97%	97,02%	97,04%	97,06%	97,08%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku								
28	PERINDUSTRIAN								
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	2,5%	2,6%	2,7%	2,8%	2,9%	3%	
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	56%	57%	58%	59%	60%	61%	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait								
29	PERENCANAAN KEUANGAN								
	Rasio PAD		29,92%	29,30%	30.00%	31.00%	32.00%	33.00%	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,26	3,28	3,3	3,32	3,34	3,36	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3,10	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		60%	60%	60%	60%	60%	60%	
30	PENGADAAN								
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	37,56	37,57	37,58	37,59	37,60	37,61	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	55,03%	56%	56,50%	57%	57,50%	58%	
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	

[illegible]

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
			indikator Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan keuangan? Ya	indikator Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan keuangan? Ya	indikator Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan keuangan? Ya	indikator Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan keuangan? Ya	indikator Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan keuangan? Ya	Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan keuangan? Ya	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	
33	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
	pelayanan								
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Pada saat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto tahun 2030 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa RPJMD sesuai peraturan perundangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
3. Kepala Daerah berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah ditetapkan kepada masyarakat, melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
4. Kepala Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda.
5. Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah agar menjabarkan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
6. Pemerintah Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan baik RKPD maupun Renja PD harus berpedoman pada RPJMD

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mojokerto merupakan instrumen penting dalam menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mekanisme pengendalian dilakukan secara berkala melalui pemantauan atas capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, serta penggunaan

anggaran. Hasil pengendalian akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan korektif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD. Evaluasi RPJMD dilaksanakan setiap tahun dan secara menyeluruh pada pertengahan periode (*midterm review*) dan akhir periode RPJMD. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memberikan masukan strategis bagi perbaikan perencanaan pembangunan di periode berikutnya. Evaluasi juga dilakukan berdasarkan urusan pemerintahan daerah, guna memastikan bahwa masing-masing urusan baik wajib maupun pilihan dilaksanakan secara optimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dengan tersusunnya RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mojokerto dapat bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan, memerlukan sikap mental bekerja keras, integritas, dan disiplin aparatur pemerintah, unsur masyarakat serta *stakeholders* terkait.